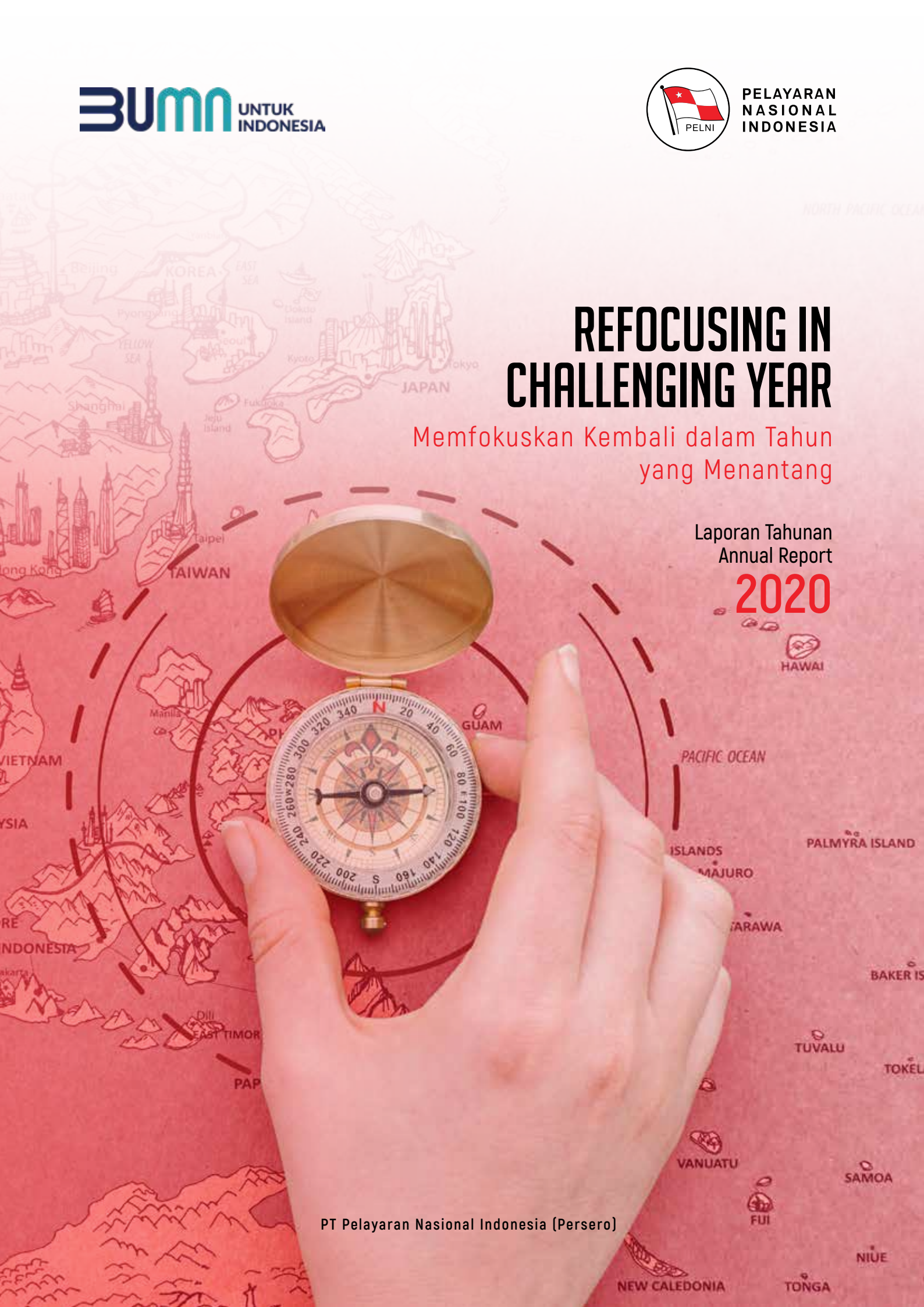
BUMN UNTUK INDONESIA

PELNI
PELAYARAN NASIONAL INDONESIA

REFOCUSING IN CHALLENGING YEAR

Memfokuskan Kembali dalam Tahun yang Menantang

Laporan Tahunan
Annual Report
2020



PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)


MONGOLIA
Beijing
KOREA
EAST SEA
Dokdo Island
Pyongyang
Seoul
YELLOW SEA
Kyoto
Tokyo
JAPAN
Tibet Plat.
CHINA
Shanghai
Fukuoka
Jeju Island
NEPAL
Kathmandu
BHUTAN
Taipei
TAIWAN
Hong Kong
BANGLADESH
MYANMAR
Dhaka
Vientiane
THAILAND
LAOS
Naypyidaw
Manila
GUAM
CAMBODIA
VIETNAM
MALAYSIA
SRI LANKA
SINGAPORE
INDONESIA
Jakarta
Dili
EAST TIMOR

REFOCUSING IN CHALLENGING YEAR

Memfokuskan Kembali dalam Tahun yang Menantang

PT PELNI (Persero) adalah perusahaan yang mengemban tugas sebagai Badan Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Laut di Indonesia. Perseroan fokus pada visi untuk menjadi perusahaan pelayaran dan logistik matirim terkemuka di Asia Tenggara dan berhasil mencatatkan kinerja yang baik pada tahun 2020.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020, mendorong Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada beberapa bagian operasional maupun non-operasional untuk dapat melewati tantangan yang terjadi. Sehingga "memfokuskan kembali" sangat mendesak untuk dilakukan agar Perseroan tidak hanya dapat melewati tahun yang penuh tantangan ini (jangka pedek) tetapi juga tantangan masa depan (jangka panjang) serta inovasi-inovasi perlu lebih cepat lagi dilakukan agar pertumbuhan dapat dicapai.

PT PELNI (Persero) is a company that in charge as an Agency of Public Service Obligation and Sea Freight Transports in Indonesia. The Company focus on its vision to become the leading maritime shipping and logistic company in Southeast Asia and managed to record a good performance in 2020.

Pandemic Covid-19 throughout 2020 pushed the Company to make certain adjustment on operational and non-operational area so that the challenges can be managed. Therefore "refocusing" is an urgent task to be done so that the Company is not only can get through this challenging moment (short term) but also future challenges (long term), as well as faster innovations to achieve the growth target.

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

2017



TRANSFORM, INNOVATE AND GROW FOR SUSTAINABLE GROWTH

Bertransformasi, Berinovasi dan Bertumbuh untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

2018



STRENGTHENING POSITION THROUGH SINERGY & DIGITALIZATION

Memperkuat Posisi Melalui Sinergi & Digitalisasi

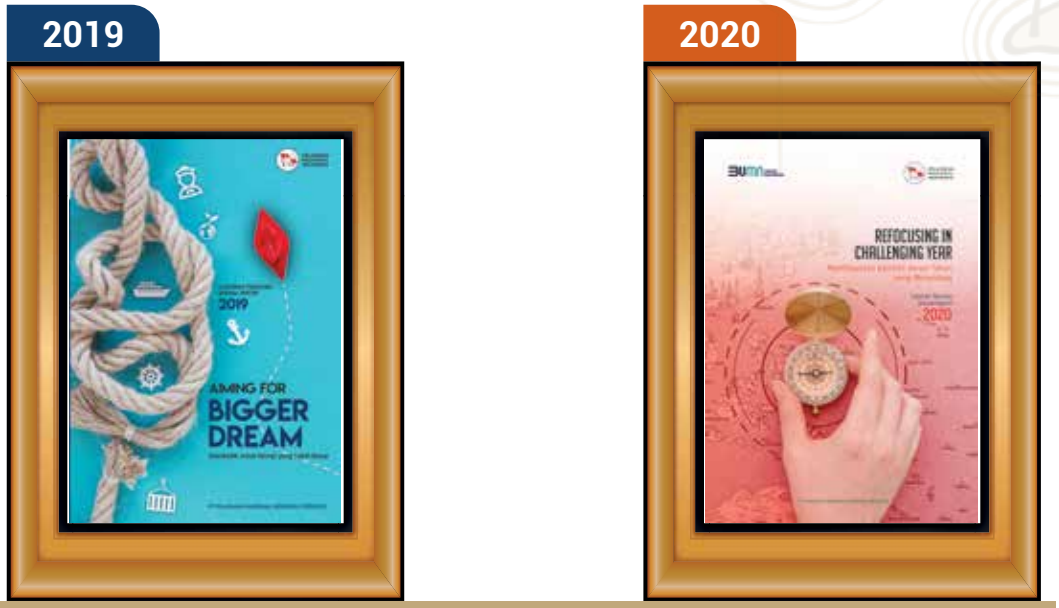
Sanggahan dan Batas Tanggung Jawab

Laporan Tahunan ini berisikan pernyataan-pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pengertian perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut bersifat prospektif yang memiliki risiko dan ketidakpastian serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang tertulis dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang dari Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa segala tindakan yang telah diambil untuk memastikan keabsahan dokumen ini akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan ini juga memuat kata "Perusahaan", "Perseroan", Pelni atau "PT PELNI (Persero)" yang didefinisikan sebagai PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY



AIMING FOR BIGGER DREAM
Membidik untuk Mimpi yang Lebih Besar

REFOCUSING IN CHALLENGING YEAR
Memfokuskan Kembali dalam Tahun yang Menantang

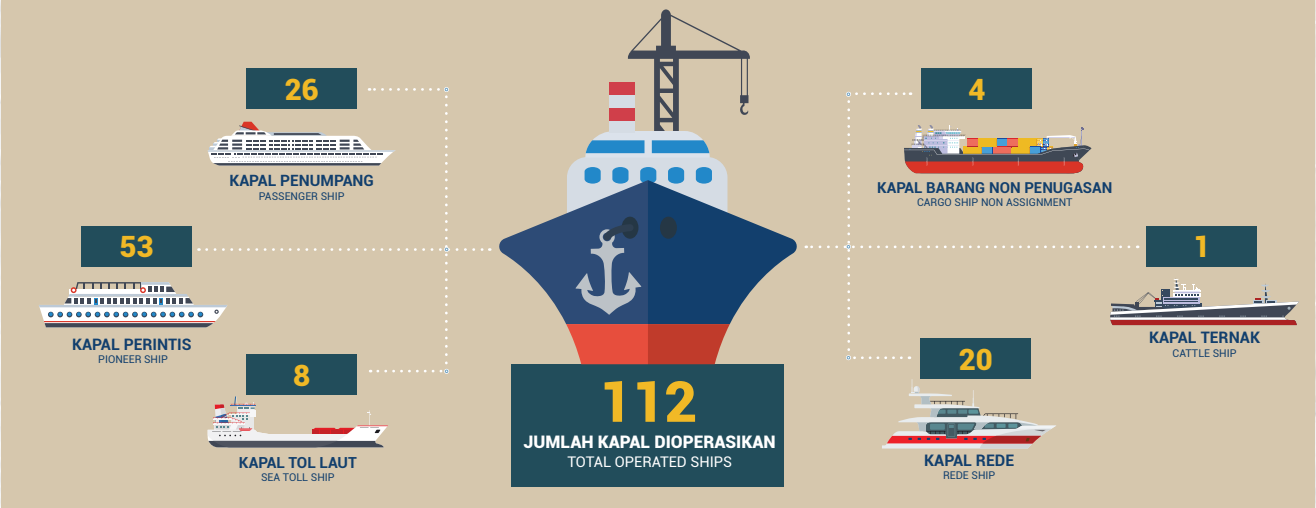
Disclaimer

This annual report contains financial condition, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as the Company's objectives, which is classified as forward-looking statements in the implementation of the prevailing laws, excluding historical matters.

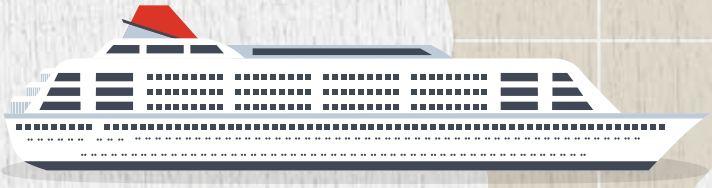
Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that the entire valid document presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the words “Company”, “The Company”, Pelni or “PT PELNI (Persero)”, here in after referred to as PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

IKHTISAR 2020
HIGHLIGHTS 2020



KAPAL PENUMPANG | Passenger Ship



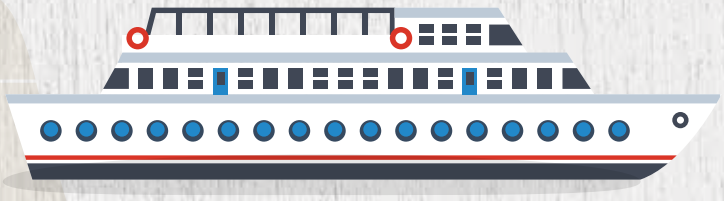
PENUMPANG
Passenger
1.616.854
Penumpang | Passenger

BARANG | Cargo
29.956 ton/m³

KONTAINER | Container
9.962 TEUs

KENDARAAN | Vehicle
10.199 Unit

KAPAL PERINTIS | Pioneer Ship



PENUMPANG | Passenger
383.041
Penumpang | Passenger

BARANG | Cargo
46.851 ton/m³

KAPAL TERNAK | Cattle Ship

TERNAK
Cattle
6.608
ekor | cattle



KAPAL BARANG | Cargo Ship

KONTAINER
Container
10.671
TEUs



TESTIMONI 2020
TESTIMONIALS 2020

"KINERJA SUDAH SANGAT BAIK TETAP DIPERTAHANKAN KUALITAS KERJA YANG SUDAH ADA"
"Excellent performance and keep maintaining the quality of existing work"

- PT SARANA GAMA SEJAHTERA -

"SUPAYA KEDEPANNYA LEBIH MAJU DAN SUKSES"
"To be more advanced and successful in the future"

- PT SAFITRI REJEKI -

"SUDAH CUKUP BAIK DAN PROFESIONAL. KOORDINASI YANG DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN GCG"
"It's been pretty good and professional. Coordination is in accordance with the regulations and GCG"

- PPM MANAJEMEN -

"SANGAT PROFESIONAL"
"Very Professional"

- PT KARIMUN MARINE SHIPYARD -

"SUDAH BAIK"
"It is Good"

- PT SQIVA SISTEM -

"KINERJA TIM DIVISI PENGADAAN SUDAH BAIK SEKALI"
"Procurement Division Team performance has been very good"

- PT YAPANINDO KONSULTAN -



DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

03 **Cover Story**
Cover Story

04 **Kesinambungan Tema**
Theme Continuity

06 **Ikhtisar 2020**
Highlights 2020

07 **Testimoni 2020**
Testimonials 2020

08 **Daftar Isi**
Table of Contents









10 IKHTISAR UTAMA
MAIN HIGHLIGHTS

12 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

16 Peristiwa Penting 2020
Significant Events 2020

26 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

36 LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

38 Laporan Dewan Komisaris
The Board of Commissioners' Report

48 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profile

54 Laporan Direksi
The Board of Directors' Report

74 Profil Direksi
Board of Directors' Profile

82 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

84 Identitas Perusahaan
Corporate Identity

86 Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company's History

88 Penjelasan Logo Perseroan
Company's Logo Explanation

90 Jejak Langkah Perusahaan
Company's Milestones

92 Bidang Usaha
Line of Business

96 Produk dan Jasa
Products and Services

102 Visi & Misi Perusahaan
Company's Vision & Mission

104 Nilai-Nilai Utama dan Perilaku
Core Values and Behavior

108 Struktur Organisasi
Organization Structure

112 Sumber Daya Manusia
Human Capital

151 Teknologi Informasi
Information Technology

178 Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Governance

183 Pejabat Eksekutif per 31 Desember 2020
Executives Officer as of 31 December 2020

186 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

186 Kronologi Pencatatan Saham
Shares Listing Chronology

186 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

187 Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure

188 Entitas Anak & Asosiasi
Subsidiary & Association

191 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Stock Market Supporting Institution and Professions

192 Peta Wilayah Operasi Jaringan Trayek Kapal Penumpang
Passenger Ship Route Network Operational Area

194 Jaringan Trayek Tol Laut Tahun 2020
Tol Laut Route 2020

196 Jaringan Trayek Nasional Kapal Perintis Tahun 2020
Domestic Pioneer Ship Route 2020

198 Rute Kapal Ternak 2020
Cattle Ship Route 2020

200 Nama dan Alamat Anak Perusahaan, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan
Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office

202 Informasi pada Website Perusahaan
Information on Company's Website

204 ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

206 Tinjauan Makro Ekonomi
Macro Economic Overview

208 Tinjauan Industri Pelayaran
Shipping Industry Review

210 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operation Overview Per Business Segment

219 Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan
Company's Financial Performance Overview

220 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Report of Consolidated Financial Position

226 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Report of Consolidated Profit and Loss and Comprehensive Income

231 Laporan Arus Kas Konsolidasian
Report of Consolidated Cash Flows

234 Rasio Keuangan
Financial Ratio

236 Kemampuan Membayar Hutang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan
Company's Ability to Pay Debt and Collectibility Rate on Receivable

238 Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure and Capital Structure Policy

240 Investasi Barang Modal
Capital Invesment

241 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitment for Capital Investment

242 Perbandingan antara Target, Realisasi Tahun 2020 dan Proyeksi 2021
Comparation Between Target, Realization in 2020 and Projection for 2021

245 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Afiliasi, Dan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Tahun 2020
Material Information Concerning Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, Debt/Capital Restructuring, Transactions with Related Parties And Transactions with Conflict of Interest that Occurred in 2020

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

246 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan
Information and Facts Material Happened after the Date of Accountant Report
249 Deviden
Dividend
249 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan/Manajemen (ESOP/MSOP)
Employee/Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)
249 Informasi Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Transaction Information Containing Conflict of Interest and Transactions with Affiliation Parties
250 Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Amendment of Regulatory Regulations and Its Impact on Company
250 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization on Public Offering Funds that Has Been Used
251 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan
Amendment of Accounting Policies and Its Impact on Company Financial Statements
254 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information
257 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
258 Prospek Usaha dan Strategi
Business Prospect and Strategies





262 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

264 Pendahuluan
Introduction
287 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders
320 Informasi Pemegang Saham
Shareholders Information
321 Dewan Komisaris
The Board of Commissioners
344 Direksi
The Board of Directors
351 Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
Affiliate Relationship Between BOD, BOC and Shareholders
352 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
The Board of Commissioners and Directors Shares Ownership
353 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi
Concurrent Position of The Board of Commissioners and Directors
354 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Composition Diversity of the Board of Commissioners and Directors
356 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat
Meeting Frequency and Attendance Level
368 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Assessment of BOC and BOD
381 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors
388 Komite Audit
Audit Committee
400 Komite Pemantau Manajemen Risiko
Risk Management Monitoring Committee
408 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
416 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
419 Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Audit Unit
429 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
431 Auditor Eksternal
External Auditor
432 Manajemen Risiko
Risk Management
441 Etika Bisnis
Business Ethics
446 Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Perusahaan
Important Cases Faced by the Company
450 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Corporate Data and Information
Sistem Pelaporan Pelanggaran
452 Whistleblowing System
Pengendalian Gratifikasi
458 Gratification Prevention

462 TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

464 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Governance
469 Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia
Corporate Social Responsibility Related to Human Rights
471 Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil
Corporate Social Responsibility Related to Fair Operation
474 Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkunan Hidup
Corporate Social Responsibility Related to Living Environment
478 Tanggung Jawab Sosial Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan Kerja, dan Keselamatan (K3)
Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety (OHS)
486 Tanggung Jawab Sosial kepada Pelanggan
Corporate Social Responsibility to Costumers
488 Tanggung Jawab Sosial Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

494 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT PELNI (Persero)
Statement of Board of Commissioner and Board of Director Members on Accountability for the Annual Reports 2020 of PT PELNI (Persero)

498 Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan tahunan Perusahaan Publik
SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

516 Kriteria Annual Report 2018
2018 Annual Report Award Criteria

536 Laporan Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Report

01





IKHTISAR UTAMA
MAIN HIGHLIGHTS

IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS

Uraian Description	2020	2019	2018	2017	2016	Satuan Unit
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	4.166.626	5.544.230	4.593.313	4.394.845	4.244.615	Rp juta Rp million
Beban Pokok Usaha Operating Expenses	(3.747.497)	(4.776.617)	(4.111.796)	(3.652.044)	(3.445.001)	Rp juta Rp million
Laba Kotor Gross Profit	419.219	767.613	481.517	742.801	799.614	Rp juta Rp million
Laba Usaha Operating Profit	(14.331)	178.291	(26.455)	262.280	260.413	Rp juta Rp million
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit for the Current Year Attributable to:	30.967	180.755	123.557	276.881	248.547	Rp juta Rp million
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	30.737	180.134	123.014	276.419	248.177	Rp juta Rp million
Pemilik Non Pengendali Non-Controlling Interest	229	620	543	370	370	Rp juta Rp million
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(17.990)	32.883	(14.757)	(37.429)	(33.627)	Rp juta Rp million
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income in the Current year	12.976	213.638	108.799	239.452	214.920	Rp juta Rp million
Laba Bersih Per Saham Dasar Basic Earnings Per Share	4.058	23.690	28.848	39.125	35.127	Rp Rp
Jumlah Aset Total Assets	7.253.039	7.061.282	6.583.657	6.432.064	6.211.091	Rp juta Rp million
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	872.444	1.035.209	771.222	728.416	747.847	Rp juta Rp million
Jumlah Ekuitas Total Equity	6.380.595	6.026.073	5.812.435	5.703.648	5.463.795	Rp juta Rp million

ARUS KAS
Cash Flows

Uraian Description	2020	2019	2018	2017	2016	Satuan Unit
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows from Operating Activities	240.307	235.834	434.153	439.262	788.812	Rp juta Rp million
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flows from Investment Activities	368.723	(327.830)	(328.621)	(323.426)	(54.065)	Rp juta Rp million
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows from Financing Activities	3.403	41.735	79.904	(13.087)	27.760	Rp juta Rp million
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent	612.433	(50.261)	185.436	102.748	762.507	Rp juta Rp million
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Beginning Balance Cash and Cash Equivalent	1.839.520	1.889.782	1.704.346	1.601.598	839.091	Rp juta Rp million
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Ending Balance Cash and Cash Equivalent	2.451.952	1.839.520	1.889.782	1.704.346	1.601.599	Rp juta Rp million

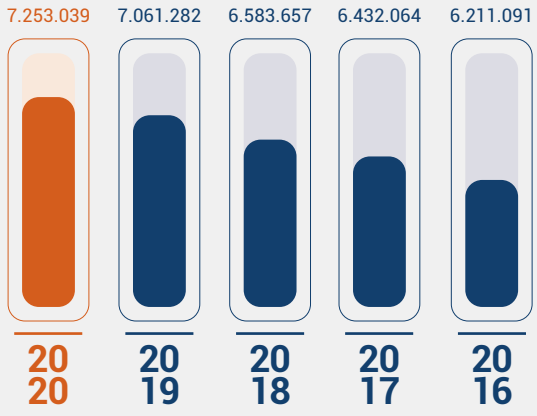
IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS

RASIO KEUANGAN
Financial Ratio

Uraian Description	2020	2019	2018	2017	2016	Satuan Unit
Rasio Likuiditas | Liquidity Ratio						
Rasio Lancar Current Ratio	583,24	418,52	527,44	525,6	430,8	%
Rasio Kas Cash Ratio	352,78	215,16	278,11	293,37	196,27	%
Rasio Cepat Quick Ratio	515,86	360,99	440,73	254,45	150,05	%
Rasio Leverage | Leverage Ratio						
Rasio Liabilitas atas Aset Liabilities to Assets Ratio	12,03	14,66	11,71	11,32	12,04	%
Rasio Liabilitas atas Ekuitas Liabilities to Equity Ratio	13,67	17,18	13,27	12,77	13,69	%
Rasio Liabilitas Jangka Panjang atas Ekuitas Long-term Liabilities to Equity Ratio	3,52	4,32	3,85	3,55	2,89	%
Rasio Aktivitas | Activity Ratio						
Rasio Perputaran Persediaan Inventory Turnover Ratio	38,23	29,35	38,38	0	0,11	Kali Times
Rasio Perputaran Aset Asset Turnover Ratio	236,44	330,50	290,48	70,94	69,81	%
Rasio Penagihan Rata-rata Average Collection Ratio	25	15	20	17	23	Hari Days
Rasio Profitabilitas | Profitability Ratio						
Imbalan terhadap Ekuitas Return to Equity	0,49	3,00	2,13	4,41	4,12	%
Imbalan terhadap Investasi Return to Investment	6,32	10,19	9,30	7,07	6,61	%
Marjin Laba Kotor atas Penjualan Gross Profit on Sales	10,06	13,85	10,67	16,9	18,84	%
Marjin Laba Bersih atas Penjualan Net Profit on Sales	0,74	3,26	2,74	6,14	5,74	%
Rasio EBITDA atas Aset EBITDA on Asset Ratio	5,76	9,07	8,53	6,61	6,61	%

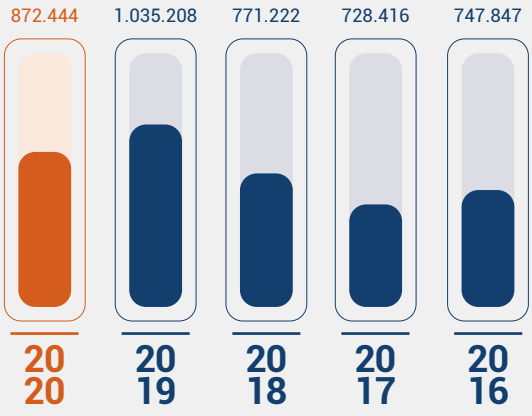
IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS

Jumlah Aset
Total Assets



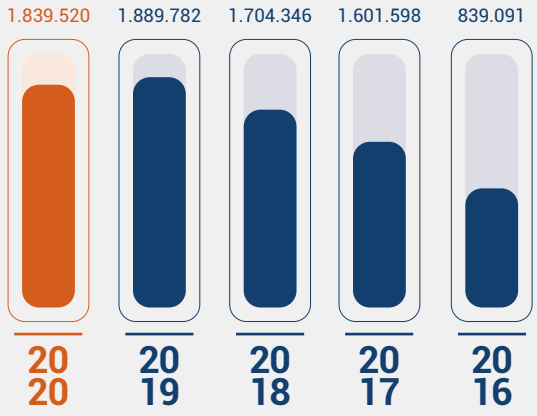
dalam Rp juta
in Rp million

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities



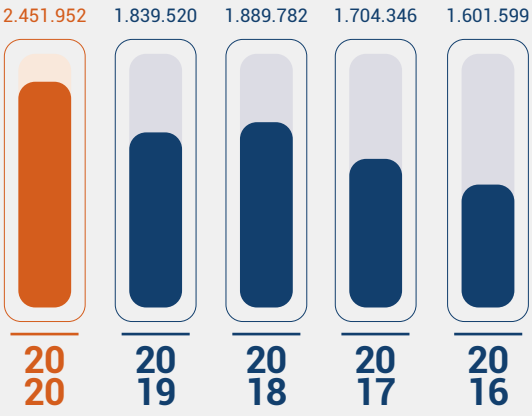
dalam Rp juta
in Rp million

Kas dan Setara Kas Awal Tahun
Beginning Balance Cash and Cash Equivalent



dalam Rp juta
in Rp million

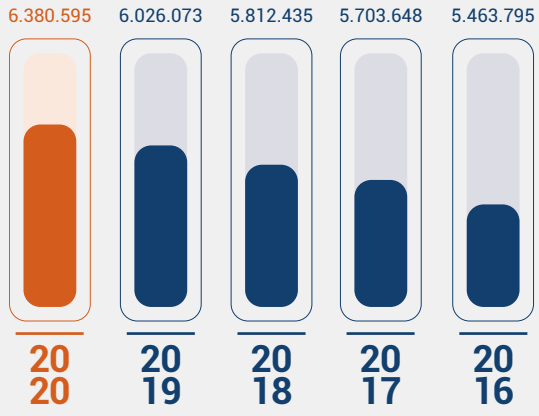
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Ending Balance Cash And Cash Equivalent



dalam Rp juta
in Rp million

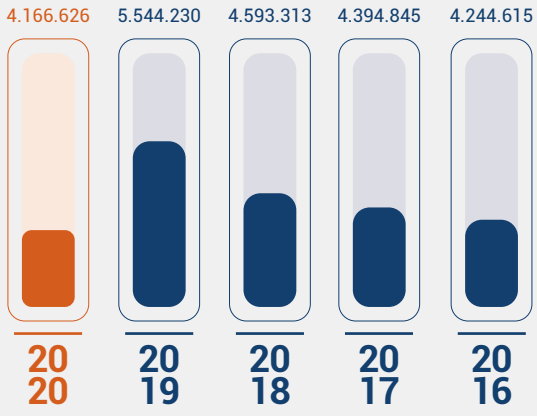
IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS

Jumlah Ekuitas
Total Equity



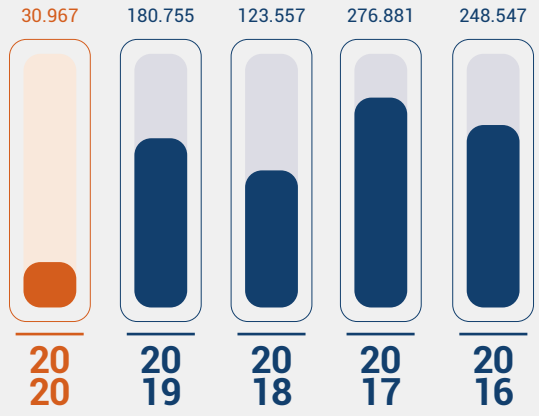
dalam Rp juta
in Rp million

Pendapatan Usaha Bersih
Net Operating Revenue



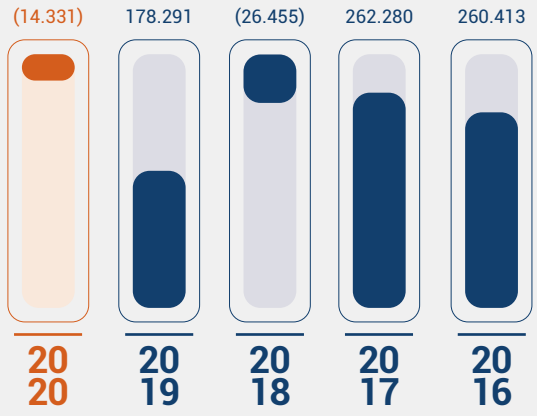
dalam Rp juta
in Rp million

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Current Year



dalam Rp juta
in Rp million

Laba (Rugi) Usaha
Operating Profit (Loss)



dalam Rp juta
in Rp million

PERISTIWA PENTING 2020
SIGNIFICANT EVENTS 2020



3 Januari 2020
January 2020

Bantuan Banjir JABODETABEK
JABODETABEK Flood Assistance

PT PELNI (Persero) turut mengambil bagian dalam Posko Bersama BUMN guna membantu penanganan banjir di wilayah Jabodetabek berupa bantuan logistik berupa makanan siap saji, air mineral, mie instan beserta alat-alat kebersihan.

PT PELNI (Persero) took part in Posko Bersama BUMN to help flood handling in Jabodetabek area in the form of logistical assistance, such as: fast food, mineral water, instant noodles and hygiene equipment.



14 Januari 2020
January 2020

Town Hall Meeting 2020
Town Hall Meeting 2020

PT PELNI (Persero) mengadakan *Town Hall Meeting* dengan Visi Baru untuk tahun 2020-2024 yaitu "*To Be A Leading Shipping And Logistics In SouthEast Asia*".

PT PELNI (Persero) conducted a Town Hall Meeting with a new Vision for the year of 2020-2024 which is "To Be A Leading Shipping and Logistics in South-East Asia".



17 Januari 2020
January 2020

Launching KM Logistik Nusantara (Lognus) 6
Launching of MV Logistics Nusantara (Lognus) 6

PT PELNI (Persero) me-*launching* kapal KM Logistik Nusantara (Lognus) 6 yang akan dioperasikan khusus untuk membawa muatan pada program tol laut, Tol Laut terus menunjukkan perannya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat hingga sampai ke pelosok Negeri, terlebih untuk daerah Tertinggal, Terpencil, Terdepan dan daerah Perbatasan (T3P).

PT PELNI (Persero) launched KM Logistik Nusantara (Lognus) 6 which will be operated specifically to carry cargo on the sea toll program, The Sea Toll continues to show its role in providing the best service for all communities to every corner of the country especially for disadvantaged, remote, leading and border areas (T3P).



21 Januari 2020
January 2020

Adendum *Holding* Rumah Sakit
Addendum of Hospital Holding

Direktur Utama PT PELNI (Persero) bapak Insan Purwarisya L. Tobing menandatangani adendum *Holding* Rumah Sakit BUMN.

The President Director of PT PELNI (Persero) Mr. Insan Purwarisya L. Tobing signed an addendum of SOE Hospital Holding.



28 Januari 2020
January 2020

RUPS PT PELNI (Persero) 2020
GMS of PT PELNI (Persero) 2020

PT PELNI (Persero) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 di kantor pusat PT PELNI (Persero), Jakarta.

PT PELNI (Persero) held Annual General Meeting of Shareholders for the year of 2020 at PT PELNI (Persero) Head Office, Jakarta.

PERISTIWA PENTING 2020
SIGNIFICANT EVENTS 2020



4 **Februari 2020**
February 2020

Penandatanganan MoU dengan Universitas Pertamina
MoU Signing with Universitas Pertamina

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, PT PELNI (Persero) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dengan Universitas Pertamina. Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilaksanakan oleh Insan Purwarisya L. Tobing selaku Direktur Utama PT PELNI (Persero) bersama dengan Prof. Akhmaloka, Ph.D selaku Rektor Universitas Pertamina.

In order to improve the quality of human resources and community welfare in term of education, research, community service and empowerment, PT PELNI (Persero) signed a joint agreement (MoU) with Universitas Pertamina. The signing of the Memorandum of Understanding was held by Insan Purwarisya L. Tobing as President Director of PT PELNI (Persero) together with Prof. Akhmaloka, Ph.D as Rector of Universitas Pertamina.



7 **Februari 2020**
February 2020

Peringkat Pertama *Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2020 (ICCA)*
First Ranked Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2020 (ICCA)

PT PELNI (Persero) meraih peringkat pertama dalam ajang penghargaan *Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2020* (ICCA) versi Majalah *Economic Review* dalam kategori *State Owned Enterprises Company* pada sektor *Transportation Maritime*, di Jakarta.

PT PELNI (Persero) got first ranked in the Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2020 (ICCA) by Economic Review Magazine in the category of State Owned Enterprises Company in the Transportation Maritime sector, in Jakarta.



12 **Februari 2020**
February 2020

Pisah Sambut Anggota Dewan Komisaris & Direksi PT PELNI (Persero)
Farewell and Welcome Ceremony of BOC and BOD of PT PELNI (Persero)

PT PELNI (Persero) mengadakan acara pisah sambut untuk melepas Ibu Tri Andayani sebagai Direktur Keuangan digantikan oleh bapak Ony Suprihartono dan Bapak Johanes Widodo Hario Mumpuni sebagai Komisaris Independen digantikan oleh Bapak Iwan Taufiq Purwanto.

PT PELNI (Persero) held a farewell and welcome ceremony to dismiss Mrs. Tri Andayani as Director of Finance replaced by Mr. Ony Suprihartono and Mr. Johanes Widodo Hario Mumpuni as Independent Commissioners replaced by Mr. Iwan Taufiq Purwanto.



21 **Februari 2020**
February 2020

Pembukaan Olimpiade HUT PT PELNI (Persero) ke 68 tahun
Sport Week's Opening Ceremony of 68th Anniversary of PT PELNI (Persero)

Pembukaan olimpiade olahraga dalam rangka perayaan Ulang Tahun PT PELNI (Persero) yang ke 68 tahun. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Direktur Utama PT PELNI (Persero) Bapak Insan Purwarisya L. Tobing di Kantor Pusat, Jakarta.

Sport week's opening ceremony was to celebrate the 68th Anniversary of PT PELNI (Persero). This event officially was inaugurated by the President Director of PT PELNI (Persero) Mr. Insan Purwarisya L. Tobing.

PERISTIWA PENTING 2020
SIGNIFICANT EVENTS 2020



24 Februari 2020
February 2020

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Bina Sejahtera
Annual Member Meeting Koperasi Bina Sejahtera

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Bina Sejahtera tahun 2020 sebagai bentuk dukungan PT PELNI (Persero) dalam program ekonomi mikro kemasyarakatan di Indonesia.

Annual Member Meeting Koperasi Bina Sejahtera 2020 was as a form of PT PELNI (Persero) contribution to support the social micro economic in Indonesia.



4 Maret 2020
March 2020

Sosialisasi Pencegahan Virus Corona di KM. Ciremai
Socialization of Coronavirus prevention on MV. Ciremai

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PELNI (Persero) Bapak Ony Suprihartono mensosialisasikan pencegahan virus corona di KM Ceremai dalam upaya memperketat pengawasan terhadap pencegahan penyebaran virus Covid-19 di atas kapal PT PELNI (Persero).

Director of Finance and Risk Management of PT PELNI (Persero) Mr. Ony Suprihartono socialized the prevention of coronavirus on MV. Ciremai in order to support strict supervision of the spread of Covid-19 on board.



5 Maret 2020
March 2020

Sosialisasi Pencegahan Virus Corona di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)
Socialization of Coronavirus prevention in PT PELNI (Persero) Head Office

PT PELNI (Persero) menggelar sosialisasi pencegahan Virus Covid-19 untuk seluruh karyawan di Kantor Pusat, Jakarta.

PT PELNI (Persero) held a socialization program to prevent the spread of Covid-19 for employees in Head Office, Jakarta.



19 Maret 2020
March 2020

Pisah Sambut Komisaris PT PELNI (Persero)
Welcome & Farewell Commissioner of PT PELNI (Persero)

PT PELNI (Persero) menerima pergantian dua anggota Dewan Komisaris. Pada acara tersebut memberhentikan dengan hormat Loto Srinaita Ginting dan Danang Parikesit dari jajaran Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan mengangkat Eddy Susanto Soepadmo serta Marwanto sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru.

PT PELNI (Persero) changed its two members of the Board of Commissioners. At the event respectfully dismissed Loto Srinaita Ginting and Danang Parikesit from the board of Commissioners of PT PELNI (Persero) and appointed Eddy Susanto Soepadmo and Marwanto as new members of the Board of Commissioners.



23 Maret 2020
March 2020

Bantuan Masker Medis dalam Rangka Pencegahan Covid-19
Medical Mask assistance for the Prevention of Covid-19

PT PELNI (Persero) memberikan bantuan masker tanggap darurat di Kelurahan Pegangsaan dalam rangka upaya pencegahan Virus Covid-19 yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia.

PT PELNI (Persero) gave medical mask assistance to Pegangsaan village to handle the spread of Covid-19 which hit most regions in Indonesia.

PERISTIWA PENTING 2020
SIGNIFICANT EVENTS 2020



4 **April 2020**
April 2020

Bantuan Penanganan Covid 19
Covid 19 Handling Assistance

Sebagai upaya mendukung penanganan Virus Covid-19, PT PELNI (Persero) menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa *hepafilter mobile* serta *mobile x-ray* diwakili oleh Komisaris PT PELNI (Persero) Bpk. Eddy Susanto Soepadmo dan Plt Direktur Utama PT Rumah Sakit PELNI Bpk. R.M. Kartobi.

In an effort to support the handling of the Covid-19, PT PELNI (Persero) handed over medical equipment assistance in the form of mobile hepafilter and mobile x-rays represented by Commissioner of PT PELNI (Persero) Mr. Eddy Susanto Soepadmo and Acting President Director of PT Rumah Sakit PELNI Mr. R.M. Kartobi.



5 **April 2020**
April 2020

Bantuan Tenaga Medis
Medical Personnel Assistance

Dalam mendukung dan membantu mobilisasi para tenaga medis dalam menangani Covid-19, PT PELNI (Persero) bersama dengan dua anak usaha nya, yakni PT SBN dan PT PIDC menyediakan sarana armada bus sebagai transportasi antar jemput bagi tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit PELNI, Jakarta.

In supporting and assisting the mobilization of medical personnel in handling Covid-19, PT PELNI (Persero) together with its two subsidiaries, PT SBN and PT PIDC provide bus fleet facilities as shuttle transportation for medical personnel working at RS PELNI, Jakarta.



28 **April 2020**
April 2020

Peringatan HUT ke 68, PELNI mengusung tema "Membangun Konektivitas"
Commemoration of the 68th Anniversary, PELNI carries the theme "Building Connectivity"

PT PELNI (Persero) memperingati HUT ke 68 dengan mengusung tema "Membangun Konektivitas" dan terus berkomitmen untuk menyediakan aksesibilitas masyarakat untuk menghubungkan daerah yang sudah maju ke daerah T3P (Tertinggal, Terpencil, Terdepan, dan Perbatasan).

PT PELNI (Persero) commemorates the 68th Anniversary by theme "Building Connectivity" and continues to be committed to providing community accessibility to connect advanced areas to T3P (Lagging, Remote, Leading, and Border areas).



5 **Mei 2020**
May 2020

Dapur Umum BUMN
Public Kitchen of SOE

PT PELNI (Persero) memberikan kontribusi dalam program "Dapur Umum BUMN" untuk masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi Virus Corona di berbagai daerah.

PT PELNI (Persero) contributed to "Dapur Umum BUMN" program for the local service community affected by the Coronavirus pandemic in most regions.



8 **Mei 2020**
May 2020

CEO Talk
CEO Talk

Direktur Utama PT PELNI (Persero) Bapak Insan Purwarisya L. Tobing mengikuti program *CEO Talk*, yang merupakan wadah komunikasi karyawan dengan jajaran Direksi Perseroan untuk meningkatkan kualitas dan motivasi karyawan PT PELNI (Persero).

President Director of PT PELNI (Persero) Mr. Insan Purwarisya L. Tobing participated in CEO Talk, which is a communication forum for employees with the Directors to boost the quality and motivation of PT PELNI (Persero) employees.

PERISTIWA PENTING 2020
SIGNIFICANT EVENTS 2020



22 Mei 2020
May 2020

Distribusi Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19
Distribution of Sembako for People Affected by Covid-19

PT PELNI (Persero) menyalurkan bantuan sosial hampir 500 paket sembako yang didistribusikan kepada warga di wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT PELNI (Persero), Insan Purwarisya L Tobing kepada perwakilan warga penerima manfaat dan disaksikan oleh Lurah Petojo Utara, Indarto di Kantor Pusat PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) distributes social assistance to almost 500 packages of sembako to residents in Jakarta, Bekasi and Karawang. This activity is a form of the Company's concern for people affected by the Covid-19 pandemic. The assistance was handed over symbolically by the President Director of PT PELNI (Persero), Insan Purwarisya L Tobing to representatives of the beneficiaries and witnessed by North Petojo Lurah, Indarto at the Head Office of PT PELNI (Persero).



5 Juni 2020
June 2020

Virtual Halal Bihalal PT PELNI (Persero) Bersama Ustd. Wijayanto
PT PELNI (Persero) Halal Bihalal virtual with Ustd. Wijayanto

Perseroan mengadakan Halal Bihalal untuk seluruh jajaran manajemen dan karyawan secara virtual bersama Bapak Ustd. Wijayanto.

The Company conducted "Halal Bihalal" for all management and employees with Ustd. Wijayanto virtually.



9 Juni 2020
June 2020

CEO Talk
CEO Talk

Direktur SDM dan Umum PT PELNI (Persero) Ibu Ganefi menjadi pembicara dalam *CEO Talk* bersama karyawan untuk menjaga performa dan motivasi karyawan PT PELNI (Persero) di masa pandemi Covid-19.

Director of HR and General Affairs of PT PELNI (Persero) Mrs. Ganefi was a speaker in CEO Talk with the employees to maintain the performance and motivation of PT PELNI (Persero) employees.



17 Juni 2020
June 2020

Penandatanganan Kesepakatan Anti Penyuapan di PT PELNI (Persero)
Signing of Anti-Bribery Agreement within PT PELNI (Persero)

Direktur Utama PT PELNI (Persero) Bapak Insan Purwarisya L. Tobing beserta jajaran Direksi lainnya menandatangani deklarasi kesepakatan anti penyuapan di lingkungan PT PELNI (Persero).

President Director of PT PELNI (Persero) Mr. Insan Purwarisya L. Tobing with other fellow Board of Directors has signed the Anti-bribery Agreement declaration within PT PELNI (Persero).

PERISTIWA PENTING 2020
SIGNIFICANT EVENTS 2020



16 **Juli 2020**
July 2020

PT PELNI (Persero) Raih Dua Penghargaan dari Kemenhub
PT PELNI (Persero) Received Two Awards from the Ministry of Transportation

PT PELNI (Persero) meraih apresiasi dari Kementerian Perhubungan atas keberhasilan menjalankan penugasan Angkutan Kapal Tol Laut dan Ternak, dalam ajang yang bertajuk "Pemberian Penghargaan Kegiatan Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut, Angkutan Kapal Ternak" yang dihadiri oleh seluruh *stakeholder* industri transportasi laut yang digelar di Jakarta.

PT PELNI (Persero) received appreciation from the Ministry of Transportation for the success in executing the assignment of Sea Toll and Cattle ship Transport, in an event titled "Awarding Of Sea Toll Freight Service Activities, Cattle Ship Transport" which was attended by all stakeholders of the sea transportation industry held in Jakarta.



20 **Juli 2020**
July 2020

CEO Talk
CEO Talk

Perseroan kembali menyelenggarakan *CEO Talk* bersama Direktur Keuangan PT PELNI (Persero) Bapak Ony Suprihartono, demi menjaga keharmonisan antara karyawan dan jajaran Direksi Perseroan untuk mencapai target di masa pandemi.

The Company held CEO Talk with Finance Director of PT PELNI (Persero) Mr. Ony Suprihartono, in order to maintain harmonious communication between the employees and the Board of Directors to achieve the target in this pandemic situation.



23 **Juli 2020**
July 2020

Best CEO 2020
Best CEO 2020

Direktur Utama PT PELNI (Persero) Insan Purwarisya L. Tobing meraih penghargaan dari *Iconomics* sebagai *Best CEO 2020 In Shipping Category* dalam acara yang bertajuk *Employees' Choice Award 2020.*

President Director of PT PELNI (Persero) Insan Purwarisya L. Tobing received an award from Iconomics as Best CEO 2020 In Shipping Category in an event titled Employees' Choice Award 2020.



29 **Juli 2020**
July 2020

Penghargaan *GRC & Performance Excellence Award* 2020
GRC & Performance Excellence Award 2020

PT PELNI (Persero) sabet dua penghargaan sekaligus pada gelaran *GRC & Performance Excellence Award 2020.* Dalam ajang tersebut, PT PELNI (Persero) meraih dua penghargaan *The Best GRC Corporate Performance in Operation, Marketing & Digital Transformation 2020* dan *The Best Corporate Secretary 2020* yang diselenggarakan oleh *Indonesia BusinessNews* terkait Tata Kelola Perusahaan di Jakarta.

PT PELNI (Persero) won two awards at once at the GRC & Performance Excellence Award 2020. In the event, PT PELNI (Persero) won two awards the Best GRC Corporate Performance in Operation, Marketing & Digital Transformation 2020 and The Best Corporate Secretary 2020 organized by Indonesia BusinessNews related to Corporate Governance in Jakarta.

PERISTIWA PENTING 2020
SIGNIFICANT EVENTS 2020



30 Juli 2020
July 2020

Top CSR Awards 2020
Top CSR Awards 2020

PT PELNI (Persero) kembali mendapatkan dua penghargaan dari *Top Business* untuk kategori "Top CSR Awards 2020 # Star 4" dan "*Top Leader on CSR Commitment 2020*" dalam acara *Top CSR Awards 2020* yang bertemakan *Strategic CSR for Sustainable Business Growth in New Normal Era*.

PT PELNI (Persero) received two award from Top Business for category "Top CSR Award 2020 # Star 4" and "Top Leader on CSR for Sustainable Business Growth in New Normal Era".



3 Agustus 2020
August 2020

Idul Adha 1441 H
Eid Al-Adha 1441 H

PT PELNI (Persero) memperingati Idul Adha 1441 H yang diselenggarakan di Kantor Pusat PT PELNI (Persero), Jakarta.

PT PELNI (Persero) celebrated Eid Al-Adha 1441 H in PT PELNI (Persero) Head Office, Jakarta.



17 Agustus 2020
August 2020

Upacara Peringatan HUT Republik Indonesia ke 75
75th Independence Day of Republic of Indonesia Ceremony

PT PELNI (Persero) menggelar Upacara Peringatan HUT RI ke 75 dengan mengenakan baju adat secara virtual dan dibawah protokol kesehatan ketat. Upacara ini merupakan bentuk apresiasi PT PELNI (Persero) dan menanamkan semangat juang di tengah situasi pandemi kepada karyawan dan seluruh jajaran manajemen Perseroan.

PT PELNI (Persero) held the 75th Independence Day of Republic of Indonesia Ceremony by wearing traditional clothes and was under strict health protocols. This ceremony was an appreciation from PT PELNI (Persero) and was to embed fighting spirit in the midst of a pandemic situation to all employees and management of the Company.



27 Agustus 2020
August 2020

Launching Core Values AKHLAK
Launching of AKHLAK Core Values

PT PELNI (Persero) melakukan *launching* budaya perusahaan. Nilai - nilai utama tersebut juga ditetapkan dalam SK Direksi Nomor: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) launched Company's culture. The core values was established on Directors' Decree Nomor: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 about establishment Core Values Human Resources of State Owned Enterprise in PT PELNI (Persero).

PERISTIWA PENTING 2020
SIGNIFICANT EVENTS 2020



28 Agustus 2020
August 2020

Kunjungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Visit of the National Committee for Transportation Safety (KNKT)

Direktur Utama PT PELNI (Persero) Insan Purwarisya L. Tobing menerima kunjungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) saat meninjau pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan Perusahaan.

President Director of PT PELNI (Persero) Insan Purwarisya L. Tobing received a visit from the National Committee for Transportation Safety (KNKT) while reviewing the implementation of COVID-19 health protocols within the Company.



4 September 2020
September 2020

Sosialisasi AKHLAK
Socialization of AKHLAK

PT PELNI (Persero) mensosialisasikan Nilai - Nilai Utama AKHLAK kepada seluruh manajemen Perseroan untuk mendukung Kementerian BUMN dalam menciptakan Badan Usaha Milik Negara yang bersih. Sosialisasi tersebut dilakukan secara virtual dan dilakukan protokol kesehatan yang ketat.

PT PELNI (Persero) socialized Company's Core Value of AKHLAK to all its management to support SOE's Ministry in creating Clean State Owned Enterprise. That event was done virtually with strict health protocol.



11 September 2020
September 2020

Bantuan CSR untuk Tenaga Medis RS PELNI
CSR Assistance for RS PELNI Medical Personnel

PT PELNI (Persero) menyalurkan sejumlah bantuan CSR bagi tenaga medis di RS PELNI, bantuan yang diberikan berupa 100 alat pelindung diri, 640 alat *rapid test*, serta fasilitas transportasi antar jemput bagi tenaga medis.

PT PELNI (Persero) distributes a number of CSR assistance for medical personnel in RS PELNI, assistance provided in the form of 100 personal protective equipment, 640 rapid test equipment, as well as shuttle transportation facilities for medical personnel.



1 Oktober 2020
October 2020

Serah Terima Jabatan Direktur Keuangan PT SBN
Handover of Financial Director Position of PT SBN

Direktur Utama PT PELNI (Persero) Bapak Insan Purwarisya L. Tobing memimpin serah terima jabatan Direktur Keuangan PT SBN yang baru. Dengan pergantian ini diharapkan PT SBN dapat meningkatkan performa, khususnya dari segi keuangan Perusahaan.

President Director of PT PELNI (Persero) Mr Insan Purwarisya L. Tobing lead the handover Financial Director PT SBN. It is hoped that PT SBN can improve its performance, especially its Financial.

PERISTIWA PENTING 2020
SIGNIFICANT EVENTS 2020



9 Oktober 2020
October 2020

Penghargaan Kapal dengan Penerapan *Tracking System* Terbaik
Ship Award With Best Tracking System Implementation

KM Sabuk Nusantara 66 yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero) mendapatkan sertifikat penghargaan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk kategori "Kapal dengan Penerapan *Tracking System* Terbaik" pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis dan Rede di Surabaya.

KM Sabuk Nusantara 66 operated by PT PELNI (Persero) received a certificate of appreciation from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia for the category of "Ship With the Best Tracking System Implementation" at the Coordination Meeting on The Implementation of Pioneer and Rede Sea Transportation in Surabaya.



5 November 2020
November 2020

Penghargaan *Trans Archipelago Branding*
Trans Archipelago Branding Award

PT PELNI (Persero) menerima penghargaan dalam acara "BUMN *Branding & Marketing Award 2020*" untuk kategori *Trans Archipelago Branding* yang diselenggarakan oleh BUMN TRACK. Penghargaan diberikan oleh Bapak Prof. Dr. PM. Budi Haryono yang bertindak sebagai dewan juri dan diterima oleh Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero) Bapak O.M. Sodikin di Jakarta.

PT PELNI (Persero) received an award in the event "BUMN Branding & Marketing Award 2020" for the trans archipelago branding category organized by BUMN TRACK. The award was given by Prof. Dr. PM. Budi Haryono who acted as a jury and was accepted by the Director of Passenger Transport Business of PT PELNI (Persero) Mr. O.M. Sodikin in Jakarta.



18 November 2020
November 2020

Site Visit Komisaris ke Cabang dan Kapal PT PELNI (Persero)
Site Visit of BOC to Branch Office and Ships of PT PELNI (Persero)

Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) meninjau cabang - cabang dan kapal PT PELNI (Persero). Dalam hal, ini Dewan Komisaris memastikan bahwa operasional dan kapal PT PELNI (Persero) selalu dalam performa yang prima.

The Board of Commissioner of PT PELNI (Persero) visited its branch office and ship. The BOC ensured that Company's operation and its ships are in excellence performance.



25 November 2020
November 2020

4 Star Platinum The Best Human Capital in Recruitment & Engagement Management 2020
4 Star Platinum The Best Human Capital in Recruitment & Engagement Management 2020

PT PELNI (Persero) menerima penghargaan kembali di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu predikat 4 *Star Platinum* pada kategori *The Best Human Capital in Recruitment & Engagement Management 2020 (Transportation Services)* dalam gelaran *Digital Marketing & Human Capital Award 2020* yang diselenggarakan oleh Majalah *BusinessNews Indonesia*.

PT PELNI (Persero) received the award again in the field of Human Resources (HR), that is the 4 Star Platinum predicate in the category of The Best Human Capital in Recruitment & Engagement Management 2020 (Transportation Services) in the Digital Marketing & Human Capital Award 2020 which was held by BusinessNews Indonesia Magazine.

PERISTIWA PENTING 2020
SIGNIFICANT EVENTS 2020



5 **Desember 2020**
December 2020

Site Visit Dewan Komisaris dan Direksi PT PELNI (Persero)
Site Visit of BOC and BOD of PT PELNI (Persero)

Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT PELNI (Persero) selalu bersinergi untuk memastikan pelayanan dan operasional prima di kantor cabang dan kapal PT PELNI (Persero) untuk menunjang ekonomi Nasional.

The BOC and BOD of PT PELNI (Persero) are always synergized to ensure that its voyage, operation and ships condition are in excellent performance to support National Economic.



14 **Desember 2020**
December 2020

PKBL Revitalisasi Terumbu Karang *Domus Coronarius Circularis*
PKBL Revitalisation Coral Reef Domus Coronarius Circularis

PT PELNI (Persero) melakukan revitalisasi terumbu karang di Laut Banyuwangi. Program PKBL tersebut merupakan salah satu cara PT PELNI (Persero) menjaga kelestarian ekosistem bawah laut Indonesia.

PT PELNI (Persero) has done revitalization Coral Reef in Banyuwangi Sea. This Program is one of PT PELNI (Persero) effort to preserve the underwater ecosystem in Indonesia.



14 **Desember 2020**
December 2020

Gold Rank The 16th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2020
Gold Rank The 16th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2020

PT PELNI (Persero) berhasil meraih peringkat *Gold Rank* dalam ajang *The 16th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2020*. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen PT PELNI dalam melaksanakan dan mengembangkan pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi melalui laporan berkelanjutan.

PT PELNI (Persero) achieved a Gold Rank in The 16th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2020. This award is a proof that PT PELNI's commitment in implementing and developing environmental, social, and economic pillars through sustainable reports.



31 **Desember 2020**
December 2020

Penandatanganan Terpadu Perjanjian Kerjasama Penyelenggara Subsidi Angkutan Laut
Integrated Agreement Cooperation Signing on Sea Transport Subsidy

Direktur Utama PT PELNI (Persero) Bapak Insan Purwarisya L. Tobing menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut.

President Director of PT PELNI (Persero) Mr insan Purwarisya L. Tobing has signed MoU with Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN
Awards



PT PELNI (Persero) memenangkan juara pertama dalam penghargaan *Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2020 (ICCA)* dari *Economic Review Magazine* dengan kategori *State Owned Enterprises Company* sektor *Transportation Maritime.*

PT PELNI (Persero) won first place in the Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2020 (ICCA) from Economic Review Magazine in the category of State Owned Enterprises Company in the Transportation Maritime sector.



PT PELNI (Persero) meraih *Gold Winner* kategori *Social Economy Contribution* dari RRI dan *Iconomics* dalam gelaran BUMN *Brand Award* 2020 "*Millenials Choice*"

PT PELNI (Persero) received Gold Winner in Social Economy Contribution category from RRI and Iconomics in BUMN Brand Award 2020 "Millenials Choice"

PT PELNI (Persero) mendapatkan dua Penghargaan dari *Indonesia BusinessNews*, yaitu "*The Best GRC Corporate Performance in Operation, Marketing & Digital Transformation 2020*" dan "*The Best Corporate Secretary 2020*" pada Ajang *GRC & Performance Excellence Award 2020.*

PT PELNI (Persero) successfully received Two Awards from Indonesia BusinessNews, called "The Best GRC Corporate Performance in Operation, Marketing & Digital Transformation 2020" and "The Best Corporate Secretary 2020" at the GRC & Performance Excellence Award 2020.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS



PT PELNI (Persero) menerima Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas Partisipasinya sebagai Operator BUMN dengan *Load* Faktor Terbanyak Semester 1 Kegiatan Pelayaran Kapal Angkutan Khusus Ternak.

PT PELNI (Persero) received a Charter Award from the Director General of Sea Transportation for Its Participation as a State-Owned Operator with the Most Load Factors Semester 1 Of Special Livestock Transport Shipping Activities.



PT PELNI (Persero) juga menerima Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk KM Sabuk Nusantara 66 dengan kategori Kapal dengan Penerapan *Tracking System* Terbaik.

PT PELNI (Persero) received a Charter Award from the Director General of Sea Transportation for KM Sabuk Nusantara 66 with the category of Ship with the Best Tracking System Application.

PT PELNI (Persero) memenangkan *TOP GRC Award 2020 #Star 3* dari *TOP GRC*.

PT PELNI (Persero) won the TOP GRC Award 2020 #Star 3 from TOP GRC.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN
Awards

PT PELNI (Persero) mendapatkan dua penghargaan bergengsi dari *Top Business* sebagai kategori *"Top CSR Awards 2020 # Star 4"* dan "*Top Leader on CSR Commitment 2020*".

PT PELNI (Persero) received two prestigious awards from Top Business category of "Top CSR Awards 2020 # Star 4" and "Top Leader on CSR Commitment 2020".



PT PELNI (Persero) menyabet predikat *Gold Winner* dan *Top 100 Worldwide* dalam kategori *Corporate Publishing Competition* dan *Global Communications Competition* dari LACP.

PT PELNI (Persero) won the Gold Winner and Top 100 Worldwide in the category of Corporate Publishing Competition and Global Communications Competition from LACP.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS



PT PELNI (Persero) menerima penghargaan dari BUMN *TRACK* dalam acara "BUMN *Branding & Marketing Award* 2020", dengan kategori *Trans Archipelago Branding* Terbaik.

PT PELNI (Persero) received an award from BUMN TRACK in the event "BUMN Branding & Marketing Award 2020", with the category of Best Trans Archipelago Branding.



PT PELNI (Persero) memenangkan *Gold Rank* dalam acara *Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)* ke 16 di tahun 2020.

PT PELNI (Persero) won a Gold Rank in The 16th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2020.

PT PELNI (Persero) menerima dua penghargaan sekaligus dari *It Works* dengan kategori "*Top Digital Implementation 2020 on Transportation Sector # Level Star 4*", dan Bapak Insan Purwarisya L Tobing sebagai Direktur Utama dengan kategori "*Top Leader on Digital Implementation 2020*".

PT PELNI (Persero) received two awards from It Works with category "Top Digital Implementation 2020 on Transportation Sector # Level Star 4", and Mr. Insan Purwarisya L Tobing as President Director with the category "Top Leader on Digital Implementation 2020".



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

SERTIFIKASI
Certifications

No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikasi Garis Muat Load Line Certificate		
		Nomor Sertifikasi Certificate Number	Tanggal Date	
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Date of Expiry
Kapal Penumpang Passenger Ship				
1	KM CIREMAI	27455	29/11/2018	01/08/2023
2	KM DOBONSOLO	27026	05/10/2018	10/03/2023
3	KM GUNUNG DEMPO	26683	31/08/2018	20/06/2023
4	KM LEUSER	27074	16/10/2018	28/05/2023
5	KM CARAKA JN III-22	26720	03/09/2018	12/11/2022
Kapal Barang Cargo Ship				
1	KM CAMARA NUSANTARA 1	011808	02/01/2018	23/11/2020
2	KM CAMARA NUSANTARA 3	012826	16/10/2018	09/03/2023
3	KM KENDHAGA NUSANTARA 1	012479	16/07/2018	29/11/2022
4	KM LOGISTIK NUSANTARA 1	25184	10/01/2018	24/04/2021
5	KM LOGISTIK NUSANTARA 2	26286	04/07/2018	16/09/2022
6	KM LOGISTIK NUSANTARA 4	26293	05/07/2018	04/06/2023

Sertifikasi Keselamatan Penumpang
Passenger Ship Safety Certification

No	Nama Kapal Ship Name	Nomor Sertifikasi Certification Number
1	KM Bukit Raya	Al.529/49/14/SYB.Tpr.2020
2	KM Bukit Raya	01431-TP/D1.9-PS/2020
3	KM Bukit Raya	AL.529/49/14/SYB.Tpr-2020
4	KM Binaiya	AL.527/3/8/KSOP.BNA-2019
5	KM Binaiya	AL.501/58/04/SYB.MKS-2020
6	KM Bukit Siguntang	AL.501/12/08/SYB.Tpr.2019
7	KM Pangrango	AL.501/66/04/SYB.MKS-2020

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

	Sertifikasi Lambung Hull Certificate			Sertifikasi Mesin Machine Certificate			Lembaga Klasifikasi Clasification Institution
	Nomor Sertifikasi Certificate Number	Tanggal Date		Nomor Sertifikasi Certificate Number	Tanggal Date		
		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Date of Expiry		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Date of Expiry	
	41587	29/11/2018	01/08/2023	27041	29/11/2018	01/08/2023	PT BKI
	40937	05/10/2018	10/03/2023	26610	05/10/2018	10/03/2023	PT BKI
	40449	31/08/2018	20/06/2023	26683	31/08/2018	20/06/2023	PT BKI
	41031	16/10/2018	28/05/2023	26669	16/10/2018	28/05/2023	PT BKI
	40508	03/09/2018	12/11/2022	26326	03/09/2018	12/11/2022	PT BKI
	038180	02/01/2018	23/11/2020	024818	02/01/2018	04-Feb-20	PT BKI
	041015	16/10/2018	09/03/2023	-	-	-	PT BKI
	039972	16/07/2018	29/11/2022	025950	16/07/2018	25-Mar-20	PT BKI
	38306	10/01/2018	24/04/2021	24885	10/01/2018	17-May-20	PT BKI
	39898	04/07/2018	16/09/2022	25895	04/07/2018	08-Jun-21	PT BKI
	39911	05/07/2018	04/06/2023	-	-	-	PT BKI

	Diterbitkan Date of Issued	Masa Berlaku Date of Expiry	Dikeluarkan Oleh Issued By
	8 Desember 2020	7 Desember 2021	KSOP SURABAYA
	7 Oktober 2020	6 Maret 2021	PT BKI
	8 Desember 2020	7 Desember 2021	KSOP SURABAYA
	28 Oktober 2019	27 Oktober 2020	KSOP BENOA
	11 September 2020	8 Maret 2021	KSOP MAKASSAR
	14 Maret 2019	12 April 2020	KSOP SURABAYA
	14 Oktober 2020	13 Januari 2021	KSOP MAKASSAR

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

No	Nama Kapal Ship Name	Nomor Sertifikasi Certification Number
8	KM Pangrango	PK.304/8/13/KSOP.ABN-2020
9	KM Jetliner	AL.501/57/04/SYB.MKS-2020
10	KM Jetliner	AL.527/59/11/Upp.Baus-20
11	KM Jetliner	AL.527/64/01/Upp.Baus-20
12	KM Dorolonda	0830-CG/D1.S-PS/2020-Perp.II
13	KM Dorolonda	AL.527/06/VII/SYB.TPK-2020
14	KM Kelimutu	AL.501/19/05/KSOP.TG.EMAS-2020
15	KM Kelimutu	AL.531/05/03/KSOP.Tg.Emas-2020
16	KM Nggapulu	PK.001/30/8/KSOP-ABN-20
17	KM Nggapulu	PK.304/81/12/KSOP.ABN-20
18	KM Ciremai	00188-SM/D1.S-PS/2020
19	KM Kelud	AL.501/33/08/KSOP.TG.EMAS.2020
20	KM Kelud	AL527/21/XII/SYB.TPK-2020
21	KM Lawit	AL.501/19/09/SYB.TPK-20
22	KM Lawit	AL.531/37/03/KSOP.Tg Emas-2020
23	KM Sangiang	PK.001/III.4/10/KSOP.BTG-20
24	KM Sangiang	PK.309/14/11/KSOP.Btg-20
25	KM Tilongkabila	AL.501/56/04/SYB.MKS-20
26	KM Tilongkabila	AL.501/73/04/SYB.MKS-2020
27	KM Tilongkabila	AL.527/172/58/SYB.MKS-2019
28	KM Tilongkabila	AL.527/161/52/SYB.MKS-2020
29	KM Sinabung	AL.501/108/07/SYB.Tpr/2020
30	KM Leuser	AL.501/77/13/SYB.Tpr/2020
31	KM Leuser	AL.529/1/10/SYB.Tpr-2020
32	KM Tatamailau	PK.001/111.4/12/KSOP.Btg-19
33	KM Tatamailau	PK.001/III.3/24/KSOP.Btg-20
34	KM Tatamailau	PK.309/10/03/KSOP.Btg.20
35	KM Lambelu	AL.527/89/3/SYB.MKS-2020
36	KM Lambelu	AL.501/5/3/KSOP.BPN-2019
37	KM Labobar	AL.529/1/09/SYB.Tpr-2020

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

	Diterbitkan Date of Issued	**Masa Berlaku** Date of Expiry	**Dikeluarkan Oleh** Issued By
	13 November 2020	12 November 2021	KSOP AMBON
	7 September 2020	6 Desember 2021	KSOP MAKASSAR
	1 Juli 2020	31 September 2020	KSOP BAU BAU
	28 September 2020	27 Maret 2021	KSOP BAU BAU
	3 Desember 2020	6 Februari 2021	PT BKI
	2 Juli 2020	2 Juli 2021	KSOP TANJUNG PRIOK
	15 Mei 2020	24 Februari 2021	KSOP SEMARANG
	14 Februari 2020	13 Februari 2021	KSOP SEMARANG
	16 November 2020	22 Februari 2021	KSOP AMBON
	10 November 2020	9 November 2021	KSOP AMBON
	10 Juli 2020	10 Juli 2021	PT BKI
	17 September 2020	19 Mei 2021	KSOP SEMARANG
	10 Desember 2020	9 Desember 2021	KSOP TANJUNG PRIOK
	24 September 2020	16 September 2021	KSOP TANJUNG PRIOK
	8 Desember 2020	7 Desember 2021	KSOP SEMARANG
	16 September 2020	12 Maret 2021	KSOP BITUNG
	11 November 2020	10 Mei 2021	KSOP BITUNG
	2 September 2020	1 Desember 2020	KSOP MAKASSAR
	1 Desember 2020	1 Maret 2021	KSOP MAKASSAR
	4 November 2019	3 November 2020	KSOP MAKASSAR
	27 Oktober 2020	26 Oktober 2021	KSOP MAKASSAR
	30 Desember 2020	1 April 2020	KSOP SURABAYA
	18 September 2020	22 Desember 2020	KSOP SURABAYA
	3 Januari 2020	2 Januari 2020	KSOP SURABAYA
	8 Agustus 2019	9 Februari 2020	KSOP BITUNG
	5 Agustus 2020	15 Februari 2021	KSOP BITUNG
	4 Agustus 2020	3 Februari 2021	KSOP BITUNG
	4 Juni 2020	3 Desember 2020	KSOP MAKASSAR
	14 Agustus 2020	15 Februari 2020	KSOP BALIKPAPAN
	3 Januari 2020	2 Januari 2020	KSOP SURABAYA

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

No	Nama Kapal Ship Name	Nomor Sertifikasi Certification Number	
38	KM Tidar	AL.501/39/11/KSOP.TG.EMAS-2020	
39	KM Tidar	AL.527/09/03/SYB.MKS-2020	
40	KM Dobonsolo	AL.527/49/03/Upp.Baus-20	

Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal
National Certificate of Prevention of Pollution From Ships

No	Nama Kapal Ship Name	Nomor Sertifikasi Certification Number	
1	KM Sangiang	AL.601/484/8/DK/2020	
2	KM Bukit Raya	AL.601/270/10/SYB.TPK-2020	
3	KM Lambelu	AL.601/173/1/DK/2019	
4	KM Lawit	AL.601/491/12/DK/2019	
5	KM Labobar	AL.601/208/12/DK/2020	
6	KM Tidar	PK.401/1098/SNPP/DK-17	
7	KM Ciremai	AL.601/4/14/KSOP.SRG-2020	
8	KM Ciremai	AL.601/408/11/DK/2020	
9	KM Sinabung	PK.401/8769/SNPP/DK-18	
10	KM Bukit Siguntang	AL.601/182/6/DK/2019	
11	KM Tatamailau	AL.601/504/15/DK/2020	
12	KM Kelud	AL.601/359/6/DK/2020	
13	KM Nggapulu	AL.601/208/20/DK/2020	
14	KM Kelimutu	AL.601/388/13/DK/2020	
15	KM Leuser	PK.401/8235/SNPP/DK-16	
16	KM Binaiya	PK.401/1097/SNPP/DK-17	
17	KM Tilongkabila	PK.401/5272/SNPP/DK-18	
18	KM Jetliner	AL.601/208/11/DK/2020	
19	KM Pangrango	AL.601/388/14/DK/2020	
20	KM Pangrango	PK.402/8/12/KSOP.ABN.19	
21	KM Dorolonda	AL.601/504/14/DK/2020	
22	KM Dobonsolo	AL.602/129/20/DK/2020	
23	KM Dobonsolo	AL.602/129/19/DK/2020	

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

	Diterbitkan Date of Issued	**Masa Berlaku** Date of Expiry	**Dikeluarkan Oleh** Issued By
	13 November 2020	11 Mei 2021	KSOP SEMARANG
	24 Januari 2020	23 Januari 2020	KSOP SEMARANG
	22 Januari 2020	21 Januari 2021	KSOP BAU BAU

	Diterbitkan Date of Issued	**Masa Berlaku** Date of Expiry	**Dikeluarkan Oleh** Issued By
	17 Juli 2020	1 Juli 2023	KEMENHUB
	6 Oktober 2020	5 Januari 2021	KEMENHUB
	18 Februari 2019	17 Februari 2022	KEMENHUB
	28 Agustus 2019	27 Agustus 2022	KEMENHUB
	3 Januari 2020	2 Januari 2023	KEMENHUB
	24 November 2018	23 November 2021	KEMENHUB
	27 Februari 2020	26 Mei 2020	KEMENHUB
	28 Mei 2020	27 Mei 2023	KEMENHUB
	25 Juli 2018	24 Juli 2021	KEMENHUB
	11 Maret 2019	10 Maret 2022	KEMENHUB
	15 Mei 2020	14 Mei 2023	KEMENHUB
	1 Juni 2020	31 Mei 2021	KEMENHUB
	24 Februari 2020	23 Februari 2023	KEMENHUB
	14 Mei 2020	13 Mei 2023	KEMENHUB
	14 Desember 2016	13 Desember 2021	KEMENHUB
	17 Januari 2016	16 November 2021	KEMENHUB
	14 Februari 2018	13 Februari 2021	KEMENHUB
	11 Februari 2020	11 Februari 2023	KEMENHUB
	6 Mei 2020	5 Mei 2023	KEMENHUB
	12 November 2019	11 Februari 2020	KEMENHUB
	2 Juli 2020	1 Juli 2023	KEMENHUB
	17 April 2020	16 April 2023	KEMENHUB
	17 April 2020	16 April 2023	KEMENHUB

02


Current financial situation
Trading Graph
Dinner with Family 5:45 pm



LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT



01
Ali Masykur Musa
Komisaris Utama
President Commissioner

02
Wahju Adji Herpriarsono
Komisaris
Commissioner

03
Haryo Indratno
Komisaris
Commissioner

04
Eddy Susanto Soepadmo
Komisaris
Commissioner

05
Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris
Commissioner

06
Kristia Budiyarto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan puji dan syukur kepada-Nya karena kami dapat menjalankan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan yang diamanatkan kepada kami selaku Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

Atas nama Dewan Komisaris, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi PT PELNI (Persero) selama tahun 2020. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan telah mengacu kepada strategi bisnis yang telah ditetapkan, dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam laporan ini, Dewan Komisaris melaporkan penilaian terhadap kinerja Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseroan, pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, pandangan atas prospek usaha dan rencana kerja yang disusun oleh Direksi untuk tahun 2021, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris, perubahan komposisi Dewan Komisaris, frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dewan Komisaris mengucapkan selamat kepada Direksi atas kemampuannya dalam memimpin PT PELNI (Persero) sehingga dapat melalui tantangan yang cukup berat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada Perseroan ditengah tantangan perekonomian dan industri.

Dear valued shareholders and stakeholders,

Our praise and gratitude to the God Almighty for his tremendous blessing given to us, so we can carry out our duties of supervisory and management functions as the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

On behalf of the Board of Commissioners, we hereby present a report for the implementation of our supervisory and advisory functions to the Board of Directors of PT PELNI (Persero) in 2020. Our duties and responsibilities have been referred to the Company's Articles of Association and legislations. We ensured that the Company's activities operate based on Business objectives, Professional Management - and meet the interest of Shareholders and other Stakeholders.

In this report, we state the performance of the Board of Directors in managing the Company, oversee the implementation of business strategy, business prospect and work plans of which prepared by the Board of Directors for 2021, implementation on Good Corporate Governance (GCG), overview on performance of Committee which support the Board of Commissioners, change in composition of the Board of Commissioners, frequency and method to provide advice to the Board of Directors.

ASSESSMENT PERFORMANCE OF BOD AND ITS BASIS

We would like to congratulate the Board of Directors for their best capability in leading PT PELNI (Persero) that we can manage the sufficient challenges due to the Covid-19 pandemic during 2020. The Board of Commissioners is pleased that the Board of Directors was able to make significant contribution to the Company in the midst of economic and industrial challenges.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Kami merasa bangga dan memberikan apresiasi terhadap pencapaian PT PELNI (Persero) sebagai hasil kerja keras seluruh insan PELNI, meliputi Direksi beserta segenap jajaran karyawan PT PELNI (Persero). Pada tahun 2020 Perusahaan berhasil memperoleh pencapaian positif, penilaian berdasarkan pencapaian pada aspek operasional dan keuangan.

We are proud and give our highest appreciation for the outstanding achievement of PT PELNI (Persero) as a result of a hard work from our best people, which are the Board of Directors and all management of PT PELNI (Persero). In 2020, the Company has been successful to create positive performance, we see from the achievement of operational and financial aspects.

Dasar Penilaian kinerja Direksi yang dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara kolektif disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diukur berdasarkan kriteria umum, yang meliputi Komposisi, Kriteria, Perencanan, Strategis, Peran dan Tugas Tanggung Jawab, Program Pelatihan, Rapat Direksi, Efektivitas organ penunjang, Hubungan komunikasi, Pertanggungjawaban serta Komitmen Standar Etika.

We also have evaluated the performance of the Board of Directors collectively using general criteria, which is composition, criteria, strategic, role and responsibility, training program, the Board of Directors meetings, effectiveness of supporting organs, communication, accountability and commitment to code of ethic standard that was submitted the result to the General Meeting of Shareholder.

Penilaian Kinerja Perusahaan atau yang disebut sebagai *Key Performance Indicators (KPI)* yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi Perseroan, terdiri dari 5 (lima) perspektif, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi dan Pengembangan Talenta. Skor KPI Kontrak Manajemen yang dicapai tahun 2020 adalah 91,40 atau meningkatkan dibandingkan dengan Skor KPI pada tahun 2019 yang tercatat adalah 90,97.

Key Performance Indicators (KPI) have been used for assessing the performance of the Board of Directors consisted of 5 perspectives, which are Social and Economic Values for Indonesia, Business Model Innovation, Leading Technology, Investment Development and Talent Development. This Management Contract KPI Score in 2020 was 91,40 or an increase compared to KPI score in 2019 which was 90,97.

Hasil penilaian skor KPI yang diperoleh pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KPI Scoring Result that obtained by the Company for 2020 are as follows:

No	Uraian Description	RKAP	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Score Score
A	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	62,71	56,61	90,28%	24,19
B	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	4,00	3,46	86,50%	17,94
C	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	30,60	36,43	119,05%	22,00
D	Pengembangan Investasi Investment Development	5,00	5,00	100,00%	5,00
E	Pengembangan Talenta Talent Development	45,50	37,79	83,05%	22,27
	Jumlah Bobot Total Weighted				**91,40**

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Aspek lainnya atas kinerja Direksi dapat terlihat dari Tingkat Kesehatan BUMN PT PELNI (Persero) tahun 2020 Audited yang berada pada "Kategori SEHAT dangan Kualifikasi A" dengan skor 75,50. Tingkat Kesehatan BUMN terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.

Ditengah tantangan pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan yang luar biasa pada perekonomian secara global yang juga sangat berdampak pada operasional bisnis Perseroan. Namun demikian, Perseroan berhasil melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap tantangan yang ada sehingga dapat mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Pada tahun 2020, Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan usaha bersih sebesar Rp4,17 triliun, turun 24,85% atau turun senilai Rp1,38 triliun jika dibandingkan dengan pendapatan usaha bersih tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp5,54 triliun. Laba tahun berjalan Perseroan tahun 2020 tercatat sebesar Rp30,97 miliar, turun 82,87% atau turun senilai Rp149,79 miliar jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan tahun 2019.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan secara aktif memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi. Hal ini sesuai dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas pengelolaan Perseroan oleh Direksi agar senantiasa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Tantangan terbesar sepanjang tahun 2020 adalah disebabkan adanya pandemi Covid-19, yang tidak hanya memberikan dampak yang sangat berat pada operasional PT PELNI (Persero) sebagai perusahaan transportasi laut tetapi pandemi itu juga berdampak kepada seluruh dunia secara global. Namun demikian, Perseroan berhasil menghadapi tantangan tersebut dengan melakukan perubahan strategi, inovasi dan adaptasi atau penyesuaian.

Other aspect for the performance assessment of the Board of Directors was the soundness of PT PELNI (Persero) audited in 2020 was "Health category on A qualification" with score of 75,50. This soundness of SOE consists of 3 indicators, which are financial aspect, operational aspect and administration aspect.

In the midst of Covid-19 pandemic situation that has suppressed the global economic and also very impacted the business operation of the Company. The Company has succeeded to adjust and adapt to this pandemic challenge and still recorded the outstanding financial performance. In 2020, the Company managed to record net operating income of Rp4.17 trillion, a decrease of 24.85% or decreased by Rp1.38 trillion compared to net operating income in 2019 was Rp5.54 trillion. Profit for the year in 2020 recorded Rp30.97 million, a decrease of 82.87% or decreased by Rp149.79 million compared to profit for the year in 2019.

SUPERVISION ON STRATEGY IMPLEMENTATION

During 2020, the Board of Commissioners has conducted supervising the management of the Company that carried out by the Board of Directors and actively provided advices and inputs to the Directors. This is in accordance with the Board of Commissioners functions as supervisors of the management of the Company so that they are always in accordance with the provisions of the Articles of Association and GMS Decisions, as well as the Legislation that applies to the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

The biggest challenge in 2020 was the Covid-19 pandemic that has not only impacted the operation of PT PELNI (Persero) as a leading shipping provider but also has spread to all over the world. Still, the Company has been success to face this challenge through innovation and strategy as well as adjusting or adapting to the situation.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melakukan tugas-tugasnya dengan optimal. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat kepada Direksi agar terus memperkuat strategi yang mencakup pada optimasi pendapatan. Dewan Komisaris secara periodik telah melakukan rapat bersama jajaran Direksi untuk memberikan nasihat atas perkembangan strategi yang diterapkan Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

We consider that the Board of Directors has performed their duties optimally and we have also provided advices to continue strengthening strategies which includes revenue optimization. We hold meeting periodically with the Board of Directors to provide development advices of strategies implemented by the Board of Directors in managing the Company.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI & DASAR PERTIMBANGANNYA

Dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang PT PELNI (Persero) Tahun 2020-2024 yang merupakan kesinambungan dari Rencana Jangka Panjang Tahun 2015-2019 yang dikenal dengan *Roadmap* Transformasi, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi PT PELNI (Persero) beserta strategi-strateginya telah mempersiapkan Perseroan untuk menjawab tantangan dan menangkap peluang bisnis untuk tercapainya target Perseroan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

OVERVIEW ON BUSINESS PROSCPECT & ITS BASIS PREPARED BY BOD

PT PELNI (Persero) Long-Term Plan for 2020-2024 is the continuity of Long-term plan for 2015-2019 as well-known Roadmap Transformation, we assess that the business prospect and the strategies of PT PELNI (Persero) has made the Company to overcome the headwinds and continues to pursue the business possibilities for the outstanding achievement targets, both short term or long term.

Dewan komisaris juga berpendapat bahwa Direksi perlu terus melakukan evaluasi lebih lanjut secara periodik mengenai strategi yang telah ditetapkan agar bisa meningkatkan kinerja ke level yang lebih baik lagi. Evaluasi ini perlu dilakukan dan tetap mengelola risiko yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang, dengan terus memperhitungkan efisiensi serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.

The Board of Commissioners has opinions that the Board of Directors needs more periodic evaluation for these strategies in order to boost the performance to the better growth. This evaluation becomes one of the concern and still manage the risks that might be arise for the years to come by calculating the efficiency and occupational health and safety.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) tetap menjadi fokus dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris tidak hanya bertanggung jawab kepada hasil atau tujuan yang dicapai tetapi juga senantiasa memantau proses

OVERVIEW ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) IMPLEMENTATION

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) remains as the focus of our duties and responsibilities with the Board of Directors. In implementing our supervisory function, we are neither responsible for the results and objectives but also constantly monitoring the processes to achieve the

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terkait dengan praktik GCG, Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

expecting results. In the practices of Good Corporate Governance (GCG), we are assisted by Board of Commissioner Secretary, Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee.

Kami juga memperhatikan beberapa isu kunci dalam penerapan GCG seperti manajemen risiko dan Tanggung Jawab Sosial Maryarakat (CSR). Hal ini sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan. Praktik manajemen risiko yang memadai diperlukan agar mampu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul. Atas hal ini, Dewan Komisaris memantau dan memberikan saran atas risiko yang dikelola oleh Perseroan. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menganggap bahwa Perseroan telah membangun sistem pemantauan risiko dan menerapkan pedoman tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal yang baik. Dewan Komisaris bersama Direksi mempunyai komitmen untuk terus menerus memperbaiki implementasi GCG yang dalam pelaksanaannya diwujudkan secara konsisten.

We also pay attention to several key issues in the implementation of GCG such as risk management and Corporate Social Responsibility (CSR). This is in line with the development of the Company's business activities. A good risk management practices are needed to be able to identify potential risks that may accur. For this matter, the Board of Commissioners monitors and provide advices on risks that managed by the Company. Overall, the Board of Commissioners considered that the Company has built a risk monitoring system and applied good corporate governance, risk management and internal control systems. The Board of Commissioners and Directors are committed to keep improving the GCG implementation, which is consistently implemented.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi PT PELNI (Persero) telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, hal ini terbukti dari capaian atas penilaian GCG yang pada tahun 2020 dengan skor 84,401 dengan predikat BAIK berdasarkan *assessment* untuk periode 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Kauangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 83,169 dengan predikat BAIK. Dengan demikian dapat terlihat bahwa dari seluruh aspek penilaian (Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, pemegang saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transaparansi serta Aspek lainnya) berada pada pencapaian Baik.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors of PT PELNI (Persero) has implemented Good Corporate Governance, the achievement of GCG assessment in 2020 is as an evidence with score of 84.401 with GOOD predicate based on assessment that conducted by Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). This score was increased compared to the previous year which was 83.169 with GOOD predicate. Thus, it can be seen from all aspects of the assessment (Commitment to the implementation of sustainable good corporate governance, shareholders and AGMS, Board of Commissioners, Directors, Information Disclosure, Transparency and other Aspects) is in Good achievement.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dibantu oleh beberapa komite, yaitu Komite Audit, Komite Kebijakan Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2020, Kami menilai bahwa komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai *charter* yang berlaku bagi masing-masing komite, termasuk memberikan rekomendasi serta laporan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut Dewan Komisaris.

Di tahun 2020, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, internal audit dan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan penelaahan atas informasi keuangan, penelaahan atas hasil audit Satuan Pengawasan Intern dan Kantor Akuntan Publik.

Komite Kebijakan Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem manajemen risiko internal dan optimalisasi mitigasi risiko. Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Risiko telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan penelaahan atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang telah berjalan.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas talenta dan pengelolaan SDM PT PELNI (Persero). Selama tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja individu Direksi, penyusunan talenta, pengelolaan SDM dan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

OVERVIEW ON PERFORMANCE OF COMMITTEE UNDER BOC

The Board of Commissioners in managing this duties were supported by committees, which are Audit Committee, Risk Policy Committee and Nomination and Remuneration Committee. Throughout 2020, We consider that committees under the Board of Commissioners have done their duties and responsibilities effectively according to the charters which are applicable to each committee, including providing recommendations and reports to us on matters that needs our concern and followed up by us.

In 2020, the Audit Committee has a duty and responsibility to supervise the effectiveness of the internal control system, internal audit and the financial reporting process. During 2020, the Audit Committee has carried out their duties, including providing recommendations to us based on their review of financial information management, the audit results of the Internal Audit Unit and the Public Accounting Firm.

Risk Policy Committee has a duty and responsibility to supervise the effectiveness on the internal risk management system and optimalization on risk mitigation. During 2019, Risk Policy Committee has carried out their duties, such as providing rekomendation to the board of commissioner based on their review of the activity in risk management that has been implemented.

Nomination and remuneration committee has the duties and responsibilities to oversee, supervise and assess the talent and Human resources management of PT PELNI (Persero). Throughout 2020, Nomination and Remuneration Committee has conducted its duties such as providing recommendation to the Board of Commissioners related to individual performance of the Board of Directors, talent and HR management and remuneration for the Board of Commissioners and Directors.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

PANDANGAN ATAS PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)* DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM WBS

Efektivitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) juga menjadi perhatian utama Dewan Komisaris. Perseroan telah memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran berfungsi sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan dalam Perseroan.

Pandangan Dewan Komisaris atas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *whistleblowing system (WBS)* di Perseroan, Kami menilai bahwa implementasi WBS di Perseroan sudah sangat baik. Disamping itu, Dewan Komisaris juga memberikan arahan agar efektivitas pelaksanaan WBS terus ditingkatkan, agar kedepannya WBS semakin efektif.

OVERVIEW ON WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) IMPLEMENTATION AND BOARD OF COMMISSIONERS ROLES ON IT

The effectiveness implementation of a whistleblowing system (WBS) is also a major concern of the Board of Commissioners. The Company has a Whistleblowing System that has function as a means of preventing and disclosing violations or fraud in the Company.

The view of the Board of Commissioners on the implementation of the Whistleblowing System (WBS) in the Company, We considers that the WBS implementation in the Company has been well implemented. In addition, the Board of Commissioners also provided directions so that the effectiveness of the WBS implementation should be improved, so that the WBS would be more effective in the future.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Salah satu cara Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi adalah dengan mengadakan Rapat Gabungan secara berkala dengan Direksi. Pelaksanaan rapat gabungan ini juga merupakan bentuk kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur tentang pelaksanaan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 4 (empat) bulan.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 13 kali. Dalam agenda rapat tersebut, Dewan Komisaris dapat mengetahui secara jelas terkait segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan, seperti strategi bisnis, rencana usaha hingga kendala yang dihadapi Perseroan selama menjalankan kegiatan bisnis. Kami memberikan rekomendasi-rekomendasi dan arahan kepada Direksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris.

FREQUENCY AND THE WAY WE GIVE ADVICE TO THE BOD

One of the ways for the Board of Commissioners performing its supervisory function on the Board of Directors performance is by holding regular Joint Meetings with the Board of Directors. The joint meeting is also a form of the Company's compliance with OJK Regulation No.33/ POJK.04/2014 concerning The Board of Commissioners and Directors of Issuers or Public Companies which regulates the implementation of joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Throughout 2020, the Board of Commissioners has conducted 13 times joint meetings with the Board of Directors. In the meeting agenda, the Board of Commissioners could get a clear understanding about all issues related to company's management activities, such as business strategies, business plans, and challenges that they encountered while managing its business activities. We provide recommendations and directions to the Board of Directors in accordance to duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2020, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris yang tertuang pada Akta Notaris Ida Adiningsih. SH No 2 tanggal 9 November 2020 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 November 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0405631 tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisaris PT PELNI (Persero).

Susunan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tahun buku 2020 sebelum terjadi perubahan susunan komposisi:

Komisaris Utama President Commissioner	Ali Masykur Musa
Komisaris Independen Independent Commissioner	Johanes Widodo Hario Mumpuni
Komisaris Commissioner	Danang Parikesit
Komisaris Commissioner	Loto Srinaita Ginting
Komisaris Commissioner	Haryo Indratno
Komisaris Commissioner	Wahju Adji Herpriarsono

Susunan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tahun buku 2020 setelah terjadi perubahan susunan komposisi adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama President Commissioner	Ali Masykur Musa
Komisaris Independen Independent Commissioner	Kristia Budiarto
Komisaris Commissioner	Wahju Adjie Herpriarsono
Komisaris Commissioner	Haryo Indratno
Komisaris Commissioner	Eddy Susanto Soepadmo
Komisaris Commissioner	Iwan Taufiq Purwanto

CHANGES IN COMPOSITION OF BOC AND ITS REASONS

In 2020, there were changes in the composition of Board of Commissioners which based on the Notary Deed of Ida Adiningsih. SH No. 2 dated November 9, 2020 whose notification has been received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated November 10, 2020 Number AHU-AH.01.03-0405631 concerning Dismissal and Appointment of Commissioners of PT PELNI (Persero).

The composition of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) for 2020 before changes in the composition are:

The composition of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) for 2020 after changes in the composition are:

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Diharapkan melalui perubahan anggota Dewan Komisaris ini dapat membantu Direksi dalam meningkatkan pertumbuhan kinerja dan mempercepat terwujudnya visi Perseroan. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Johanes Widodo Hario Mumpuni, Bapak Danang Parikesit dan Ibu Loto Srinaita Ginting atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

Hopefully, this changes in composition of the Board of Commissioners can assist the Board of Directors in increasing the growth and hastening the creation of the Company's vision. We sincerely commended Mr. Johanes Widodo Hario Mumpuni, Mr. Danang parikesit and Mrs. Loto Srinaita Ginting for their contribution as long as they served as the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

APRESIASI

Mewakili Dewan Komisaris, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham dan pemangku kepentingan kepada PT PELNI (Persero). Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh jajaran manajemen serta insan PELNI, berkat dedikasi dan kerja kerasnya sehingga Perseroan berhasil melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dan mencatatkan kinerja yang baik.

APPRECIATION

On behalf of the Board of Commissioners, I express our gratitude for the support and trust given by shareholders and stakeholders to PT PELNI (Persero). We also express our appreciation to the the Board of Directors and all level of management and insan PELNI. We thank to their dedication and hard work, so the Company can get through the challenging year of 2020 and recorded good performance.

Atas nama Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
On behalf of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero)



Ali Masykur Musa
Komisaris Utama
President Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Ali Masykur Musa
Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
58 tahun per 31 Desember 2020
58 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Tulungagung, 12 September 1962
Tulungagung, September 12, 1962

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN No. SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
Appointed as a President Commissioner based on the Letter of Decision of the Ministry of State-owned Enterprises No. SK-234/MBU/10/2019 dated on 17 October 2019.

Masa Jabatan | Term of Serving
2019–Sekarang
2019–Present

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2010 — Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta
  Bachelor of Law Faculty, Sahid University, Jakarta
- 2009 — Magister Hukum Bisnis di UGM, Yogyakarta
  Master Degree of Business Law at Gadjah Mada University, Yogyakarta
- 2007 — Doktor Manajemen Pendidikan Studi Kebijakan dan Politik Anggaran, UNJ
  Management Education Budget Policy and Politics Studies, State University of Jakarta
- 1998 — Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia
  Master of Political Science at the University of Indonesia
- 1988 — *Study internship* "Metode Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional", PAU Universitas Indonesia
  Internship Study "Methods of International Relations and International Political Economy", PAU University of Indonesia
- 1987 — *Study internship* tentang "Studi Kawasan", PAU Universitas Gajah Mada
  Internship study "Regional Studies", PAU Gajah Mada University
- 1986 — Sarjana FISIP Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember
  Bachelor of Social and Political Sciences, International Relations, University of Jember

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2019 — Komisaris Utama PT Reasuransi Indonesia Utama
  President Commissioner at PT Reasuransi Indonesia Utama
- 2014–2019 — Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI
  Member of the People's Consultative Assembly (MPR) Study Institute, Republic of Indonesia
- 2013–2016 — Ketua Komite Pelaksanaan INTOSAI WGEA di BPK RI
  Head of INTOSAI WGEA Implementation Committee at Indonesian Supreme Audit Institution (BPK), Republic of Indonesia
- 2009–2014 — Anggota IV BPK RI
  Member IV at Indonesian Supreme Audit Institution (BPK), Republic of Indonesia
- 2006–2009 — Anggota Komisi XI DPR-RI
  Member of XI Commission at The People's Representative Council (DPR), Republic of Indonesia

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Wahju Adji Herpriarsono
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
55 tahun per 31 Desember 2020
55 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Purbalingga, 22 Oktober 1965
Purbalingga, 22 October 1965

Domisili | Domicile
Bekasi, Indonesia
Bekasi, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN No.SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
Appointed as a Commissioner based on the Letter of Decision of the Ministry of State-owned Enterprises No.SK-234/MBU/10/2019 dated on 17 October 2019.

Masa Jabatan | Term of Serving
2019–Sekarang
2019–Present

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 1998 — Magister Hukum Maritim dan Hukum Transportasi, Universite Aix-Marseille
  Masters in Maritime Law and Transportation Law, Universite Aix-Marseille
- 1990 — Sarjana Jurusan Hukum, UNTAG, Semarang
  Bachelor of Law, UNTAG, Semarang

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2017 — Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
  Head of the Legal Secretariat General of the Ministry of Transportation
- 2015–2017 — Kepala Biro Hukum dan Organisasi di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  Head of Legal and Organizational Bureau at Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG)
- 2013–2015 — Inspektur di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  Inspector at Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG)
- 2009–2013 — Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  Head of Regulations and Legal Aid at Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Anggota Kebijakan Risiko
Member of Risk Policy Committee

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Haryo Indratno
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
51 tahun per 31 Desember 2020
51 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Surakarta, 9 April 1969
Surakarta, 9 April 1969

Domisili | Domicile
Bekasi, Indonesia
Bekasi, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN No.SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
Appointed as a Commissioner based on the Letter of Decision of the Ministry of State-owned Enterprises No.SK-234/MBU/10/2019 dated on 17 October 2019.

Masa Jabatan | Term of Serving
2019–Sekarang
2019–Present

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2008 — Magister Manajemen Keuangan, Universitas Bhayangkara, Jakarta
  Masters in Financial Management, Bhayangkara University, Jakarta
- 1995 — Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Slamet Riyadi
  Bachelor of Economic Management, Universitas Slamet Riyadi

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2018–Sekarang / 2018–Present — Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Ib
  Indonesian Aviation Navigation Services, Head of Energy, Logistics, Regional and Tourism Business Ib
- 2014–2019 — Anggota Dewan Pengawas Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
  Member of the Supervisory Board of the Indonesian Public Aviation Navigation Service Provider
- 2012–2014 — Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan
  Commissioner at PT Perkebunan Mitra Ogan
- 2011–2013 — Sekretaris Dewan Komisaris Perum Jasa Tirta I
  Secretary of the Board of Commissioners at Perum Jasa Tirta I
- 2008–2013 — Sekretaris Dewan Komisaris PT Len Industri (Persero)
  Secretary of the Board of Commissioners at PT Len Industri (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
- Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Ib
  Indonesian Aviation Navigation Services, Head of Energy, Logistics, Regional and Tourism Business Ib
- Anggota Komite Audit Perseroan
  Member of Audit Committee of the Company

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Eddy Susanto Soepadmo
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
61 tahun per 31 Desember 2020
61 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Madiun, 26 Januari 1959
Madiun, 26 January 1959

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN No.SK-84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020.
Appointed as a Commissioner based on the Letter of Decision of the Ministry of State-owned Enterprises No. SK-84/MBU/03/2020 dated on 19 March 2020.

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2003 — S1 Ekonomi Universitas Indonesia
  Bachelor of Economics, Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2018 — *Special Advisor to the chief of Staff, Executive Office of the President Repiblic of indonesia*
  Special Advisor to the chief of Staff, Executive Office of the President Repiblic of indonesia
- 2016 — *Advisior, E bus Technology Innovation*
  Advisior, E bus Technology Innovation
- 2015 — *Deputy Secretary General of Innovation to the* Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
  Deputy Secretary General of Innovation to the Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
- 2015 — *Advisior, Agricultural Technology Innovation*
  Advisior, Agricultural Technology Innovation
- 2014 — *Program Director to the* Planet Inovasi Indonesia
  Program Director to the Planet Inovasi Indonesia
- 2013–2015 — *Special Advisor to the Commander of the National Armed Forces*
  Special Advisor to the Commander of the National Armed Forces

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
52 tahun per 31 Desember 2020
52 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place DOB
Magelang, 7 Juni 1958
Magelang, 7 June 1958

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN No. SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020.
Appointed as a Commissioner based on the Letter of Decision of the Ministry of State-owned Enterprises No. SK-354/MBU/11/2020 dated on 2 November 2020.

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 1999 — Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Nanzan University Nagoya, Jepang
  Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Nanzan University Nagoya, Jepang
- 1996 — Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta
  Bachelor Degree of Economy, Economic Faculty, Accounting Major, Indonesia University, Jakarta

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2020–Sekarang / 2020–Present — Ketua Komite Audit PT PELNI (Persero)
  Head of Audit Committee of PT PELNI (Persero)
- 2020 — Deputi Kepala BPKP
  Deputy of BPKP
- 2019 — Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan SDM & Kebudayaan
  Director of Talent Development & Culture
- 2017 — Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial & Keamanan Lainnya
  Director of Government Institutions Supervision for Political, Social & Security Other
- 2016 — Kepala Pusat Informasi Pengawasan
  Head of Information Center Supervision
- 2015 — Kepala Perwakilan, BPKP Prov. Gorontalo
  Branch Manager, BPKP Gorontalo

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
- Ketua Komite Audit
  Head of Audit Committee
- Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
  Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Kristia Budiyarto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
42 tahun per 31 Desember 2020
42 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Cirebon, 17 Januari 1978
Cirebon, 17 January 1978

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN No. SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020.
Appointed as an Independent Commissioner based on the Letter of Decision of the Ministry of State-owned Enterprises No. SK-354/MBU/11/2020 dated on 2 November 2020.

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2002 — S1 FIKOM Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan
  Bachelor of Communication, Faculty of Communication Science, Universitas Hasanuddin, South Sulawesi

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2019 — Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin (Koordinator Sosial Media)
  National Team Campaign Jokowi-Ma'ruf Amin (Social Media Coordinator)
- 2017–2019 — Tim Media & Sosial Media dibawah Stafsus Kemenko Perekonomian Darmin Nasution
  Media & Social Media Team under Special Staff Coordinating Minister for Economics Darmin Nasution
- 2014–2018 — *Media Planner/Social Media Analysis PT-G Indonesia, Asia Pulp Paper (APP) (Group Sinar Mas) & MRC (Media Group)*
  Media Planner/Social Media Analysis PT-G Indonesia, Asia Pulp Paper (APP) (Group Sinar Mas) & MRC (Media Group)
- 2014 — Koordinator War Room Tim Media Social Jokowi-Jusuf Kalla (Jasmev)
  War Room Social Media Coordinating Team Jokowi-Jusuf Kalla (Jasmev)
- 2012–2013 — *General Manager E-Commerce PT Planet Tecno, Jakarta (Makanja.com/Online Store)*
  General Manager E-Commerce PT Planet Tecno, Jakarta (Makanja.com/Online Store)
- 2009–2011 — Direktur Operational Jaringan Etnikom Bens Radio Jakarta (Jakarta, Bandung, Cirebon, Batam, Baturaja, Kayuagung, Banten)
  Operational Director of Bens Radio Etnikom Network Jakarta (Jakarta, Bandung, Cirebon, Batam, Baturaja, Kayuagung, Banten).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT



01
Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Director

02
Olih Masolich Sodikin
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Transportation Business

03
Yahya Kuncoro
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut
Director of Freight Cargo and Sea Toll Business

04
Robert MP Sinaga
Direktur Armada dan Teknik
Director of Fleet and Engineering

05
Ony Suprihartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

06
Ganefi
Direktur SDM dan Umum
Director of HR and General Affairs

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melalui tahun 2020 dengan baik, walaupun penuh tantangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Suatu kehormatan bagi saya atas nama Direksi untuk menyajikan Laporan Tahunan PT PELNI (Persero) untuk tahun buku 2020.

Laporan Tahunan ini kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud dari pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada pemegang saham, regulator, pemangku kepentingan, serta publik pada umumnya.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Sepanjang tahun 2020, kondisi perekonomian global mengalami tekanan yang sangat hebat, yaitu akibat dari pandemi Covid-19. Pandemi tersebut telah menggugurkan seluruh asumsi akan perekonomian global dan mengakibatkan perubahan iklim bisnis sebagai akibat dari kebijakan *lockdown* di beberapa negara. Kebijakan *lockdown* di beberapa negara membuat aktivitas ekonomi terhenti sehingga arus perdagangan dunia mengalami penurunan yang sangat tajam karena banyak negara yang menutup akses masuk ke negaranya kecuali untuk barang kebutuhan pokok.

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Kontraksi pada tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75%, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%.

Dear valued shareholders and stakeholders,

Our gratitude and Praise be to the God almighty for his blessing given to all of us so that we were successful in 2020, despite of all challenges due to the impact of Covid-19 pandemic. I am pleased on behalf of my fellow the Board of Directors to present to you PT PELNI (Persero) Annual Report 2020.

We present this Annual Report to all Stakeholders as for our responsibility and disclosing information to Shareholder, Regulator, Stakeholder and Public.

ECONOMIC OVERVIEW

Throughout 2020, global economy condition experienced a great pressure, that is because of Covid-19 pandemic. That pandemic has devastated all assumptions of global economy and lead to changes in business climate as a result of the lockdown policy in several countries. The lockdown policy in several countries has made economy activities stopped so that the flows of world trade have also declined sharply due to many countries closed their entry access, unless for basic needs.

Central Bureau of Statistics reported that economic growth contracted by 2.07%. The contraction in 2020 was the impact of the Covid-19 pandemic that has hit the entire world, including Indonesia. The spatial structure of the Indonesian economy in 2020 was dominated by the group of provinces in Java Island at 58.75%, with economic performance experiencing a growth contraction of 2.51%.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi beberapa negara tahun 2020, tekanan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 termasuk moderat dibandingkan dengan negara anggota G20 dan Asia Tenggara. Sedangkan Uni Eropa, Hong Kong, Singapura dan Amerika Serikat mengalami penurunan yang cukup dalam, meskipun beberapa negara mampu tumbuh positif seperti China 2,3% dan Vietnam 2,9%.

Perlambatan ekonomi global dan dampak negatif di pasar keuangan utama yang disebabkan oleh penyebaran pandemi Covid-19, telah mengakibatkan dampak yang merugikan antara lain merugikan pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis, yang dapat berlanjut dan mengakibatkan keuangan dan operasi perusahaan yang tidak menguntungkan. Kemampuan Indonesia dalam meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian negara, sebagian besar bergantung pada efektifitas kebijakan dan tindakan respon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyebaran Covid-19, sebagaimana serta fiskal dan langkah-langkah lain yang sedang diambil oleh otoritas Pemerintah. Efektivitas kebijakan termasuk tindakan dan peristiwa berada di luar kendali Perusahaan.

Namun demikian, perekonomian dunia tahun 2021 diprediksi akan membaik dengan adanya pengembangan vaksin yang dilakukan oleh beberapa perusahaan farmasi dunia dan beberapa negara sudah mulai membuka kembali akses keluar dan masuk negaranya serta mengijinkan aktivitas ekonomi warganya pada kuartal ketiga tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Based on data on the economic growth of several countries in 2020, Indonesia's economic pressure throughout 2020 was moderate compared to G20 member countries and Southeast Asia. While European Union, Hong Kong, Singapore and the United States experienced a deep decline, although several countries were able to grow positively, such as China 2.3% and Vietnam 2.9%.

The global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of Covid-19, has resulted to adverse effects including adverse in economic growth, decline in capital market, increase in credit risks, depreciation of foreign exchange rates and disruption of business operation. which may continue and result on unfavourable financial and operation of the Company. The ability of Indonesia to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy, is largely depend on the effectiveness of policies and actions responses issued by the Government of Republic of Indonesia on the eradicate the spread of the Covid-19, as well as the fiscal and other measures that are being taken by the Government authorities. The effectiveness of the policy including actions and events are beyond the Company's control.

However, world economy in 2021 is predicted to be better due to development of vaccine that is done by several world pharmaceutical company and many countries have started to open their access in and out of the country as well as allowing economy activities of their citizens on third quarter of 2020 by applying health protocol.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

ANALISA KINERJA TAHUN 2020

PT PELNI (Persero) sebagai salah satu pemain besar dalam industri pelayaran di Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam transportasi laut mengalami dampak yang sangat signifikan dengan adanya pandemi Covid-19, terutama pada kinerja bisnis dan keuangan. Beberapa kondisi yang mempengaruhi dampak signifikan tersebut diantaranya adanya pelarangan mudik Idul Fitri 1441H oleh pemerintah Republik Indonesia mulai tanggal 24 April 2020 sampai 8 Juni 2020 untuk angkutan laut dan pembatasan akses masuk wilayah pada beberapa daerah di Indonesia dengan penutupan pelabuhan. Hal ini menyebabkan sebagian operasional kapal penumpang dan perintis harus terhenti sehingga perusahaan memutuskan untuk memarkirkan di pelabuhan (*port stay*) 20 kapal penumpang dan 21 kapal perintis sepanjang bulan April 2020 sampai Mei 2020. Keputusan Perseroan untuk melaksanakan *port stay* kapal penumpang dan perintis juga dilakukan dalam rangka efisiensi operasional kapal dan rasionalisasi anggaran perusahaan.

Setelah dapat memulai kembali kegiatan operasional perkapalan secara bertahap, Perseroan harus mengikuti syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait pembatasan jumlah penumpang yang diangkut. Selain itu, penutupan sejumlah pelabuhan juga mengurangi potensi terangkutnya penumpang pengguna jasa transportasi angkutan laut. Tercatat selama bulan Desember 2020 terdapat 17 pelabuhan yang masih ditutup.

Untuk segmen usaha non penugasan, seperti perhotelan juga mengalami tekanan yang sama yang mengakibatkan penurunan pendapatan karena jumlah pelanggan/tamu yang datang menurun signifikan. Hal yang sama terjadi pada pengusahaan aset dimana dampak pandemi covid-19 membuat calon mitra menahan investasi untuk sewa properti dan ataupun tidak memperpanjang masa kontrak sewa.

PERFORMANCE ANALYSIS IN 2020

PT PELNI (Persero) as one of the big players in the shipping industry in Indonesia that has a strategic function in sea transportation had experienced a significant impact due to Covid-19 pandemic, especially in its business and financial performance. Some of the conditions that affect this significant impact include the prohibition of travelling as long as Idul Fitri 1441H by the government of the Republic of Indonesia from 24 April 2020 to 8 June 2020 for sea transportation and restrictions on access to territory in several regions in Indonesia with the closure of ports. This caused some passenger and pioneer ship operations to stop, so the company decided to port stay its 20 passenger ships and 21 pioneer ships from April 2020 to May 2020. The Company's decision to carry out port stay for passenger and pioneer ships was also made in the context of ship operational efficiency and rationalization Company budget.

After being able to restart its shipping operation gradually, the Company has to comply to term and condition that is stated on Circular Letter of Chief Task Force Acceleration on Covid-19 and Circular Letter of Directorate General of Maritime Transportation related to limitation of passengers onboard. Other than that, some shutdown of ports have reduced potential passenger who uses sea transportation to be transported. It is recorded that during December 2020 there are 17 ports that are still closed.

For non assignment segment, such as hospitality also had the same pressure that generates a decreased of revenue due to a significant reduction of customers/ guests. The same thing also happened to asset management that made potential partner hold their investment on property rent or not extending their lease contract.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Perseroan telah menerapkan protokol kesehatan, baik di kapal, kantor pusat maupun kantor cabang. Penumpang diwajibkan untuk mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan agar dapat ikut berlayar dengan kapal PT PELNI (Persero). Proses transaksi pembelian tiketpun sudah diharuskan dengan menggunakan *cashless*. Untuk kegiatan operasional di kantor pusat pun sudah menerapkan metode *Work From Home (WFH) & Work From Office (WFO)* yang sudah disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan Perseroan juga telah menyediakan aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang proses-proses kegiatan WFH & WFO.

The Company had applied health protocol onboard the ship, head office and branch. All passengers are required to comply to the terms and conditions so that they may onboard the ships of PT PELNI (Persero). Cashless transactions is required to all ticket purchase transaction. Operational activities in the head office are implementing Work From Home (WFH) & Work From Office (WFO) method that is adjusted according to the assigned schedule. The Company also provide applications to support activities process of WFH & WFO.

Dengan menghadapi semua tantangan akibat adanya pandemi ini, seluruh manajemen PT PELNI (Persero) telah memberikan usaha yang terbaik dan optimal sehingga berhasil mencatatkan kinerja yang cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa target Perseroan yang tidak dapat tercapat dan terjadi penurunan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perseroan mencatatkan volume penggunaan kapal PT PELNI (Persero) secara keseluruhan pada tahun 2020 adalah 1,99 juta penumpang; angkutan barang 76.807 ton/m3; angkutan kontainer 20.633 TEUs; angkutan kendaraan 10.199 unit dan angkutan ternak 6.608 ekor.

In dealing with all of these challenges due to the pandemic, the management of PT PELNI (Persero) has given their best and optimum performance for this outstanding performance. However, the Company still suppressed to achieve some targets and there was a decrease in performance compared to the previous year. The Company recorded the overall sales volume of PT PELNI (Persero) ships in 2020 was 1,99 million passengers; 76.807 ton/m3 cargo; 20.633 TEUs containers; 10.199 vehicles and 6.608 cattles.

Pencapaian dari segi keuangan untuk tahun 2020, Perseroan mencatatkan pendapatan usaha bersih sebesar Rp4,17 triliun, turun 24,85% atau turun senilai Rp1,38 triliun jika dibandingkan dengan pendapatan usaha bersih tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp5,54 triliun. Laba tahun berjalan Perseroan tahun 2020 tercatat sebesar Rp30,97 miliar, turun 82,87% atau turun senilai Rp149,79 miliar jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan tahun 2019.

From financial achievement, The Company managed to record a net income of Rp4.17 trillion, decreased by 24.85% or a decrease of Rp1.38 trillon compared to a net income in 2019 was Rp5.54 trillion. Profit for the year of the Company in 2020 was Rp30.97, decreased by 82.87% or a decrease of Rp149.79 billion compared to profit for the year in 2019.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGI

Direksi menyadari bahwa untuk mencapai kinerja operasional dan keuangan yang baik, diperlukan perencanaan strategis dan upaya-upaya untuk memastikan keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan. Sesuai dengan RJPP Transformasi PT PELNI (Persero), Perseroan memiliki Visi, Misi dan Roadmap tahun 2020 – 2024, yaitu:

STRATEGY AND STRATEGIC POLICY

The Board of Directors are aware to need some strategic plans and efforts that ensures the success of achieving the operating and financial performance targets we set. In line with RJPP Transformation of PT PELNI (Persero), the Company shall have vision, missions and roadmap for 2020-2024, as follows:

VISI 2020 – 2024
VISION 2020 – 2024

"Menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara"

"To Become the Leading Maritime Shipping and Logistics Company in Southeast Asia"

MISI 2020 – 2024
MISSION 2020 – 2024

1. Menjamin aksesibilitas masyarakat dengan mengelola angkutan laut untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara.
2. Mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia Tenggara.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*.
5. Berkontribusi positif terhadap negara dan karyawan, serta berperan aktif dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Ensuring public accessibility by managing sea transportation to support the creation of the Archipelago Insight.
2. Managing and developing maritime logistic business in Indonesia and Southeast Asia.
3. Increasing the Company's value by creativity, innovation, business process digitalization and human resources development to achieve sustainable growth.
4. Conducting fair business with due regards to the principles of benefit for all Stakeholders by applying the principles of good corporate governance.
5. Having positive contribution to the Nation and employees, as well as playing an active role in developing the environment and service for the community.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Roadmap 2020 – 2024

1. **Strategi Pelayanan Umum**
   Agen Pembangunan Bangsa 2020 – 2024
   a. Optimalisasi Konektivitas Kapal
   b. *Operational & Service Excellence*
   c. *Corporate Social Responsibility*

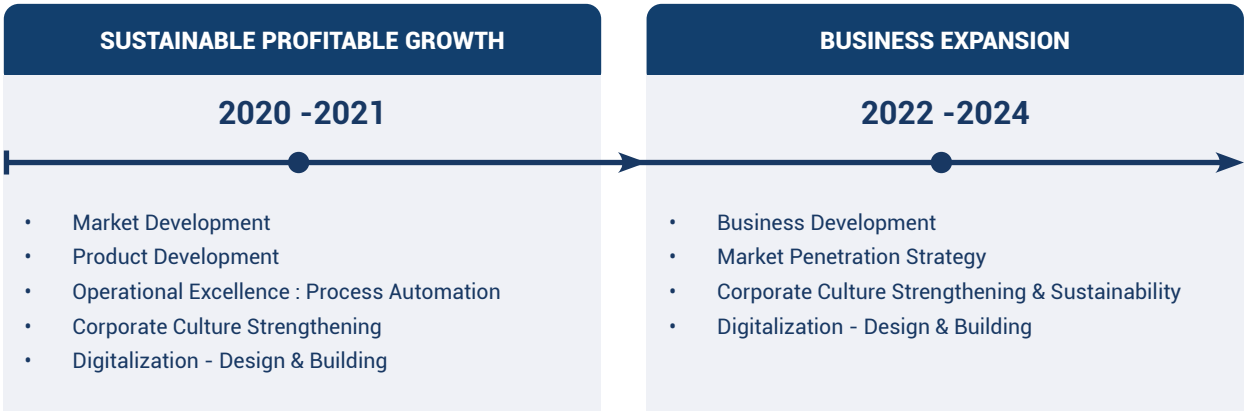
2. **Strategi Komersial**
   Sustainable Profitable Growth 2020 – 2021
   Business Expansion 2022 - 2024

Roadmap 2020 – 2024

1. **General Services Strategy**
   Nation Agent of Change 2020-2024
   a. Optimum Ships Connectivity
   b. Operational and Service Excellence
   c. Corporate Social Responsibility

2. **Commercial Strategy**
   Sustainable Profitable Growth 2020 – 2021
   Business Expansion 2022 – 2024

Roadmap 2020 – 2024
Roadmap 2020 – 2024



PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

Setiap periode operasional, PT (PELNI) Persero melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil operasional yang dicapai pada tahun buku. Ukuran kinerja berdasarkan Target atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi pada akhir tahun anggaran.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION IN 2020

In operational period, PT (PELNI) Persero evaluates the operational results achieved in the financial year. The performance measure is based on the Target or Corporate Work and Budget Plan (RKAP) that set at the beginning of the fiscal year compared to realization at the end of fiscal year.

Comparison between Target and Realization for 2020 can be seen on this following table:

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Uraian Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 Realization 2020	Pencapaian % Achievement %
Operasional | Operational			
Kapal Milik Ships Owned			
Kapal Penumpang Passenger Ship	26	26	100,00%
Kapal Perintis Pioneer Ship	53	53	100,00%
Kapal Ternak Cattle Ship	1	1	100,00%
Kapal Barang Cargo Ship	11	11	100,00%
Kapal Rede Rede Ship	20	20	100,00%
Jumlah Kapal Beroperasi Total Ships Operating	111	111	100,00%
Produksi | Production			
Angkutan Penumpang (orang | persons) Passenger Transport	1.785.555	1.616.854	90,55%
Angkutan Barang (Ton/ M3) Cargo Transport	48.611	76.807	158,00%
Container (Teus) Container	14.782	10.671	72,19%
Kendaraan (unit) Vehicle	6.547	10.199	155,78%
Ternak (ekor | cattle) Cattle	7.920	6.608	83,43%
Efisiensi Operasional | Operational Efficiency			
Commission Day (hari layar | sailing days) Commission Day	14.353	19.372	134,97%
Frekuensi (pelayaran | voyage) Frequency	1.047	1.397	133,43%
Gross Profit Margin (%) Gross Profit Margin	9,88	6,61	66,90%
Net Profit Margin (%) Net Profit Margin	1,00	0,98	98,00%
Keuangan | Financial			
Laba Konsolidasi (Rp juta | Rp million) Consolidated Income	36.864	41.175	111,69%
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio	242,94	461,33	189,89%
Rasio Aktivitas (%) Activity Ratio	52,83	60,24	114,03%
Rasio Leverage (%) Leverage Ratio	12,70	8,39	66,06%
Rasio Solvabilitas (%) Solvability Ratio	1.009,00	1.864,58	184,79%
Rasio Rentabilitas (%) Rentability Ratio	2,66	2,69	101,13%
Kondisi Kesehatan (%) Company's Soundness	Sehat AA	Sehat A	95,00%

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

KENDALA / TANTANGAN DAN LANGKAH PENYELESAIAN

Tantangan terbesar sepanjang tahun 2020 adalah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan berdampak pada hampir seluruh industri bisnis yang ada. Pandemi Covid-19 menciptakan beberapa tantangan, diantaranya: pelarangan mudik Idul Fitri 1441 H oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 24 April 2020 – 9 Juni 2020 untuk angkutan laut; pembatasan akses masuk wilayah pada beberapa daerah di Indonesia dengan dilakukannya penutupan pelabuhan dan menyebabkan sebagian operasi kapal penumpang dan perintis harus berhenti (*post stay*). Sampai dengan Desember 2020, dari 83 pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang masih terdapat 17 pelabuhan yang ditutup/pembatasan kegiatan sementara dan dari 275 pelabuhan yang dilayani oleh kapal perintis, terdapat 37 Pelabuhan Kapal Perintis yang ditutup sementara.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan darat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Darat untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, maka pelayaran kapal penumpang dan perintis per tanggal 1 Juni 2020 telah diijinkan kembali mengangkut penumpang dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19. Kebijakan dengan mewajibkan penumpang melampirkan hasil Rapid/PCR kurang sesuai dengan profil penumpang PT PELNI (Persero) yang sebagian besar adalah kategori keuangan menengah ke bawah.

OBSTACLES / CHALLENGES AND ITS SOLUTION

The biggest challenge during 2020 was the ongoing of Covid-19 pandemic and impacting on across industries in the Nation. This Covid-19 pandemic has emerged some new challenges, among others: homecoming prohibition of Ied al-Fitr 1441 H issued by the Government of Republic of Indonesia during 24 April 2020 – 9 June 2020 for sea transportation; mobility restriction in some regions in Indonesia by closing the port access and causing the post stay for passenger and pioneer ships operation. By December 2020, there were 17 ports still closed/ applying mobility restriction from 83 ports stopped by passenger ships and 37 ports were closed from 275 ports served by pioneer ships.

Based on the Letter of General Derectorate of Land Transportation Number 9 of year 2020 regarding Land Transportation Manual for People Mobility Restriction in order to handle the spread of Covid-19 pandemic outbreak. Thus, passenger and feeder ships operation as of 1 June 2020 have had permission to transport the passenger by applying strict health protocol based on the Circular Letter of the Task Force for the Acceleration of COVID-19 Handling Number 7 of year 2020 regarding Criteria and Requirements for People Mobility in New Normal Situation for the Productive Community and Covid-19 Free. This regulation has not fitted for some passengers of PT PELNI (Persero) due to the middle lower-class passenger must be completed by Rapid/PCR test to travel.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Namun demikian, Perseroan telah melakukan beberapa langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang ada, diantaranya: omisi/deviasi rute dengan memaksimalkan pengangkutan barang dan logistik di wilayah yang tidak melakukan pembatasan akses (penutupan pelabuhan); memasang sekat diantara tempat duduk penumpang untuk menghindari kontak antar penumpang; secara bertahap pembayaran pembelian tiket dilakukan secara *cashless; go live aplikasi Mycargoo!* diberlakukan secara bertahap di kapal Penumpang, dengan tarif angkutan *dry container* dan *reefer container;* menetapkan dan menjalankan prosedur operasi standar layanan penjualan tiket kapal penumpang pada masa pandemi Covid-19, seperti penggunaan alat pelindung diri, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan pemeriksaan suhu tubuh.

However, the Company has taken some strategic steps to overcome the challenges, as follows: route omission/deviation through maximizing cargo and logistic carrier to the open ports/unrestricted mobility access (port close); Installing partition between passenger seats to prevent the passenger making contacts; ticket purchasing gradually via cashless; go live Mycargoo! Application gradually installed to passenger ships, dry container and reefer container tariff, establishing and applying ticketing service procedures in the Covid-19 pandemic era such as wearing personal protective equipment, wearing mask, washing hands, physical distancing and temperature check.

PROSPEK USAHA TAHUN 2021

Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 tumbuh 4,5%. Pemulihan ekonomi Indonesia diproyeksikan masih akan terganjal pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih ada di Indonesia. Pemulihan ekonomi Indonesia nantinya akan didorong oleh prospek pemulihan konsumsi swasta, juga disokong oleh keyakinan konsumen yang akan kembali pada zona optimistis.

Pemulihan juga akan didorong oleh membaiknya sentimen bisnis yang merupakan hasil dari reformasi iklim investasi, termasuk dengan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan juga akan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang bisa semakin membaik.

Sementara versi Pemerintah, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diprediksi bertumbuh dikisaran 4,5%-5,3%. Untuk memulihkan ekonomi, otoritas fiskal telah menganggarkan dana sebesar Rp619,83 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang dialokasikan.

BUSINESS PROSPECT FOR 2021

Asian Development Bank (ADB) projects that Indonesia economic growth in 2021 will grow by 4.5%. Despite, Indonesia economic recovery projected to be stuck due to Covid-19 pandemic that is still spreading in Indonesia. This Indonesia economic recovery will be optimist driven by the household consumptions recovery and customers' trust.

This recovery will bring good sentiment as reforming investment climate, including Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement and a preferable export performance will also have a good impact.

The Government predicts that economic growth in 2020 will be at 4.5%-5.3%. To recover this economic condition, fiscal authorities has arranged Rp 619.83 trillion for National Economic Recovery program (PEN) 2021 allocated.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Bidang transportasi adalah salah satu bisnis yang terdampak besar atas pandemi ini. Dampak tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi pemerintah yang mengedepankan protokol kesehatan dalam bepergian, namun perilaku konsumen yang burubah juga turut berkontribusi dalam menurunkan jumlah angkutan transportasi. Kondisi ini mendorong mayoritas perusahaan untuk mempertimbangkan kembali strategi jangka panjangnya kedepan.

Transportation sector is one of business sector that is impacted by this pandemic. That impact is not only affected by government regulation which is prioritizing health protocol when travelling, but also the changes in consumers behavior which contributes on weakening the amount of transportation demand. This condition made many companies to take into further consideration their long tem strategy.

Strategi Tahun 2021

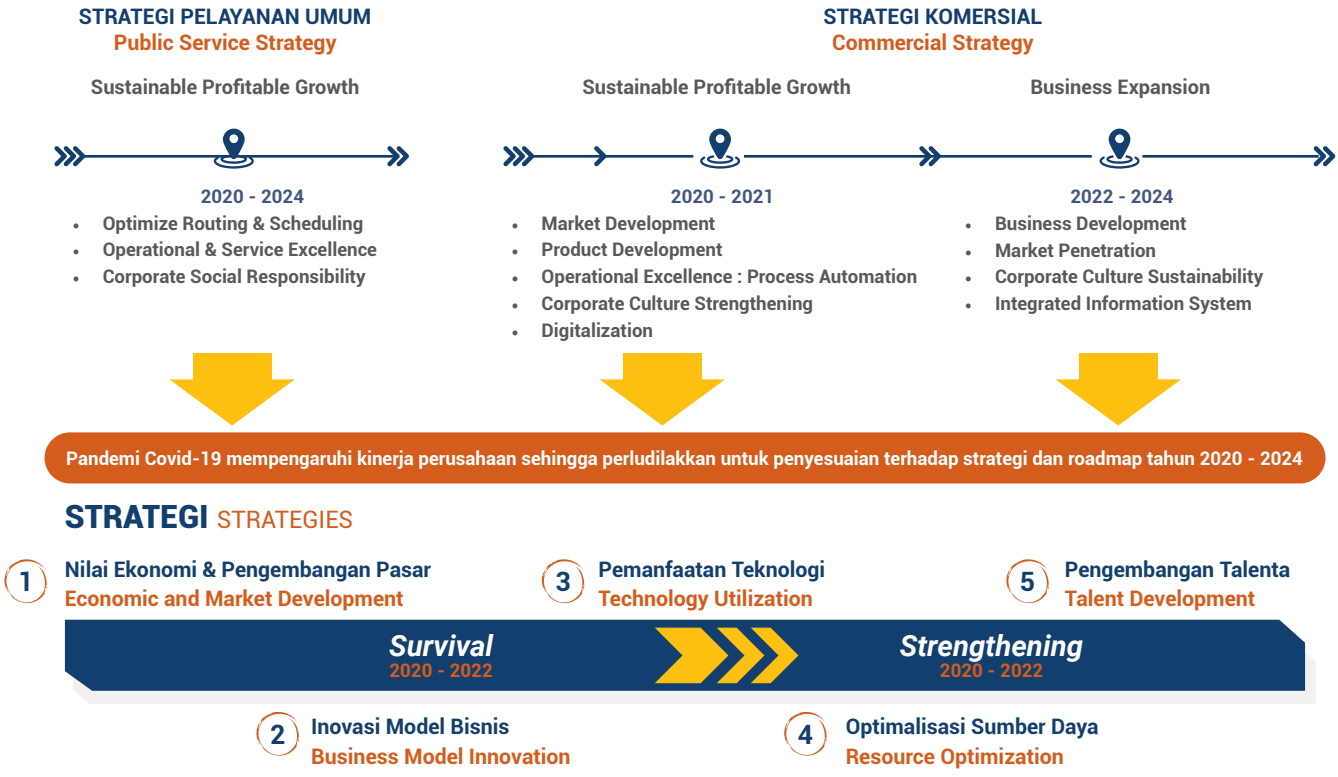
Sebagai salah satu perusahaan angkutan laut terbesar di Indonesia yang ikut terdampak Pandemi COVID-19, PT PELNI (Persero) telah mengevaluasi strategi jangka panjangnya. Strategi PT PELNI (Persero) yang baru juga telah mempertimbangkan 5 Agenda Prioritas Kementerian BUMN yang terdiri dari Nilai Ekonomi & Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, & Pengembangan Talenta.

Strategy for 2021

As one of the biggest sea transportation providers in Indonesia impacted by the Covid-19 pandemic, PT PELNI (Persero) has evaluated the long-terms plan. PT PELNI (Persero) new strategies have considered 5 priority agendas of Ministry of SOE consisted of Social & Economic values for Indonesia, Business Model Innovation, Leading Technology, Increase in Investment & Talent Development.

Strategi yang dilakukan PT PELNI (Persero) digambarkan sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) strategy can be described below:



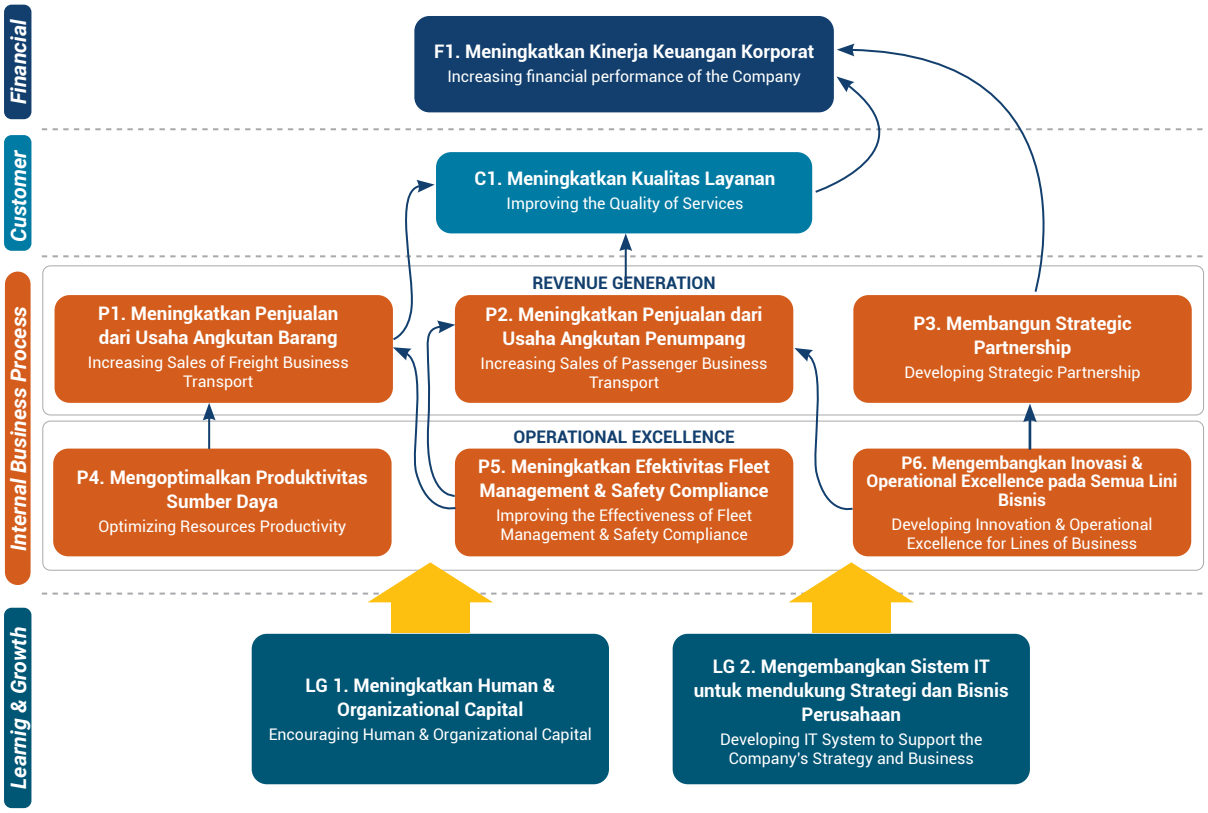
LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Pada Tahun 2021 PT PELNI (Persero) akan memasuki tahap *recovery* atas dampak Pandemi Covid-19. Pada aspek Finansial, sasaran strategis Perusahaan akan mengutamakan kelangsungan usaha dan kesehatan keuangan perusahaan yaitu "Menjaga Kondisi Kinerja Keuangan Korporat" dan "Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan". Sehingga diharapkan PT PELNI (Persero) dapat mengatasi tantangan bisnis pada masa *recovery* atas dampak pandemi Covid-19, dan ke depannya dapat terus tumbuh secara berkesinambungan.

Untuk menunjang tercapainya sasaran strategis pada aspek finansial, beberapa sasaran strategis dibawahnya yang telah diselaraskan dengan strategi Perusahaan yang fokus pada: pengembangan pasar, inovasi, pemanfaatan teknologi, optimalisasi aset, serta pengembangan SDM. Adapun Sasaran Strategis Perusahaan yang akan diterapkan pada Tahun 2021 tertuang dalam Pemetaan Strategi berbasis *Balanced Scorecard* sebagai berikut:

In 2021, PT PELNI (Persero) will enter to recovery phase due to the impact of Covid-19 pandemic. For financial aspect, PT PELNI (Persero) strategic target focuses on the ongoing business and financial soundness of the Company which is "Maintaining Corporate Financial Performance Conditions" and "Increasing Revenue Growth". By doing so, PT PELNI (Persero) is able to face the business challenges during recovery phase due to the impact of Covid-19 pandemic and will keep growing sustainably for the years to come.

To pursue this strategic aspect in financial aspect, some supporting strategic aspects must be in line with the Company main strategy that focuses on: market development, innovation, use of technology, asset optimalization, as well as HR development. This following strategy will be implemented in 2021 as stated in Balanced Scorecard base Strategy Mapping:



LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

9 Transform Actions to Drive Growth

1. Mengembangkan portofolio bisnis utama perusahaan yang fokus pada bisnis pelayanan penumpang, pelayaran barang, logistik dan perdagangan.
2. Melakukan *strategic partnership* dan sinergi antar entitas untuk mengoptimasi perolehan pendapatan dan menyediakan layanan dengan biaya yang efisien.
3. Meningkatkan skala bisnis perusahaan melalui market *penetration* yang agresif.
4. Melakukan ekspansi bisnis yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan wilayah Asia Tenggara.
5. Melakukan *operational excellence* di seluruh unit bisnis dan unit pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja.
6. Meningkatkan standar pelayanan dalam memberikan *service excellence* kepada pelanggan.
7. Melakukan transformasi digital secara efektif dan menyeluruh.
8. Membangun PELNI menjadi *Hi-Performance and People's Choice Company.*
9. Mengembangkan SDM yang kompeten, professional, dan memiliki digital *leadership* melalui program pengembangan *talent* serta penguatan budaya dan nilai utama perusahaan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

Kami meyakini bahwa pengembangan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja dan pencitraan perusahaan yang baik. Penerapan GCG di PT PELNI (Persero) dilakukan pada semua level organisasi dengan mengacu pada aturan dan ketentuan terkait penerapan GCG untuk perusahaan.

9 Transform Actions to Drive Growth

1. Developing core business portfolio of the Company that focuses of passenger, cargo, logistic transport businesses and trading.
2. Strategic partnership and entity synergi to optimize the income and provide excellent services with an efficient cost.
3. Increasing business scale of the Company by aggressive market penetration.
4. Busineness expansion to reach entire Indonesia and South-east Asia areas.
5. Operational excellence for business unit and supporting unit is to improve work process to be more efficient and effective.
6. Increasing service standards in providing service excellence for the customer.
7. Effective and comprehensive digital transformation.
8. Building PELNI to be Hi-Performance and People's Choice Company.
9. Developing competent, professional and digital leadership human resources through talent development, culture streghthening and core velues of the Company.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

We believe that the development and implementation of good corporate governance (GCG) is to be our highest commitment in aming for the business success and accountability in the long-term that is expected to increase the value of the company for the outstanding performance and good corporate image. This implementation of GCG within PT PELNI (Persero) applies to all level of organization based on the rules and regulations related to the implementation of GCG for companies.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Komitmen PT PELNI (Persero) terhadap implementasi GCG direalisasikan melalui pembentukan organ-organ Perseroan sesuai dengan kaidah dan landasan GCG di Indonesia baik Organ Utama seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi maupun Organ Pendukung seperti komite-komite, Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan *Whistleblowing System (WBS)*.

Pada tahun 2020, PT PELNI (Persero) telah melakukan *assessment* terhadap penerapan GCG dalam lingkungan Perseroan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan *assessment* penerapan praktik-praktik GCG yang dilakukan, disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) mencapai skor 84,401 dan skor maksimal 100,00 dengan predikat "Baik".

Selain melalui *assessment* GCG, Perseroan juga telah melaksanakan evaluasi berdasarkan *Key Performance Indicators (KPI)* yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi Perseroan, yang terdiri dari terdiri dari 5 (lima) perspektif, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi dan Pengembangan Talenta. Skor KPI yang diperoleh untuk tahun 2020 adalah 91,40.

Segenap Manajemen dan Insan PELNI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perseroan dan mencapai skor evaluasi penerapan GCG yang semakin baik di masa yang akan datang.

Commitment of PT PELNI (Persero) in implementing GCG is done through the formation of the Company's organs in accordance with the principles and foundation of GCG in Indonesia, both Main Organs such as the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Directors or Supporting Organ such as committees, Corporate Secretary, Internal Audit and Whistle Blowing System (WBS).

In 2020, PT PELNI (Persero) has conducted an assessment on the implementation of GCG within the Company environment by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). Based on GCG assessment can be concluded that the GCG condition within PT PELNI (Persero) managed to record 84.401 gcg score with "Good" predicate from the maximum score of 100.00.

Despite of GCG Assessment, the Company has also conducted the evaluations based on Key Performance Indicators (KPI) used to measure the performance of Board of Directors consisting of 5 (five) perspectives, which are Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Development and Talent Development. The KPI score obtained in 2020 was 91.40.

All of Management and Insan PELNI are committed to continuously improving the quality of Good Corporate Governance in the Company and achieving better evaluation scores on GCG implementation in the future.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di PT PELNI (Persero) merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tanggal 03 Juli 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT PELNI (Persero) percaya bahwa implementasi CSR dalam jangka panjang akan memberikan banyak manfaat bagi Perusahaan, terutama pada aspek peningkatan kepercayaan, menciptakan harmoni dan meningkatkan reputasi yang pada akhirnya memiliki implikasi untuk menciptakan nilai tambah yang mendorong stabilitas dan pertumbuhan bisnis yang lancar.

Kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat dalam program Kemitraan dan Bina Lingkungan terus dilakukan PT PELNI (Persero) secara berkesinambungan. Program-program ini difokuskan pada bidang pendidikan, sarana dan prasarana umum, bantuan bencana alam, serta upaya-upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup. Pada tahun 2020, PT PELNI (Persero) menyalurkan dana pinjaman mitra binaan sebesar Rp1,79 miliar dan menyalurkan dana bina lingkungan sebesar Rp2,85 miliar.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup

PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap lingkungan hidup dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan maupun kegiatan manusia pada umumnya. Komitmen Perusahaan untuk tetap menjaga

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The policy of implementing Corporate Social Responsibility (CSR) at PT PELNI (Persero) refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2016 dated July 3, 2016 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program and have the latest changes in accordance with Minister of State Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/07/2017 July 5, 2017 concerning the Second Amendment to SOE Ministry Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership Program and Community Development Program.

Through activities of Corporate Social Responsibility, PT PELNI (Persero) believes that the implementation of CSR in the long term will provide many benefits for the Company, especially in the aspect of increasing trust, creating harmony and enhancing reputation which ultimately has implications for creating added value that driving stability and smooth business growth.

Community development activities in Partnership and Community Development Programs are done by PT PELNI (Persero) as an ongoing basis. These programs focused on education, public infrastructure and facilities, natural disaster assistance, as well as nature and environment conservation. In 2020, PT PELNI (Persero) distributed Rp1.79 billon loan to its fostered partners and distributed Rp2.85 billion funds for community development.

Corporate Social Responsibility on Environment

PT PELNI (Persero) is committed to carrying out corporate social responsibility on the environment in order to reduce the environmental impact of the Company and human activities in general. The Company's commitment is to conserve and maintain

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

dan mempertahankan sekaligus pelestarian lingkungan merujuk pada dokumen Kedinasan di lingkungan PT PELNI (Persero) No. 01/HK.02.01/Dir.SDM dan Umum/VII/2013. Selain itu PT PELNI (Persero) juga memiliki Surat Edaran No. 07/SE/Dir.SDM dan UM/VI.2013.

Program tanggung jawab terhadap lingkungan PT PELNI (Persero) bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai bagian dari program efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi laut, PT PELNI (Persero) menyadari bahwa ekosistem laut juga menjadi factor keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pada tahun 2020, PT PELNI (Persero) kembali memberikan kontribusi dalam melestarikan lingkungan laut dengan membangun 1 unit struktur *artificial reef* yang diberi nama *Domus Coronarius Circularis* dengan ukuran 15x5x3 meter untuk revitalisasi (penanaman kembali) terumbu karang di Pantai Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT PELNI (Persero) bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan setiap karyawannya dan juga menjamin kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan mulai dari tahap perekrutan, pengembangan karir hingga evaluasi kinerja. PT PELNI (Persero) tidak mengakui adanya diskriminasi berdasarkan *gender* maupun karakter lain seperti agama maupun etnis dimana kebijakan dan keputusan dalam aspek ketenagakerjaan sepenuhnya mempertimbangkan kinerja pegawai yang bersangkutan. Praktik kesetaraan gender di PT PELNI (Persero) juga tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 05.23/05/SK/HKO.01/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pendidikan & Pelatihan di PT PELNI (Persero).

environmental preservation at the same time referring to the official documents within PT PELNI (Persero) No. 01/HK.02.01/Dir.SDM dan Umum/VII/2013. In addition, PT PELNI (Persero) also has Circular Letter No. 07/SE/Dir.SDM and UM/VI.2013.

PT PELNI (Persero) responsibility program to the environment aims to create an environmental friendly of work atmosphere to preserve the environment as well as part of a sustainable resource efficiency program.

As a company engaging in sea transportation, PT PELNI (Persero) realizes that marine ecosystems are also a long-term business sustainability factor. In 2020, PT PELNI (Persero) contributed to preserving the marine environment by making artificial reef structure that called Domus Coronarius Circularis with the size of 15x5x3 meters for revitalization of coral reef in Pantai Bangsring, Banyuwangi, East Java.

Corporate Social Responsibility on Occupational, Health and Safety

PT PELNI (Persero) is responsible to occupational, health and safety, and the welfare of every employee and always guarantees equal equality and job opportunities for all employees from the recruitment phase, career development until performance evaluation. PT PELNI (Persero) does not recognize discrimination based on gender or other characters such as religion or ethnicity where labor policy and decisions fully considering the performance of the employee concerned. The practice of gender equality at PT PELNI (Persero) is also listed in Directors Decree No. 05.23/05/SK/HKO.01/2019 concerning Standard Operational Procedure of Employee Education and Training at PT PELNI (Persero).

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja, program peningkatan kualitas dan profesionalisme, evaluasi kinerja, serta program kesejahteraan dilakukan oleh Perusahaan secara rutin sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja adalah melakukan Inspeksi dan Sosialisasi SMK3-LH terhadap Kantor PT PELNI (Persero) Pusat dan cabang.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

PT PELNI (Persero) menyadari keberlangsungan bisnis Perusahaan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pencapaian kinerja Perusahaan, menuntut Perseroan untuk memberikan imbal balik manfaat kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat sebagai bentuk tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, implementasi tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Sepanjang tahun 2020 Perseroan telah merealisasikan program kemitraan dan Bina Lingkungan. Penyaluran dana Kemitraan dilaksanakan di 5 provinsi yaitu: DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Lampung. Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dalam bentuk pinjaman modal usaha sampai dengan akhir Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp1,79 miliar atau 80,27% dari anggaran 2020 sebesar Rp2,23 miliar sedangkan pembinaan mitra binaan di tahun 2020 sebesar Rp98,99 juta. Sumber dana Bina Lingkungan berasal dari alokasi dana dari BUMN Pembina (biaya) dengan total keseluruhan Rp2,85 miliar dan untuk penyaluran di tahun 2020 terealisasi 100% dalam bentuk pemberian sumbangan/bantuan korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan untuk penanggulangan wabah Covid-19, pembangunan dan renovasi sarana ibadah, pelestarian alam dan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Some of various occupational safety and health programs, quality and professionalism improvement programs, performance evaluations, and welfare programs are carried out regularly by the Company as in the previous years. One form of corporate responsibility in terms of occupational health and safety is conducting an inspection and socialization of SMK3-LH in the Headquarter and branches of PT PELNI (Persero).

Corporate Social Responsibility on Social and Community Development

PT PELNI (Persero) realizes that the business sustainability and community are inseparable part to many years. Participation and support from the community genuinely contribute to the Company's performance target, which enable the Company to always give more shared values for the community. This can be seen as a form of social and community responsibility of the Company. As a State-owned enterprise, this social and community development includes Partnerships and community development program (PKBL).

During 2020, the Company has distributed the cost for partnership and community development program in 5 provinces, among others: DKI, West Java, Banten and Lampung. This loan disburstment to the partners in the form of business capital loans until the end of December 2020 was Rp1.79 billion or 80,27% from the 2020 budget was Rp2.23 billion, whereas the development program in 2020 was Rp98.99 million. This source of community development funds was allocation funds from SOE (cost) in total of Rp2.85 billion and its distribution in 2020 was 100% achieved in the form of natural disaster assistance, education, health assistance for handling the Covid-19 outbreak, worship building and renovation, nature conservation and social community for poverty alleviation.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Tanggung Jawab Sosial Bidang Perlindungan Pelanggan

PT PELNI (Persero) menempatkan kepuasaan pelanggan sebagai hal yang fundamental dalam usaha. Hal ini didasari keyakinan kami bahwa pelanggan atau pengguna jasa sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berperan menjamin keberlangsungan usaha. Karenanya pelanggan merupakan mitra utama dalam mengembangkan usaha kini dan di masa depan.

PT PELNI (Persero) telah menjalankan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan selama tahun 2020 meliputi Bidang *Service Quality Assurance*, Bidang *Food & Baverages*, Bidang *Hospitality,* Bidang Layanan Pelanggan. Selain itu guna mendukung pelayanan kepada pelanggan, PT PELNI (Persero) juga menyediakan layanan *contact center*.

Bagi Kami, kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu sarana dalam menjalin komunikasi kepada para pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif kepada para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menunjang efektivitas dan akurasi dari setiap perencanaan, implementasi dan proses evaluasi dari setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Perusahaan. Selain itu, kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini juga dapat memicu inisiatif bagi Perusahaan untuk terus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kami berharap untuk tahun-tahun selanjutnya PT PELNI (Persero) dapat terus menjaga konsistensi dan senantiasa meningkatkan kontribusinya kepada para pemangku kepentingan.

Corporate Social Responsibility On The Costumers Protection

PT PELNI (Persero) believes that customer satisfaction as a fundamental in running its business. Based on our assuredness that customers or service users are one of the stakeholders who have a role in ensuring business continuity. Therefore, customers are the main partners in developing businesses nowadays and in the future.

PT PELNI (Persero) has done its social responsibility activities on customers during 2019 covering the Field of Service Quality Assurance, Food & Baverages, Hospitality, Customer Service. In addition to supporting services for customers, PT PELNI (Persero) also provides contact center services.

For us, Corporate Social Responsibility is a tool for us to communicate with our stakeholders. Effective communication with our stakeholders is a key to support the effectiveness and accuracy of every planning, implementation and evaluation process of every making decision and policy made by the Company. Corporate Social Responsibility can also further boost the initiatives of the Company to keep delivering added values to our Stakeholders.

We hope that PT PELNI (Persero) continues maintaining its consistency and provide more contribution to Stakeholders for the years to come.

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pada tahun 2020, tidak terdapat perubahan susunan Direksi PT PELNI (Persero) yang sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-339/MBU/12/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT PELNI (Persero) tanggal 27 Desember 2019, maka susunan Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

In 2020, there was no changes in composition of Board of Directors which based on decree of Minister of State Owned Enterprises number SK-339/MBU/12/2019 concerning to termination and appointment of members of Board of Directors of PT PELNI (Persero) on 27 December 2019 the Board of Directors for the year ended 31 December 2020 are as follows:

Direktur Utama President Director	Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Olih Masolich Sodikin
Direktur Keuangan Director of Finance	Ony Suprihartono
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Masrul Khalimi
Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	Ganefi
Direktur Armada Director of Fleet	Muhamad Tukul Harsono

Namun pada tanggal 12 Januari 2021 yang kami catat sebagai informasi kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan, sehingga susunan Direksi Perseroan PT PELNI (Persero) sebagai berikut:

However in 12 January 2021 that we noted as information of important event after the date of accountant report that based on decree of Minister of State Owned Enterprises number Nomor SK-12/MBU/01/2021 dated on 12 January 2021 concerning termination, Changes of Nomenclature Duties Diversion and appointment of members of Board of Directors of the Company, therefore the composition of BOD of PT PELNI (Persero) as follows:

Direktur Utama President Director	Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Olih Masolich Sodikin
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight dan Sea Toll Business	Yahya Kuncoro
Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Robert MP Sinaga
Direktur Keuangan Director of Finance	Ony Suprihartono
Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	Ganefi

LAPORAN DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Kami optimistis, komposisi Direksi dapat bersinergi dengan baik untuk memberikan kinerja yang optimal bagi Perseroan. Atas kepercayaan yang telah diberikan, Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

We are optimistic that the Board of Directors' composition can synergize well to provide optimal performance for the Company. For the trust that has been given, We expresses our deepest gratitude.

APRESIASI

Demikian, laporan tugas Direksi atas pelaksanaan usaha Perseroan selama tahun 2020. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh insan PELNI yang telah bekerja keras sehingga PT PELNI (Persero) dapat menghadapi tantangan tahun 2020 dengan baik.

Direksi juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris PELNI. Arahan Dewan Komisaris sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2020. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemegang saham, mitra kerja dan pelanggan atas kepercayaannya terhadap PT PELNI (Persero). Dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam menjelajah serta tumbuh di tahun-tahun yang penuh tantangan di masa depan.

APPRECIATION

That is all, the report of the Board of Directors on the implementation of the Company's business during 2019. We give our highest appreciation for the trust and cooperation of all Stakeholders, especially for the management team and all insan PELNI who have worked hard so that PT PELNI (Persero) could dealt the challenges in 2020.

We also give our deepest appreciation to the Board of Commissioners of PELNI. The directtion from The Board of Commissioners gave a huge contribution for the Company in achiaving its performance in 2020.. We also want to express our gratitude to the shareholders, our partners and our customers for their trust given to PT PELNI (Persero). Their support and trust are an essential immune to struggle and to grow in the challenging years for the success of the Company in the future.

Atas nama Direksi PT PELNI (Persero)
On behalf of the Board of Directors of PT PELNI (Persero)



Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Director

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
55 tahun per 31 Desember 2020
55 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Bandung, 17 Maret 1965
Bandung, 17 March 1965

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 26 September 2017 berdasarkan SK Kementerian BUMN No. SK-210/MBU/09/2017.
Appointed as a President Director since 26 September 2017 based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-210/MBU/09/2017.

Masa Jabatan | Term of Serving
2017–Sekarang
2017–Present

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 1988 — Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran
  Bachelor of International Relation from Universitas Padjajaran

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2017–Sekarang / 2017–Present — Direktur Utama PT PELNI (Persero)
  President Director of PT PELNI (Persero)
- 2016–2017 — Direktur SDM dan Umum PT PELNI (Persero)
  Director of HR and General Affairs at PT PELNI (Persero)
- 2015–2017 — Komisaris PT Pertamina Internasional Explorasi & Produksi
  Commissioner at PT Pertamina Internasional Explorasi & Produksi
- 2011–2015 — Komisaris Pertamina EP Cepu
  Commissioner of Pertamina EP Cepu
- 2012–2016 — *SVP HR Development* PT Pertamina (Persero)
  SVP HR Development PT Pertamina (Persero)
- 2010–2012 — *VP People Management* PT Pertamina (Persero)
  VP People Management of PT Pertamina (Persero)
- 2007–2010 — VP HRD PT Pertamina EP
  VP HRD of PT Pertamina EP

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Olih Masolich Sodikin
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Transportation Business

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
61 tahun per 31 Desember 2020
61 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Ciamis, 22 September 1959
Ciamis, 22 September 1959

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Direktur Usaha Angkutan Penumpang sejak tanggal 3 April 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-62/MBU/04/2017.
Appointed as Director of Passenger Transportation Business since 3 April 2017 based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-62/MBU/04/2017.

Masa Jabatan | Term of Serving
2017–Sekarang
2017–Present

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2002	Ahli Teknika Tingkat I (ATT I) Technical Expert Level 1 (ATT I)
1992	Diklat BP3IP Strata AMK "C", Ahli Mesin Kapal "C" BP3IP Training and Education Starta AMK "C", "C" Ship Engine Expert
1988	Diklat BP3IP Strata AMK "B", Ahli Mesin Kapal "B" BP3IP Training and Edication Strata AMK, "B" Ship Engine Expert
1984	Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) RI, Ahli Mesin Kapal "A" The School of Shipping and Science of Republic of Indonesia, "A" Ship Engine Expert

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017–Sekarang 2017–Present	Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero) Director of Passenger Transportation Business of PT PELNI (Persero)
2012–2017	Direktur Armada & Teknik PT PELNI (Persero) Director of Fleet and Engineering of PT PELNI (Persero)
2011–2012	Senior Manajer Pengadaan PT PELNI (Persero) Procurement Senior Manager of PT PELNI (Persero)
2010–2011	Senior Manajer Pemasaran & Pengembangan Usaha PT PELNI (Persero) Marketing and Business Development Senior Manager of PT PELNI (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Komisaris Utama PT PIDC
President Commissioner of PT PIDC

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Yahya Kuncoro
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut
Director of Freight and Sea Toll Business

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
44 tahun per 31 Desember 2020
44 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Solo, 15 Oktober 1976
Solo, 15 October 1976

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut sejak tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan SK Kementerian BUMN No. SK-12/MBU/01/2021
Appointed as Director of Freight and Sea Toll Business since 12 January 2021 based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-12/MBU/01/2021

Masa Jabatan | Term of Serving
2021*–2026

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2010 — Master Manajemen Transportasi Laut STMT Trisakti
  Master of Marine Transportation Management at STMT Trisakti
- 2000 — Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi 10 November
  Bachelor of Industrial Engineering Institute of Technology 10 November

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- Januari 2021–Sekarang / January 2021–Present — Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT PELNI (Persero)
  Director of Freight and Sea Toll Business PT PELNI (Persero)
- 2021–Sekarang / 2021–Present — Ketua Bidang Perintis, Indonesian National Shipowner's Association (INSA)
  Chairman of Pioneer Sector, Indonesian National Shipowner's Association (INSA)
- 2003–Sekarang / 2003–Present — Dosen, Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti
  Lecturer, Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti
- 2019–2021 — Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI (Persero)
  VP Corporate Secretary of PT PELNI (Persero)
- 2019–2021 — Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC)
  Secretary of BOC of PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC)
- 2016–2019 — Vice President Keagenan dan Tour PT PELNI (Persero)
  Vice President Branch and Tour PT PELNI (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
- Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Ib
  Indonesian Aviation Navigation Services, Head of Energy, Logistics, Regional and Tourism Business Ib
- Anggota Komite Audit Perseroan
  Member of Audit Committee of the Company

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

*Menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut sejak 12 Januari 2021 berdasarkan SK Kementerian BUMN No.SK-12/MBU/01/2021.
Appointed as Director of Frieght and Sea Toll Business since 12 January 2021 based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-12/MBU/01/2021.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Robert MP Sinaga
Direktur Armada dan Teknik
Director of Fleet and Engineering

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
53 tahun per 31 Desember 2020
53 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Medan, 29 Desember 1967
Medan, 29 December 1967

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Direktur Armada dan Teknik sejak tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan SK Kementerian BUMN No. SK-12/MBU/01/2021
Appointed as Director of Fleet and Engineering since 12 January 2021 based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-12/MBU/01/2021

Masa Jabatan | Term of Serving
2021*–2026

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 1998 — Magister Manajemen Logistik & Teknik Transportasi University Of Lille I, Perancis
  Magister Management of Logistic & Engineering Transportation, University of Lille I, France.
- 1992 — Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung
  Bachelor of Industry Engineering of Institut Teknologi Bandung

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- Januari 2021–Sekarang / January 2021–Present — Direktur Armada dan Teknik PT PELNI (Persero)
  Director of Fleet and Engineering of PT PELNI (Persero)
- 2018–Januari 2021 / 2018–January 2021 — Direktur Utama PT Prima Multi Terminal
  President Director of PT Prima Multi Terminal
- 2017–2018 — *President Director Project Organization* Pengembangan Kuala Tanjung
  President Director Projetc Organization of Kuala Tanjung Development
- 2016–2017 — Komisaris PT Prima Husada Cipta Medan
  Commissioner of PT Prima Husada Cipta Medan
- 2015–2017 — Senior Manajer, Bina Usaha
  Senior Manager of Bina Usaha
- 2014–2015 — *General Manager*, Terminal Petikemas Domestik Belawan
  General Manager, Domestic Container Terminal Belawan
- 2009–2014 — Senior Manajer Perencanaan Organisasi dan SDM PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
  Senior Manager Organization and HR planning of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Palm Oil Product Knowledge And Handling
Palm Oil Product Knowledge And Handling

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

* Menjabat sebagai Direktur Armada dan Teknik sejak 12 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN No.SK-12/MBU/01/2021.
Appointed as Director of Fleet and Engineering since 12 January 2021 based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-12/MBU/01/2021.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Ony Suprihartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
51 tahun per 31 Desember 2020
51 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Jakarta, 31 Desember 1969
Jakarta, 31 Desember 1969

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Direktur Keuangan sejak 27 Desember 2019 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-339/MBU/12/2019.
Appointed as a Director of Finance since 27 December 2019 based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-339/MBU/12/2019.

Masa Jabatan | Term of Serving
2019–Sekarang
2019–Present

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2002 — Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
  Master Degree of Management form Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- 1995 — Sarjana Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman
  Bachelor Degree of Accounting from Universitas Jenderal Soedirman

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2019–Sekarang / 2019–Present — Direktur Keuangan PT PELNI (Persero)
  Director of Finance of PT PELNI (Persero)
- 2016–2019 — Komisaris PT Pupuk Indonesia Holding Company
  Commissioner of PT Pupuk Indonesia Holding Company
- 2014–2019 — Kepala Biro Perencanaan SDM dan Organisasi Kementerian BUMN
  Head of Bureau for Human Resources and Organization Planning of Ministry of SOE
- 2013–2018 — Komisaris Perum Jamkrindo
  Commissioner of Perum Jamkrindo
- 2013 — Komisaris PT Jasa Raharja Putera
  Commissioner of PT Jasa Raharja Putera
- 2010–2012 — Direktur Keuangan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
  Finance Diretor of PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
- 2015 — Management Government Business Enreprises Training Program, University Technology Sydney
  Management Government Business Enreprises Training Program, University Technology Sydney
- 2015 — The Challenge of Borderless SMEs Market in the Developing Economic and the Role of Guarantee Corporation, Asippindo
  The Challenge of Borderless SMEs Market in the Developing Economic and the Role of Guarantee Corporation, Asippindo

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Ganefi
Direktur SDM & Umum
Director of HR & General Affairs

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
57 tahun per 31 Desember 2020
57 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Jakarta, 1 Agustus 1963
Jakarta, 1 Agustus 1963

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Direktur SDM dan Umum sejak 26 September 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-210/MBU/09/2017.
Appointed as a Director of HR and General Affairs since 26 Sepetember 2017 based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-210/MBU/09/2017.

Masa Jabatan | Term of Serving
2017–Sekarang
2017–Present

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 1994 — Magister Banking & Finance Monash University
  Master of Banking & Finance, Monash University
- 1989 — Sarjana Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia
  Bachelor of Fiscal Administration, Indonesia University

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2018–Sekarang / 2018–Present — Komisaris Utama PT RS PELNI
  President Commissioner of PT RS PELNI
- 2017–Sekarang / 2017–Present — Direktur SDM dan Umum PT PELNI (Persero)
  Director of HR and General Affairs PT PELNI (Persero)
- 2016–2017 — Direktur Komersial PTPN VII
  Director of Commercial PTPN VII
- 2015–2016 — *Chief Auditor* Jakarta BRI
  Chief Auditor of BRI Jakarta
- 2012–2015 — Kepala Divisi HC BRI
  Head of Human Capital Division BRI
- 2008–2009 — Wakil Kepala Divisi SDM Kantor Pusat Bank BRI
  Vice President HR Division at Bank BRI Head Office

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Komisaris Utama PT RS PELNI
President Commissioner of PT RS PELNI

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Muhamad Tukul Harsono
Direktur Armada
Director of Fleet

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
Berusia 53 tahun per 31 Desember 2020
53 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Demak, 1 November 1967
Demak, 1 November 1967

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Direktur Armada sejak 1 Desember 2016 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-263/MBU/12-2016.
Appointed as a Director of Fleet since 1 December 2016 based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-263/MBU/12/2016.

Masa Jabatan | Term of Serving
2016–2021**

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2017 — S2 Manajemen Bisnis dari Dr. Soetomo
  Master of Business Management from Dr. Soetomo
- 2010 — S1 Manajemen Personalia
  Bachelor of HR Management
- 2007 — Master Mariner dari BP3IP Sunter Podomoro
  Master of Mariner from BP3IP Sunter Podomoro
- 2007 — ANT 1 dari BP3IP Sunter Podomoro
  ANT 1 from BP3IP Sunter Podomoro
- 2004 — ANT II PIP Semarang
  ANT II PIP Semarang
- 1993 — ANT III BPLP Semarang
  ANT III BPLP Semarang

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2017–Sekarang / 2017–Present — Direktur Armada PT PELNI (Persero)
  Director of Fleet of PT PELNI (Persero)
- 2016–2017 — Direktur Operasi dan Pelayanan PT PELNI (Persero)
  Director of Operation and Service of PT PELNI (Persero)
- 2016 — Direktur PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari
  Director of PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari
- 2015–2016 — Direktur Utama PT PIDC Anak Perusahaan PT PELNI (Persero)
  President Director of PT PIDC, a Subsidiary of PT PELNI (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Lainnya.
Has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners, Directors and the Majority Shareholders.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

**Menjabat sebagai Direktur Armada sampai dengan 12 Januari 2021 berdasarkan SK Kementerian BUMN No.SK-12/MBU/01/2021.
Served as Director of Fleet until 12 January 2021 based on the Decree of Ministry of SOE No.SK-12/MBU/01/2021

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Masrul Khalimi
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut
Director of Freight and Sea Toll Business

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
50 tahun per 31 Desember 2020
50 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Mojokerto, 18 Oktober 1970
Mojokerto, 18 October 1970

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut sejak 27 Desember 2019 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-339/MBU/12/2019.
Appointed as a Director of Freight and Sea Toll Business since 27 December 2019 based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-339/MBU/12/2019.

Masa Jabatan | Term of Serving
2019–2021**

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2003 — Sarjana Teknik Mesin Universitas Darul Ulum Jombang
  Bachelor Degree of Engineering from Darul Ulum University Jombang.
- 1993 — Diploma Pelayaran PIP Semarang
  Diploma of Marine Studies PIP Semarang

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2020–Januari 2021 / 2020–January 2021 — Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT PELNI (Persero)
  Director of Freight Cargo and Tol Laut of PT PELNI (Persero)
- 2020–2021 / 2020–2021 — Komisaris Utama PT PBM Saran Bandar Nasional
  President Commissioners of PT PBM Saran Bandar Nasional
- 2017–2019 / 2017–2019 — Kepala Cabang PT PELNI (Persero) Tanjung Priok
  Branch Manager of PT PELNI (Persero) Tanjung Priok
- 2016–2017 — *Senior Manager PSO* PT PELNI (Persero)
  Senior Manager PSO of PT PELNI (Persero)
- 2014–2016 — Kepala Cabang PT PELNI (Persero) Semarang
  Branch Manager of PT PELNI (Persero) Semarang
- 2014 — Senior Manager SDM PT PELNI (Persero)
  Senior Manager HR of PT PELNI (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Lainnya.
Has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners, Directors and the Majority Shareholders.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

**Menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut sampai dengan 12 Januari 2021 berdasarkan SK Kementerian BUMN No.SK-12/MBU/01/2021.
Served as Director of Freight and Sea Toll Business until 12 January 2021 based on the Decree of Ministry of SOE No.SK-12/MBU/01/2021.

03





PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY



Nama Perusahaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia	**Company Name** Limited Liability Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia
Nama Panggilan PELNI	**Called Name** PELNI
Bidang Usaha Pelayaran	**Line of Business** Shipping
Badan Hukum Perseroan Terbatas	**Legal Entity** Limited Liability Company
Status Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	**Company Status** State-Owned Enterprise (SOE)
Tanggal Pendirian 28 April 1952	**Date of Establishment** April 28, 1952
Tanggal Operasi 28 April 1952	**Date of Operation** April 28, 1952
Dasar Pendirian Akta pendirian No. 92 tanggal 28 April 1952 yang dibuat dihadapan Raden Kadiran Notaris di Jakarta	**Establishment Deeds** Establishment Deeds No. 92 dated April 28, 1952 drafted before Raden Kadiran Notary in Jakarta.

IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY



Kepemilikan Saham 100% Pemerintah Indonesia	**Shares Ownership** 100% owned by The Republic of Indonesia Government
Modal Dasar Rp13.000.000.000.000	**Authorized Capital** Rp13.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp7.629.900.000.000	**Subscribed and Fully Paid-in Capital** Rp7.629.900.000.000
NPWP 01.001.637.6-093.000	**Tax Payer Registration Number** 01.001.637.6-093.000
TDP 09.05.1.50.37082	**Company Registration Certificate** 09.05.1.50.37082
SIUP 01.001.637.6-093.000	**Trade Business License** 01.001.637.6-093.000
Jumlah Karyawan 5.327 orang	**Total Employees** 5,327 employee
Alamat Perusahaan Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat 10130 T. (021) 6334342 F. (021) 63854130 E. infopelni162@pelni.co.id www.pelni.co.id	**Company Address** Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat 10130 T. (021) 6334342 F. (021) 63854130 E. infopelni162@pelni.co.id www.pelni.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF COMPANY'S HISTORY



Sejarah berdirinya PT PELNI (Persero) bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Establishment history of PT PELNI (Persero) was initiated after the issuance of Joint Decree between Minister of Transportation and Minister of Public Works on September 5, 1950 declaring establishment of Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Latar belakang pendirian Yayasan PEPUSKA diawali dari penolakan pemerintah Belanda atas permintaan Indonesia untuk mengubah status maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi di Indonesia, N.V. K.P.M (*Koninklijke Paketvaart Matschappij*) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar kapal-kapal KPM dalam menjalankan operasi pelayarannya di perairan Indonesia menggunakan bendera Merah Putih. Pemerintah Belanda dengan tegas menolak semua permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan modal awal 8 (delapan) unit kapal dengan total tonage 4.800 DWT (*dead weight tonnage*), PEPUSKA berlayar berdampingan dengan armada KPM yang telah berpengalaman lebih dari setengah abad. Persaingan benar-benar tidak seimbang ketika itu, karena armada KPM selain telah berpengalaman, jumlah armadanya juga lebih banyak serta memiliki kontrak-kontrak monopoli. Akhirnya pada 28 April 1952 Yayasan PEPUSKA resmi dibubarkan.

Background of PEPUSKA Foundation establishment was begun when the Government of Netherlands rejected request from Indonesia to change status of N.V. K.P.M (Koninklijke Paketvaart Matschappij), a Netherlands shipping company operated in Indonesia into a Limited Liability Company (PT) The Government of Indonesia also wished the vessels of KPN to use Red and White flag during their shipping operations in Indonesian water territory. The Government of Netherland firmly rejected all appeals submitted by the Republic of Indonesia Government.

With initial capital of 8 (eight) units vessel with total tonnage of 4,800 DWT (dead weight tonnage), PEPUSKA sailed side to side with KPM fleets with more than half of century experience. At that time, this was such an unbalanced competition not only due to bigger fleets but also monopoly contracts. Finally on April 28, 1952, Pepuska Foundation was officially dismissed.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF COMPANY'S HISTORY

Pada saat yang sama didirikanlah PT PELNI (Persero) dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Akta Notaris Nomor 92 tahun 1952.

At the same time, PT PELNI (Persero) was established pursuant to Minsiter of Transportation Decree Number M.2/1/2 dated February 28, 1952 and Number A.2/1/2 dated April 19, 1952 and Notarial deeds Number 92 of 1952.

Dalam perkembangannya, PT PELNI (Persero) tidak hanya melayani jasa transportasi kapal laut, kami pun memberikan layanan paket wisata bahari ke pulau-pulau yang memiliki keindahan bawah laut dan pemandangan alam yang mengagumkan, seperti Kepulauan Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan dan Tomini.

During its progress, PT PELNI (Persero) does not only provide marine vessels transportation service but also marine tourisme package to islands with beautiful underwater and landscape such as Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan and Tomini Islands.

Sejak tahun 2015, PT PELNI (Persero) dipercaya Pemerintah RI sebagai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak yang menjangkau di wilayah Indonesia.

Since 2015, PT PELNI (Persero) was mandated by the RI Government to serve as operator for Pioneer Ship, Sea Toll and Cattle Ship which covering entire Indonesian territory.

Pada tahun 2020, PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Budaya Perusahaan sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai–Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

In 2020, PT PELNI (Persero) implements Company Culture based on Letter of Minister SOE No. SE-7/MBU/07/2020 about Core Values of Human Resources of SOE which are AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative).

PT PELNI (Persero) terus meningkatkan kapasitas operasional secara konsisten. Perseroan memiliki 45 cabang, 115 *Terminal Point*, 1 cabang khusus di Singapura dan 2 Unit Bisnis Strategi (Galangan Surya, Surabaya dan Hotel Bahtera Cipayung).

PT PELNI (Persero) keep improving its operational capacity consistently. The Company has 45 branches 115 Terminal Points 1 Special Branch in Singapore and 2 Strategic Business Units (Galangan Surya, Surabaya and Hotel Bahtera Cipayung).

Perseroan mengoperasikan 112 kapal secara keseluruhan, yang merupakan 26 Kapal Penumpang, 53 Kapal Perintis, 8 Kapal Penugasan Tol Laut, 4 Kapal Barang Non Penugasan, 1 Kapal Ternak dan 20 Kapal Rede.

The Company operates 112 ships in total, which are 26 Passenger Ships, 53 Pioneer Ships, 8 Sea Toll Assignment Ships, 4 Cargo Non Assignment Ships, 1 Livestock Ships and 20 Rede Ships.

Sejak awal pendirian di tahun 1952 hingga 31 Desember 2020, PT PELNI (Persero) belum pernah melakukan pergantian nama.

Since the establishment in 1952 up to December 31, 2020, the name of PT PELNI (Persero) has never been changed.

PENJELASAN LOGO PERSEROAN
COMPANY'S LOGO EXPLANATION

Logo History
Sebagai negara maritim, Indonesia dikenal akan keberanian pelautnya dalam mengarungi samudera dari masa ke masa. Setiap kapal dan pelaut umumnya membawa panji-panji sebagai identitas dan kebanggaan mereka. Beberapa poin dibawah menjadi filosofi terbentuknya ide bendera (Panji) sebagai logo dari PT PELNI (Persero).

Logo History
As maritime country, Indonesia is well-known for the courage of its sailors from time to time. There is identity or flag in every ship and every sailor is proud of it. Some of points below become the philosophy of the flag or logo of PT PELNI (Persero).

Logogram



Logotype

PELAYARAN
NASIONAL
INDONESIA



Bendera (Panji) melambangkan identitas dari pelayaran.
Flag (Banner) represents shipping identity.



Bintang melambangkan cita-cita dan harapan yang tinggi.
Star represents goals and high hopes.

Warna Primer
Warna-warna primer pada logo PT PELNI (Persero) bertujuan untuk menghadirkan berbagai macam komunikasi yang menarik secara visual. Kode warna yang tertera harus selalu digunakan saat memilih warna yang akan diterapkan pada setiap aplikasi.

Primary Colors
Primary colors on this PT PELNI (Persero) logo aims to showcase interesting visual communication. Code colors shall be used for each of applications.

Merah | Red

C	11	**R**	217
M	99	**G**	37
Y	95	**B**	45
K	0	**#**	d9252d

Memberikan makna energi dalam mencapai tujuan bersama dengan terus memberikan layanan prima kepada pengguna jasa.
Red represents the energy to achieve shared purposes by always providing service excellence to the customer.

PENJELASAN LOGO PERSEROAN
COMPANY'S LOGO EXPLANATION

Putih | White

C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255
ffffff

Memberikan makna keterbukaan dan dapat dipercaya untuk terus mentransformasikan diri secara berkelanjutan sesuai kebutuhan perusahaan dan tuntutan pengguna jasa.

White represents openness and trusted to always transform sustainably for the Company and customer needs.

Hitam | Black

C 90 M 73 Y 73 K 91
R 0 G 0 B 3
000003

Mewakili kekuatan perusahaan yang melayari dari pelabuhan ke pelabuhan di berbagai kepulauan untuk menjaga persatuan Indonesia.

Black represents the strength of the Company that sails from port to port across Islands for the unity of Indonesia.

Warna Sekunder

Warna sekunder yang pada logo PT PELNI (Persero) bertujuan untuk mendukung warna-warna primer dan menghadirkan berbagai macam komunikasi yang menarik secara visual. Kode warna yang tertera harus selalu digunakan saat memilih warna yang akan diterapkan pada setiap aplikasi.

Secondary Color

Secondary color on this PT PELNI (Persero) logo aims to harmonize primary colors and visualize interesting communication. This code color shall be used for each of applications.

Kuning | Yellow

C 2 M 20 Y 90 K 0
R 250 G 201 B 52
fac934

Menyimbolkan konsentrasi dan kehati-hatian dalam mengutamakan keselamatan penumpang dan kelestarian lingkungan dalam kegiatan perusahaan. Kuning juga mewakili semangat melayani demi meningkatkan kenyamanan dan kegembiraan pelanggan selama menggunakan jasa perusahaan.

Yellow color symbolizes concentration and prudence in prioritizing passenger safety and environmental sustainability across Company activities. Yellow also represents the spirit of serving to increase the comfort and joy of our customers when using our services.

Grayscale Color

Logo versi full color selalu menjadi pilihan utama, namun logo versi *grayscale* dapat diapplikasikan pada saat logo dicetak di materi yang mempunyai limitasi penggunaan tinta pada produksi. Logo dengan warna *grayscale* hanya digunakan apabila sangat diperlukan.

Grayscale Color

Full color version of this logo is always to be the first, despite grayscale color can be used when printed material has limitation use of ink on production. Logo with this greyscale color is only used as needed.

Hitam
Black

C 75 M 68 Y 67 K 90
R 0 G 0 B 0
#000000

Abu-abu
Gray

C 0 M 0 Y 0 K 69
R 79 G 79 B 79
#fac934

Putih
White

C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255
#ffffff

JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN
COMPANY'S MILESTONES

1950

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Issuance of Joint Decree (SKB) between Minister of Transportation and Minister of Public Works dated September 5, 1950 declaring Yayasan Penguasaan Pusat Kapal- kapal (PEPUSKA).

1952

PT PELNI (Persero) resmi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R. Djuanda No. 2/1/2 tanggal 23 Februari 1952.

PT PELNI (Persero) was officially established under Minister of Transportation R. Djuanda Decree Number 2/1/2 dated February 23, 1952.

1953

Perubahan status hukum PT PELNI (Persero) menjadi Perusahaan Negara (PN) dan menjadikan PT PELNI (Persero) sebagai Agen Pemerintah (*Government Agency*).

PT PELNI (Persero) legal entity was changed into Perusahaan Negara (PN)/State Company and brought PT PELNI (Persero) as Government Agency.

1975

Perubahan status hukum PN PELNI menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Maret 1973 dan Akta Notaris Nomor 31/1975.

PN PELNI legal entity was changed into Limited Liability Company under Government Regulation Number March 17, 1973 and Notarial Deeds Number 31/1975.

1981

Penyerahan pengelolaan pelayaran Perintis kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 35 unit Kapal Perintis.

Delegation of Pioneer shipping management to PT PELNI (Persero) by operating 35 units Pioneer Ship.

2014

PT PELNI (Persero) mulai menggelar paket wisata *Let's Go* dan *Event onboard*.

PT PELNI (Persero) launched Let's Go and Event onboard travel package.

JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN
COMPANY'S MILESTONES

2020

PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Budaya Perusahaan sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai–Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

PT PELNI (Persero) implements Company Culture based on Letter of Minister SOE No. SE-7/MBU/07/2020 about Core Values of Human Resources of SOE which are AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative).

2019

PT PELNI (Persero) menetapkan Visi 2020 – 2024: "Menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara"

PT PELNI (Persero) establish its 2020 – 2024 Vision: "To Become Leading Maritime Shipping and Logistics Company in Southeast Asia"

2018

PT PELNI (Persero) menerapkan strategi bisnis berupa sinergi BUMN dan sistem operasi berbasis digital.

PT PELNI (Persero) applied SOEs synergy and operating system-digital base business strategies.

2017

PT PELNI (Persero) menetapkan Tata Nilai (*Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive*), Budaya Perusahaan (Peduli, Ekselen, Inovasi) dan Perilaku "JUARA" (Jujur, Unggul, Adaptasi, Ramah, Akurat).

PT PELNI (Persero) established Value (Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive), Corporate Culture (Care, Excellent, Innovation) and Behavior "JUARA" (Honest, Excellent, Adaptable, Friendly, Accurate).

2016

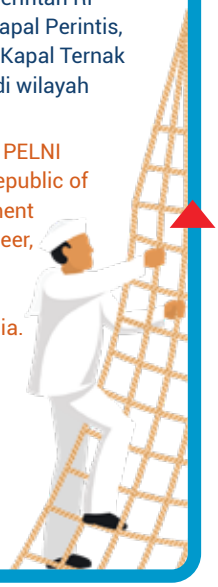
PT PELNI (Persero) meningkatkan kapasitas armadanya dengan mengoperasikan 80 (delapan puluh) kapal.

PT PELNI (Persero) increased fleets capacity by operating 80 (eighty) vessels.

2015

Penunjukkan PT PELNI (Persero) oleh Pemerintah RI sebagai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak yang menjangkau di wilayah Indonesia.

Appointment of PT PELNI (Persero) by The Republic of Indonesia Government as operator of Pioneer, Sea Toll and Cattle vessels covering territory of Indonesia.



BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS



KEGIATAN USAHA PERSEROAN MENURUT ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan yaitu untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang usaha pelayaran dalam dan luar negeri untuk angkutan penumpang, hewan dan barang dalam bentuk unit curah kering atau cair dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan, kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh PT PELNI (Persero) adalah:

a. Kegiatan usaha jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu.
b. Kegiatan usaha jasa keagenan usaha pelayaran.
c. Kegiatan usaha jasa pergudangan, angkutan rede dan ekspedisi/*forwarding*.
d. Kegiatan usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok/reparasi kapal.
e. Kegiatan *charter* dan *broker* kapal.
f. Kegiatan jasa konsultan, pendidikan, pelatihan dan pelayanan kesehatan.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLE OF ASSOCIATION

Pursuant to Articles of Association, purpose and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting policy and program of the Government in economy sector and national development generally as well as development in domestic and overseas shipping business for passenger, cattle and cargo as liquid or dry bulk units by implementing Limited Liability Company.

BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

According to the purpose and objective of the Company's establishment, business activity that is operated by PT PELNI (Persero) is among others:

a. Passenger and cargo transportation business with scheduled and on demand (charter) shipping network.
b. Shipping agency service business.
c. Warehouse, rede transportation and expedition/ forwarding operation services.
d. Vessels maintenance and ship docking/reparation services.
e. Ship charter and broker services.
f. Consulting, education, training and health services.

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

JASA PERKAPALAN
Kapal *2 in 1*
Kapal jenis *2 in 1* adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Werft dan dibangun di galangan Papenburg, Jerman. Kapal *2 in 1* ini memiliki kapasitas 1.583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu Kapal tipe *2 in 1* ini secara resmi diberi nama KM Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dan panjang 146,80 m dengan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot.

Kapal jenis *2 in 1* beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia bagian tengah dan timur seperti kebutuhan pokok masyarakat setempat.

Kapal Penumpang Serbaguna
Kapal jenis *3 in 1* adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan kendaraan sekaligus. Kapal Motor Dobonsolo dan Kapal Motor Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis *3 in 1*.

Kemampuan kapal *3 in 1* PT PELNI (Persero) dalam mengangkut kontainer dan kendaraan, secara langsung berkontribusi dalam mendistribusikan kebutuhan pokok di wilayah Indonesia bagian timur yang dipasok dari kota-kota besar bagian barat seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Kapal Barang
Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, kami menyediakan kapal barang untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

Saat ini PT PELNI (Persero) memiliki 3 kapal barang yaitu KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 dan KM Caraka Jaya Niaga – 32 dengan kapasitas muat yang berbeda-beda untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

SHIPPING SERVICES
2 in 1 Ship
2 in 1 Ship is a type of ship with capacity to carry passenger and containers that is designed by Meyer Werft and built at Papenburg Shipyard, Germany. The 2 in 1 ship has capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of the 2 in 1 ships is officially named KM Gunung Dempo and built in mid-2006 with total length of 146.80 m and sailing speed over 20 knot.

This 2 in 1 ship operates to serve public needs in the middle and east areas of Indonesia such as basic needs for those local community.

Multipurpose Passenger Ship
The 3 in 1 ship type is multipurpose passenger ship with capacity to carry containers, passenger and Vehicle simultaneously. KM Dobonsolo and KM Ciremai are passenger ships which have been modified into 3 in 1 ship type.

Capacity of PT PELNI (Persero)'s 3 in 1 ships in carrying containers and vehicle contribute directly in distributing groceries to Eastern Indonesia that are supplied from western major cities such as Jakarta, Surabaya and Makassar.

Cargo Ship
For logistic distribution across Indonesian region, we provide cargo ship to carry large-volume cargo with excellent service and supported by professional personnel.

PT PELNI (Persero) currently has 3 cargo ships, among others, KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 and KM Caraka Jaya Niaga – 32 with different capacities to provide cargo ship and carry large volume cargo with excellent services and supported by professional personnel.

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

1. Logistik Nusantara 1, dibangun pada tahun 1998 dengan 10822 DWT.
2. Logistik Nusantara 2, dibangun pada tahun 2006 dengan 3893 DWT.
3. Logistik Nusantara 3, dibangun pada tahun 2008 dengan 3901 DWT.
4. Logistik Nusantara 4, dibangun pada tahun 2007 dengan 3901 DWT.
5. Logistik Nusantara 5, dibangun pada tahun 2008 dengan 11184 DWT.

Kapal Tol Laut

Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada:

- Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*).

Saat ini, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 9 armada Kapal Tol Laut yaitu KM Logistik Nusantara I, II, III, IV V. VI, KM Kendhaga Nusantara 01, 07, 11.

Jenis Muatan Kapal Tol Laut:

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kategorisasi muatan Kapal Tol Laut dijelaskan sebagai berikut:

1. Logistik Nusantara 1, that was built in 1998 with 10822 DWT.
2. Logistik Nusantara 2, that was built in 2006 with 3893 DWT.
3. Logistik Nusantara 3, that was built in 2008 with 3901 DWT.
4. Logistik Nusantara 4, that was built in 2007 with 3901 DWT.
5. Logistik Nusantara 5, that was built in 2008 with 11184 DWT.

Sea Toll Ship

Sea Toll Ship is operated referring to:

- Presidential Decree No. 70 of 2017 regarding Public Service Obligation Implementation for Marine Cargo.
- Presidential Decree No. 71 of 2015 regarding Stipulation and Storing of Primary Need Goods and Valuable Goods.
- Minister of Transportation Regulation No. PM. 4 of 2016 as Amendment to Minister of Transportation Regulation No. PM 161 of 2015 regarding Public Service Obligation for Marine Cargo.
- Minister of Transportation Regulations No. 17 of 2017 regarding Marine Cargo Transportation Tariff in Public Service Obligation Implementation.

PT PELNI (Persero) currently operates 9 Sea Toll Ships, which are KM Logistik Nusantara I, II, III, IV V. VI, KM Kendhaga Nusantara 01, 07, 11.

Type of Sea Toll Ship Cargo:

Pursuant to Presidential Regulation Number 71 of 2015 regarding Stipulation and Storing of Groceries and Valuable Goods, classification of Tol Laut cargo is explained below:

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

Barang Kebutuhan Pokok
Groceries

Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian:
Agricultural groceries :
1. Beras
   Rice
2. Kedelai bahan baku tahu dan tempe
   Soy as material for tofu and soybean
3. Cabai
   Chili
4. Bawang Merah
   Onion

Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri:
Industrial groceries:
1. Gula
   Sugar
2. Minyak Goreng
   Oil
3. Tepung Terigu
   Wheat Flour

Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan dan Perikanan:
Livestock and Fisheries product groceries:
1. Daging Sapi
   Meat
2. Daging ayam ras
   Chicken
3. Telur ayam ras
   Eggs
4. Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang
   Fresh fish, such as milkfish, mackarel and tuna/mackarel tuna/skipjack tuna

Barang Penting
Valuable Goods

1. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai
   Seeds, including rice, corn and soy
2. Pupuk
   Fertilizer
3. Gas Elpiji 3 (tiga) kilogram
   Elpiji Gas 3 (three) kilogram
4. Triplek
   Plywood
5. Semen
   Cement
6. Besi baja konstruksi
   Construction Steel
7. Baja ringan
   Light steel

Sedangkan Sesuai Permendag No 38 tahun 2018 Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

In addition, pursuant to Ministry of Trading Regulation No. 38 in the year of 2018 regarding types of goods as stated in article 2 paragraph (1) letter b determined as follows:

Barang Penting Lainnya
Other Valuable Goods

1. Air mineral
   Mineral Water
2. Bawang Putih
   Garlic
3. Garam
   Salt
4. Kacang hijau
   Mung bean
5. Kacang Tanah
   Peanut
6. Margarin
   Margarine
7. Mie instan
   Noodles
8. Minuman ringan
   Soft drink
9. Obat-obatan
   Medicine
10. Sayuran
    Vegetables
11. Susu
    Milk
12. Teh
    Tea
13. Kopi
    Coffee
14. Ikan Kemasan Kaleng
    Canned Fish
15. Biskuit
    Biscuit
16. Pakaian jadi
    Clothes
17. Popok bayi dan dewasa
    Diapers for baby and adult
18. Deterjen/sabun/pasta gigi
    Detergen/soap/toothpaste
19. Alat tulis/peralatan sekolah
    Stationery and tools
20. Gas elpiji 12 kg
    Elpiji Gas 12 kilogram
21. Pakan ternak atau pakan ikan
    Fish and Cattle food
22. Asbes/gypsum
    Asbestos/gypsum
23. Paku
    Nails
24. Seng
    Seng
25. Aspal
    Bitumen

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

Kapal Ternak

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 2 (dua) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dan KM Camara Nusantara III dengan rute Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

Kapal Perintis

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak. Dasar hukum pengelolaan Kapal Perintis, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/7/1/DJPL-15 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/18/DJPL-15 Tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2016 serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya tanggal 30 November 2015.

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 51 (lima puluh satu) Kapal Perintis yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

Kapal Rede

Kapal Rede merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 20 Kapal Rede yang tersebar diseluruh Indonesia.

Cattle Ship

PT PELNI (Persero) operates 2 (two) Cattle Ships. KM Camara Nusantara I and KM Camara Nusantara III with routes of Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. The operation of cattle ships are aim to help the Government to press of meat price and increase welfare of breeders in domestic cow breeding center.

Pioneer Ship

Pioneer Ship Fleet is part of Government's assignment to PT PELNI (Persero) besides Sea Toll and Cattle ships. Legal Frameworks of Pioneer Ship management are among others:

1. Presidential Regulation Number 2 of 2016 regarding State-Owned Pioneer Ship Public Service Obligation Implementation.
2. The Republic of Indonesia Minister of Transportation Regulation Number PM. 6 of 2016 regarding State Owned Pioneer Ship Public Service Obligation Implementation.
3. Marine Transportation General Directorate Decree Number Al.108/7/1/DJPL-15 as the Second Amendment on Marine Transportation General Directorate Decree Number Al.108/5/18/DJPL-15 regarding Route Network and Requirement for Pioneer Shipping Vessel Budget year 2016 and Implementation Provisions dated November 30, 2015.

PT PELNI (Persero) operates 51 (fifty one) Pioneer Ships covering remote area across Indonesia.

Rede Ships

Rede ship is part of the assignment of the authority to PT PELNI (Persero) by operating 20 Rede vessels spread throughout Indonesia.

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES





PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

FASILITAS KAPAL

PT PELNI (Persero) menyediakan tenaga kerja profesional dan fasilitas terbaik demi kenyamanan penumpang dalam melakukan perjalanan menggunakan armada PT PELNI (Persero), meliputi:

1. Fasilitas yang umum yang tersedia di kapal:
   a. *Live Music*;
   b. *Charging Spot;*
   c. *Free* Kasur Ekonomi;
   d. Toilet;
   e. *Play Ground;*
   f. *Mini Gym;*
   g. *Jogging Track;*
   h. *Mini Theatre;*
   i. *Sun Bathing Area;*
   j. Mushola*;*
   k. Klinik;
   l. *Cafetaria;*
   m. *Wifi ;*
   n. *BTS on the ship;*
   o. *Hot Water;*
   p. *Cleaning Service;*
   q. TV

SHIP FACILITIES

PT PELNI (Persero) provides professional personnel and excellent facilities to ensure convenience of our passenger in using PT PELNI (Persero) fleets, among others:

1. General Ship Facilities:
   a. Live Music;
   b. Charging Spot;
   c. Free Economic Mattress;
   d. Toilet;
   e. Play Ground;
   f. Mini Gym;
   g. Jogging Track;
   h. Mini Theatre;
   i. Sun Bathing Area;
   j. Mosque;
   k. Clinic;
   l. Cafetaria;
   m. Wifi ;
   n. BTS on the ship;
   o. Hot Water;
   p. Cleaning Service;
   q. TV.









PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

2. Fasilitas permakanan:
   a. Restoran (Ruang Makan);
   b. *Bread Toaster;*
   c. *Combi Oven;*
   d. Menu Makan (*bento box*);
   e. *Additional Suplemen* (Susu UHT, biskuit kemasan dan jus botol);
   f. Air Minum dalam Kemasan *Branding* PELNI.

2. Dining Facility:
   a. Restaurant (Dining Room);
   b. Bread Toaster;
   c. Combi Oven;
   d. Food menu (bento box);
   e. Additional Supplements (UHT milk, biscuits and bottled juice).
   f. Mineral Water in PELNI Branding Packaging.









3. *Event* dalam kapal:
   a. *Meeting onboard;*
   b. *Tour on the ship;*
   c. *Entertainment;*
   d. *New Year Eve's Party;*
   e. *Solar Eclipse onboard;*
   f. *Photo Shoot;*
   g. *Event Charity;*
   h. *Floating Hotel.*

3. Event Onboard:
   a. Meeting onboard;
   b. Tour on the ship;
   c. Entertainment;
   d. New Year Eve's Party;
   e. Solar Eclipse onboard;
   f. Photo Shoot;
   g. Charity Event;
   h. Floating Hotel.

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

MANAJEMEN KESELAMATAN

1. Regulasi IMO:
   - SOLAS 1974 *Consolidated* 2004 (*Chapter IX:ISM Code*);
   - MARPOL 78 *Consolidated* 2006;
   - STCW 95 (KM. 70 tahun 1998, PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan);
   - COLREG 72 (*Collision Regulation* tahun 72).
2. *International Load Line Convention* (ILLC) 1966.

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)
Keagenan Kapal & Tour

1. Jenis Layanan Keagenan:
   a. *Clearance in & out;*
   b. *Bunker, Fresh Water, Provision Supply;*
   c. *Crew & Guest Attendance;*
   d. *Protecting Agent;*
   e. *Custom & Immigration Clearance;*
   f. Layanan *Sea Pollution;* dan
   g. Layanan G*arbage Removal.*

2. *Tour* Paket Wisata Bahari:
   c. Wisata Karimunjawa;
   d. Wisata Banda Neira;
   e. Wisata Pulau Komodo;
   f. Wisata Raja Ampat;
   g. Wisata Wakatobi;
   h. Wisata Kepulauan Seribu;
   i. Wisata Selat Lembeh (*Coming Soon*); dan
   j. Wisata Derawan (*Coming Soon*).

SAFETY MANAGEMENT

1. IMO Regulation:
   - SOLAS 1974 Consolidated 2004 (Chapter IX:ISM Code);
   - MARPOL 78 Consolidated 2006;
   - STCW 95 (KM. 70 of 1998, PP No. 7 of 2000 on Marine);
   - COLREG 72 (Collision Regulation in 72).
2. International Load Line Convention (ILLC) 1966.

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)
Ship Agency & Tour

1. Type of Agency Services:
   a. Clearance in & out;
   b. Bunker, Fresh Water, Provision Supply;
   c. Crew & Guest Attendance;
   d. Protecting Agent;
   e. Custom Immigration Clearance;
   f. Sea Pollution Service; and
   g. Garbage Removal Service.

2. Marine Tourism Packages:
   a. Karimunjawa Tours;
   b. Banda Neira Tours;
   c. Komodo Island Tours;
   d. Raja Ampat Tours;
   e. Wakatobi Tours;
   f. Seribu Islands Tours;
   g. Selat Lembeh Tours (Coming Soon); and
   h. Derawan Tours (Coming Soon).

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

Hotel Bahtera
Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

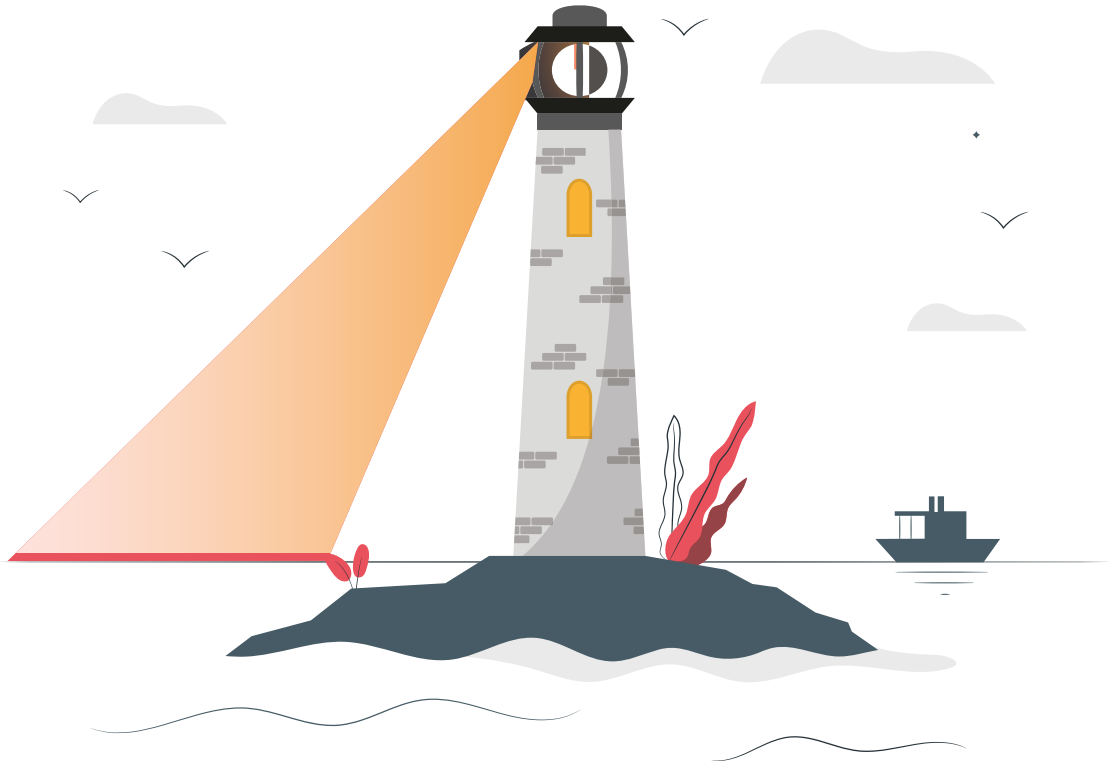
Galangan Surya Surabaya
Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PT PELNI (Persero) tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PT PELNI (Persero) *Maintenance Facilities* (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin *space* dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

Bisnis Properti
Persewaan ruang kantor dari aset gedung PT PELNI (Persero) yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PT PELNI (Persero) serta persewaan toko dan *cafe* di atas kapal.

Bahtera Hotel
Hotel that has meeting and training center facilities equipped with meeting room facility that has capacity over 200 pax as well as other supporting facilities.

Surya Surabaya Shipyard
Established since May 20, 1996, the Shipyard handled 500- type PT PELNI (Persero) ships, such as KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PT PELNI (Persero) Maintenance Facilities (PMF), strategic projection to guarantee docking and repair space for all vessels (including large ships) that are operated by PT PELNI (Persero).

Property Business
Rent office space from PT PELNI (Persero)'s building assets spread across branch office of PT PELNI (Persero). In addition, the property business also includes onboard advertising space rental on PT PELNI (Persero) ships as well as onboard store and café rental.



VISI & MISI PERUSAHAAN
COMPANY'S VISION & MISSION

PENETAPAN VISI DAN MISI
Visi dan Misi PT PELNI (Persero) telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia BUMN dilingkungan PT PELNI (Persero). Visi dan Misi tersebut juga dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara periodik.

ESTABLISHMENT OF VISION AND MISSION
Vision and Mission of PT PELNI (Persero) have been established by the Board of Directors' Decree No: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 regarding Establishment of Core Values of State-owned Enterprises Human Resources within PT PELNI (Persero). Those Vision and Missions has also been being evaluated by the Board of Commissioners periodically.



VISI VISION

"Menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara"

"To Become the Leading Maritime Shipping and Logistics Company in Southeast Asia"

Makna Visi PT PELNI (Persero)

Perusahaan Pelayaran

Suatu badan usaha yang menjalankan operasional kapal atau usaha lain yang erat hubungannya dengan kapal yang ditata dalam sistem transportasi yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara massal, menghubungkan, dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan.

Logistik Maritim

Sistem yang mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam manajemen transportasi maritim yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan barang atau sumber daya lainnya, dari titik awal menuju titik penggunaan yang mencakup *inland transport, warehousing, cargo handling, shipping,* dan *port services*.

The Meaning of PT PELNI (Persero) Vision

Shipping Company

A business entity that operates vessels or other businesses closely related to vessels laid out in dynamic transportation system and able to adapt the progress in the future, has the characteristic of being able to carry out massive transportation, connect, and reach the entire region through the waters.

Maritime Logistics

A system that covers all activities involved in maritime transportation management which includes planning, implementation, to supervision of a process of moving goods or other resources, from the starting point to the point of use that includes inland transport, warehousing, cargo handling, shipping, and port services.

VISI & MISI PERUSAHAAN
COMPANY'S VISION & MISSION

Terkemuka
1. Memiliki jaringan trayek yang optimal
2. Memiliki pertumbuhan kinerja perusahaan yang optimal
3. Memiliki *operation & service excellence*
4. *Center of excellence* usaha pelayaran nasional, yang meliputi sumber daya manusia, produksi, distribusi, pelayanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan.

Asia Tenggara
PT PELNI (Persero) akan membuka jaringan bisnis untuk menjaga pertumbuhan dengan melakukan ekspansi ke negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara.

Leading
1. Have an optimal route network
2. Have optimal company performance growth
3. Have operation & service excellence
4. Center of excellence of national shipping business, which includes human resources, production, distribution, service, safety and environmental health.

Southeast Asia
PT PELNI (Persero) will open a business network to maintain growth by expanding to countries located in the Southeast Asian region.

MISI MISSION

1. Menjamin aksesibilitas masyarakat dengan mengelola angkutan laut untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara.
2. Mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia Tenggara.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*.
5. Berkontribusi positif terhadap negara dan karyawan, serta berperan aktif dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Ensure the accessibility of the community by managing sea transportation to support the realization of Wawasan Nusantara.
2. Manage and develop maritime logistics business in Indonesia and Southeast Asia.
3. Increase the value of the company through creativity, innovation, digitization of business processes, and human resource development to achieve sustainable growth.
4. Conduct business fairly by paying attention to the benefits for all stakeholders by applying the principles of good corporate governance.
5. Contribute positively to the country and its employees, as well as play an active role in environmental development and service to the community.

NILAI-NILAI UTAMA DAN PERILAKU
CORE VALUES AND BEHAVIOR

PENETAPAN NILAI - NILAI UTAMA DAN PERILAKU

Nilai-Nilai Utama dan Perilaku disahkan dalam No: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia BUMN di lingkungan PT PELNI (Persero).

ESTABLISHMENT OF CORE VALUES AND BEHAVIOR

Core values and behavior of the Company is established based on the Board of Directors' Decree No: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 Regarding Establishment of Core Values for Human Resources of SOE within PT PELNI (Persero).

Menindaklanjuti Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara maka Kementerian BUMN melakukan transformasi SDM sebagai wujud peran BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, *social welfare*, penyedia lapangan kerja dan penyedia talenta. Sehingga dibentuklah nilai-nilai utama yang sama untuk diimplementasikan dan diinternalisasikan di seluruh BUMN sebagai Budaya Perusahaan. Nilai-Nilai Utama tersebut adalah AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Following up on the Letter of the Minister for State-Owned Enterprises Number: SE-7/MBU/07/2020 concerning the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises, the Ministry of SOEs is transforming HR as a manifestation of the role of SOEs as engines of economic growth, social welfare, job providers and talent providers. So that the same main values are formed to be implemented and internalized in all SOEs as a Corporate Culture. The main values are AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative).

Maksud dan tujuan penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK di lingkungan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Agar seluruh insan PT PELNI (Persero) mengetahui, mengimplementasikan dan menginternalisasikan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja PT PELNI (Persero) yang selaras dengan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) tersebut;
2. Membantu seluruh insan PT PELNI (Persero) agar berperilaku secara benar, baik secara hukum maupun secara etis dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan;
3. Membentuk insan PT PELNI (Persero) berintegritas kuat dan perilaku yang beretika, diharapkan Perusahaan akan memperoleh kepercayaan yang terus-menerus dari para *stakeholders*;

The purpose and objective of establishing the Core Values of AKHLAK in the PT PELNI (Persero) is as follows:

1. All employees of PT PELNI (Persero) are to know, implement and internalize AKHLAK's Core Values seriously, consistently and consequently so as to shape daily behavior and the work culture of PT PELNI (Persero) which is in line with these Core Values;
2. Helping all PT PELNI (Persero) to behave properly, both legally and ethically in order to maintain and enhance the Company's image;
3. Forming PT PELNI (Persero) with strong integrity and ethical behavior, it is hoped that the Company will gain continuous trust from stakeholders;

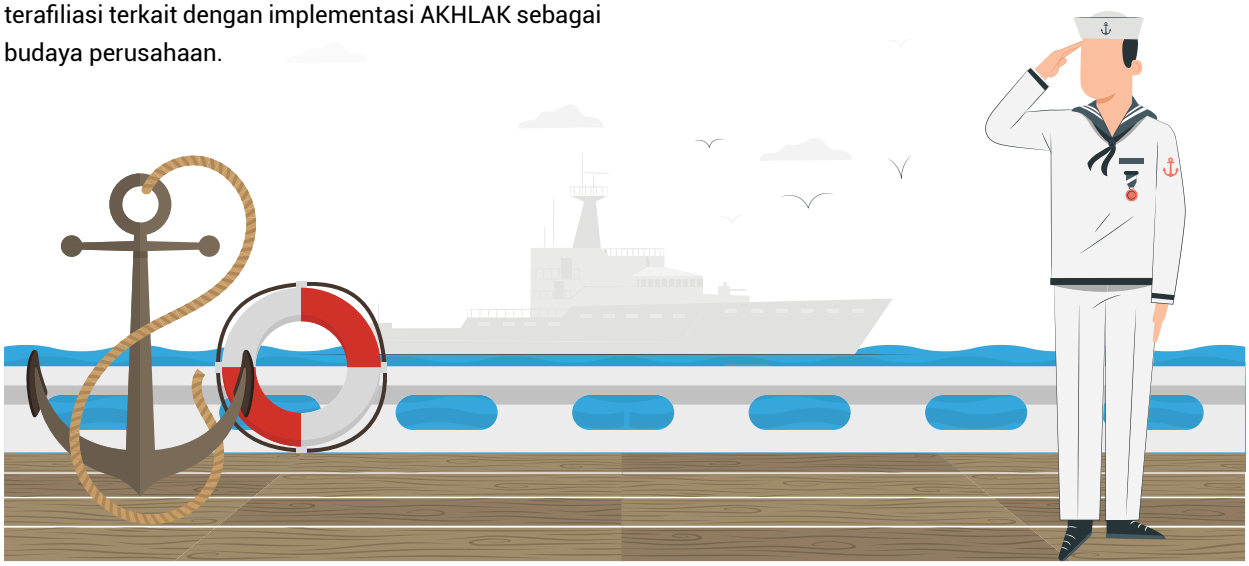
NILAI-NILAI UTAMA DAN PERILAKU
CORE VALUES AND BEHAVIOR

4. Memberikan kejelasan dalam bersikap dan berperilaku bagi insan PT PELNI (Persero) dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
5. Membentuk karakter insan PT PELNI (Persero) yang bertanggungjawab dan beretika dalam berinteraksi baik dengan sesama insan PT PELNI (Persero) maupun dengan pihak di luar Perusahaan;
6. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dengan menjunjung tinggi Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK sehingga akan mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Mendukung hal tersebut, PT PELNI melakukan *launching* budaya perusahaan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020 dan Sosialisasi kepada seluruh pegawai pada tanggal 4 September 2020 melalui media daring. Nilai-nilai utama tersebut juga ditetapkan dalam SK Direksi Nomor: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan PT PELNI (Persero). Untuk mensosialisasikan Nilai-Nilai Utama ini, PT PELNI (Persero) juga melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi terkait dengan implementasi AKHLAK sebagai budaya perusahaan.

4. Provide clarity in attitude and behavior for the employees of PT PELNI (Persero) in carrying out their work activities so as to produce a good reputation, which in turn creates long-term business success;
5. Forming the character of PT PELNI (Persero) which is responsible and ethical in interacting well with fellow employees of PT PELNI (Persero) as well as with parties outside the Company;
6. Creating a healthy and comfortable work atmosphere and environment by upholding AKHLAK's Core Values so that it will support performance improvement continuously.

To support this, PT PELNI launched the corporate culture on 27 August 2020 and socialization to all employees on 4 September 2020 through online media. These main values are also stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 concerning the Determination of Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises within PT PELNI (Persero). To socialize these Core Values, PT PELNI (Persero) also conducts outreach to all work units, subsidiaries and affiliated companies regarding the implementation of AKHLAK as a corporate culture.



NILAI-NILAI UTAMA DAN PERILAKU
CORE VALUES AND BEHAVIOR

NILAI-NILAI UTAMA DAN PERILAKU CORE VALUES AND BEHAVIOR

AKHLAK

AMANAH KOMPETEN HARMONIS LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

AMANAH
Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Uphold the trust given.

Panduan Perilaku
Behavior Guide

a. Memenuhi janji dan komitmen.
Keep promises and commitments
b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
Responsible for the duties, decision and action conducted.
c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
Uphold moral and ethical values

KOMPETEN
Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Keep learning and developing capabilities.

Panduan Perilaku
Behavior Guide

a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
Develop self-competencies to respond ever-changing challenges.
b. Membantu orang lain belajar.
Help others to learn
c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
Complete the duties with best performance.

HARMONIS
Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Care for each other and appreciate differences.

Panduan Perilaku
Behavior Guide

a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
Respect others for whatever their background.
b. Suka menolong orang lain.
Like to help others.
c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Build a conducive work environment.

LOYAL
Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Dedicated and put the interests of the Nation and Country.

Panduan Perilaku
Behavior Guide

a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
Maintain the good name of fellow workers, leaders, SOE and the Country.
b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Willing to sacrifice to achieve the greater goals.
c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
Obey the leaders as long as that is not against the laws and ethics.

ADAPTIF
Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Continue to innovate and be enthusiastic in moving or facing any changes.

Panduan Perilaku
Behavior Guide

a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
Quickly adjust to be better
b. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
Continuously make improvements following technology developments.
c. Bertindak proaktif.
Be pro-active

KOLABORATIF
Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis.
Building synergistic cooperation.

Panduan Perilaku
Behavior Guide

a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
Give a chance to any parties to make a contribution
b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
Be open to work together for making added-value
c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
Empower the use of some resources for the common goals.

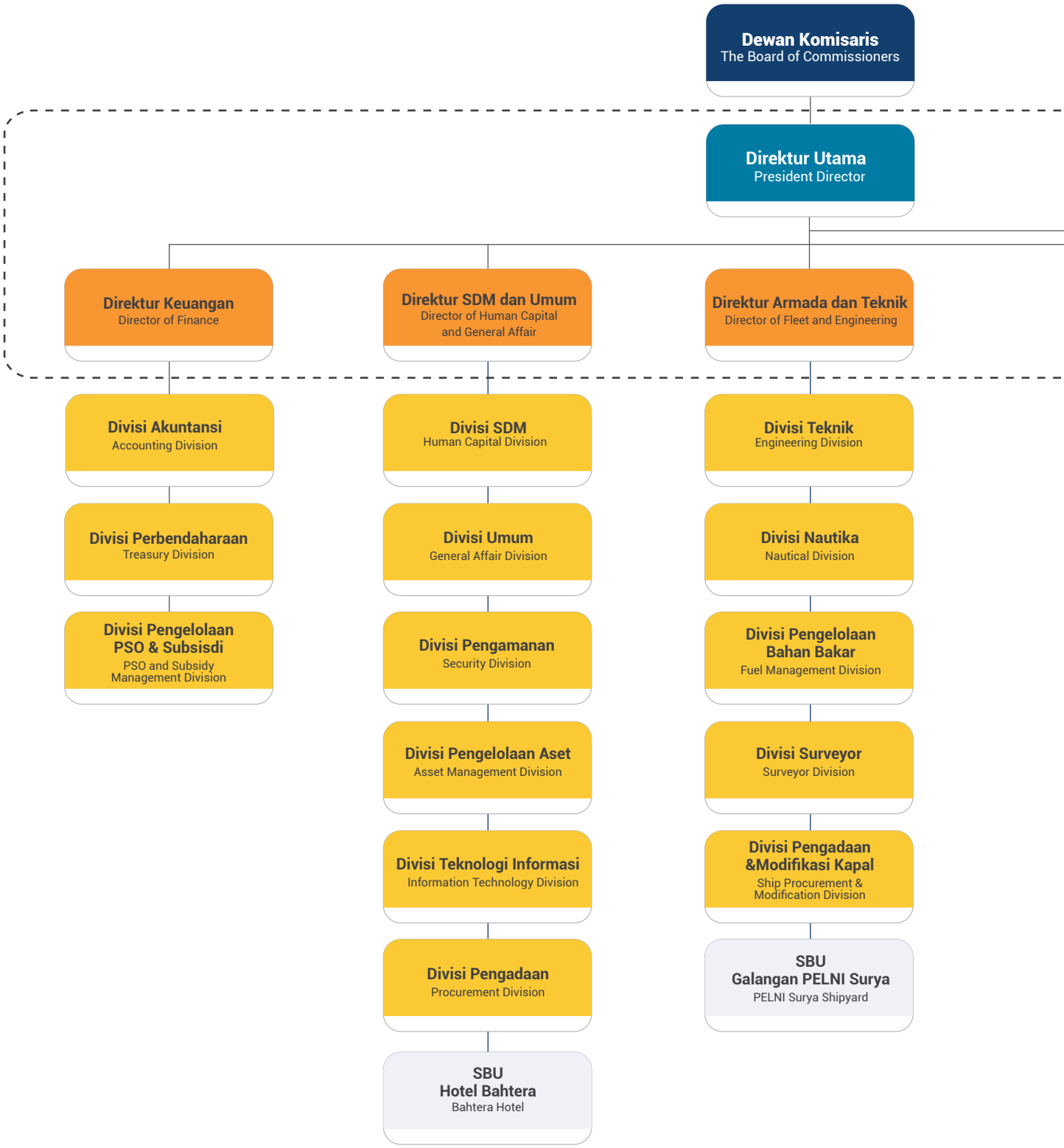
NILAI-NILAI UTAMA DAN PERILAKU
CORE VALUES AND BEHAVIOR

A	K	H	L	A	K
Amanah Trustworthy	**Kompeten** Competent	**Harmonis** Harmonious	**Loyal** Loyal	**Adaptif** Adaptive	**Kolaboratif** Collaborative



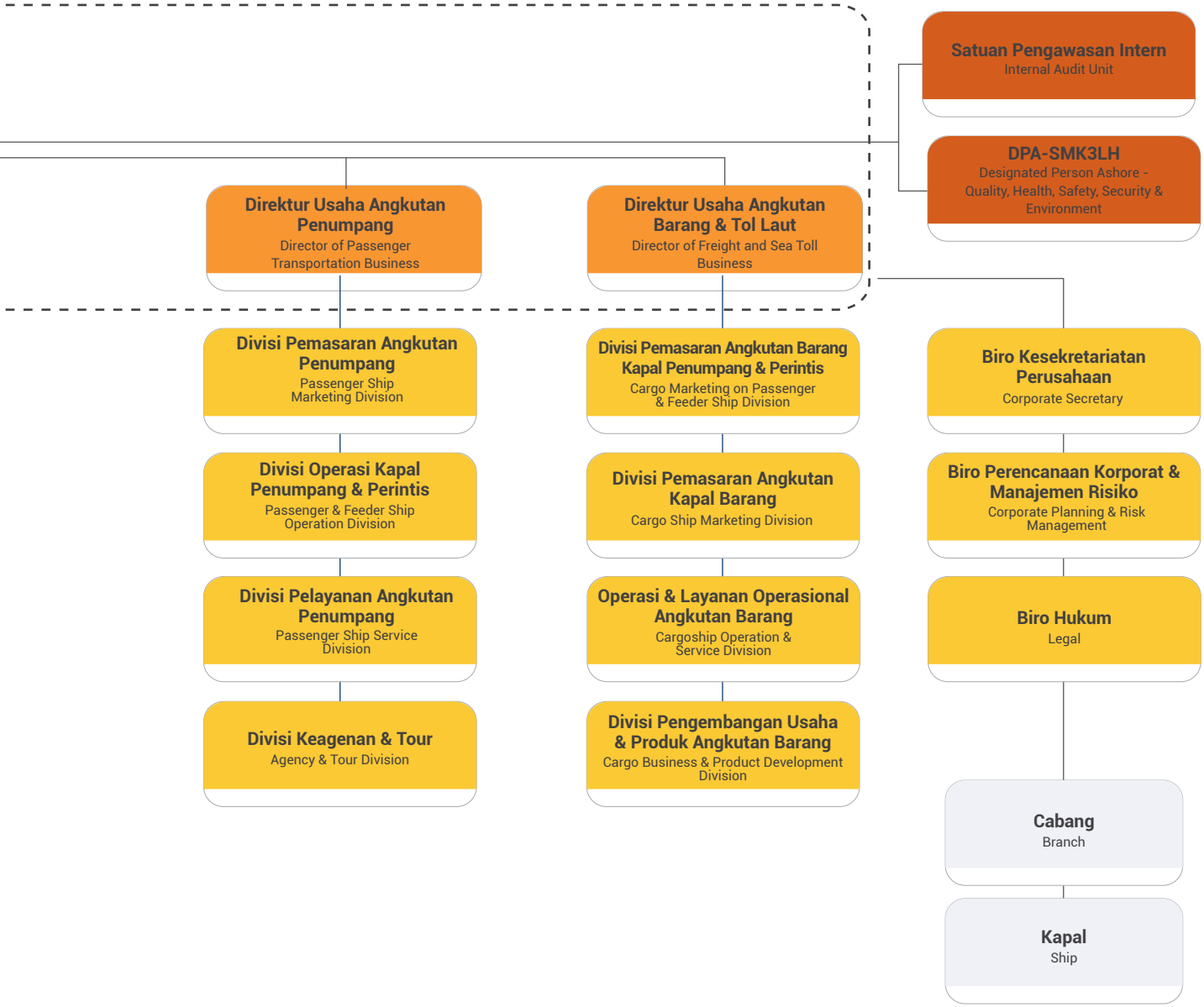
STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE

Struktur Organisasi disahkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.19/01/SK/HKO.01/2019 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat PT PELNI (Persero).

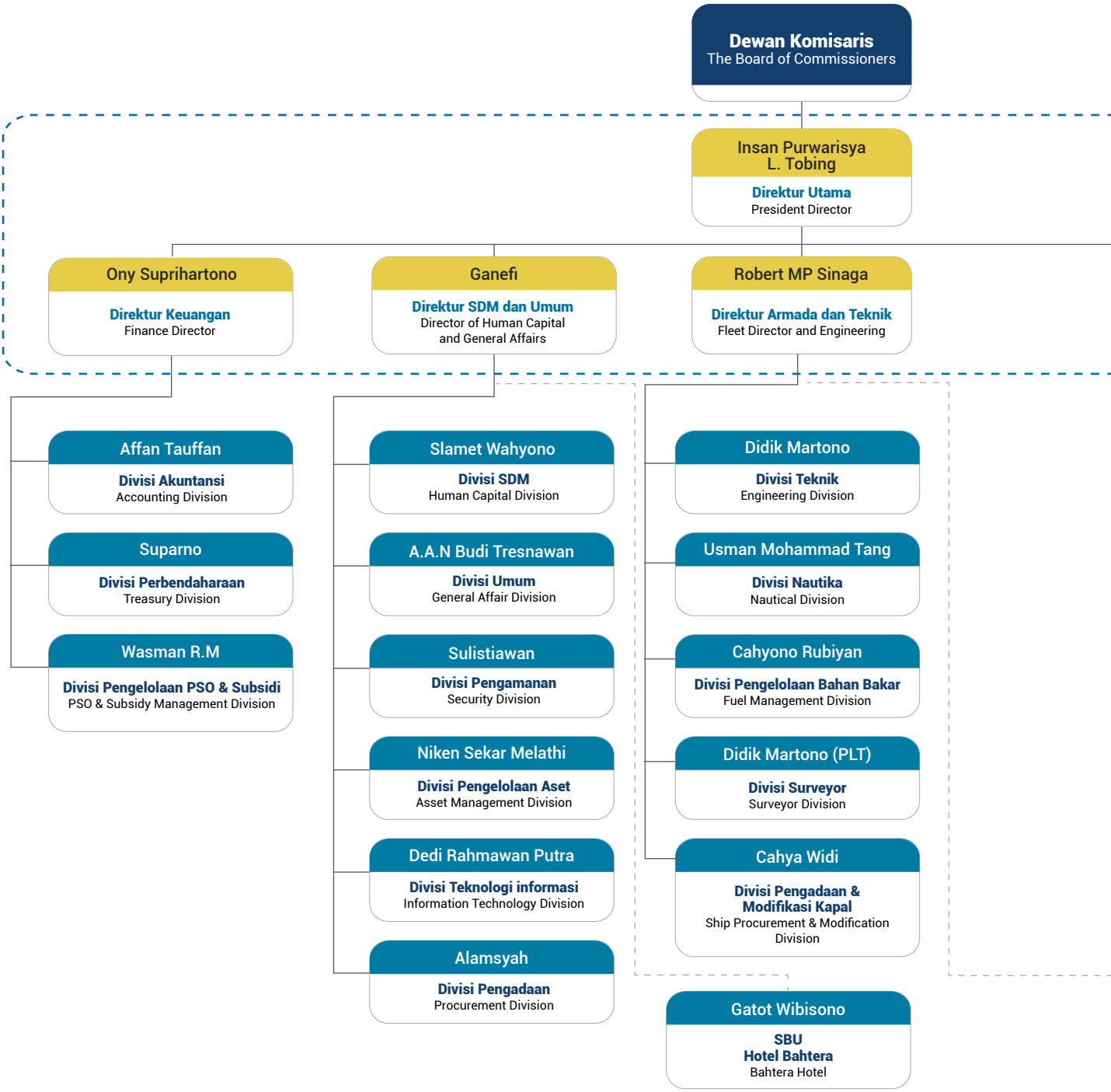


STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE

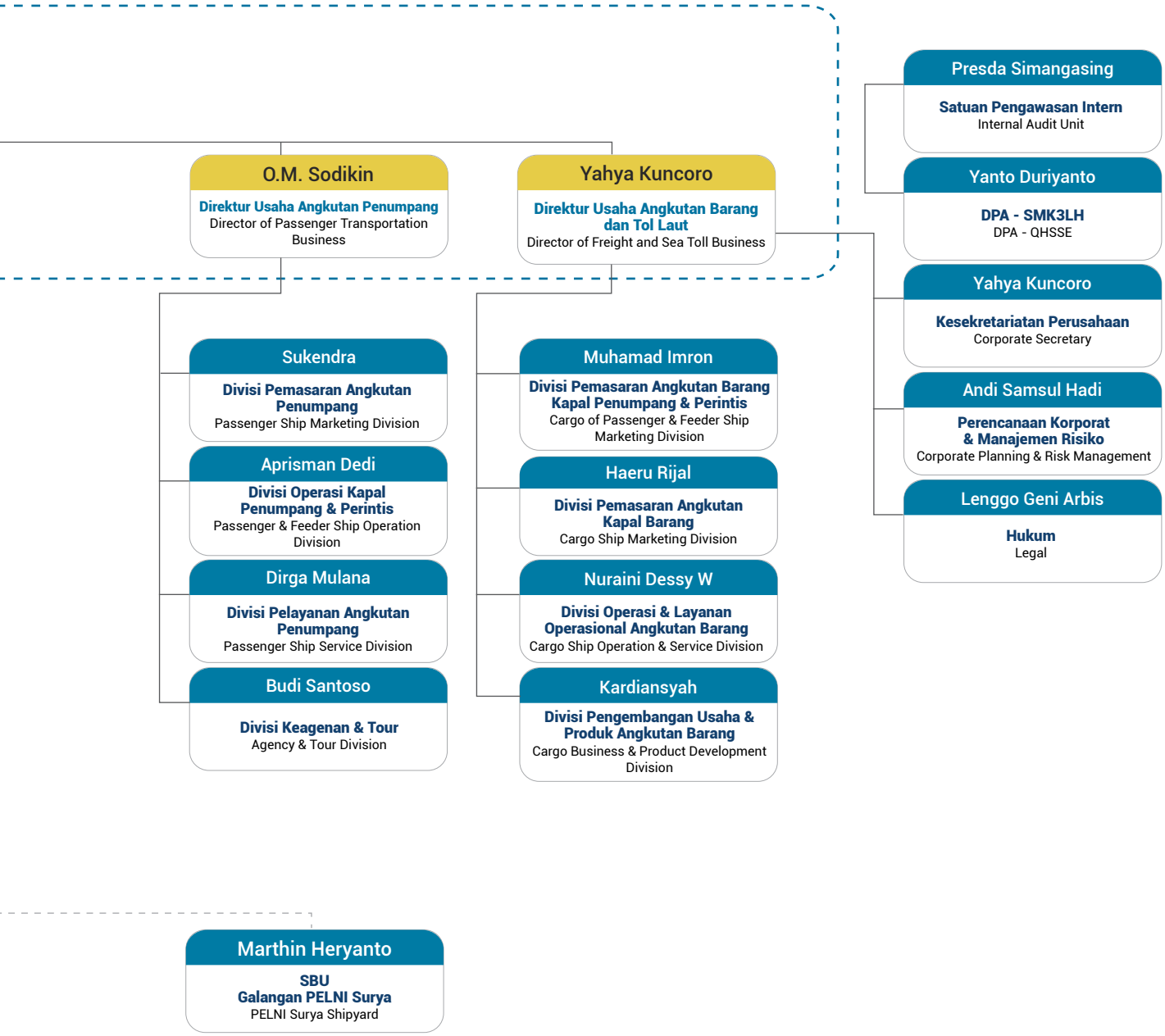
Organization structure is ratified under the Decree of Board of Directors Number: 03.19/01/SK/HKO.01/2019 regarding Organization Structure, Main Duty and Function of PT PELNI (Persero).



STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE

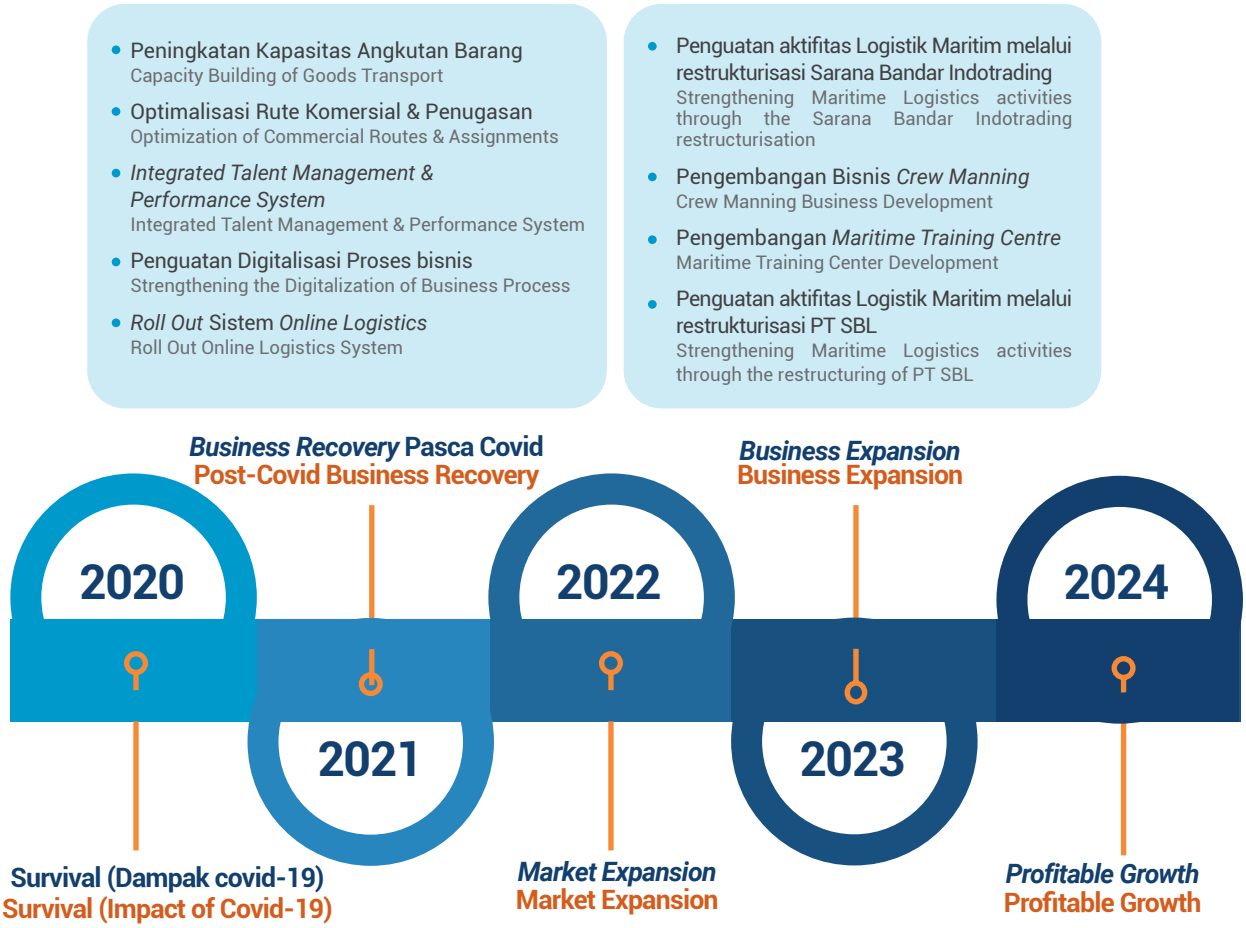


STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE



SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM 2020
HC MANAGEMENT POLICY IN 2020



SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan di tahun 2020 untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan kebijakan dari pemegang saham, PT PELNI (Persero) melakukan pembaharuan dan penyempurnaan dalam kebijakan dan sistem pengelolaan SDM guna menunjang Visi Misi Perusahaan. Di tahun 2020, PT PELNI (Persero) merumuskan beberapa aturan yang ditetapkan dalam kebijakan untuk mendukung *sustainability* perusahaan dalam masa pandemi Covid – 19 selain itu perusahaan juga tetap melakukan pengembangan *talent*, budaya perusahaan dan penguatan organisasi sesuai dengan aspirasi pemegang saham. Aturan-aturan tersebut antara lain:

1. SK Direksi Nomor: 01.17/01/SK/HKO.01/2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.16/01/SK/HKO/01/2017 tentang Struktur Oganisasi Kapal PT PELNI (Persero);

2. SK Direksi Nomor: 01.20/02/SK/HKO.01/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 12.06/01/SK/HKO.01/2017 tentang Penetapan Peraturan Dinas Awak Kapal PT PELNI (Persero).

3. SK Direksi Nomor: 02.17/02/SK/HKO.01/2020 tentang Penetapan Model Keluarga Jabatan (*Job Family Modelling*) di PT PELNI (Persero);

4. SK Direksi Nomor: 03.02/02/SK/HKO.01/2020 tentang SOP Pencegahan Penyebaran Novel Coronavirus dan virus lainnya;

5. SK Direksi Nomor: 03.02/03/SK/HKO.01/2020 tentang Tim Tanggap Darurat Penanganan Coronavirus dan Virus lainnya di Lingkungan PT PELNI (Persero);

6. SK Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT PELNI (Persero);

In line with the Company's Long-Term Plan for 2020 to deal with the COVID-19 pandemic and policies from shareholders, PT PELNI (Persero) is making updates and improvements in its HR management policies and systems to support the Company's Vision and Mission. In 2020, PT PELNI (Persero) formulates several rules stipulated in the policy to support company's sustainability during the Covid-19 pandemic. Besides that, the company also continues to develop talent, corporate culture and organization affirmation according to the aspirations of shareholders. These rules include:

1. Decree of the Board of Directors Number: 01.17/01/SK/HKO.01/2020 on Amendment to the Decree of the Board of Directors Number: 06.16/01/ SK/HKO.01/2017 concerning PT PELNI (Persero) Ship Organization Structure;
2. The Directors' Decree Number: 01.20/02/SK/HKO.01/2020 regarding Second Amendment of the Directors' Decree: 12.06/01/SK/HKO.01/2017 regarding Establishment of Official Ship Crews Regulation of PT PELNI (Persero)

3. Decree of the Board of Directors Number: 02.17/02/SK/HKO.01/2020 concerning the Establishment of a Job Family Modeling at PT PELNI (Persero);

4. Decree of the Board of Directors Number: 03.02/02/SK/HKO.01/2020 concerning SOP for Prevention of the Spread of Novel Coronavirus and other viruses;

5. Decree of the Board of Directors Number: 03.02/03/SK/HKO.01/2020 concerning the Emergency Response Team for Handling Coronavirus and Other Viruses within PT PELNI (Persero);

6. Decree of the Board of Directors Number: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 concerning PT PELNI (Persero) Employee Discipline Regulations;

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

7. SK Direksi Nomor: 04.20/01/SK/HKO.01/2020 tentang Komite Talenta di Lingkungan PT PELNI (Persero);

8. SK Direksi Nomor: 05.18/01/SK/HKO.01/2020 tentang Tim *Task Force* Penanganan Coronavirus dan Virus lainnya dalam mengantisipasi fase *new normal life* di PT PELNI (Persero);

9. SK Direksi Nomor: 05.21/01/SK/HKO.01/2020 tentang Protokol *New Normal Life* PT PELNI (Persero);

10. SK Direksi Nomor: 07.28/01/SK/HKO.01/2020 tentang Sasaran, Strategi & Kebijakan Fase *The New Normal* PT PELNI (Persero);

11. SK Direksi Nomor: 08.10/01/SK/HKO.01/2020 tentang Standar Prosedur Pemeliharaan Kesehatan di PT PELNI (Persero);

12. SK Nomor : 05.23/05/SK/HKO.01/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pendidikan & Pelatihan di PT PELNI (Persero);

13. SK Direksi Nomor: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan PT PELNI (Persero);

14. SK Direksi Nomor: 12.30/01/SK/HKO.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Coaching* di Lingkungan PT PELNI (Persero);

15. Instruksi Direksi Nomor: 04.07/01/ND-B/090/2020 tentang Protokol Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 pada Nakhoda dan Awak Kapal PT PELNI(Persero);

7. Decree of the Board of Directors Number: 04.20/01/SK/HKO.01/2020 concerning the Talent Committee within PT PELNI (Persero);

8. Decree of the Board of Directors Number: 05.18/01/SK/HKO.01/2020 concerning the Task Force Team for Handling Coronavirus and other Viruses in anticipating the new normal life phase at PT PELNI (Persero);

9. Decree of the Board of Directors Number: 05.21/01/SK/HKO.01/2020 concerning PT PELNI (Persero) New Normal Life Protocol;

10. Decree of the Board of Directors Number: 07.28/01/SK/HKO.01/2020 concerning the Targets, Strategies & Policies of PT PELNI (Persero) 's The New Normal Phase;

11. Decree of the Board of Directors Number: 08.10/01/SK/HKO.01/2020 concerning Standard Health Care Procedures at PT PELNI (Persero);

12. Decree No : 05.23/05/SK/HKO.01/2019 on Standard Operational Procedure of Employee Education and Training at PT PELNI (Persero);

13. Decree of the Board of Directors Number: 10.07/01/SK/HKO.01/2020 concerning Determination of Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises within PT PELNI (Persero);

14. Decree of the Board of Directors Number: 12.30/01/SK/HKO.01/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Coaching within PT PELNI (Persero);

15. Instruction of the Board of Directors Number: 04.07/01/ND-B/090/2020 concerning the Protocol for the Prevention and Handling of the Covid-19 Pandemic for the Captain and Crew of PT PELNI (Persero);

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

16. Instruksi Direksi Nomor: 04.11/02/ND-B/090/2020 tentang Pembatasan Sosial dan Larangan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
17. Instruksi Direksi Nomor: 04.12/01/ND-B/090/2020 tentang Protokol Pasca *Rapid Test* Covid-19 di PT PELNI (Persero);
18. SE Direktur SDM & Umum Nomor: 10.06/01/SE/HKO.03/2020 tentang Implementasi Aplikasi *Helpdesk & Employee Assistance Program* di Lingkungan PT PELNI (Persero);
19. SE Direktur SDM & Umum Nomor: 12.28/01/SE/HKO.03/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia BUMN di Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi PT PELNI (Persero).

16. Directors Instruction Number: 04.11/02/ND-B/090/2020 concerning Social Restrictions and Prohibition of Traveling Out of the Region and / or Homecoming Activities in Efforts to Prevent the Spread of Covid-19;
17. Directors Instruction Number: 04.12/01/ND-B/090/2020 concerning the Post-Covid-19 Rapid Test Protocol at PT PELNI (Persero);
18. Director of Human Resources & General Affairs Circular Number: 10.06/01/SE/HKO.03/2020 concerning the Implementation of the Application Helpdesk & Employee Assistance Program in PT PELNI (Persero);
19. Director of Human Resources & General Affairs Circular Number: 12.28/01/SE/HKO.03/2020 concerning Determination of Core Values of BUMN Human Resources in Subsidiaries and Affiliated Companies of PT PELNI (Persero).

PROFIL SDM 2020

Per 31 Desember 2020, jumlah pegawai Perseroan adalah 5.327 orang turun 6.13% dari tahun sebelumnya yaitu 5.654 pegawai pada tahun 2019. Penurunan tersebut diakibatkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi dan salah satu strategi perusahaan untuk bertahan adalah tidak melakukan rekrutmen dalam jumlah besar. Rekrutmen hanya diutamakan untuk posisi inti baik di kantor pusat, kantor cabang dan kapal. Perseroan memberikan perlakuan dan kesempatan pengembangan karir yang setara kepada seluruh pegawai tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi.

Deskripsi profil SDM berdasarkan level jabatan, jenis kelamin, status kepegawaian, tingkat pendidikan dan usia pengembangan kompetensinya pada tahun 2020, sebagai berikut:

HR PROFILE 2020

As of 31 December 2020, the number of the Company's employees was 5,327 people, decreasing 6.13% from the previous year, namely 5,654 employees in 2019. This decrease was due to pandemic in 2020 and one of the company's strategies to survive is not to recruit large numbers of people. Recruitment is only prioritized for core positions at the head office, branch offices and ships. The Company provides equal treatment and career development opportunities to all employees without discrimination based on gender, ethnicity, religion, race or other discriminatory matters.

Descriptions of HR profiles based on position level, gender, employment status, education level and age of competency development in 2020 are as follows:

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Berdasarkan level organisasi, didominasi oleh pegawai jenjang bintara dan tamtama (setara *staff*/pelaksana) sebesar 50.9%. Hal ini sejalan dengan model bisnis Perseroan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja operasional di kapal.

Employee Composition based on Position Level

Based on organizational level, 50.9% was dominated by non-commissioned and enlisted employees (same level staff/executives) level. This is in line with the Company's business model which absorbs more operational workforce onboard.

No	Uraian Description	2020	2019	Komposisi Composition
Pegawai Darat Ashore Employee				
A	Direksi Directors	6	-	0.11%
	2 - 4 (Upper Mgr.)	55	59	1.03%
	5 - 7 (Middle Mgr.)	161	164	3.02%
	8 - 9 (lower Mgr.)	173	177	3.25%
	10 - 13 (Staff & Officer)	502	509	9.42%
	14 - 16 (Adm. Officer)	146	164	2.74%
	Jumlah Total	1.043	1.073	19.58%
Pegawai Laut Onboard Employee				
B	3 - 9 (Perwira | Commissioned Officer)	1.185	1.039	22.25%
	10 - 12 (Bintara | Non-Commissioned Officer)	567	576	10.64%
	13 - 15 (Tamtama | Enlisted Officer)	2.147	2.495	40.30%
	Jumlah Total	3.899	4.110	73.19%
Pegawai Darat (Anak Perusahaan) Ashore Employee (Subsidiary)				
C	2 - 4 (Upper Mgr.)	9	16	0.17%
	5 - 7 (Middle Mgr.)	25	29	0.47%
	8 - 9 (lower Mgr.)	33	38	0.62%
	10 - 13 (Staff & Officer)	241	296	4.52%
	14 - 16 (Adm. Officer)	77	92	1.45%
	Jumlah Total	385	471	7.23%
Jumlah Keseluruhan Total Number		**5.327**	**5.654**	**100.00%**

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, 89,1% didominasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan banyaknya pekerjaan operasional yang lebih diminati dan sesuai untuk laki-laki, misalnya di cabang dan kapal, namun demikian Perseroan berkomitmen tetap memberlakukan kesetaraan *gender* dalam kesempatan berkarir di dalam Perseroan.

Employee Composition Based on Gender

Employee composition based on gender, 89.1% was dominated by men. This was due lots of operational jobs are more desirable and suitable for men, such as in branches and ships. However, the Company is committed to apply gender equality in career opportunities within the Company.

Uraian Description	2020					
	Jumlah Total	Laki-Laki Male		Jumlah Total	Perempuan Female	
		Pegawai Tetap Permanent Employees	Pegawai Tidak Tetap Temporary Employees		Pegawai Tetap Permanent Employees	Pegawai Tidak Tetap Temporary Employees
Pegawai Darat Ashore Employees	894	847	47	534	522	12
Pegawai Laut Onboard Employees	3.854	1.880	1.974	45	4	41
Jumlah Total	4.748	2.727	2.021	579	526	53
	5327					

Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja & Status Kepegawaian

Komposisi pegawai berdasarkan status pegawai, 61,1% didominasi oleh pegawai tetap yang disebut pegawai organik. Jumlah pegawai kontrak atau pegawai non-organik dikarenakan masih terdapat beberapa pekerjaan yang bersifat teknis dan tidak memerlukan keahlian khusus serta sejumlah armada yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero) merupakan penugasan dan sewaktu-waktu dapat digantikan atau ditarik oleh pemegang saham.

Composition of Employees by Working Area & Staffing Status

The composition of employees based on employee status, 61.1% is dominated by permanent employees called organic employees. The number of contract employees or non-organic employees is because there are still some technical work and do not require special expertise and a number of fleets operated by PT PELNI (Persero) is an assignment and can be replaced at any time or withdrawn by shareholders.

No	Uraian Description	Non Organik Non Organic	Organik Organic	Jumlah Total
1	Pegawai Darat Ashore Employees	59	1.369	1.428
2	Pegawai Laut Onboard Employees	2.015	1.884	3.899
	Jumlah Total	2.074	3.253	**5.327**

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Posisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan, 43,6% didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan < SLTA. Hal ini sejalan dengan model bisnis Perseroan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja di cabang dan operasional kapal. Namun demikian Perusahaan tetap membekali pegawai dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan melalui pelatihan yang diberikan agar pegawai memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang dilakukan.

Employee Composition Based On Educational Background

Based on educational background, 43.6% was dominated by employees with a high school background. This is in line with the Company's business model which absorbs more workers for branches and ship operations. However, the Company still provides the competencies programs for employees through training that gives expertise needed for the operational job.

No	Uraian Description	2020	2019	Komposisi Composition
1	Doktor Doctor	0	0	0.00%
2	Pasca Sarjana Master Degree	49	53	0.92%
3	Sarjana Bachelor	653	660	12.26%
4	Diploma Diploma	227	463	4.26%
5	≤ SLTA Highschool	2.324	3.200	43.63%
6	ANT I ANT I	121	108	2.27%
7	ANT II ANT II	153	97	2.87%
8	ANT III ANT III	581	285	10.91%
9	≤ ANT IV ≤ ANT IV	175	125	3.29%
10	ATT I ATT I	76	82	1.43%
11	ATT II ATT II	105	97	1.97%
12	ATT III ATT III	486	292	9.12%
13	≤ ATT IV ≤ ATT IV	377	192	7.08%
	Jumlah Total	**5.327**	**5.654**	**100.00%**

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Posisi Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan kelompok usia, komposisi pegawai pada kelompok umur 40-49 tahun dan 50-55 tahun masing-masing adalah 21,5% dan 30,2%. Komposisi secara umum pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perseroan masih memiliki pegawai yang produktif (41,2%) untuk menjalankan bisnis ke depan. Di sisi lain perlu mempersiapkan regenerasi secara cepat untuk menggantikan pegawai yang berusia lebih dari 50 tahun.

Employee Composition Based on Age

Based on age of employee, 40-49 and 50-55 years old of employee were respectively 21.5% and 30.2%. The general composition in 2020 showed that the company still has productive employees to run the business for the years to come, and regeneration is needed to replace more than 50 years old of employees.

No	Uraian Description	2020	2019	Komposisi Composition
1	>55	380	178	7.13%
2	50 - 55	1.610	1.511	30.22%
3	40 - 49	1.147	1.782	21.53%
4	31 - 39	1.034	895	19.41%
7	<30	1.156	1.288	21.70%
	Jumlah Total	**5.327**	**5.654**	**100.00%**

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Dalam rangka mewujudkan roadmap PT PELNI 2020-2024, PT PELNI (Persero) senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan semangat belajar pegawai untuk siap bertransformasi dengan meningkatkan kualitas pegawai sebagai aset utama perusahaan. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini, tidak menyurutkan semangat belajar dari para pegawai PT PELNI (Persero). Upaya tersebut diimplementasikan melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan yang dilakukan secara berkala dan dianggarkan untuk semua level pegawai, baik darat maupun laut sehingga setiap pegawai PT PELNI (Persero) akan mendapakan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni, dengan beragam metode yang dapat disesuaikan.

HR COMPETENCY DEVELOPMENT

In order to realize the 2020-2024 PT PELNI roadmap, PT PELNI (Persero) always strives to continue improving employee's learning enthusiasm with an eye to be ready for transformation by improving their qualities as the company's main asset. The Covid-19 pandemic occurred in 2020, did not dampen the enthusiasm for learning from the employees of PT PELNI (Persero). These efforts are implemented through training programs and knowledge transfer which are carried out regularly and budgeted for all levels of employees, both ashore and onboard, so that every employee of PT PELNI (Persero) will get qualified knowledge and skills with a variety adjustable methods.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Program pelatihan di Tahun 2020 terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. **Diklat Orientasi**
   Pelatihan Orientasi diselenggarakan bagi calon pegawai agar mengenali ruang lingkup perusahaan, fungsi dan tugas jabatannya di lingkungan Perusahaan sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman, serta sikap-sikap dasar untuk beradaptasi dengan budaya perusahaan dan siap bekerja guna mendukung perwujudan visi dan misi Perusahaan.

2. **Diklat Teknis**
   Pelatihan Teknis adalah pelatihan untuk jabatan-jabatan pelaksana dan staf pada fungsi-fungsi utama organisasi yang mendukung bisnis inti perusahaan, yang terdiri dari:
   a. **Pelatihan Tingkat Mula**
      - Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan yang bersifat semi analisa, teknis, dan berdasarkan *value chain* perusahaan.
      - Peserta pelatihan tingkat mula adalah pegawai dengan kelas jabatan 13 dan 12.

   b. **Pelatihan Tingkat Lanjut**
      - Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan yang bersifat analisa, teknis, dan berdasarkan *value chain* perusahaan.
      - Peserta pelatihan tingkat lanjut adalah pegawai dengan kelas jabatan 11 dan 10.

Training program in 2020 is divided into several types, including:

1. **Orientation education and training**
   Orientation training is given to prospective employees to recognize the scope, functions and duties in the Company so that they have knowledge, understanding, and attitudes foundation to adapt to corporate culture and ready to work to support the creation of the Company's vision and mission.

2. **Technical Education and Training**
   Technical Training is given to executive and staff positions in management functions of the organization that support the company's core business, consisted of:
   a. **Beginning Level Training**
      - This training must be participated by employee to be more optimal in conducting the function and duties of semi-analysis, technical and based on Company's value chain.
      - Beginning level training is for 13 and 12 position level of employee.

   b. **Advance Level Training**
      - This training must be attended by employees to be more optimal in conducting the function and duties in analysis, technical, and Company's value chain
      - Advance Level training is for 11 and 10 position levels.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

3. Diklat Manajerial

Pelatihan Manajerial diselenggarakan bagi pejabat struktural/fungsional dalam mengembangkan diri dan organisasi agar mampu melaksanakan fungsi dan tugas pokok dari jabatan-jabatan manajerial, yang terdiri dari:

a. Pelatihan Manajerial Tingkat Muda

Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat muda pada kelas jabatan 9 sampai 8.

b. Pelatihan Manajerial Tingkat Madya

Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat madya pada kelas jabatan 7 sampai 5.

4. Pelatihan Pengayaan

Pelatihan pengayaan bertujuan untuk membekali para pegawai dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap-sikap pegawai agar senantiasa dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan bisnis serta kemajuan teknologi informasi yang menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok pada jabatan yang didudukinya.

Jenis pelatihan pengayaan dapat berupa lokakarya/ *workshop*, seminar, konferensi, simposium, penyuluhan/sosialiasi yang dikemas dalam bentuk *inhouse training* maupun *public training*. Namun pada tahun 2020, sebagian besar metode pembelajaran yang digunakan adalah virtual, sesuai dengan anjuran protokol kesehatan untuk tidak melakukan aktivitas berkerumun.

3. Managerial Education and Training

Managerial training is for structural/functional officials to develop themselves and organizations in order to be able to carry out the main functions and tasks in managerial positions, which consists of:

a. Youth Managerial Training

This basic managerial training must be attended by employees to be more optimal in conducting the function and duties in managerial positions of 9 until 8 position levels.

b. Intermediate Managerial Training

This training must be attended by employees to be more optimal in conducting the function and duties in managerial positions of 7 until 5 position levels.

4. Enrichment Training

Enrichment training aims to give knowledge, understanding, skills and behaviour to employees, so they can always anticipate and adapt to business development and information technology advances that support the success of main functions and duties in their current position.

Enrichment training is workshops, seminars, conferences, symposia, counseling/socialization which packaged in the form of in-house training and public training; However, in 2020, most of the learning methods used are virtual, in accordance with the recommended health protocols to avoid crowd activities.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

5. Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi adalah program pemenuhan sertifikat kompetensi pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau ketentuan *International Maritime Organization* (IMO) yang berlaku dan bersifat *mandatory*.

Sertifikasi profesi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

a. Sertifikasi profesi pegawai darat

Sertifikasi pegawai darat adalah pelatihan dengan suatu penetapan yang diberikan oleh organisasi profesional tertentu terhadap pegawai darat untuk menunjukkan bahwa pegawai tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.

b. Sertifikasi profesi pegawai laut

Sertifikasi pegawai laut adalah pelatihan yang harus dilaksanakan oleh pegawai laut merujuk kepada ketentuan dari *Standards of Training Certification and Watchkeeping* (STCW) sebagai prasyarat untuk dapat berlayar.

6. Pelatihan Purnabakti

Pelatihan Purnabakti adalah pelatihan yang diselenggarakan guna membekali para pegawai yang hendak menjalani pensiun dengan pengetahuan, keterampilan, sikap mental spiritual serta kewirausahaan untuk menghadapi masa pensiun agar siap dan mampu mandiri serta tetap produktif pada saat menjalani masa pensiunnya.

5. Professional Certification

Profession certification is employee competency certification program based on law-regulation, Government's regulation, or International Maritime Organization (IMO) regulation.

Professional Certification consists of 2 (two) types:

a. Ashore employee certification

Ashore employee certification is training from a particular professional organization for ashore employees to show that the employee is capable of carrying out a specific job or duties.

b. Onboard employee certification

Onboard employee certification is a training participated by onboard employees referring to the provisions of the Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) as a requirement for sailing.

6. Post-employee Training

Post-Employee Training is a training for employees who want to retire with knowledge, skills, mental and spiritual attitude and entrepreneurship to ready face retirement and be able to be independent and still productive on their retirement.

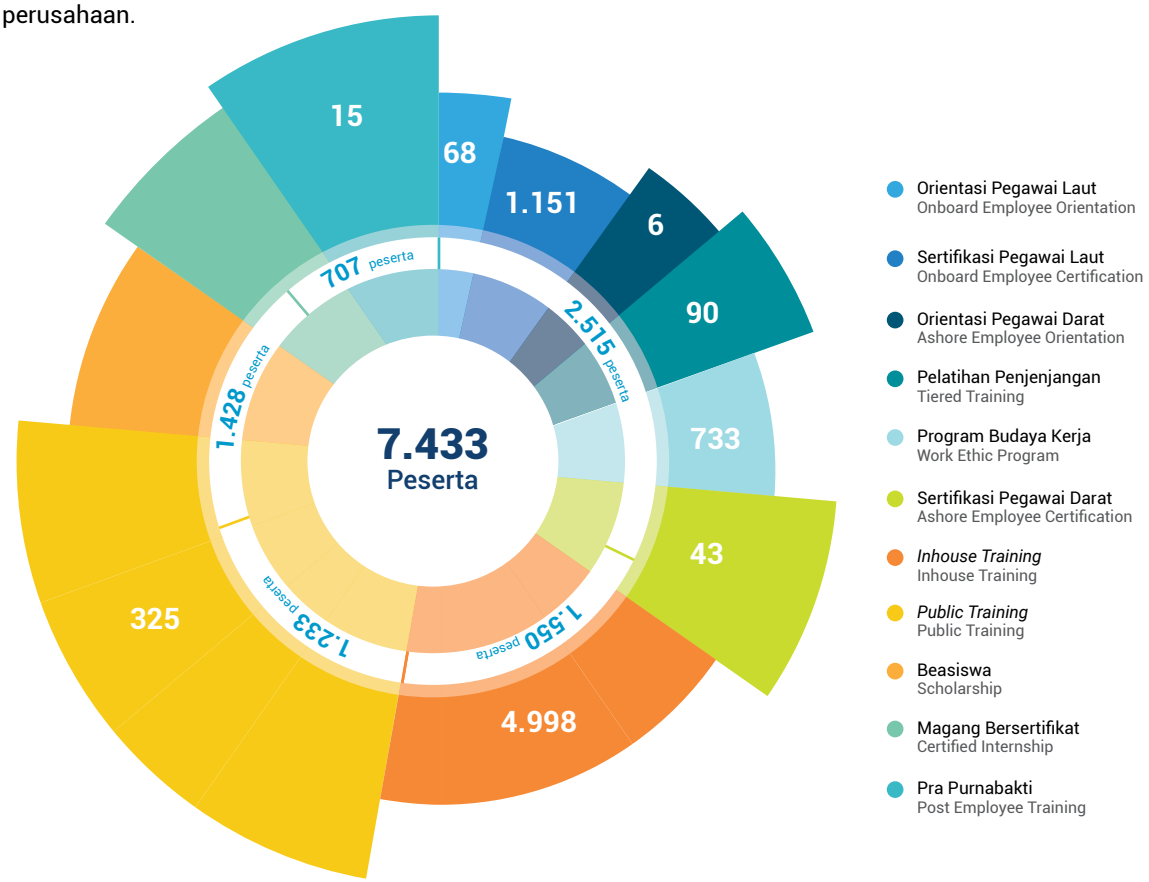
SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan

Sepanjang tahun 2020 PT PELNI (Persero), telah memberikan pelatihan dan program pengembangan kepada 913 orang pegawai darat dan 1.667 pegawai laut dari total kepesertaan program yaitu 7.433 Pegawai darat dan laut, guna memperkuat kompetensi inti pegawai. Pengembangan kompetensi yang dimaksud tersebut dapat berupa seminar, *workshop* dan sertifikasi serta pelatihan penjenjangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Number of Employees Who Get Training

Throughout 2020, PT PELNI (Persero) has provided training and development programs to 913 ashore employees and 1,667 onboard employees of the total program participation, namely 7,433 ashore and onboard employees, in order to strengthen the core competencies of employees. The competency development can be in the form of seminars, workshops and certifications as well as ranking training conducted by company.



	VP/Setara VP/Same Level	Mgr/Setara Mgr/Same Level	Spv/Setara Spv/Same Level	Staff Staff	Officer Officer	Jumlah Total
Pusat Head Office	194	574	640	737	299	2.444
Cabang Branch	171	279	349	494	975	2.268
Kapal Ship	342	575	244	319	1.241	2.721
Jumlah Total	707	1.428	1.233	1.550	2.515	7.433

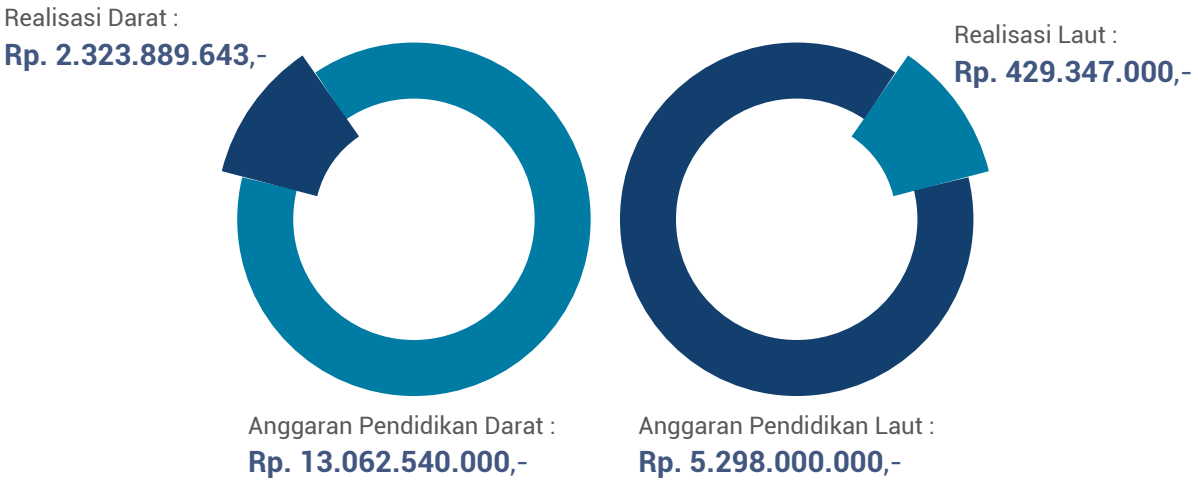
SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2020 untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pendidikan, seminar, *workshop*, sertifikasi dan beasiswa untuk pegawai laut dan darat adalah sebesar Rp 2.753.236.643,- dengan rincian sebagai berikut :

COST FOR EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Costs spent by the company in 2020 for employee competency development through training, education, seminars, workshops, certifications and scholarships for onboard and ashore employees was Rp2,753,236,643.-



Gambar : Realisasi Anggaran Pengembangan SDM 2020
Image: Realization of the 2020 HR Development Budget

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk biaya pendidikan dan pelatihan tidak terlalu besar dibandingkan dengan Anggaran Pengembangan SDM 2020. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pembatasan anggaran yang diterapkan perusahaan terkait masa pandemi covid-19 sehingga program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan biaya seefisien mungkin tanpa mengesampingkan kebutuhan pengembangan pegawai.

Based on the data above, the absorption of the budget for education and training costs is not too large compared to the 2020 Human Resources Development Budget. This is related to the budget restriction policies implemented by the company regarding Covid-19 pandemic period so that education and training programs are carried out in the most efficient cost possible without prejudice to employee development needs.

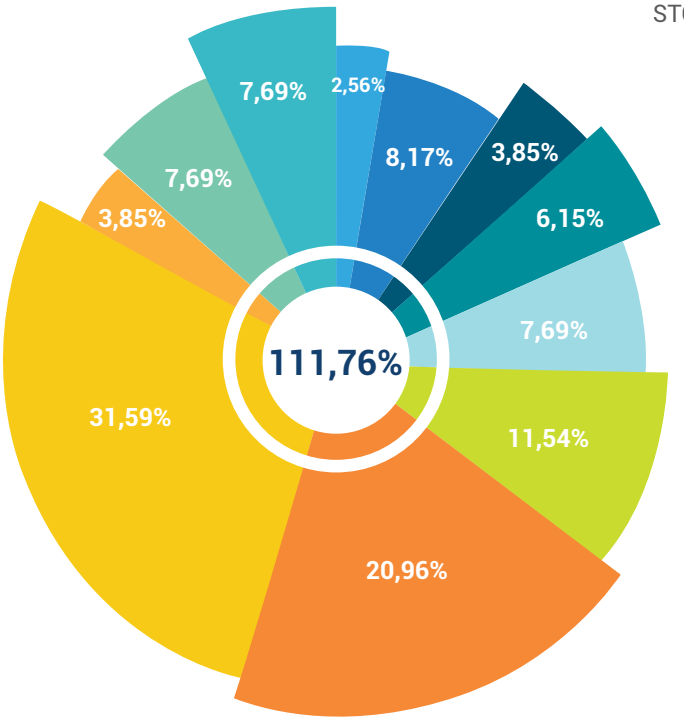
SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Realisasi Diklat 2020 (Jumlah Pegawai/ Peserta)

Sepanjang tahun 2020 PT PELNI (Persero) telah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk pegawai kantor pusat, pegawai kantor cabang dan juga pegawai di kapal. Jumlah pegawai darat (kantor pusat dan kantor cabang) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 913 pegawai darat (4.712 kepesertaan program), serta sebanyak 1.393 orang pegawai laut (5.442 kepesertaan program). Adapun realisasi program pendidikan dan pelatihan tahun 2020 PT PELNI (Persero) sebesar 111,76% dari target yang telah ditetapkan, program pengembangan berupa seminar, *workshop*, dan sertifikasi serta pelatihan penjenjangan. Sedangkan untuk pemenuhan sertifikasi pegawai laut sesuai STCW Amandemen Manila 2010 adalah sebesar 106%.

Training Realization of 2020 (Number of Employees/Participants)

Throughout 2020 PT PELNI (Persero) has implemented training and development programs for head office employees, branch office employees and also employees on ships. The number of ashore employees (head office and branch offices) who have attended education and training is 913 ashore employees (4,712 program memberships), and 1,393 onboard employees (5,442 program memberships). As for the realization of PT PELNI (Persero) 's 2020 education and training programs as 111.76% of the predetermined target, development programs in the form of seminars, workshops and certification as well as ranking training. Meanwhile, the fulfillment of onboard employee certification according to the 2010 Manila Amendment STCW is 106%.



- Orientasi Pegawai Laut — Onboard Employee Orientation
- Sertifikasi Pegawai Laut — Onboard Employee Certification
- Orientasi Pegawai Darat — Ashore Employee Orientation
- Pelatihan Penjenjangan — Tiered Training
- Program Budaya Kerja — Work Ethic Program
- Sertifikasi Pegawai Darat — Ashore Employee Certification
- *Inhouse Training* — Inhouse Training
- *Public Training* — Public Training
- Beasiswa — Scholarship
- Magang Bersertifikat — Certified Internship
- Pra Purnabakti — Post Employee Training

PROGRAM KERJA BELUM TERLAKSANA

- PROGRAM PENGEMBANGAN EKSEKUTIF
- PENGEMBANGAN INTERNAL TRAINER

PEGAWAI DARAT DENGAN JUMLAH PELATIHAN <1 PADA TAHUN 2020
(Belum pernah mengikuti diklat dalam waktu setahun)

JUMLAH : 91 PEGAWAI
Total Peg. Darat 1.004 Orang
Total Peserta Pelatihan Peg. Darat 4.712 Pegawai

PEMENUHAN SERTIFIKAT PEGAWAI LAUT SESUAI AMANDEMEN MANILA 2010 :

TARGET 2020	CAPAIAN	%
1.500 Sertifikat	1.594 Sertifikat	106%

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

INDEKS KETERIKATAN PEGAWAI TAHUN 2020

Indeks keterikatan pegawai tahun 2020 berada di angka 4,12 yaitu dengan kategori terikat atau *engaged*. Namun berdasarkan hasil ini PT PELNI (Persero) terus berupaya untuk meningkatkan hal-hal yang menjadi perhatian sesuai dengan *Survey* Keterikatan Pegawai tersebut, antara lain:

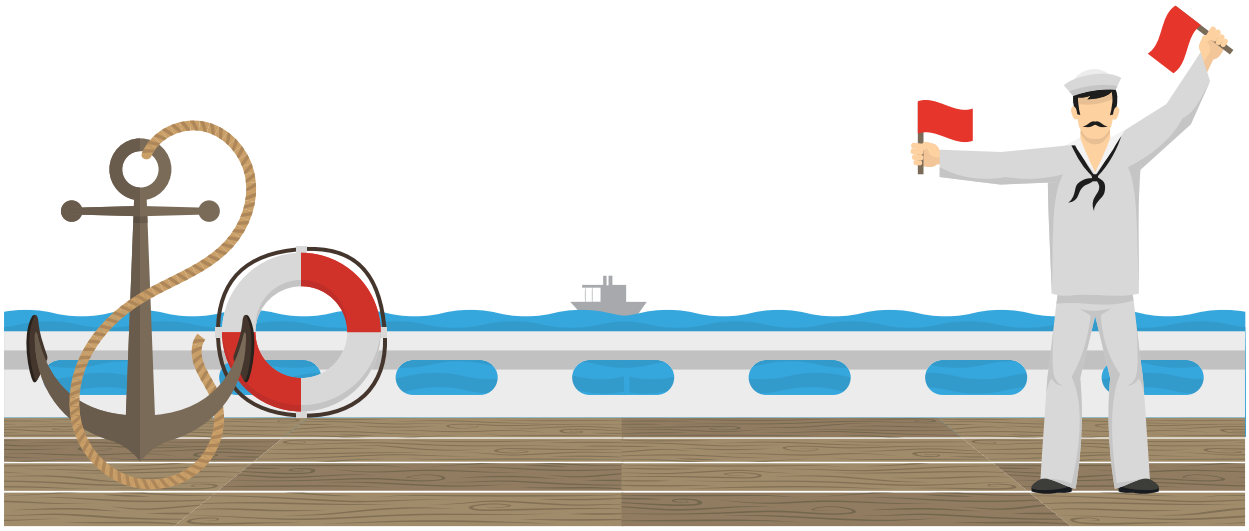
EMPLOYEE ENGAGEMENT INDEX IN 2020

Employee engagement index in 2020 was on 4.12, which is engaged. By these results, PT PELNI (Persero) continues to improve matters of concern according to the Employee Engagement Survey.

No	Aspek Kepuasan Satisfaction Aspect	Rencana Tindak Lanjut Follow Up Plan
1	*Pay & Benefit* Pay & Benefit	**Divisi SDM** HR Division **Dept. Kesejahteraan Pegawai** Dept. Compesation & Benefit • Sesuai dengan arahan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), Divisi SDM melakukan kajian terhadap perubahan struktur remunerasi serta memberikan peningkatan secara bertahap terhadap iuran Jaminan Hari Tua pegawai untuk kesejahteraan pegawai pasca kerja. In accordance with the direction of the Nomination and Remuneration Committee (KNR), the HR Division conducts a study of changes in the remuneration structure and provides a gradual increase in employees' Old Age Security contributions for post-employment employee welfare. • Saat ini sedang dilakukan kajian bersama dengan pihak ketiga terkait dengan strategi remunerasi di PT PELNI (Persero) terkait pengajuan perubahan pengertian dan filosofi *reward* dan strategi remunerasi dan menyusun skema remunerasi berbasis kinerja individu sehingga lebih adil bagi pegawai. Currently a joint study is being carried out with a third party regarding the remuneration strategy at PT PELNI (Persero) concerning proposals for changes in the meaning and philosophy of rewards, remuneration strategies and formulating a remuneration scheme based on individual performance to be fair for employee.
2	*Job Security* Job Security	**Divisi SDM** HR Division **Dept. Pengemb. Org. & Sistem Inf. SDM** Dept. Organization Development & HR Information System • Melakukan *review* berkala terkait dengan Struktur Organisasi dan kebutuhan formasi di setiap unit kerja. hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Organisasi dapat mencapai tujuan yang ditentukan dan berjalan secara efektif dan efisien. Conducts periodic reviews related to the Organizational Structure and formation needs in each work unit. This is to ensure the organization can achieve the specified goals and run effectively and efficiently. **Dept. Perencanaan SDM Darat dan Dept. Perencanaan SDM Laut** Dept. Ashore Man Power Planning and Dept.. Onboard Man Power Planning • Memastikan bahwa perencanaan SDM berjalan secara baik sehingga kebutuhan formasi pada unit kerja dapat terisi sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Ensures that HR planning is running well so as the formation needs of work units can be filled according to the required competencies. **Dept. Penilaian Kinerja dan Administrasi Personalia** Dept. Performance Appraisal and Personnel Administration • Memastikan setiap pegawai mendapatkan KPI sehingga pegawai tetap termotivasi untuk mencapai target. Selain itu, hasil dari penilaian kinerja juga dapat dipergunakan sebagai salah satu dalam mempertimbangkan posisi/jabatan pegawai. Ensures every employee gets KPIs to keep employees stay motivated in achieving targets. In addition, the results of the performance appraisal can also be used as one of the factors in considering an employee's position/occupation.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

No	Aspek Kepuasan Satisfaction Aspect	Rencana Tindak Lanjut Follow Up Plan
3	*Career Oppotunities* Career Oppotunities	**Divisi SDM** HR Division **Dept. Perencanaan SDM Darat** Dept. Ashore Man Power Planning • Menyusun pola karir pegawai berbasis kompetensi dan kelompok jabatan sehingga peta karir pegawai dapat tergambarkan dengan jelas dan lebih terarah dalam program pengembangan karirnya. Arranges competency-based employee career patterns and job groups so that the employee career map can be clearly described and more focused in career development programs. **Dept. Perencanaan SDM Laut** Dept. Onboard Man Power Planning • Memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam jenjang karier sesuai dengan hasil penilaian kinerja masing masing pegawai laut, dalam hal ini sedang disusun acuan baru dalam pelaksanaan pola karier yang diharapkan lebih relevan dan Obyektif untuk diterapkan di lingkungan pegawai laut PT PELNI (Persero). Ensures that every employee has equal opportunities in career paths by the results of each onboard employee's performance appraisal. In this case a new benchmark is being drafted in the implementation of the career patterns which are expected to be more relevant and objective to be applied in the PT PELNI onboard employees (Persero) environment.
4	*Employee Value Proposition* Employee Value Proposition	**Divisi SDM** HR Division **Dept. Kesejahteraan Pegawai** Dept. Compesation & Benefit • Melakukan kajian terhadap fasilitas kesejahteraan sehingga meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Conducts studies on welfare facilities to improve the company's image in the community. **Dept. Pengembangan SDM** Dept. People Development • Memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan, belajar, bertumbuh dan berkontribusi. Hal ini juga sudah didukung dengan adanya KPI Divisi SDM terkait dengan *training plan* yang terlaksana dan *compliance updating* sertifikat pegawai laut. Ensures that every employee has the same opportunity to attend training, learn, grow and contribute. This has also been supported by the existence of KPI in the HR Division related to the implemented training plan and compliance updating of onboard employee certificates.



SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

PROGRAM KERJA SDM TAHUN 2020
HR WORK PROGRAM IN 2020

No	Program Kerja Work Programs	Aktivitas yang telah dilakukan Activities Done

1	Rekrutmen pegawai darat *(new entry, experienced hire* dan *managed service)* dan pegawai laut
	Ashore Employee Recruitment (new entry, experienced hire and managed service) and Onboard employee
		1. Darat:
		Ashore:
		• Memperpanjang pegawai struktural yang memasuki MPP sebanyak 7 pegawai.
		Extended structural employees who entered the MPP as many as 7 employees.
		• Membuat usulan untuk mengisi pegawai struktural yang MPP dan formasi kosong.
		Made a proposal to fill in the MPP structural staff and vacant formations.
		• Memperpanjang pegawai *Prohire* yang masih dibutuhkan pada unit kerja masing-masing.
		Extended Prohire employees who were still needed in their respective work units.
		• Data job rotation sebagai berikut:
		Job Rotation data as follows:
		  • Rotasi = 46
		  Rotation = 46
		  • Promosi = 31
		  Promotion= 31
		
		2. Laut:
		Onboard:
		• Belum melakukan rekrutmen ABK.
		The crew member recruitment has not been done.

2	Pelaksanaan pelatihan baik *in house training, public training* dan sertifikasi Training in house training, public training, and certification	Pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan metode daring melalui *e-learning*, Portal Pelni, dan Zoom. Training using online methods by e-learning, Portal Pelni, dan Zoom.
3	Pelaksanaan magang bersertifikat secara WFH. Internship with WFH certification.	1. Program magang bersertifikat *batch* 1 tahun 2020 menerima 5 orang mahasiswa/i. The certified internship program batch 1 in 2020 accepted 5 students. 2. Program magang bersertifikat *batch* 2 tahun 2020 menerima 1 orang mahasiswi. The certified internship program batch 2 in 2020 accepted 1 student.
4	Pelaksanaan program penjenjangan dan purnabakti dengan metode *online*. The implementation of the grading and retirement programs using the online method.	Program penjenjangan yang sudah dilakukan : The ranking program that has been carried out: 1. Diklat Teknis Tingkat Mula Angkatan IX Tahun 2020 pada tanggal 09-12 November 2020. Entry Level Technical Training Batch IX 2020 on 9-12 November 2020. 2. Diklat Teknis Tingkat Lanjut Angkatan X Tahun 2020 – pada tanggal 16-19 November 2020. Advanced Technical Training Class X 2020 - 16-19 November 2020 3. Diklat Manajerial Tingkat Muda Angkatan XII Tahun 2020 – pada tanggal 24-26 November 2020. Youth level managerial training, batch XII 2020 - on 24-26 November2020 4. Diklat Manajerial Tingkat Madya Angkatan XII Tahun 2020 – pada tanggal 24-26 November 2020. Intermediate Managerial Training Class XII 2020 - on 24-26 November 2020. 5. Program Pra Purnabakti telah dilaksanakan secara *online* pada tanggal 21 s/d 24 Des 2020. The Pre-Retirement Program has been carried out online from 21 to 24 December 2020.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

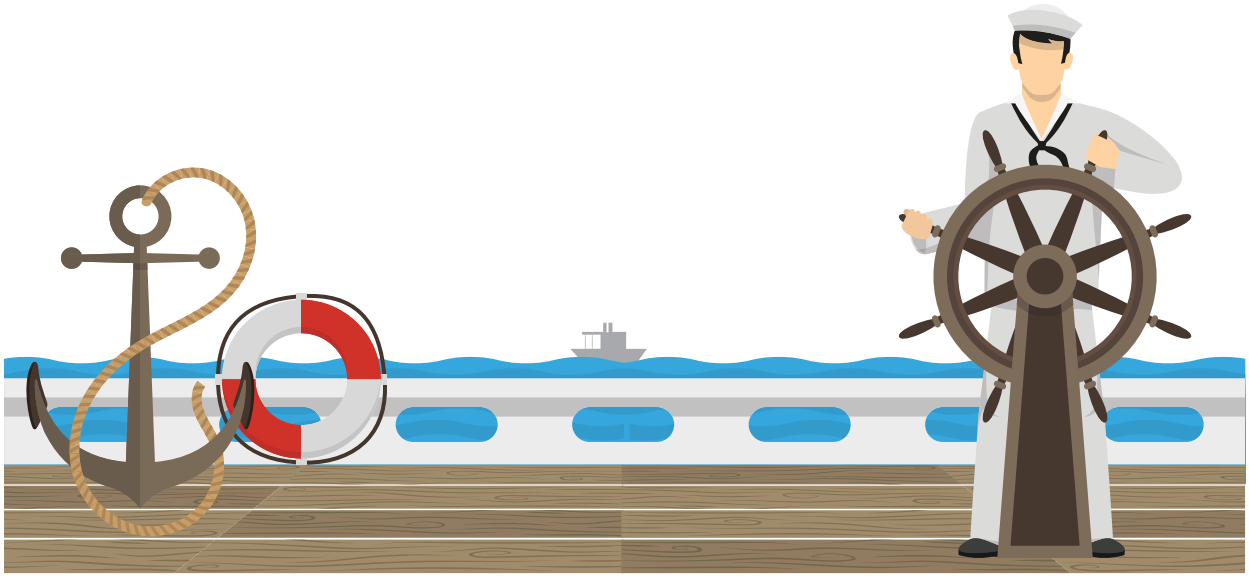
No	Program Kerja Work Programs	Aktivitas yang telah dilakukan Activities Done
5	Sertifikasi pegawai laut (revalidasi, *endorsement* ijazah dan pembuatan sertifikat baru) Onboard employee certification (revalidation, endorsement of certificates and creation of new certificates)	1. Pengumpulan berkas revalidasi dilakukan secara kolektif dengan metode *online* melalui *email/cloud system*. Collecting revalidation files was done collectively by using the online method via email/cloud system. 2. Pengumpulan berkas revalidasi awak kapal TOD dilakukan secara personal dengan metode *online* melalui *email/cloud system*. TOD crew revalidation files were collected personally by using the online method via email/cloud system. 3. Penyerahan berkas ke UPT dilakukan dengan cara pengiriman via ekspedisi (*hard copy*) dan *email (soft copy)*. Files submission to UPT was done by expedition (hard copy) and email (soft copy).
6	Pengelolaan penilaian kinerja pegawai dan pemberian penghargaan kinerja individu Management of employee performance appraisals and individual performance awards	1. Sistem Validasi Kontrak Kinerja BOD-1 harus menyesuaikan jadwal direksi, VP, serta konsultan. Performance Contract Validation System BOD-1 must adjust the schedule of the board of directors, VPs, and consultants 2. Penurunan KPI Individu sampai ke level pelaksana harus menunggu Kontrak Kinerja BOD-1 yang telah final. Decreased individual KPIs to the executive level must wait for the final BOD-1 Performance Contract 3. Aplikasi sudah selesai dibuat. The application has been completed
7	Penguatan budaya kerja perusahaan (Pusat, Cabang, Kapal, SBU, Mitra, Pemasok & *Stakeholder*) Strengthening the work culture of the company (Head Office, Branch, Ship, SBU, Partners, Suppliers & Stakeholders)	1. Sosialisasi *New Normal* untuk Kantor Pusat, Cabang, Kapal, SBU, Mitra, Pemasok & *Stakeholder* melalui daring, medsos, *talkshow* dll. Socialization of New Normal for Head Office, Branches, Ships, SBU, Partners, Suppliers & Stakeholders through online, social media, talk shows etc. 2. Pembentukan *Covid Ranger* dan program kerja Covid Ranger untuk *memonitoring* implementasi *New Normal;* Establishment of the Covid Ranger and the Covid Ranger work program to monitor the implementation of the New Normal; 3. *Launching* dan Sosialisasi *Core Value* AKHLAK kepada seluruh Pegawai; Launching and Socialization of AKHLAK's Core Values to all Employees; 4. Pengesahan SK Penetapan Tata Nilai Utama SDM "AKHLAK"; Ratification of the Decree on the Establishment of the HR Main Values "AKHLAK"; 5. Penguatan Budaya Kerja AKHLAK kepada *Change Leader*; Strengthening AKHLAK's Work Culture for Change Leaders; 6. Pembuatan Surat Edaran kepada Anak Perusahaan & Perusahaan Terafiliasi untuk Penetapan & Implementasi Budaya Kerja AKHLAK. Preparation of Circular Letters to Subsidiaries & Affiliated Companies for establishment & implementation of AKHLAK Work Culture
8	Pengaturan, pemenuhan dan pelaksanaan protokol kesehatan bagi karyawan, mitra kerja dan *stakeholder* Arrangement, fulfillment and implementation of health protocols for employees, partners and stakeholders	**Fasilitas:** Amenities: 1. Telah menyediakan fasilitas untuk mendukung protokol Kesehatan seperti masker (15.024 seluruh unit), *rapid test* (800 sampel) untuk kapal, *hotline* pelaporan covid-19 dan Vitamin. Has provided facilities to support health protocols such as masks (15,024 all units), rapid tests (800 samples) for ships, Covid-19 reporting hotlines and vitamins. 2. Penggunaan aplikasi EAP dalam mendukung kesejahteraan psikologis pegawai. EAP application usage to support the employees' psychological well-being. **Protokol:** Protocol: 1. Pelaksanaan Protokol WFO *New Normal life*, meliputi Kriteria pegawai WFO & WFH, *Skema shift* dan jam kerja pegawai, Absensi *QR Code*. Implementation of the WFO New Normal Life Protocol, including criteria for WFO & WFH employees, employee shift, working hour schemes, and QR Code attendance. 2. *Monitoring* protokol kesehatan melalui aplikasi *monitoring* protokol kesehatan kepada setiap unit kerja. Monitoring health protocols through the health protocol monitoring application for each work unit. 3. Penyediaan Penunjang alat kesehatan dan obat-obatan selama *new normal life*. Provision of supporting medical devices and medicines during new normal life.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

No	Program Kerja Work Programs	Aktivitas yang telah dilakukan Activities Done
9	Pengukuran keterikatan pegawai sesuai dengan segmentasi dan kelompoknya Mesurement of employee engagement according to the segmentation and group	Indeks keterikatan pegawai tahun 2020 berada di angka 4,12 yaitu dengan kategori terikat atau *engaged*. The employee engagement index for 2020 is at 4.12, which is in the category of engaged.
10	Mutasi Pegawai Employee's Mutation	**Darat** Ashore Mutasi pegawai Struktural 20 orang, Non Struktural 57 orang dari target mutasi sebanyak 100 orang. Mutation of 20 Structural and 57 Non Structural employees from the mutation target of 100 employees. **Laut** Onboard Mutasi berlayar 4021 orang, Mutasi turun 1370 orang, dengan total sebanyak 5391 orang. Sailing mutation of 4021 employees, hereditary mutation of 1370 employees, with a total of 5391 employees
11	Asesmen kompetensi struktural Structural Competency Assessment	Di tahun 2020 dianggarkan untuk dilakukan asesmen untuk 12 pegawai dan terealisasi untuk 2 pegawai yang diasesmen (periode Januari 2020). In 2020 it is budgeted for 12 employees assessment and realized for 2 employees (January 2020 period)
12	Program pengembangan eksekutif (BUMN *talent*) Executive Development Program (BUMN talent)	Program pengembangan talent berdasarkan *standard* kompetensi BUMN (ITMS BUMN) terutama pada kompetensi yang memiliki gap paling besar, antara lain *visionary leadership, strategic orientation,* dan *business acumen*, melalui: Talent development programs based on BUMN competency standards (BUMN ITMS), especially those with the largest gaps, including visionary leadership, strategic orientation, and business acumen, through: a. Webinar : *Webinar in Collaboration with IMD Leading in Crisis – Preparing for the Rebound*. Target peserta diikuti untuk level VP Webinar: Webinar in Collaboration with IMD Leading in Crisis - Preparing for the Rebound. Target participants are followed for the VP level b. *Coaching* dengan Direksi Pelni setiap bulan = CEO *Talk Series* Target *Talent* Pelni sesuai aplikasi ITMS (14 Orang) Monthly coaching with Pelni Directors = CEO Talk Series Pelni Talent Target according to the ITMS application (14 people)
13	Pembuatan materi *e-learning* Content making of the e-learning materials	Saat ini untuk mengisi konten materi *E-Learning* dibuat melalui *power point* saja. Untuk pembuatan video akan dijalankan di tahun 2021. Currently, the content of E-Learning material is made through power points only. For the videos, will be run in 2021.
14	Program pengembangan *internal trainer* Internal trainer Development Program	1. Pengembangan *trainer* baru sampai *progress* 50% ditahun 2019 dan rencana akan dilanjutkan pengembangannya di tahun 2020 tapi belum bisa direalisasikan. The development of new trainers is up to 50% progress in 2019 and the development plan will be continued in 2020 but this could not be realized yet. 2. Pembatasan anggaran selama masa Pandemi COVID-19. Budget restrictions during the COVID-19 Pandemic. 3. Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 di lingkungan PT PELNI berkaitan dengan pelaksanaan program yang membutuhkan sesi tatap muka karena diperlukan observasi perilaku pada pelaksanaan program. Implementation of the Protocol to Prevent the Spread of the COVID-19 Virus in the PT PELNI related to program implementation which requires face-to-face sessions, since behavioral observations are required in program implementation.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

No	Program Kerja Work Programs	Aktivitas yang telah dilakukan Activities Done
15	Program *coaching & mentoring* penilaian kinerja individu karyawan Coaching & mentoring program for individual employee performance appraisal	1. Telah disusun SK Pedoman *Coaching*. A Coaching Guidelines Decree has been prepared. 2. Pelaksanaan penilaian kinerja individu direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021. The implementation of individual performance appraisals was planned to be carried out in 2021.
16	*Innovation programme* (jaring inovasi) Innovation program (innovation net)	Pengumuman pemenang untuk MIS BUMN 2020, selanjutnya dipilih program inovasi yang dapat diimplementasikan. Announcement of winners for MIS BUMN 2020, which then an applicable innovation program was selected
17	Implementasi aplikasi HCM HCM Application Implementation	Hal-hal yang telah selesai adalah, sbb : The things that have been completed are as follows: • BRS Manajemen Sistem Penilaian Kinerja BRS Management System Performance Appraisal • BRS Pendidikan dan Pelatihan BRS Education and Training • BRS *employee transfer management* (emutasi) BRS employee transfer management (emutation) • BRS BRS • BRS *helpdesk SDM* dan *employee assistance* BRS helpdesk SDM dan employee assistance • BRS *workforceplanning* BRS workforceplanning
18	*Integrated Human Capital System* Integrated Human Capital System	Menyelesaikan evaluasi untuk: Complete an evaluation for: a. *Job Evaluation* Job Evaluation b. *Job Family* Job Family c. *Career Management* Career Management d. *Remuneration system* Remuneration system • Telah dilakukan *review* komponen upah Wage component review has been carried out



SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

REKRUTMEN SDM

Sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor pelayaran, Perseroan memberikan kesempatan berkarir yang sama berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan unit kerja di Perseroan. Peluang berkarir di PELNI memberlakukan asas kesetaraan tanpa adanya diskriminasi *gender*, agama, suku bangsa maupun hal lainnya.

Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selama tahun 2020, Perseroan hanya melaksanakan 1 (satu) jenis program rekrutmen pegawai PT PELNI (Persero), antara lain:

1. **Rekrutmen Pegawai Laut**
   Pada tahun 2020 tidak dilakukan Rekrutmen Pegawai Laut PT PELNI (Persero). Pengisian posisi di atas kapal dioptimalkan dengan merekrut kembali pegawai yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan melakukan pemenuhan posisi di atas kapal sesuai dengan ketentuan tanpa mengesampingkan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan.

2. **Rekrutmen Pegawai Darat**
   Rekrutmen pegawai darat dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk pelaksanaan psikotes secara online dan tes kesehatan. Proses rekrutmen dimulai pada Tahun 2020. Jumlah pegawai yang diterima sebanyak 40 untuk ditempatkan di Kantor Pusat dengan rincian sebagai berikut :

HR RECRUITMENT

As Stated-owned Enterprise engaged in shipping sector, the Company gives equal career opportunities based on competency and standards of the Company. Career opportunities in PT PELNI (Persero) uphold the principle of fairness without any discrimination in gender, religion, ethnicity and other aspects.

This recruitment system will be done transparently based on manpower planning to support the Company's short and long-term targets. During 2020, the Company only held 1 (one) employee recruitment program, as follows:

1. **Recruitment of Onboard Employees**
   In 2020 there were no PT PELNI (Persero) Recruitment of Onboard Employees. Filling positions on the ship is optimized by re-recruiting employees who enter the Retirement Preparation Period (MPP) and fulfilling positions on the ship in accordance with the provisions without compromising safety and comfort in service.

2. **Recruitment of Ashore Employees**
   The recruitment of ashore employees is carried out in collaboration with external parties for the online psychological tests and medical tests. The recruitment process starts in 2020. The number of employees hired is 40 to be placed at the Head Office with the following details:

No	Posisi Position	2020
1	*Junior Officer* Junior Officer	36 Pegawai | Employees
2	*Internship* Internship	4 Pegawai | Employees
	Jumlah Total	**40 Pegawai** | Employees

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Selanjutnya dilaksanakan orientasi perusahaan terhadap calon pegawai (selain *internship*) agar pada saat ditempatkan telah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai ilmu dasar pada saat ditempatkan di unit kerjanya.

Furthermore, company orientation is carried out for prospective employees (other than internships) so that they will have the knowledge and skills that can be used as basic knowledge once they are placed in their work units.

Jumlah Anggaran untuk Proses Rekrutmen Pegawai Tahun 2020

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2020 untuk pelaksanaan kegiatan rekrutmen pegawai darat dan pegawai laut adalah sebagai berikut:

Total Cost for Employee Recruitment Process In 2020

Costs expended by the Company in 2020 for the recruitment process of ashore and onboard employees are as follows:

No	Keterangan Description	Anggaran 2020 2020 Budget	Realisasi 2020 2020 Realization
1	Rekrutmen Pegawai Darat Ashore Employee Recruitment	Rp 2.000.000.000	Rp 447.700.000
2	Rekrutmen Pegawai Laut Onboard Employee Recruitment	Rp 0,-	Rp 0,-
	Jumlah Total	**Rp 2.000.000.000**	**Rp 447.700.000**

PROGRAM PENGEMBANGAN

Kegiatan program pelatihan yang telah dilakukan berdasarkan level jabatan dan status kepegawaian sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

DEVELOPMENT PROGRAM

Training program activities that have been carried out based on position level and employment status throughout 2020 are as follows:

a. Program Pengembangan untuk Pegawai Darat
Development Programs for Ashore Employees

No	Program Program	Nama Program Program Name	Tempat Pelaksanaan Place
PEGAWAI DARAT | ASHORE EMPLOYEE			
1	VP / SETARA VP/SAME LEVEL	Pelatihan *Online Coaching & Counseling Skill* Online Coaching & Counseling Skill Training (VP Level)	(Webinar)
		Seminar Nasional BUMN dengan Tema "Menakar Kesiapan Perusahaan BUMN Menapaki Era Industri 4.0 dan Peleburan Bisnis Sampingan BUMN" BUMN National Seminar with the theme of "Measuring the Readiness of BUMN Companies Entering the Era of Industry 4.0 and the Merging of BUMN Side Businesses"	Singosari Room Grand Sahid Jaya Hotel
		Pelatihan *Science & Art of Salesforce Management* Science & Art of Salesforce Management Training	Philip Kotler Theater, EightyEight Kasablanka
		Exclusive Webinar In Collaboration with IMD : Leading In Crisis - Preparing For The Rebound Exclusive Webinar In Collaboration with IMD : Leading In Crisis - Preparing For The Rebound	(Webinar)

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

No	Program Program	Nama Program Program Name	Tempat Pelaksanaan Place
		Internalisasi *Core Values* AKHLAK untuk *Change Leader* di Kantor Pusat & SBU PT PELNI (Persero) Internalization of AKHLAK Core Values for Change Leaders at Head Office & SBU PT PELNI (Persero)	(Webinar)
2	KEPALA CABANG BRANCH MANAGER	Pelatihan *Online Coaching & Counseling Skill (Batch III)* Online Coaching & Counseling Skill Training (Batch III)	LMS PT PELNI (Persero)
		Internalisasi *Core Values* AKHLAK untuk *Change Leader* di Kantor Cabang PT PELNI (Persero) Internalization of AKHLAK Core Values for Change Leaders at PT PELNI (Persero)	(Webinar)
3	MANAGER / SETARA MANAGER/SAME LEVEL	Pelatihan Manajerial Tingkat Madya Angkatan XII Tahun 2020 Intermediate Managerial Training Batch XII of 2020	(Webinar)
		Program *Project Management Agile Culture & Execution - Tahap Assess & Create* Project Management Agile Culture & Execution Program - Assess & Create Step	Hotel Ibis Harmoni Jakarta
		Excellence Business Plan Development Tahun 2020 Excellence Business Plan Development in 2020	(Webinar)
		Internalisasi *Core Values* AKHLAK untuk *Change Leader* di Kantor Pusat & SBU PT PELNI (Persero) Internalization of AKHLAK Core Values for Change Leaders at Head Office & SBU PT PELNI (Persero)	(Webinar)
		Pelatihan *Online Coaching & Counseling Skill* Online Coaching & Counseling Skill Training	LMS PT PELNI (Persero)
		Time to Take Care Our Most Important Asset Time to Take Care Our Most Important Asset	(Webinar)
		Building High Trust Relationship for Better Team Engagement a.n. Christina Devyanti & Nurul Rizky Hamzah Building High Trust Relationship for Better Team Engagement by Christina Devyanti & Nurul Rizky Hamzah	(Webinar)
		Peran Psikologi Industri & Organisasi Untuk Masyarakat : *Preparation of New Normal* The role of Industrial Psychology & Organization for Community	(Webinar)
		Talkshow Team Empowerment In The New Normal Life Talkshow Team Empowerment In The New Normal Life	(Webinar)
		Kuliah Umum Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan tema "Pemuda dan Pembangunan Kemaritiman Berkelanjutan Berbasis Teknologi Industri 4.0 Menuju Indonesia Maju Public Lecture of the Minister of National Development Planning / Head of Bappenas with the theme "Youth and Sustainable Maritime Development Based on Industrial Technology 4.0 For Advanced Indonesia"	(Webinar)
		Seminar Modernisasi Pengadaan untuk Peningkatan Kinerja Pengadaan Procurement Modernization Seminar to Improve Procurement Performance	Financial Club Jakarta Gedung CIMB Niaga
		Peran Pemimpin dalam Menghadapi Perubahan The Role of Leaders in Facing Change by R. Andang Gumilang & Ninien Triyana	(Webinar)
		How To Build Winning Teams In New Normal How To Build Winning Teams In New Normal	(Webinar)

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

No	Program Program	Nama Program Program Name	Tempat Pelaksanaan Place
		Diskusi Siapkah Pelayaran Nasional Menghadapi *New Normal* dan Menjalankan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Discussion on Preparing for National Shipping to Face a New Normal and Carrying Out Health Protocols During the Covid-19 Pandemic	(Webinar)
		Training Corporate Culture Specialist Training Corporate Culture Specialist	(Webinar)
		Workshop Penyusunan *Action Plan* Kerjasama Bilateral Transportasi Indonesia dengan Beberapa Negara di Wilayah Eropa Workshop on Preparing Action Plans for Bilateral Transportation Cooperation between Indonesia and Several Countries in the European Region	(Webinar)
		Coffee Morning with Ketua BPK RI "Masalah & Solusi atas Temuan Pemeriksaan Keuangan BUMN Oleh BPK" Coffee Morning with Chairman of BPK RI "Problems & Solutions for the Findings of BUMN Enterprises Financial Audit by BPK"	(Webinar)
		Diklat Audit Operasional Operational Audit Training and Education	*Zuri Resort and Convention* Cianjur
4	SPV / SETARA SPV/SAME LEVEL	Pelatihan Manajerial Tingkat Muda Angkatan XII Tahun 2020 Youth Level Managerial Training Class XII 2020	(Webinar)
		Pelatihan Komunikasi dan Psikologi Audit Communication and Audit Psychology Training	*Zuri Resort and Convention* Cianjur
		Diklat Audit Operasional Operational Audit Training	*Zuri Resort and Convention* Cianjur
		Revalidasi Perpanjangan SKP dan kartu kewenangan ahli K3 Umum Revalidation of SKP Extension and General K3 expert authority card	*Phitagoras Training & Consulting*
		Pelatihan Brevet A & B Terpadu a/n Devi Rama Yanti Integrated Brevet A & B Training	IAI Ruko Duta Mas Fatmawati
5	STAFF/SETARA STAFF/SAME LEVEL	Diklat Teknis Tingkat Lanjut Angkatan X Tahun 2020 Advanced Technical Training Batch X 2020	(Webinar)
		Pelatihan Menulis Opini dengan tema "Menjawab Hoax" Opinion Writing Training with the theme "Answering Hoaxes"	Kantor Media Indonesia & Metro TV
6	OFFICER/SETARA OFFICER/SAME LEVEL	Diklat Teknis Tingkat Mula Angkatan IX Tahun 2020 Initial Level Technical Training, Batch IX 2020	(Webinar)
7	Seluruh Pegawai di Kantor Cabang All Officers in Branches	Pelatihan *Online Service Excellent* Pegawai PT PELNI Cabang Tg. Priok Excellent Online Service Training for PT PELNI Branch Tg. Priok	LMS PT PELNI (Persero)
		Pelatihan *Online Service Excellent* Pegawai PT PELNI Cabang Surabaya Excellent Online Service Training for PT PELNI Surabaya Branch	LMS PT PELNI (Persero)
		Pelatihan *Online Service Excellent* PT PELNI Cabang Makassar Excellent Service Online Training PT PELNI Makassar Branch	LMS PT PELNI (Persero)
		Pelatihan *Online Service Excellent* PT PELNI Cabang Jayapura Excellent Service Online Training PT PELNI Jayapura Branch	LMS PT PELNI (Persero)
		Pelatihan *Communication Skill* Cabang Branch Communication Skill Training	LMS PT PELNI (Persero)
		Blood-Airborne Hazard Training Sesi Pemaparan Materi Blood-Airborne Hazard Training Material Presentation Session	(Webinar)
		Survived and Succeed In Challenging Times Survived and Succeed In Challenging Times	PT PELNI Cabang Palu

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

No	Program Program	Nama Program Program Name	Tempat Pelaksanaan Place
8	Seluruh Level Pegawai All Level of Employees	*Workshop* Percepatan *Development New* BL Acceleration of New BL Development Workshop	Hotel Luminor Pecenongan Jakarta
		CEO *Talk* dengan tema Pekerja Muda Menyikapi Kondisi *New Normal Life* CEO Talk with the theme Young Workers Responding to New Normal Life Conditions	(Webinar)
		Sosialisasi Hasil Survei *Risk Maturity Level* Tahun 2019 Socialization of the 2019 Risk Maturity Level Survey Results	(Webinar)
		Team Coaching During Work Form Home Team Coaching During Work Form Home	(Webinar)
		Workshop Studi Analisa Risiko Risk Analysis Study Workshop	(Webinar)
		Strategic and HR Mega Trends for 2020: Holistic RJPP Strategic and HR Mega Trends for 2020: Holistic RJPP	(Webinar)
		Working Virtually Through Disruption Working Virtually Through Disruption	(Webinar)
		Logistics Series on Optimising Supply and Demand While Keeping People Safe Logistics Series on Optimising Supply and Demand While Keeping People Safe	(Webinar)
		Pelatihan Kebijakan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Terdampak Covid-19 Tax Policy Training for Taxpayers Affected by Covid-19	(Webinar)
		Webinar HR *Virtual Gathering* HR Webinar Virtual Gathering	(Webinar)
		Pembahasan *Review* Dokumen Untuk Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Discussion of Document Review for ISO 3700:2016 Certification of Anti-Bribery Management System	(Webinar)
		Perlindungan Hukum & Protokol Kesehatan Untuk Pelaut Dalam Masa Pandemi Covid-19 Legal Protection & Health Protocols for Seafarers During the Covid-19 Pandemic	(Webinar)
		Restart Your Business With SIBV and Embrace The New Normal Restart Your Business With SIBV and Embrace The New Normal	(Webinar)
		Dewas Menyapa Indonesia "Menata Rotasi Mutasi Promosi Untuk Talent Masa Depan Di Era *New Normal*" Dewas Greeting Indonesia "Arranging Promotional Movements For Future Talents In The New Normal Era"	(Webinar)
		Webinar *Develop Your Emotional Agility Through Crisis* Webinar Develop Your Emotional Agility Through Crisis	(Webinar)
		Acclimate Your Stress Management Style Facing The New Normal Acclimate Your Stress Management Style Facing The New Normal	(Webinar)
		Mengelola Bisnis Maritim Melalui Teknologi Digital dan Otomasi Managing Maritime Business Through Digital Technology, Automation	(Webinar)
		Boosting Work Productivity During The New Normal Boosting Work Productivity During The New Normal	(Webinar)

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

No	Program Program	Nama Program Program Name	Tempat Pelaksanaan Place
		Seminar *Online* Nasional Memberantas Peredaran Sertifikat Pelaut "Palsu" National Online Seminar Against Circulation of "Fake" Seafarers' Certificates	(Webinar)
		Empowering Agent of Change in Turbulent Times Empowering Agent of Change in Turbulent Times	(Webinar)
		Leadership Online Program "Rahasia Jadi Supervisor Asik" Leadership Online Program "The Secret Being a Cool Supervisor"	(Webinar)
		Sharing Session dengan Tema "Membangun Jiwa *Entrepeneur* di Era *New Normal Life*" Sharing Session with the theme "Building Entrepreneurial Spirit in the New Normal Life Era"	(Webinar)
		Sosialisasi *Monitoring* Penerapan Protokol Kesehatan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Terminal Point, SBU dan Mitra Kerja PT PELNI (Persero) Socialization of Monitoring the Implementation of Health Protocols at the Head Office, Branch Offices, Terminal Points, SBUs and Work Partners of PT PELNI (Persero)	(Webinar)
		Sharing Session Online dengan Tema "Pentingnya Etika Bekerja dan Komunikasi di Dunia Bisnis" Online Sharing Session with the Theme "The Importance of Work Ethics and Communication in the Business World"	(Webinar)
		Webinar *Leveraging an Agile Culture for Sustainable Results* Webinar Leveraging an Agile Culture for Sustainable Results	(Webinar)
		Webinar Implementasi Transportasi Umum di Masa *New Normal* Webinar on Public Transportation Implementation in the New Normal Era	(Webinar)
		Webinar Peluang dan Tantangan Kapal Penumpang dan Kapal Pariwisata di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19 Webinar Opportunities and Challenges of Passenger Boats and Tourism Ships in the Period and Post of the COVID-19 Pandemic	(Webinar)
		Diskusi Strategi Galangan Kapal Nasional Untuk Bangkit dan Menghadapi *New Normal* Pasca Covid-19 Discussion on National Shipyard Strategies to Awaken and Face the New Normal Post-Covid-19	(Webinar)
		Webinar *Creating an Environment of Trust to Boost Your Teams' Productivity* Webinar on Creating an Environment of Trust to Boost Your Teams' Productivity	(Webinar)
		Customer Gathering PPM dengan Tema "*Let's Conquer The New Normal*" PPM Customer Gathering with the theme "Let's Conquer The New Normal"	(Webinar)
		Webinar Strategi Kapal Angkutan Curah Menghadapi Pandemi COVID-19 Webinar Strategy for Bulk Transport Ships Facing the COVID-19 Pandemic	(Webinar)
		Sosialisasi Penguatan Protokol Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru PT PELNI (Persero) Socialization of Strengthening Health Protocols for Adaptation to New Habits of PT PELNI (Persero)	(Webinar)
		Sharing Session Bersama Putra Papua "Papua Maju, Indonesia Maju" Sharing Session with Papuan Boys "Advanced Papua, Advanced Indonesia"	(Webinar)

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

No	Program Program	Nama Program Program Name	Tempat Pelaksanaan Place
		Webinar Strategi Restrukturisasi Perusahaan Pelayaran di Masa Pandemi COVID 19 Webinar on Strategy for Shipping Company Restructuring During the COVID-19 Pandemic	(Webinar)
		Webinar Digitalisasi Angkutan Penyeberangan Antar Pulau di Masa Dan Pasca Pandemi COVID 19 Webinar Digitalization of Cross-Island Transfers During and After the COVID-19 Pandemic	(Webinar)
		Dunamis Solution Overview dengan Tema "Internalisasi *Core Values* BUMN AKHLAK menjadi Budaya BUMN" Dunamis Solution Overview with the theme "Internalization of Core Values for BUMN AKHLAK into BUMN Culture"	(Webinar)
		Seminar Daring *Business Leadership* dengan Tema *Future of Human Capital Management* Online Seminar on Business Leadership with the Theme of Future of Human Capital Management	(Webinar)
		Internalisasi dan Sosialisasi *Core Values* AKHLAK PT PELNI (Persero) Internalization and Outreach of PT PELNI (Persero) AKHLAK Core Values	(Webinar)
		Webinar Akselerasi Internalisasi Budaya AKHLAK AKHLAK's Culture Internalization Acceleration Webinar	(Webinar)
		Webinar Pemulihan Ekonomi Nasional Paska Pandemi & Apresiasi Karya Putra/Papua di BUMN Indonesia Post-Pandemic National Economic Recovery Webinar & Appreciation of Putra/Papua's Work in Indonesian SOEs	(Webinar)
		Webinar AKHLAK Sebagai Pondasi Galangan Kapal BUMN Yang Kuat Dan Berdaya Saing Tinggi Webinar of AKHLAK as a Strong and Competitive Foundation for BUMN Shipyards	(Webinar)
		Executive Webinar *Change Management* Executive Webinar Change Management	(Webinar)
		Webinar *Warehouse Management Operation & Control* Webinar Warehouse Management Operation & Control	(Webinar)
		Webinar Optimalisasi Sistem Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Menuju SDM Maritim Unggul Webinar on Optimizing Education Systems, Training and Certification Towards Excellent Maritime Human Resources	(Webinar)
		Training Vaksin Hati ESQ - Bangkit Di Era Pandemi ESQ Liver Vaccine Training - Rise In Pandemic Era	(Webinar)
		Bimbingan Teknis *Designated Person Ashore* Tahun Anggaran 2020 - Periode III Technical Guidance of Designated Person Ashore Fiscal Year 2020 - Period III	Hotel Wyndham Surabaya;
		Bimbingan Teknis *Designated Person(s) Ashore (DPA)* Tahun Anggaran 2020 Periode IV Technical Guidance for Designated Person(s) Ashore (DPA) for Fiscal Year 2020 Period IV	Hotel Aston Manado
		Webinar Peraturan & Praktik Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia Webinar on Rules & Practices for Using Electronic Signatures in Indonesia	(Webinar)

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

No	Program Program	Nama Program Program Name	Tempat Pelaksanaan Place
		Pelatihan *Online Master Class Corporate Governance* Online Master Class Corporate Governance Training	(Webinar)
		Online Master Class Corporate Governance Online Master Class Corporate Governance	(Webinar)
		Penunjukan Peserta Pelatihan Pra Purnabakti Tahun 2020 Appointment of Pre-Retirement Training Participants in 2020	(Webinar)
		Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practice : Corporate Law for Executive "Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN" Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practice: Corporate Law for Executive "Legal Aspects in the Management of SOE Corporations"	(Webinar)
		Integrating Performance & Risk Management - ERM 2020 Integrating Performance & Risk Management - ERM 2020	(Webinar)
		Training Aplikasi Siparsel Divisi Pengadaan Siparsel Application Training for Procurement Division	(Webinar)
		Pembahasan Analisa Risiko Untuk Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Discussion on Risk Analysis for ISO 37001:2016 Certification of Anti-Bribery Management System	(Webinar)
		Pelatihan Audit Manajemen Internal Internal Management Audit Training	(Webinar)
		Pelatihan *Monitoring* dan Tinjauan Manajemen Untuk Sertifikasi ISO 37000:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Monitoring and Management Review Training for ISO 37000:2016 Certification of Anti-Bribery Management System	(Webinar)
		Pre Training Sosialisasi Aplikasi PELNI Doc untuk Tim *Agent* di Kapal Penumpang Pre Training for Socialization of PELNI Doc Application for Agent Team on Passenger Ship	(Webinar)
		Pelatihan Aplikasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Partnership and Community Development Program Application Training	(Webinar)
		Refreshment Training Aplikasi SIPARSEL Modul Kapal Refreshment Training Application SIPARSEL Ship Module	(Webinar)
		Sosialisasi dan *Training* Aplikasi Penjualan Muatan "Perintis *Cargo System* (PECASY)" Socialization and Training of Cargo Sales Application "Perintis Cargo System (PECASY)"	(Webinar)
		Training Awareness ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (*Batch* I) Training Awareness ISO 9001:2015 Quality Management System (Batch I)	(Webinar)
		Training Awareness ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (*Batch* II) Training Awareness ISO 9001:2015 Quality Management System (Batch II)	(Webinar)
		Training Pemahaman *Internal Audit* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Training Understanding Internal Audit ISO 9001:2015 Quality Management System	(Webinar)

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Nama Pelatihan Training	Status Status	Pusat Head Office					Cabang/SBU/Anak Perusahaan Branch Office / SBU / Entity				
		VP/ Setara VP/ Same Level	Manager /Setara Manager /Same Level	SPV/ Setara SPV/ Same Level	Staff Staff	Officer Officer	Kacab/ GM/ Setara Head of Branch Office/ GM/ Same Level	Kaops/ Kabag/Mgr/ Setara Head of Operations/ Head of Section/Mgr/ Same Level	Kaur/ Spv/ Setara Head of Affairs/ Mgr/ Same Level	Staff Staff	Officer Officer
Orientasi Orientation		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Penjenjangan Grading	Tetap Permanent	-	2	18	19	8	-	-	6	14	19
Sertifikasi Certification	Tetap Permanent	3	5	24	10	1	-	-	-	-	-
Publik Training Public Training	Tetap Permanent	35	76	75	98	17	1	1	9	-	17
In-house Training In-house Training	Tetap Permanent	153	491	521	607	263	170	278	334	479	933
Pra Purnabakti Pre retirement	Tetap Permanent	-	-	2	3	10	-	-	-	-	-
Jumlah Total		**191**	**574**	**640**	**737**	**299**	**171**	**279**	**349**	**493**	**975**

b. Program Pengembangan untuk Pegawai Laut
Development Program for Onboard Employees

Program Program	Nama Pelatihan Training	Status Status	Level Jabatan Position Level			
			Tamtama Enlisted Officer	Bintara Non-Commission Officer	Perwira Commissioned Officer	Nakhoda/ KKM Captain/Chief Engineer
Orientasi Pegawai Employee Orientation	Familiarisasi Perwira Kontrak Kapal Perintis dan Rede Tahun 2020 di Auditorium Kantor Pusat PT PELNI (Persero) pada tanggal 3-4 Maret 2020. Familiarization of 2020 Pioneer and Rede Ship Contract Officers in the Auditorium Head Office of PT PELNI (Persero) on 3-4 March 2020	Tetap & Kontrak Permanent & Contract		68		
Sertifikasi STCW 2010 STCW 2010 Certification	Revalidasi STCW 2010 Kolektif Revalidation of STCW 2010 Collective	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	788	115	145	42
	Revalidasi STCW 2010 Mandiri Revalidation of STCW 2010 Independent	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	40	3	11	7

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Program Program	**Nama Pelatihan** Training	**Status** Status	**Level Jabatan** Position Level			
			Tamtama Enlisted Officer	**Bintara** Non-Commission Officer	**Perwira** Commissioned Officer	**Nakhoda/ KKM** Captain/Chief Engineer
In House Training In House Training	*Sharing Knowledge* Permesinan Kapal – *Building PELNI Maritime Force Ready for Any Challenging Future, Auditorium* Kantor Pusat 11-12 Maret 2020 Sharing Knowledge on Ship Engineering - PELNI Maritime Force Ready Building for Any Challenging Future, Head Office Auditorium 11-12 March 2020	Tetap & Kontrak Permanent & Contract		3	23	17
	Sharing Session dengan Tema "Membangun Jiwa *Entrepeneur* Di Era *New Normal Life*" Sharing Session with the theme "Building Entrepreneurial Spirit in the New Normal Life Era"	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	77	41	37	17
	Sharing Session "Sehat Dari Hati", 11 Juni 2020 (Webinar) Sharing Session "Healthy From the Heart", 11 June 2020 (Webinar)	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	18	36	31	60
	Sharing Session Online dengan Tema "Pentingnya Etika Bekerja dan Komunikasi di Dunia Bisnis", 23 Juli 2020 Online Sharing Session with the theme "The Importance of Work Ethics and Communication in the Business World", 23 July 2020	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	58	46	58	23
	Sosialisasi *Monitoring* Penerapan Protokol Kesehatan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Terminal Point, SBU dan Mitra Kerja PT PELNI (Persero), 29 Juli 2020 Socialization of Monitoring the Implementation of Health Protocols at the Head Office, Branch Offices, Terminal Points, SBUs and Work Partners of PT PELNI (Persero), 29 July 2020	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	61	45	47	24
	Sosialisasi Penguatan Protokol Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru PT PELNI (Persero) 6 Agustus 2020 Socialization on Strengthening Health Protocols for Adaptation to New Habits of PT PELNI (Persero) 6 August 2020	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	117	52	58	24

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Program Program	Nama Pelatihan Training	Status Status	Level Jabatan Position Level			
			Tamtama Enlisted Officer	Bintara Non-Commission Officer	Perwira Commissioned Officer	Nakhoda/ KKM Captain/Chief Engineer
	Sosialisasi dan *Training* Aplikasi Siparsel Modul Kapal Via *Virtual Meeting* KM. Nggapulu dan KM. Kelimutu, 13 - 24 Agustus 2020 & KM. Tatamailau dan KM. Lawit, 9-13 November 2020 Socialization and Training on Siparsel Ship Module Application Via Virtual Meeting, KM. Nggapulu and KM. Kelimutu, 13 - 24 August 2020 & KM. Tatamailau and KM. Lawit, 9-13 November 2020	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	12	28	37	10
	Blood-Airborne Hazard Training Sesi Pemaparan Materi, Rabu/ 16 September 2020 Blood-Airborne Hazard Training Material Presentation Session, Wednesday/16 September 2020	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	18	36	31	60
	Sosialisasi Implementasi Aplikasi PELNI Doc *Batch* 3 untuk KM Labobar Kamis/22 Oktober 2020 Socialization on the Implementation of the Batch 3 PELNI Doc Application for KM Labobar on Thursday/22 October 2020	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	2	25	28	5
	Penguatan Protokol Kesehatan & Pengayaan Prosedur Penanganan COVID-19 (KNKT) - Kamis/ 10 Desember 2020 Strengthening the Protocol for Health & Enrichment for COVID-19 Handling Procedures (NTSC) – Thursday/10 December 2020	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	17	34	30	25
Program Budaya Kerja Work Culture Program	Internalisasi dan Sosialisasi *Core Values* AKHLAK PT PELNI (Persero) - 4 September 2020 Internationalization and Sosialization of AKHLAK Core Values PT PELNI (Persero)- 4 September 2020	Tetap & Kontrak Permanent & Contract	33	30	38	21
	Internalisasi *Core Values* AKHLAK *Change Leader* PT PELNI (Persero) - 30 Nov 2020 Internalization of AKHLAK Core Values Change Leader PT PELNI (Persero) - 30 Nov 2020	Tetap Permanent		1	1	7
	Jumlah Total		**1.241**	**563**	**575**	**342**

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Sistem *Rewards and Punishment* PELNI

Sebagai bagian dari sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan *Merit System* yang diterapkan oleh Perseroan, pengelolaan SDM juga dilengkapi oleh mekanisme *Reward and Punishment* di mana setiap pegawai yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan tingkat capaian dan sebaliknya, bagi para pelaku pelanggaran yang terbukti dalam mekanisme yang sah, akan dijatuhkan hukuman.

Pada tahun 2020, PT PELNI (Persero) memberikan penghargaan dedikasi kerja 30 tahun, 25 tahun dan 16 tahun dan 8 tahun kepada para pegawai di seluruh entitas kantor pusat, kantor cabang dan unit usaha Perseroan lainnya serta menjatuhkan 69 sanksi disiplin, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemberian Penghargaan

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PELNI (Persero) mengenai penghargaan yang diberikan kepada pegawai, maka jumlah pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan masa kerja dan tertuang dalam SK No.03.03/01/SK/HKO.01/2020 tanggal 03 Maret 2020 tentang Pemberian Penghargaan Masa Kerja 30 tahun, 25 tahun, 16 tahun dan 8 tahun adalah berikut ini:

PELNI Reward And Punishment System

As part of performance-based HR management system and Merit System implemented in the Company, the HR management is also equipped with Reward and Punishment systems where every outstanding employees will receive reward based on their achievement, and also for committed violation will be punished under applicable regulation.

In 2020, PT PELNI (Persero) awarded the dedication program for 30, 25, 16 and 8 years of working tenure in head office, branches and other business units and administered 69 discipline sanctions with detailed explanation as follows:

a. The Awards

In accordance with the Collective Labor Agreement between PT PELNI (Persero) with the Labor Union PT PELNI (Persero) regarding the awards given to employees. The number of employees who receive awards is in accordance with the years of service and is stated in Decree No. 03.03/01/SK/HKO.01/2020 dated 03 March 2020 concerning the Awarding of Working Periods of 30 years, 25 years, 16 years and 8 years are as follows:

No	Penghargaan Appreciation	Pusat Head Office	Cabang Branch	ABK Staff	SBU BAC	Anak Perusahaan Subsidiary	Jumlah Total
1	30 Tahun | Years	23	20	85	2	25	155
2	25 Tahun | Years	6	19	22	4	17	68
3	16 Tahun | Years	-	8	-	-	5	13
4	08 Tahun | Years	-	-	90	-	-	90
			Jumlah Total				**326**

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

b. Sanksi Disiplin Pegawai PT PELNI (Persero) 2020

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PELNI (Persero) tentang pemberian sanksi disiplin serta SK Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT PELNI (Persero) untuk pegawai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka berikut ini merupakan jumlah pemberian hukuman disiplin yang diberikan pegawai PT PELNI (Persero):

b. Discipline Sanction for disobeyed employee of PT PELNI (Persero) in 2020

According to Joint Working Agreement between PT PELNI (Persero) and Labor Union regarding discipline sanction administration also in the Letter of Directors' Decree Number: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 about PT PELNI (Persero) Employee Discipline Regulations for employees who defied regulation that stipulated by the Company. The total discipline sanction given to employees of PT PELNI (Persero) is as follows:

No	Jenis Hukuman Punishment	Pegawai Employees		Jumlah Total
		Darat Ashore	Laut Onboard	
1	Teguran Tertulis Written Reprimand	24	5	29
2	Peringatan Tertulis Written Warning	-	1	1
3	Peringatan Keras Stern Warning	1	6	7
4	Peringatan Keras Terakhir Last Stern Warning	3	3	6
5	Skorsing Suspension	3	9	12
6	PHK Layoffs	9	5	14
	Jumlah Total			**69**

Remunerasi dan Kesejahteraan SDM

Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas pegawai terhadap Perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai, Perseroan telah menetapkan aturan pemberian fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh Pegawai berdasarkan level jabatan dan status kepegawaian. Pemberian fasilitas dan tunjangan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait lainnya.

Employee Remuneration And Welfare

To raise motivation and loyalty of the employee and to improve the employee's welfare, the Company has stipulated employee remuneration based on the results of performance assessment. The employee's remuneration package has also complied with relevant Laws and regulations, including Provincial Minimum Wage and Ministry of Manpower and Transmigration regulation.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Komponen remunerasi yang diberikan kepada pegawai Perseroan, antara lain gaji pokok, insentif prestasi serta berbagai tunjangan dan fasilitas. Tunjangan dan fasilitas yang dimaksud tersebut diantaranya adalah:

1. Struktur Upah telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 tentang Pengupahan di lingkungan PT PELNI (Persero) tanggal 31 Juli 2019 terdiri dari:
   a. Upah Pokok yaitu upah yang diterima oleh pegawai tetap setiap bulannya tidak dipengaruhi oleh kehadiran, namun dipegaruhi oleh golongan dan masa kerja.
   b. Tunjangan tetap yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap setiap bulan berdasarkan kelas jabatan dan tidak dipengatuhi oleh kehadiran maupun prestasi pegawai itu sendiri.
   c. Tunjangan Tidak Tetap yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap berupa insentif prestasi (IP) yang dipegaruhi oleh kehadiran dan berlaku bagi pegawai darat maupun pegawai laut berdasarkan kelas jabatan.
   d. Tunjangan Khusus yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap yang memiliki jabatan tertentu:
      1). Tunjangan Struktural dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 diberikan kepada pegawai tetap dengan jabatan Pimpinan Unit kerja di Kantor Pusat, Cabang dan SBU/ Pegawas pada Unit Kerja Kantor Pusat/ Manager pada Unit Kerja Kantor Pusat/ Kepala Bagian pada Cabang tipe A & B/ Kepala Urusan pada Cabang tipe C & D.

      2). Tunjangan Fungsional dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 diberikan kepada *Staff* Utama Direksi/*Staff* Madya Direksi/ Pemeriksa Utama, Surveyor Utama.

Remuneration component such as basic salary, performance incentives, allowances and other facilities given to the employees is as follows.

1. Wage Structure has been regulated in Letter of Directors' Decree Number: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 concerning Wages of PT PELNI (Persero) dated July 31st, 2019 containing of:
   a. Basic Salary is received by permanent employees per month, which is not counted by attendance but influenced by the position and the length of service.
   b. Permanent allowance is given to permanent employees per month according to their class position and is not influenced by the attendance or achievement of the employee itself.
   c. Non-Permanent Allowance is provided to permanent employees in performance incentives (IP) according to their attendance and apply to both onboard and ashore employees by their class position.
   d. Specific allowance is provided to permanent employees who have certain positions:

      1). Structural allowance in the Letter of Directors' Decree Number: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 is given to permanent employees with the position of Head of work Units in the Head Office, Branch Offices and SBU/Supervisor in the Work Unit of the Head Office/Manager in the Work Units of the Head Office/Head of Branches for Type A & B/Head of Affairs in Branches for type C & D.
      2). Structural allowance in the Letter of Directors' Decree Number: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 is given to Main Staff of the Board of Directors/Associate Staff of the Board of Directors/Main Investigator, Main Surveyor.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

3). Tunjangan Komando dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 diberikan kepada Nakhoda/ Kamar Mesin/Mualim I/ Masinis I Senior.

4). Tunjangan Profesi dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 diberikan kepada Dokter Kapal yang bekerja di atas Kapal Milik yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

5). Tunjangan Telekomunikasi dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 diberikan kepada Pimpinan Unit Kerja Kantor Pusat, Cabang, Kapal dan SBU/Pengawas pada Unit Kerja Kantor Pusat/Kepala Kamar Mesin dan Mualim I/Manager Kantor Pusat/Manager atau Kepala Bagian SBU/Kepala Bagian di Cabang/ Kepala Urusan di Cabang/ Asisten Manager atau Kepala Urusan di Cabang/Asisten *Manager* atau Kepala Urusan di SBU.

6). Tunjangan Perumahan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 diberikan kepada Pimpinan Unit Kerja Kantor Pusat/Pengawas pada Unit Kerja Kantor Pusat/*Manager* Kantor Pusat.

7). Tunjangan Premi tetap awak kapal dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 diberikan kepada pegawai laut dengan dipengaruhi oleh Faktor Tipe Kapal, Jabatan, dan Penugasan berlayar dari perusahaan dengan perintah berdasarkan SK Direksi dan/ atau Mutasi dan/atau Dokumen Resmi Perusahaan lainnya seperti Mutasi Naik Tetap, Pengganti Cuti (PC), Pengganti Cuti Khusus ataupun Pengenalan.

3). Command allowance in the Letter of Directors' Decree Number: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 is given to Captain/ Engineer/Mualim I/Senior Engineer I.

4). Profession allowance in the Letter of Directors' Decree Number: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 is given to Ship Doctors who work on Owned Vessels operated by PT PELNI (Persero).

5). Telecomunication allowance in the Letter of Directors' Decree Number: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 is given to Chairman at Head Office Work Unit, Branch, Ship and SBU/ Supervisor at Head Office Work Unit/Head of Machine Room and Mualim I/Head Office Manager/Head of Section at SBU/Head of Section at Branch Office/Head of Affairs at Branch Office/Assistant Manager or Head Affairs at the Branch office/Assistant Manager or Head of Affairs at SBU.

6). Housing allowance in the Letter of Directors' Decree Number: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 is given to Chairman at Head Office Work Unit/Supervisor at Head Office Work Unit/Head Office Manager.

7). Insurance allowance in the Letter of Directors' Decree Number: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 is given to onboard Employee by being influenced by Ship Type, Position, and Sailing Assignments from the company by order based on the Directors' Decree and/or Mutations and/or other Company Official Documents such as Permanent Up, Mutation, Special Leave or Introduction.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

8). Insentif tim pendukung kinerja direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 diberikan kepada pegawai tetap yang ditempatkan sebagai Personal Assisten Direksi dan Sekretaris Direksi.

2. Penetapan Remunerasi yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan gender
Pemberian tunjangan anak dan istri telah diubah dan disesuaikan menjadi tunjangan tetap yang diberikan kepada seluruh Pegawai PT PELNI (Persero) tanpa berdasarkan gender, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.09/01/SK/HKO.01/2017 tentang Pengupahan di lingkungan PT PELNI (Persero) dan diperbaharui di Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 tentang Pengupahan dilingkungan PT PELNI (Persero) tanggal 31 Juli 2019.

Jumlah pegawai yang promosi, mengundurkan diri, mutasi, pensiun, kecelakaan kerja dan meninggal selama tahun 2020.

1. **Promosi dan rotasi**
Dalam periode tahun 2020, sebanyak 160 pegawai yang dimutasikan baik rotasi, mutasi dan demosi guna mengisi formasi sekaligus penyegaran. Dimana sebanyak 64 pejabat struktural yang dimutasi dan 96 pegawai Supervisor dan Pelaksana yang dimutasi, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Pejabat Struktural**
Structural Officers

Keterangan Description	Rotasi Rotation	Promosi Promotion	Demosi Demotion	Jumlah Total
Jumlah Total	**18**	**46**	**0**	**64**

b. **Supervisor dan Pelaksana**
Supervisor and Manager

Keterangan Description	Rotasi Rotation	Promosi Promotion	Demosi Demotion	Jumlah Total
Jumlah Total	**57**	**39**	**0**	**96**

8). Directors' performance support team incentives based on the Letter of Directors' Decree No.07.31/03/SK/HKO.01/2019 is given to permanent employees who are placed as Personal Assistant Directors and Secretary of the Directors.

2. Determination of Remuneration given to Employees based on gender
The provision of child and wife benefits has been changed and adjusted to a permanent allowance given to all employees of PT PELNI (Persero) without being based on gender, this is in accordance with Directors' Decree Number: 06.09/01/SK/HKO.01/2017 concerning Wages in the environment PT PELNI (Persero) and updated in the Decree of the Board of Directors Number: 07.31/03/SK/HKO.01/2019 concerning Wages at PT PELNI (Persero) dated 31 July 2019.

The number of employees who are promoted, resigned, transferred, retired, accidents and died during 2020.

1. **Promotion and rotation**
In the period of 2020, as many as 160 employees were mutated due to rotation, mutation and demotion to fill formations as well as refreshment. Where as many as 64 structural officers were mutated and 96 supervisors and implementers were mutated, with the following details:

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

2. Mengundurkan diri
Resignation

Penempatan Placement	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Darat Ashore	5	4	9
Laut Onboard	5	-	5
Jumlah Total			**14**

3. Pensiun
Retired

NO. SK Decree No.	Pusat Head Office	Cabang Branch	Kapal Ship	Anak Perusahaan Subsidiary	SBU SBU	Jumlah Total
12.03/02/SK/HKO.01/2019	7	10	41	1	29	88
06.16/02/SK/HKO.01/2020	9	13	46	0	36	104
Jumlah Total						**192**

4. Kecelakaan kerja

Pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang Pegawai PT PELNI (Persero) mengalami kecelakaan akibat kerja pada bulan Mei 2020 dengan kasus kehilangan jari tengah yang dialami oleh ABK KM. Logistik Nusantara V.

4. Work Accident

In 2020, 1 (one) employee of PT PELNI (Persero) onboard Motor Vessel. Logistics Nusantara V had an accident during work in May 2020 causing loss of middle finger.

Penempatan Placement	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Darat Ashore	-	-
Laut Onboard	1	-
Jumlah Total	**1**	

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

5. Meninggal Dunia

Pada tahun 2020 terdapat 29 orang Pegawai PT PELNI (Persero) yang meninggal dunia yang terdiri dari Pegawai Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kapal, Anak Perusahaan (PT PIDC, RS PELNI), dengan rincian sebagai berikut :

5. Deceased

In 2020 there are 29 employees of PT PELNI (Persero) who died consisting of Employees of the Head Office, Branch Office, Ship, Subsidiaries (PT PIDC, RS PELNI), with the following details:

No	Unit Kerja Working Unit	Jumlah Total	Satuan Unit
PT PELNI (Persero)			
1	Kantor Pusat Head Office	6	Orang Person
2	Kantor Cabang Branch	4	Orang Person
3	Kapal Ship	13	Orang Person
Pegawai PELNI yang ditempatkan di Anak Perusahaan PELNI employees placed in a subsidiary			
1	PIDC PIDC	1	Orang Person
2	RS PELNI RS PELNI	5	Orang Person
	Jumlah Total	**29**	Orang Person

Jumlah Pegawai yang Melakukan Klaim Karena Kecelakaan Kerja

Pada tahun 2020 sebanyak 1 orang Pegawai PT PELNI (Persero) mengalami kecelakaan akibat kerja dan melakukan klaim asuransi.

Number of Employees Who Claimed Due to Work Accident

In 2020, 1 (one) employee of PT PELNI (Persero) had an accident due to work and made an insurance claim.

Penempatan Placement	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Darat Ashore	-	-
Laut Onboard	1	-
Jumlah Total	**1**	

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Jumlah Klaim Karena Sakit Akibat Kerja

Selain keselamatan kerja, Perseroan juga memperhatikan kesehatan kerja. Pada tahun 2020 jumlah klaim atau pengobatan karena sakit di RS PELNI sebanyak 8.539 kali yang terdiri atas pegawai Kantor Pusat, Cabang, ABK, Hotel Bahtera dan PT PIDC (fasilitas kesehatan ini diberikan untuk pegawai dan keluarga) dari bulan Januari hingga Desember 2020 dengan realisasi biaya sebesar Rp11.870.095.821. Pegawai PT PELNI (Persero) yang terdiagnosa penyakit khusus top up RS PELNI dapat melakukan pengobatan di RS PELNI hingga yang bersangkutan dinyatakan sembuh dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan.

Number of Claims Due to Sickness During Work

In addition to work safety, the Company also pays attention to occupational health. In 2020 the number of claims or treatment for illness in RS PELNI were 8,539 times consisting of employees of the Head Office, Branch, Crewmembers, Bahtera Hotel and PT PIDC (this health facility is provided for employees and families) from January to December 2020 with the realization of costs of IDR 11,870,095,821. Employees of PT PELNI (Persero) who were diagnosed with a special disease topped up the hospital. PELNI can do treatment in RS PELNI until the concerned is declared cured with the costs charged to the company.

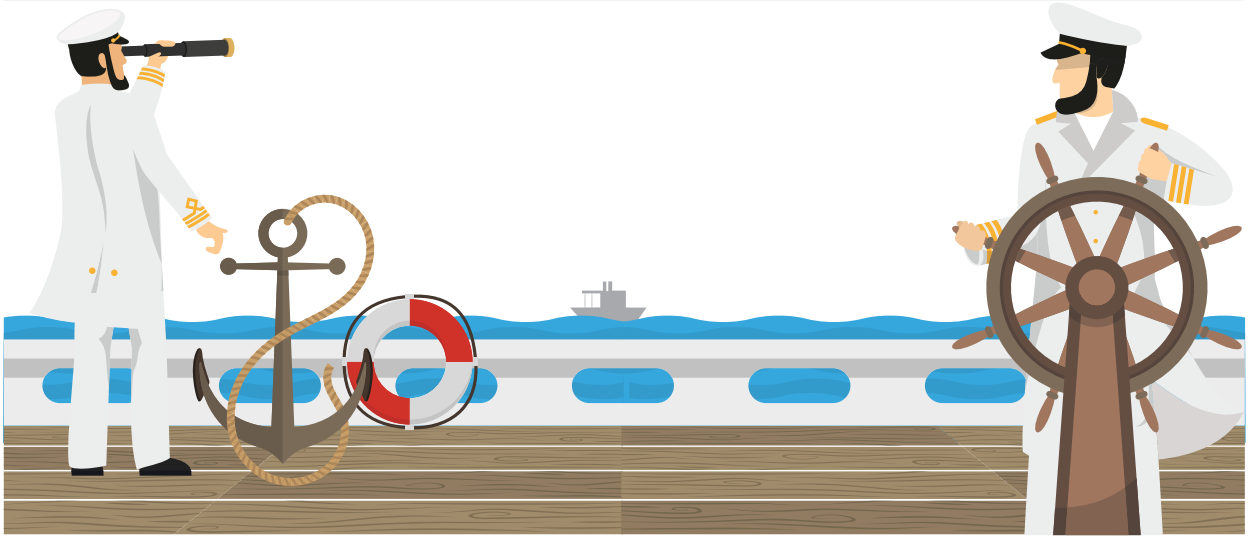
Jumlah Pegawai Darat dan Laut yang Ikut ke dalam Serikat Pekerja Selama Tahun 2020

Tahun 2020 PT PELNI (Persero) memiliki 2 Serikat Pekerja, jumlah pegawai yang terdaftar dalam Serikat Pekerja sebanyak 3.821 Orang pegawai atau setara dengan 71,7% Pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

Number of Ashore And Sea Employees Joining The Trade Union During 2020

In 2020 PT PELNI (Persero) has 2 Trade Unions, the number of employees registered in the Trade Union are 3,821 employees or equivalent to 71.7% employees, with the following details:

No	Uraian Description	SP PELNI Pelni Trade Union	Serikat Karyawan Employees Union	Jumlah Total
1	Pegawai Darat Ashore Employees	982	260	1.242
2	Pegawai Laut Onboard Employees	2.462	117	2.579
	Jumlah Total	3.444	377	**3.821**



TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

PENDAHULUAN

Divisi Teknologi informasi adalah unit kerja pengelola teknologi informasi di PT PELNI (Persero) yang berada dibawah Direktur SDM & Umum. Berdasarkan No. 03.19/01/SK/HKO.01/2019, Divisi Teknologi Informasi mempunyai fungsi penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan, penelaahan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja kesiapan pakai (*serviceability performance*) dan kehandalan (*reliability performance*) fasilitas, peralatan serta perangkat teknologi informasi perusahaan yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Teknologi Informasi memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana kerja (jangka panjang, menengah dan pendek) dan program kerja perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi;
2. Menyiapkan konsep peraturan kebijakan dan sistem prosedur dalam pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi yang menjamin dapat dicapainya kinerja kesiapan pakai (*service ability performance*) dan kehandalan (*reliability performance*) fasilitas, peralatan serta perangkat teknologi informasi perusahaan yang optimal;
3. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan, perawatan, dan perbaikan untuk penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

INTRODUCTION

Information technology division is an information technology work unit of PT PELNI (Persero), which is under supervision of the Director of HR & General Affairs. Based on Decree No. 03.19/01/SK/HKO.01/2019, the Information technology division has functions to formulate policy, implement, review, control and report the management of procurement activities, readiness and reliability of information technology devices both software and hardware applicable with the relevant regulation in order to be achieved serviceability and reliability performances of optimal information technology facilities and devices of the Company. In performing its functions, Information technology division has the following main duties:

1. Preparing (long, medium and short terms) work plans and programs of the Company related to the management of providing and preparing the reliability of information technology facilities, equipment and devices;
2. Preparing regulatory and procedures to manage ready to use – reliability of facilities, equipment and devices both software and hardware which ensures serviceability and reliability performance of facilities, equipment and devices for optimal information technology of the Company;
3. Organizing the activities of providing, maintaining, and improving ready to use and reliability of information technology facilities, equipment and devices (hardware & software) in accordance with applicable regulations;

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

4. Memantau, mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi di Kantor Pusat, Kapal, Kantor Cabang, dan SBU;
5. Melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, dan kehandalan fasilitas, peralatan, serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi;
6. Menyiapkan laporan berkala dan atau laporan khusus kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, dan kehandalan fasilitas, peralatan, serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Monitoring, coordinating and controlling ready to use – and reliability of information technology facilities, equipment and devices both software and hardware in Head Office, Ships, Branch Offices and SBU;
5. Conducting risk management and mitigation for ready to use – and reliability of information technology facilities, equipment and devices both software and hardware;
6. Preparing periodic reports and/or special reports on ready to use – and the reliability of facilities, equipment and information technology both software and hardware in accordance with applicable regulations.

TEMA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2020-2024

PT PELNI (Persero) memiliki tema strategis perusahaan tahun 2020-2024 yaitu *Sustainably Profitable Growth* (2020-2021) dan *Business Expansion* (2022-2024). Untuk mendukung tema strategis perusahaan tersebut, Teknologi Informasi perusahaan memiliki tema strategis yang diselaraskan yaitu *Business Enabler* (2020-2021) dan *Digitalization* (2022-2024). Adapun strategi-strategi yang mendukung tema strategis teknologi informasi dijabarkan pada table di bawah ini:

STRATEGIC THEME OF INFORMATION TECHNOLOGY OF THE YEAR 2020-2024

PT PELNI (Persero) has a strategic theme of the company 2020-2024, called Sustainably Profitable Growth (2020 2021) and Business Expansion (2022-2024). To support the company's strategic theme, Company's Information Technology has a strategic theme called Business Enabler (2020-2021) and Digitalization (2022-2024). As for the strategies that supports strategic themes of information technology described in the following table:

Tema Strategis Perusahaan Company's Strategic Theme	Tema Strategis Teknologi Informasi Information Technology's Strategic Theme	Strategi Teknologi Informasi Information Technology's Strategy
Sustainably Profitable Growth (2020-2021)	*Business Enabler* (2020-2021)	1. *Develop Integrated Information System* Develop Integrated Information System 2. *High Availability Infrastructure* High Availability Infrastructure 3. *Enhance Information Technology Maturity Level* *Enhance Information Technology Maturity Level*
Business Expansion (2022-2024)	*Digitalization* (2022 – 2024)	1. *Digitalization for Customer Experiences* Digitalization for Customer Experiences 2. *Digitalization for All Operational Processes* Digitalization for All Operational Processes 3. *Digitalization for New Business Models* Digitalization for New Business Models

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

PENCAPAIAN KINERJA 2020

Divisi Teknologi Informasi dalam menjalankan pekerjaannya di tahun 2020 didasarkan RKAP 2020 dan Kontrak Kerja Manajemen tahun 2020. Pada RKAP 2020, Divisi Teknologi Informasi menjalankan berbagai program kerja yang diamanatkan baik melalui Rencana Strategis Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) periode 2017-2021 maupun permintaan-permintaan dari unit-unit kerja yang ada. Sedangkan pada kontrak kerja manajemen tahun 2020, Divisi Teknologi Informasi dituntut untuk memenuhi *key performance indicator* (KPI) yang tertera pada *score card*.

Divisi Teknologi Informasi memiliki program-program kerja yang mampu mendukung percepatan transformasi digital perusahaan. Program-program kerja tersebut dikategorikan sebagai program kerja *quick win*.

Program-program kerja yang termasuk dalam program kerja *quick win* adalah sebagai berikut:

PERFORMANCE ACHIEVEMENT IN 2020

The Information Technology Division in carrying out its work in 2020 referred to the Company's work and budget plan and the Management Contract for fiscal 2020. The Information Technology Division carries out some essential duties or initiative programs mandated through PT PELNI (Persero) Information Technology Strategic Plan for 2017- 2021 and follows up inquiries from other work units. Despite, in the management contract in 2020, the Information Technology Division is required to fulfill the key performance indicator (KPI) printed on the scorecard.

The Information Technology Division has work programs that are able to support the acceleration of Company's digital transformation. These work programs are categorized as a quick win work program.

Work programs included in the quick win work is as follows:

No	Program Kerja *Quick Win* Quick Win Work Program	Pencapaian Achievement
1	Interkoneksi & DCS Interconnection & DCS	• Kebutuhan interkoneksi online pada lokasi/cabang yang minim infrastruktur komunikasi, direncanakan menggunakan konsep SD-WAN. Need for online interconnection at location/branch lacking communication infrastructure, planned using the concept of SD-WAN. • Implementasi akan direncanakan pada tahun 2021. Implementation will be planned in 2021.
2	Aplikasi Admin Kapal Ship Administration Application	Implementasi aplikasi Admin Kapal sudah dilakukan di seluruh kapal penumpang (26 kapal). The implementation of the Ship Admin application has been done throughout passenger ships (26 ships).
3	Aplikasi Siparsel Siparsel Application	Implementasi aplikasi SIPARSEL berhasil dilakukan di 5 kapal penumpang (KM Kelud, KM Nggapulu, KM Kelimutu, KM Tatamailau, dan KM Lawit. Siparsel application implementation was successfully carried out on 5 ships passengers (KM Kelud, KM Nggapulu, KM Kelimutu, KM Tatamailau, and KM Lawit.
4	Aplikasi ERP Keuangan (*Oracle EBS Finance*) Financial ERP Application (Oracle EBS Finance)	• Terintegrasi dengan aplikasi PPSS untuk transaksi penjualan tiket penumpang dengan pembayaran melalui *virtual account* (VA). Integrating to PPSS application is to pay passenger ticket sales transaction through virtual account (VA). • Terintegrasi dengan aplikasi MyCargoo! untuk transaksi penjualan muatan. Integrating to MyCargoo application for cargo sales payment.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Program Kerja *Quick Win* Quick Win Work Program	Pencapaian Achievement
5	Implementasi *E-Payment* Implementation of E-Payment	Penyediaan layanan pembayaran secara elektronik untuk mempermudah transaksi pembelian produk PELNI. Provision of payment services electronically to facilitate the purchase of PELNI products. Terimplementasi : *Virtual Account* (VA BNI) dan BRI *Virtual Account* (BRIVA) Implemented : Virtual Account (VA BNI) and BRI Virtual Account (BRIVA) *On Progress* : Mandiri dan *Payment Gateway* (Finnet) On Progress : Mandiri and Payment Gateway (Finnet)
6	MyCargoo! MyCargoo!	Implementasi aplikasi MyCargoo! sudah dilakukan di 2 kapal penumpang yaitu KM Kelud dan KM Dobonsolo. Implementation of MyCargoo! application has been done on 2 ships which are KM Kelud and KM Dobonsolo.
7	*Planned Maintenance System* (PMS) Planned Maintenance System (PMS)	Aplikasi sudah diuji coba di KM Kelud. The application has been tested on KM Kelud.

EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS 2020

Sesuai SK Direksi No.07.28/02/SK/HKO.01/2017 tentang Prosedur Tata Kelola dan Rencana Strategis Teknologi Informasi PT PELNI (Persero), PT PELNI (Persero) memiliki roadmap pengembangan Teknologi Informasi perusahaan periode 2017-2021. Divisi Teknologi Informasi sebagai unit kerja pengelola teknologi informasi, menjalankan inisiatif-inisiatif yang telah diamanatkan dalam *roadmap* rencana strategis tersebut. Tabel berikut ini pencapaian inisiatif-inisiatif tersebut:

STRATEGIC PLANNING EVALUATION 2020

Pursuant to Directors' Decree No. 07.28/02/SK/HKO.01/2017 regarding the Procedures for Governance and Information Technology Strategic Plans of PT PELNI (Persero), PT PELNI (Persero) has a roadmap for the development of corporate Information Technology for the 2017-2021 period. The Information Technology Division, as a work unit for information technology management, carries out the initiatives mandated in the strategic plan roadmap. The following table achieves these initiatives:

No	Inisiatif Initiative	Pencapaian Achievement	Penjelasan Explanation
Inisiatif Kerja Kategori Aplikasi/Sistem Informasi Work Initiative of Application Category / Information System			
1	Pengembangan aplikasi SIPARSEL Development of SIPARCEL Application	100%	Secara pengembangan aplikasi Siparsel sudah selesai dilakukan di tahun 2020, dilanjutkan sudah dilakukan implementasi di 5 Kapal Penumpang. Pada tahun 2021, akan dilanjutkan implementasi di 4 Kapal Penumpang dan 5 kapal Logistik Nusantara. In terms of developing the Siparsel application, it has been completed in 2020, continued the implementation in 5 passenger ships. In 2021, implementation will continue in 4 passenger ships and 5 Nusantara Logistics vessels.
2	Pengembangan aplikasi MyCargoo! Development of MyCargoo! Application	100%	Secara pengembangan aplikasi MyCargoo! sudah selesai dilakukan di tahun 2020 dan diimplementasikan di 2 Kapal Penumpang. Pada tahun 2021 akan dilakukan rollout di 23 Kapal Penumpang. Based on the development of MyCargoo! Application it had been completed in 2020 and implemented on 2 passenger ships. In 2021 there will be a rollout on 23 passenger ships.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Inisiatif Initiative	Pencapaian Achievement	Penjelasan Explanation
3	Pengembangan aplikasi *Human Resource Information System* (HRIS) Development of Human Resource Information System (HRIS) Application	95%	Pada tahun 2020, sudah dilakukan pengembangan untuk modul: In 2020, development has been carried out for module: 1. Manajemen Organisasi dan Jabatan; Organizational Management and Position; 2. Manajemen Pegawai; Employee Management; 3. Manajemen Absensi Pegawai; Employee Attendance Management; Pada tahun 2021, akan dilakukan pengembangan untuk modul *Workforce Management, Performance Management System (PMS), Personal Administration, dan Leave Management.* In 2021, development will be carried out for Workforce Management module, Performance Management System (PMS), Personal Administration, and Leave Management.
4	Pengembangan Aplikasi PELNI Doc Development of PELNI Doc Application	100%	Tahun 2020, sudah dilakukan implementasi ke semua Kapal Penumpang, Kapal Barang, Kapal Perintis, dan Kapal Rede PT PELNI (Persero). In 2020, PELNI Doc Application has been implemented on all Passenger Ship, Cargo Ship, Pioneer Ship, and Rede Ship of PT PELNI (Persero).
5	Pengembangan aplikasi Muatan Kapal Perintis (*Pecasy*) Development of Perintis Cargo System (Pecasy)	99%	Tahun 2020, sudah dilakukan pengembangan aplikasi dan sudah di-*deploy* di hampir seluruh Kapal Perintis. Di tahun 2021, akan dilakukan *deployment* di sisa 2 Kapal Perintis (Sanus 87 dan Sanus 95). In 2020, application development has been done and deployed on almost all Pioneer ships. In year 2021, deployment will be carried out on the remaining 2 Pioneer Ships (Sanus 87 and Sanus 95).
6	Pengembangan Aplikasi *Knowledge Management System* Development of Knowledge Management System Application	100%	Tahun 2020, sudah dilakukan pengembangan dan implementasi aplikasi *Knowledge Management System (Implementasi Knowledge Base)* pada aplikasi *e-learning* perusahaan. Development and Knowledge Management System application implementation (Knowledge Base Implementation) in Company's e-learning applications has been done in 2020.
7	Pengembangan Aplikasi Winona Winona Application development	100%	Pengembangan aplikasi sudah selesai dilakukan (https://winona.pelni.co.id). Application development is complete (https://winona.pelni.co.id).
8	Penyediaan Aplikasi Pelaporan PKBL Provisioning of PKBL Reporting Application	100%	Pengembangan aplikasi sudah selesai dilakukan. Application development is complete.
9	Pengembangan Aplikasi Keagenan Development of Agency Application	100%	Pengembangan aplikasi ini sudah dilakukan (https://agencies.pelni.co.id) Application development is complete (https://agencies.pelni.co.id)
10	Penyediaan aplikasi *Planned Maintenance System* (PMS) Provisioning of Planned Maintenance System (PMS)	62%	Aplikasi sudah diuji coba dan dilakukan *Conference Room Pilot* (CRP) di KM Kelud. Application has been tested and Conference Room Pilot (CRP) was conducted on MV Kelud.
11	Pengembangan aplikasi *e-procurement* Development of e-procurement application	15%	Pekerjaan ini masih dalam tahap proses pengadaan. This work is still in the procurement process.
12	Penyesuaian *Website* PELNI (Re-*design*) Customization of PELNI's Website (Re-design)	100%	Pekerjaan ini sudah selesai dilakukan (https://pelni.co.id). This work is done (https://pelni.co.id).

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Inisiatif Initiative	Pencapaian Achievement	Penjelasan Explanation
13	Pengembangan aplikasi Pelni *One* (*mobile apps*) Development of Pelni One Application (mobile apps)	100%	Pengembangan aplikasi ini sudah dilakukan. The development of this application is already done.
Inisiatif Kerja Kategori Jaringan/Infrastruktur TI Work Initiatives of Network/IT Infrastructure Category			
1	*Maintenance Data Center* PELNI Maintenance Data Center PELNI	40%	Pekerjaan ini masih dalam tahap proses pengadaan. This work is still in the procurement process.
2	Implementasi DRC DRC implementation	75%	Pada tahun 2020, sudah selesai dilakukan pengadaan perangkat dan lisensi *software* DRC. Selanjutnya akan dilakukan instalasi, testing dan *Go-Live*. By 2020, procurement device and DRC software license has been completed. Next will be done the installation, testing and Go-Live.
3	Manage Service Perangkat Jaringan Kantor Pusat Manage Service of Home Office Network Device	100%	Pekerjaan ini sudah selesai diimplementasikan. This work has been completed.
Inisiatif Kerja Kategori Tata Kelola TI Work Initiatives of IT Governance Category			
1	Menjalankan *training* peningkatan kompetensi personil TI sesuai spesialisasi perannya Running the Improvement of IT personnel competency training in accordance with specialization of his role	20%	Divisi TI telah memberikan usulan pelatihan/sertifikasi kepada Divisi SDM namun karena adanya prioritisasi, *training* dan sertifikasi difokuskan pada operasional perkapalan. The IT division has provided training/certification proposals to HR division but due to prioritization, training and certification is focused on operational Shipping.
2	Kajian (*Assessment*) Kematangan Tata Kelola TI Assessment of IT Governance's Maturity	100%	Pada tahun 2020, pelaksanaan asesmen kematangan tata kelola TI dilakukan secara *self assessment* dengan hasil IT *Maturity Level* sebesar 2,93. In 2020, maturity of IT governances assessment is conducted on a self assessment basis with result of IT Maturity Level is 2.93.
3	Mendorong setiap area TI melakukan riset terhadap tren teknologi dan *best practice* yang relevan Drive every IT area to conduct research on technology trends and best relevant practices	100%	Pada tahun 2020, Divisi TI telah melakukan riset pengembangan aplikasi *Visitor Management, Self Assessment* Pegawai, dan *Presensi Digital.* By 2020, the IT Division has conducted research on Application development Visitor Management, Self Employee Assessment, and Digital Review.
4	Melakukan *survey* kepuasan TI tahunan Conducting annual IT satisfaction surveys	100%	Inisiatif ini bersifat rutin tahunan. Tahun 2020, dilaksanakan *survey* kepuasan *user* PELNI terhadap layanan TI dengan hasil skor 3,9 (skala 1-5), survey tingkat kepuasan vendor dengan skor 4,3 (skala 1-5), dan survey tingkat kepuasan mitra dengan skor 4,9 (skala 1-5). This initiative is done annualy. In 2020, PELNI user satisfaction survey has been implemented to IT services with score of 3.9 (scale 1-5), vendors satisfaction level survey with a score of 4.3 (scale 1-5), and a survey of partners satisfaction levels with a score of 4.9 (scale 1-5).
5	Memberikan laporan periodik TI ke manajemen Providing periodic IT report to management	100%	Laporan perkembangan TI secara bulanan dalam bentuk rapat koordinasi Direktorat SDM dan Umum. Laporan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Monthly IT progress report in the form of coordination meeting of the Directorate of Human Resources and General Affairs. The report has been submitted to the Board of Commissioners and Board of Directors.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

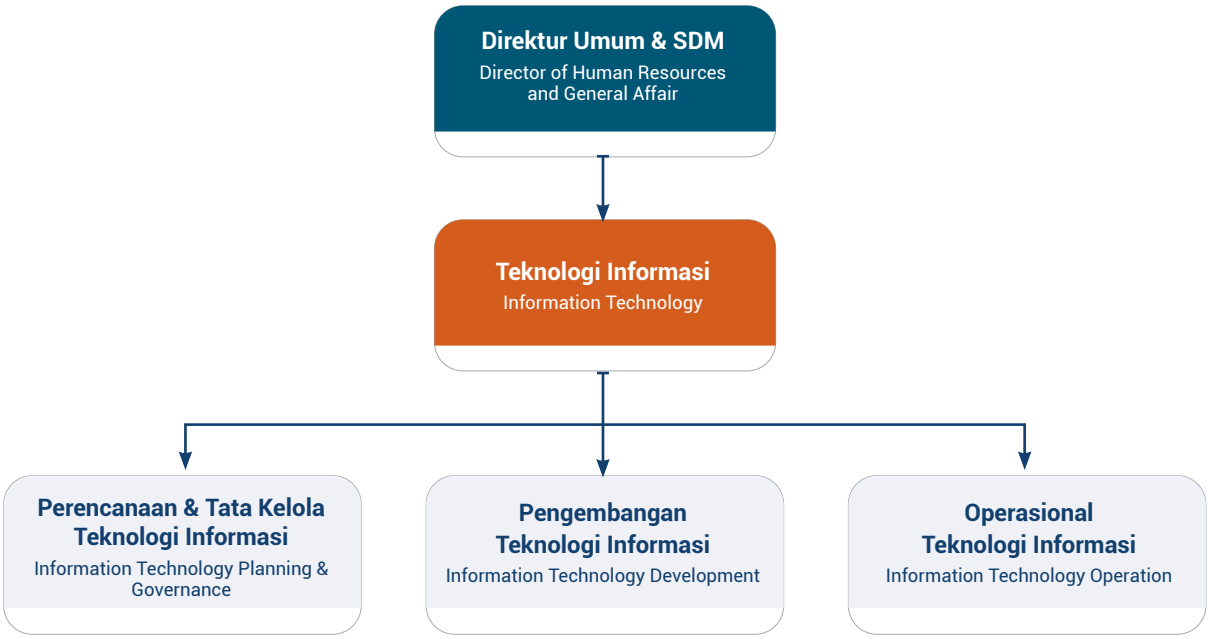
No	Inisiatif Initiative	Pencapaian Achievement	Penjelasan Explanation
6	Bersama dengan fungsi bisnis terkait, melanjutkan kerjasama sinergi Along with functions of related business, continue synergy cooperation	100%	Inisiatif ini dilakukan dalam bentuk sinergi dengan beberapa instansi, diantaranya yaitu Kerjasama dengan perbankan BUMN (Bank BNI dan Bank BRI) dalam penyediaan layanan virtual account untuk transaksi pembayaran produk PELNI. Integrasi antara aplikasi SIPARSEL PT PELNI (Persero) dengan aplikasi WMS PT PIDC terkait PO/Surat Pesanan Bahan Permakanan dan *Scan QR Code* Bahan Permakanan untuk menunjang proses bisnis penerimaan dan penggunaan bahan permakanan di atas kapal. This initiative is carried out in the form of synergy with several institutions, including cooperation with banks BUMN (Bank BNI and Bank BRI) in the provision of services virtual account for payment transactions of Pelnis product. Integration between PT PELNI (Persero) SIPARSEL application and WMS application of PT PIDC related to PO/Letter of Food Ingredients Order and Scan QR Code of Food Ingredients to support business processes of acceptance and use of food onboard.
7	Penyusunan dan pemutakhiran arsitektur dan standar TI Preparation and architecture updates and IT standards	60%	Beberapa standar TI yang dicoba diterapkan di PT PELNI (Persero) yaitu *Disaster Recovery Center* (DRC) dan *Service Oriented Architecture* (SOA) ditargetkan selesai terimplementasi pada tahun 2021. Some IT standards that are tried to be implemented at PT PELNI (Persero) such as Disaster Recovery Center (DRC) and Service Oriented Architecture (SOA) are targeted to be implemented in 2021.

STRUKTUR ORGANISASI

Pada tahun 2020, tidak ada perubahan struktur organisasi di Divisi TI. Berikut ini gambaran struktur organisasi Divisi sesuai SK Direksi per tanggal 19 Maret 2020:

ORGANIZATION STRUCTURE

In 2020, there were no changes in the organization structure of Information Technology Division. The following is the organization structure of information technology division based on Letter of Board of Directors' Decree per March 19, 2020:



TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah pegawai Divisi Teknologi Informasi sebanyak 28 orang pegawai organik. Berdasarkan SK Direksi No. 08.12/02/SK/HKO.01/2019 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat, ada 35 formasi yang ada di Divisi Teknologi Informasi PT PELNI (Persero), terdiri dari 29 formasi pegawai organik, dan 6 pegawai non organik.

APLIKASI/SISTEM INFORMASI

Aplikasi-aplikasi dan sistem informasi yang ada di PT PELNI (Persero) dibangun berdasarkan kebutuhan dari setiap unit kerja/fungsi bisnis yang ada di Perusahaan. Berdasarkan RKAP 2020 dan *roadmap* inisiatif aplikasi/sistem informasi pada tahun 2020 yang tercantum dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi 2017-2021, ada beberapa aplikasi yang telah berhasil diimplementasikan dan ada beberapa aplikasi yang sudah masuk tahapan pembangunan. Berikut pencapaian pengembangan aplikasi-aplikasi penting di PT PELNI (Persero).

Aplikasi PELNI Passengers Service System (PPSS)

Aplikasi PPSS adalah bentuk kerja sama antara PT PELNI (Persero) dengan PT Sqiva System sesuai kontrak No. TH.08.18-02/SS/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Hingga tahun 2020, Perseroan telah berhasil mengimplementasikan beberapa modul utama yaitu modul *Reservation Online, Payment Processing & Settlement, Departure Control System*, Admin Kapal, *payment melalui EDC (electronic data capturing)* dan *virtual account* BNI (VA BNI).

NUMBER OF HUMAN RESOURCES

Until 31 December 2020, total Information Technology Division employees was 28 permanent employees. Based on the Directors' Decree No. 08.12/02/SK/HKO.01/2019 regarding work formation unit and position within head office, which are 35 existing formation for Information Technology of PT PELNI (Persero), consisted of 29 permanent employees and 6 non-permanent employees.

APPLICATION/INFORMATION SYSTEM

Applications and information systems of PT PELNI (Persero) are built to meet the needs of each work unit/business function in the Company. Based on the Company's budget plan 2020 and the application/information system initiative roadmap in 2020 listed in the Information Technology Strategic Plan for 2017-2021, there are several applications that have been successfully implemented and other applications have entered the development stages. The Following are achievements of developing applications/information systems in PT PELNI (Persero).

PELNI Passengers Service System (PPSS) Application

PPSS application is a form of cooperation between PT PELNI (Persero) with PT Sqiva System in accordance with contract No. TH.08.18-02/SS/2020 dated August 18 2020. Until 2020, the Company has successfully implemented several main modules, such as Online Reservation module, Payment Processing & Settlement, Departure Control System, Ship Admin, payment via EDC (electronic data capturing) and Virtual Account BNI (VA BNI).

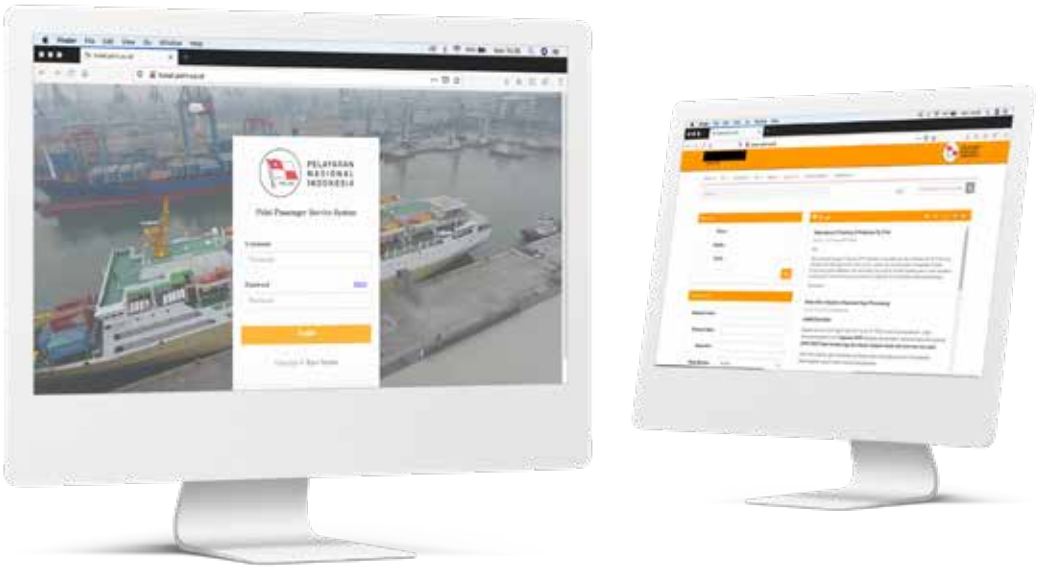
TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Selain pencapaian terkait modul-modul pada aplikasi tersebut, berikut beberapa pencapaian lainnya terkait dengan aplikasi PPSS pada tahun 2020:

1. Pencetakan tiket mandiri berupa *Vending Machine* yang sudah dapat dilakukan di pelabuhan Benoa, Balikpapan, dan Bau Bau sehingga total pelabuhan yang sudah menerapkan hal tersebut menjadi 10 pelabuhan.
2. Pembayaran tiket melalui mesin EDC (*Electronic Data Capturing*) Bank Mandiri dan *virtual account* (VA BNI);
3. Sosialisasi dan implementasi modul Admin Kapal sudah dilakukan di 26 Kapal Penumpang. Modul Admin Kapal ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan administrasi di atas kapal seperti laporan *manifest*, laporan tabel silang, laporan permakanan, dan sebagainya.

In addition to achievements related to modules in the application and other achievements related to the PPSS application in 2020:

1. Self-service ticket printing in the form of Vending Machine that can already be done at the port Benoa, Balikpapan, and Bau Bau so that the total ports that have implemented this were 10 ports.
2. Ticket payment via EDC machine (electronic data capturing) Bank Mandiri and virtual account (VA BNI);
3. Socialization and implementation of Ship Admin module has already been done on 26 Passenger ships. This Ship Admin Module serves to make it easier and speed up the above administration reporting on the vessels such as manifest reports, cross-table reports, food reports, and so on.



TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Aplikasi *Oracle E-Business Suite*

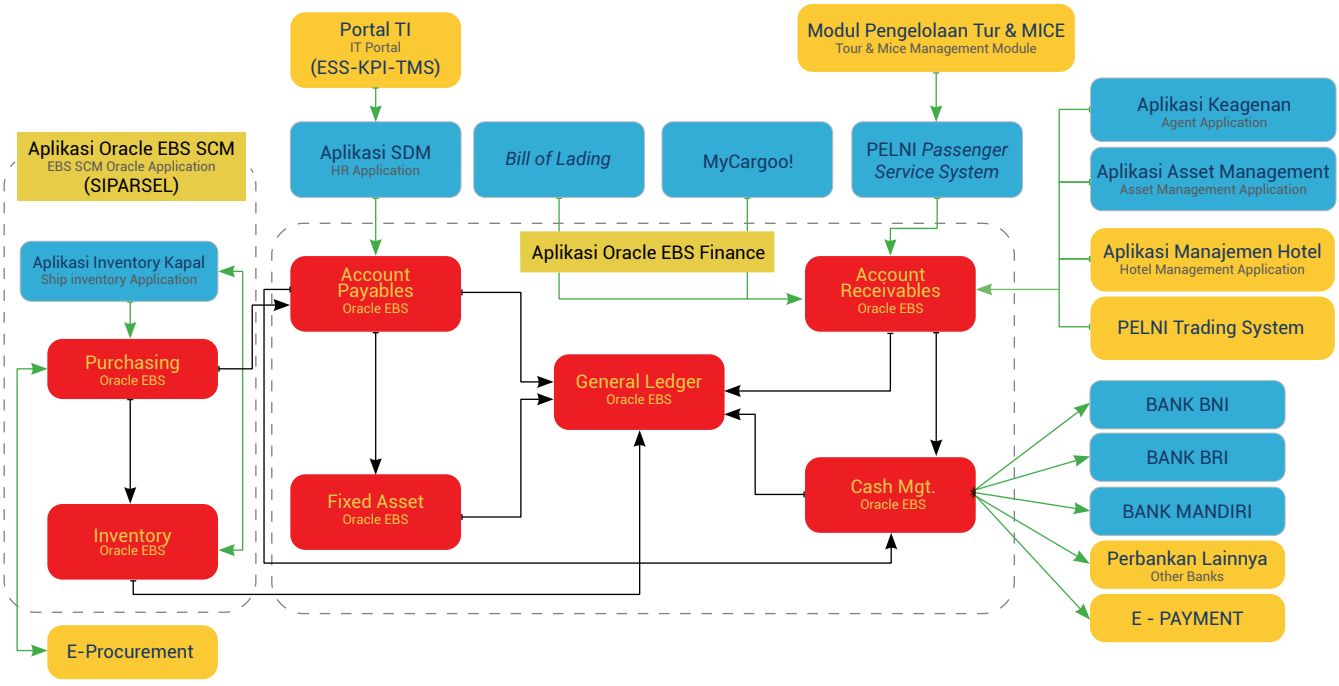
PT PELNI (Persero) telah mengimplementasikan sistem *enterprise resource planning* (ERP) yaitu dengan menggunakan *Oracle E-Business Suite* (EBS). Ada dua aplikasi yang digunakan yaitu *Financial* dan *Supply Chain Management* (SCM). Aplikasi *Oracle EBS SCM* diberikan nama Siparsel (Sistem Informasi Pengadaan & Rantai Pasok PELNI). Aplikasi *Oracle EBS Financial* memiliki 5 modul yaitu, *Account Payables, Account Receivables, Fixet Asset, Cash Management,* dan *General Ledger.* Aplikasi *Oracle EBS SCM* terdiri dari dua modul yaitu, *Purchasing* dan *Inventory*.

Kedua aplikasi tersebut telah terhubung dengan berbagai aplikasi-aplikasi atau sistem lainnya seperti aplikasi SDM (*payroll*), aplikasi MyCargoo!, aplikasi PELNI *Passenger Service System* (PPSS), aplikasi *Inventory* Kapal, sistem BNI, BRI dan Bank Mandiri. Selain itu, ada beberapa aplikasi yang akan dan sedang dibangun yang nantinya akan terhubung dengan dua aplikasi ERP tersebut, yaitu *E-Procurement,* aplikasi Keagenan, *Asset Management*, Manajemen Hotel, PELNI *Trading System*, sistem perbankan dan sistem *E-Payment* lainnya. Berikut ini adalah arsitektur aplikasi sistem ERP dengan aplikasi-aplikasi/sistem *legacy* lainnya.

Oracle E- Business Suite Application

PT PELNI (Persero) has implemented an enterprise resource planning (ERP) system by using the Oracle E-Business Suite (EBS). There are two applications used, called Financial and Supply Chain Management (SCM). The Oracle EBS SCM application is given the name Siparsel (PELNI's Procurement & Supply Chain Information System). The Oracle EBS Financial application has 5 modules, which are Account Payables, Account Receivables, Asset Fixets, Cash Management, and General Ledger. The Oracle EBS SCM application consists of two modules namely, Purchasing and Inventory.

These two applications has been connected with several applications or other systems among others HR (payroll) application, MyCargoo application, PELNI Passenger Service System (PPSS) application, Ship Inventory application, BNI, BRI and Mandiri Banks systems. In addition, there are several application that will be developed and connected with those two ERP application, which are E-procurement, Branches application, Asset Management, Hotel Management, PELNI Trading System, Banking system and other E-Payment systems. Below is ERP application system architecture with other applications/legacy systems.



TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Aplikasi *Oracle EBS Financial* telah diimplementasikan di seluruh unit kerja baik di kantor pusat dan kantor cabang sejak April 2017. Sedangkan aplikasi Siparsel telah diimplementasikan di seluruh unit kerja di kantor pusat, 3 gudang darat (Tg. Priok, Surabaya, dan Makassar), dan 5 kapal yaitu, KM Kelud, KM Nggapulu, KM Kelimutu, KM Tatamailau, dan KM Lawit. Pada tahun 2021, akan dilaksanakan *roll out* di sisa kapal penumpang dan kapal Logistik Nusantara. Adapun pelaksanaan *roll out* tersebut dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan dengan kesiapan data master item maupun data *opening balance* masing-masing kapal.

The Oracle EBS Financial Application has been implemented in all work units both at the head office and branch offices since April 2017. While Siparsel application has been implemented throughout the work units at the head office, 3 land warehouses (Tg. Priok, Surabaya, and Makassar), and 5 ships onboard KM Kelud, KM Nggapulu, KM Kelimutu, KM Tatamailau, and KM Lawit. By 2021, it will be implemented a roll out on the rest of the Passenger Ships and Nusantara Logistics Ship. The roll out is implemented gradually in accordance with the readiness of master item data as well as opening balance data of each ship.

Aplikasi Portal PELNI

Aplikasi Portal PELNI beralamat di https://portal.pelni.co.id telah diimplementasikan dan digunakan oleh para pegawai PT PELNI (Persero) sejak tahun 2015. Aplikasi ini merupakan pintu masuk untuk mengakses semua aplikasi yang dikembangkan secara internal oleh Divisi Teknologi Informasi.

Portal PELNI Application

PELNI Portal application is at https://portal.pelni.co.id that has been worked and used by employees of PT PELNI (Persero) since 2015. This application is an entrance to access all applications developed internally by the Information Technology Division.

Aplikasi Portal PELNI dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna/unit kerja. Adapun modul-modul aplikasi dari Aplikasi Portal PELNI adalah sebagai berikut:

PELNI Portal application is based on the needs of Users in work units. The application modules of PELNI Portal application are as follows:

No	Nama Modul Aplikasi Name of Application Module	Fungsi Function	Keterangan Description	*User* User
1	*Human Resource Management (HRM)* Human Resource Management (HRM)	Manajemen sumber daya manusia (SDM) Human Resources Management	Aplikasi ini sudah diimplementasikan sebagian untuk *approval* perbaruan data kepegawaian di ESS, namun masih dalam tahap pengembangan This application has been implemented partly for approval of staffing data update at ESS, but still in a development stage	Divisi SDM HR Division
2	*Employee Self Services (ESS)* Employee Self Services(ESS)	Manajemen layanan mandiri untuk informasi & data kepegawaian Independent Service management for information & staffing data	Aplikasi sudah secara luas digunakan oleh para pegawai Independent Service Management for information & staffing data	Divisi SDM dan seluruh pegawai PELNI HR Division and all PELNI employees
3	*Asset Management* Asset Management	Manajemen aset milik PELNI termasuk pencatatan, penyewaan, dan pelaporan Asset management owned by PELNI includes recording, leasing, and reporting	Aplikasi sudah digunakan oleh Divisi Pengelolaan Aset The application is already in use by the Asset Management Division	Divisi Pengelolaan Aset Asset Management Division

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Nama Modul Aplikasi Name of Application Module	Fungsi Function	Keterangan Description	*User* User
4	*Trouble Ticketing System* Trouble Ticketing System	Manajemen penanganan insiden dan layanan teknologi informasi Management of incident handling and information technology services	Aplikasi sudah digunakan oleh para pegawai *helpdesk* TI PELNI The application is already in use by PELNI IT helpdesk employees	Divisi TI IT Division
5	Aplikasi Kapal Perintis Pioneer Ship Application	Manajemen pemasaran dan penjualan tiket kapal perintis Marketing management and ticket sales on Pioneer Ship	Aplikasi ini sudah diimplementasikan di semua kapal perintis yang beroperasi. This application has been implemented on all Pioneer Ships in operation.	Divisi Pemasaran Angkutan Penumpang di Kapal Penumpang & Perintis Passenger Transport Marketing Division on Passenger & Pioneer Ships
6	PELNI Doc PELNI Doc	Manajemen kearsipan dokumen dan *workflow* PELNI Document Archival Management and workflow PELNI	Aplikasi ini sudah digunakan secara komprehensif di kantor pusat dan kantor cabang. Untuk *user* Kapal juga telah menggunakan, namun belum komprehensif (karena belum disosialisasikan/dilatih). This Application has been used comprehensively in Head Office and branch office. For ship user is also using, but not comprehensive (because of not socialized/trained).	*Corporate Secretary*, Biro Hukum, Divisi SDM, dan seluruh pegawai Corporate Secretary, Legal Bureau, HR Division, and all employees
7	*Dashboard Management* Dashboard Management	*Dashboard* untuk manajemen terkait produksi dan penghasilan PELNI Dashboard for management related to production and PELNI earnings	Aplikasi ini sudah digunakan, menampilkan data-data kebutuhan *user*. This application has been used, providing user need data.	Divisi Nautika (*Operation Room*), Direksi, Divisi TI, Divisi SDM Nautica Division (Operation Room), BOD, IT Division, HR Division
8	*Operation Monitoring* Operation Monitoring	Manajemen untuk *monitoring* operasional kapal-kapal PELNI (terkait posisi, haluan, kecepatan, noon position, dan jumlah penumpang naik-turun) Management to monitor PELNI Ships operations (related to position, bow, speed, noon position, and number of embarking and disembarking passengers)	Aplikasi ini sudah digunakan oleh *Operation Room* sejak tahun 2015 This application has been used by Operation Room since 2015	Divisi Nautika (*Operation Room*) Nautical Division (Operation Room)
9	Laporan Penerapan Protokol Kesehatan Implementation Report of Health Protocol	Manajemen pelaporan penerapan protokol kesehatan di cabang, dan kapal Reporting management of health protocol implementation in branch offices, and ships	Aplikasi ini diperuntukkan bagi Divisi DPA dan SMK3LH untuk *monitoring* penerapan protokol Kesehatan di cabang dan kapal This application is intended for the DPA Division and SMK3LH for monitoring the implementation of health protocols in branch offices and ships	Divisi DPA dan SMK3LH, Divisi SDM, Divisi TI DPA Division and SMK3LH, HR Division, IT Division
10	*Project Management* Project Management	Pengelolaan dan pengawasan terhadap proyek-proyek yang ada di PELNI Management and supervision of existing projects at PELNI	Aplikasi ini merupakan permintaan dari Komisaris dan Direksi untuk mengawasi kinerja proyek-proyek yang ada di PELNI This application is a request from Commissioners and Directors to supervise performance of existing projects in PELNI	*Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management*, Direksi Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management, Directors

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Nama Modul Aplikasi Name of Application Module	Fungsi Function	Keterangan Description	*User* User
11	Surat Pemberitahuan Notification Letter	Manajemen informasi surat pemberitahuan MPP, kenaikan berkala, SK Pensiun, dan SK MPP Information management of MPP notification letter, periodic increase, SK Pension, and SK MPP	Aplikasi ini merupakan permintaan dari Divisi SDM untuk memfasilitasi pembuatan surat pemberitahuan. This application is a request from the HR Division to facilitate the creation of notification letter.	Divisi SDM HR Division
12	*Document Catalogue Management* Document Catalogue Management	Manajemen data master terkait dengan aplikasi-aplikasi di dalam Portal Master data management related to applications within the Portal	Aplikasi ini telah digunakan untuk mendukung pengelolaan data-data This application has been used to support data management	Divisi TI IT Division
13	*Agency Management* Agency Management	Pengelolaan transaksi keagenan kapal-kapal eksternal Transaction management of external ships agency	Aplikasi ini sudah diimplementasikan pada tahun 2020. This application has been implemented in 2020	Divisi Keagenan & Tour Agency and Tour Division
14	CMS *Mobile* Reservasi CMS Mobile Reservation	Pengelolaan konten untuk aplikasi *mobile reservasi* tiket kapal penumpang Content management for mobile reservation application of passenger ship's ticket	Aplikasi ini telah digunakan mulai tahun 2018. This application has been used since 2018.	Divisi Pemasaran Kapal Penumpang, Divisi Keagenan & *Tour* Passenger Ship Marketing Division, Agency & Tour Division
15	*Events Management* Events Management	Pengelolaan *event* yang diadakan oleh PELNI baik internal maupun eksternal Event management that is held by PELNI internally or externally	Aplikasi ini telah digunakan mulai tahun 2019. This application has been used since 2019.	Kesekretariatan Perusahaan, Divisi SDM, Divisi Keagenan dan *Tour*, Divisi TI Company Secretarial, HR Division, Agency and Tour Division, IT Division
16	*Email Blast* Email Blast	Pengelolaan pengiriman email ke banyak penerima untuk keperluan promosi dan pemberitahuan Email Delivery management to multiple recipients for promotional purposes and notifications	Aplikasi ini telah digunakan dari awal tahun 2020. This application has been used since beginning of 2020.	Semua divisi dengan pengajuan akses ke Divisi TI All divisions with application for access to IT Division
17	*Audit Management* Audit Management	Manajemen tindak lanjut laporan hasil audit Follow-up management of audit result report	Aplikasi ini merupakan permintaan dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk memfasilitasi tindak lanjut temuan audit. This application is a request from Internal Audit Unit (SPI) to facilitate the follow-up of audit findings.	Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Audit Unit (SPI)
18	*Video conference* Video conference	Memfasilitasi *meeting* secara *online* baik internal maupun eksternal To facilitate online meting internally or externally	Aplikasi ini sudah digunakan dari tahun 2018. This application has been used since 2018.	Seluruh pegawai PT PELNI (Persero) All PELNI Employees

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Aplikasi PELNI DOC merupakan salah satu terobosan pemanfaatan teknologi informasi di PT PELNI (Persero) untuk pengelolaan korespondensi dan *workflow* kedinasan. Aplikasi PELNI DOC mengubah nota kedinasan perusahaan yang sebelumnya menggunakan kertas menjadi berbasis elektronik. Aplikasi PELNI DOC sudah diimplementasikan di seluruh kantor pusat, cabang, dan kapal berdasarkan Surat Edaran Direktur SDM & Umum tentang Implementasi *Go Live* Aplikasi Dokumen Manajemen Tahap I sampai dengan Tahap IV. Pada tahun 2020, dilakukan pengembangan pada aplikasi PELNI Doc yaitu penambahan salah satu fitur penting yaitu ijin prinsip.

PELNI DOC application is one of the breakthroughs utilization of information technology at PT PELNI (Persero) for correspondence and workflow management. The application changes Companys memo that previously used paper becomes electronic-based. This application was implemented throughout the head office, branches, and ships based on the HR Directors & General Affairs Circular about Implementation of Go Live Document Management Application Phase I to Phase IV. In 2020, development that is carried out in PELNI Doc application is the addition one of the important feature which is the principle permission.



TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Aplikasi Muatan Kapal Perintis (PECASY)

Aplikasi Muatan Kapal Perintis merupakan inisiatif dari Divisi Teknologi Informasi untuk mendukung proses bisnis pemasaran dan penjualan muatan barang kapal-kapal perintis yang dioperasikan oleh PELNI. Aplikasi ini dinamakan PECASY (*Perintis Cargo System*) dibangun secara internal oleh Divisi Teknologi Informasi mulai akhir tahun 2019 dan mulai diimplementasikan pada triwulan ketiga tahun 2020. Ada 3 (tiga) modul yang menjadi bagian dari aplikasi ini. Tabel berikut ini menjelaskan modul-modul yang ada di aplikasi Muatan Kapal Perintis (PECASY).

Perintis Cargo System (PECASY) Application

Perintis Cargo System application is an initiative of Information Technology Division to support processes marketing and cargo sales business of pioneer ships operated by PELNI. This app was built internally by the Information Technology Division started at end of 2019 and began to be implemented in third quarter of 2020. There are 3 (three) modules part of the app. The following table explain the modules in PECASY.

No	Nama Modul Aplikasi Name of Application Module	Penjelasan Explanation	Pengguna User
1	Modul Administrasi Pusat Head Office Administration Module	Modul aplikasi ini berada di dalam aplikasi Portal PELNI yang berfungsi untuk mengelola master data seperti, kapal, pelabuhan, rute, jadwal dan tarif, hak akses user cabang, serta laporan yang terkait muatan perintis. This app module is located inside PELNIs Portal app that serves to manage master data such as ships, ports, routes, schedules and tariffs, branch user access rights, and related reports to Pioneer ship content.	Kantor Pusat: Head Office: • Divisi Pemasaran Angkutan Penumpang Kapal Penumpang & Perintis Passenger Transportation Marketing Division of Passenger & Pioneer Ships • Divisi Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang & Perintis Cargo Marketing Division of Passenger & Pioneer Ships • Divisi Operasi Kapal Penumpang & Perintis Ship Operations Division of Passenger & Pioneer Ships • Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division
2	Modul Administrasi Kapal Ship Administration Module	Modul aplikasi ini di-*install* di server kapal yang berfungsi untuk reservasi tiket muatan, mengelola *upload* data penghasilan/muatan, *download* data master, dan pelaporan daftar muatan serta penghasilan kapal. This application module is installed on the ship's server, the function is for reservation of cargo tickets, managing upload income/load data, download master data, and loading list reporting as well as ship income.	Kapal Ships
3	Modul Administrasi Cabang Branch Offices Administration Module	Modul aplikasi ini berada di dalam aplikasi Portal PELNI yang berfungsi untuk melihat jadwal/emplooi, tarif, reservasi tiket muatan, serta laporan yang terkait muatan perintis. This application module is inside PELNI's Portal application which serves to view schedules/emplooi, fares, reservation of cargo tickets, and reports related to Pioneer load.	Cabang Branch Offices

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Implementasi Aplikasi Muatan Kapal Perintis (PECASY)

Aplikasi Muatan Kapal Perintis (PECASY) telah berhasil diimplementasikan di 44 kapal dan 39 cabang/sub cabang/*terminal point*. Tahun 2021 aplikasi Muatan Kapal Perintis akan terintegrasi dengan aplikasi ERP *Finance*, sehingga data penghasilan penjualan muatan akan tercatat secara sistem.

Aplikasi MyCargoo!

Berdasarkan *roadmap* perusahaan yaitu, perubahan fokus bisnis dari angkutan penumpang ke angkutan muatan (*total logistics*) dan menanggapi kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini, manajemen berinisiatif untuk membangun aplikasi MyCargoo! yang dimaksudkan untuk menggantikan aplikasi BL (lama) baik dari sisi teknologi maupun proses bisnis. Aplikasi MyCargoo! menggunakan teknologi *open source* dan berfungsi sebagai *platform* terbuka untuk semua perusahaan bisnis yang bergerak di bidang logistik. Pada tahun 2020, Aplikasi MyCargoo! sudah *Go-Live* pada tanggal 6 November 2020 di 2 kapal penumpang (https://mycargoo.pelni.co.id/) yaitu KM Kelud dan KM Dobonsolo. Selanjutnya di tahun 2021, akan diimplementasikan di 23 kapal penumpang lainnya.

Implementation Perintis Cargo System (PECASY) Application

Perintis Cargo System (PECASY) Application has been successful implemented in 44 vessels and 39 branches/sub branch/terminal points. In 2021 Pioneer Ship Payload app will be integrated with ERP Finance application, so that the sales revenue data of cargo will be recorded in the system.

MyCargoo! Application

Based on the company's roadmap, which is changes in business focus from passenger transportation to cargo transportation (total logistics) and responding to progress information technology these days, management took the initiative to build the MyCargoo! app that is intended to replace the (old) BL application both in terms of technology and business processes. MyCargo! Application using open source technology and serves as an open platform for all logistics company. In 2020, MyCargoo! App Go Live on 6 November 2020 on 2 Passenger Ships (https://mycargoo.pelni.co.id/), on KM Kelud and KM Dobonsolo. Next in 2021, will be implemented on 23 other Passenger Ships.



TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Implementasi Digitalisasi Adaptasi Kebiasaan Baru PELNI

Dalam menghadapi *pandemic* COVID-19, PT PELNI (Persero) melakukan digitalisasi untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru (*physical distancing*). Berikut ini berbagai digitalisasi adaptasi kebiasaan baru yang sudah diimplementasikan:

Implementation of New PELNI Habit Digitization Adaptation

In facing the COVID-19 pandemic, PT PELNI (Persero) is digitizing to support the new habits adaptation (physical distancing). The following are various digitalization of new habits adaptations that have been implemented:



No	Digitalisasi Adaptasi Kebiasaan Baru Digitalization of New Habits Adaption	Tujuan Purpose
1	Presensi Digital Digital Presentation	Memfasilitasi presensi menggunakan *QR Code* bagi pegawai WFO di kantor pusat dan cabang Tanjung Priok serta manajemen jam kerja pegawai WFO dan WFH Facilitate attendance using QR Code for WFO employees in the head office and Tanjung Priok branch as well as the management of WFO employees and WFH working hours
2	Media Sosialisasi Digital (*Web & Portal*) Digital Socialization Media (Web & Portal)	Menyebarkan informasi internal perusahaan secara elektronik Disseminate internal company information electronically
3	*Learning Management System* (e-*Learning*) Learning Management System (e-Learning)	Memfasilitasi manajemen *training* dan *survey* Facilitate training and survey management
4	PELNI Doc (Nota Dinas & Ijin Prinsip) PELNI Doc (Official Note & Principle Permit)	Manajemen dokumen internal perusahaan (*e-office*) Management of internal office document (e-office)
5	*Audit Management* Audit Management	Manajemen tindak lanjut laporan hasil audit Follow-up management of audit report
6	*Visitor Management* Visitor Management	Manajemen pencatatan pengunjung kantor pusat dengan menyimpan informasi kondisi pengunjung Management of head office visitor logging by saving information of visitor condition
7	*Self Assessment* Kondisi Pegawai Self Assessment of Employee's condition	Melaporkan kondisi kesehatan pegawai secara mandiri Report employee's health condition independently

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Digitalisasi Adaptasi Kebiasaan Baru Digitalization of New Habits Adaption	Tujuan Purpose
8	PELNI *Video Conference* PELNI Video Conference	Memfasilitasi *meeting* secara *online* baik internal maupun eksternal Facilitating online meeting internally or externally
9	Laporan Penerapan Protokol Kesehatan Cabang & Kapal Report of Health Protocol Implementation in branch offices and ships	Monitoring penerapan protokol kesehatan cabang dan kapal Monitoring Health Protocol Implementation in branch offices and ships

Infrastruktur Data Center & WorkStation

Pada tahun 2020, Divisi Teknologi Informasi telah melakukan penyusunan dan penyempurnaan dokumen kebijakan dan *standard operational procedures* (SOP) *data center* PT PELNI (Persero). SOP tersebut telah diresmikan melalui SK Direksi No. 08.31/01/SK/HKO.01/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Operasional dan *Maintenance Data Center* PT PELNI (Persero). Pedoman ini memiliki 6 rincian prosedur terdiri dari 26 instruksi kerja yang digunakan sebagai acuan para pegawai Teknologi Informasi dalam kegiatan operasional dan *maintenance Data Center* PT PELNI (Persero). Berikut rincian prosedur dan instruksi kerja yang digunakan:

Data Center & WorkStation Infrastructure

By 2020, the Information Technology Division has prepared and improved documents policies and standard operational procedures (SOP) data center of PT PELNI (Persero). The SOP has been inaugurated through the Decree of the Board of Directors No. 08.31/01/SK/HKO.01/2020 on Management Guidelines Operational and Maintenance Data Center PT PELNI (Persero). This Code has 6 detailed procedures consist of 26 working instructions used as a reference for Information Technology employees in operational and maintenance Data Center of PT PELNI (Persero). Here's a breakdown of the procedure and working instructions used:

No	Rincian Prosedur Procedure Details	Instruksi Kerja Work Instruction
1	Identifikasi & Analisis Persyaratan Spesifikasi Fasilitas Data *Center* TI Identification & Analysis of IT Data Center Facilities Specification Requirements	1. Instruksi Kerja melakukan Pemeriksaan Kondisi Ruangan *Server* Working Instructions for Checking Server Room Condition
		2. Instruksi Kerja Melakukan Pencatatan *Stand* Meter PLN Working Instruction to Record PLN Stand Meter
		3. Instruksi Kerja Melakukan Pengecekan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Working Instructions to Check Fire Extinguishers
		4. Instruksi Kerja Melakukan Pengecekan Suhu *Battery* UPS Working Instructions to Check UPS Battery Temperature
		5. Instruksi Kerja Melakukan *Monitoring* Operasional Genset Working Instructions to Monitor Genset Operational
		6. Instruksi Kerja melakukan Pengecekan Suhu Rak *Server* Working Instructions to Check Server Shelf's Temperature

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Rincian Prosedur Procedure Details	Instruksi Kerja Work Instruction
2	Jadwal Pemeliharaan Data *Center* & Perangkatnya Maintenance Schedule of Data Center & Device	1. Instruksi Kerja Melakukan Pengecekan Harian PDU (Power Distribution Unit) Working Instructions to Check Daily PDU (Power Distribution Unit)
		2. Instruksi Kerja Melakukan Pengecekan Inventaris Data *Center* Working Instructions to Check Data Center Inventory
		3. Instruksi Kerja Melakukan Pengecekan Label Rak *Server* Working Instructions to Check Server Shelf's Label
		4. Instruksi Kerja Melakukan Pengecekan Fisik *Raised Floor* Working Instructions to Check Raised Floor Physic
		5. Instruksi Kerja Melakukan Pengecekan Visual Dan Kebersihan Panel MSB/AMF Working Instructions to Check Visual and Cleanliness of Panel MSB/AMF
		6. Instruksi Kerja Melakukan Pembersihan Area Koridor Luar Data *Center* Working Instructions to Clean Outside Corridor of Data Center
		7. Instruksi Kerja Melakukan Pembersihan Area Dalam Data *Center* Working Instructions to Clean Inside of Data Center
3	Pemeriksaan Terhadap Kondisi Fasilitas Data *Center* TI Checking on the condition of IT Data Center Facility	1. Instruksi Kerja melakukan Pemeriksaan Kondisi Alat Pendingin Ruangan *Server* Working Instructions to Check the Condition of Server Room's Air Condition
		2. Instruksi Kerja melakukan Pemeriksaan Kondisi Alat Pendingin Ruangan *Server* Working Instructions to Check the Condition of Server Room's Air Condition
		3. Instruksi Kerja melakukan Pemeriksaan Peralatan *Humidity* Ruangan *Server* Working Instructions to Check Humidity Equipment in Server Room
4	Perbaikan Terhadap Data *Center* dan Perangkatnya Repairing to Data Center and Its Device	1. Instruksi Kerja melakukan Penarikan Kabel Jaringan oleh Pihak Ketiga Working Instructions for Performing Network Cable Withdrawals by Third Parties
		2. Instruksi Kerja Melakukan Penarikan Kabel Data Working Instructions for Performing Data Cable Withdrawals
		3. Instruksi Kerja Melakukan Penarikan Kabel *Power* Working Instructions for Performing Power Cable Withdrawals
5	Pengaturan Otoritas & Akses ke Fasilitas Data Center TI Authority Settings and Access to IT Data Center Facilities	1. Instruksi Kerja melakukan Pemberian Hak Akses Fisik Work Instructions for Granting Physical Access Rights
		2. Instruksi Kerja melakukan Pemberian Hak Akses Fisik Authority Settings & Access to IT Center Data Facilities
		3. Instruksi Kerja Melakukan Penggunaan Awal Hak Akses Work Instructions for Early Use of Access Rights
		4. Instruksi Kerja melakukan Penarikan Dan Pemberhentian Hak Akses Fisik Work Instructions for Withdrawal and Termination of Physical Access Rights
		5. Instruksi Kerja Melakukan Pemeriksaan Barang Masuk Gudang Working Instructions for Inspecting Warehouse Entry Goods
		6. Instruksi Kerja Melakukan Peminjaman Kunci Rak Server Panel Working Instructions for Borrowing Panel Server Rack Locks

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Seiring dengan bertambahnya aplikasi-aplikasi PELNI, Divisi Teknologi Informasi melakukan pembangunan *Disaster Recovery Center* (DRC). Pembangunan ini diawali dengan pengadaan perangkat DRC pada akhir tahun 2019 dimana untuk pelaksanaan pekerjaannya dimulai di awal tahun 2020. Sedangkan untuk pengadaan *software* dan lisensi perangkat DRC dilakukan pada triwulan III tahun 2020. Proses pekerjaan instalasi dan testing DRC tertunda dikarenakan dampak *pandemic* COVID-19, sehingga dilanjutkan di tahun 2021.

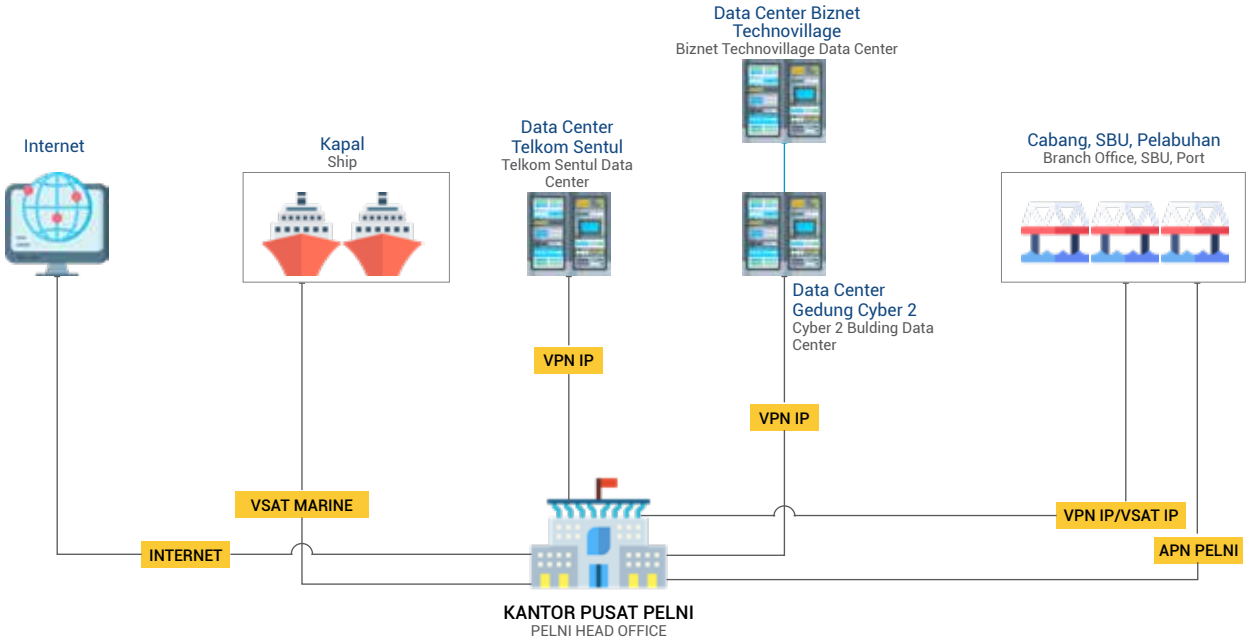
As PELNI applications grow, Information Technology Division conducts development of Disaster Recovery Center (DRC). This development was started with the procurement of DRC devices at the end of 2019 where the implementation of its work was started in early 2020. As for procurement of software and licenses of DRC device are performed on quarter III of 2020. Installation work process and DRC testing was delayed due to pandemic impact COVID-19, so it will be continued in 2021.

Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur jaringan PT PELNI (Persero) terdiri dari beberapa jenis konektivitas yang menghubungkan kantor pusat, kantor cabang/pelabuhan, dan beberapa kapal penumpang. Berikut ini topologi secara umum infrastruktur jaringan PT PELNI (Persero):

Network Infrastructure

Pt PELNI (Persero) network infrastructure consists of some types of connectivity that connect headquarters, branch/port offices, and some Passenger Ship. Here's the topology in general of network infrastructure in PT PELNI (Persero):



TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Pada tahun 2020 Divisi Teknologi Informasi melanjutkan peremajaan perangkat-perangkat jaringan di kantor pusat dengan metode sewa milik (*seat management*) selama 3 (tiga) tahun. Pekerjaan ini meliputi pembuatan *centralized access point*, *WLAN controller*, perangkat *access point*, dan *software* pendukungnya. Pekerjaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringan dan kemudahan manajemen infrastruktur jaringan di kantor pusat. Salah satu kontrol manajemen jaringan ini adalah para pegawai gedung kantor pusat dapat dengan mudah terhubung dengan jaringan internal PELNI yang diberi nama pelni.net dengan menggunakan akun *email* masing-masing.

In 2020 the Information Technology Division continues rejuvenation of network devices in the head office with seat management method for 3 (three) years. This work includes the creation of centralized access point, WLAN controller, access point device, and its supporting software. Work is expected to improve the quality of network and ease of infrastructure management network at headquarters. One of the management controls is the employees of the head office building can easily connect to the internal PELNI network called pelni.net with using their respective email accounts.

Perangkat *Workstation*

Sejak tahun 2015, untuk penyediaan perangkat *workstation* (perangkat kerja) bagi para pegawai PELNI dilakukan dengan metode sewa milik (*seat management*). Perangkat-perangkat yang dimaksud berupa *personal computer* (PC), laptop, scanner, printer, dan proyektor bagi Kantor Pusat, Kantor Cabang, Terminal Pelabuhan, Kapal Penumpang, Kapal Barang/Tol Laut, dan Kapal Perintis. Layanan tersebut diukur dan dijamin dalam bentuk *Service Level Agreement* (SLA) yang disepakati baik PELNI maupun vendor dalam suatu kontrak.

Workstation Devices

Since 2015, for the provision of workstations for PELNI employees done by seat management method. The devices are personal computer (PC), laptop, scanner, printer, and projector for Head Office, Branch Office, Port Terminal, Passenger Ships, Freighters/Sea Tolls, and Pioneer Ships. The services are measured and guaranteed in agreed Form of Service Level Agreement (SLA) both PELNI and vendors in a contract.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola Teknologi Informasi dan manajemen risiko Teknologi Informasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan teknologi informasi di semua perusahaan. Tingkat kematangan tata kelola Teknologi Informasi yang tinggi akan mempengaruhi kinerja dan kualitas dari layanan Teknologi Informasi yang dihasilkan, sedangkan manajemen risiko yang baik akan melindungi pengelolaan layanan Teknologi Informasi perusahan.

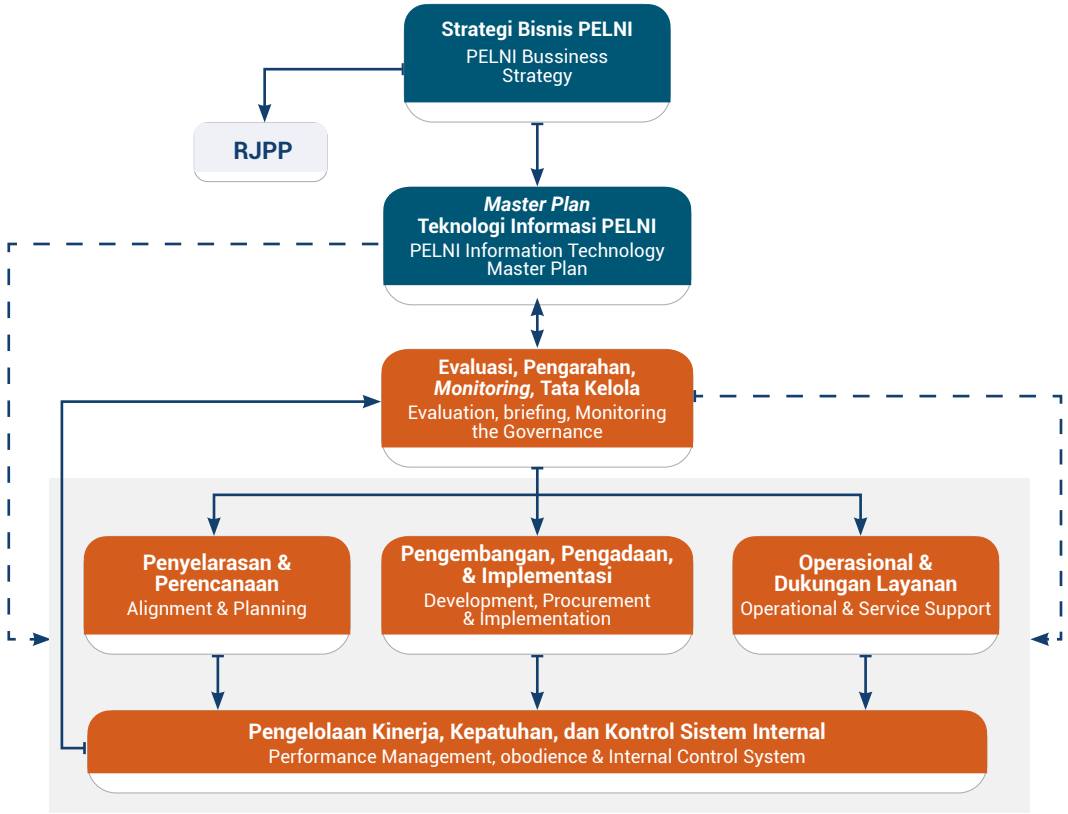
INFORMATION TECHNOLOGY & RISK MANAGEMENT GOVERNANCE

Governance of Information Technology and Information Technology risk management is an important part of information technology management in all companies. Maturity level of Information Technology governance will affect the performance and quality from the resulting Information Technology services, while good risk management will protect the management of the company's Information Technology services.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Sesuai SK Direksi No.07.28/02/SK/HKO.01/2017 dan Peraturan Menteri BUMN No.Per-02/MBU/2013 dan perubahannya No.PER-03/MBU/02/2018, Tata Kelola Teknologi Informasi PELNI mengadopsi proses-proses yang ada pada *framework* (kerangka kerja) COBIT 5. Gambar berikut ini merupakan kerangka kerja tata kelola Teknologi Informasi di PELNI:

In accordance with the Decree of the Board of Directors No.07.28/02/SK/HKO.01/2017 and Regulation of the Minister of SOEs No.Per-02/MBU/2013 and amendment No.PER-03/MBU/02/2018, Governance of PELNI Information Technology adopts processes on the COBIT 5 framework. The following figure is a framework for Information Technology governance at PELNI:



TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Nama Proses Process Name	Perangkat Penerapan Deployment Devices
1	Pengelolaan perubahan Change management	Pengisian *form Information Technology Change Request* (ITCR) dan persetujuan perubahan/modifikasi pada aplikasi, infrastruktur *hardware*/jaringan, maupun perangkat kerja. Filling in the Information Technology Change Request (ITCR) form and changes/ modifications approval on applications, hardware/network infrastructure, or work device.
2	Pengelolaan *Master Plan* TI IT Master Plan Management	Sebagai acuan pengembangan layanan TI sesuai kebutuhan bisnis dan agar peningkatan layanan TI selalu mempertimbangkan kebutuhan bisnis. As a reference for the development of IT services according to business needs and in order to always take business needs into account.
3	Pengelolaan insiden & permintaan layanan TI Incident management & IT service requests	Aplikasi *Trouble Ticketing System* untuk pencatatan tiket dan pelaporan insiden dan layanan teknologi informasi. Trouble Ticketing System application for ticketing and incident reporting and information technology services.
4	Pengelolaan Infrastruktur TI IT Infrastructure Management	Pemetaan jaringan yang di kantor pusat, cabang, dan kapal serta peremajaan perangkat secara berkala. Pembangunan *data center* sebagai langkah memastikan keberlangsungan layanan TI yang lebih baik lagi. Network mapping at headquarters, branches, and ships and rejuvenation device periodically. Data center development as a step to ensure better sustainability of IT services.
5	Pengelolaan program dan proyek TI Management of IT programs and projects	Setiap Proyek yang akan diimplementasikan oleh Divisi TI harus seusai dengan alur proses yang terdapat pada SOP Pengelolaan Proyek TI. Any Project to be implemented by the IT Division must meet with process flow contained in the IT Project Management SOP.
6	Pengelolaan Kebutuhan Layanan TI IT Service Needs Management	Laporan serta SLA layanan vendor untuk semua aplikasi yang ditangani oleh pihak ketiga dan analisis dampak dari tiap aplikasi yang akan berjalan maupun yang sedang berjalan di PT PELNI (Persero) untuk mengetahui kapasitas pada *server* serta *storage*. Reports as well as SLAs vendor service for all applications handled by third parties and impact analysis of each application to be run or running at PT PELNI (Persero) to determine the capacity on the server and storage.
7	Desain dan pengembangan layanan TI Design and Development of IT Services	Berita acara rilis dan *deployment* yang ditandatangani oleh divisi Teknologi Informasi dan pemilik proses bisnis (*user*). News of the release and deployment event signed by the Technology division Information and business process owner (user).
8	Pengelolaan Operasional, dukungan layanan, dan aset TI Operational Management, service support, and IT assets	Pemeliharaan berkala Aplikasi serta Infrastruktur TI dan aset TI baik di pusat, cabang, dan kapal. Penyusunan laporan *risk register* dan *response plan* Divisi Teknologi Informasi setiap triwulan, serta melakukan penyusunan DRP (*Disaster Recovery Plan*) untuk pemulihan rencana layanan TI. Periodic maintenance of Applications and IT Infrastructure and IT assets both in head office, branches, and ships. Preparation of risk register report and response plan of Information Technology Division quarterly, as well as conducting DRP preparation (Disaster Recovery Plan) for IT service plan recovery
9	Pengelolaan data Data management	Pengisian *form Information Technology Change Request* (ITCR) dan persetujuan perubahan/modifikasi data pada aplikasi. Filling in the Information Technology Change Request (ITCR) form and approval on changes/modifications to the application.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Self Assessment Tingkat Kematangan Tata Kelola TI

Pada tahun 2020, sesuai arahan Kementerian BUMN yang tertuang pada surat No. S-949/MBU/10/2020 Perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 memperbolehkan penilaian tingkat kematangan tata kelola dilakukan secara *self assessment*. Oleh karena itu, Divisi Teknologi Informasi mengadakan *self assessment* Tingkat Kematangan Tata Kelola TI, kegiatan ini dilakukan dari tanggal 16-23 Desember 2020. Kegiatan ini dilakukan oleh 11 assesor yang terdiri dari para pegawai Divisi Teknologi Informasi yang bertugas untuk menilai proses-proses tata kelola TI PELNI berdasarkan *framework* COBIT 4.1 yaitu, *Plan & Organize (PO), Acquire & Implement (AI), Deliver & Support (DS),* dan *Monitor & Evaluate (ME)*. Adapun skor yang didapatkan dari hasil *self assessment* tersebut adalah 2,93.

Kuesioner Kepuasan Layanan Pegawai TI dan *Stakeholder*

Divisi Teknologi Informasi mengadakan kegiatan pengisian Kuesioner Kepuasan Layanan TI dengan jangka waktu pengisian tanggal 12 November-19 Desember 2020. Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan *user* pada layanan aplikasi, jaringan, maupun infratruktur yang disajikan oleh Divisi TI. Hasil kuesioner untuk tahun 2020 ini adalah sebesar skor 3,9 (skala 1-5), *survey* tingkat kepuasan vendor dengan skor 4,3 (skala 1-5), dan survey tingkat kepuasan mitra dengan skor 4,9 (skala 1-5). Diharapkan untuk tahun 2021 kepuasan *user* terhadap layanan teknologi informasi PELNI semakin meningkat.

Self Assessment of IT Governance Maturity Level

In 2020, according to Ministry of SOE that stated on the letter No. S-949/MBU/10/2020 concerning Aspirations of Shareholders/ Capital Owners to establishment Work Plan and Budger of the Company for 2021 It is allowed to assess the maturity level of governance using self-assessment. Therefore, Information Technology Division conducting self-assessment of maturity level IT Governance, this activity is conducted from 16-23 December 2020. This activity was conducted by 11 assessors consisting of Information Technology Division employees tasked with assessing processes of IT PELNI governance based on COBIT 4.1 framework i.e., Plan & Organize (PO), Acquire & Implement (AI), Deliver & Support (DS), and Monitor & Evaluate (ME). As for the score obtained from the results of the self-assessment is 2.93.

Service Satisfaction Questionnaire of IT Employee and Stakeholders

The Information Technology Division conducts filling out the IT Service Satisfaction Questionnaire with period of 12 November-19 December 2020. The filling out of this questionnaire aims to know the level of user satisfaction in the application service, network, as well as infrastructure presented by the IT. The results of this questionnaire for 2020 are 3.9 score (scale 1-5), vendor satisfaction level survey with a score of 4.3 (scale 1-5), and a survey of partner satisfaction levels with a score of 4.9 (scale 1-5). In 2021 user satisfaction with PELNI Information Technology services is expected to to be increasing.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Penghargaan *Digital Marketing & Human Capital* 2020

Pada tanggal 25 November 2020, PT PELNI (Persero) mendapatkan penghargaan dari Majalah *BusinessNews* Indonesia dalam di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu predikat 4 *Star Platinum* pada kategori The *Best Human Capital in Recruitment & Engagement Management 2020 (Transportation Services)* dalam gelaran *Digital Marketing & Human Capital Award* 2020.

Digital Marketing & Human Capital Award 2020

In 25 November 2020, PT PELNI (Persero) earned 4 Star Platinum predicate for The Best Human Capital in Recruitment & Engagement Management 2020 (Transportation Services) on Digital Marketing & Human Capital Award 2020 held by BusinessNews Indonesia Magazine.

Kategori Penghargaan Award Category	Pemenang Penghargaan Award Winner
TOP DIGITAL Implementation 2020 on Transportation Sector # Level Star 4 TOP DIGITAL Implementation 2020 on Transportation Sector # Level Star 4	PT PELNI (Persero) PT PELNI (Persero)
TOP Leader on Digital Implementation 2020 TOP Leader on Digital Implementation 2020	Insan Purwarisya L Tobing Insan Purwarisya L Tobing (Direktur Utama) (President Direktur)





TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Majalah *BusinessNews* Indonesia yang bekerjasama dengan IMA (*Indonesia Marketing Association*), FHCI (Forum *Human Capital Indonesia*) dan Asosiasi *Digital Marketing* Indonesia (aDIGIMIND). Berikut ini foto penghargaan *Digital Marketing & Human Capital* 2020 yang dimenangkan oleh PT PELNI (Persero) diwakili oleh *Vice President* SDM dan *Vice President* Teknologi Informasi.

This event was held by BusinessNews Indonesia Magazine cooperating with IMA (Indonesia Marketing Association), FHCI (Forum Human Capital Indonesia) and Association of Digital Marketing Indonesia (aDIGIMIND). The following is a picture of Digital Marketing & Human Capital Award 2020 won by PT PELNI (Persero) and represented by VP of HC and VP of Information Technology.



4 *Star Platinum* pada kategori *The Best Human Capital in Recruitment & Engagement Management* 2020 (*Transportation Services*) dalam gelaran *Digital Marketing & Human Capital Award* 2020 dari Majalah *BusinessNews* Indonesia.

MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Manajemen Risiko Teknologi Informasi dilakukan mengikuti implementasi Perusahaan berdasarkan SK Direksi No.10.06/2/SK/HKO.01/2016 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 di PT PELNI (Persero). Setiap unit kerja/cabang/SBU diminta menyampaikan laporan *risk register* dan *response plan* per triwulan kepada Biro Perencanaan Korporat & Manajemen Risiko untuk dilaporkan kepada manajemen (Direksi dan Komisaris). Sesuai laporan *risk register* TW IV pada tahun 2020, terdapat 7 risiko beserta mitigasi risikonya yang ada pada Teknologi Informasi perusahaan, yaitu:

INFORMATION TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT

Information Technology Risk Management is conducted following the Company's implementation based on Decree of the Board of Directors No.10.06/2/SK/HKO.01/2016 on Determination of Risk Management Guidelines Based on ISO 31000 at PT PELNI (Persero). Each work unit/branch/SBU is required to submit a risk register and response plan report quarterly to the Planning Corporate Bureau & Risk Management to report to management (Board of Directors and Commissioners). As per the report risk register TW IV in 2020, there are 7 risks and the mitigation of the risks in the Company's Information Technology, as per following:

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

No	Peristiwa Risiko Risk Event	Konsekuensi Consequences	Rencana Mitigasi Mitigation Plan
1	*System Unavailable* System Unavailable	Gangguan kelancaran operasi perusahaan Trouble operation of the Company	Implementasi *high availability system* (*hardware, software,* dan *network*) dan menerapkan sistem monitoring yang *real time*. Implementing high availability system (hardware, software and network) and applying real-time monitoring system
2	*Slow Response Service* Slow Response Service	Gangguan kelancaran operasi perusahaan Interference of company operations smoothness	• Melakukan *preventive maintenance* secara berkala dan melakukan *corrective maintenance* yang efektif baik *hardware, software,* maupun *network*. Conduct preventive maintenance periodically and perform effective corrective maintenance for hardware, software, or network. • Penambahan *scheduler* di server portal.pelni.co.id untuk menghapus *session* yang tidak aktif. The addition of a scheduler on the portal.pelni.co.id server to delete the inactive session.
3	*Data loss* Data loss	Kehilangan data penting Important data loss	• Membangun sistem backup dan restore yang mumpuni dan menjalankan prosedur *backup* dan *restore* secara berkala. Build a powerful backup and restore system and perform backup and restore procedures periodically. • Manajemen administrasi akses aplikasi dan database sesuai *role/privilege* masing-masing *user.* Management of application and database access administration according to the role / privilege of each user.
4	*Data center damage* Data center damage	*Interrupted operation* Interrupted operation	Membangun dan mengimplementasikan *Disaster Recovery Center* (DRC) dengan lokasi yang berbeda (*georedundancy*) berdasarkan *Disaster Recovery Plan* (DRP). Building and Implementing Disaster Recovery Center (DRC) with different location (georedundancy) based on Disaster Recovery Plan (DRP).
5	*Computer virus spreading* Computer virus spreading	Gangguan kelancaran operasi perusahaan Interference of company operations smoothness	Meningkatkan *information security awareness* para pegawai dan melakukan *maintenancepatch* dan antivirus secara berkala. Improving information security awareness of employees and maintenancepatch and antivirus periodically.
6	*IT security breach* IT security breach	*Data loss, disclose, manipulation* Data loss, disclose,manipulation	• Meningkatkan *information security awareness* para pegawai. Increase information security awareness of the employees. • Melakukan *vulnerability assessment* dan *penetration test* secara berkala dan melakukan hasil rekomendasi tes tersebut. Perform vulnerability assessment and penetration test periodically and perform test recommendation results. • Manajemen administrasi *network access* sesuai *best practice* dan kebutuhan perusahaan. Network access administration management according to best practice and needs of the company.
7	*Low IT Utilization* Low IT Utilization	• *Business process* jadi lama dan tidak akurat, *opportunity loss* Business process becomes long and not accurate, opportunity loss • Berpotensi terjadinya *fraud* Potential occurrence of fraud	• Dukungan manajemen untuk pemenuhan *resources.* Management support for resource fulfillment. • Meningkatkan *engagement* dengan para *user* untuk memperkuat implementasi TI di perusahaan. Increase engagement with user to strengthen IT implementation in the company. • Penyusunan/dokumentasi proses bisnis di masing-masing *user* mengikuti tren teknologi informasi. Preparation / documentation of business processes in each user following the trends of information technology.

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT GOVERNANCE

Transformasi bisnis proses dan operasional yang dilaksanakan oleh PT PELNI (Persero) selama tahun 2020 juga didukung oleh penguatan dan perbaikan prosedur pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap tahap proses pengadaan barang dan jasa, PT PELNI (Persero) menerapkan etika dan prinsip-prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel) yang telah terkandung dalam kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Perseroan.

Business process and operational transformation conducted by PT PELNI (Persero) during 2020 has been supported by maximizing and strengthening the procedures of goods and services procurement, which aims to ensure the process of goods and services procurement fitted with the principles of Good Corporate Governance and relevant laws and regulations. In each process of procurement, PT PELNI (Persero) upholds the ethic and principles of procurement (efficient, effective, transparent, opened, competitive, fair and accountable), contained in Goods and Services Procurement policy of the Company.

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa merujuk pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PELNI (Persero) yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 10.23/01/SK/HKO.01/2019 dan SK kewenangan Direksi dalam proses pengadaan barang dan jasa atau penggunaan anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.17/3/SK/HKO.01/2017 telah memiliki jiwa yang sama dengan Peraturan Menteri BUMN terkait Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor PER-08/MBU/12/2019.

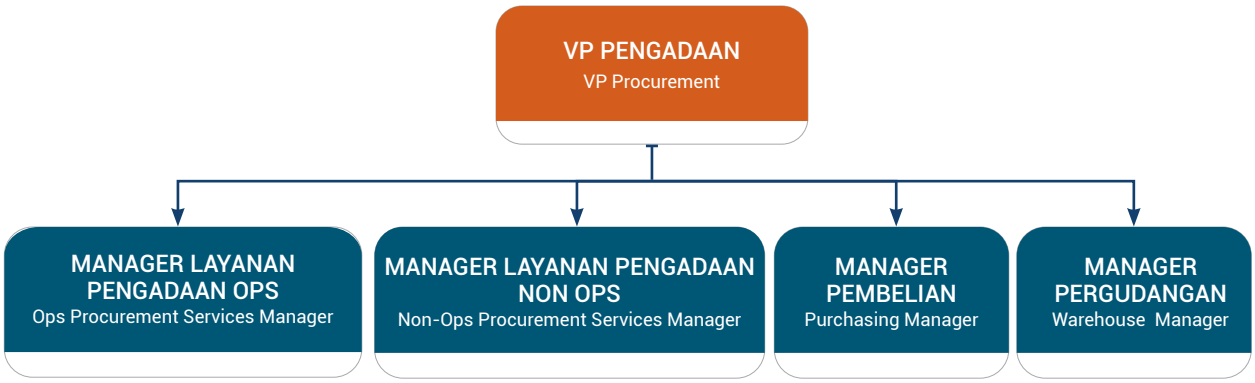
The process of goods and services procurement use the provision of procurement guidelines in PT PELNI (Persero) determined by The Decision Letter of Directors Number 10.23/01/SK/HKO.01/2019 and The authority letter of Directors for goods and services procurement or the use of budget based on the decision letter of Directors Number 01.17/3/SK/HKO.01/2017 has the strength that is the same as the Ministry of State-owned Enterprises Regulation Number PER-08/MBU/12/2019 concerning Goods and Services Procurement.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PENGADAAN

Struktur Organisasi divisi Pengadaan PT PELNI (Persero) digambarkan sebagai berikut:

ORGANIZATION STRUCTURE OF PROCUREMENT DIVISION

Organization structure of procurement division of PT PELNI (Persero) is as follows:



TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT GOVERNANCE

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Perseroan berusaha mengoptimalkan sinergi BUMN sebagai upaya untuk pemberdayaan BUMN dengan prinsip saling menguntungkan. Pemilihan Penyedia telah dilakukan secara terbuka bagi pihak yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, Perseroan juga telah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

In Implementation of goods and services procurement, the Company strives to optimize the synergy of SOEs to provide the mutual benefit across State-owned Enterprises. The tendering of suppliers has been open for any parties who are qualified under sound-competition. Entire processes of procurement based on regulations and procedures which is accountable and transparent, the Company also has owned the estimated prices, calculated by expertise and responsible data.

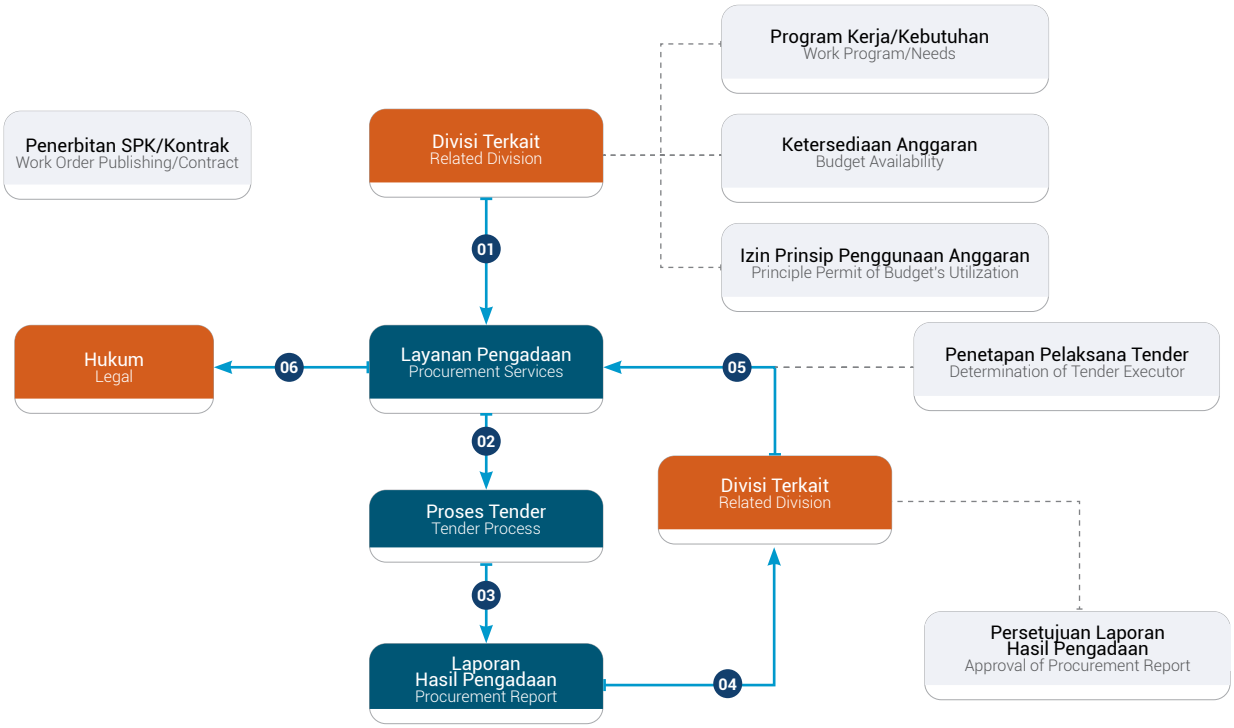
DIAGRAM ALUR PENGADAAN BARANG DAN PT PELNI (PERSERO)

Bila merujuk pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PELNI (Persero) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor10.23/01/SK/HKO.01/2019, berikut adalah diagram alur pengadaan barang dan jasa Perseroan:

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT DIAGRAM OF PT PELNI (PERSERO)

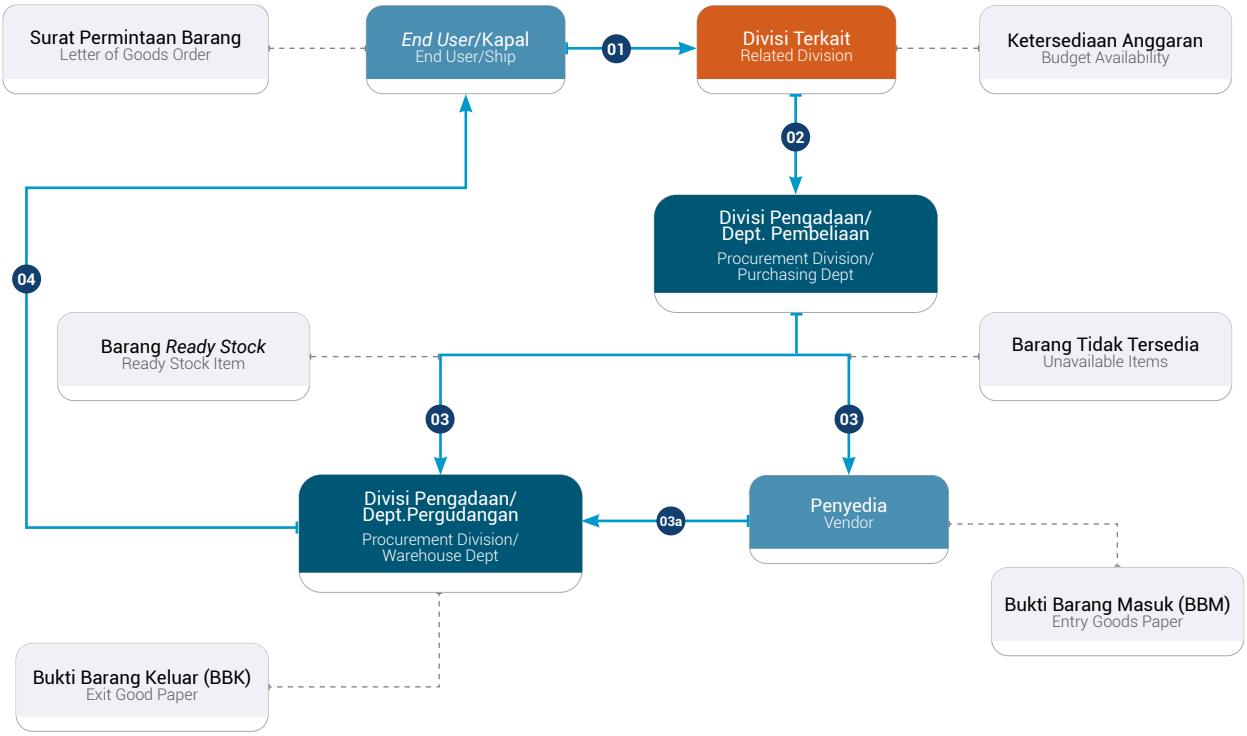
Reffering to Goods and Services Procurement Guidelines applicable in PT PELNI (Persero) which is the Decision Letter of Directors Number 10.23/01/SK/HKO.01/2019, the following is a flowchart of the Company's procurement of goods and services:

DIVISI PENGADAAN
Procurement Division



TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT GOVERNANCE

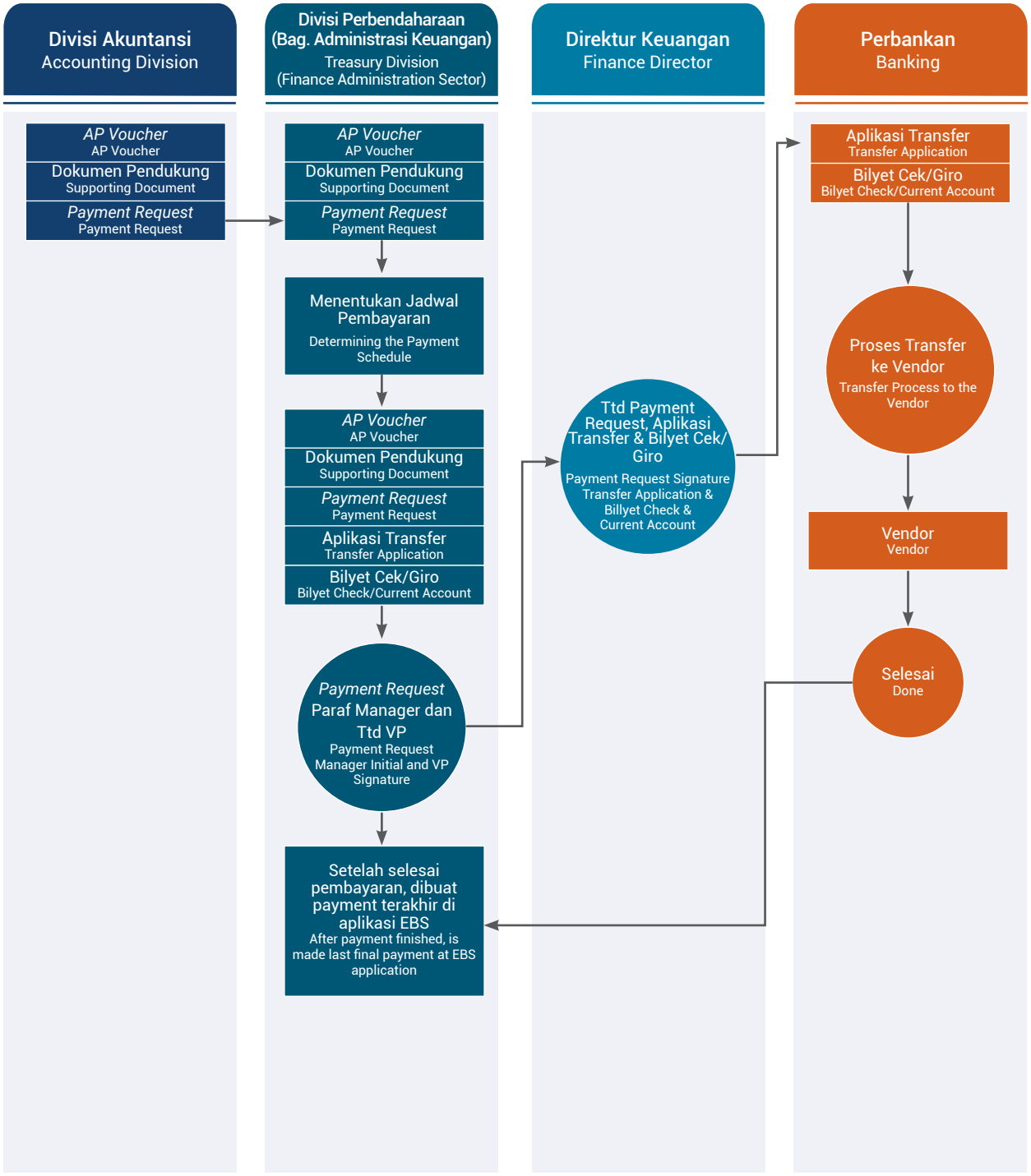
PERMINTAAN BARANG/SPAREPART
Goods/Sparepart Request





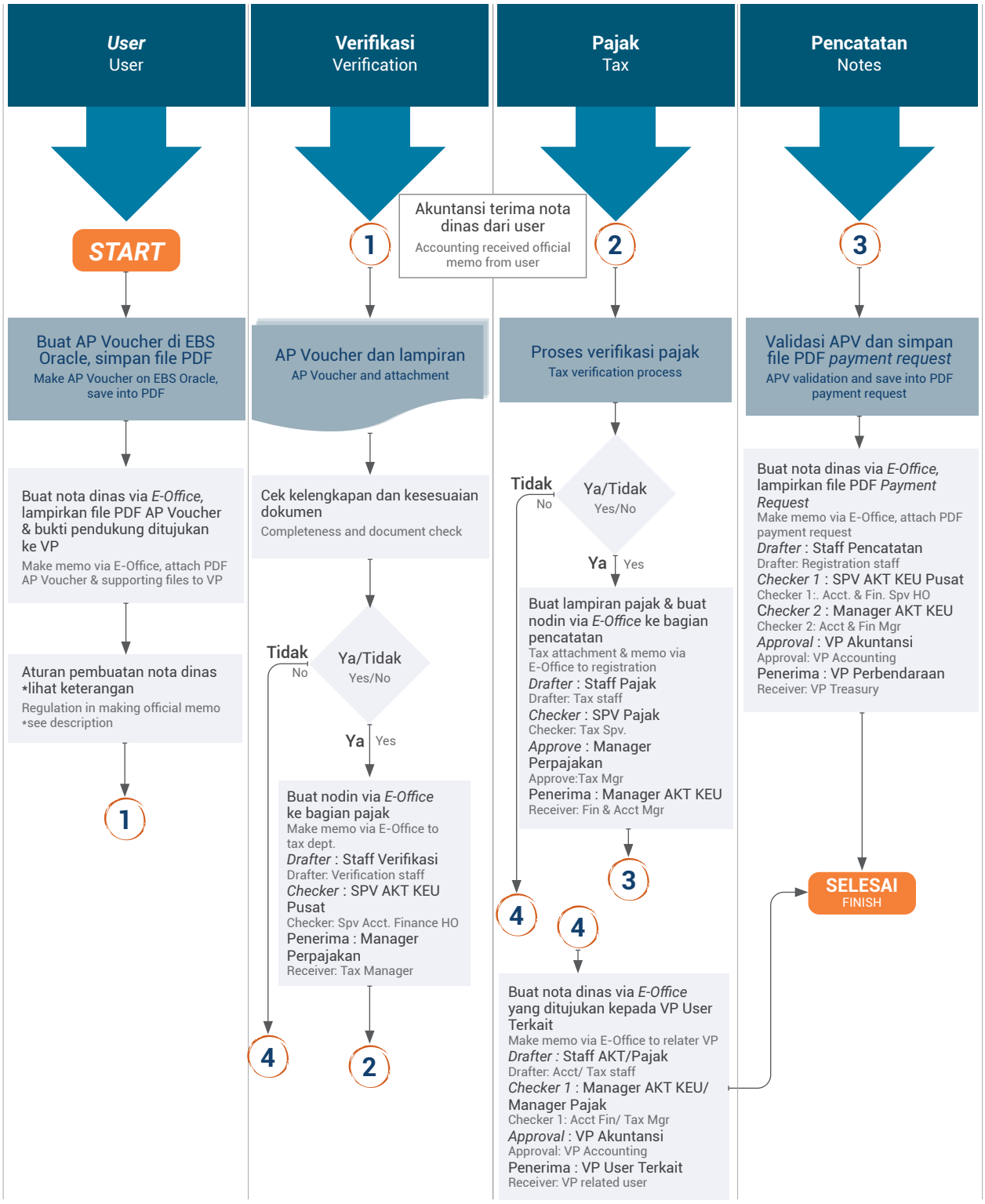
TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT GOVERNANCE

SISTEM PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PELNI (PERSERO)
Payment Systems of Goods and Services Procurement of PT PELNI (Persero)



TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT GOVERNANCE

FLOW PENGAJUAN APV VIA *E-OFFICE*
APV Submission Flow Via E-office



PEJABAT EKSEKUTIF PER 31 DESEMBER 2020
EXECUTIVES OFFICER AS OF 31 DECEMBER 2020



PRESDA SIMANGASING
Kepala Satuan Pengawas Intern
Head of Internal Audit



YANTO DURIYANTO
Kepala DPA – Sistem Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Hidup
Head of DPA – Quality, Health, Safety, Security & Environment



ANDI SAMSUL HADI
VP Perencanaan Korporat & Manajemen Risiko
VP of Corporate Planning & Risk Management



LENGGO GENI ARBIS
VP Hukum
VP of Legal



SUKENDRA
VP Pemasaran Angkutan Penumpang
VP of Passenger Ship Marketing



APRISMAN DEDI
VP Operasi Kapal Penumpang & Perintis
VP of Passenger & Pioneer Ship Operation



DIRGA MULANA
VP Pelayanan Angkutan Penumpang
VP of Passenger Ship Service



BUDI SANTOSO
VP Keagenan & Tour
VP of Agency & Tour



MUHAMAD IMRON
VP Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang & Perintis
VP of Cargo Marketing on Passanger & Pioneer Ship



HAERU RIJAL
VP Pemasaran Angkutan Kapal Barang
VP of Cargo Ship Marketing

PEJABAT EKSEKUTIF PER 31 DESEMBER 2020

EXECUTIVES OFFICER AS OF 31 DECEMBER 2020



NURAINI DESSY W
VP Operasi & Layanan Operasional Angkutan Barang
VP of Cargo Ship Operation & Service



KARDIANSYAH
VP Pengembangan Usaha & Produk Angkutan Barang
VP of Cargo Business & Product Development



DIDIK MARTONO
VP Teknik & Plt VP Surveyor
VP of Engineering & Acting VP of Surveyor



USMAN MOHAMMAD TANG
VP Nautika
VP of Nautical



CAHYONO RUBIYAN
VP Pengelolaan Bahan Bakar
VP of Fuel Management



CAHYA WIDI
VP Pengadaan & Modifikasi Kapal
VP of Ship Procurement & Modification



SLAMET WAHYONO
VP SDM
VP of Human Capital



A.A.N BUDI TRESNAWAN
VP Umum
VP of General Affair



SULISTIAWAN
VP Pengamanan
VP of Security



NIKEN SEKAR MELATHI
VP Pengelolaan Aset
VP of Asset Management

PEJABAT EKSEKUTIF PER 31 DESEMBER 2020

EXECUTIVES OFFICER AS OF 31 DECEMBER 2020



DEDI RAHMAWAN PUTRA
VP Teknologi informasi
VP of Information Technology



ALAMSYAH
VP Pengadaan
VP of Procurement



AFFAN TAUFFAN
VP Akuntansi
VP of Accounting



SUPARNO
VP Perbendaharaan
VP of Treasury



WASMAN R.M
VP Pengelolaan PSO & Subsidi
VP of PSO & Subsidy Management

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS COMPOSITION

PT PELNI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikannya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Per 31 Desember 2020, tidak ada Direktur dan Komisaris yang memiliki saham PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) whose shares are 100% owned by The Republic of Indonesia Government.

As of December 31, 202, both Board of Directors and Board of Commissioners did not have shares of PT PELNI (Persero).

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM
SHARES LISTING CHRONOLOGY

Per 31 Desember 2020, Perseroan belum melakukan penawaran saham kepada publik dan kepemilikan saham 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian informasi mengenai tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham dan tindakan korporasi serta nama bursa di mana saham dicatatkan tidak relevan untuk disajikan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of 31 December 2020, the Company had not executed shares offering to public and the shares are 100% owned by The Republic of Indonesia Government. Therefore, information about shares listing year, total shares outstanding, shares par value, shares public offering and corporate action as well as name of stock exchange where the shares are listed are irrelevant to be presented in this Annual Report.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA
OTHER SECURITIES LISTING CHRONOLOGY

Per 31 Desember 2020, Perseroan tidak melakukan pencatatan efek lainnya sehingga informasi mengenai nama efek, nilai penawaran, nama bursa tempat efek dicatatkan dan peringkat efek tidak relevan untuk disajikan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of 31 December 2020, the Company had not listed other securities, therefore, information about name of securities, offering price, name of stock exchange where the securities are listed and securities rating are irrelevant to be presented in this Annual Report.

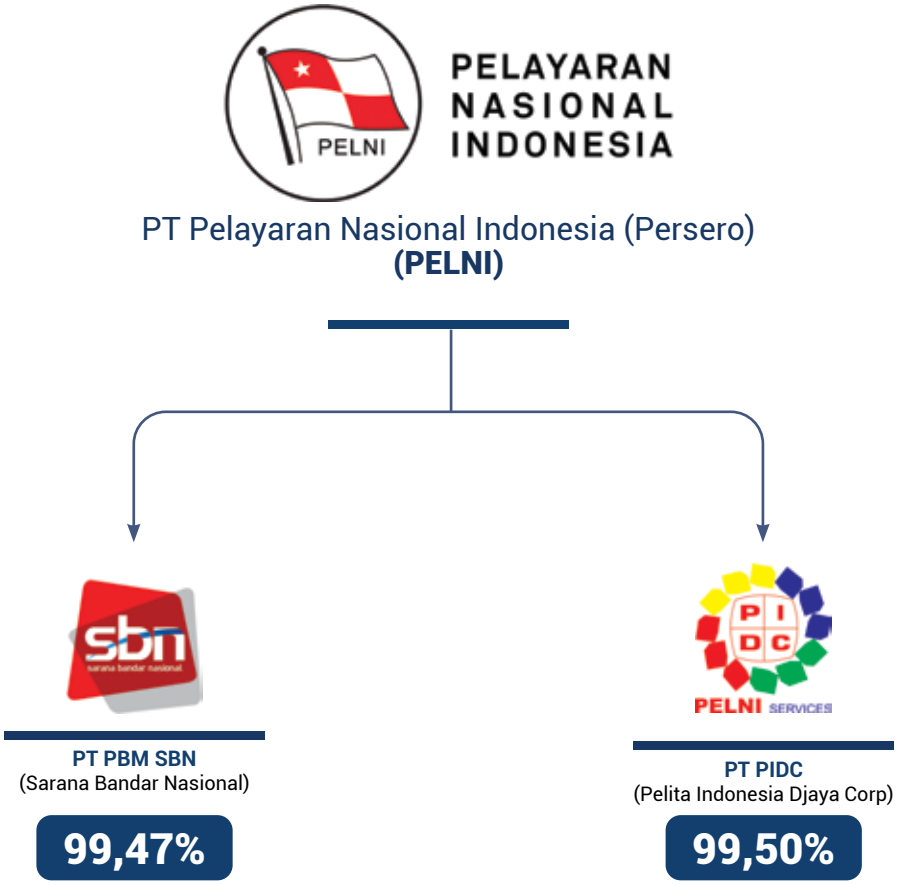
STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
COMPANY'S GROUP STRUCTURE

PT PELNI (Persero) memiliki 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) dengan kepemilikan saham 99,47%, PT Pelita Indonesia Djaya Grup (PIDC) dengan kepemilikan saham 99,50%.

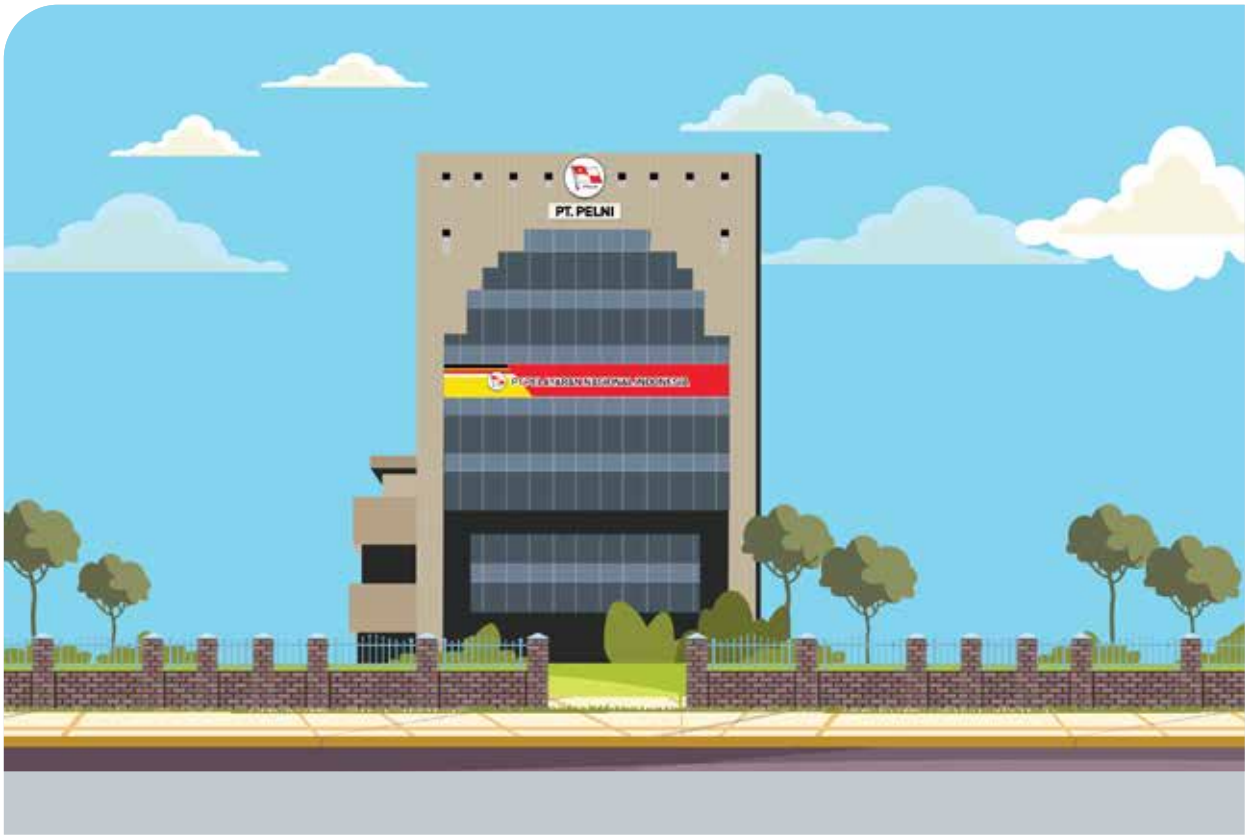
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Struktur Grup PT PELNI (Persero) sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) has 2 (two) subsidiaries which are PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) with 99.47% shares, PT Pelita Indonesia Djaya Grup (PIDC) with 99.50% shares.

As of 31 December 2020, Structure Group of PT PELNI (Persero) is as follows:



ENTITAS ANAK & ASOSIASI
SUBSIDIARY & ASSOCIATION



Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Anak Perusahaan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2020, the Subsidiaries of PT PELNI (Persero) are as follows:

No	Nama Perusahaan Name of the Company	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	Bidang Usaha Line of Business	Status Operasi Operating Status
1	PT PBM Sarana Bandar Nasional	99,47%	Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, *custom clearance*, pedalaman depo. Transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.	Beroperasi Operating
2	PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)	99,50%	Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal. General trading services, port services, customs delivery companies, cleaning services, security services, mattress management services, bottled water supply services, hotel management services, entertainment services onboard.	Beroperasi Operating

ENTITAS ANAK & ASOSIASI
SUBSIDIARY & ASSOCIATION

INFORMASI MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

Berikut adalah informasi mengenai anak perusahaan PT PELNI (Persero):

PT PBM Sarana Bandar Nasional

PT PBM Sarana Bandar Nasional merupakan anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang:

1. Jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal milik induk perusahaan maupun kapal-kapal lainnya yang meliputi kegiatan *stevedoring, cardogoring, receiving delivery*. Wilayah usaha PT SBN meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan didukung oleh 56 kantor cabang dan sub-cabang yang beroperasi di pelabuhan besar dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan kantor pusat di Jakarta.
2. *Freight Forwarding*.
3. Pergudangan (*warehousing*).
4. Transportasi untuk mendukung muatan kapal PT PELNI (Persero).
5. *Trading dan Retail*.

Pada tahun 2020, PT PBM SBN membukukan laba sebesar Rp30,12 miliar atau turun sebesar 50,22% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp60,52 miliar.

Susunan Manajemen SBN per 31 Desember 2020, sebagai berikut:

INFORMATION ABOUT SUBSIDIARY

Information about PT PELNI (Persero) subsidiaries is described below:

PT PBM Sarana Bandar Nasional

PT PBM Sarana Bandar Nasional is a subsidiary of the Company engaged in:

1. Loading and unloading services from and to ship owned by the Parent Company and other ships, which includes; stevedoring, cardogoring, receiving delivery. The scope of work of PT SBN covers the entire sea territory of Indonesia, supported by 56 branch offces and sub-branches operating in large and small ports from Sabang to Merauke with Headquarter in Jakarta.
2. Freight Forwarding.
3. Warehousing.
4. Transportation to support the cargo of PT PELNI (Persero) ships.
5. Trading and Retail.

In 2020, PT PBM SBN recorded a profit for the year of Rp30.12 billion or decreased by 50.22% compared to the previous year was Rp60.52 billion.

As of 31 December 2020, composition of SBN Management is as follows:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners	
Komisaris Utama | President Commissioner	Masrul Khalimi
Komisaris | Commissioner	Tri Andayani
Direksi | Board of Directors	
Direktur Utama | President Director	Suharyanto
Direktur Operasional | Operation Director	Murdiyoto
Direktur Keuangan | Finance Director	Edward Tobing
Informasi Perusahaan | Company Information	
Alamat | Address	Jl. Cempaka Putih Tengah II B.13-144, Cempaka Putih, Jakarta – 10510
Informasi Kontak | Contact Information	T : 021- 4287 9000 | F : 021-4287 8389
Email | Email	info@pelnilogistics.co.id
Situs Web | Website	www.pelnilogistics.co.id

ENTITAS ANAK & ASOSIASI
SUBSIDIARY & ASSOCIATION

PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)

PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC) merupakan anak Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Jasa Kepengurusan Transportasi (JPT), Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), *cleaning service*, *bunkering* BBM, Jasa Pengawasan dan Pengamanan, Sewa Pergudangan, Sewa *Forklift*, Multimoda Transportasi, Hotel dan Restoran.

Pada tahun 2020, PT PIDC membukukan laba sebesar Rp22,42 miliar atau turun sebesar 50,56% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp51,56 miliar.

Susunan Manajemen PIDC per 31 Desember 2020, sebagai berikut:

PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)

PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC) is subsidiary of Company that operated in Transprotation Management Service (JPT), Custom Service Management (PPJK), cleaning sevice, Oil Fuel bunkering, Security Services, Warehouse Service, Forklift Service, Multi-modal Transportation, Hotel and Restaurant.

In 2020, PT PIDC recorded a Profit for the Year of Rp22.42 billion or decreased by 50.56% compared to the previous year was Rp51.56 billion.

As of 31 December 2020, composition of PIDC Management is as follows:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners	
Komisaris Utama | President Commissioner	Muhammad Tukul Harsono
Komisaris | Commissioner	Muhammad Tukul Harsono
Direksi | Board of Directors	
Direktur Utama | President Director	Effendi
Plt Direktur Operasional | Plt Operation Director	Effendi
Informasi Perusahaan | Company Information	
Alamat | Address	Ruko Cempaka Mas Blok Q No.5 Jl. Letjend Suprapto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat
Informasi Kontak | Contact Information	T : 021- 42883740
Email | Email	corporate@pidc.co.id
Situs Web | Website	www.pidc.co.id

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
STOCK MARKET SUPPORTING INSTITUTION AND PROFESSIONS

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Jl. Casablanca Kav.18 Jakarta 12870
T. 62 21 831 7046
F. 62 21 831 7050
E. hlbjakarta@hadori.co.id

NIUKAP
AP.0060

Biaya
Rp440.000.000

Jasa yang Diberikan
Jasa audit laporan keuangan yaitu jasa audit kepatuhan dan laporan kinerja Perseroan.

NOTARIS
Ida Adiningsih, S.H
Jl. Kembang Raya No. 15 A, Jakarta Pusat

H. Teddy Anwar, SH. SpN
Jl. Bendungan Hilir Raya No.80, Jakarta Pusat

KUASA HUKUM
LQQ media Law Office
Gedung Citylofts Unit 10.12
Jl. KH Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat

Kantor Advokat
Deni Simorangkir SH MH
Jl. Tebet Timur Dalam V K No. 3, Jakarta Selatan

Biro Administrasi Efek
Per 31 Desember 2020, Perseroan belum mencatatkan saham dan efek-efek sehingga belum menggunakan jasa Biro Administrasi Efek.

Perusahaan Pemeringkat Efek
Per 31 Desember 2020, Perseroan belum mencatatkan saham dan efek-efek sehingga belum menggunakan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek.

PUBLIC ACCOUNTANT FIRM
Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Jl. Casablanca Kav.18 Jakarta 12870
T. 62 21 831 7046
F. 62 21 831 7050
E. hlbjakarta@hadori.co.id

Public Accountant License Number
AP.0060

Fee
Rp440.000.000

Provided Service
Financial audit report services are compliance audit services and the company's performance reports.

NOTARY
Ida Adiningsih, S.H
Jl. Kembang Raya No. 15 A, Jakarta Pusat

H. Teddy Anwar, SH. SpN
Jl. Bendungan Hilir Raya No.80, Jakarta Pusat

LEGAL ATTORNEY
LQQ media Law Office
Gedung Citylofts Unit 10.12
Jl. KH Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat

Advocate Office
Deni Simorangkir SH MH Advocate Office
Jl. Tebet Timur Dalam V K No. 3, Jakarta Selatan

Securities Registrar
As of 31 December 2020, the Company had neither listed shares nor securities, therefore, the Company did not hire any Securities Registrar.

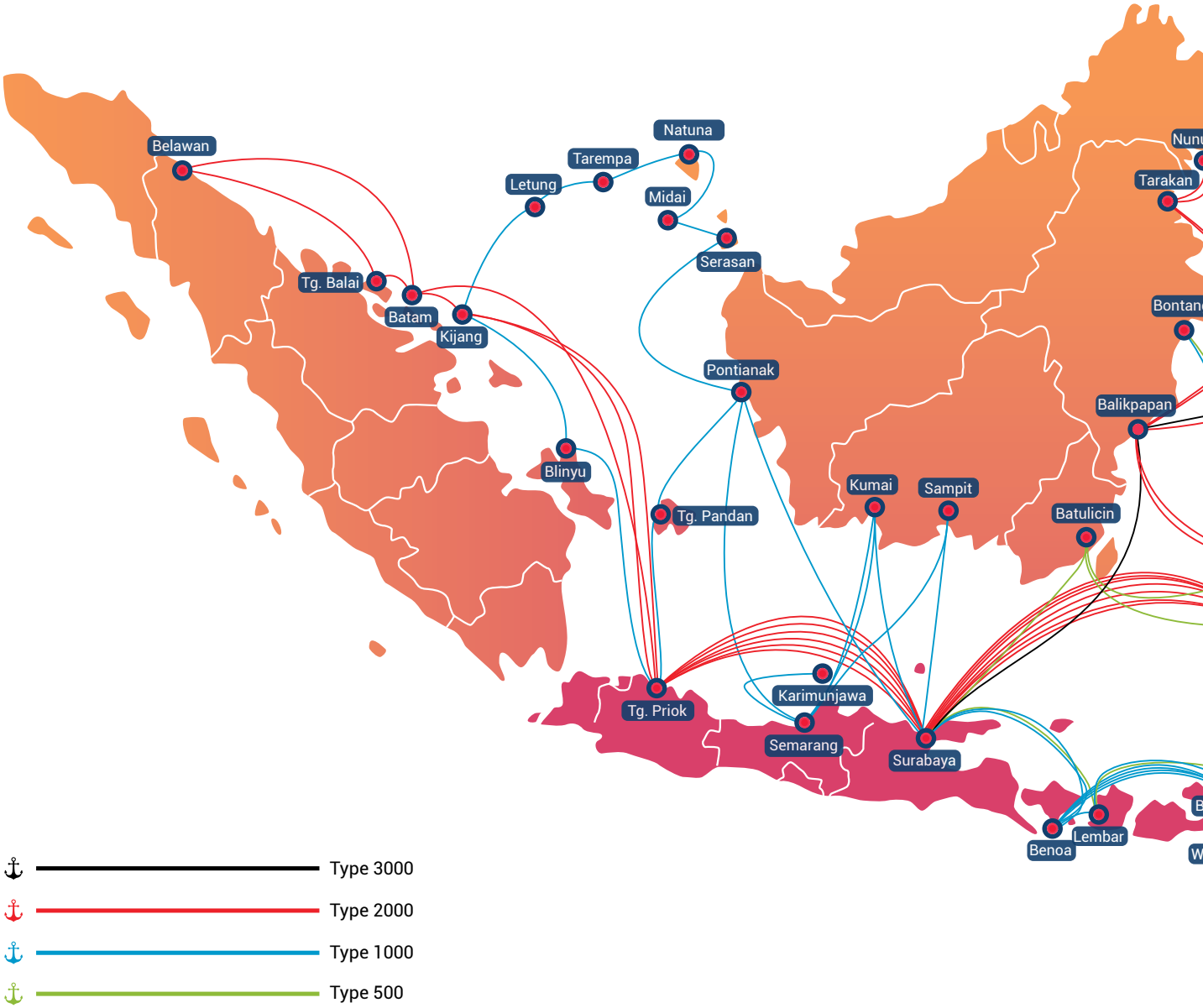
Rating Agency
As of 31December 2020, the Company had not listed hadneither listed shares nor securities, therefore, the Company did not hire any Rating Agency.

PETA WILAYAH OPERASI JARINGAN TRAYEK KAPAL PENUMPANG

PASSENGER SHIP ROUTE NETWORK OPERATIONAL AREA

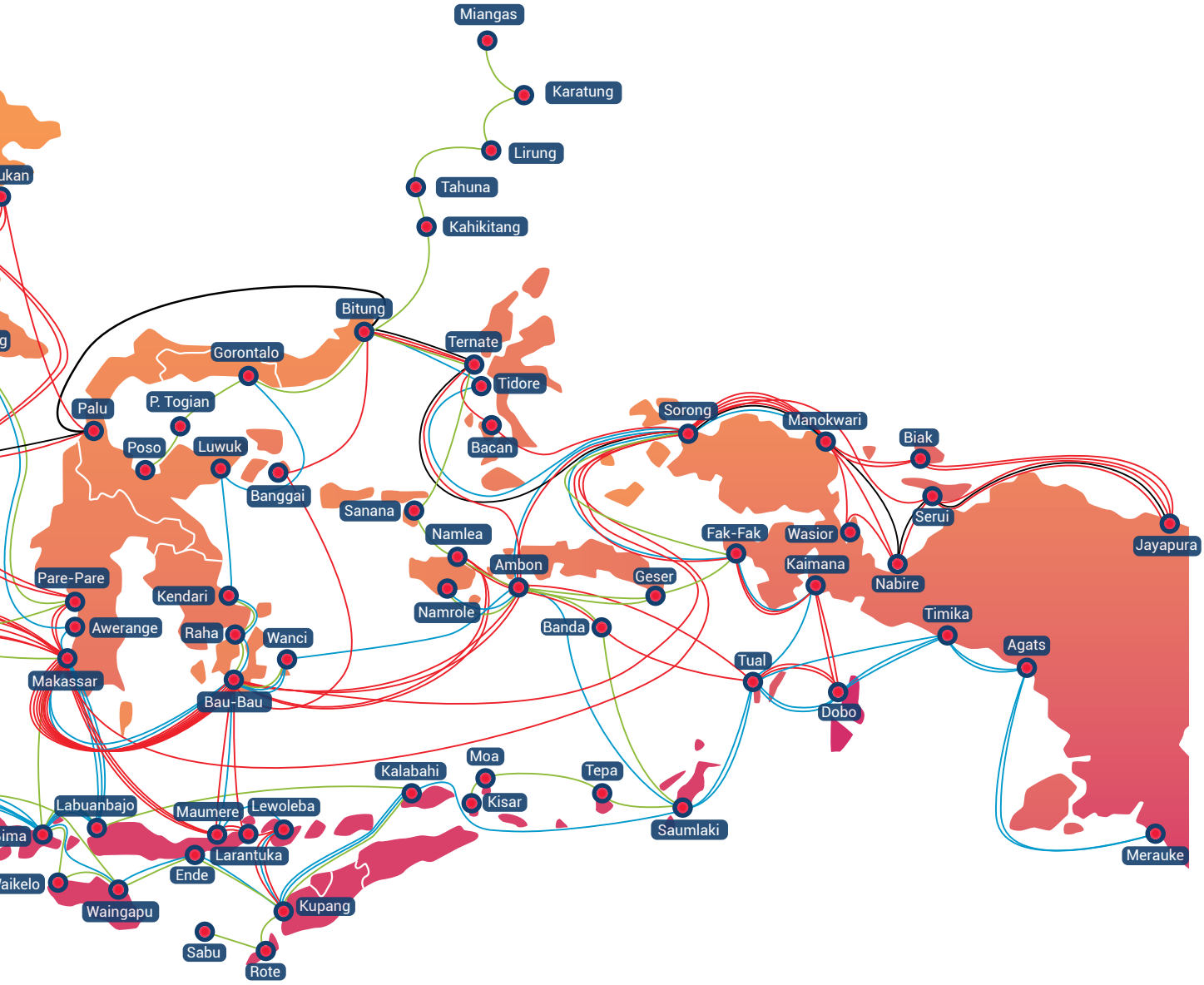
- Jumlah Pelabuhan Singgah Tahun 2020 adalah 83 Pelabuhan
- Jumlah Kapal PSO tahun 2020 adalah 26 Kapal
- Jumlah Ruas Tahun 2020 adalah 1.100 ruas
- Total Mil tahun 2020 adalah 95.311 Mil Laut

- Total transit ports in 2020 were 83 ports
- Total PSO Ship in 2020 were 26 Ships
- Total Lines in 2020 were 1,100 lines
- Total Mile in 2020 were 95,311 Nautical Miles

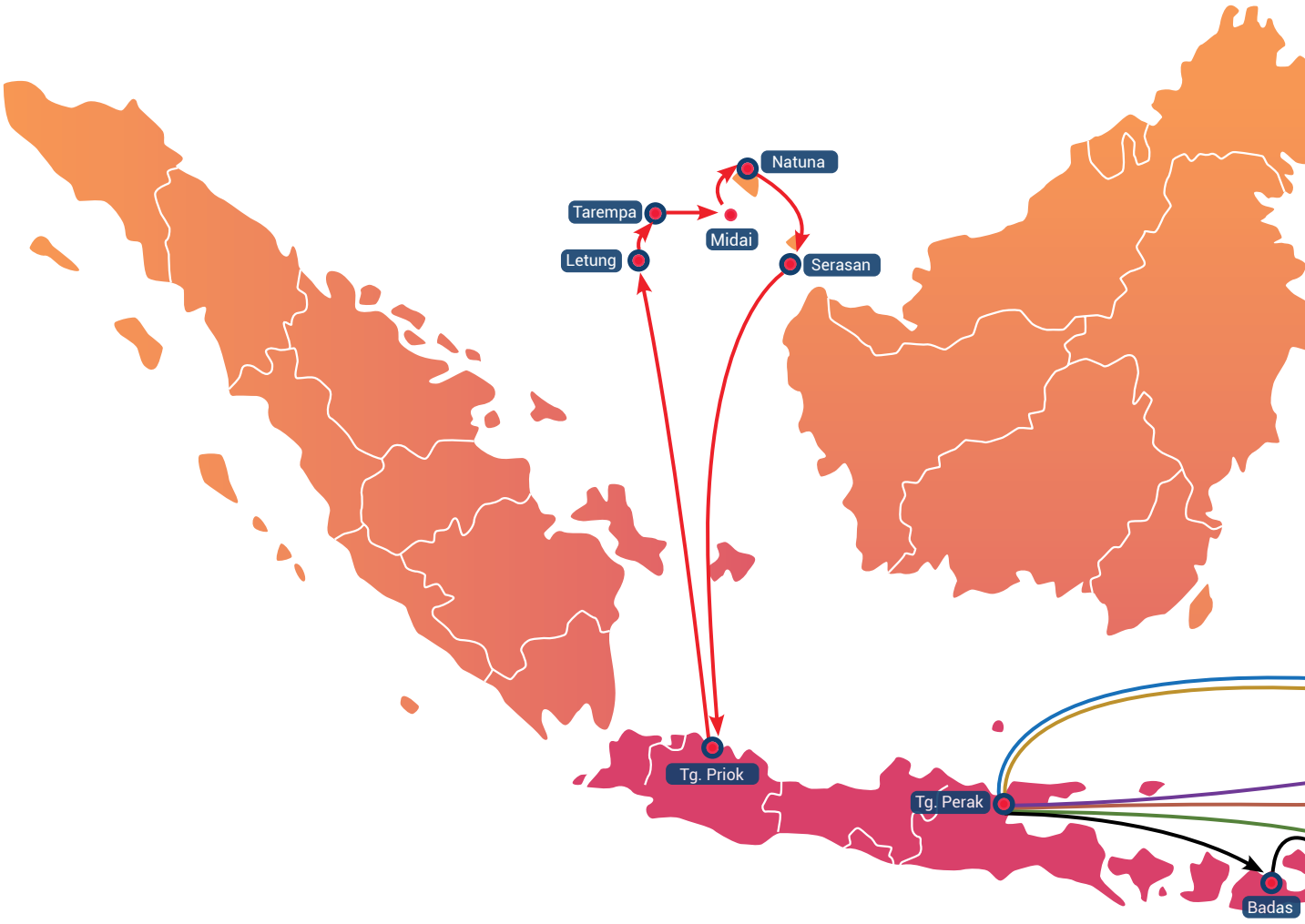


PETA WILAYAH OPERASI JARINGAN TRAYEK KAPAL PENUMPANG

PASSENGER SHIP ROUTE NETWORK OPERATIONAL AREA



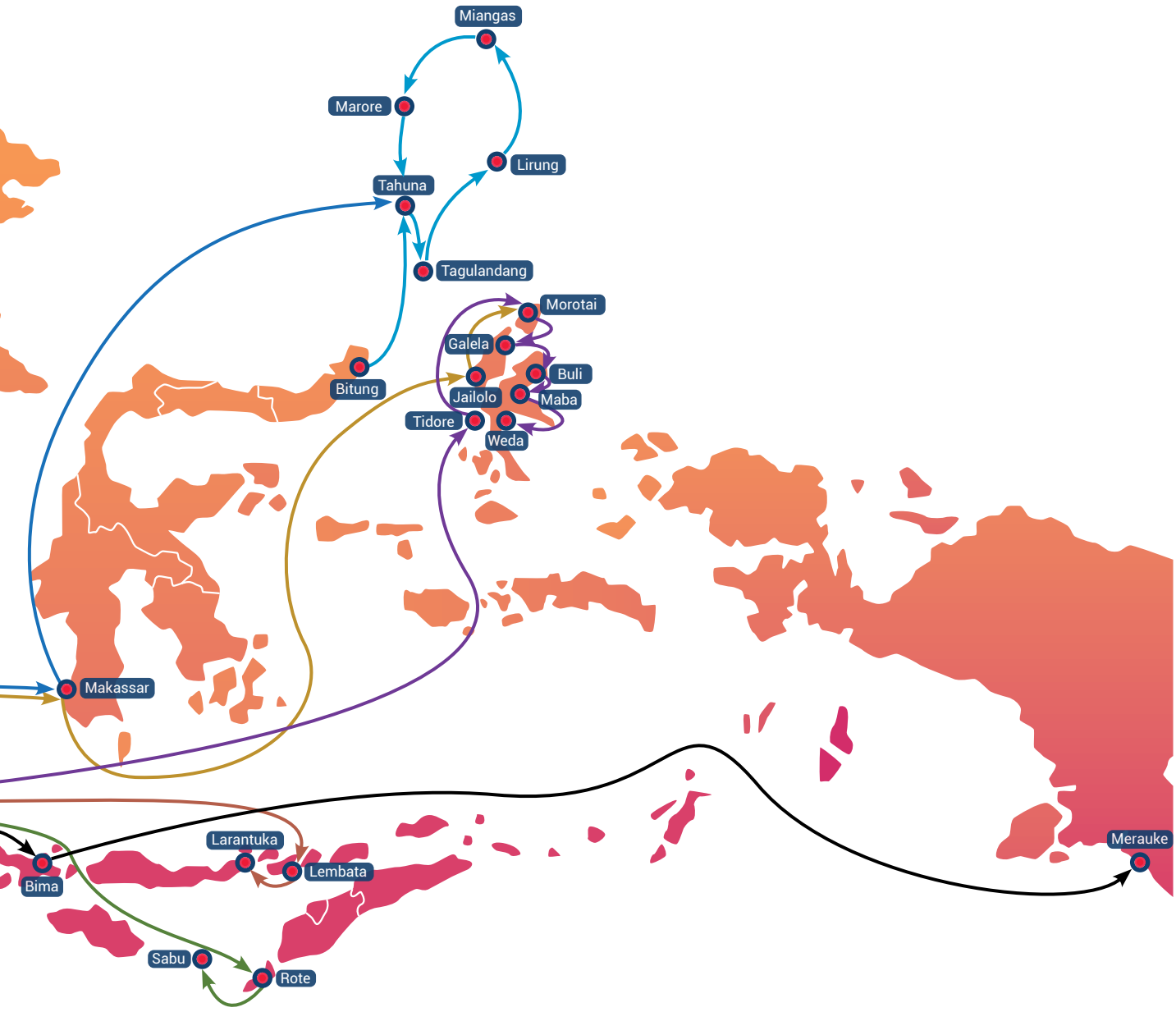
JARINGAN TRAYEK TOL LAUT TAHUN 2020
TOL LAUT ROUTE 2020



- H-1 : Tg. Perak – Makassar – Tahuna – Tg. Perak (KM Logistik Nusantara 1)
- T-3 : Tg. Priok – Letung - Tarempa – Midai –Natuna – Serasan – Tg. Priok (KM Logistik Nusantara 4)
- T - 5 : Bitung – Tahuna – Tagulandang – Lirung – Miangas – Marore – Tahuna – Bitung (KM Kendhaga Nusantara 1)
- T-10 : Tg. Perak –Tidore–Morotai - Galela – Buli – Maba – Weda – Tg. Perak (KM Logistik Nusantara 6)

JARINGAN TRAYEK TOL LAUT TAHUN 2020

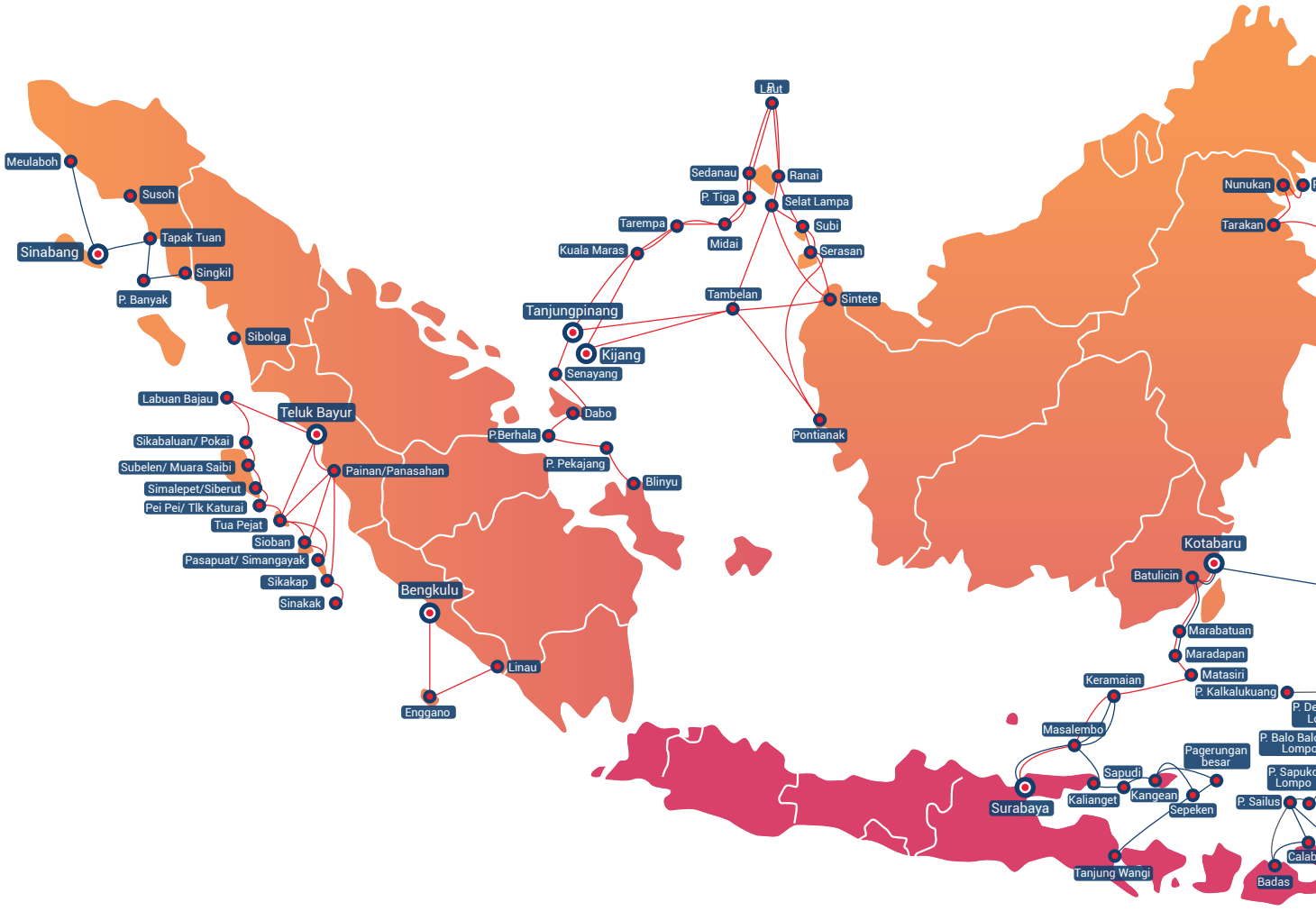
TOL LAUT ROUTE 2020



- T-13 : Tg. Perak – Rote – Sabu – Tg. Perak (KM Kendhaga Nusantara 11)
- T-14 : Tg. Perak – Loweleba – Larantuka – Tg. Perak (KM Kendhaga Nusantara 7)
- T-15 : Tg. Perak – Makassar – Jailolo – Morotai – Tg. Perak (KM Logistik Nusantara 3)
- T-18 : Tg. Perak – Badas – Bima – Merauke – Bima – Tg. Perak (KM Logistik Nusantara 2)

JARINGAN TRAYEK NASIONAL KAPAL PERINTIS TAHUN 2020

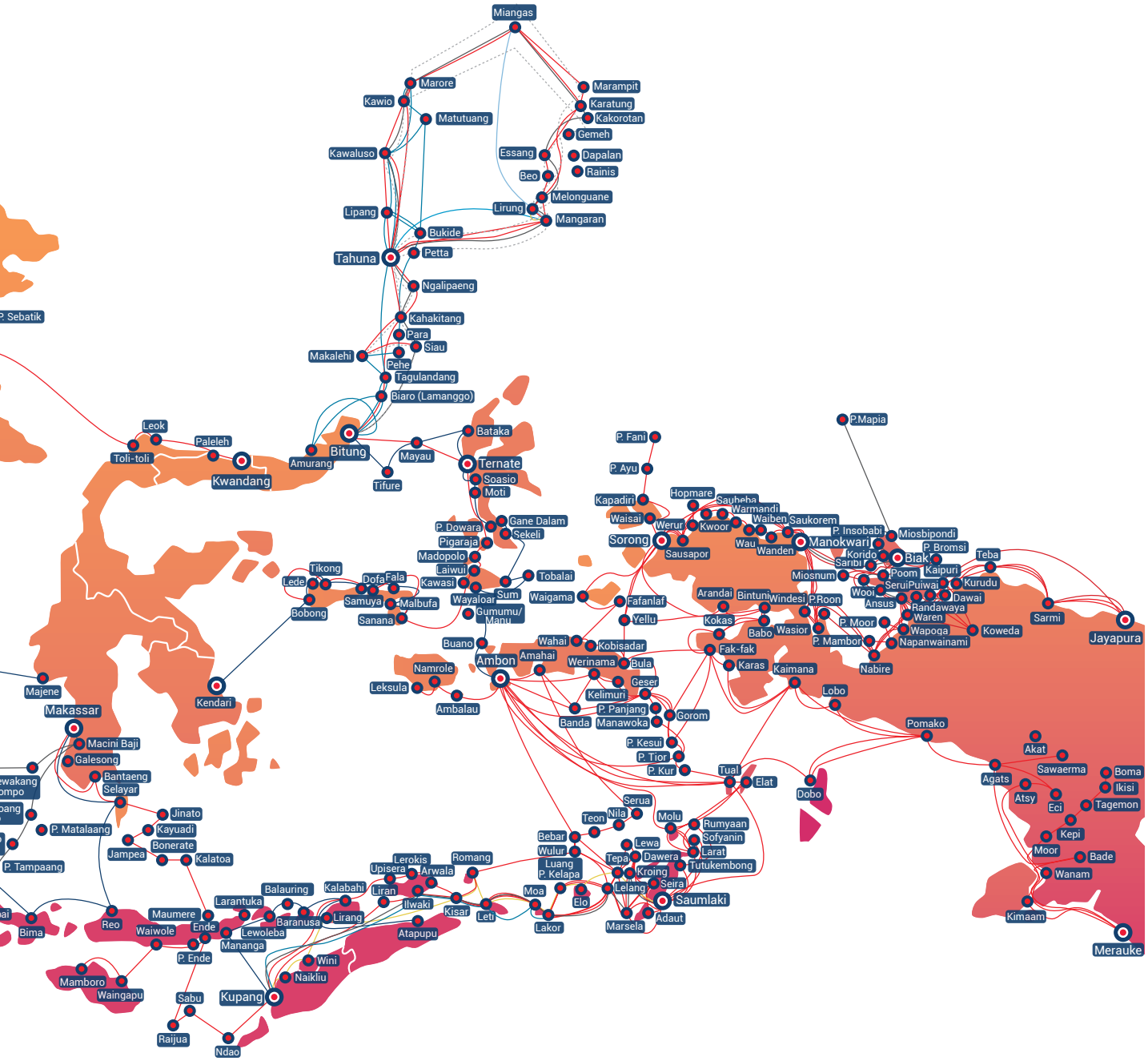
DOMESTIC PIONEER SHIP ROUTE 2020



- Kode Trayek (R-1, R-12, R-16, R-19, R-20, R-25, R-67, R-70)
- Kode Trayek (R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-17, R-23, R-31, R-33, R-42, R-43, R-46, R-49, R-50, R-51, R-52, R-60, R-61, R-66, R-72, R-74, R-76, R-78, R-81, R-82, R-84, R-87, R-89, R-90, R-91, R-95)
- Kode Trayek R-24
- Kode Trayek (R-32, R-34)
- Kode Trayek R-24
- Kode Trayek (R-33, R-44, R-63, R-77)
- Kode Trayek R-33

JARINGAN TRAYEK NASIONAL KAPAL PERINTIS TAHUN 2020

DOMESTIC PIONEER SHIP ROUTE 2020



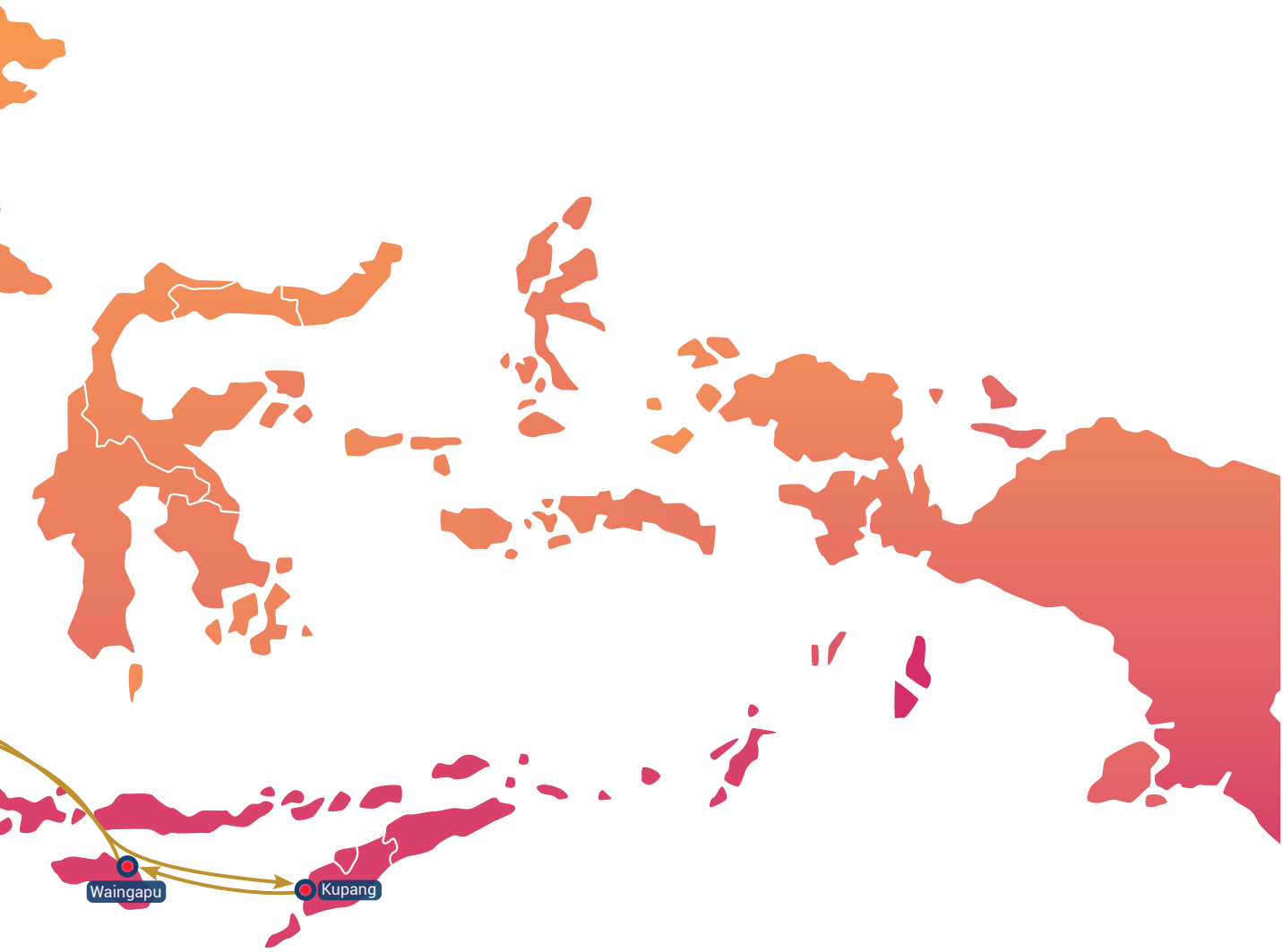
RUTE KAPAL TERNAK 2020
CATTLE SHIP ROUTE 2020



RT - 1 : Kupang – Waingapu – Tg. Priok – Cirebon – Kupang (KM Camara Nusantara 1)

RUTE KAPAL TERNAK 2020

CATTLE SHIP ROUTE 2020



NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARY, BRANCH OFFICE AND REPRESENTATIVE OFFICE

PT PELNI (PERSERO)

Kantor Pusat | Head Office
Jl. Gajah Mada No. 14,
DKI Jakarta 10130
T. +6221 6334 342
F. +6221 6385 4130
E. humas@pelni.co.id
W. www.pelni.co.id

Pemasaran | Marketing
Jl. Gajah Mada No. 14,
DKI Jakarta 10130
T. +6221 6385 50962
E. divisi.pemasaran@pelni.co.id

ANAK PERUSAHAAN | Subsidiary

PT Sarana Bandar Nasional (SBN)
Jl. Cempaka Putih Tengah II
B.13-144, Cempaka Putih,
DKI Jakarta - 10510
T. +6221 4287 9000
F. +6221 4287 8389
E. info@ptsbn.co.id
W. www.ptsbn.co.id

Rumah Sakit PELNI Petamburan
Jl. Aipda Ks Tubun
No. 92-94, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 11410
T. +6221 5306 901
F. +6221 5483 145
E. pemasaran@rspelni.net
W. www.rspelni.co.id

Pelita Djaya Indonesia Corporation (PIDC)
Ruko Cempaka Mas
Jl. Suprapto Blok Q No. 5
Jakarta Pusat
T. +6221 4393 3184
F. +6221 4393 1623
E. pt.pidc@gmail.com

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)

Galangan Surya Surabaya
Jl. Nilam Barat No. 39,
Surabaya 60165
T. +6231 3291 909
+6231 3292 961
F. +6231 3291 909
E. galangan@pelni.co.id

Hotel Bahtera Cipayung
Jl. Raya Puncak Cipayung,
No. 256, Bogor
T. +6251 8254 251
+6251 8257 451
F. +6251 8256 663
E. hotelbahtera@hotelbahtera-pelni.co.id

CABANG A | Branch A

Tg Priok
Jl. Palmas No. 2,
Tanjung Priok, Jakarta Utara
T. +6221 4393 3184
F. +6221 4393 1623
E. tg-priok@pelni.co.id

Makassar
Jl. Sawerigading No. 14,
Makassar
T. +62411 3614 861
F. +62411 3631 395
+62411 3614 788
E. makassar@pelni.co.id

Surabaya
Jl. Pahlawan No.112-114,
Surabaya
T. +6231 3293 197
F. +6231 3538 958
+6231 3293 195
E. surabaya@pelni.co.id

CABANG B | Branch B

Jayapura
Jl. Argapura No. 15,
Jayapura Selatan, Papua
T. +62967 5332 70
+62967 5330 70
+62967 5314 12
F. +62967 5319 21
+62967 5333 70
E. jayapura@pelni.co.id

Sorong
Jl. Jend. A. Yani,
Kompleks Pelabuhan, Sorong
T. +62951 3218 60
F. +62951 323873
E. sorong@pelni.co.id

Ambon
Jl. D.I. Panjaitan No. 19, Ambon
T. +62911 3482 19
+62911 3531 61
+62911 3423 28
F. +62911 3520 49
E. ambon@pelni.co.id

Semarang
Jl. Mpu Tantular 25-27, Semarang
T. +6224 3540 238
+6224 3546 722
F. +6224 3555 156
E. semarang@pelni.co.id

Bau-bau
Jl. Pahlawan No.1,
Bau-bau Sulawesi Tenggara
T. +62402 2821 258
+62402 2821 905
+62402 2822 705
F. +62402 2821 188
E. bau-bau@pelni.co.id

NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARY, BRANCH OFFICE AND REPRESENTATIVE OFFICE

Balikpapan
Jl. Yos Sudarso No. 1 Balikpapan
T. +62542 4241 71
+62542 4224 10
F. +62542 7350 09
E. balikpapan@pelni.co.id

Kupang
Jl. Pahlawan No.7 Kel. Fatufeto - Kec. Alak Kupang, NTT
T. +62380 8219 44
+62380 8238 98
F. +62380 8336 46
E. kupang@pelni.co.id

Bitung
Jl. Sam Ratulangi No. 7 Bitung, Bitung Kota - Sulawesi Utara
T. +62438 3635 2
+62438 3581 8
F. +62438 3358 8
E. bitung@pelni.co.id

Manokwari
Jl. Siliwangi No. 24 Manokwari, Papua Barat
T. +62986 2151 66
+62986 2151 67
+62986 2151 65
F. +62986 2151 68
E. manokwari@pelni.co.id

Tg. Pinang
Jl. Jend. A. Yani No. 06
Tg. Pinang Kepulauan Riau
T. +62771 2151 3
+62771 2193 3
F. +62771 2342 7
E. tg-pinang@pelni.co.id

CABANG C | Branch C

Batam
Jl. DR Cipto Mangunkusumo No. 4, Tanjung Pinggir, Sekupang, Pulau Batam
T. +62778 3221 81
+62778 3210 70
F. +62778 3210 85
+62778 3255 86
E. batam@pelni.co.id

Pare-pare
Jl. Lasiming No. 44
Pare-pare, Sulawesi Selatan
T. +62421 2101 7
+62421 2470 9
F. +62421 2307 9
E. pare-pare@pelni.co.id

Nabire
Jl. Frans Kaisepo No. 14,
Nabire, Papua
T. +62984 2285 0
+62984 2318 1
+62984 2507 2
F. +62984 2135 0
E. nabire@pelni.co.id

Ternate
Jl. Jend.A.Yani,
Kompleks Pelabuhan, Ternate, Maluku Utara
T. +62921 3121 434
+62921 4124 434
+62921 3125 474
F. +62921 3121 276
E. ternate@pelni.co.id

Medan/Belawan
Jl. Gunung Krakatau No. 17A, Medan
T. +6261 4206 5268
F. +6261 4206 5267
E. belawan@pelni.co.id

Pontianak
Jl. St. Abdurahman No.12 Pontianak, Kalimantan Barat
T. +62561 7481 24
+62561 7481 29
F. +62561 7481 31
E. pontianak@pelni.co.id

Kumai
Jl. Sudirman, SH No. 16 Pangkalan Bun/Kumai, Kalimantan Tengah
T. +62532 2442 0
F. +62532 2407 3
E. kumai@pelni.co.id

Tarakan
Jl. Kusuma Bangsa No. 100, Gunung Lingkas, Tarakan Kota
T. +62551 5116 9
+62551 2544 0
F. +62551 21529
E. tarakan@pelni.co.id

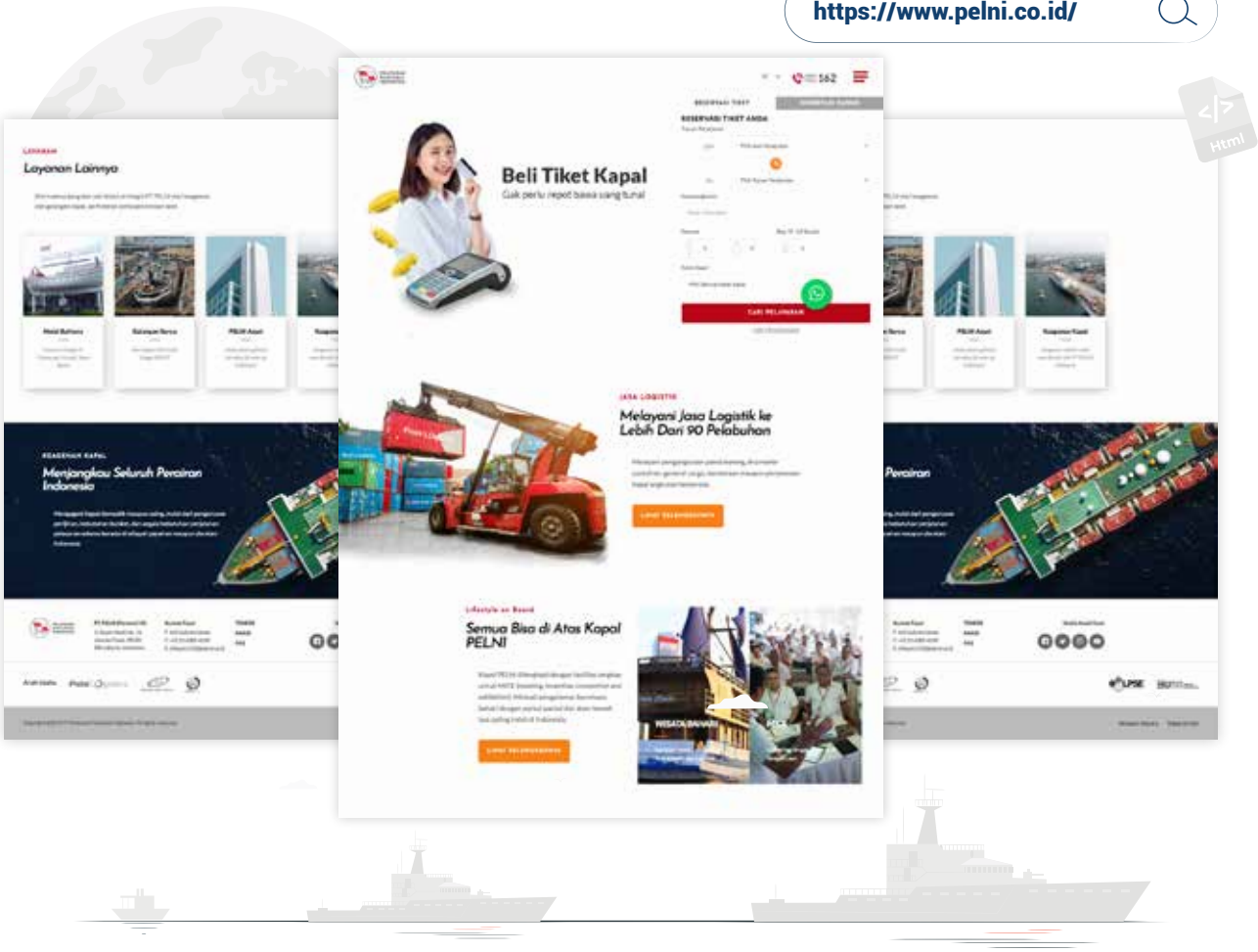
Nunukan
Jl. A. Yani No. 11, Nunukan, Kalimantan Tenggara
T. +62556 2130 9
+62556 2298 4
F. +62556 2102 9
E. nunukan@pelni.co.id

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN
INFORMATION ON COMPANY'S WEBSITE

PT PELNI (Persero) memberikan kemudahan akses informasi secara transparan dan akurat kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui Website Perusahaan.

PT PELNI (Persero) provides easy access to information transparently and accurately for all Shareholders and Stakeholders on the Company's Website.

https://www.pelni.co.id/



Situs web resmi Perusahaan www.pelni.co.id, telah memenuhi informasi yang meliputi:

1. Informasi Pemegang Saham;
2. Isi Kode Etik (Etika Bisnis);
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
4. Laporan Keuangan Tahunan terpisah (5 tahun terakhir);
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

The Company's official website, www.pelni.co.id has fulfilled the following information:

1. Shareholders informations;
2. Code of Ethic (Business Ethic);
3. Information of General Meeting of Shareholders;
4. Annual Financial Report (AGMS);
5. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors;
6. Board Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary and Internal Audit.

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

INFORMATION ON COMPANY'S WEBSITE

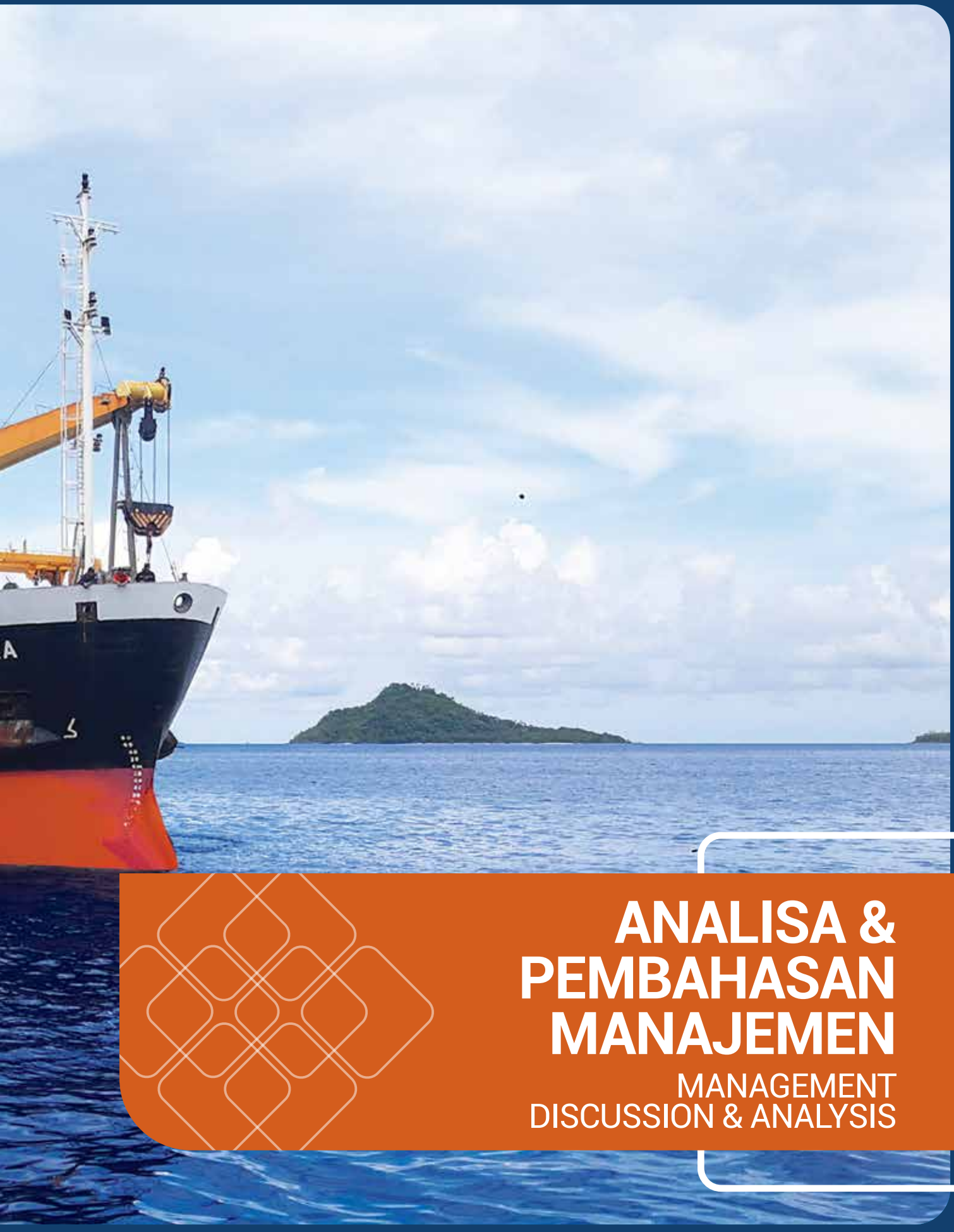
Selain informasi yang disebutkan di atas, Website PT PELNI (Persero) juga membuat informasi yang lebih spesifik, yaitu:

Other than the above information, Website of PT PELNI (Persero) also provides more specific information, such as:

TENTANG KAMI About us	Sejarah | History
	Visi & Misi | Vision & Mission
	Penghargaan | Awards
	Keterbukaan Informasi | Disclosure Information
	Tata Kelola Perusahaan | Corporate Governance
	Laporan Tahunan | Annual Report
	Relasi Stakeholder | Stakeholders Relation
	Pemegang Saham | Shareholders
	BOD / BOC | BOD / BOC
	RUPS ID | GMS ID
	Komite Audit | Audit Committee
	Komite Risiko | Risk Committee
	Struktur Organisasi | Organization Structure
	CSR/PKBL | CSR/PKBL
	Nilai Perusahaan | Corporate Value
RESERVASI TIKET Ticket Reservation	Reservasi Tiket PT PELNI (Persero) | PT PELNI (Persero) Ticket Reservation
JASA LOGISTIK Logistic Services	Angkutan Barang Komersial | Commercial Cargo Transportation
	Sewa Kapal Barang Komersial | Commercial Cargo Ship Rentals
LAYANAN Services	Gaya Hidup | Lifestyle
	Wisata Bahari | Marine tourism
	MICE | MICE
	Layanan Lainnya | Other Services
	Hotel Bahtera | Bahtera Hotel
	Galangan Kapal | Shipyard
	Keagenan Kapal | Ship Agency
	PELNI Aset | PELNI Assets
GALERI Gallery	Reguler | Regular
	Perintis | Perintis
	Tol Laut (Kargo) | Tol Laut (Cargo)
BERITA News	Berita | News
	Press Release | Press Release
	Event | Events
KONTAK KAMI Contact Us	Kantor Pusat | Head Office
	Jakarta | Jakarta
	Kantor Cabang | Branch Office

04


UTAMAKAN SHOLAT DAN KESELAMATAN KERJA
LOGISTIK NUSANTAR
TOL LAUT



ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

TINJAUAN MAKRO EKONOMI
MACRO ECONOMIC OVERVIEW

Sepanjang tahun 2020, kondisi perekonomian global mengalami tekanan yang sangat hebat, yaitu akibat dari pandemi Covid-19. Pandemi tersebut telah menggugurkan seluruh asumsi akan perekonomian global dan mengakibatkan perubahan iklim bisnis sebagai akibat dari kebijakan *lockdown* di beberapa negara. Kebijakan *lockdown* di beberapa negara membuat aktivitas ekonomi terhenti sehingga arus perdagangan dunia mengalami penurunan yang sangat tajam karena banyak negara yang menutup akses masuk ke negaranya kecuali untuk barang kebutuhan pokok.

Throughout 2020, global economy condition experienced a great pressure, that is because of Covid-19 pandemic. That pandemic has devastated all assumptions of global economy and lead to changes in business climate as a result of the lockdown policy in several countries. The lockdown policy in several countries has made economy activities stopped so thet the flows of world trade have also declined sharply due to many countries closed their entry access, unless for basic needs.

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Kontraksi pada tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75%, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%.

Central Bureau of Statistics reported that economic growth contracted by 2.07%. The contraction in 2020 is the impact of the Covid-19 pandemic that has hit the entire world, including Indonesia. The spatial structure of the Indonesian economy in 2020 is dominated by the group of provinces in Java Island at 58.75%, with economic performance experiencing a growth contraction of 2.51%.

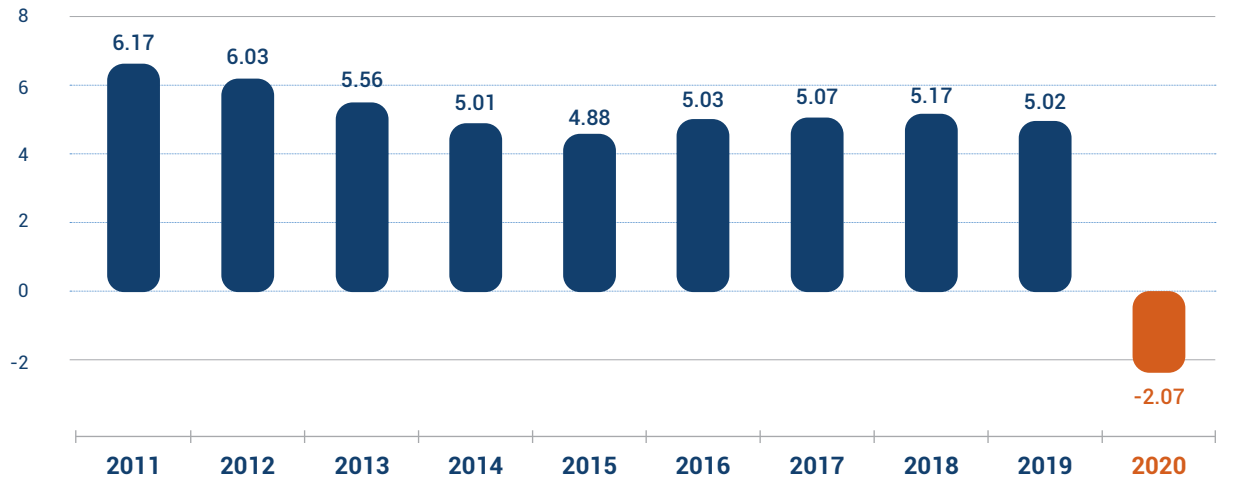
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi beberapa negara tahun 2020, tekanan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 termasuk moderat dibandingkan dengan negara anggota G20 dan Asia Tenggara. Sedangkan Uni Eropa, Hongkong, Singapura dan Amerika Serikat mengalami penurunan yang cukup dalam, meskipun beberapa negara mampu tumbuh positif seperti China 2,3% dan Vietnam 2,9%.

Based on data on the economic growth of several countries in 2020, Indonesia's economic pressure throughout 2020 was moderate compared to G20 member countries and Southeast Asia. While European Union, Hong Kong, Singapore and the United States experienced a deep decline, although several countries were able to grow positively, such as China 2.3% and Vietnam 2.9%.

TINJAUAN MAKRO EKONOMI
MACRO ECONOMIC OVERVIEW

Namun demikian, perekonomian dunia tahun 2021 diprediksi akan membaik dengan adanya pengembangan vaksin yang dilakukan oleh beberapa perusahaan farmasi dunia dan beberapa negara sudah mulai membuka kembali akses keluar dan masuk negaranya serta mengijinkan aktivitas ekonomi warganya pada kuartal ketiga tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan.

However, world economy in 2021 is predicted to be better due to development of vaccine that is done by several world pharmaceutical company and many countries have started to open their access in and out of the country as well as allowing economy activities of their citizens on third quarter of 2020 by applying health protocol.



Sumber: BPS (data diolah)
Source: BPS (data processed)

TINJAUAN INDUSTRI PELAYARAN
SHIPPING INDUSTRY REVIEW

Perlambatan ekonomi global dan dampak negatif di pasar keuangan utama yang disebabkan oleh penyebaran pandemi Covid-19, telah mengakibatkan dampak yang merugikan antara lain merugikan pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis, yang dapat berlanjut dan mengakibatkan keuangan dan operasi perusahaan yang tidak menguntungkan. Kemampuan Indonesia dalam meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian negara, sebagian besar bergantung pada efektifitas kebijakan dan tindakan respon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyebaran Covid-19, sebagaimana serta fiskal dan langkah-langkah lain yang sedang diambil oleh otoritas Pemerintah. Efektivitas kebijakan termasuk tindakan dan peristiwa berada di luar kendali Perusahaan.

The global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of Covid-19, has resulted to adverse effects including adverse in economic growth, decline in capital market, increase in credit risks, depreciation of foreign exchange rates and disruption of business operation. which may continue and result on unfavourable financial and operation of the Company. The ability of Indonesia to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy, is largely depend on the effectiveness of policies and actions responses issued by the Government of Republic of Indonesia on the eradicate the spread of the Covid-19, as well as the fiscal and other measures that are being taken by the Government authorities. The effectiveness of the policy including actions and events are beyond the Company's control.

PT PELNI (Persero) sebagai salah satu pemain besar dalam industri pelayaran di Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam transportasi laut mengalami dampak yang sangat signifikan dengan adanya pandemi Covid-19, terutama pada kinerja bisnis dan keuangan. Beberapa kondisi yang mempengaruhi dampak signifikan tersebut diantaranya adanya pelarangan mudik Idul Fitri 1441H oleh pemerintah Republik Indonesia mulai tanggal 24 April 2020 sampai 8 Juni 2020 untuk angkutan laut dan pembatasan akses masuk wilayah pada beberapa daerah di Indonesia dengan penutupan pelabuhan. Hal ini menyebabkan sebagian operasional kapal penumpang dan perintis harus terhenti sehingga perusahaan memutuskan untuk mem-portstay-kan 20 kapal penumpang dan 21 kapal perintis sepanjang bulan April 2020 sampai Mei 2020. Keputusan Perseroan untuk melaksanakan *portstay* kapal penumpang dan perintis juga dilakukan dalam rangka efisiensi operasional kapal dan rasionalisasi anggaran perusahaan.

PT PELNI (Persero) as one of the big players in the shipping industry in Indonesia that has a strategic function in sea transportation had experienced a significant impact due to Covid-19 pandemic, especially in its business and financial performance. Some of the conditions that affect this significant impact include the prohibition of travelling as long as Idul Fitri 1441H by the government of the Republic of Indonesia from 24 April 2020 to 8 June 2020 for sea transportation and restrictions on access to territory in several regions in Indonesia with the closure of ports. This caused some passenger and pioneer ship operations to stop, so the company decided to port 20 passenger ships and 21 pioneer ships from April 2020 to May 2020. The Company's decision to carry out portstay for passenger and pioneer ships was also made in the context of ship operational efficiency and rationalization. Company budget.

TINJAUAN INDUSTRI PELAYARAN
SHIPPING INDUSTRY REVIEW

Setelah dapat memulai kembali kegiatan operasional perkapalan secara bertahap, Perseroan harus mengikuti syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait pembatasan jumlah penumpang yang diangkut. Selain itu, penutupan sejumlah pelabuhan juga mengurangi potensi terangkutnya penumpang pengguna jasa transportasi angkutan laut. Tercatat selama bulan Desember 2020 terdapat 17 pelabuhan yang masih ditutup.

After being able to restart its shipping operation gradually, the Company has to comply to term and condition that is stated on Circular Letter of Chief Task Force Acceleration on Covid-19 and Circular Letter of Directorate General of Maritime Transportation related to limitation of passengers onboard. Other than that, some shutdown of ports have reduced potential passenger who uses sea transportation to be transported. It is recorded that during December 2020 there are 17 ports that are still closed.

Untuk segmen usaha non penugasan, seperti perhotelan juga mengalami tekanan yang sama yang mengakibatkan penurunan pendapatan karena jumlah pelanggan/tamu yang datang menurun signifikan. Hal yang sama terjadi pada pengusahaan aset dimana dampak pandemi covid-19 membuat calon mitra menahan investasi untuk sewa properti dan ataupun tidak memperpanjang masa kontrak sewa.

For non assignment segment, such as hospitality also had the same pressure that generates a decreased of revenue due to a significant reduction of customers/ guests. The same thing also happened to asset management that made potential partner hold their investment on property rent or not extending their lease contract.

Perseroan telah menerapkan protokol kesehatan, baik di kapal, kantor pusat maupun kantor cabang. Penumpang diwajibkan untuk mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan agar dapat ikut berlayar dengan kapal PT PELNI (Persero). Proses transaksi pembelian tiketpun sudah diharuskan dengan menggunakan *cashless*. Untuk kegiatan operasional di kantor pusat pun sudah menerapkan metode *Work From Home* (WFH) & *Work From Office* (WFO) yang sudah disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan Perseroan juga telah menyediakan aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang proses-proses kegiatan WFH & WFO.

The Company had applied health protocol onboard the ship, head office and branch. All passengers are required to comply to the terms and conditions so that they may onboard the ships of PT PELNI (Persero). Cashless transactions is required to all ticket purchase transaction. Operational activities in the head office are implementing Work From Home (WFH) & Work From Office (WFO) method that is adjusted according to the assigned schedule. The Company also provide applications to support activities process of WFH & WFO.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATION OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya.

An operating segment is a component of an entity engaged in business activities of which it may earn revenues and incur expenses that operating results are regularly reviewed by the entity's operating decision-maker to take the decisions about resources allocated to the segment and value of its performance.

Untuk tujuan manajemen, Grup terbagi menjadi dua segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

For management purposes, these Groups are divided into two operating segments based on its products and services which independently managed by its responsible segment managers for the performance of each segment. These segment managers report directly to the management that regularly reviews the operating results as a basis for allocating resources to each of the segments and to assess segment performance.

PELNI membagi segmen usaha menjadi 2 (dua) segmen, yakni :
1. Segmen Penugasan;
2. Segmen Non Penugasan;

PELNI business segments divided 2 (two), among others:
1. Assignment segment;
2. Non Assignment segment;

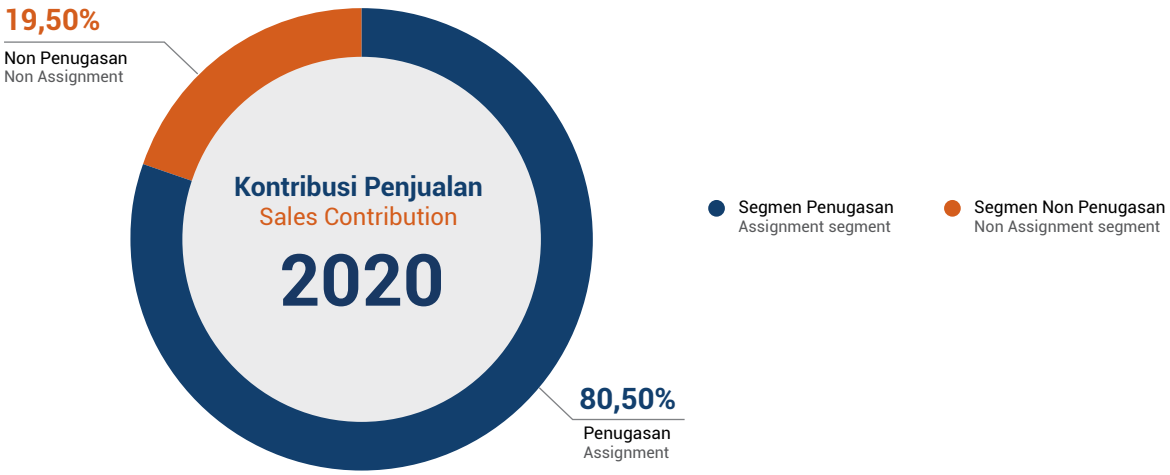
Kinerja Segmen Usaha PT PELNI (Persero) Tahun 2020
Business Segment Performance of PT PELNI (Persero) in 2020

Segmen Usaha Business Segment	2020	2019	Pertumbuhan Growth		Kontribusi Contribution
			Nilai Amount	%	
Penugasan Assignment	3.354.143	3.984.238	(630.095)	(15,81%)	80,50%
Non Penugasan Non Assignment	812.483	1.559.992	(747.509)	(47,92%)	19,50%
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenue	**4.166.626**	**5.544.230**	**(1.377.604)**	**(24,85%)**	**100,00%**

dalam Rp juta | in Rp million

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATION OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Konstribusi Pendapatan Usaha Berdasarkan Segmen Usaha PT PELNI (Persero) Tahun 2020
Net Operating Contribution Based On Business Segment PT PELNI (Persero) in 2020



SEGMEN USAHA PENUGASAN
Pendapatan segmen usaha penugasan merupakan kompensasi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation - PSO*) dan subsidi meliputi:

1. Angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi;
2. Kegiatan pengoperasian kapal ternak;
3. Angkutan barang di laut (Tol laut);
4. Kapal perintis milik negara; dan
5. Kapal rede.

ASSIGNMENT BUSINESS SEGMENT
Revenue from Assignment business segment is compensation received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Transportation - Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) and subsidies assignments including:

1. Sea Freight for Economy Class Passengers;
2. Activities of Operation of Livestock Ships;
3. Freight in the Sea (Sea Toll);
4. State owned Pioneer ships; and
5. Rede Ships.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATION OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Jumlah trip dan kompensasi per unit kapal yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Sea Freight for Economy Class Passengers
The number of trips and compensation per unit of ship carrying out the Sea Transport Sector Public Service Obligations for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2020 and 2019 are as follows:

Jumlah Kapal Total Ships	Jumlah Trip Total Voyage		Jumlah Kompensasi (Rp juta) Total Compensation (Rp million)	
	2020	2019	2020	2019
26	440	632	2.193.107	2.130.281

Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak
Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Kapal Ternak tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.544.010.383 (Tahap I) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2020 tanggal 12 November 2019.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Kapal Ternak tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.843.750.000 (Tahap I). dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2019 tanggal 5 Desember 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 dan Rp 5.240.950.000 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03.022.04.1.439454/2019 pada tanggal 15 Agustus 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya.Tahun anggaran 2018 sebesar Rp16.008.262.000. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2018 tanggal 5 Desember 2017.

Tarif penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak tahun anggaran 2020 dan 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak.

Activities of Operation of Livestock Ships
The value of the activity of subsidizing operations of livestock vessel operation year 2019 amounted to Rp5,544,010,383 (phase I). is charged to the Register of Budget (DIPA) registration number: SP DIPA-022.04.1.439454/2020 dated November 12, 2019.

The value of the activity of subsidizing operations of livestock vessel operation year 2019 amounted to Rp4,843,750,000 (phase I). is charged to the Register of Budget (DIPA) registration number: SP DIPA-022.04.1.439454/2019 dated December 5. 2018 state budget of revenue and Expenditure (APBN) year budget 2019 and Rp5,240,950,000 are charged in the Register for implementation of budget (DIPA) revised to 03.022.04.1.439454/2019 on August 15, 2019 state budget of revenues and Expenditure (APBN) year 2019 and its changes. The fiscal year 2018 amounted to Rp16,008,262,000. charged to the Register of budget Implementation (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454/2018 dated December 5, 2017.

Rates implementation of the activities of livestock vessels operating subsidy of fiscal year 2020 and 2019 based on Regulation of the Minister of Transportation Republic of Indonesia Number 109 Year 2018 concerning PM third amendment to the Regulation of the Minister of Communications of the Republic of Indonesia No PM 182 Year 2015 on Freight rates for Ships Operating Subsidies Livestock Event.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATION OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Angkutan Barang di Laut (Tol Laut)
Jumlah trip dan kompensasi per unit kapal dan kode trayek yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Freight in the Sea (Sea Toll)
The number of trips and compensation per unit of ship and route code that carry out the Public Service Transport Obligations in the Sea in the Fiscal Year 2020 and 2019 are as follows:

Jumlah Kapal Total Ships	Jumlah Trip Total Voyage		Jumlah Kompensasi (Rp juta) Total Compensation (Rp million)	
	2020	2019	2020	2019
12	147	89	175.570	103.381

Kapal Perintis Milik Negara
Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik Negara tahun anggaran 2020 sebesar Rp210.405.873.000 termasuk PPN 10%. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2020 tanggal 12 November 2019.

Untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp308.920.000.000. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- 022.04.1.439454/2018 tanggal 5 Desember 2018.

Kapal Rede
Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahap I tahun anggaran 2020 sebesar Rp 24.000.000.000 sudah termasuk PPN yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Nomor SP DIPA-022.04.1.439454/2020 Tanggal 12 November 2019 revisi tanggal 1 Juli 2020. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp38.223.805.809 termasuk PPN 10%. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2019 tanggal 5 Desember 2018.

State Owned Pioneer Ships
The value of the agreement on the implementation of public service activities of pioneering vessels belonging to the State in 2020 fiscal year amounting to Rp210,405,873,000. including 10% VAT. is charged to the Budget Implementation Entry List (DIPA) No : SP DIPA-022.04.1.439454 / 2020 dated November 12. 2019.

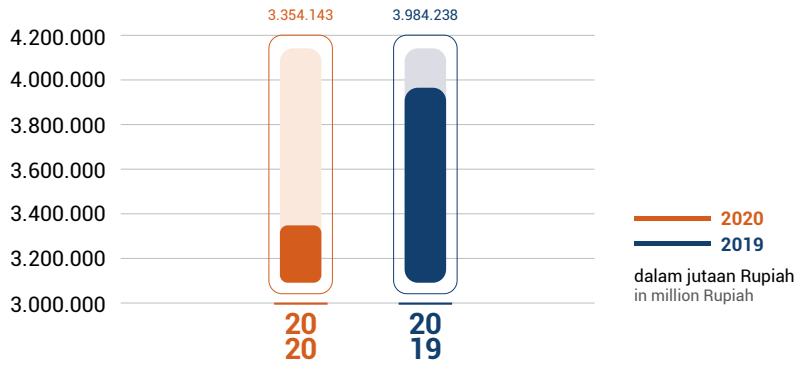
For fiscal year 2019 amounting to Rp308,920,000,000 being charge to Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. : SP DIPA- 022.04.1.439454/2018 dated December 5, 2018.

Rede Ships
The amount of the agreement's port water transportation service activities using State-Owned Ships (Rede Ship) Phase I for the 2020 fiscal year is equal to Rp24,000,000,000 including VAT charged to Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat No. SP DIPA-022.04.1.439454 / 2020 Dated November 12, 2019 revised on July 1, 2020. Fiscal Year 2019 amounting to Rp38,223,805,809 including 10% VAT. charged to Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No.: SP DIPA-022.04.1.439454 / 2019 dated December 5, 2018.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATION OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Pendapatan Segmen Usaha Penugasan
Pendapatan segmen usaha penugasan pada tahun 2020 sebesar Rp3,35 triliun, menurun 15,81% dari pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2019 yang sebesar Rp3,98 triliun. Segmen usaha ini memberikan kontribusi yang besar kepada jumlah pendapatan PT PELNI (Persero) secara keseluruhan, yaitu sebesar 80,50%.

Revenue of Assignment Business Segment
Revenue from the assignment business segment in 2020 was Rp. 3.35 trillion, a decrease of 15.81% from the revenue generated in 2019 which was Rp. 3.98 trillion. This business segment contributes greatly to the total revenue of PT PELNI (Persero) as a whole, which is 80.50%.



Profitabilitas Segmen Usaha Penugasan
Laba kotor yang dihasilkan segmen usaha penugasan pada tahun 2020 adalah sebesar 622,30 miliar, turun 9,09% atau seniliai Rp62,25 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatatat sebesar Rp684,55 miliar. Laba tahun berjalan segmen usaha penugasan tahun 2020 tercatat sebesar Rp364,58 milliar, meningkat 10,36% atau senilai 34,23 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp330,35 miliar.

Profitability of Assignment Business Segment
The gross profit generated by the assignment business segment in 2020 was 622.30 billion, a decrease of 9.09% or Rp. 62.25 billion compared to 2019 which was recorded at Rp. 684.55 billion. Profit for the year of the assignment business segment in 2020 was recorded at Rp364.58 billion, an increase of 10.36% or worth 34.23 billion compared to 2019 which was recorded at Rp330.35 billion.

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nilai Amount	%
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenue	3.354.143	3.984.238	(630.095)	(15,81%)
Beban Pokok Usaha Operating Expense	(2.731.842)	(3.299.684)	567.842	(17,21%)
Laba Kotor Gross Profit	622.300	684.554	(62.254)	(9,09%)
Laba (Rugi Usaha) Operating Profit (Loss)	391.289	389.724	1.565	0,40%
Laba Tahun Berjalan Profit for The Current Year	364.577	330.351	34.226	10,36%

dalam Rp juta | in Rp million

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATION OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

SEGMEN USAHA NON PENUGASAN

Pendapatan segmen usaha non penugasan merupakan pendapatan yang diterima selain daripada kompensasi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation - PSO*) dan subsidi, yang meliputi:

1. Tambang pasasi;
2. Usaha pelayanan kesehatan;
3. Tambang Muatan;
4. Usaha perkapalan lainnya;
5. Usaha perbengkelan;
6. Usaha perhotelan;
7. Usaha keagenan;
8. Usaha wisata bahari;
9. Usaha lifestyle;
10. Usaha penunjang lainnya.

Tambang Pasasi

Tambang Pasasi melaksanakan kegiatan angkutan berupa muatan barang tertentu sesuai spesifikasi yang ditentukan, yang dikelola oleh PT PELNI (Persero) Pusat dimana Pendapatan tambang pasasi sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang pasasi (B60A). Tambang Pasasi terdiri dari Tambang pasasi Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, dan Pasasi Kelas Wisata dan Tambang Pasasi Kelas Ekonomi.

Usaha Pelayanan Kesehatan

Usaha pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan berupa pelayanan jasa kesehatan yang dilaksanakan oleh perusahaan anak PT PELNI (Persero) yakni PT RS PELNI yang berlokasi di Jakarta Barat. Layanan kesehatan yang diberikan oleh RS PELNI diantaranya adalah Konsultasi Dokter, Rawat Jalan serta Rawat inap.

NON ASSIGNMENT BUSINESS SEGMENT

Assignment Revenue is compensation received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Transportation - Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) and subsidies assignments including:

1. Ticketing;
2. Health service business;
3. Cargo;
4. Other shipping business;
5. Workshop business;
6. Hospitality business;
7. Agency business;
8. Maritime tourism business;
9. Lifestyle business;
10. Other supporting business;

Ticketing

Ticketing provides certain types of cargo transport according to the specifications set and managed by PT PELNI (Persero) Head office, where the Pasasi Mining revenues is aligned to the level of service completion on the basis of ticketing revenues' list (B60A). Ticketing consists of Class I, Class II, Class III, Class IV, Tourism and Economy Class.

Health Service Business

Health service business engages activities related to health care services conducted by a subsidiary of PT PELNI (Persero), namely PT RS PELNI located in West Jakarta. Health service provided by RS PELNI covering Consultation with the Doctors, Outpatient and Inpatient.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATION OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Tambang Muatan
Usaha tambang muatan melaksanakan kegiatan angkutan berupa muatan barang tertentu sesuai spesifikasi yang ditentukan, yang dikelola oleh PT PELNI (Persero) Pusat dimana Pendapatan tambang muatan diakui sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang daftar tambang muatan (B60). Tambang muatan terdiri dari Tambang Muatan Palka, Muatan *Dry Container* dan Muatan *Reefer Container*.

Cargo
Cargo provides certain types of cargo transport according to the specifications set and managed by PT PELNI (Persero) Head office where cargo mining revenues is recognized by the level of service completion on the basis of cargo revenues' list (B60). Cargo mining divided into Payload Cargo, Dry Container Cargo and Reefer Container cargo.

Usaha Perkapalan Lainnya
Usaha perkapalan lainnya mencakup usaha pelayanan jasa yang diberikan perseroan dengan beberapa jenis kapal seperti Kapal Perintis yang menyediakan pelayanan transportasi ke bagian-bagian wilayah Republik Indonesia bagian timur. Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

Other Shipping Business
Other shipping business include business services provided by the Company with several types of ships such as pioneer ship that provides transport services for the eastern of Republic of Indonesia. Cattle ships aim to help the government suppress the meat's prices and to improve the welfare of domestic cattle farming.

Usaha Perbengkelan
Usaha perbengkelan adalah jasa pemeliharaan kapal, reparasi kapal yang dilakukan oleh *Strategic Business Unit* PT PELNI (Persero) yakni Galangan "PELNI Surya" yang Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PELNI tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI *Maintenance Facilities* (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin space dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

Workshop business
Workshop business engages in ship maintenance, ship reparation that conducted by Strategic Business Unit of PT PELNI (Persero) namely "PELNI Surya" that has been established since 20 May 1996 and works for PELNI's Vessels of 500 GT type, namely MV. Sangiang, MV. Pangrango, MV. Wilis. This PELNI Maintenance Facilities (PMF) is a strategic projection that can guarantee the dock space and reparation for all ships (including large vessels) operated by PT PELNI (Persero).

Usaha Perhotelan
Usaha perhotelan adalah sewa ruangan wisma yang dilakukan oleh *Strategic Business Unit* PT PELNI (Persero) yakni Hotel Bahtera Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

Hospitality Business
Hospitality business engages in renting rooms of wisma that is conducted by Strategic Business Unit of PT PELNI (Persero) called Bahtera Hotel which is equipped with other supporting hospitality facilities and meeting rooms for a meeting or training center events that can accommodate more than 200 people.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

OPERATION OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Usaha keagenan

Usaha keagenan dan angkutan bandar merupakan salah satu usaha andalan PT PELNI (Persero) yang dimulai sejak tahun 1960 yang meliputi jasa keagenan kapal-kapal baik domestik maupun luar negeri. Jenis kapal yang dioperasikan untuk mendukung segmen usaha ini meliputi: *Clearance in & out; Bunker, Fresh Water, Provision Supply; Crew Attendance; Protecting Agent; Custom Clearance;* Layanan *Sea Pollution;* dan Layanan *Garbage Removal*.

Usaha Wisata Bahari

Salah satu jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan pada segmen jasa keagenan adalah Usaha Wisata Bahari yang menyediakan paket-paket wisata bahari ke berbagai destinasi di tanah air, seperti Kepulauan Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan dan Tomini.

Usaha *Lifestyle*

Usaha lifestyle merupakan salah satu usaha yang baru dikembangkan oleh PT PELNI (Persero) untuk bisnis *lifestyle* untuk komersial seperti *virtual tour onboard,* lomba menggambar dan hiburan lainnya secara online.

Usaha Penunjang Lainnya

Usaha ini memperoleh pendapatan dengan menyediakan jasa penunjang lainnya seperti operasi terminal, pergudangan dan ekspedisi muatan kapal laut. Kegiatan usaha yang juga tercakup di dalam segmen usaha ini adalah penyediaan alternatif terkait Jasa Pengiriman Barang murah ke seluruh kota-kota di Indonesia yang berbentuk Kepulauan. Dengan menggunakan Armada Pelayaran Kapal Laut, setiap pengirim diuntungkan karena dapat melakukan pengiriman barang dalam jumlah tonase dan volume yang besar serta dapat melakukan pengiriman barang yang dilarang melalui jalur cargo udara.

Agency Business

Agency and port carrier business segments are one of core business of PT PELNI (Persero) that has been begun since 1960 covering domestic or overseas ship agencies. The types of ship operated to support these business segments which include: Clearance in & out; Bunker, Fresh Water, Provision Supply; Crew Attendance; Protecting Agent; Custom Clearance; Sea Pollution Service; and Garbage Removal Service.

Maritime Tourism Business

One of services provided by the Company in the agency services segment is marine tourism business that provides marine tourism packages voyaging to various destinations in the Nations. Raja Ampat Islands, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan and Tomini.

Lifestyle Business

Lifestyle business is one of the new business that is developed by PT PELNI (Persero) to cover the commercial side of lifestyle business, such as virtual onboard, drawing competition and other online entertainment.

Other Supporting Business

These business earned income by providing other supporting services such as terminal operations, warehousing and cargo ship expeditions. Other business activities that are also included in these business segments are alternative providers related to cheap cargo delivery services to all cities across Indonesia. By using our fleet, each shipper will receive some benefits for being able to send their goods in a large tonnage and volume and being able to deliver prohibited cargo via air cargo liners.

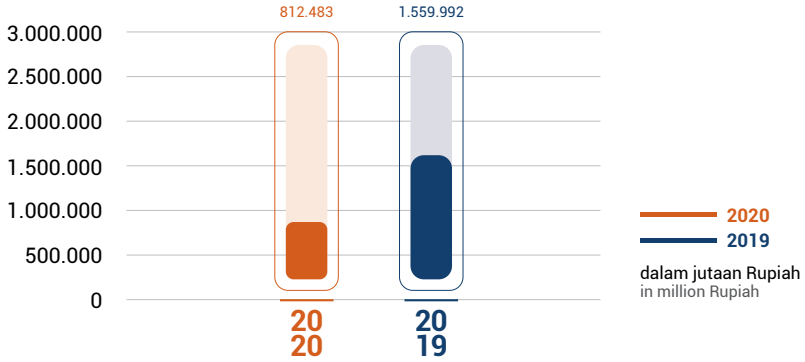
TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATION OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Pendapatan Segmen Usaha Non Penugasan

Pendapatan segmen usaha non penugasan pada tahun 2020 sebesar Rp812,48 miliar, menurun 47,92% dari pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2019 yang sebesar Rp1,56 triliun. Segmen usaha ini memberikan kontribusi sebesar 19,50% kepada jumlah pendapatan PT PELNI (Persero) secara keseluruhan.

Revenue of Non Assignement Business Segment

Revenue from the non-assignment business segment in 2020 amounted to Rp812.48 billion, a decrease of 47.92% from the revenue generated in 2019 which was Rp1.56 trillion. This business segment contributed 19.50% to the total revenue of PT PELNI (Persero) as a whole.



Profitabilitas Segmen Usaha Non Penugasan

Rugi kotor yang dihasilkan segmen usaha non penugasan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp203,17 miliar, turun 344,61% dibandingkan tahun 2019, yang mencatatkan laba kotor sebesar Rp83,06 miliar. Rugi tahun berjalan segmen usaha non penugasan tahun 2020 tercatat sebesar Rp333,61 miliar meningkat 123,01% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp149,60 miliar.

Profitability of Non Assignement Business Segment

The gross loss generated by the non-assignment business segment in 2020 was Rp203.17 billion, a decrease of 344.61% compared to 2019, which recorded a gross profit of Rp.83.06 billion. The current year's loss for the non-assigned business segment in 2020 was recorded at Rp333.61 billion, an increase of 123.01% compared to 2019 which was recorded at Rp149.60 billion.

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nilai Amount	%
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenue	812.483	1.559.992	(747.509)	(47,92%)
Beban Pokok Usaha Operating Expense	(1.015.654)	(1.476.933)	461.279	(31,23%)
Laba Kotor Gross Profit	(203.171)	83.059	(286.230)	(344,61%)
Laba (Rugi Usaha) Operating Profit (Loss)	(405.620)	(211.433)	(194.187)	91,84%
Laba Tahun Berjalan Profit for The Current Year	(333.610)	(149.596)	(184.014)	123,01%

dalam Rp juta | in Rp million

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
COMPANY'S FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT PELNI (Persero) dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo.

Laporan tersebut telah memperoleh opini "Wajar" dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PELNI (Persero) dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bahasan kinerja keuangan PT PELNI (Persero) dan Entitas Anaknya disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Bahasan serta analisis tentang kondisi keuangan ini disajikan dalam empat bagian sebagai berikut:
- Kinerja Posisi Keuangan Konsolidasian;
- Kinerja Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian;
- Kinerja Arus Kas Konsolidasian; dan
- Kinerja Rasio Keuangan.

This Management Analysis and Discussion is based on information obtained from the Consolidated Financial Statements of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries for the year ended December 31, 2020 and the year ended December 31, 2019 that has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin &Sumargo.

The report has obtained unqualified opinion in all material aspects, the consolidated financial position of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries by 31st December 2020, and the consolidated financial and cash flows performances for the year ended on that date have met the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

Discussion on this financial performance of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries was taking the explanation in the notes of the Consolidated Financial Statements into consideration which are an inseparable part of this Annual Report.

The discussion and analysis of this financial condition is presented in four sections as follows:
- Performance of Consolidated Financial Position;
- Performance of Consolidated Profit and Loss and Comprehensive Income;
- Performance of Consolidated Cash Flow; and
- Performance of Financial Ratios.



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
REPORT OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

Posisi keuangan secara konsolidasian per 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa total aset dan total ekuitas Perusahaan mengalami peningkatan masing-masing tumbuh sebesar 2,72% dan 5,88% sedangkan total liabilitas mengalami penurunan sebesar 15,72% yang disebabkan oleh menurunnya utang usaha, utang pajak dan utang bank di 2020.

The consolidated financial position as of December 31, 2020 shows that the Company's total assets and total equity grew by 2.72% and 5.88% respectively while total liabilities decreased by 15.72% as a result of the decrease in account payable, tax payable and bank loan in 2020.

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Aset Lancar Current Assets	3.777.477	3.242.483	534.994	16,50%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	3.475.562	3.818.799	(343.237)	(8,99%)
Jumlah Aset Total Asset	**7.253.039**	**7.061.282**	**191.757**	**2,72%**
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	647.668	774.741	(127.073)	(16,40%)
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	224.775	260.467	(35.692)	(13,70%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**872.443**	**1.035.208**	**(162.765)**	**(15,72%)**
Jumlah Ekuitas Total Equity	6.380.595	6.026.073	354.522	5,88%
Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity	**7.253.039**	**7.061.282**	**191.757**	**2,72%**

dalam Rp juta | in Rp million

Aset

Nilai aset PT PELNI (Persero) mengalami kenaikan pada aset lancar sebesar 16,50% sedangkan aset tidak lancar menurun sebesar 8,99%. Nilai aset lancar tahun 2020 adalah sebesar Rp3,78 triliun dan nilai aset tidak lancar adalah sebesar Rp3,48 triliun. Komposisi Aset Perusahaan di 2020 terdiri dari 52,08% aset lancar dan 47,92% aset tidak lancar.

Assets

Asset Value of PT PELNI (Persero) increased in current assets by 16.50% while non-current assets decreased by 8.99%. The current asset value in 2020 was Rp3.78 trillion and the value of non-current assets was Rp3.48 trillion. The Composition of Company's Assets in 2020 consists of 52.08% of current assets and 47.92% of non-current assets.

Uraian Description	2020	Komposisi Composition	2019	Komposisi Composition	Pertumbuhan Growth	
					Nominal	%
Aset Lancar Current Assets	3.777.477	52,08%	3.242.483	45,92%	534.994	16,50%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	3.475.562	47,92%	3.818.799	54,08%	(343.237)	(8,99%)
Jumlah Aset Total Asset	**7.253.039**	**100%**	**7.061.282**	**100%**	**191.757**	**2,72%**

dalam Rp juta | in Rp million

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
REPORT OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

Aset Lancar

Aset lancar Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3,78 triliun, nilai ini meningkat sebesar 16,50% atau senilai dengan Rp534,99 miliar jika dibandingkan dengan nilai aset lancar pada periode yang sama tahun 2019 yang sebesar Rp3,24 triliun.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan kas dan setara kas pada tahun 2020 berkontribusi dalam naiknya nilai aset lancar pada tahun 2020, dimana jumlah kas dan setara kas pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2,28 triliun, kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya jumlah deposito milik Perseroan dan entitas anak.

- Kenaikan piutang usaha juga mempengaruhi naiknya total aset Perseroan pada tahun 2020, nilai piutang usaha pada tahun 2020 adalah sebesar Rp281,18 miliar, naik 20,94% atau senilai Rp48,68 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Current Assets

The Company's current assets as of December 31, 2020 reached to Rp3.78 trillion, an increase of 16.50% or Rp534.99 billion compared to the current asset value in the same period in 2019 which was Rp3.24 trillion.

This increase was mainly due to:

- The increase in cash and cash equivalents in 2020 contributed to the increase in the value of current assets in 2020, where the amount of cash and cash equivalents at December 31, 2020 was Rp2.28 trillion, an increase mainly due to the increase in the number of deposits owned by the Company and its subsidiaries.
- The increase in trade receivables also influenced the increase in the Company's total assets in 2020, the value of trade receivables in 2020 was Rp281.18 billion, an increase of 20.94% or Rp48.68 billion compared to the previous year.

Uraian Description	2020	Komposisi Composition	2019	Komposisi Composition	Pertumbuhan Growth	
					Nominal	%
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalent	2.284.861	31,50%	1.666.914	23,61%	617.947	37,07%
Piutang Usaha Account Receivables	281.167	3,88%	232.488	3,29%	48.679	20,94%
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	666.495	9,19%	761.807	10,79%	(95.312)	(12,51%)
Persediaan Inventories	436.431	6,02%	445.747	6,31%	(9.316)	(2,09%)
Pajak dibayar dimuka Prepaid Taxes	25.631	0,35%	43.760	0,62%	(18.129)	(41,43%)
Uang Muka Advances Payment	48.902	0,67%	55.473	0,79%	(6.571)	(11,85%)
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	33.988	0,47%	36.291	0,51%	(2.303)	(6,35%)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**3.777.475**	**52,08%**	**3.242.480**	**45,92%**	**534.995**	**16,50%**

dalam Rp juta | in Rp million

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
REPORT OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

Aset Tidak Lancar

Perseroan membukukan jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3,47 triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang bernilai Rp3,82 triliun penurunan yang terjadi sebesar 8,99% atau sebesar Rp343,24 miliar.

Perubahan nilai aset tidak lancar dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Menurunnya nilai properti investasi dari Rp262,31 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp122,38 miliar di tahun 2020 ini, disebabkan karena Perseroan melakukan pengurangan nilai sebesar Rp153,94 miliar. Pengurangan nilai Property Investasi pada Tahun 2020 merupakan Properti Investasi milik PT RS PELNI yang telah dilakukan Divestasi oleh Perseroan pada 31 Maret 2020.
- Pada periode Maret 2020 perseroan menjual mayoritas saham PT RS PELNI sehingga perseroan tidak lagi mengonsolidasikan PT RS PELNI. Hal ini berdampak pada pencatatan Alat Produksi yang berkurang cukup signifikan senilai Alat Produksi milik PT RS PELNI.

Non-Current Assets

The Company booked the total non-current assets as of December 31, 2020 to Rp3.47 trillion, a decrease compared to 2019 which was worth at Rp3.82 trillion, decreased by 8.99% or Rp343.24 billion.

The changes in noncurrent assets value was due to:

- The decrease in the value of investment properties from Rp262.31 billion in 2019 to Rp122.38 billion in 2020 is due to the Company's reduction in value of Rp153.94 billion. The reduction in the value of Investment Property in 2020 is an Investment Property owned by PT RS PELNI that has been divested by the Company on March 31, 2020.
- In the period of March 2020 the company sold the majority shares of PT RS PELNI, so that the company no longer consolidates PT RS PELNI.This has an impact on the recording of Production Equipment which is significantly reduced by the value of Production Equipment belonging to PT RS PELNI.

Uraian Description	2020	Komposisi Composition	2019	Komposisi Composition	Pertumbuhan Growth	
					Nominal	%
Investasi Pada Entitas Asosiasi Investment in Assosiate	159.910	2,20%	-	-	159.910	100%
Properti Investasi Investment Properties	122.382	1,69%	262.311	3,71%	(139.929)	(53,34%)
Alat Produksi Production Equipment	2.747.319	37,88%	3.004.629	42,55%	(257.310)	(8,56%)
Aset Tetap Fixed Assets	362.950	5,00%	495.416	7,02%	(132.466)	(26,74%)
Aset Tak berwujud Intangible Assets	20.019	0,28%	20.951	0,30%	(932)	(4,45%)
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-current Assets	442	0,01%	231	0,00%	211	91,34%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	58.025	0,80%	35.258	0,50%	22.767	64,57%
Aset Hak Guna Right of Use Assets	4.510	0,06%	-	-	4.510	100%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non Current Assets	**3.475.562**	**47,92%**	**3.818.799**	**54,08%**	**(343.237)**	**(8,99%)**

dalam Rp juta | in Rp million

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
REPORT OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

Liabilitas

Total Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 15,72% dari Rp1,04 triliun per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp872,44 miliar per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan perseroan menjual mayoritas saham PT RS PELNI sehingga Perseroan tidak lagi mengkonsolidasi utang milik PT RS PELNI. Menurunnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, masing-masing sebesar 16,40% dan 13,70%. Komposisi liabilitas Perusahaan di 2020 terdiri dari 74,24% liabilitas jangka pendek dan 25,75% liabilitas jangka panjang.

Liabilities

The Company's total liabilities decreased by 15.72% from Rp1.04 trillion as of December 31, 2019 to Rp872.44 billion as of December 31, 2020. This decrease was mainly due to the company sold its majority shares in PT RS PELNI so that PT PELNI (Persero) doesn't have to consolidate PT RS PELNI's account payable. Decreased short-term liabilities and long-term liabilities by 16.40% and 13.70% respectively. The composition of the Company's liabilities in 2020 consisted of 74.24% of short-term liabilities and 25.75% of long-term liabilities.

Uraian Description	2020	Komposisi Composition	2019	Komposisi Composition	Pertumbuhan Growth	
					Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	647.668	74,24%	774.741	74,84%	(127.073)	(16,40%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	224.776	25,76%	260.468	25,16%	(35.692)	(13,70%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**872.444**	**100%**	**1.035.209**	**100%**	**(162.765)**	**(15,72%)**

dalam Rp juta | in Rp million

Liabilitas Jangka Pendek

Nilai liabilitas jangka pendek Perseroan di tahun 2020 adalah sebesar Rp647,67 miliar turun sebesar 16,40% dari Rp744,74 miliar per tanggal 31 Desember 2019. Penurunan pada liabilitas jangka pendek dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

- Menurunnya akun bagian lancar atas utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang secara signifikan menjadi salah satu penyebab utama menurunnya liabilitas jangka pendek tahun 2020. Dengan tingkat penurunan sebesar 91,90% atau senilai Rp108,96 miliar menjadi Rp9,59 miliar ditahun 2020 dari Rp118,56 miliar di tahun 2019.
- Utang usaha mengalami penurunan sebesar 48,64% dari Rp190,08 miliar di tahun 2019 menjadi Rp97,62 miliar di tahun 2020.

Current Liabilities

The Company's short-term liabilities in 2020 reached to Rp647,67 billion, decreased by 16.40% from Rp744,74 billion as of December 31, 2019. The decrease in short-term liabilities is further detailed as follows:

- The decline in current accounting for bank and long-term financial institution debt is significantly one of the main causes of the decline in short-term liabilities in 2020. With a decrease rate of 91,90% or rp108,96 billion to Rp9,59 billion in 2020 from Rp118,56 billion in 2019.
- Account Payable decreased by 48.64% from Rp190.08 billion in 2019 to Rp97.62 billion in 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
REPORT OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

Walaupun liabilitas jangka pendek mengalami penurunan secara signifikan, namun pada akun beban akrual ditahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 35,34% atau sebesar Rp97,46 miliar dari Rp275,77 miliar ditahun 2019 meningkat menjadi Rp373,23 miliar ditahun 2020.

Although short-term liabilities decreased significantly, accrued expenses accounted for in 2020 increased by 35.34% or Rp97.46 billion from Rp275.77 billion in 2019 to Rp373.23 billion in 2020.

Uraian Description	2020	Komposisi Composition	2019	Komposisi Composition	Pertumbuhan Growth	
					Nominal	%
Utang Usaha Account Payable	97.619	11,19%	190.082	18,36%	(92.463)	(48,64%)
Beban Akrual Accrued Expenses	373.233	42,78%	275.769	26,64%	97.464	35,34%
Utang Pajak Tax Payable	24.174	2,77%	49.126	4,75%	(24.952)	(50,79%)
Bagian Lancar atasUtang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang Current Portion of Financial Institution and Bank Loan	9.599	1,10%	118.557	11,45%	(108.958)	(91,90%)
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Short Term Financial Liabilities	79.811	9,15%	73.206	7,07%	6.605	9,02%
Liabilitas Hak Guna Lease Liabilities	4.140	0,47%	-	-	4.140	100%
Liabilitas Kontrak Contract Liability	59.089	6,77%	67.997	6,57%	(8.908)	(13,10%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**647.665**	**74,24%**	**774.737**	**74,84%**	**(127.072)**	**(16,40%)**

dalam Rp juta | in Rp million

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang turun sebesar 13,70% menjadi Rp224,77 miliar per tanggal 31 Desember 2020 dari Rp260,47 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan pada liabilitas jangka panjang dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

- Penurunan liabilitas utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang sebesar 94,04% atau senilai 55,82 miliar memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penurunan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun 2020. Sehingga nilai liabilitas utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang pada tahun 2020 menjadi Rp3,54 miliar dari Rp59,36 miliar pada tahun sebelumnya.

Non-Current Liabilities

Long-term liabilities decreased by 13.70% to Rp224.77 billion as of December 31, 2020 from Rp260.47 billion in the same period in the previous year. The deflasion in long-term liabilities is further detailed as follows:

- A decrease in long-term bank and financial institution debt liabilities was 94,04% or 55.82 billion contributed significantly to the company's long-term liabilities decline in 2020. Therefore, the value of long-term debt liabilities of banks and financial institutions in 2020 will be Rp3.54 billion from Rp59.36 billion in the previous year.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
REPORT OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

Uraian Description	2020	Komposisi Composition	2019	Komposisi Composition	Pertumbuhan Growth	
					Nominal	%
Utang Non Usaha Jangka Panjang Long Term Non Operating Payables	33.287	3,82%	25.054	2,42%	8.233	32,86%
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang Long Term Financial Institution and Bank Loan	3.537	0,41%	59.358	5,73%	(55.821)	(94,04%)
Liabilitas imbalan Paska Kerja Jangka Panjang Long Term Employee Benefits	187.102	21,45%	176.055	17,01%	11.047	(6,27%)
Liabilitas Hak Guna Jangka Panjang Non-Current Portion Lease Liabilities	848	0,10%	-	-	848	100%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non- current Liabilities	224.774	25,76%	260.467	25,16%	(35.693)	(13,70%)

dalam Rp juta | in Rp million

Ekuitas

Total ekuitas Perseroan naik sebesar 5,88% dari Rp6,02 triliun per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp6,38 triliun per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya dana cadangan sebesar Rp205,11 miliar atau naik 22,98% yang menjadi Rp1,09 triliun pada tahun 2020. Dana cadangan merupakan cadangan yang dibentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari laba setelah pajak yang belum ditentukan peruntukannya.

Equity

The Company's total equity increased by 5.88% from Rp6.02 trillion as of December 31, 2019 to Rp6.38 trillion as of December 31, 2020. This increase was due to an increase in reserve funds of Rp205.11 billion or an increase of 22.98% to Rp1.09 trillion in 2020. Reserve fund is a reserve formed based on the General Meeting of Shareholders from unspecified profit after tax.

Uraian Description	2020	Komposisi Composition	2019	Komposisi Composition	Pertumbuhan Growth	
					Nominal	%
Modal saham Share Capital	7.629.900	119,58%	7.629.900	2,42%	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Government Equity	143	0,00%	143	5,73%	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional paid in Capital	397.878	6,24%	-	-	397.878	100%
Cadangan Reserves	1.097.752	17,20%	892.643	14,81%	205.109	22,98%
Saldo Rugi (Defisit) Retained Earnings (Defisits)	(2.623.468)	(41,12%)	(2.427.746)	(40,29%)	(195.722)	8,06%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Component Equity	(124.433)	(1,95%)	(71.872)	(1,19%)	(52.561)	73,13%
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Total equity attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	6.377.772	99,96%	6.023.068	99,95%	354.704	5,89%
Kepemilikan non-pengendali Non-controlling Interest	2.823	0,04%	3.005	0,05%	(182)	(6,06%)
Jumlah Ekuitas Total equity	**6.380.595**	**100,00%**	**6.026.073**	**100,00%**	**354.522**	**5,88%**

dalam Rp juta | in Rp million

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

REPORT OF CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha Operating Revenue	4.167.427	5.547.751	(1.380.324)	(24,88%)
Reduksi Pendapatan Usaha Reduction in Operating Revenues	(801)	(3.521)	2.720	(77,25%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenue	4.166.626	5.544.230	(1.377.604)	(24,85%)
Beban Pokok Usaha Operating Expenses	3.747.496	4.776.617	(1.029.121)	(21,54%)
Laba Kotor Gross Profit	419.128	767.613	(348.485)	(45,40%)
Beban Pemasaran dan Distribusi Distribution and Marketing Expenses	23.060	28.189	(5.129)	(18,20%)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	410.399	561.132	(150.733)	(26,86%)
Laba Usaha Operating Profit	(14.331)	178.292	(192.623)	(108,04%)
Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih Non Operating Income, (Expense) Net	94.403	114.313	(19.910)	(17,42%)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	80.072	292.605	(212.533)	(72,63%)
Beban Pajak Tax Expenses	(49.105)	(111.849)	62.744	(56,10%)
Jumlah Beban Pajak Total Tax Expenses	(49.105)	(111.849)	62.744	(56,10%)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Current Year	30.967	180.755	(149.789)	(82,87%)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income				
Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Items That Will Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss:				
Entitas Asosiasi Share from Associate	(298)	-	(298)	-
Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss:				
Kerugian Aktuarial Periode Berjalan Actuarial loss Current Period	(27.472)	(40.488)	13.016	(32,15%)
Perubahan nilai wajar Properti Investasi Change on Revaluation of Property Investment	9.780	73.371	(63.591)	(86,67%)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income of The Year	12.977	213.639	(200.662)	(93,93%)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit for The Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	30.737	180.134	(149.397)	(82,94%)
Kepemilikan Non Pengendali Non Controlling Interest	229	620	(391)	(63,06%)
Laba Tahun Berjalan Profit for Current Year	30.966	180.754	(149.788)	(82,87%)
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income Attributable to:				

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

REPORT OF CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	12.977	213.017	(200.040)	(93,91%)
Kepemilikan Non Pengendali Non Controlling Interest	(1)	620	(621)	(100,16%)
Jumlah Laba Komprehensif Total Comprehensive Income	12.976	213.638	(200.662)	(93,93%)
Laba Bersih Per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Basic Earnings Per Share	4.058,59	23.690,35	(19.632)	(82,87%)

dalam Rp juta | in Rp million

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp4,17 triliun mengalami penurunan 24,88% jika dibandingkan dengan pendapatan di 2019 yaitu sebesar Rp5,55 triliun. Penurunan pendapatan usaha pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh PT PELNI (Persero) menjual mayoritas saham pada PT RS PELNI sehingga Perseroan tidak lagi mengonsolidasikan PT RS PELNI. Sehingga pendapatan dalam pelayanan kesehatan tidak lagi tercatat dalam pendapatan usaha, yang menyebabkan turunnya pendapatan usaha tahun 2020. Penurunan yang terjadi secara signifikan juga terdapat pada usaha wisata bahari, dimana tidak tercatat adanya nilai karena dampak dari covid-19 yang melanda secara global. Pendapatan dari usaha penunjang lainya mengalami peningkatan sebesar 12,37% dari tahun sebelumnya.

Operating Revenues

Operating income in 2020 was recorded at Rp4.17 trillion, a decrease of 24.88% when compared to revenue in 2019 of Rp5.55 trillion. The decrease in operating income in 2020 was due to PT PELNI (Persero) sold its majority share in PT RS PELNI as the impact of Covid-19 Pandemic so that the company no longer consolidates PT RS PELNI. So that revenue in health care is no longer recorded in business income, which leads to a decrease in business income in 2020. The significant decline is also found in marine tourism businesses, where there is no recorded value due to the impact of covid-19 that hit globally. Revenue from other supporting businesses increased by 12.37% from the previous year.

Reduksi Pendapatan Usaha

Reduksi pendapatan usaha adalah diskon atau potongan tarif penumpang atau muatan. Reduksi pendapatan usaha Perusahaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp801 juta atau menurun 77,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,52 miliar.

Reduction in Operating Revenue

Reduction in operating revenue is a discount or discount on passenger fares or cargo. The reduction in the Company's operating income in 2020 was Rp801 million or decreased by 77.25% compared to the previous year that was Rp3.52 billion.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

REPORT OF CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih merupakan perolehan pendapatan usaha setelah dikurangi reduksi pendapatan usaha. Pada tahun 2020, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp4,17 triliun yang dimana turun sebesar Rp1,37 triliun atau 24,85% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp5,54 triliun. Hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan usaha tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.

Net Operating Revenue

Net operating income is the acquisition of operating income after deducting the reduction of operating income. In 2020, the Company booked a net income at Rp4.17 trillion which decreased by Rp1.37 trillion or 24.85% compared to 2019 which was Rp5.54 trillion. This is due to the decrease in business revenue in 2020 due to the impact of Covid-19 pandemic.

Beban Pokok Usaha

Secara keseluruhan beban pokok usaha Perseroan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 21,55%. Beban usaha turun sebesar Rp1,03 triliun menjadi Rp3,75 triliun dari Rp4,77 triliun.

Operating Expeneses

Overall, the Company's operating expenses in 2020 decreased by 21.55%. Operating expenses decreased by Rp1.03 trillion to Rp3.75 trillion from Rp4.77 trillion.

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Perkapalan Shipping	1.332.862	1.554.616	(221.754)	(14,26%)
Pegawai Employee	871.249	940.675	(69.426)	(7,38%)
Pemeliharaan dan Perbaikan Maintenance and Repair	477.506	698.318	(220.812)	(31,62%)
Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization	378.429	375.945	2.484	0,66%
Penumpang Passenger	286.163	388.547	(102.384)	(26,35%)
Pelayanan Kesehatan Health Services	-	396.069	(396.069)	(100%)
Asuransi Insurance	53.395	52.002	1.393	2,68%
Muatan Ternak Livestock Cargo	28.378	23.373	5.005	21,41%
Kendali Mutu Pelayanan Quality Service Control	10.601	10.623	(22)	(0,21%)
Perbengkelan Workshop	9.438	7.278	2.160	29,68%
Perhotelan Hospitality	2.314	3.086	(772)	(25,02%)
Sewa Rent	1.623	1.199	424	35,36%
Pajak dan Retribusi Taxes and Levies	40	86	(46)	(53,49%)
Beban Pokok Lainnya Other Cost of Revenues	295.492	324.794	(29.302)	(9,02%)
Jumlah Total	3.747.497	4.776.617	(1.029.120)	(21,55%)

dalam Rp juta | in Rp million

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

REPORT OF CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME

Turunnya beban pokok usaha Perseroan pada tahun 2020 terutama disebabkan beberapa hal, diantaranya:

- Komponen beban pokok usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah pelayanan kesehatan, dimana pada tahun 2019 mencatatatkan pendapatan sebesar Rp396,07 namun di tahun 2020 ini perseroan tidak mencatat adanya beban pokok usaha dari pelayanan kesehatan.
- Beban penumpang juga memberikan kontribusi atas turunnya Beban pokok usaha pada tahun 2020, dimana beban penumpang mencatatkan penurunan sebesar Rp102,38 miliar atau turun 26,35% menjadi sebesar Rp286,16 miliar dari Rp388,55 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatya Covid-19 yang terjadi secara global.

Laba Kotor

Jumlah laba kotor per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp348,49 miliar atau turun 45,40% menjadi sebesar Rp419,13 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp767,61 miliar.

Laba Usaha

Laba usaha tahun 2020 Perseroan mencatatkan kerugian sebesar 14,33 miliar atau turun 108,04%. Menurunnya pendapatan periode ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 sehingga berdampak signifikan pendapatan usaha dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Non Usaha – Bersih

Perseroan mencatat pendapatan non usaha bersih sebesar Rp94,40 miliar, jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp19,91 miliar atau turun 17,42% jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan non usaha bersih yang diperoleh tahun sebelumnya yang sebesar Rp178,29 miliar.

The decrease of the Company's operating expenses in 2020 is mainly due to several factors, including:

- The component of the cost of business that experienced the biggest decrease is health services, where in 2019 recorded revenues at Rp396.07 but in 2020 the company did not record any cost of business from the health service.

- Passenger expenses also contributed to the decrease in operating expenses in 2020, where passenger expenses recorded a decrease of Rp102.38 billion or decreased by 26.35% to Rp286.16 billion from Rp388.55 billion in the previous year. This is due to the increase in Covid-19 occurring globally.

Gross Profit

Total gross profit as of December 31, 2020 decreased by Rp348.49 billion or decreased by 45.40% to Rp419.13 billion compared to the previous year of Rp767.61 billion.

Operating Profit

Operating profit in 2020 the Company recorded a loss of Rp14.33 billion or decreased by 108.04%. The revenue reduction on this period was due to the pandemic that made significant impact on operating profit compared to the previous year.

Non Operating Income - Net

The Company recorded net non-operating income of Rp94.40 billion, this amount decreased by Rp19.91 billion or decreased by 17.42% when compared to the total non-net non-operating income obtained in the previous year of Rp178.29 billion.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

REPORT OF CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME

Pendapatan non usaha – bersih adalah keuntungan nilai wajar aset non keuangan yang merupakan kenaikan perubahan nilai wajar properti investasi tanah dan gedung, serta Pemulihan iuran program dana pensiun merupakan kelebihan iuran program manfaat pasti dana pensiun yang telah dibayarkan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya berdasarkan perhitungan aktuaria.

Non operating Income - Net is the fair value gained from nonfinancial assets which is a changes increasing in the fair value of property investment in land and buildings, and pension fund recovery contribution is the excess contribution from the defined benefit of pension plan paid by the Company compared to the the obligation based on actuarial calculations.

Laba Sebelum Pajak

Pada tahun 2020, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp80,07 miliar, jumlah ini mengalami penurunan 72,63% atau senilai Rp212,53 miliar jika dibandingkan dengan jumlah laba sebelum pajak tahun 2019 yang sebesar Rp292,60 miliar.

Profit Before Tax

In 2020, the Company posted a pre-tax profit of Rp80.07 billion, this amount decreased by 72.63% or Rp212.53 billion when compared to the total profit before tax in 2019 of Rp292.60 billion.

Jumlah Beban Pajak

Beban pajak yang yang dicatat Perseroan sepanjang tahun 2020 adalah sebesar Rp49,11 miliar menurun 56,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp111,85 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya beban pajak baik beban pajak final, beban pajak tangguhan serta beban pajak kini baik di entitas anak maupun induk.

Total Tax Expenses

The tax expense recorded by the Company during 2020 amounted to Rp49.11 billion decreased by 56.10% compared to the previous year was Rp111.85 billion. This decrease is mainly attributable to the decrease in tax burden both final tax burden, deferred tax burden and current tax burden in both subsidiaries and parent entities.

Laba Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2020, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp30,97 miliar, menurun sebesar Rp149,79 miliar atau turun 82,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp180,75 miliar.

Profit for the Current Year

As of December 31, 2020, the Company posted a profit for the current year of Rp30.97 billion, a decrease of Rp149.79 billion or a decrease of 82.87% compared to the previous year was Rp180.75 billion.

Laba Komprehensif

Laba komprehensif yang berhasil diperoleh Perusahaan adalah sebesar Rp12,98 miliar, jumlah ini mengalami penurunan 25,87% atau senilai Rp200,66 miliar dari tahun 2019 yang sebesar Rp213,64 miliar.

Comprehensive Income

Comprehensive income obtained by the Company was Rp12.98 billion, this amount decreased by 25.87% or Rp200.66 billion from 2019 which was Rp213.64 billion.

Laba Bersih Per Saham

Perseroan berhasil mencatatkan laba bersih per saham pada tahun 2020 sebesar Rp4.058,59 nilai ini menurun 82,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp23.690,35.

Earnings per Share

The Company managed to record net income per share in 2020 at Rp4,058.59 this value decreased by 82.87% compared to the previous year which was Rp23,690.35.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
REPORT OF CONSOLIDATED CASH FLOWS

Per 31 Desember 2020 Perseroan mencatat kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar Rp612,43 miliar, meningkat 1318,48% dibandingkan kenaikan bersih kas dan setara kas tahun 2019, yang tercatat mengalami penurunan sebesar Rp50,26 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya Arus kas dari aktivitas investasi 212,47% dan naiknya arus kas bersih dari aktivitas operasi 1,90% walau mengalami penurunan pada arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 91,85%.

As of December 31, 2020, the Company recorded a net increase in cash and cash equivalents at Rp612,43 billion, increased by 1.318.48% compared to the net increase in cash and cash equivalents in 2019, which recorded a decrease of Rp50.26 billion. The increase was due to an increase in cash flow from investment activities by 212.47% and an increase in net cash flow from operating activities by 1.90% despite a decrease in net cash flow from funding activities by 91.85%.

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows from Operating Activities	240.306	235.833	4.473	1,90%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flows from Investment Activities	368.723	(327.829)	696.552	(212,47%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows from Financing Activities	3.403	41.734	(38.331)	(91,85%)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas Net Increase (Decrease In Cash And Cash Equivalent	612.432	(50.262)	662.694	(1318,48%)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun Beginning Balance Cash And Cash Equivalent	1.839.520	1.889.782	(50.262)	(2,66%)
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun Ending Balance Cash And Cash Equivalent	2.451.952	1.839.520	612.432	33,29%

dalam Rp juta | in Rp million

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp240,31 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp235,83 miliar. Kenaikan Arus kas bersih dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan penurunan penerimaan kas dan pernurunan nilai pembayaran dari beberapa aktivitas operasi Perseroan, yaitu:

- Penerimaan Kas dari pelanggan mengalami penurunan 48,01% atau sebesar Rp1,17 triliun menjadi sebesar Rp1,27 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp2,44 Triliun.

Cash Flows from Operating Activities

The Company's net cash flow from operating activities increased in 2020 to Rp240.31 billion compared to the previous year which was Rp235.83 billion. The increase in net cash flow from operating activities was primarily attributable to the decrease in cash receipts and decrease payments from some of the Company's operating activities, namely:

- Cash receipts from customers decreased by 48.01% or as much as Rp1.17 trillion to Rp1.27 trillion compared to Rp2.44 trillion in 2019.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
REPORT OF CONSOLIDATED CASH FLOWS

- Penerimaan Public Service Obligation & Subsidi meningkat sebesar Rp116,38 miliar atau 4,35% menjadi Rp2,79 triliun pada tahun 2020 dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp2,68 triliun.
- Pembayaran kepada pemasok turun 34,09% atau sebesar Rp1,16 triliun menjadi sebesar Rp2,24 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,41 triliun.

- Public Service Obligation & Subsidy revenue increased by 4.35% or as much as Rp116.38 billion to Rp2.79 trillion in 2020 compared to the previous period of Rp2.68 trillion.
- Payments to suppliers decreased by 34.09% or as much as Rp1.16 trillion to Rp2.24 trillion compared to the previous year of Rp3.41 trillion.

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi | Cash Flow from Operating Activities				
Penerimaan Kas dari Pelanggan Receipt from Customer	1.270.204	2.442.994	(1.172.790)	(48,01%)
Penerimaan Public Service Obligation & Subsidi Receipt form Public Service Obligation	2.794.142	2.677.763	116.379	4,35%
Pembayaran Kepada Pemasok Payment to Suppliers	(2.244.851)	(3.405.749)	1.160.898	(34,09%)
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya Receipt of Other Operating Activities	104.901	110.375	(5.474)	(4,96%)
Pembayaran Biaya Operasional Payment of Operating Expenses	(488.999)	(475.301)	(13.698)	2,88%
Pembayaran Biaya Overhead Payment of Overhead Expenses	(1.105.913)	(976.525)	(129.388)	13,25%
Pengeluaran dari Aktivitas Operasi Lainnya Payment of Other Operating Expenses	(12.005)	(33.908)	21.903	(64,60%)
Penerimaan (Pembayaran) Uang Jaminan Dari Pelangan Receipt (Payment) of Cash Collateral from Customer	(5.313)	16.614	(21.927)	(131,98%)
Pembayaran Pajak Tax Payment	(71.858)	(120.428)	48.570	(40,33%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Next Cash Flows from Operating Activities	**240.307**	**235.834**	**4.473**	**1,90%**

dalam Rp juta | in Rp million

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas investasi meningkat di tahun 2020, dimana arus kas bersih yang digunakan untuk investasi adalah sebesar Rp368,72 miliar, meningkat 212,48% atau senilai Rp696,55 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar -Rp327,83 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya Perolehan atas Pelepasan pengendalian invetasi pada anak sebesar Rp503,80 miliar.

Cash Flows from Investment Activities

Cash Flows of the Company for Investing Activities increased in 2019, which Cash Flows from Investment Activities was Rp368.72 billion, an increase of 212.48% or Rp696.55 billion compared to 2019 of Rp327.83 billion. This is due to the Acquisition of Proceeds from Divest Control in Subsidiary reached Rp503.80 billion.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
REPORT OF CONSOLIDATED CASH FLOWS

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi | Cash Flows from Investment Activities				
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro Interest Deposit and Demand Deposit Receipt	51.166	39.313	11.853	30,15%
Perolehan atas Pelepasan pengendalian invetasi pada anak Proceeds from Divest Control in Subsidiary	503.800	-	503.800	
Perolahan Alat Produksi dan Aset Tetap Acquisition Production Equipment and Fixed Assets	(158.326)	(324.337)	166.011	(51,18%)
Perolehan Aset Dalam Penyelesaian Acquisition Construction in Progress	(14.211)	(36.425)	22.214	(60,99%)
Perolehan Aset Tak Berwujud Acquisition Intangible Assets	(5.483)	(738)	(4.745)	642,95%
Perolehan Aset Sewa Guna Usaha Purchase of Lease for Assets	(7.843)	(5.641)	(2.202)	39,04%
Perolehan Aset Lain-Lain Acquisition of Other Assets	(378)	-	(378)	
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Net Cash Flows for Investment Activities	368.723	(327.830)	696.553	(212,48%)

dalam Rp juta | in Rp million

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas pendanaan pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp3,41 miliar, menurun 91,84% atau senilai Rp38,33 miliar. Penurunan ini terjadi karena perusahan induk tidak ada penambahan pinjaman bank dan pembayaran hutang bank pada periode ini.

Cash Flows from Financing Activities

The Company's net cash flow used in funding activities at the end of 2020 was recorded at Rp3.41 billion, decreased by 91.84% or Rp38.33 billion. This decrease occurred because the parent company did not have any additional bank loan and bank loan payment in this period.

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | Cash Flows from Financing Activities				
Penerimaan Pinjaman Bank/ Pihak Ketiga Receipt from Bank Loan/ Third Parties	5.000	60.000	(55.000)	(91,67%)
Penerimaan (Pengeluaran) Deviden Receipt (Payment) Deviden	-	(201)	201	(100%)
Pembayaran Bunga Pinjaman Interest Receipt	(792)	-	(792)	(100%)
Pembayaran Utang Bank Payment of Bank Loan	(804)	(18.063)	17.259	(95,55%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows from Financing Activities	3.403	41.735	(38.332)	(91,84%)

dalam Rp juta | in Rp million

RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIO

Uraian Description	2020	2019	Satuan Unit
Rasio Likuiditas | Liquidity Ratio			
Rasio Lancar Current Ratio	583,24	418,52	%
Rasio Kas Cash Ratio	352,78	215,16	%
Rasio Cepat Quick Ratio	515,86	360,99	%
Rasio Leverage | Leverage Ratio			
Rasio Kewajiban atas Aset Debt to Asset Ratio	12,03	14,66	%
Rasio Kewajiban atas Ekuitas Debt to Equity Ratio	13,67	17,18	%
Rasio Kewajiban Jangka Panjang atas Ekuitas Long Term Debt to Equity	3,52	4,32	%
Rasio Aktivitas | Activity Ratio			
Rasio Perputaran Persediaan Inventory Turnover Ratio	38,23	29,35	Kali Times
Rasio Perputaran Aset Asset Turnover Ratio	236,44	330,5	Kali Times
Rasio Penagihan Rata-rata Average Collection Ratio	25	15	Hari Day
Rasio Profitabilitas | Profitability Ratio			
Imbalan terhadap Ekuitas Return on Equity	0,49	3,00	%
Imbalan terhadap Investasi Return on Investment	6,32	10,19	%
Margin Laba Kotor terhadap Penjualan Gross Profit on Sales	10,06	13,85	%
Margin Laba Bersih terhadap Penjualan Net Profit on Sales	0,74	3,26	%
Rasio EBITDA terhadap Aset EBITDA to Asset Ratio	5,76	9,07	%

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini tercermin dari tingkat rasio lancar 583,24%, rasio kas 352,78% dan rasio cepat 515,86%.

Liquidity Ratio

Liquidity ratio is a measurement to calculate the Company's ability level to meet the short-term obligation. This can be seen from Current Ratio level of 583.24%, Cash Ratio of 352.78% and Quick Ratio of 515.86%.

RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIO

Rasio Leverage
Rasio leverage adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya apabila saat ini perusahaan dilikuidasi. Hal ini tercermin dari rasio total liabilitas terhadap total aset 12,03%; rasio liabilitas atas ekuitas 13,67% dan rasio liabilitas jangka panjang atas ekuitas 3,52%.

Leverage Ratio
Leverage ratio is a measurement to calculate the Company's ability in paying all the liabilities which leads to the acquisition of the Company. This can be seen from total liabilities ratio to total assets of 12.03%; Liabilities to Equity of 13.67% and Long-Term Debt to Equity of 3.52%.

Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya. Hal ini tercermin dari rasio perputaran persediaan 78,78 kali, rasio perputaran aset 136,99% dan rasio penagihan rata-rata 25 hari.

Activity Ratio
Activity ratio is a measurement to calculate the effectiveness level of the Company in utilizing all the resources in control. This can be seen from the inventory turnover ratio of 78.78 times, asset turnover ratio of 136,99% and an average collection ratio of 25 days.

Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas atau rasio kemampulabaan perusahaan adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini tercermin dari imbalan terhadap ekuitas 0,49%; imbalan terhadap investasi 6,32%; margin laba kotor terhadap penjualan 10,06%; margin laba bersih terhadap penjualan 0,74% dan rasio EBITDA terhadap aset 5,76%.

Profitability Ratio
Profitability ratio or the Company's Profitability ratio is a measurement to calculate net results from some policies and management's decision that will give the final answer for the effectiveness level of the management in managing the Company. This can be seen from the return on equity of 0.49%; return on investment of 6.32%; gross profit on sales of 10.06%; net-profit on sales of 0.74% and EBITDA to assets ratio of 5.76%

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

COMPANY'S ABILITY TO PAY DEBT AND COLLECTIBILITY RATE ON RECEIVABLE

Kemampuan Membayar Hutang

Rasio kemampuan membayar pinjaman terefleksikan dalam rasio lancar dan rasio kas. Di akhir tahun 2020, Perusahaan dalam posisi likuiditas yang sangat baik dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Rasio lancar dan rasio kas pada tahun 2020 adalah 583,24% dan 352,78%.

PT PELNI (Persero) melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga saldo kecukupan kas dan surat berharga dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. PT PELNI (Persero) juga mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal. Tanggal jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan seperti utang usaha, biaya masih harus dibayar, utang lain-lain dan pinjaman bank jangka pendek adalah kurang dari satu tahun, kecuali untuk liabilitas keuangan seperti utang obligasi dan pinjaman investasi.

Ability to Pay Debt

Ability to pay debt is reflected in current and cash ratios. In the end of 2020, the Company is in an excellent liquidity position and has improved compared to 2019. The current ratio and cash ratio in 2020 were 583.24% and 352.78%.

PT PELNI (Persero) manages liquidity risk by monitoring the loan maturity profile and funding sources, maintaining sufficient cash and securities balances and readiness to maintain market position. PT PELNI (Persero) also maintains its ability to finance loans owned by finding various sources of binding financing facilities from reliable lenders. The contractual maturity dates of financial liabilities such as trade payables, accrued expenses, other payables and short-term bank loans are less than one year, except for financial liabilities such as bonds payable and investment loans.

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2019
Rasio Likuiditas | Liquidity Ratio			
Rasio Lancar Current Ratio	%	583,24	418,52
Rasio Kas Cash Ratio	%	352,78	215,16
Rasio Cepat Quick Ratio	%	515,86	360,99

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

COMPANY'S ABILITY TO PAY DEBT AND COLLECTIBILITY RATE ON RECEIVABLE

Tingkat Kolektibilitas Piutang

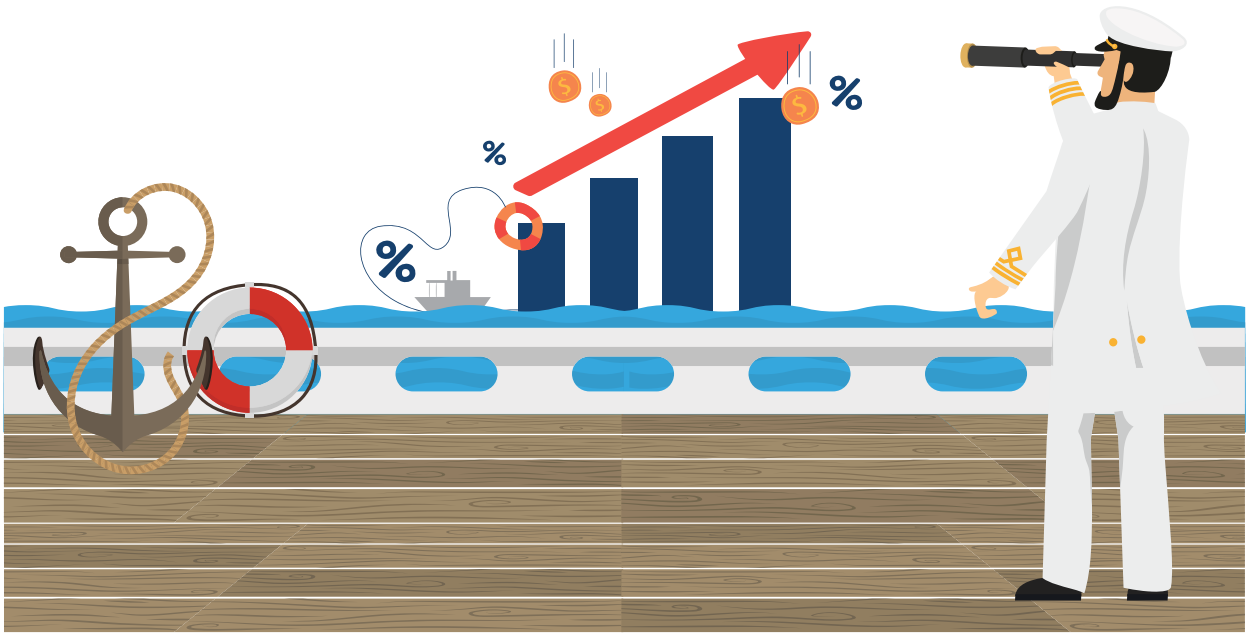
Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan tahun 2020 tercatat 25 hari, mengalami penurunan sebanyak 10 hari dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat selama 15 hari. Perseroan tidak membentuk cadangan provisi atas penurunan nilai, karena manajemen berkeyakinan jumlah piutang tersebut dapat tertagih.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung dengan mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa PT PELNI (Persero) tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukan adanya penurunan nilai piutang.

Collectibility Rate on Receivable

Collectibility rate on Company's account receivables in 2020 was recorded at 25 days, decreased by 10 days compared to 2019 which was recorded at 15 hari. On trade receivables from related parties, the Company did not specify any reserves for impairment, because the management believed that these total receivables can be collected.

The collateral rate of receivables and other receivables are reviewed regularly. Receivables are well-known to be uncollectible written off directly by reducing their carrying value. An allowance account is used when there is objective evidence that PT PELNI (Persero) cannot collect all outstanding values in accordance with the initial requirements of the accounts. Significant financial difficulties experienced by the debtor, the likelihood of debtors being declared bankrupt or financial reorganization and defaults or delinquent payments are indicators that are deemed to indicate a decline in the value of receivables.



STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Struktur Modal

Selama tahun 2020, rincian struktur modal yang dimiliki oleh Perusahaan adalah 12,03% berasal dari liabilitas dan 87,97% berasal dari ekuitas. Struktur modal ini mengalami sedikit perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 14,66% berasal dari utang dan 85,34% berasal dari ekuitas.

Capital Structure

During 2020, the details of the capital structure owned by the Company are 12.03% derived from liabilities and 87.97% comes from equity. This capital structure has changed slightly compared to 2019, namely 14.66% from debt and 85.34% from equity.

Uraian Description	2020	Komposisi Composition	2019	Komposisi Composition	Pertumbuhan Growth	
					Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	647.668	8,93%	774.741	10,97%	(127.073)	(16,40%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	224.775	3,10%	260.467	3,69%	(35.692)	(13,70%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**872.444**	**12,03%**	**1.035.208**	**14,66%**	**(162.765)**	**(15,72%)**
Ekuitas Equitas	**6.380.595**	**87,97%**	**6.026.073**	**85,34%**	**354.522**	**5,88%**
Jumlah Total	**7.253.039**	**100%**	**7.061.282**	**100%**	**191.757**	**2,72%**

dalam Rp juta | in Rp million

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

PT PELNI (Persero) menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai Perseroan. Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Management Policy on Capital Structure

PT PELNI (Persero) established an optimal capital structure policy in order to maximize the value of the Company. Management policy on capital structure is based on protecting the Company's ability to maintain business continuity so that it can continue to provide returns to shareholders and benefits to other stakeholders and maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

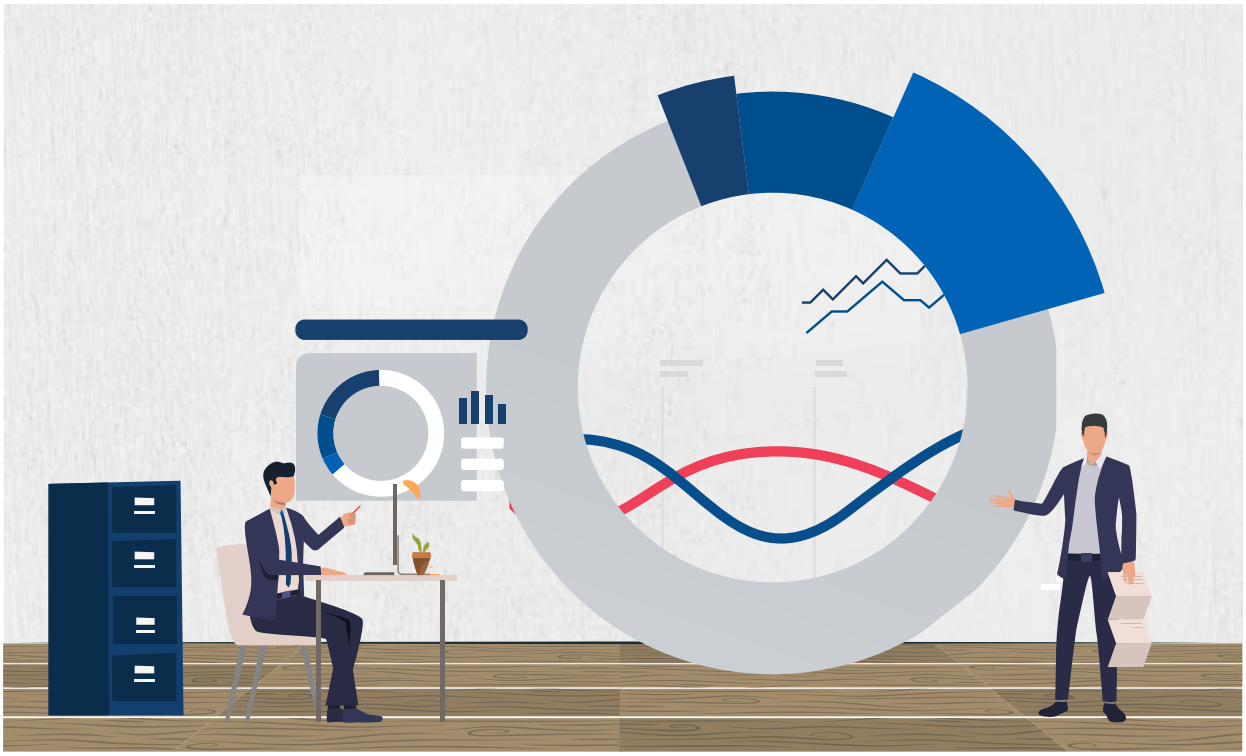
PT PELNI (Persero) menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai Perseroan. Berikut dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal:

- Senantiasa berupaya menetapkan target struktur modal yang optimal.
- Penggunaan proporsi utang yang lebih besar (dari ekuitas) dapat dilakukan bila risiko usaha lebih kecil
- Struktur modal senantiasa ditinjau dengan mempertimbangkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan.
- Struktur modal diusahakan memberi kontribusi optimal dengan mengatur kombinasi hutang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perseroan.

Basis of Management Policy Selection on Capital Structure

PT PELNI (Persero) established an optimal capital structure policy in order to maximize the Company's value. The following is the basis for selecting management policies on capital structure:

- Always strive to set an optimal capital structure target.
- The use of a larger proportion of debt (from equity) can be done if the business risk is smaller.
- Capital structure is always reviewed by considering the balance between financial risk and the rate of return in an effort to increase the value of the company.
- Capital structure is sought to make optimal contributions by regulating the combination of debt and equity (equity) that can maximize the value of the Company.



INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL INVESMENT

Sepanjang tahun 2020 Perseroan telah mengalokasikan dana untuk penambahan aset berupa properti tanah dan gedung serta alat produksi, hal ini dilakukan guna menunjang operasional Perseroan.

Dalam RKAP 2020 Perusahaan menganggarkan dana investasi sebesar Rp384,58 miliar dan sampai dengan akhir 2020 berhasil merealisasikan investasi sebesar Rp162,23 miliar.

During 2020, the Company has allocated the budget for additional assets in land and building properties and production tools in order to support the Company's operations.

In RKAP for 2020, the Company allocated the budget for investment which was Rp384.58 billion and until the end of 2020 had realized its invesment amounted to Rp162.23 billion.

JENIS INVESTASI BARANG MODAL
Type Of Investment Capital

Keterangan Description	2020	2019
Alat Produksi | Production Tools		
Kapal Barang Cargo Ship	-	97.997
Repowering Kapal Ship Repowering	101.926	134.306
Kontainer Container	-	50.468
Alat Produksi Lainnya Other Tools	23.882	40.207
Jumlah Investasi Alat Produksi Total Production Tools Investment	125.808	322.979
Sarana Penunjang | Supporting Facilities		
Bangunan Perkantoran Office Building	20.546	17.842
Tanah & Sertifikat Tanah Land & Land Certificate	2.210	10.348
Kendaraan Bermotor Vehicles	259	2.593
Investasi Perkantoran Office Investment	13.410	6.757
Jumlah Investasi Sarana Penunjang Total Supporting Facilities Investment	36.424	37.540
Jumlah Investasi Total Investment	**162.232**	**360.518**

dalam Rp juta | in Rp million

INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL INVESMENT

Tujuan Investasi Barang Modal
Investasi barang modal bertujuan untuk pengembangan dan optimalisasi produksi perusahaan.

Nilai Investasi Barang Modal yang Dikeluarkan Pada Tahun 2020
Total investasi barang modal yang di tahun 2020 adalah sebesar Rp162,23 miliar, investasi barang modal dikelompokkan menjadi 2 jenis investasi yakni investasi alat produksi sebesar Rp125,81 miliar dan investasi sarana penunjang sebesar Rp36,42 miliar.

Purpose of Capital Investment
The capital investment is to improve and optimize the Company's production.

Value of Capital Investment Spent in 2020

Total capital investment in 2020 was Rp162.23 billion, the capital investment was divided into 2 types, which are investment in production tools at Rp125.81 billion and investment in supporting activities at Rp36.42 billion.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL INVESTMENT

PT PELNI (Persero) tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal. Investasi barang modal dilakukan secara langsung menggunakan dana yang telah danggarkan.

PT PELNI (Persero) has no material commitment related to capital investment, Capital Investment was spent directly from the fund available that already budgeted.



PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI TAHUN 2020 DAN PROYEKSI TAHUN 2021

COMPARATION BETWEEN TARGET, REALIZATION IN 2020 AND PROJECTION FOR 2021

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2020

Setiap periode operasional, PT PELNI (Persero) melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil operasional yang dicapai pada tahun buku. Ukuran kinerja berdasarkan Target atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi pada akhir tahun anggaran.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Comparation between Target and Realization in 2020

In operational period, PT PELNI (Persero) evaluates the operational results achieved in the financial year. The performance measure is based on the Target or Corporate Work and Budget Plan (RKAP) that set at the beginning of the fiscal year compared to realization at the end of fiscal year.

Comparison between Target and Realization for 2020 can be seen on this following table:

Uraian Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 Realization 2020	Pencapaian % Achievement %
Operasional | Operational			
Kapal Milik Ships Owned			
Kapal Penumpang Passenger Ship	26	26	100,00%
Kapal Perintis Pioneer Ship	53	53	100,00%
Kapal Ternak Cattle Ship	1	1	100,00%
Kapal Barang Cargo Ship	11	12	100,00%
Kapal Rede Rede Ship	20	20	100,00%
Jumlah Kapal Beroperasi Total Ships Operating	111	111	100,00%
Produksi | Production			
Angkutan Penumpang (orang | persons) Passenger Transport	1.785.555	2.000.056	90,55%
Angkutan Barang (Ton/ M3) Cargo Transport	48.611	76.808	158,00%
Container (Teus) Container	14.782	20.633	72,19%
Kendaraan (unit) Vehicle	6.547	10.199	155,78%
Ternak (ekor | cattle) Cattle	7.920	6.608	83,43%
Efisiensi Operasional | Operational Efficiency			
Commission Day (hari layar | sailing days) Commission Day	14.353	19.068	134,97%
Frekuensi (pelayaran | voyage) Frequency	1.047	1.388	133,43%
Gross Profit Margin (%) Gross Profit Margin	9,88	6,61	66,90%
Net Profit Margin (%) Net Profit Margin	1,00	0,98	98,00%

PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI TAHUN 2020 DAN PROYEKSI TAHUN 2021

COMPARATION BETWEEN TARGET, REALIZATION IN 2020 AND PROJECTION FOR 2021

Uraian Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 Realization 2020	Pencapaian % Achievement %
Keuangan | Financial			
Laba Konsolidasi (Rp juta | Rp million) Consolidated Income	36.864	41.175	111,69%
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio	242,94	461,33	189,89%
Rasio Aktivitas (%) Activity Ratio	52,83	60,24	114,03%
Rasio Leverage (%) Leverage Ratio	12,70	8,39	66,06%
Rasio Solvabilitas (%) Solvability Ratio	1.009,00	1.864,58	184,79%
Rasio Rentabilitas (%) Rentability Ratio	2,66	2,69	101,13%
Kondisi Kesehatan (%) Company's Soundness	Sehat AA	Sehat A	95,00%

Target Tahun 2021

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 disusun sebagai pedoman kerja dan alat pengendalian serta untuk memenuhi ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perusahaan. Materi dan sistematika Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Menteri BUMN tanggal 31 Agustus 2018 Nomor S-564/MBU/2018 perihal Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal tahun 2021 untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang sangat mempengaruhi perkembangan bisnis Perseroan di tahun 2021. RKAP Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Target for 2021

The preparation Company Work and Budget Plan for 2021 is formed as guidelines and control tools and to fulfill the provisions of Article 21 of the Company's Articles of Association. The material and systematic preparation of the Company's Work and Budget plan in 2020 refers to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number: KEP-101/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Preparation of State-Owned Enterprises' Corporate Work and Budget plan and Minister of State-owned Enterprises Letters dated on August 31, 2018 Number: S-564/MBU/2018 concerning Aspirations of Shareholders/ Owners of Capital for 2021 for Preparation of Company Work and Budget Plan.

The preparation of the Company's Work and Budget plan is carried out by considering external and internal climate that greatly affect the Company's business development in 2021. Target for 2021 can be seen on this following table:

PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI TAHUN 2020 DAN PROYEKSI TAHUN 2021

COMPARATION BETWEEN TARGET, REALIZATION IN 2020 AND PROJECTION FOR 2021

Uraian Description	RKAP 2020
Operasional | Operational	
Kapal Milik Ships Owned	
Kapal Penumpang Passenger Ship	26
Kapal Perintis Pioneer Ship	52
Kapal Ternak Cattle Ship	2
Kapal Tol Laut Sea Toll Ship	6
Kapal Barang/Komersial Cargo/Commercial Ship	17
Kapal Wisata Cruise ship	8
Kapal Tanker Tanker Ship	2
Jumlah Kapal Beroperasi Total Ships Operating	**113**
Produksi | Production	
Angkutan Penumpang (orang l persons) Passenger Transport	3.927.174
Angkutan Barang (Ton/ M3) Cargo Transport	1.726.621
Container (Teus) Container	30.133
Kendaraan (unit) Vehicle	5.059
Ternak (ekor l cattle) Cattle	19.200
Keuangan | Financial	
Laba Konsolidasi (Rp juta l Rp million) Consolidated Income	473.615
Kondisi Kesehatan Liquidity Ratio	Sehat AA
Commission Day (hari) Commission Day	19.299
Gross Profit Gross Profit	19,46%
Net Profit Net Profit	7,51%

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL, TRANSAKSI AFILIASI, DAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN PADA TAHUN 2020

MATERIAL INFORMATION CONCERNING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, DEBT/ CAPITAL RESTRUCTURING, TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTEREST THAT OCCURRED IN 2020

Investasi pada Entitas Asosiasi

Berdasarkan perjanjian Penjualan dan Penerbitan Saham bersyarat di PT RS PELNI tanggal 4 Oktober 2019. Antara PT Pertamina Bina Medika, IHC, dan PT PELNI (Persero) dan PT RS PELNI bahwa Perseroan setuju untuk melepas kepemilikan Investasi di PT RS PELNI, dan terlaksana di tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pelepasan Investasi

Perseroan melepas kepemilikan di PT RS PELNI sebanyak 42.721 lembar saham atau sebesar 42,70% sehingga menyebabkan sisa kepemilikan Perseroan di RS PELNI sebanyak 57.314 Lembar Saham atau sebesar 57,28% atau setara dengan Rp 128.629.813.793.

b. Dilusi

Berdasarkan pernyataan keputusan di luar RUPS No. 36 Tanggal 31 Maret 2020, PT RS PELNI melakukan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor, dimana atas penambahan Modal tersebut PT Pertamina Bina Medika IHC bersedia mengambil seluruh tambahan Modal, sehingga kepemilikan Investasi Perseroan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 48,98%.

Investment in Associate

Based on agreement of Conditional Sales and Issueance of Shares of PT RS PELNI on October 4th, 2020 between PT Pertamina Bina Medika IHC dan PT PELNI (Persero) and PT RS PELNI that the Group agreed to release ownership of investment in PT RS PELNI, and do in the year 2020 as follows:

a. Investment Release

The Group has release ownership of PT RS PELNI as much 42,721 of shares or amounting to 42.71% resulting in ownership oh the Group in RS PELNI as much 57,314 of shares or amounting to 57.28% or equivalent to Rp 128,629,813,793.

b. Dillution

Based on decision statement out of RUPS No. 36 dated on March 31, 2020, PT RS PELNI to do improvement Issued and Paid-up Capital , which is additional capital PT Pertamina Bina Medika IHC willing to take all over additional capital, so that the Group's ownership investment in 2020 decreased amounting to 48.98%.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND FACTS MATERIAL HAPPENED AFTER THE DATE OF ACCOUNTANT REPORT

1. **Pengembalian dana Subsidi (Subsidi Kapal Perintis) ke Kemenhub atas kegiatan tahun 2019**

   Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nomor: UM.006/1/12/DA-2021 perihal Tindak Lanjut atas Temuan Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Perintis dan Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) Tahun Anggaran 2019 kepada PT PELNI (Persero).

   Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 Nomor: 90.c/HP/XIV/05/2020 tanggal 21 Mei 2020.

1. **Refund of Pioneer Ship Subsidy to the Ministry of Transportation for 2019 activities**

   Based on the Letter of the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation number: UM.006/1/12/DA-2021 regarding the Follow-up on Findings of Pioneer Transportation Activities and Sea Freight Transportation (Sea Toll) for Fiscal Year 2019 to PT PELNI (Persero).

   Based on Audit Board of Republic of Indonesia Report regarding compliance to the Ministry of Transportation laws and regulation year of 2019 Number:90c/HP/XIV/05/2020 on 21 May 2020.

2. **Pengembalian dana Subsidi (Subsidi Kapal Perintis) ke Kemenhub atas kegiatan tahun 2018**

   Berdasarkan Surat Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Nomor: PR/101/9/17/DA.-2020 perihal tindak lanjut hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektur Jendral Kementrian Perhubungan kepada PT PELNI (Persero).

   Berdasarkan Surat Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor: KU.102//I/8/DJPL/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal pembuatan komitmen kapal perintis agar memerintahkan PT PELNI (Persero) menyetor kelebihan pembayaran.

   Sehubungan hal tersebut diinstruksikan kepada Operator PT PELNI (Persero) untuk segera menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran kegiatan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kapal Milik Negara Triwulan IV TA 2018 senilai Rp42.745.259.943.- (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

2. **Refund of Pioneer Ship Subsidy to the Ministry of Transportation for 2018 activities**

   Based on the letter of Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation number: PR/101/9/17/DA.-2020 regarding the follow-up of Audit results with a specific purpose (ADTT) inspector General of the Ministry of Transportation to PT PELNI (Persero).

   Based on letter of director General of Sea Transportation number: KU. 102//I/8/DJPL/2020 dated January 28, 2020 concerning the making of the pilot vessel commitment to order PT PELNI (Persero) to deposit excess payment.

   In the event that it is instructed to the Operator of PT PELNI (Persero) to immediately deposit to the state treasury for the excess payment subsidy of the land transport pioneer of the state owned quarterly IV TA 2018 Worth Rp42.745.259.943,- (Forty Two Billion Seven Hundred Forty Five Million Two Hundred Fifty Nine Thousand Nine Hundred Forty Three Rupiah).

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND FACTS MATERIAL HAPPENED AFTER THE DATE OF ACCOUNTANT REPORT

Berdasar hasil Tindak Lanjut perihal pengembalian kelebihan pembayaran kegiatan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kapal Milik Negara tersebut, Perseroan berencana untuk meminta verifikasi terhadap kekurangan pembayaran Pekerjaan Kewajiban Pelayanan Kewajiban Publik Angkutan Barang Kapal Perintis Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 sehingga hasil verifikasi tersebut dapat dikompensasikan sebagai pengurang atas kelebihan pembayaran tersebut.

Based on the results of the follow-up on the return of overpayment of marine transport subsidy activities of the State. the company plans to request verification against the shortage of payment of employment obligations services Public liability transport goods Pioneer Quarter IV year budget 2018 so that the verification results can be compensated as a deduction for the excess payment.

3. **Perubahan Susunan Direksi PT PELNI (Persero)**
Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor : SK-12/MBU/01/2021 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Penagngkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELNI (Persero).

Memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama dibawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELNI (Persero):
1. Sdr. Muhammad Tukul Harsono sebagai Direktur Armada
2. Sdr. Masrul Khalimi sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut

Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELNI (Persero) :
1. Sdr. Robert MP Sinaga sebagai Direktur Armada dan Teknik
2. Sdr. Yahya Kuncoro sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut

3. **Changing of PT PELNI 's Board of Directors member**
Based on the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number: SK-12/MBU/ 01/2021 Regarding Dismissal, Change in Position Nomenclature, and Appointment of Members - Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT PELNI (Persero).

Decided to honorably dismiss the following names as members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT PELNI (Persero):
1. Mr. Muhammad Tukul Harsono as Fleet Director
2. Mr. Masrul Khalimi as Director of the Sea Freight and Freight Transport Business

To appoint the following names as members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT PELNI (Persero):
1. Mr.Robert MP Sinaga as Director of Fleet and Technic
2. Mr. Yahya Kuncoro as Director of Freight and Sea Toll Transport Business

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND FACTS MATERIAL HAPPENED AFTER THE DATE OF ACCOUNTANT REPORT

4. Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2019

Pada Tanggal 15 April 2021, Perseroan menerima Surat Keterangan Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan untuk masa Pajak 2019 dengan nomor: 00015/406/19/093/21 sebesar Rp6.706.778.317 di tahun 2021.

Pada Mei 2021, telah diterima pengembalian Pajak Lebih Bayar Badan tahun 2019 sebesar Rp4.860.844.581.

4. Result of Tax Return for the fiscal Year 2019

On April 15, 2021. the Company received on Overpayment Tax assessment letter on income Tax for the year 2019 tax period with number: 00015/406/19/093/21 amounting to Rp6,706,778,317 in 2021.

On May 2021, had been received Overpayment of Tax Return for the year fiscal tax 2019 amounting to Rp4,860,844,581.



DEVIDEN
DIVIDEND

Untuk periode tahun buku 2019 dan 2020, PT PELNI (Persero) tidak membagikan deviden, sesuai dengan risalah RUPST yang menetapkan untuk mencadangkan seluruh laba bersih Perseroan.

For the fiscal year 2019 and 2020, PT PELNI (Persero) did not distribute its dividend, in accordance to minutes of AGMS that determined Company's net profit to be retained.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN/ MANAJEMEN (ESOP/ MSOP)
EMPLOYEE/ MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/ MSOP)

Pada tahun 2020 PT PELNI (Persero) tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau manajemen (ESOP/MSOP) yang dilaksanakan Perusahaan.

In 2020, PT PELNI (Persero) did not have Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP).

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTIONS WITH AFFILIATION PARTIES

PT PELNI (Persero) melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama, sehingga Perseroan melakukan transaksi secara wajar tanpa adanya benturan kepentingan.

PT PELNI (Persero) engaged in transactions with related parties that conducted under mutually agreed terms and conditions, so that the Company transacts fairly without any conflict of interest.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

AMENDMENT OF REGULATORY REGULATIONS AND ITS IMPACT ON COMPANY

Omnibus Law

Omnibus law merupakan RUU komprehensif yang akan mengatur banyak ketentuan di berbagai sektor industri menjadi satu undang-undang. Ia berupaya memperkuat ekonomi dengan meningkatkan daya saing menciptakan lapangan kerja. dan mempermudah berbisnis di Indonesia.

Omnibus law dirancang untuk membantu memenuhi tujuan ini. sebagian dengan menyederhanakan lingkungan peraturan negara yang kompleks terkadang berlebihan. Undang-undang tersebut akan meringankan pembatasan di 11 bidang penting, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan usaha, pajak perusahaan dan pembebasan tanah. Tak perlu dikatakan, langkah-langkah ini jika diterapkan akan membuat Indonesia menjadi tujuan yang jauh lebih menarik bagi bisnis dan investor asing.

Berikut adalah area yang terkena Omnibus Law antara lain:

1. Mempermudah perizinan usaha
2. Mengurangi pembatasan investasi asing
3. Meringankan hukum ketenagakerjaan
4. Memperlancar peraturan perpajakan perusahaan

Dampak terhadap Perusahaan

Sampai dengan tanggal Laporan Keuangan diterbitkan, Perseroan masih dalam proses menilai dampak Omnibus Law tersebut dalam laporan keuangannya.

Omnibus Law

The omnibus law is a comprehensive bill that would regulate many provisions in various industry sectors into one law. It seeks to strengthen the economy by increasing competitiveness creating jobs and making it easier to do business in Indonesia.

The omnibus law is designed to help meet these goals. in part by streamlining the country's complex. sometimes redundant regulatory environment. The law would ease restrictions in 11 critical areas, including labour law, capital investment, business licensing, corporate tax and land acquisition. Needless to say. these measures if adopted would make Indonesia a far more attractive destination for foreign businesses and investors.

The following are the areas affected by the Omnibus Law among others are:

1. Simplifying business licensing
2. Easing foreign investment restrictions
3. Easing labour laws
4. Streamlining corporate tax regulations

Its Impact to the Company

As of the date of the financial statements. the Company is still in the process of assessing the impact of the Omnibus Law in its financial statements.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

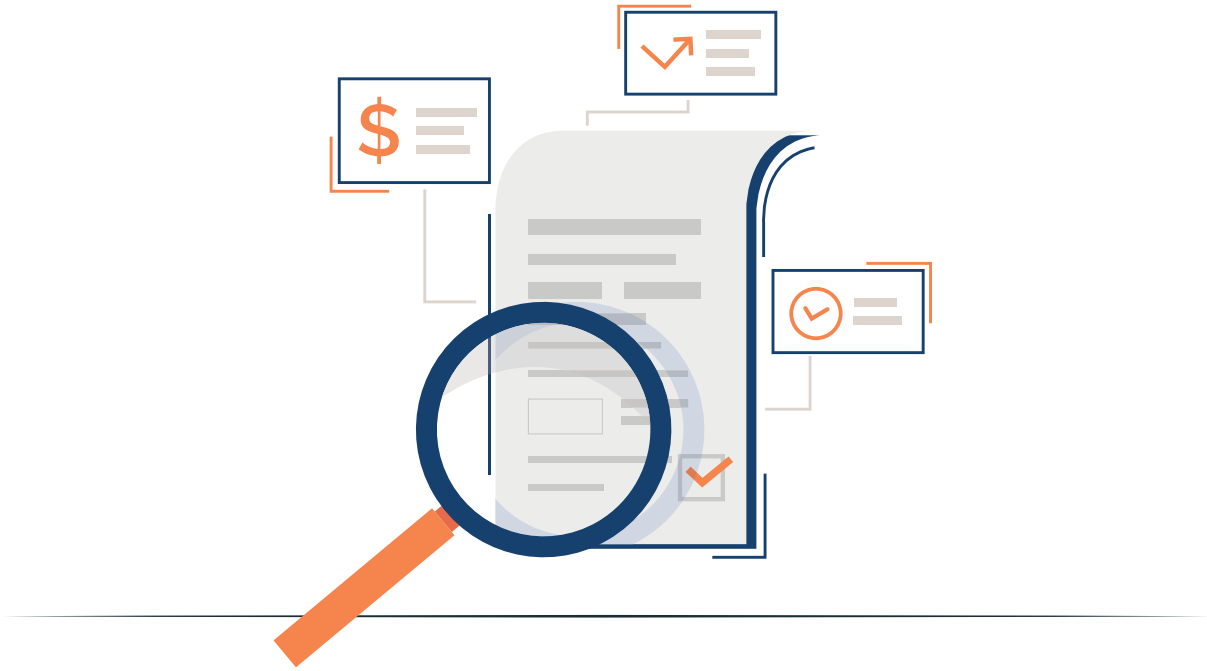
REALIZATION ON PUBLIC OFFERING FUNDS THAT HAS BEEN USED

Perseroan belum menawarkan sahamnya kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana (IPO) dan masih merupakan perusahaan tertutup sehingga Perseroan tidak memiliki informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

The Company has not offered its share to public through Initial Public Offering (IPO) and being a not listed company so that the Company does not have any information about realization on the funds used from public offering.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

AMENDMENT OF ACCOUNTING POLICIES AND ITS IMPACT ON COMPANY FINANCIAL STATEMENTS



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrument keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" sejak 1 Januari 2020 mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

PSAK 73 "Sewa"

Perseroan telah menerapkan PSAK 73 Sewa secara retrospektif sejak 1 Januari 2020, tetapi belum menyajikan kembali komparatif untuk periode pelaporan 2019, seperti yang diizinkan berdasarkan ketentuan transisi spesifik dalam standar. Oleh karena itu. reklasifikasi dan penyesuaian yang timbul dari aturan sewa guna usaha yang baru diakui dalam saldo awal neraca pada tanggal 1 Januari 2020.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

SFAS 71 "Financial Instrument"

SFAS 71 substitute of SFAS 55. related to the recognition. classification and measurement of financial assets and financial liabilities. derecognition of financial instruments. impairment of financial assets and hedge accounting.

The adoption of SFAS 71 "Financial Instruments" since January 1, 2020 has resulted in changes in accounting policies and adjustments to amounts recognized in financial statements.

SFAS 73 "Lease"

The Company has implemented PSAK 73 Leases retrospectively since January 1, 2020. but has not yet restated the comparability for the 2019 reporting period, as permitted under the specific transitional provisions in the standard. Therefore. the reclassifications and adjustments arising from the new lease arrangements are recognized in the opening balance sheet on January 1, 2020.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

AMENDMENT OF ACCOUNTING POLICIES AND ITS IMPACT ON COMPANY FINANCIAL STATEMENTS

ALASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan perusahaan. Dan alasan terjadinya perubahan pada Kebijakan Akuntansi yang berlaku adalah untuk dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang berimplikasi pada dunia akuntansi.

REASON FOR CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The Financial Accounting Standards Statement issued by the Indonesian Institute of Accountants regulates overall accounting treatment for various business activities of companies in Indonesia. These standards are not only intended to regulate accounting treatment from the beginning to the end of a year, namely for reporting to users, these standards also include guidelines for accounting treatment starting from the acquisition, the use, and the time of deletion for each of accounting elements. The standards also regulate the recognition, measurement, presentation and reporting of company finances. And the reason for the changes in the applicable Accounting Policy is to be able to accommodate changes that have implications for the accounting patterns.

DAMPAK SECARA KUMULATIF TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" sejak 1 Januari 2020 mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Berdasarkan penerapan PSAK 73, Perseroan mengakui liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya telah diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip sewa PSAK 30. Liabilitas ini diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa. didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan lessee per 1 Januari 2019. Tingkat pinjaman inkremental rata-rata tertimbang penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 10%.

Aset hak guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa. Disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa yang dibayar di muka atau yang masih harus dibayar terkait sewa tersebut yang diakui di neraca pada tanggal 31 Desember 2019.

QUANTITATIVE IMPACT IN FINANCIAL STATEMENT

The adoption of SFAS 71 "Financial Instruments" since January 1, 2020 has resulted in changes in accounting policies and adjustments to amounts recognized in financial statements.

Based on the application of PSAK 73. the Company recognizes lease liabilities in respect of leases which were previously classified as 'operating leases' under the lease principles of PSAK 30. This liability is measured at the present value of the remaining lease payments. discounted using the lessee's additional borrowing interest rate as of 1 January, 2019 The weighted average incremental loan rate of the tenants to the lease liabilities as of January 1, 2020 is 10%.

Usage rights assets are measured at the same amount as the lease liabilities. Adjusted for the rental payments prepaid or accrued related to the lease that were recognized in the balance sheet as of December 31, 2019.


PT. PELNI
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
PT.PELNI

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Tahun 2020

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan tentu menghadapi beberapa tantangan dan dari semua tantangan tersebut terdapat beberapa hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku 2020 diantaranya adalah:

1. Risiko keselamatan kapal dan penumpang (Armatek, Operasi, *Designated Person Ashore*).
2. Risiko *public service obligation*;
3. Risiko *pax factor* kapal penumpang;
4. Risiko subsidi kapal barang tol laut; dan
5. Risiko kenaikan BBM.

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Tahun 2020

Assessment manajemen atas hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan *framework* ISO 31000 yang menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan.

Dalam menyikapi perubahan konteks eksternal secara berkala atau periode triwulanan dilakukan pembahasan risiko-risiko yang ada terhadap pengelolaan perusahaan antara unit manajemen risiko, Dewan Komisaris dan Direksi.

Things that have Potential to Significantly Affect Company's Business Continuity in 2020

In conducting its business, the Company certainly faces several challenges, from all these challenges there are some potentially influential things significant to the company's business continuity in the fiscal year 2020 as follows:

1. Ship and passenger safety risks (Armatek, Operation, Designated Person Ashore);
2. Public service obligation risk;
3. Passenger ship pax factor risk;
4. Subsidizing Tol Laut carriages risk; and
5. Rising fuel prices risk.

Management Assessment on Things that have Potential to Significantly Affect Company's Business Continuity in 2020

Management assessment on the matters affect the business continuity of the Company significantly, PT PELNI (Persero) implements risk management system based on ISO 31000 framework resulting the widely perspectives, easy to understand and measurable of risk management practices to support each unit coordination and integration in the Company.

In responding the external changing context periodically and quarterly has been discussed the existing risks on company management between risk management unit, Board of Commissioners and Directors.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Asumsi yang digunakan Manajemen dalalm Melakukan Pengkajian

Dalam penyusunan RKAP 2020 PT PELNI (Persero) salah satu acuannya berdasarkan *Risk Based Budgeting*, dalam hal ini penyusunan anggaran berdasarkan risiko-risiko yang telah terpetakan.

Adapun beberapa asumsi yang digunakan Perseroan berkaitan dengan kelangsungan usaha PT PELNI (Persero) di masa yang akan datang diantaranya adalah kondisi makro ekonomi, kondisi industri pelayaran nasional serta kebijakan Pemerintah. Adapun data asumsi tersebut sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,00%
- Tingkat inflasi adalah sebesar 3,90%
- Tingkat Suku Bunga adalah sebesar 5,40%
- Kurs 1USD = Rp15.500
- Harga BBM Subsidi adalah sebesar Rp5.360/liter
- Harga BBM Non Subsidi adalah sebesar Rp13.250/liter
- Harga Minyak Pelumas Rp36.500/liter
- Kapal yang dioperasikan sebanyak 111 unit

Asumsi tersebut juga didukung oleh peran PT PELNI (Persero) dalam beberapa aspek, antara lain:

- **Infrastruktur Negara**
  PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi publik antar pulau (daerah yang sudah dan sedang berkembang) termasuk angkutan transmigrasi dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

- **Agen Pembangunan**
  PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi publik ke wilayah pulau terpencil dan terluar guna mempercepat pembangunan dan membuka isolasi geografis.

- **Sistem Logistik**
  PT PELNI (Persero) mengangkut kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat seluruh Indonesia termasuk di pulau-pulau terpencil dan terluar guna stabilisasi.

Assumptions Used by Management in Conducting Assessment

In preparing PT PELNI (Persero) 2020 work and budget plan, one of the asumption based on Risk Based Budgeting, in this form of budgeting based on risks mapped.

The assumptions used by the Company related to business continuity of PT PELNI (Persero) in the future include macroeconomic climate, the conditions of national shipping industry and Government policies. The assumptions are as follows:

- Economic growth is 5.00%
- Inflation rate is 3.90%
- Interest rate is 5.40%
- 1USD currency = Rp15,500
- Subsidy Fule price is Rp5,360/liter
- Non Subsidy Fule price is Rp13,250/liter

- Price of Lubricant Oil is Rp36,500/liter
- Ships operated are 111 units

The assumptions are also supported by role of PT PELNI (Persero) in several aspects, as follows:

- **State Infrastructure**
  PT PELNI (Persero) provides inter islands public transportation access (developed and developing regions) including transmigration and TKI (Indonesian Workers).

- **Agent of Development**
  PT PELNI (Persero) provides public transportation access to remote and border islands to accelerate development and eliminate geographical isolation.

- **Logistic System**
  PT PELNI (Persero) carries groceries and other essentials for society across Indonesian territory including in remote and border islands to stabilization.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

- **Kedaulatan NKRI**
  PT PELNI (Persero) menyediakan akses untuk keperluan sosial politik Negara dan pertahanan nasional melalui kunjungan regular antar pulau.

- **Tanggap Darurat**
  PT PELNI (Persero) menyediakan angkutan dengan kapasitas besar, cepat dan handal ke seluruh pelosok Nusantara untuk kondisi darurat nasional.

- **NKRI Sovereignit**
  PT PELNI (Persero) provides access for national social and political needs as well as national security through inter-island regular visit.

- **Emergency**
  PT PELNI (Persero) provides large-capacity, fast and reliable fleets nationwide for national emergency condition.

Assessment atas Kelangsungan Usaha

Perusahaan juga melakukan penghitungan kelangsungan usaha dengan menggunakan metode *Z-score* model yakni model yang dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum *go-public* oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

Assessment on Business Continuity

The company also calculates business continuity using Z-score model, a model developed by a combination of several financial ratio analysis formula for companies that have not been publicly listed by Altman Edwards with the following formula:

Rasio | Ratio	Rumus/Formula Altman Z-Score
Likuiditas	$6{,}56 \times \frac{\text{Modal Kerja Bersih | Net Working Capital}}{\text{Jumlah Aset | Total Assets}}$
Profitabilitas	$3{,}26 \times \frac{\text{Akumulasi Saldo Laba | Retained Earning}}{\text{Jumlah Aset | Total Assets}}$
Profitabilitas	$6{,}72 \times \frac{\text{Laba Sebelum Bunga & Pajak | Earning Before Tax & Interest}}{\text{Jumlah Aset | Total Assets}}$
Solvabilitas	$1{,}05 \times \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas | Equity}}{\text{Jumlah Kewajiban | Total Liabilities}}$

Berdasarkan hasil perhitungan *Z-Score* model pada periode berjalan diperoleh skor sebesar 9.31 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas aman dari kepailitan (Z>2.60) atau dapat diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan entitas anaknya secara konsolidasi sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya.

Based on the results of the Z-Score model calculation in the current period, a score of 9.31 was obtained, indicating that it is very far above "safe from bankruptcy" limit or it can be interpreted that, in carrying out its activities, the company and its subsidiaries in a consolidated manner are very capable of maintaining business continuity.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECT

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang diterapkan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama pemasaran dengan *tour and travel online* serta *channeling* penjualan *online*,
2. Implementasi *e-ticketing*,
3. Survei kepuasan pelanggan,
4. Pengelolaan social media melalui *marketing agency*,
5. Kajian market research berbasis permintaan *customer* dan melalui *benchmarking*,
6. Mengembangkan destinasi wisata bahari dan bekerjasama dengan tour operator asing untuk *domestic selling*.
7. Kerjasama angkutan barang melalui sinergi BUMN, BUMD, UMKM, dan swasta.
8. Mengadakan *Shipper & Sales Gathering*.

Pangsa Pasar

Pangsa pasar PT PELNI (Persero) didominasi oleh karakter penumpang menengah kebawah dengan barang bawaan (kargo) yang signifikan serta penumpang yang tinggal atau menuju daerah tanpa adanya layanan transprotasi udara. Pangsa pasar Perseroan lainnya adalah *shipper* yang membutuhkan alat angkut terjadwal.

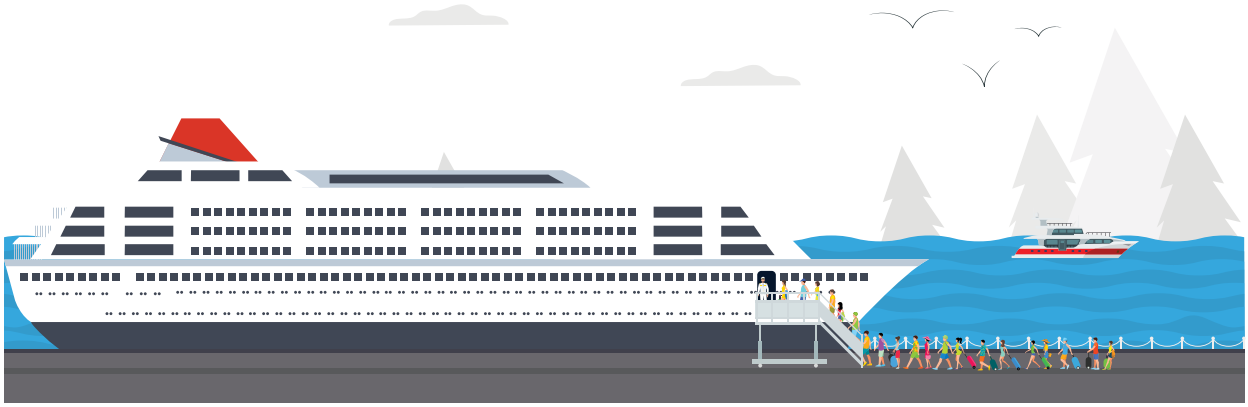
Marketing Strategy

Marketing strategy implemented by PT PELNI (Persero) are as follows:

1. Marketing cooperation with online tour and travel as well as online sales channeling,
2. Implementation of e-ticketing,
3. Customer satisfaction surveys,
4. Social media management via marketing agency,
5. Market research development based on customer's request and through benchmarking
6. Developing marine tourism and cooperating with foreign tour operator for domestic selling.
7. Cooperating cargo transport through SOE, Regional-owned enterprises, Small-Medium enterprises and private companies
8. Conducting Shipper & Sales Gathering

Market Share

Market share of PT PELNI (Persero) is dominated by characteristic of middle-low passenger with signficant cargo carried as well as passengers who stays or departs to several areas without airplane transportation service. The other market served by the Company is shipper that needs scheduled transportation.



PROSPEK USAHA DAN STRATEGI
BUSINESS PROSPECT AND STRATEGIES

Prospek Usaha

Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 tumbuh 4,5%. Pemulihan ekonomi Indonesia diproyeksikan masih akan terganjal pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih ada di Indonesia. Pemulihan ekonomi Indonesia nantinya akan didorong oleh prospek pemulihan konsumsi swasta, juga disokong oleh keyakinan konsumen yang akan kembali pada zona optimistis.

Pemulihan juga akan didorong oleh membaiknya sentimen bisnis yang merupakan hasil dari reformasi iklim investasi, termasuk dengan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan juga akan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang bisa semakin membaik.

Sementara versi Pemerintah, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diprediksi bertumbuh dikisaran 4,5% - 5,3%. Untuk memulihkan ekonomi, otoritas fiskal telah menganggarkan dana sebesar Rp619,83 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang dialokasikan.

Bidang transportasi adalah salah satu bisnis yang terdampak besar atas pandemi ini. Dampak tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi pemerintah yang mengedepankan protokol kesehatan dalam bepergian, namun perilaku konsumen yang burubah juga turut berkontribusi dalam menurunkan jumlah angkutan transportasi. Kondisi ini mendorong mayoritas perusahaan untuk mempertimbangkan kembali strategi jangka panjangnya kedepan.

Business Prospect

Asian Development Bank (ADB) projects that Indonesia economic growth in 2021 will grow by 4.5%. Despite, Indonesia economic recovery projected to be stuck due to Covid-19 pandemic that is still spreading in Indonesia. This Indonesia economic recovery will be optimist driven by the household consumptions recovery and customers' trust.

This recovery will bring good sentiment as reforming investment climate, including Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement and a preferable export performance will also have a good impact.

The Government predicts that economic growth in 2020 will be at 4.5% - 5.3%. To recover this economic condition, fiscal authorities has arranged Rp 619.83 trillion for National Economic Recovery program (PEN) 2021 allocated.

Transportation sector is one of business sector that is impacted by this pandemic. That impact is not only affected by government regulation which is prioritizing health protocol when travelling, but also the changes in consumers behavior which contributes on weakening the amount of transportation demand. This condition made many companies to take into further consideration their long tem strategy.

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI
BUSINESS PROSPECT AND STRATEGIES

Strategi Perusahaan Tahun 2021

Sebagai salah satu perusahaan angkutan laut terbesar di Indonesia yang ikut terdampak Pandemi COVID-19, PT PELNI (Persero) telah mengevaluasi strategi jangka panjangnya. Strategi PT PELNI (Persero) yang baru juga telah mempertimbangkan 5 Agenda Prioritas Kementerian BUMN yang terdiri dari Nilai Ekonomi & Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, & Pengembangan Talenta.

Strategi yang dilakukan PT PELNI (Persero) digambarkan sebagai berikut:

Company's Strategy for 2021

As one of leading shipping company in Indonesia impacted by the Covid-19 pandemic, PT PELNI (Persero) has evaluated its long-term strategies. This new strategies of PT PELNI (Persero) has paid attention to 5 Ministry of SOE Priority Agendas consisted of Economic and Social contribution for Indonesia, Business Model Innovation, Leading Technology, Investment increase, & Talent Development.

PT PELNI (Persero) strategies are described below:



STRATEGI
STRATEGIES



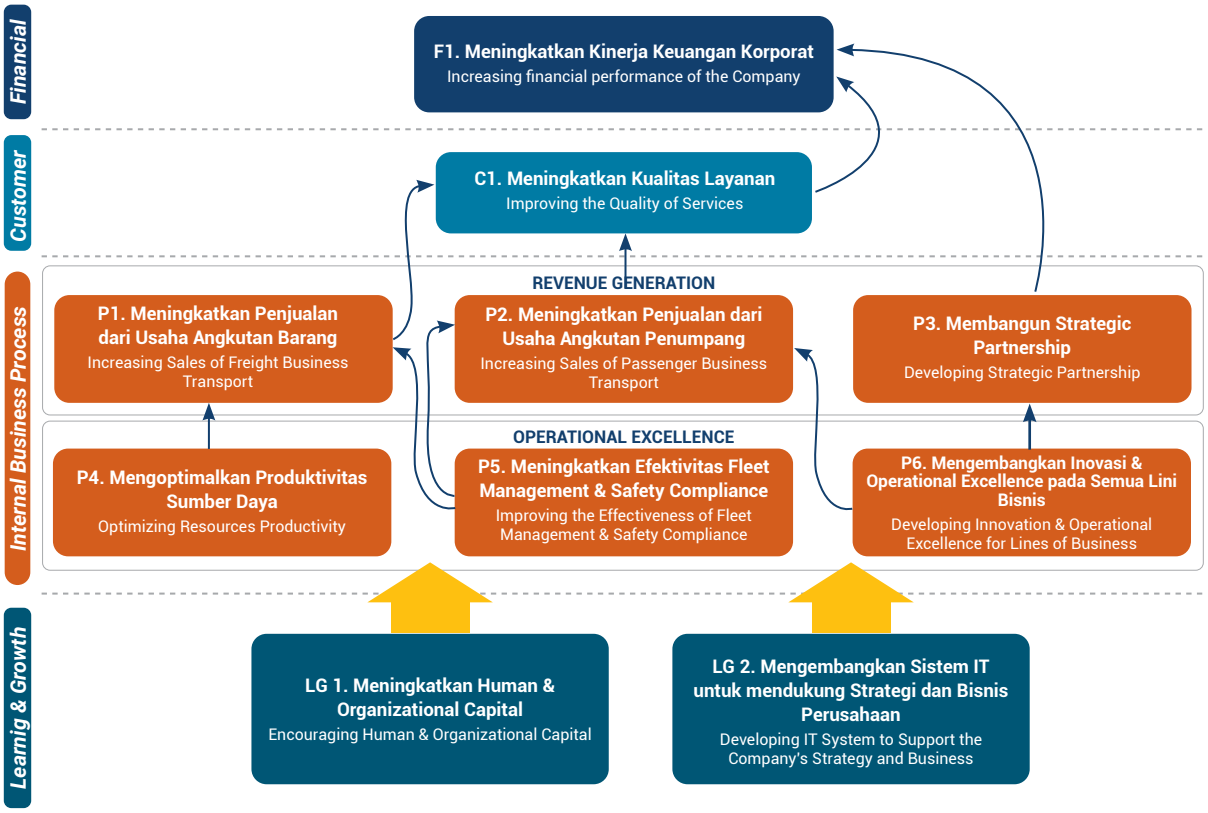
PROSPEK USAHA DAN STRATEGI
BUSINESS PROSPECT AND STRATEGIES

Pada Tahun 2021 PT PELNI (Persero) akan memasuki tahap *recovery* atas dampak Pandemi Covid-19. Pada aspek Finansial, sasaran strategis Perusahaan akan mengutamakan kelangsungan usaha dan kesehatan keuangan perusahaan yaitu "Menjaga Kondisi Kinerja Keuangan Korporat" dan "Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan". Sehingga diharapkan PT PELNI (Persero) dapat mengatasi tantangan bisnis pada masa *recovery* atas dampak pandemi Covid-19, dan ke depannya dapat terus tumbuh secara berkesinambungan.

PT PELNI (Persero) is in recovery phase in 2021 due to Covid-19 Pandemic. In financial aspect, the Company strategic target will focus on the ongoing business and financial soundness, which are "Maintaining Financial Performance Condition" and "Increasing Income" of the Company. It is expected that PT PELNI (Persero) can overcome the business challenges in recovery period due to Covid-19 Pandemic and will continue to grow sustainably for the years to come.

Untuk menunjang tercapainya sasaran strategis pada aspek finansial, beberapa sasaran strategis dibawahnya yang telah diselaraskan dengan strategi Perusahaan yang fokus pada: pengembangan pasar, inovasi, pemanfaatan teknologi, optimalisasi aset, serta pengembangan SDM. Adapun Sasaran Strategis Perusahaan yang akan diterapkan pada Tahun 2021 tertuang dalam Pemetaan Strategi berbasis *Balanced Scorecard* sebagai berikut:

To support this strategic targets achievement on financial aspect, some strategic targets have been aligned with the Company's strategy, which focuses on: market development, innovation, technology utilization, asset optimization, and talent development. The Company's Strategic Goals will be applied in 2021 that has been stated in the Balanced Scorecard-based Strategy Mapping as follows:



PROSPEK USAHA DAN STRATEGI
BUSINESS PROSPECT AND STRATEGIES

9 Transform Actions to Drive Growth

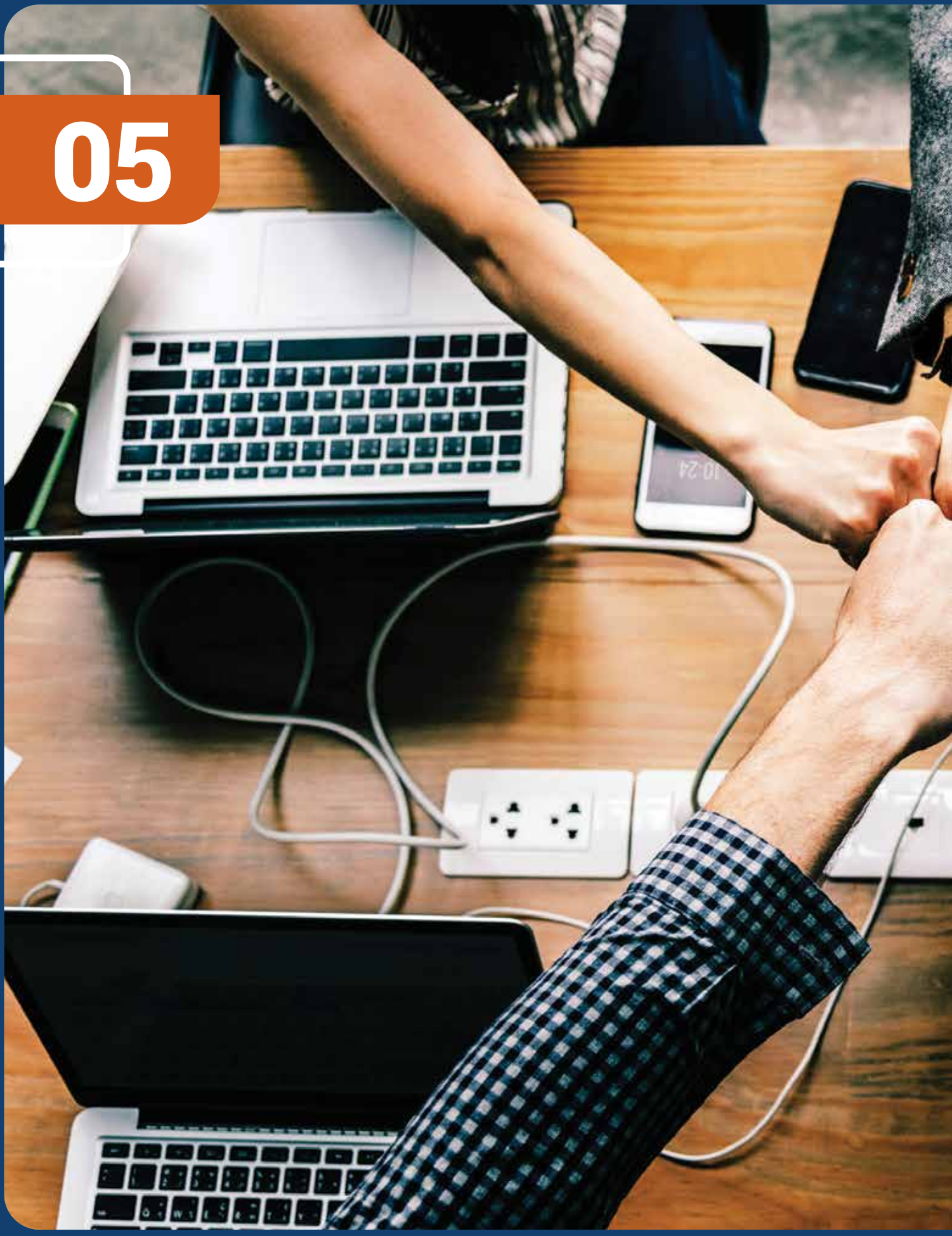
1. Mengembangkan portofolio bisnis utama perusahaan yang fokus pada bisnis pelayanan penumpang, pelayaran barang, logistik dan perdagangan.
2. Melakukan *strategic partnership* dan sinergi antar entitas untuk mengoptimasi perolehan pendapatan dan menyediakan layanan dengan biaya yang efisien.
3. Meningkatkan skala bisnis perusahaan melalui market penetration yang agresif.
4. Melakukan ekspansi bisnis yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan wilayah Asia Tenggara.
5. Melakukan *operational excellence* di seluruh unit bisnis dan unit pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja.
6. Meningkatkan standar pelayanan dalam memberikan *service excellence* kepada pelanggan.
7. Melakukan transformasi digital secara efektif dan menyeluruh.
8. Membangun PELNI menjadi *Hi-Performance and People's Choice Company.*
9. Mengembangkan SDM yang kompeten, professional, dan memiliki digital *leadership* melalui program pengembangan *talent* serta penguatan budaya dan nilai utama perusahaan.

9 Transform Actions to Drive Growth

1. Developing the core business portfolio of the Company, which focuses on passenger transport, freight forwarding, logistic and trade.
2. Strategic partnership and Company's entity synergy is to optimize income achievement and provide services with cost efficient.
3. Increasing scale of the Company's business by aggressive market penetration.
4. Expanding the Business to all regions of Indonesia and South-east Asia.
5. Operational excellence applied for all business units and supporting unit is to increase efficient and effective work processes.
6. Improving service standard in providing service excellence for the customer.
7. Applying effective and comprehensive digital transformation.
8. Creating PELNI to be Hi-Performance and People's Choice Company.
9. Developing competent, professional and digital leadership human resources through talent development program as well as culture and core values strengthening.



05





TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PENDAHULUAN
INTRODUCTION



Perseroan menerapkan struktur dan mekanisme GCG dengan tujuan untuk menjalankan suatu proses dan struktur untuk mencapai target kinerja serta mewujudkan akuntabilitas Perseroan guna menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* lainnya.

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di PT PELNI (Persero) merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

The Company implements the structure and mechanism of GCG that aims to operate process and structure to achieve performance target and accountability of the Company to generate added-value for the Shareholders and Stakeholders by still maintaining the interests of other Stakeholders.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) practice at PT PELNI (Persero) refers to several prevailing Laws in Indonesia, among others, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company and Ministry of State-Owned Enterprises' Decree Number Kep-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 regarding Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOE).

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Adapun tujuan penerapan GCG menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN adalah:

1. Mengoptimalkan nilai-nilai Perseroan agar senantiasa mampu mempertahankan posisinya di pasar serta dapat mencatat pertumbuhan yang berkelanjutan demi merealisasikan visi, misi, dan tujuan Perseroan.
2. Mampu mewujudkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif dan efisien, serta dapat memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian masing-masing organ Perseroan.
3. Mendorong setiap organ Perseroan untuk selalu menjunjung tinggi etika bisnis dan nilai-nilai moral saat membuat sebuah keputusan, serta senantiasa mendasarkan tindakannya pada perundang-undangan yang berlaku dan kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perseroan di dalam perekonomian nasional.
5. Mendukung pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif terhadap perkembangan investasi nasional.

PURPOSES OF CORPORATE GOVERNANCE

The purpose of implementing GCG according to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE are:

1. Optimizing corporate values in order to maintain its position in the market and gain sustainable growth in order to realize its vision, mission, and goals.
2. Encouraging professional, effective, and efficient management of the company as well as empowering function and increasing independence of the Company's organs.
3. Encouraging the Company's organs in upholding business ethics and moral values in every decision made, also complying every action with prevailing regulations and considering corporate social responsibility toward stakeholders and environmental preservation around the Company.
4. Improving the Company's contribution for the national economy.
5. Creating a business climate for the development of national investment.

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

IMPLEMENTASI PRINSIP GCG PT PELNI (PERSERO)
IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLE IN PT PELNI (PERSERO)

Prinsip Principle	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
Transparancy Transparency	Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Perusahaan. Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional Perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku Pemangku Kepentingan. The principle of transparency is openness in implementing the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the Company.The Company shall comply with laws and regulations governing information disclosure issues applicable to the Company. Transparency also includes matters relevant to the information required by the public in relation to the Company's products and operational activities that potentially influence stakeholder behavior.	Melaksanakan aktivitas keterbukaan informasi melalui pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Pemegang Saham, dan melalui pelaporan keuangan dan melalui media komunikasi resmi. Information disclosure activity through responsible reporting compliance to the Shareholders as well as financial reporting and through other official communication media.
Akuntabilitas Accountability	Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. The principle of accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Company's Organs which enable the Company's management effectively implemented. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang atau satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan Perusahaan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban atas aktivitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Accountability relates to the execution of duties and authorities owned by a person or work unit in carrying out the responsibilities imposed by the Company. This accountability includes explanations of the performance of duties and authorities, reporting on the execution of duties and authorities, and accountability for activities in performing these duties and authorities.	Memiliki struktur tata kelola perusahaan yakni organ utama yang saling menunjang terciptanya pelaksanaan tugas yang transparan dan independen. Perseroan juga telah melengkapi pedoman-pedoman yang berfungsi untuk menjadi panduan penerapan tata kelola perusahaan. Having a corporate governance structure which is the main organ to support implementation of transparent and independent practices. The Company also has manuals as corporate governance implementation guidelines.
Pertanggungjawaban Responsibility	Prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The principle of accountability is the suitability in the management of the Company with the prevailing laws and regulations and the principles of sound corporations.	Menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang bersifat *cross check* untuk memastikan responsibilitas dari masing-masing fungsi struktur tata kelola perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya tanpa benturan kepentingan dan intervensi. Conducting corporate governance cross check mechanism is to ensure the responsibilities of each function of the corporate governance structure in their duty and responsibility without conflict of interest and intervention.

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

Prinsip Principle	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
Kemandirian Independency	Prinsip kemandirian yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The principle of independence is the Company professionally managed without conflict of interest and influence/ pressure from any parties which is containing dissension with the prevailing laws, regulations and sound corporate principles.	Perseroan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun intervensi dan dominasi dari pihak manapun. The Company is managed professionally without conflict of interest and intervention from any party.
Kewajaran Fairness	Prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The principle of fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising under the applicable laws and regulations.	Perseroan menerapkan kesetaraan kepada segenap Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. The Company implements fairness principle to all stakeholders in accordance with prevailing law and regulation.

ROADMAP GCG

Salah satu misi dari pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah menciptakan warga perusahaan yang berintegritas dan berdedikasi untuk kekuatan bisnis perusahaan. Perusahaan yang sehat dan kuat akan terwujud saat para warganya bekerja berdasarkan nilai-nilai moral dan etika bisnis yang berintegritas tinggi. Untuk itu Perseroan perlu memiliki rencana yang jelas dan terukur untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai etika bisnis yang kuat kepada setiap insan Perseroan.

Melalui *Roadmap* GCG PT PELNI (Persero), berusaha untuk memberikan gambaran akan langkah-langkah konkrit bagi setiap bagian Perusahaan. Harapannya penerapan GCG di dalam perusahaan akan meningkat secara menyeluruh dan konsisten sehingga di masa yang akan datang dapat tercapainya level *Good Corporate Citizen*, dimana GCG sudah menjadi budaya internal perusahaan.

GCG ROADMAP

One of the mission of implementing good corporate governance principles is to create corporate citizens with integrity and dedicated to the cornerstones of the company's business. A sound and reliable company can be achieved when its citizens work based on high-integrity moral and business ethics values. For this reason, the Company concerns to have a clear and measurable plan to be able to implement strong business ethical values for each of the Company's employees.

Through the GCG Roadmap of PT PELNI (Persero), we strive to provide an overview of concrete steps for each function of the Company. We hope that the implementation of GCG within the Company will comprehensively and consistently increase so that the level of Good Corporate Citizens can be achieved for the years to come, and the GCG will become an internal culture of the Company.

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

Good Corporate Governance

Memenuhi ketentuan dan peraturan (*mandatory* maupun *voluntary*) dalam tata kelola perusahaan

Fullfill the provisions and regulations (mandatory and voluntary) in corporate governance

Good Governance Company

Dapat mengendalikan operasi bisnis terutama aspek risiko usaha secara efektif

Controlling the business operations especially business risk aspects effectively

Good Corporate Citizen

Menjadi warga industri maupun masyarakat

Be an ethical and responsible industrial and social citizen

2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan Infrastruktur & Sistem Infrastructure & System Improvement		**Peningkatan Infrastruktur & Sistem** Infrastruacture & System Improvement	**Peningkatan Mekanisme Penerapan GCG** GCG Implementation Mechanisms Improvement	**Peningkatan Infrastruktur & Sistem** Infrastructure & System Improvement



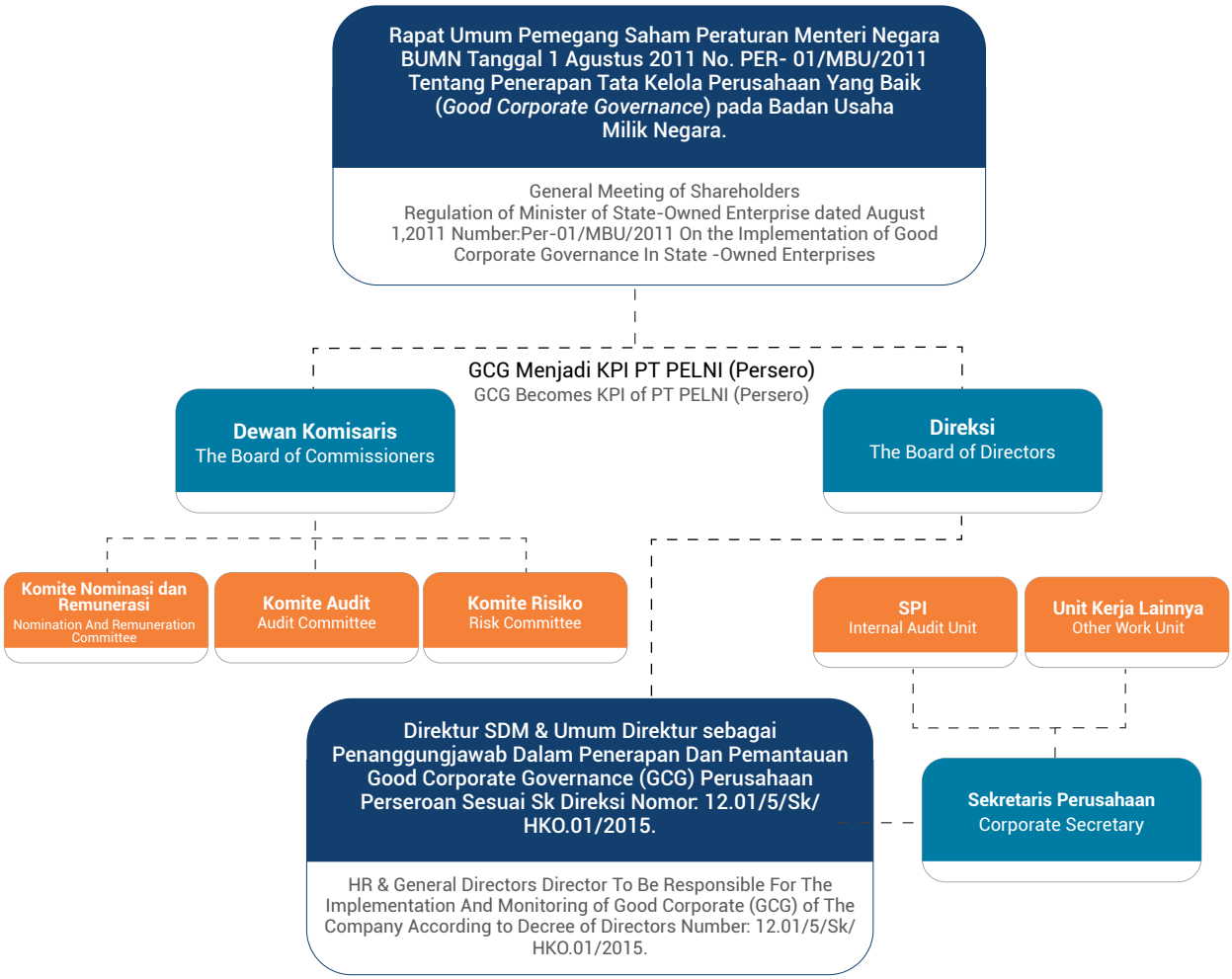
PENDAHULUAN
INTRODUCTION

STRUKTUR ORGAN GCG PERUSAHAAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan telah memiliki struktur *Governance* yang terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama PT PELNI (Persero) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun Organ Pendukung PT PELNI (Persero) diantaranya Komite Audit, Komite Kebijakan Risiko, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Manajemen Risiko. Berikut adalah Struktur GCG PT PELNI (Persero) :

GCG ORGAN STRUCTURE OF THE COMPANY

In Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, the Company has Governance Structure consisting of main and supporting organs of the Company. Main organs in this structure are the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and Directors. And the supporting organs consist of the Audit Committee, Risk Policy committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Risk Management. Here is GCG Structure of PT PELNI (Persero) explained below :



PENDAHULUAN
INTRODUCTION

SOFT STRUCTURE GCG

Perseroan menempatkan GCG sebagai landasan penting untuk menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan dengan penguatan struktur dan mekanisme pengelolaan secara internal yang didukung oleh kepatuhan eksternal terhadap seluruh perangkat peraturan perundang-undangan. Komitmen pelaksanaan GCG di Perseroan diwujudkan dalam rangkaian pedoman terkait pelaksanaan GCG dan penandatanganan Pakta Integritas GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Pedoman GCG PT PELNI (Persero)
2. Pedoman *Code of Conduct* PT PELNI (Persero)
3. Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
4. Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT PELNI (Persero)
5. Pakta Integritas PT PELNI (Persero)
6. Pedoman Penanganan Gratifikasi PT PELNI (Persero)
7. Pedoman dan Sistem Manajemen Risiko PT PELNI (Persero)
8. Tata Kelola Teknologi Informasi PT PELNI (Persero)
9. Pedoman *Whistleblowing* System PT PELNI (Persero)
10. Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT PELNI (Persero)

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan secara berkala melakukan penilaian implementasi GCG sebagai wujud mekanisme *check & balances* untuk menilai sudah sejauh mana efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan dan entitas anak. Dengan diterapkannya penilaian ini, Perseroan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai area atau fokus pengembangan aspek GCG yang perlu diperhatikan setiap tahunnya. Sampai saat ini metode penilaian GCG di Perseroan dilakukan secara mandiri oleh internal Perseroan (*self-assessment*) dan pihak independen (*Assessment eksternal*). Berkaitan dengan hal tersebut,

GCG SOFT STRUCTURE

The Company took place GCG as a fundamental aspect to create sustainable growth through strengthening internal management structure and mechanism that is also supported with external compliance with all law and regulation frameworks. GCG implementation commitment of the Company is manifested in several manual books related with GCG implementation and GCG integrity pact signed by the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

1. PT PELNI (Persero) GCG Guidelines
2. PT PELNI (Persero) Code of Conducts Guidelines
3. PT PELNI (Persero) Board Manual of Board of Directors and Board of Commissioners
4. PT PELNI (Persero) Conflict of Interest
5. PT PELNI (Persero) Integrity Pact
6. PT PELNI (Persero) Anti-Gratification Manual
7. PT PELNI (Persero) Risk Management System and guideline
8. PT PELNI (Persero) Information Technology governance
9. PT PELNI (Persero) Whistleblowing System Manual
10. PT PELNI (Persero) Annual Report

ASSESSMENT ON IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company organizes regular evaluation on GCG implementation, manifesting as a check & balance mechanism to monitor the implementation effectiveness of GCG principles within the Company's environment and its subsidiaries. By this evaluation, the Company has more comprehensive outcomes description to the development area or focus on GCG aspects which must be considered each year. Currently, this Company's evaluation method of GCG is being conducted independently by Internal of the Company (self-assessment) and assisted by an Independent Party (External Evaluation). This agenda made the Company

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

Perseroan senantiasa bersikap terbuka terhadap setiap masukan yang dinilai dapat mendorong kualitas implementasi GCG ke depannya. Selain itu, Perseroan juga selalu bersikap transparan untuk memberikan informasi serta penjelasan atas hal apapun yang relevan dengan Perseroan apabila sewaktu-waktu ditanyakan oleh *Stakeholders* atau *Regulator.*

Kriteria dan Indikator Penilaian yang Digunakan

Pengukuran penilaian GCG Perseroan mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK- 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance)* pada BUMN. Indikator yang digunakan dalam penilaian GCG tersebut meliputi:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi; serta
6. Aspek lainnya.

SKOR PENILAIAN GCG TAHUN 2020

Pada tahun 2020, pelaksanaan assessment GCG Perseroan menunjukkan hasil dengan predikat "BAIK", mencakup 6 (enam) aspek yang diukur yaitu Komitmen Terhadap Penerapan Tata kelola Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi dan aspek lainnya, dengan capaian skor sebesar 84,401. Berikut adalah rincian dari hasil penilaian GCG tahun 2020:

Penilai	: BPKP
Periode Penerapan	: 1 Januari 2020–31 Desember 2020
Tahun Ukur	: 2020
Tempat	: Kantor Pusat PT PELNI (Persero)
Waktu Pengukuran	: 1 Maret 2021 – 20 Mei 2021

that has always been open for every incoming advice, which could boost up the implementation quality of GCG in future ahead. Furthermore, the Company can provide relevant information and clarification transparently to our Stakeholders and Regulators at any times.

Assessment Criteria and Indicator Used

The measurement of GCG assessment referred to the Ministry of SOE Regulation No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 regarding Indicator/Evaluation Parameter and Assessment of GCG Implementation in SOE. The indicators are:

1. Commitment to sustainable GCG;
2. Shareholders and GMS/Investors;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. The Directors;
5. Information Disclosure and Transparency;
6. Other Aspects;

2020 GCG ASSESSMENT SCORE

In 2020, the assessment of GCG application showed an "excellent" result for 6 (six) aspects assessed, among others, Commitment to Sustainable Application of GCG, Shareholders and GMS/Investors, the Board of Commissioners/Steering Committee, the Board of Directors, Disclosure of Information and Transparency and other aspects, with a score of 84.401. Here is the detail of assessment result of GCG in 2020:

Assesor	: BPKP
Implementation Period	: 1 Januari 2020–31 Desember 2020
Year of Measurement	: 2020
Place	: Kantor Pusat PT PELNI (Persero)
Time of Measurement	: 1 Maret 2021 – 20 Mei 2021

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

Skor *Assessment* GCG 2020

Ringkasan Hasil Penilaian GCG PT PELNI (Persero) Tahun 2020:

GCG Assessment Score 2020

Assessment Result Resume on GCG of PT PELNI (Persero) 2020:

No	Aspek/Indikator/Parameter Pengujian Assessment Aspect/Indicator/Param	Bobot Weight	Capaian Tahun 2020 Achievement 2020		Penjelasan Explanation
			Skor Score	Persentase Percentage	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment on Sustainable Corporate Governance	7,00	6,183	88,329	Sangat Baik Very Good
2	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	8,143	90,487	Sangat Baik Very Good
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	31,166	89,046	Sangat Baik Very Good
4	Direksi Board of Directors	35,00	30,956	88,446	Sangat Baik Very Good
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,953	88,367	Sangat Baik Very Good
	Sub Total	**95,00**	**84,401**		
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	0,000	0,000	-
	Skor Keseluruhan Total Score	**100,00**	**84,401**	**84,401%**	**Baik** **Good**

Rekomendasi Assessment GCG 2020
Recommendation of GCG Assessment 2020

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
1	Menetapkan pengaturan mengenai jumlah jabatan yang boleh dirangkap anggota Direksi, bila tidak konflik kepentingan. Setting up number of position that can be held by members of Director, as long as there is no conflict of interest.	V			
2	Di waktu yang akan datang tepat waktu dalam pengesahan RJPP To be on time in the future when legalizing RJPP	V			
3	Menyusun dan menetapkan pedoman penilaian Direksi secara individu Drafting and establishing BOD' assessment guidelines individually	V			
4	Menyebutkan jumlah besarnya honorarium/imbal jasa dalam Penetapan KAP yang akan melakukan audit Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Mention the amount of honorarium/ service return in the Determination of KAP that will conduct the audit of Company's Annual Reports and Consolidated Financial Statements	V			

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
5	Menyusun dan menetapkan pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Drafting and establishing guidelines for the preparation of BOC's supervisory duties report	V			
6	Memberikan Pengesahan Laporan Tahunan dengan tepat waktu, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau (tanggal 30 Juni) Provide Annual Report Endorsement in a timely manner, no later than 6 (six) months after financial year ended (June 30)	V			
7	Membuat rencana tindak atas *areas of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* GCG PT PELNI (Persero) dan meningkatkan pelaksanaan tindak lanjutnya Create an action plan for areas of improvement from GCG assessment of PT PELNI (Persero) and improve the follow-up	V			
8	Membuat pengaturan lebih lanjut terkait sistem pelaporan gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Make further settings regarding the reporting system of decreased performance of the BOD and/or BOC to Shareholders	V			
9	Menginstruksikan kepada Komite Komisaris dan seluruh karyawan, menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku Instruct the Committee of Commissioners and all employees, to sign a commitment to comply the Code of Conduct			V	V
10	Menginstruksikan kepada pejabat wajib lapor LHKPN untuk memenuhi kewajibannya menyampaikan LHKPN secara tepat waktu Instruct the officials to deliver LHKPN in a timely manner			V	
11	Memberlakukan penerapan penegakan aturan sanksi bagi pejabat wajib lapor LHKPN tetapi tidak menyampaikan kewajibannya Implement the sanctions for the officials who do not report their LHKPN			V	
12	Menginstruksikan kepada unit terkait untuk membuat kebijakan/mekanisme Gratifikasi dan *Whistleblowing system* dalam majalah internal Perusahaan (Majalah Camar) Instruct the relevant unit to create a policy/mechanism of Gratuity and Whistleblowing system in the Company's internal magazine (Camar Magazine)			V	
13	Menginstruksikan kepada unit terkait untuk melakukan evaluasi/pembahasan atas pelaksanaan *whistle blowing system* dan membuat laporan atas hasil evaluasi Instruct the relevant unit to perform evaluation/discussion of whistle blowing system and report the result			V	
14	Meningkatkan *progress* tindak lanjut *AoI (Areas of Improvement)* hasil assessment GCG tahun sebelumnya Improve the progress of AoI (Areas of Improvement) follow-up of GCG assessment results from the previous year			V	

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
15	Meningkatkan koordinasi dengan Pemegang Saham, sebagai wujud Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang baik/GCG agar mencantumkan Target Skor GCG dalam Kontrak Manajemen/ *KPI Corporate* Improve coordination with shareholders, as a Commitment of Good Corporate Governance/GCG to include GCG Score Target in Corporate Management Contract/KPI			V	
16	Menyusun laporan hasil kegiatan bagi anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pelatihan/peningkatan kapabilitas Prepare a report on the results of activities for members of BOC who participate in training/improvement capabilities programs		V		
17	Penyampaian tanggapan atas rancangan RJPP kepada Pemegang Saham disampaikan sesuai dengan ketentuan yaitu paling lambat 60 hari sebelum tahun berjalan Submission of responses to RJPP draft to Shareholders in accordance with the provisions, which is no later than 60 days before the current year		V		
18	Menetapkan kriteria kebijakan mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang diperkirakan berdampak pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris Set policy criteria for business environment exchange and problems impacted to the Company's business and performance that need attention of the Board of Commissioner		V		
19	Melakukan telaah atas visi dan misi Perusahaan Reviewing the Company's vision and mission		V		
20	Melengkapi rencana kerja Dewan Komisaris dengan rencana kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem pengendalian intern Complete the work plan of the Board of Commissioners with a plan of supervision activities and advising on the policy of the internal control system		V		
21	Melakukan reviu atas kebijakan sistem pengendalian intern Perusahaan; mendorong Direksi untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem pengendalian intern Perusahaan (tingkat entitas) dan menuangkannya dalam *internal control report;* melakukan reviu atas hasil evaluasi sistem pengendalian intern Perusahaan (tingkat entitas) dan *Internal Control report* dari Direksi Review on the policy of Company's internal control system; encourage the Board of Directors to entirely evaluate it (entity level) and put it in internal control report; review on the result of Company's internal control system (entity level) and Internal Control report from the Board of Directors		V		
22	Melengkapi rencana kerja Dewan Komisaris dengan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Complete the Working Plan of the Board of Commissioners with supervision and advice on Risk management policy		V		

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
23	Melakukan telaah atas kebijakan manajemen risiko perusahaan Reviewing the Company's risk management policy		V		
24	Melakukan telaah atas kebijakan sistem informasi dan teknologi serta melakukan reviu mengenai ketercapaian penerapan teknologi informasi dibandingkan dengan *IT Master Plan* Conduct a review of information systems and technology policies and conduct a review on the achievement of IT implementation compared to the IT Master Plan		V		
25	Melakukan telaah laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telaah atas upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi atas permasalahan hukum yang sedang terjadi di Perusahaan Review audit results on compliance against the prevailing laws and regulations and review of efforts to resolve litigation cases and non-litigation over ongoing legal issues happening in the Company		V		
26	Memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS disertai dengan analisis risiko Give consent to a transaction or action by BOD within the scope of the authority of the BOC or the GMS accompanied by a risk analysis		V		
27	Melakukan evaluasi kinerja auditor eksternal sebelumnya Conduct an evaluation on the performance of previous external auditors		V		
28	Melengkapi penilaian efektivitas pelaksanaan audit internal dengan mencakup penilaian atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal, kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal, dan manajemen fungsi SPI Complete the assessment of internal audit implementation effectiveness with assessment of conformity audits implementation, with internal audit standards, completeness of the attributes of findings and the quality of recommendations internal audit results, and management of SPI functions		V		
29	Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal, yang mencakup pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya, telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik, dan telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal Assessing the effectiveness of external audit implementation, which includes conformity monitoring completion of audit progress with its work plan, review the suitability of audit implementation with standards public accounting profession, and review of external audit results and the quality of external audit recommendations		V		
30	Melakukan evaluasi atas pengelolaan dan capaian kinerja anak perusahaan yang dikaitkan dengan visi pengembangan usaha Perusahaan dan membahas mengenai kebijakan *subsidiary governance* Evaluate management and achievements performance of subsidiaries associated with vision developing the Company's business and discussing subsidiary governance		V		

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
31	Melengkapi rencana kerja Dewan Komisaris dengan rencana kegiatan terkait penelaahan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Complete the Working Plan of the BOC with activity plan related to the review of the principles of Company Good Corporate Governance		V		
32	Melakukan telaah atas hasil *assessment* GCG serta memantau tindak lanjut atas *area of improvement* dari hasil penilaian tersebut Review the results of the GCG assessment and monitor the follow-up on area of improvement from the assessment results		V		
33	Menyusun rencana, melaksanakan, dan memantau tindak lanjut areas of improvement hasil *assessment* GCG yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris Develop plans, implement, and monitor follow-up areas of improvement of GCG assessment results that are the authority of the Board of Commissioners		V		
34	Melengkapi dan mencantumkan alasan ketidakhadiran Anggota Dewan Komisaris dalam risalah rapat Complete and list the reasons for the absence of Members of the Board of Commissioners in the minutes of the meeting		V		V
35	Mendokumentasikan proses pembahasan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dalam risalah rapat internal dan membuat *progress t*indak lanjut yang telah dilaksanakan Documenting the process of evaluating the implementation of previous meetings results in the minutes of internal meetings and making follow-up progress that has been implemented		V		V
36	Menginstruksikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyusun: Instruct the Nomination and Remuneration Committee to arrange: a. Piagam/*Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi Charter Nomination and Remuneration Committee b. Program kerja tahunan Annual work program c. Laporan berkala yang disampaikan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan maupun tahunan, dengan muatan minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja, substansi hasil kegiatan, dan rekomendasi yang diberikan; Periodic reports submitted to the Council Commissioner on a quarterly and annual basis, with minimal charge contains a realization comparison activities with work programs, substance of activities results, and recommendations provided; d. Risalah/notulen rapat dalam setiap pertemuan/rapat internal Komite Nominasi dan Remunerasi Minutes of meetings in each meeting/Internal Nomination and Remuneration Committee meeting		V		V

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
37	Menginstruksikan kepada Komite Audit untuk menyempurnakan Program Kerja Komite Audit tahun berikutnya dengan muatan antara lain rencana kegiatan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, melakukan prosedur reviu terhadap informasi dari Perusahaan, dan *self-assessment* kinerja Komite Audit Instruct the Audit Committee to improve the Audit Committee's Work Program of the next year with a load, among other plans activities to ensure the effectiveness of the system control management and provide recommendations improvement of management control system as well as the implementation, performing the review against information from the Company, and self-assessment of Audit Committee performance		V		V
38	Menginstruksikan kepada Komite Kebijakan Risiko untuk menyempurnakan Program Kerja Komite Kebijakan Risiko tahun berikutnya dengan muatan *self assessment* kinerja Komite Kebijakan Risiko Instruct the Risk Policy Committee to improve the Risk Policy Committee's Work Program the following year with a performance self assessment charge Risk Policy Committee		V		V
39	Menginstruksikan kepada Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk menyempurnakan Laporan Tahunan Triwulanan dan Laporan Tahunan tahun berikutnya dengan muatan perbandingan antara program kerja dengan realisasinya secara informatif dan terstruktur untuk tahun berikutnya Instruct the Audit Committee and the Risk Management Monitoring Committee to improve Quarterly Annual Report and Annual Report the following year with a comparison between work program with its realization in an informative and structured for the following year		V		V
40	Melaksanakan program pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat dengan materi sesuai pedoman yang telah ditetapkan meliputi: Implementing an introduction program for Directors who newly appointed with the material in accordance with the guidelines that have been defined include: (a) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Implementation of GCG principles, (b) Gambaran mengenai Perusahaan, Overview of the Company, (c) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit, Description relating to delegated authority, internal and external audit, control systems and internal policies and Audit Committee, (d) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Information on duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors			V	
41	Membuat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi Make a report on the training results that have been undertaken by members of the BOD			V	

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
42	Menindaklanjuti hasil temuan audit eksternal dengan menetapkan SOP tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang teridentifikasi penyimpangan dan/atau kecurangan sesuai ketentuan Menteri BUMN Follow up the results of external audit findings with establishing an SOP on Business Transaction Delay Guidelines that is identified as deviations and/or fraud in accordance with the provisions of the Minister of SOEs			V	
43	Melaksanakan SOP secara konsisten Implement SOPs consistently			V	
44	Melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala sesuai pedoman yang ditetapkan Review and refine the SOP periodically in accordance with the guidelines set			V	
45	Menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu Submit the next period RJPP draft to the Board of Commissioners in a timely manner			V	
46	Menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu atau sesuai jadwal waktu yang ditentukan Presenting the RKAP plan to the Board Commissioner in a timely manner or on time as scheduled			V	
47	Menyampaikan rencana promosi dan mutasi satu level di bawah Direksi kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut Submit a promotional plan and mutation one level below the BOD to the BOC to provide direction to the promotional plan and that mutation			V	
48	Mengesahkan mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis (SOP Kajian Bisnis Berskala Korporat dan Direktorat) Authorizing mechanisms for the Board of Directors to respond business opportunity proposal(SOP Scaled Business Review) Corporate and Directorate)			V	
49	Menyempurnakan mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan dengan aturan mengenai kewajiban Direksi untuk melakukan analisa dengan memperhatikan risiko yang akan dihadapi dalam membahas isu-isu tersebut Improve the mechanism for the Board of Directors to immediately discuss current issues regarding changes in the business environment and problems that have major impact on the Company's business and performance with rules regarding the obligations of the BOD to analyze with regard to risk that will be faced when discussing these issues			V	
50	Menyempurnakan pedoman penilaian kinerja individu untuk awak kapal, dengan muatan penjelasan indikator kinerja antara lain: formula, cara - cara penilaian Improve individual performance assessment guidelines for the crew, with work indicator explanation such as: formula, assessment methods			V	

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
51	Menggunakan aplikasi komputer untuk mendukung sistem pengukuran kinerja pegawai kapal Use computer applications to support ship employee performance measurement system			V	
52	Menggunakan aplikasi komputer untuk mendukung sistem pengukuran kinerja Kantor Cabang Use computer applications to support Branch Office performance measurement system			V	
53	Menetapkan kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi serta memonitor capaiannya Assign performance contracts for each position in organizational structure and monitoring its achievements			V	
54	Menyampaikan pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi kepada Dewan Komisaris Delivering the achievements of each Directorate performance based on the targets in the Management contract as the performance of each Board of Directors to the Board of Commissioners			V	
55	Melaksanakan program pengembangan SDM melalui *training, coaching* dan *assignment* sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan Implementing HR development programs through training, coaching and assignment in accordance with the Guidelines which has been set			V	
56	Menetapkan program reward untuk prestasi unit kerja Establish a reward program for work unit achievement			V	
57	Menyusun kebijakan *subsidiary governance* yang mengatur pola hubungan antara induk Perusahaan dengan anak Perusahaan yang mencakup: Establishing a subsidiary governance policy that organize the pattern of relationship between the parent company with subsidiaries that include: (a) Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, di antaranya memuat penjaringan atau nominasi, penilaian/pengujian atas kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test), proses penetapan Guidelines appointment and dismissal of the BOD and BOC, including nominations, assessments/fit and proper test, the process of determination (b) Pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris (kolegial) yang memuat sekurang-kurangnya indikator utama dan kriteria keberhasilan, Guidelines for assessment of the BOD's performance (collegial and individual) and Board of Commissioners (collegial) which contain at least the main indicators and success criteria, (c) Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Guidelines for salary/honorarium, benefits and facilities of the BOD and BOC			V	
58	Meningkatkan capaian kinerja anak perusahaan Improving subsidiaries' work performance			V	

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
59	Menyampaikan analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya kepada Dewan Komisaris Submit a risk analysis of the RKAP plan and its handling strategy to the Board of Commissioners			V	
60	Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan selanjutnya menerbitkan *Internal Control Report* Evaluate/assess the effectiveness of internal control at the entity level then publish an Internal Control Report			V	
61	Meningkatkan penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal Improve follow-up from internal and external auditors recommendations			V	
62	Meningkatkan kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi Increase the efforts to resolve litigation cases			V	
63	Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan pelanggan tahun sebelumnya untuk perbaikan layanan *pre on Board* dan *post Board* Coordinating with relevant parties to follow up on the results of customer satisfaction survey from the previous year to improve pre-on board and services post Board			V	
64	Melakukan assessment terhadap seluruh pemasok yang bermitra secara berkala Assess all suppliers periodically			V	
65	Melakukan survei kepuasan terhadap seluruh pemasok yang bermitra Conduct a satisfaction survey of all suppliers			V	
66	Menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan (SPT Bulanan) secara tepat waktu Submit tax liability documents (Monthly SPT) in a timely manner			V	
67	Mempercepat proses penyelesaian pembaharuan Perjanjian Kontrak Bersama (PKB) Speed up the process of Joint Contract Agreement (PKB) renewal completion			V	
68	Melaksanakan program kemitraan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan Implementing a partnership program in accordance with the assigned work plan			V	
69	Menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham Submit quarterly management reports and annual management report to the Board of Commissioners before being delivered to shareholders			V	
70	Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyusun rencana rapat Direksi dan agenda yang dibahas Instruct Corporate Secretary to prepare the Board of Directors meeting plan and agenda			V	V

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
71	Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mencantumkan penjelasan alasan ketidakhadiran Direksi dalam risalah rapat Instruct Corporate Secretary to list an explanation of the reasons of the Board of Directors' absence in the meeting minutes			V	V
72	Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mencantumkan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dalam risalah rapat Instruct Corporate Secretary to enclose the evaluation of previous meeting results in the meeting minutes			V	V
73	Meningkatkan tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris Improve follow-up on instructions and/or decision of the Board of Commissioners			V	
74	Menambah jumlah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI Increase the number of personnel assigned at SPI to meet the needs to do SPI tasks			V	
75	Meningkatkan kualitas atas profesionalitas personil SPI melalui program pengembangan profesi secara berkelanjutan Improve SPI personnel professionalism's quality through sustainable professional development program			V	
76	Menginstruksikan kepada kepala SPI untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan secara berkala Instruct the head of the SPI to do assessment of quality assurance program and Internal Audit Function improvement periodically			V	V
77	Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk meningkatkan pemberian kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola (*Governance*), manajemen risiko, dan pengendalian intern Instruct the Head of SPI to improve the Governance process, risk management, and Internal control			V	V
78	Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk meningkatkan pemberian masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan Instruct the Head of SPI to provide more inputs on efforts to achieve Company's business strategies			V	V
79	Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk menyempurnakan pedoman untuk memantau tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan intern dan ekstern dengan menambahkan muatan tentang pelaporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan KAP Instruct the Head of SPI to improve the follow up guidelines on the internal and external supervision recommendation result by adding up monitoring reports on the KAP overview follow up			V	V
80	Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk meningkatkan aplikabilitas rekomendasi SPI sehingga dapat ditindak lanjuti Instruct the Head of SPI to improve SPI's applicability recommendations so that they can be followed up			V	V

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
81	Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk membuat risalah rapat sesuai dengan best practices, diantaranya dengan mencantumkan hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan keputusan rapat sebelumnya Instruct Corporate Secretary to make meeting minutes in accordance with best practices, such as including the results of the evaluation of previous meeting decisions			V	V
82	Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk memasukkan rencana kerja program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat ke dalam program kerja Kesekretariatan Perusahaan Instruct Corporate Secretary to include work plan of Company's introduction program to members of the BOD and members of BOC that are newly appointed into the Company's Secretarial work program			V	V
83	Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyempurnakan laporan Kesekretariatan Perusahaan dengan penjelasan pelaksanaan tugas unit kerja dibawahnya yaitu: Instruct Corporate Secretary to improve the Company's Secretarial report with an explanation of work unit duties under its supervision, called: 1. Departemen Hubungan Masyarakat, Kelembagaan & CSR, Public Relations Department, Institutional and CSR 2. Departemen Kesekretariatan Direksi & GCG Director's Secretarial Department and GCG 3. Pengelolaan Dokumen Korporat Corporate Documents Management			V	V
84	Melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS Announce GMS no later than 14 days before GMS is held, without taking into account the date of the announcement and date of GMS			V	
85	Menambahkan muatan informasi yang termasuk kategori rahasia perusahaan dan prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada stakeholders dalam kebijakan tentang Informasi Perusahaan PT PELNI (Persero) Add information that include Company's secret category and procedures of Company's information disclosure to stakeholders in the policy about Company's Information			V	
86	Menyempurnakan muatan Laporan Tahunan dengan berpedoman pada best practices yang diisyaratkan dalam keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, antara lain: Enhance the annual report load based on the best practices hinted in decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 about Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs, such as:			V	

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Pihak-Pihak yang Terkait/Pelaku Tindak Lanjut Related Parties/Performers Follow-up			
		PS/RUPS	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Organ Pendukung Supporting Organs
	a. Menambahkan uraian terkait pelaporan kepemilikan saham keluarga inti dari Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahan lain; Add a description related to reporting of shares ownership by family of the BOD and BOC to the company and also the other company; b. Uraian tentang komponen dari beban lainnya untuk mengetahui hasil Perusahan; Description about components of other expenses to know the company's yield; c. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan selama 2 (dua) tahun; Discussion about the impact of price changes on sales or net income of the company during 2 (two) years; d. Uraian atas informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan belum mencantumkan dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang; Description of the material information and facts that occur after the report date, the accountant has not listed the impact on business performance and risks in the future; e. Bahasan tentang jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, serta besarnya Payout Ratio; Discussion about the amount of cash dividends per Share and the amount of dividends per year or paid for the last 2 (two) years, as well as Payout Ratio; f. Informasi material antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal; Material information, about investments, expansion, divestment, acquisition, debt restructuring/capital; g. Uraian mengenai Sistem Pengendalian Intern di perusahaan; dan Description of the Internal Control System in company; and h. Informasi biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen Information on expenses related to Corporate social responsibility, especially regarding the company's commitment to consumer's protection				

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

SKOR PENILAIAN GCG TAHUN 2019

Penilai : BPKP
Periode Penerapan : 1 Januari – 31 Desember 2019
Tahun Ukur : 2019
Tempat : Kantor Pusat PT PELNI (Persero)
Waktu Pengukuran : Januari 2019 – Maret 2019

Ringkasan Hasil Penilaian GCG PT PELNI (Persero) Tahun 2019:

GCG ASSESSMENT SCORE 2019

Assesor : BPKP
Implementation Period : 1 January 2019 – 31 December
Year of Measure : 2019
Place : Kantor Pusat PT PELNI (Persero)
Time of Measurement : January 2019 - March 2019

Ringkasan Hasil Penilaian GCG PT PELNI (Persero) Tahun 2019:

No	Aspek/Indikator/Parameter Pengujian Assessment Aspect/Indicator/Param	Bobot Weight	Capaian Tahun 2020 Achievement 2020		Penjelasan Explanation
			Skor Score	Persentase Percentage	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment on Sustainable Corporate Governance	7,000	6,214	88,77%	Sangat Baik Very Good
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owner	9,000	8,205	91,16%	Sangat Baik Very Good
3	Dewan Komisaris /Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	30,357	86,73%	Sangat Baik Very Good
4	Direksi Board of Directors	35,000	30,376	86,79%	Sangat Baik Very Good
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	8,017	89,08%	Baik Good
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	0,000	0,000%	-
	Skor Keseluruhan Total Score	100,000	83,169	83,17%	Baik Good

Status tindak lanjut usulan rekomendasi Asesmen GCG tahun 2019, adalah sebagai berikut:
Follow-up Status on Recommendation of GCG assessment 2019, is as follows:

No	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
ASPEK I | ASPECT I		
1	Keputusan RUPS/Pemilik Modal dalam hal pemberhentian anggota Direksi, memberikan/ memuat alasan pemberhentiannya. Decision of GMS/Capital Owner in terminating the member of the Directors, granting/giving the reason for the termination.	• Pemegang Saham telah memiliki Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Shareholder has had Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Directors, as stated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/ MBU/02/2015 regarding Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of the Board of Directors of State-Owned Enterprises. • Pada tahun 2020 tidak ada pergantian Direksi There was no changes of the Board of Directors in 2020

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
2	Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti/ *monitoring area of improvement (AOI)* yang dihasilkan dari *assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan. Shareholders shall make efforts to follow up/ monitor the area of improvement (AOI) referring to the assessment of the implementation of Good Corporate Governance in the Company.	Pemegang saham belum membuat rencana tindak atas *areas of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* GCG PT PELNI (Persero) dan belum optimal dalam pelaksanaan tindak lanjutnya Shareholders have not made an action plan for the areas of improvement resulting from GCG assessment and have not been optimal in the follow-up progress
ASPEK II | ASPECT II		
1	Dewan Komisaris memberikan tanggapan tertulis atas rancangan RJPP 2020- 2025 yang disampaikan kepada Pemegang Saham. The Board of Commissioners shall give a written response on the long-term plan of the Company for 2020 - 2025 presented by the Shareholders.	Dewan Komisaris memberikan tanggapan tertulis atas rancangan RJPP Tahun 2020-2024 dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham dalam Surat Dewan Komisaris Nomor 95/DK/IX-2020 tanggal 30 September 2020 perihal Tanggapan Dewan komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PELNI (Persero) Tahun 2020-2024. Namun, penyampaian tanggapan atas rancangan RJPP kepada Pemegang Saham belum tepat waktu, yaitu melewati tahun anggaran berjalan. The Board of Commissioners gave a written response to the RJPP 2020-2024 draft and submitted it to the Shareholders through the Letter Number 95/DK/IX-2020 on 30 September 2020 regarding the Board of Commissioners' Response to the Long Term Plan (RJPP) of PT PELNI (Persero) for the Years of 2020-2024. However, the Board of Commissioners' response to the RJPP draft submitted to Shareholders was not in time, which overreached the current fiscal year.
2	Membuat kesimpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. Made the conclusion that RKAP was fit in and/or not fit with the long-term plan of the Company.	1. Buku Rancangan RKAP 2020 (Disusun di Juli s.d Oktober 2019), didalamnya mencakup: RKAP 2020 Draft Book (Compiled in July to October 2019), which includes: a. Pendahuluan (Visi, Misi, Kegiatan Perusahaan, Tata Nilai Utama & Budaya, Susunan Direksi dan Komisaris) Introduction (Vision, Mission, Company Activities, Core Values & Culture, Composition of Directors and Commissioners) b. Pelaksanaan RK Tahun 2019 (Perbandingan Asumsi, Pelaksanaan Program kerja, Prognosa Realisasi, Rasio Keuangan, Kinerja Perusahaan Tahun 2019) Implemented the 2019 work plans (Comparison between Assumptions, Work Programs, Realization Prognosis, Financial Ratios and Company Performance in 2019) c. Sasaran Strategis Tahun 2020 (RKM, KPI, RK Unit Kerja Tahun 2020) The 2020 Strategic Goals (RKM, KPI, work program of the Directorates in 2020) d. Proyeksi Keuangan Pokok Tahun 2020 (LR, Posisi Keuangan, Arus Kas, Rasio Keuangan, Kinerja Perusahaan Tahun 2020) 2020 Principal Financial Projections (LR, Financial Position, Cash Flow, Financial Ratios, Company Performance in 2020) e. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Realisasi PKBL Tahun 2019, RKA PKBL Tahun 2020) Partnership and Community Development Programs (Realization of PKBL 2019, PKBL Work Plans and Budget for 2020) f. RKA Dewan Komisaris Tahun 2020 (Tugas, Program Kerja, Susunan Komisaris, Uraian Kinerja Utama) The Board of Commissioners work plans for the year of 2020 (Duties, Work Programs, Composition of Board Commissioners, Discription of Main Target) g. Kesimpulan (*Main Target, Absolute Target,* Spesifik Target, Keputusan RUPS) Conclusion (Main Target, Absolute Target, Specific Target, Resolution of GMS) 2. Rancangan RKAP mengacu pada RJPP Tahun 2020-2024. RKAP Plans reffered to the Company's long term plans for the year of 2020-2024

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

No	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
3	Membuat Surat Ketidakhadiran oleh Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris/ Pengawas serta penjelasan ketidakhadiran. Shall make a letter of absence by members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who are unable to attend in the meeting of the Board of Commissioner/Supervisor and mention the reason for the absence.	Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal dan rapat gabungan sepanjang tahun 2020 rata-rata yaitu 93,59%. Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat telah membuat surat kuasa, namun alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris tidak dicantumkan dalam risalah rapat. The attendance rate of the Board of Commissioners in internal and joint meetings throughout 2020 was 93.59%. The Board of Commissioners who was not present at the meeting had made a power of attorney, but the reason for the absence of the Board of Commissioners was not stated in the minutes of the meeting.
ASPEK III | ASPECT III		
1	Menginstruksikan kepada pejabat perusahaan yang wajib menyampaikan LHKPN untuk mematuhi kewajibannya, menginstruksikan kepada petugas pengelola LHKPN untuk meningkatkan pelaporan secara berkala kepada KPK tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN dan memberikan teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan. Instructed the Company's officials who are required to report on assets of state officials to meet their obligations, instructed the management officers of LHKPN to increase the intention of periodic reporting to the Corruption Eradication Commission on progress in fulfilling the obligation to report on assets of state officials and granted the reprimands/sanctions for State Administrator who have not/ did not report on assets of state officials in accordance with the relevant regulations.	• Telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai terkait sesuai Nota Dinas dari Plt VP SDM Nomor 02.18.19ND-B/041/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2020, yang memuat pemberitahuan Wajib Lapor LHKPN posisi per 31 Desember 2020 kepada KPK. The Company has socialized activities and technical guidance of LHKPN related employees according to the Official Memorandum from Acting VP of HR Number 02.18.19ND-B/041/2021 on 18 February 2021 regarding Submission of LHKPN for the Year of 2020, which contained notification of Mandatory Reporting LHKPN positions as of 31 December 2020 to the Corruption Eradication Commission. • Bagi Wajib Lapor (WL) yang belum tepat waktu menyerahkan laporan LHKPN kepada KPK maka akan diberikan sanksi berdasarkan Instruksi Direktur Utama Nomor: 12.22/01/INS/HKO.01/2017 tanggal 22 Desember 2017 diberikan Sanksi tercantum pada Point No.4. For the Officers (WL) who have not submitted the LHKPN on time to the Corruption Eradication Commission, they will be given sanctions based on the President Director's Instruction Number: 12.22/01/INS/HKO.01/2017 on 22 December 2017, given the sanctions listed in Point No.4.
2	Perlu dilakukan penanganan tindak lanjut, pelaporan dan evaluasi atas pengaduan yang diterima perusahaan. Shall have handling, reporting and evaluating on the complaints received by the Company.	Terdapat SOP/mekanisme penanganan keluhan pelanggan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 04.28/03/Sk/HKO.01/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Contact Center Info PELNI di point IV tentang Complaint Handling. Berdasarkan rekapitulasi Keluhan Pelanggan Tahun 2020 yang masuk melalui media facebook, instagram, phone, email, whatsapp dan twitter, terdapat 52 kasus, sebanyak 43 kasus telah selesai ditindaklanjuti dan 9 keluhan masuk datanya tidak lengkap. There has been the SOP/mechanisms for handling customer complaints which is regulated in the Decree of the Board of Directors Number 04.28/03/Sk/HKO.01/2016 on 26 April 2016 regarding the Application of Standard Operating Procedures (SOP) for PELNI Contact Center Info at point IV regarding Complaint Handling. Based on the Customer Complaints in 2020 that came in via facebook, instagram, phone, email, whatsapp and twitter, there have been 52 cases, 43 cases have been followed up and 9 complaints with incomplete data.
3	Membuat hasil laporan pelatihan dalam hal anggota Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Shall make a training report results in the event that members of the Board of Directors participated in training programs to improve their competencies.	Anggota Direksi yang mengikuti pelatihan belum menyusun hasil laporan pelatihannya. Member of Board of Directors who participated in training has not made their training report.
4	Membuat pencapaian tingkat Direksi individu berdasarkan tingkat pencapaian target kinerja. Shall make individual performance of the Board of Directors by the achievement level of performance targets.	Belum membuat pencapaian tingkat Direksi individu berdasarkan tingkat pencapaian target kinerja. Have not made the achievement for individual Board of Directors based on the level achievement of performance targets.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Perseroan yang berperan sebagai wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan. Meski demikian, RUPS tidak dapat mengintervensi tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan atau kepengurusan Perseroan dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan di dalam RUPS senantiasa dilakukan secara wajar dan transparan, serta didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ within the company that serves as a room of decision making for all shareholders regarding their investment capital in the company. Nevertheless, GMS cannot intervene in the tasks, functions and authorities of the Board of Commissioners and Directors when managing the company. However, they still look up on the authority of GMS in accordance to Articles of Associations and regulations. Decision making at GMS is executed in a fair and transparent manner, and based on the long terms' interest of the company.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan terdapat 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

1. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari Pemegang Saham.

Based on the provisions of the Articles of Association there are 2 (two) types of General Meeting of Shareholders, namely:

1. Annual General Meetings of Shareholders, which is held annually at least 6 (six) months after the financial year ended.
2. Extraordinary General Meetings of Shareholders could be held once a year if it is necessary on a written request from the Board of Commissioners or from the Shareholders.

RUPS RKAP TAHUN BUKU 2019

Pada RUPS RKAP Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Januari 2019 telah diagendakan dengan keputusan sebagai berikut:

AGENDA AND RESOLUTIONS OF GMS RKAP 2019

On the General Meeting of Shareholders RKAP 2019 held on 4 January 2019 that was scheduled with the following decision:

No	Agenda Agenda	Keputusan Decision
1	Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2019. Approval/Ratification of RKAP and the Corporate Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (PKBL) 2019.	Menyetujui mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2019 PT PELNI (Persero). Approved to ratify RKAP as well as the Corporate Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (PKBL) 2019 for PT PELNI (Persero).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Agenda Agenda	Keputusan Decision
2	Penetapan *Key Performance Indicator (KPI)* Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019. Determination of Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors and Board of Commissioners in 2019.	Menetapkan *Key Performance Indicator (KPI)* Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 yang tertuang dalam kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Established Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2019 as stated in the Management contract signed by the Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).
3	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan tahun 2019, meliputi *Passenger Factor, Number of Port, Commission Days, One Time Performance* dan Efisiensi pemakaian BBM. Determination of Operational Aspect Indicators for calculating the company's health level in 2019, including Passenger Factor, Number of Port, Commission Days, One Time Performance and Efficiency of fuel consumption.	Menetapkan Aspek Indikator Aspek Operasional PT PELNI (Persero) untuk perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2019. Determined the Operational Aspect Indicator Aspect of PT PELNI (Persero) for the calculation of the Company's health level in 2019.

RUPST TAHUN BUKU 2018

Agenda dan Keputusan

Pada RUPS Laporan Manajemen Tahun Buku 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2019 telah diagendakan dengan keputusan sebagai berikut:

AGMS FISCAL YEAR 2018

Agenda and Resolution of AGMS

At the AGMS of Management Report for fiscal year 2018 held on 27 May 2019 that was scheduled with the following resolution:

No	Agenda Agenda	Keputusan Decision
1	Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). Approval of the 2018 Annual Report (two thousand and eighteen) including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for 2018 (two thousand and eighteen).	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00040/2.0821/AU.1/05/0112-1/1/1V/2019 tanggal 22- 04-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan belas), dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" posisi keuangan konsolidaslan PT PELNI (Persero)dan entitas anaknya tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan "Standar Akuntansi Keuangan di Indonesla", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas)sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. Approved the 2018 Financial Year (two thousand and eighteen) Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratified the Company's Financial Report for the 2018 Financial Year (two thousand and eighteen) which had been audited by Djoko, Sidik & Indra Public Accounting Office as published in report Number 00040/2.0821/AU.1/05/0112-1/1/1V/2019 dated 22-04-2019 (twenty-second of April two thousand and nineteen), with an "Unqualified" opinion on the consolidated financial position of PT PELNI (Persero) and its subsidiaries dated 31-12-2018 (thirty-first December two thousand and eighteen), as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with" Financial Accounting Standards in Indonesia ", as well as providing full acquittal and release of responsibility (volledig acquit de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions that have been performed in the Financial Year ended on 31-12-2018 (thirty-first December two thousand and eighteen) as long as the said action is not a criminal act and is reflected in the books of the Company's reports.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Agenda Agenda	Keputusan Decision
2	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). Approval and Ratification of Partnership and Community Development Program Report for the 2018 Financial Year (two thousand and eighteen).	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00024/2.0821/NASS-AUP. PKBL/05/0112-1/1/II/2019 tanggal 28-02-2019 (dua puluh delapan Februari dua ribu sembilan belas) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut. Approved and ratified the 2018 PKBL Annual Report (two thousand and eighteen) including the Partnership and Community Development Program Financial Report audited by Djoko, Sidik & Indra Public Accounting Office in accordance with the Independent Auditor's Report Number 00024/2.0821/NASS- AUP.PKBL/05/0112-1/1/II/2019 dated 28-02-2019 (twenty-eight February two thousand and nineteen) with an "Unqualified" opinion, as well as providing a settlement and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of PKBL for the 2018 Financial Year (two thousand and eighteen), as long as their action is not a criminal act and is reflected in the report.
3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). Determination of the Use of the Company's Net Profits for the 2018 Financial Year (two thousand and eighteen).	Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp203.631.186.048,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat puluh delapan Rupiah) seluruhnya sebagai cadangan. Determined the use of the consolidated net profit for the 2018 Financial Year (two thousand and eighteen) amounting to Rp203.631.186.048.00 (two hundred and three billion six hundred thirty one million and one hundred eighty six thousand and forty eight Rupiah) as a total reserve.
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Appointment of a Public Accountant Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2019 Financial Year (two thousand and nineteen) and the Financial Statements for the Partnership and Community Development Program for the 2019 Financial Year (two thousand and nineteen).	Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dilakukan secara tersendiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Appointed the Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements and for the Partnership and Community Development Program for the 2019 financial Statements (two thousand and nineteen), which was carried out separately by the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the General Meeting of Shareholders (GMS) based on proposal from the Board of Commissioners.
5	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), Gaji, Honorarium, dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Determination of the tantiem for the 2018 financial year (two thousand and eighteen), salary, honorarium and allowances and other facilities for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2019 (two thousand and nineteen).	Tantiem Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), Gaji, Honorarium, dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ditetapkan dalam keputusan tersendiri. Tantiem for the 2018 Financial Year (two thousand and eighteen), Salary, Honorarium and Allowances and Other Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2019 (two thousand and nineteen) were stipulated in a separate decision.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Agenda Agenda	Keputusan Decision
6	Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2015 (dua ribu lima belas) untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). Ratification of the 2015 (two thousand and fifteen) State Capital Additional Funds (PMN) Accountability Report for the 2018 Financial Year (two thousand and eighteen).	Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015 (dua ribu lima belas), untuk periode Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). Ratification of the 2015 (two thousand and fifteen) State Capital Additional Funds (PMN) Accountability Report for the 2018 Financial Year (two thousand and eighteen).

RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 dan RUPS RKAP TAHUN BUKU 2020

Pada tahun 2020, PT PELNI (Persero) menyelenggarakan 2 kali RUPS yaitu RUPS RKAP Tahun Buku 2020 pada tanggal 28 Januari 2021 dan RUPS Laporan Manajemen Tahun Buku 2020 pada 2 Juli 2020 yang dilaksanakan secara virtual via *Zoom Meeting Video Conference*.

AGMS FISCAL YEAR 2019 and AGMS of RKAP FISCAL YEAR 2020

In 2020, PT PELNI (Persero) held 2 GMS, which were GMS of the RKAP Fiscal Year 2020 on 28 January 2020 and GMS of Management Report for Fiscal Year 2019 on 2 July 2020 via Zoom Meeting Video Conference.

RUPS RKAP TAHUN BUKU 2020
Kehadiran Dewan Komisaris Dan Direksi

Pelaksanaan RUPS RKAP Tahun Buku 2020 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai saat Rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2020 melalui Video Conference Meeting sebagaimana tercantum dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 13 yang di buat dihadapan notaris Ida Adiningsih, SH. Berikut adalah kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat:

GMS OF RKAP FISCAL YEAR 2020
Attendance of BOC and BOD

AGMS of RKAP Fiscal Year 2020 was attended by all members of BoC and BoD who served until the meeting was underway on 28 january 2020 via Video Conference Meeting as stated in the Deed of General Meeting of Shareholder Number: 13 made after Ida Adiningsih, SH. The following is the attendance of Board of Commissioners and Directors in the meeting:

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Attendance of Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Jabatan Position
Dewan Komisaris | Board of Commissioners	
Ali Masykur Musa	Komisaris Utama & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner
Danang Parikesit	Komisaris Independen Independent Commissioner
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner
Wahyu Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner
Haryo Indratno	Komisaris Commissioner
Loto Srinaita Ginting	Komisaris Commissioner

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Nama Name	Jabatan Position
Direksi | Board of Directors	
Insan Purwarisya L Tobing	Direktur Utama President Director
Ganefi	Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs
Masrul Khalimi	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Tol Laut
Muhammad Tukul Harsono	Direktur Armada Director of Fleet
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Business Transportation
Ony Suprihartono	Direktur Keuangan Director of Finance

Agenda dan Keputusan RUPS RKAP Tahun Buku 2020

Pada RUPS RKAP Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2020 memutuskan beberapa hal essential terkait bisnis Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Keputusan Pemegang Saham No.13 yang dibuat dihadapan notaris Ida Adiningsih, SH. Berikut adalah agenda dan keputusan RUPS RKAP Tahun Buku 2020:

Agenda and Resolution of GMS for RKAP Fiscal Year 2020

On AGMS of RKAP Fiscal Year 2020 was held on 28 January 2020 that has decided several essential things related to the Company's business as stated in the Deed of Shareholders' Decision No. 13 made after Ida Adiningsih, SH. The following is the agenda and resolution of AGMS of RKAP Fiscal Year 2020:

No	Agenda RUPS RKAP GMS of RKAP Agenda	Keputusan Decision
1	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Approval of Work Plans and Budgets (RKAP) for 2020 (two thousand and twenty)	Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) PT PELNI (Persero) dengan pokok-pokok sebagai berikut: Approved the Work Plans and Budget (RKAP) for the year of 2020 (two thousand and twenty) of PT PELNI (Persero) with the points as follows: **a. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasi** Statement of Consolidated Profit (Loss)

Uraian Description	Jumlah Total
Pendapatan Usaha Operating Revenue	Rp6,841,041 Juta | Million
Laba Tahun Berjalan Profit for the Current Year	Rp407,852 Juta | Million

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi
Statement of Consolidated Financial Condition

Uraian Description	Jumlah Total	Uraian Description	Jumlah Total
Aset Lancar Current Assets	Rp2,810,814 Juta Million	Liabilitas Liabilities	Rp826,743 Juta Million
Aset Tetap Fixed Assets	Rp4,561,277 Juta Million	Ekuitas Equity	Rp6,545,348 Juta Million
Total Aset Total Assets	Rp7,372,091 Juta Million	Total Liabilitas dan Ekuitas Total Equity and Liabilities	Rp7,372,091 Juta Million

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Agenda RUPS RKAP GMS of RKAP Agenda	Keputusan Decision

c. Investasi
Investment

1). Rencana Investasi Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut:
Investment Planning In 2020 (two thousand and twenty) is as follows:

Uraian Description	Jumlah Total
Kapal Ship	Rp308.500 Juta | Million
Alat Kesehatan Health Equipments	Rp36.520 Juta | Million
Bangunan Rumah Sakit Hospital Building	Rp188.00 Juta | Million
Kontainer Container	Rp7.710 Juta | Million
Alat Bongkar Muat Loading/Unloading Equipments	Rp35.570 Juta | Million
Alat Perhotelan Hospitality Equipments	Rp315 Juta | Million
Alat Perbengkelan Workshop Equipments	Rp3.000 Juta | Million
Perluasan Gedung Operasional Operational Building Expansion	Rp1.200 Juta | Million
Depo Container/Pergudangan Depo Container/Warehousing	Rp62.418 Juta | Million
Alat Retail & Trading Retail & Trading Equipments	Rp7.608 Juta | Million
Alat Service Service Tools	Rp1.339 Juta | Million
Kendaraan untuk Disewakan Vehicles for Rent	Rp5.240 juta | Million
TOTAL INVESTASI ALAT PRODUKSI TOTAL PRODUCTION EQUIPMENTS INVESTMENT	**Rp657.420 Juta** | Million

Uraian Description	Jumlah Total
Bangunan Perkantoran Ship	Rp308.500 Juta | Million
Tanah & Sertifikat Tanah Land & Land Certificate	Rp36.520 Juta | Million
Kendaraan Bermotor Vehicles	Rp188.00 Juta | Million
Mesin Kantor Office Equipments	Rp7.710 Juta | Million
Komputerisasi Computerize	Rp35.570 Juta | Million
Investasi Perkantoran Office Investment	Rp315 Juta | Million
TOTAL INVESTASI SARANA PENUNJANG TOTAL SUPPORTING FACILITIES INVESTMENT	**Rp237.857 Juta** | Million
TOTAL INVESTASI TOTAL INVESTMENT	**Rp895.277 Juta** | Million

2). Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat Tindakan- Tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total nilai investasi, sepanjang tidak merubah program investasi dan tidak melebihi total Investasi.
Granting the authority to Board of Commissioners to give approval if there is any investment allocation changes with maximum value of 10% (ten persen) from total investment value, as long as that does not change investment program and does not exceed total investment.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

<table>
<tr><th>No</th><th>Agenda RUPS RKAP
GMS of RKAP Agenda</th><th>Keputusan
Decision</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
Approval of the Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) in 2020 (two thousand and twenty).</td><td>Menyetujui Rancana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) PT PELNI (Persero) sesuai dengan risalah rapat Nomor: RIS-46/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 22 (dua puluh dua) November 2019 (dua ribu sembilan belas)
Approved the Partnership and Community Development Program Plans and Budgets (RKA PKBL) for the Year of 2020 of PT PELNI (Persero) based on Minutes of Meeting Number: RIS-46/D7.MBU.3/11/2019 on 22 November 2019 (twenty two November two thousand and nineteen)

<table>
<tr><th></th><th>Kemitraan
Partnership</th><th>Bina Lingkungan
Community Development</th></tr>
<tr><td>Dana Tersedia
Available Funds</td><td>Rp 2.430 juta | Million</td><td>Rp 2.850 Juta | Million</td></tr>
<tr><td>Penggunaan Dana
Use of Funds</td><td>Rp 2.430 Juta | Million</td><td>Rp 2.850 Juta | Million</td></tr>
<tr><td>Sisa Dana
Rest of Funds</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr>
</table>
1). Rencana penyaluran dana Program Kemitraan sebesar Rp2.430.000.000 (dua milyar empat ratus tiga puluh juta) yang bersumber dari dana tersedia (bergulir) Program Kemitraan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang terdiri dari: penyaluran pinjaman PK Mitra Binaan sebesar Rp2.230.000.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan pembinaan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas MB.
Partnership Program funds distribution plan was Rp 2,430,000,000 (two billion four hundred and thirty million) from available funds (revolving) for the 2020 Partnership Program (two thousand and twenty) consisting of: disbursement of PK loans to the Partners was IDR 2. 230,000,000 (two billion two hundred and thirty million rupiah) and Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) for coaching that will be used for the Partners capacity building activities.

2). Rencana penyaluran dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp2.850.000.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau 1,08% (satu koma delapan persen) dari Prognosa Laba 2019 (dua ribu Sembilan belas) sebesar Rp262.710.000.000 (dua ratus enam puluh milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
The Community Development Program funds distribution plan was Rp 2,850,000,000 (two billion eight hundred fifty million rupiah) or 1.08% (one point eight percent) of the 2019 Profit Prognosis was Rp 262,710,000,000 (two hundred and sixty billion seven hundred and ten million rupiah) sourced from the budget which is calculated as a fee for SOEs in 2020 (two thousand and twenty).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicator) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
Ratification of Management Contracts (Key Performance Indicators) of the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders in 2020 (two thousand and twenty).</td><td>Mengesahkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicator) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
Approved the Management Contract (Key Performance Indicator) of the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders in 2020 (two thousand and twenty)</td></tr>
</table>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Agenda RUPS RKAP GMS of RKAP Agenda	Keputusan Decision
4	Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*key Performance indicator*) antara Dewan komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Approval and Ratification of Management Contracts (key Performance indicators) between the Board of Commissioners and Shareholders in 2020 (two thousand and twenty)	Menyetujui dan Mengesahkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Approved and ratified the Management Contract (Key Performance Indicator) between the Board of Commissioners and Shareholders in 2020 (two thousand and twenty)
5	Penetapan indikator Aspek operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Determination of operational Aspect indicators to Calculate the Company's Soundness in 2020 (two thousand and twenty)	Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan PT PELNI (Persero) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sebagai berikut: Determined Operational Aspect Indicators to calculate PT PELNI (Persero) soundness in 2020 (two thousand and twenty), as follows:

No	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight
1	*Passenger Factor* Passenger Factor	%	5
2	*Number of Ports* Number of Ports	%	6
3	*Commission Days* Commission Days	%	6
4	*On Time Performance* On Time Performance	%	9
5	Efisiensi Pemakaian BBM Efficiency of fuel consumption	%	9
	Jumlah Total	%	35

Arahan RUPS RKAP Tahun Buku 2020

Pada RUPS RKAP Tahun Buku 2020 telah menghasilkan arahan RUPS dengan status tindak lanjut sebagai berikut:

Direction From GMS RKAP Fiscal Year 2020

At the AGMS of RKAP Fiscal Year 2020 resulted the direction of GMS with follow-up status is as follows:

No	Arahan RUPS RKAP Direction from GMS RKAP
1	RKAP Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan cascading ke seluruh jajaran Perusahaan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan cascading dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan I tahun 2020 (dua ribu dua puluh); RKAP For the Year of 2020 (two thousand and twenty) that was ratified to be detailed into per month targets and cascading to all levels of the Company. The Board of Commissioners should report the detailed and cascading results to the Shareholders in the 1st Quarter of 2020 (two thousand and twenty);
2	Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (cost reduction program) di semua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba besih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen Perusahaan; Triving revenue increasing and controlling the costs (cost reduction program) in all business lines were to realize more effective and efficient Company management, and net profit which was the minimum target that must be achieved by all levels of the Company's management;

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS RKAP Direction from GMS RKAP
3	Mengoptimalkan kenerja operasi kapal tol laut dan pemanfaatan kapal Logistik Nusantara I-VI agar dapat memaksimalkan revenue dan menekan biaya; Optimizing the operational performance of sea toll ships and empowering Nusantara I-VI Logistics ship were to maximize revenue and to reduce the costs;
4	Segera mengusulkan pemanfaatan sisa dana tambahan PMN tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang sampai saat ini belum terserap 100% (serratus persen) untuk meningkatkan jumlah alat produksi; Immediately proposing the use of the remaining 2015 (two thousand and fifteen) additional PMN funds that have not yet been absorbed 100% (one hundred percent) to increase the number of production equipments;
5	Direksi agar memastikan bahwa rencana investasi sudah disertai kajian yang mendasarinya, sehingga realisasi pencapaian investasi dimaksud sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2020 (dua ribu dua puluh); The Board of Directors must ensure that the investment plan has been based on an underlying study, so that the realization of the investment achievement was in accordance with the targets set in the 2020 RKAP (two thousand and twenty);
6	Memperbaiki administrasi pelaksanaan subsidi dan PSO sehingga dapat memastikan bahwa revenue yang berasal dari subsidi dan PSO dapat diterima oleh BPK terkait dengan pencairan subsidi dan PSO sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan PELNI dalam melakukan layanan subsidi/PSO; Fixing the subsidy and PSO administration to ensure that the revenue notes derived from subsidies and PSO can be received by BPK related to the disbursement of subsidies and PSO in accordance with the costs that have been used by PELNI for providing subsidy/PSO services;
7	Menerapkan digitalisasi untuk mendukung pengendalian operasional dan peningkatan layanan; Digitalization is to support operational control and to increase services;
8	Direksi agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja anak perusahaan maupun perusahaan patungan, terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja Perusahaan secara konsolidasi; The Board of Directors should guide and monitor the performance of subsidiaries and joint venture companies, especially whose have a significant contribution to the performance of the Company on a consolidated basis;
9	Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK, auditor independent dan Satuan Pengawasan Intern Perusahaan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh); The Board of Directors should pay attention to the findings and recommendations from the BPK, independent auditors and the Internal Audit Unit which have not been resolved until 2019 (two thousand and nineteen) and set this as target to complete in 2020 (two thousand and twenty);
10	Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (Key Performance Indicator) Direksi dan Dewan Komsiaris Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. The Book of RKAP & PKBL Work and Budget Plans, work plans and KPI (Key Performance Indicator) of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2020 (two thousand and twenty) which have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), are an integral part of the Resolutions of the GMS and become the guidelines for the Board of Directors in implementing work programs and performance targets in 2020 (two thousand and twenty) and to be a tool of monitoring and supervision for the Board of Commissioners.

RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Kehadiran Dewan Komisaris Dan Direksi

Pelaksanaan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan pada 2 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Keputusan Pemegang Saham No. 05 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, SH. SpN. Berikut adalah kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat:

AGMS FISCAL YEAR 2019

Attendance of the BOC And BOD

The AGMS for Fiscal Year 2019 was attended by all members of the BoC and BoD who served until the Meeting was underway on 2 July 2020 as stated in the Deed of Shareholders' Decision No. 05 made after H. Teddy Anwar, SH. SpN. The following is the attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the meeting:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Attendance of Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Jabatan Position
Dewan Komisaris | The Board of Commissioners	
Ali Masykur Musa	Komisaris Utama & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner
Wahyu Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner
Haryo Indratno	Komisaris Commissioner
Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner
Marwanto	Komisaris Commissioner
Direksi | The Board of Directors	
Insan Purwarisya L Tobing	Direktur Utama President Director
Ganefi	Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs
Masrul Khalimi	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Tol Laut
Muhammad Tukul Harsono	Direktur Armada Director of Fleet
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Business Transportation
Ony Suprihartono	Direktur Keuangan Director of Finance



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Agenda dan Keputusan RUPST 2019

Pada RUPS Laporan Manajemen Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juli 2020 melalui *Video Conference Meeting* yang telah diagendakan dengan keputusan sebagai berikut:

Agenda and Resolutions of GMS Fiscal Year 2019

At the AGMS of Management Report for fiscal year 2019 that held on May 2 July 2020 via Video Conference Meeting with the following resolution:

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta Laporan Tugas Pengawasan dewan Komisaris Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Approval of the 2019 Annual Report (two thousand and nineteen) including the Supervisory Duties of the Board of Commissioners Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for 2019 (two thousand and nineteen).	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), yang telah di Audit oleh KAP Hadori Sugiharto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor 00032/2.0768/AU.1/05/0468-1/1/IV/2020 tanggal dua puluh empat april (24-04-2020) dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana Laporan Auditor Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana yang tercermin dalam buku-buku Laporan Perseroan. Approved the 2018 Financial Year (two thousand and eighteen) Annual Report including the Supervisory Duties of Board of Commissioners Report and ratified the Company's Financial Report for the 2019 Financial Year (two thousand and nineteen) which had been audited by Hadori Sugiharto Adi & Partners Public Accounting Office as published in report Number 00032/2.0768/AU.1/05/0468-1/1/IV/2020 dated 24-04-2020 (twenty-second April two thousand and twenty), resulting in "Unqualified" opinion, as well as providing full acquittal and release of responsibility (volledig acquit de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions that have been performed in the Financial Year ended on 31-12-2019 (thirty-first December two thousand and nineteen) as long as the said action was not a criminal act and reflected in the Company's reports.
2	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Approval and Ratification of Partnership and Community Development Program Report for the 2019 Financial Year (two thousand and nineteen).	Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), yang telah di Audit oleh KAP Hadori Sugiharto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor 00032/2.0768/AU.1/05/0468-1/1/IV/2020 tanggal dua puluh empat april (24-04-2020) dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana Laporan Auditor Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Perseroan. Approved and ratified the 2019 Partnership and Community Development Annual Report (two thousand and nineteen) audited by Hadori Sugiharto Adi & Partners Public Accounting Firm as stated in the Report Number Nomor 00032/2.0768/AU.1/05/0468-1/1/IV/2020 dated 24-04-2020 (Twenty-forth April Two thousand and Twenty) resulting "Unqualified" opinion, as well as providing a settlement and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision of PKBL for the 2019 Financial Year (Two Thousand and Nineteen), as long as their action was not a criminal act and recorded in the report.
3	Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2019. Determination of the Use of the Company's Net Profits for the 2019 Financial Year (two thousand and nineteen).	Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sebesar Rp205.108.931.712 (dua ratus lima miliar seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) seluruhnya menjadi cadangan. Determined the use of the consolidated net profit for the 2019 Financial Year (two thousand and nineteen) was Rp205.108.931.712 (two hundred five billion and one hundred eight million and nine hundred thirty one thousand seven hundred and twelve rupiah) as a total reserve.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision
4	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Determination of Salary/Honorarium with other Facilities and Allowances for the Board of Commissioners and Directors of the Company for the 2020 Financial Year (two thousand and twenty), as well as Tantiem for Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2019 Financial Year (two thousand and nineteen).	Menyetujui Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), akan ditetapkan secara tersendiri. Approved the Salary/Honorarium with other Facilities and Benefits for the Board of Commissioners and Directors of the Company for the 2020 Financial Year (two thousand and twenty), as well as bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2019 Financial Year (two thousand and nineteen) to be determined separately.
5	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). Appointment of a Public Accountant Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2020 Financial Year (two thousand and twenty) and the Financial Statements for the Partnership and Community Development Program for the 2020 Financial Year (two thousand and twenty).	Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris Approved the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership Program and Community Development Program for the 2020 Financial Year (two thousand and twenty), which appointed separately by the Minister of SOE at the GMS based on the proposal of the Board of Commissioners
6	Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2015 (dua ribu lima belas) untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Ratification of the Use of Additional State Capital Participation Funds (PMN) Accountability Report in 2015 (two thousand and fifteen) for the fiscal year 2019 (two thousand and nineteen).	Menyetujui Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2015 (dua ribu lima belas) untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Ratified the 2015 (two thousand and fifteen) State Capital Additional Funds (PMN) Accountability Report for the 2019 Financial Year (two thousand and eighteen).

Arahan RUPS Tahunan 2019

Pada RUPS tersebut telah menghasilkan arahan RUPS dengan status tindak lanjut sebagai berikut:

Direction of Annual GMS Fiscal Year 2019

At the AGMS of The Company has been generated The direction of GMS with follow-up status as follows:

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
1	Direksi agar menyusun *roadmap action plan* mengenai Manajemen Pengelolaan PSO dan Angkutan Barang. The Board of Directors is required to prepare the roadmap action plan regarding the management of PSO and Cargo transportation.	Direksi agar menyusun *roadmap action plan* mengenai Manajemen Pengelolaan PSO dan Angkutan Barang. The Board of Directors required to prepare the roadmap action plan regarding the management of PSO and Cargo transportation. • Pembuatan jadwal kapal pso penumpang dengan pola harian 7 hari, 14 hari dan 28 hari disesuaikan dengan *Master Schedule* Tahun 2020. Making of PSO passenger ships scheduled with 7 days, 14 days and 28 days schemes that must fit with Master Schedule 2020. • Penyesuaian operasional kapal pso penumpang dalam rangka efisiensi dan rasionalisasi dampak COVID-19 mulai akhir maret dengan melaksanakan rapat mingguan antara direktorat UAP, direktorat UAB & direktorat keuangan untuk menentukan kapal yang beroperasi. Adjustment of PSO passenger ships for efficiency and rationalisation due to the impact of Covid-19 started since the end of March through weekly meetings with UAP Directorate, UAB Directorate and Finance Directorate is to determine which ships will be operated.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		• Memasuki era *new normal life* pengoperasian kapal pso penumpang terus ditingkatkan dan direncanakan mulai pada bulan Oktober s/d Desember 2020 seluruh kapal pso penumpang sudah beroperasi. PSO passenger ships' entry to New normal life that must keep updated and well-prepared in October until December 2020 for all operating PSO passenger ships.
		Dit.UAB akan berkoordinasi dengan Dit.Keu untuk *roadmap action plan* subsidi angkutan barang. UAB Directorate will coordinate with the Finance Directorate for a roadmap action plan of cargo transport subsidy.
2	Direksi perlu mendorong peningkatan laba konsolidasi melalui pemanfaatan *iddle asset*, efisiensi biaya, penyempurnaan serta pemanfaatan teknologi informasi dan sistem aplikasi secara optimal, pengawasan yang ketat terhadap calon penumpang tanpa tiket serta pengendalian penumpang diatas kapal. The Board of Directors needs to boost consolidated income by empowering idle assets and cost efficiency, updating and using information technology and application systems optimally, strict monitoring to the passengers with no ticket as well as passengers control on board.	• Bersama Direktorat Usaha Angkutan Penumpang melakukan implementasi aplikasi admin kapal di seluruh kapal penumpang. Together with the Passenger Business Transport Directorate is installing ship administration applications to all passenger ships. • Bersama Direktorat Usaha Angkutan Penumpang melakukan implementasi aplikasi *sweeping* penumpang di atas kapal. Together with the Passenger Business Transport Directorate is installing a passenger sweeping application on board. • Melakukan implementasi *e-payment* (baik *payment gateway* maupun *host to host*) guna memperluas kanal pembayaran untuk seluruh produk/jasa PELNI Installing e-payment (both gateway or host to host payments) in order to multiply payment channels into all PELNI products/services. • Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Winona (winona.pelni.co.id) untuk mendukung bisnis penyewaan aset-aset PELNI. Optimizing Winona application (winona.pelni.co.id) is to support PELNI rent assets business. • Bersama Direktorat Usaha Angkutan Barang & Tol Laut mengembangkan aplikasi *New Bill of Lading (New BL)* yang diberi nama *MyCargoo!* (mycargoo.pelni.co.id) untuk mendukung perluasan dan pengembangan bisnis angkutan muatan PELNI. Together with Freight & Tol Laut Business Directorate developed a New Bill of Lading (New BL) application named MyCargoo (mycargoo.pelni.co.id) to broaden and develop PELNI freight transport business.
		Upaya dilakukan secara persuasif untuk memberikan pemahaman dan instruksi kepada kepala cabang dan kepala terminal poin untuk memanfaatkan aset *idle* dengan melakukan pengendalian biaya operasional, penjagaan keamanan aset hingga komersialisasi aset yang dapat meningkatkan penghasilan bagi perusahaan. Some persuasives steps were to give an understanding and instructions to Head of Branches and Head of Terminal Point for utilizing idle assets through operational cost control, assets security up to the commercialization of assets that can improve the income for the Company.
		Pemanfaatan *Idle* Aset. Untuk pemasaran yang efektif perlu modifikasi atau renovasi aset sehingga ada pembeda dan keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Untuk efisiensi biaya perlu dilakukan rencana pemeliharan atau renovasi bagian-bagian utama aset secara bertahap sehingga dapat meningkatkan nilai guna bangunan. Idle assets utilization for an effective marketing that needs modification or renovation to make different and excellent assets compared to others. For cost efficiency needs maintenance or renovation plans for main assets partially that can increase the building value.
		• Menjaga dan memastikan aset perusahaan dalam keadaan aman dan membantu mengawasi pengelolaan aset 114 berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelolanya. Maintaining and ensuring the Company's assets in safe condition and monitoring 114 assets management is well-used in accordance with its governance. • Menerapkan *barcode system* untuk memastikan bahwa patroli pengawasan gedung dilaksanakan dengan baik. Installing barcode system to ensure that the building surveillance patrol is running well. • Memastikan Penumpang yang naik ke atas Kapal telah memiliki tiket dan mengambil tindakan tegas bagi penumpang yang tidak memiliki tiket. Ensuring the passenger has been on board already having a ticket and taking decisive action for the passenger who does not have a ticket.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		• Optimalisasi pengelolaan anggaran Bantuan pengamanan dengan menyesuaikan kondisi dan peruntukannya. Optimization of security costs management is by adjusting to its term and condition.
		• Saat ini dilakukan sistem check in di DCS (*Departure Control System*) dengan melakukan *scan barcode* pada tiket/*boarding pass* serta melakukan validasi tiket/*boarding pass* dengan kartu identitas sebelum pnp naik ke atas kapal. Now there is an applicable check in system in DCS (Departure Control System) by scanning the barcode on the ticket/boarding pass and validating the ticket/boarding pass with ID before the passenger on board. • Dilakukan koordinasi antara PELNI (Div Operasi & Div TI) dengan PELINDO terkait integrasi data untuk filter penumpang yang masuk ruang tunggu terminal melalui *Gate*. PELNI (Operation & IT Divisions) coordinates with PELINDO related to data integrated to filter the passenger who wants to enter the terminal waiting room through the Gate. • Dilakukan koordinasi antara Div. Operasi dengan Div. IT terkait pembuatan *platform voyage account* untuk memonitor kapal dari sisi pengoperasian, penghasilan dan biaya. Operation Division coordinates with IT Division related to the voyage account platform to monitor the ships in terms of operation, income and cost.
		• Saat ini telah digunakan sistem *e-reservation* untuk pemesanan tiket kapal secara online, *e-payment* untuk melakukan pembayaran tiket secara cashless dengan edc dan *e-wallet*, dan *e-ticketing* dengan cara menukarkan kode *booking* menjadi tiket *boarding pass* yang dicetak dengan mesin cetak tiket mandiri. An e-reservation system is for online ticket reservation, e-payment, and cashless payment system through edc and e-wallet, as well as e-ticketing is to change the booking code to be a boarding pass printed on self-service printing machine. • Saat ini dilakukan sistem check in di *DCS(Departure Control System)* dengan barcode sebelum naik ke atas kapal, validasi tiket dan tanda pengenal, dan pengecekan ulang tiket dan tanda pengenal setelah naik ke kapal. Check in via DCS (Departure Control System) with barcode before on board is now applied, validating ticket and ID, as well as rechecking ticket and id after on board. • Sistem pelaporan di atas kapal menggunakan admin kapal. Reporting system on board is using ship administration. • Saat ini dilakukan konsolidasi data tiket penumpang antara data DCS dan Kapal, untuk bisa melacak penumpang tanpa tiket yang berada di atas kapal. The passenger ticket data, DCS data and ship are now being consolidated, to track the passenger who has no ticket on board.
		Dalam rangka penyempurnaan serta pemanfaatan teknologi informasi dan sistem aplikasi secara optimal, Divisi Pelayanan Angkutan Penumpang melakukan hal sebagai berikut : In order to always update the use of information technology and application system optimally, Passengers Service Division has conducted several steps, as follows: • Menerapkan Protokol *New Normal Life* di atas kapal dengan layanan penyajian makanan & minuman untuk penumpang yang menerapkan metode *self scan barcode meal service* yaitu setiap penumpang melakukan verifikasi tiket mandiri untuk tukar makan dan mengambil sendiri makanan & minuman yang telah disiapkan di meja *buffet* dalam bentuk *meal box* pada masing-masing dek dengan pengawasan Awak Kapal. Adapun pengawasan yang dilaksanakan Awak Kapal adalah untuk mengawasi pengambilan makan penumpang sesuai hasil validasi tiket pada aplikasi Admin Kapal dan memonitor persediaan makanan di meja *buffet*. Saat ini sedang dalam proses penentuan atas rekomendasi bisnis proses dan investasi peralatan untuk penerapan *self scan barcode* tukar makan yang sementara ini ditetapkan pada 1 (satu) titik lokasi di setiap kapal untuk 26 kapal penumpang. Yang selanjutnya akan diproses Divisi TI untuk pengadaan dan instalasi di atas kapal. Applying New Normal Life protocol for food & beverages services on board through self - scan barcode meal service that each passenger validates their ticket to take their food and beverages in a kind of meal box on the buffet table by themselves and it is under supervision by ship crews. This supervision by ship crews is to watch the passenger meals according to the ticket validation on Ship Administration application and to monitor the food availability on the buffet table. The determining process of business process recommendation and equipment investment for meal self scan barcode is currently on 1 (one) point on every ship for 26 passenger ships and will be processed by IT Division for the procurement and installation to those ships.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		• Melakukan transformasi digital secara efektif dan menyeluruh khususnya pada *supply chain* bahan makanan dengan melakukan integrasi sistem antara aplikasi SIPARSEL PT PELNI dengan aplikasi WMS (*Warehouse Management System*) milik PT PIDC diantaranya sebagai berikut: Effective and comprehensive digital transformation applied to food supply chain by integrating system between SIPARSEL application of PT PELNI (Persero) and WMS (Warehouse Management System) application of PT PIDC is as follows:
		a. Mengintegrasikan PO (*Purchase Order*) bahan makanan pada aplikasi SIPARSEL dengan SPBM (Surat Pesanan Bahan Makanan) pada aplikasi WMS. Integrating PO (Purchase Order) of food ingredients to SIPARSEL application and SPBM (Letter of Food Purchase Order) on WMS application. b. Mengintegrasikan *barcode system* bahan makanan yang dikirimkan PT PIDC keluaran dari aplikasi WMS dengan penerimaan barang pada aplikasi SIPARSEL. Untuk saat ini kapal yang sudah mengimplementasikan aplikasi SIPARSEL yaitu KM. Kelud dan selanjutnya diimplementasikan juga pada KM. Nggapulu dan KM. Kelimutu pada bulan September 2020. Integrating barcode system of food ingredients sent by PT PIDC from WMS Application attached with the receipt of SIPARSEL Application. For now, this SIPARSEL application has already been installed on MV. Kelud and will be installed on MV. Nggapulu and MV. Kelimutu in September 2020.
3	Direksi perlu mengoptimalkan pemanfaatan kas perusahaan dengan lebih baik dengan mempertimbangkan instrumen keuangan yang aman dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. The Board of Directors needs to optimize the Company's cash wisely by considering safe financial instruments and can be useful for the Company.	Guna optimalisasi pemanfaatan kas yang tersedia, dalam pengelolaannya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum *cash* setiap bulannya. Dimana rata-rata kebutuhan kas (kondisi normal) setiap bulannya guna membiayai kegiatan operasional seperti Biaya BBM, Biaya Gaji, Biaya Layanan Penumpang, Biaya Kepelabuhanan dan Biaya Suku Cadang Kapal dan Biaya lainnya yang bersifat mandatory dibutuhkan kas rata - rata sebesar Rp.380 M. Selain itu, dalam pengelolaan optimalisasi kas juga menyesuaikan dengan Belum terjadwalnya pencairan kompensasi dana penugasan PSO dan subsidi secara tetap di tahun 2019, maka optimalisasi pemanfaatan kas yang dilakukan PT PELNI (Persero) melalui instrumen deposito perbankan dan giro special. In order to optimize the utilization of the provided cash, its management is carried out by considering the minimum cash requirement every month. Where the average cash requirement (normal conditions) each month to finance operational activities such as fuel costs, salary costs, passenger service fees, port fees and ship spare parts costs and other mandatory costs that need an average of Rp 380 billion. In addition, in managing cash optimization, it also adjusts to the unscheduled disbursement of compensation for PSO assignment funds and subsidies on a regular basis in 2019, so the optimization of cash utilization is carried out by PT PELNI (Persero) through banking deposit instruments and special demand deposits.
		Sejalan program Digitalisasi Perusahaan, Tim Divisi Pengadaan Bersama Tim Divisi TI sedang dalam proses pengembangan aplikasi sbb : In line with the Company's Digitization program, the Procurement Division Team with the IT Division Team is in the process of developing for the following applications: 1. *E-procurement* PT PELNI PT PELNI (Persero) e-Procurement 2. *Digital Signature* untuk dokumen *Purchase Order* (PO) Digital Signature for Purchase Order (PO) document
4	Direksi agar meningkatkan pendapatan usaha perkapalan yang merupakan bisnis utama induk perusahaan. The Board of Directors needs to increase ship business income, which is a core business of the Company	• Telah dilaksanakan rapat rencana pengoperasian kapal penumpang antara lintas Direktorat untuk mengevaluasi capaian pendapatan perkapalan di seluruh kapal pso penumpang sebagai dampak Covid-19 sehingga beberapa kapal melakukan penyesuaian trayek (omisi dan deviasi). Passenger ship operation plan meeting has been held by across Directorate to evaluate the achievement of the income for all passenger pso ships impacted by Covid-19 pandemic so that some ships adjusted its routes (omission and deviation). • Telah dilakukan pengajuan pembatasan kapasitas keterisian penumpang di kapal dari 50% menjadi 70% There has been a proposal for limiting the occupancy capacity of passengers on board from 50% to 70%.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		• Mengoptimalkan informasi dan promosi produk *knowledge* melalui *marketing tools* berupa Media Cetak (booklet, brosur, koran, dll) dan Media Sosial (*Email Blasting*, PELNI 162, dll). Optimizing information and promoting the product knowledge via marketing tools such as Printed Media (booklet, brochure, news paper, etc) and Social Media (Email Blasting, PELNI 162, dll) • Memberlakukan tarif diskon untuk muatan balik di semua jenis muatan berdasarkan potensi yang ada atas permintaan Cabang, ketentuan tarif sesuai SK kewenangan dan SK *Return Cargo*. Round-trip cargo carrier tariff discount for all kinds of cargo based on the potential area and branches request, the term of this tariff is aligned with Decree letters of authority and Return Cargo. • Optimalisasi program *canvassing* ke perusahaan logistik dan sentra produksi barang. The canvassing optimization program to logistic and goods production companies. • *One on one meeting* dengan pelaku logistik dan produsen yang mempunyai potensi cargo secara periodik (Mingguan atau Bulanan). One on one meeting with logistic provider and producer which have potential cargo periodically (weekly or monthly).
		Kerja sama dengan *shipper* daerah yang memiliki potensi muatan di daerah-daerah tertentu. Selain itu, untuk menjaga hubungan baik antara *shipper* dan perusahaan maka setiap tahun selalu dilakukan *shipper gathering.* Cooperating with local shippers which have the potential cargo in certain areas. On the other hand, to ensure a harmonious relationship between us and those shippers, we also held shipper gatherings.
5	Direksi agar selalu berupaya menangani kendala-kendala operasional yang menyebabkan keterlambatan perjalanan kapal sebagai pengendalian mutu layanan angkutan kapal. The Board of Directors is required to tackle the operational challenges that led to the trip delayed schedule, which is as a quality control for ship transport services.	Penggunaan jala-jala guna menghindari lamanya port time kapal di pelabuhan dapat memaksimalkan percepatan waktu dalam kegiatan bongkar muat khususnya muatan *General Cargo* sehingga O*n Time Performance* dapat tercapai. The use of nets to avoid the length of the ship's port time can maximize the acceleration of time in loading and unloading activities, especially General Cargo cargo that is to achieve On Time Performance.
		Disamping itu penyampaian fasilitas pelabuhan yang disinggahi Tol laut merupakan daerah T3P (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) yang sangat minim fasilitas pelabuhannya, adapun upaya yang kami lakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat) untuk dapat membawa alat2 (seperti forklif) untuk ditempatkan diatas kapal sebagai penunjang alat bongkar muat di pelabuhan T3P, sehingga keterlambatan kapal dapat diminimalisir. Besides, the delivery of port facilities that are visited by sea highways to T3P area (Disadvantaged, Remote, Outermost and Border) which has very minimal port facilities, our efforts are to coordinate with PBM (Unloading Companies) to be able to carry equipment (such as forklifts) to be placed on the ship as a support for loading and unloading equipment at the T3P area ports, so that ship delays can be minimized.
		Melakukan koordinasi dengan cabang - cabang yang dilalui oleh Kapal Tol Laut untuk menghitung dan mengestimasikan kegiatan bongkar muat serta operasional dan pelayanan kapal supaya tepat waktu dan sesuai emplooi yang sudah terbit Coordinate with the branches that are stopped by Sea Toll Ships to calculate and estimate loading and unloading activities as well as ship operations and services so the ships can be on time and are according to the published emplooi.
		Sejalan program Digitalisasi Perusahaan, Tim Divisi Pengadaan bersama Tim Divisi TI sedang dalam proses pengembangan aplikasi sbb : 1. *E-procurement* PT PELNI 2. *Digital Signature* untuk dokumen *Purchase Order* (PO) In line with the Company's Digitalization program, the Procurement Division together with the IT Division are in the process of developing these following applications: 1. PT PELNI E-procurement, 2. Digital Signature for Purchase Order (PO) documents.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		Bersama Direktorat Armada melakukan implementasi aplikasi PMS (*Planned Maintenance System*) untuk mengawasi dan mengelola pelaksanaan pemeliharaan kapal-kapal yang dioperasikan PELNI. Together with the Fleet Directorate, we has implemented the PMS (Planned Maintenance System) application to supervise and manage the maintenance of ships operated by PELNI.
		• Menjalankan pengawasan dan pelaksanaan Embarkasi/Debarkasi sesuai prosedur agar berjalan optimal sehingga *port time* Kapal sesuai dengan jadwal yang elah ditentukan Embarkation/Debarkation according to procedures to run optimally so that the ship's port time is in accordance with the predetermined schedule. • Mengatur pergerakan barang agar tidak mengganggu jalannya proses Embarkasi/Debarkasi Organizing the movement of goods so as it does not interfere with the Embarkation/Debarkation process. • Membantu Pelayanan tiket agar berjalan lancar dan tertib Helping ticketing service is to run smoothly and orderly.
		Upaya tindaklanjut dalam menangani kendala operasional kapal sebagai berikut: Follow-up to deal with ship operational constraints are as follows: • Perbaikan oleh ABK (dengan arahan *Owner Surveyor*/Divisi Teknik apabila diperlukan). Repairment is by ship crews (with direction from Owner Surveyor/Engineering Division if needed). • Jika kendala teknis tidak mampu ditangani oleh ABK maka Direktorat Armada akan mengirimkan tenaga ahli ke Pelabuhan tujuan pelayaran terdekat untuk dilakukan perbaikan segera. Adapun Pengadaan jasa tenaga ahli dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan. If the technical problems cannot be handled by the crews, the Fleet Directorate will send experts to the nearest shipping destination port for immediate repair. The procurement of this expert services is carried out in accordance with applicable regulations within the Company.
		Telah dilaksanakan rapat antara Div. Operasi dengan Div. Teknik untuk pelaksanaan *scraping* pada kapal-kapal yang melaksanakan *port stay* sehingga kapal dapat mencapai kecepatan optimalnya ketika dioperasikan kembali dan dapat mencapai target OTP. Penyesuaian Operasi jam layar dengan *speed* kapal eksisting. The Operation Division and Engineering Division held a meeting for the implementation of scrapping on ships in port stay so that ships can reach their optimal speed when sailing again and can reach the OTP target. Adjustment of sailing hours operation with the existing ship speed.
6	Direksi agar sigap melengkapi dokumen administrasi pencairan dana PSO/ subsidi pada kesempatan pertama untuk memperlancar proses pencairannya. The Board of Directors responses to complete administrative documents for disbursement of PSO/subsidy funds at the first place to expedite the disbursement process.	Secara rutin mengirimkan nota dinas kepada Div. Pengelolaan PSO & Subsidi setiap awal bulan yang berisi Realisasi Laporan Perjalanan Penugasan PSO Angkutan Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) berupa V*oyage Report, Capaian Commission Days* & Frekuensi, Laporan Omisi dan Deviasi dan *Tracking* Kapal Penumpang (Peta & Koordinat). Routinely sending official notes to PSO & Subsidy Management division at the beginning of each month, which is containing the Realization of the PSO Assignment Trip Report for PT PELNI (Persero) Passenger Ship Transport in the form of Voyage Reports, Commission Days Achievements & Frequency, Omissions and Deviations Reports and Passenger Ship Tracking (Maps & Coordinates).
		• Secara periodik (bulanan) berkoordinasi dan menginfokan penjualan produksi dan penghasilan muatan di kapal penumpang dan perintis dengan Div PSO, Div OKPP, Div PAPKPP. (melampirkan dokumen - dokumen pendukung yang diperlukan). Periodically (monthly) coordinating and informing sales of production and cargo income on passenger and feeder ships with the PSO Div, OKPP Div, PAPKPP Div. (attached necessary supporting documents) • Implementasi aplikasi muatan perintis (*Pecasy*) sebagai tools percepatan penyampaian data produksi dan penghasilan muatan di Kapal Perintis Implementation of Feeder cargo application (Pecasy) is as a tool for accelerating the delivery of production data and cargo income on Pioneer Ships.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		Melakukan koordinasi dengan cabang - cabang yang termasuk di dalam rute yang dilewati oleh Kapal Tol Laut untuk selalu mempersiapkan dokumen - dokumen terkait penagihan PSO setiap akhir *voyage* Coordinating with branches that are included in the route passed by Sea Toll Ships to always prepare documents related to PSO billing at the end of each voyage.
		Pada semester I/ 2020 kolaborasi pengelolaan aset dicabang atau *terminal point* mulai terdapat geliat yang lebih baik. Dimana cabang atau terminal poin mampu mewakili Divisi Pengelolaan Aset (dengan arahan dan pendampingan secara virtual) untuk bernegosiasi kepada calon mitra lokal hingga mendampingi saat survey dan renovasi. Kontrak baru selama pandemi ini: Asset management collaboration In the first semester of 2020 at branches or terminal points began to get better. Where branches or terminal points are able to represent the Asset Management Division (with virtual direction and assistance) to negotiate with potential local partners to assist during surveys and renovations. New contracts during this pandemic are:
		1. Penggunaan bangunan oleh PT Garuda Indonesia di pangkalpinang (kontrak selesai). The use of building by PT Garuda Indonesia Tbk in Pangkalpinang (contract expired). 2. Penawaran kerjasama jangka panjang untuk aset Ternate dan Jayapura oleh PT Sari Melati Kencana utk Pizza Hut (progress persetujuan BOD pizza HUT). Offering of Long term agreement for Ternate and Jayapura assets by PT Sari Melati Kencana untuk Pizza hut (on BOD Pizza Hut approval progress). 3. Kerjasama sharing profit untuk aset di banjarmasin dengan PT Kula Makmur Baimbai (tahap renovasi lokasi sewa). Sharing profit for assets in Banjarmasin with PT Kula Makmur Baimbai (on rental site renovation process). 4. Kerjasama sewa space iklan di kapal dan kantor pusat dengan PT Pegadaian (Persero). Advertising rent space agreement on Board and at Head Office with PT Pegadaian (Persero). 5. Kerjasama sewa aset Surabaya Heritage dan Kintamani untuk gerai Indomart (tahap pengurusan ijin PEMDA). Rent assets agreement at Surabaya Heritage and Kintamani for Indomaret store (on local government permit process).
7	Direksi perlu menjalin sinergi dan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah, khususnya kepada Menteri Perhubungan c.q Ditjen Hubla, agar memperoleh kepastian kontrak penugasan kapal Tol Laut setiap tahunnya. The Board of Directors needs to build a sinergy and more intense coordination with the Government, particularly the Ministry of Transportation c.q General Directorate of Sea Transportation, in order to get an assignment contract for Sea Toll Ship each year.	Direksi berkoordinasi intens dengan Kemenhub dan Dirjen Hubla terkait kepastian anggaran Subsidi tol laut perintis ternak dan rede tahun 2021 The Board of Directors coordinated intensely with the Ministry of Transportation and the Director General of Sea Transportation regarding the certainty of the budget for Tol Laut, Feeder, livestock and rede ships subsidies for 2021.
		• *Zoom meeting* terkait Monev dan Usulan Trayek Tol Laut Trayek T-10 dengan Kemenhub pada tanggal 17 April 2020. Zoom meeting related to monitoring, evaluating and Proposing the T-10 Tol Laut Route with the Ministry of Transportation on 17 April 2020. • *Zoom meeting* terkait Verifikasi Tagihan PT PELNI (Persero) bulan Januari - Mei TA 2020 dengan Kemenhub pada tanggal 28 Juli 2020. Zoom meeting related to Billing Verification of PT PELNI (Persero) in January - May Fiscal Year 2020 with the Ministry of Transportation on 28 July 2020. • Melaksanakan rapat pembahasan PM 2 dengan Ditlala pada tanggal 4-5 Agustus 2020 di Hotel Harris Vertu. Held a PM 2 discussion meeting with Ditlala on 4-5 August 2020 at the Harris Vertu Hotel. • *Zoom meeting* terkait Pembahasan Usulan Trayek Perintis Provinsi Jawa Timur dengan Kemenhub pada tanggal 14 Agustus 2020. Zoom meeting related to the Proposed Feeder ships Route in East Java Province with the Ministry of Transportation on 14 August 2020. • Melaksanakan rapat dengan Kementerian Perhubungan terkait amandemen kontrak PSO dan penugasan kapal ternak pada tanggal 7-9 September 2020 di Merlynn Park Hotel. Held a meeting with the Ministry of Transportation regarding the amendment of the PSO contract and the assignment of cattle ships on 7-9 September 2020 at the Merlynn Park Hotel.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		• *Zoom meeting* terkait FGD Penyelenggaraan Transportasi Berkeadilan di Kepulauan Seribu dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta pada tanggal 8-9 September 2020. Zoom meeting related to the FGD for Equitable Transportation to the Seribu Islands with the Jakarta City Transportation Council on 8-9 September 2020. • Rapat Monitoring dan Evaluasi Kapal Perintis, Kwandang, Bitung, Surabaya, Papua Barat dan Maluku Utara, dengan Kemenhub, KSOP dan Dishub setempat. Monitoring and Evaluation Meeting of Pioneer Ships, Kwandang, Bitung, Surabaya, West Papua and North Maluku, with the Ministry of Transportation, KSOP and the local Transportation Agency.
		Melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan Tol Laut dan Kapal Ternak dengan Kemenhub dan Pemda, terutama untuk perubahan trayek Tol Laut dan Ternak yang dilayari oleh PT PELNI (Persero) Periodic evaluation of Tol Laut and Cattle Ships implementation with the Ministry of Transportation and Regional Government for the changes of Tol Laut and Cattle Ships routes voyaged by PT PELNI (Persero).
		Secara berkesinambungan Divisi Pengelolaan Aset bekerjasama dengan Divisi Teknologi Informasi tengah mengembangkan aplikasi web dan sistem transaksi WINONA yang dapat dipergunakan sebagai sarana promosi kepada masyarakat, informasi kepada calon mitra dan transaksi pembayaran dengan mitra. Saat ini sistem transaksi tersebut sudah dipergunakan untuk penawaran dan negosiasi dengan mitra sebagai berikut: The Asset Management Division has cooperated with the Information Technology Division and is continuously developing the WINONA web application and transaction system that can be used for promotion to the public, information to potential partners and payment transactions with partners. Currently, the transaction system has been used for offers and negotiations with partners as follows:
		1. Kerjasama sewa aset di cabang PELNI Palu dengan CV. Akar Daya Mandiri (proses penerbitan kontrak). Rent assets cooperation for PELNI Palu branch with CV. Akar Daya Mandiri (Contract Issuance Process). 2. Perpanjangan kontrak di cabang PELNI Surabaya dengan STIE Artha Bodhi Iswaran dan CV. *Gracia Blue Logistic* (proses penerbitan kontrak). Contract extension at PELNI Surabaya branch with STIE Artha Bodhi Iswaran and CV. Gracia Blue Logistic (contract issuance process). 3. Kerjasama pengelolaan space di kapal dengan CV Qadri Bangun Persada (proses penerbitan kontrak) Space advertising management on board with CV Qadri Bangun Persada (contract issuance process).
8	Direksi perlu meningkatkan kinerja serta sinergi koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan aktif menjemput bola di masing-masing cabang. The Board of Directors needs to improve and coordinate synergy with the Related Parties to actively pursue the income in Branches.	Menjaga kualitas Pelayanan Keamanan dan menjaga *Perform* agar memberi rasa aman dan nyaman serta memberi nilai positif bagi Pengguna jasa Perusahaan. Maintained the quality of Security Services and Performance in order to provide a sense of security and comfort as well as provide positive value for the Customers.
		PT PELNI (Persero) telah memberikan instruksi terkait kepada cabang dan terminal poin untuk melakukan pengendalian biaya operasional, penjagaan keamanan aset hingga komersialisasi aset yang dapat meningkatkan penghasilan bagi perusahaan sesuai ND Direktur SDM dan Umum Nomor : 04.09/01/ND-B/040/2020 tanggal 09 April 2020 perihal Instruksi Pengamanan Pendapatan Dan Pembatasan Penggunaan Fasilitas Perusahaan Untuk Mitra Penyewa/Kerjasama. PT PELNI (Persero) has given instructions to branches and terminal points to control operational costs, safeguard asset security to commercialize assets that can increase income for the company according to the Director of Human Resources and General Affairs Notes Number: 04.09/01/ND-B/040/2020 dated 9 April 2020 regarding Instructions for Safeguarding Income and Restricting the Use of Company Facilities for Tenant/Cooperation Partners.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		• *Zoom meeting* terkait Monev dan Usulan Trayek Tol Laut Trayek T-10 dengan Kemenhub pada tanggal 17 April 2020. Zoom meeting related to Monitoring, Evaluation and Proposal of the T-10 Tol Laut Routes with the Ministry of Transportation on 17 April 2020. • *Zoom meeting* terkait Pembahasan Usulan Trayek Perintis Provinsi Jawa Timur dengan Kemenhub pada tanggal 14 Agustus 2020. Zoom meeting related to the Discussion of the Proposed Feeder Route in East Java Province with the Ministry of Transportation on 14 August 2020. • *Zoom meeting* terkait FGD Penyelenggaraan Transportasi Berkeadilan di Kepulauan Seribu dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta pada tanggal 8-9 September 2020. Zoom meeting related to the FGD for the Equitable Transportation in the Seribu Islands with the Jakarta City Transportation Council on 8-9 September 2020.
		• Rapat *Monitoring* dan Evaluasi Kapal Perintis, Kwandang, Bitung, Surabaya, Papua Barat dan Maluku Utara, dengan Kemenhub, KSOP dan Dishub setempat. Monitoring and Evaluation Meeting of Pioneer Ships, Kwandang, Bitung, Surabaya, West Papua and North Maluku, with the Ministry of Transportation, KSOP and the local Directorate of Transportation. • Rapat koordinasi dengan kemenhub dan kadishub Aceh, Tg. Pinang, Makassar, Ambon. Coordinated with the Ministry of Transportation and Head of the Department of Transportation of Aceh, Tg. Pinang, Makassar, Ambon.
		• Tim Sales di cabang secara rutin melakukan kegiatan *canvassing* dan melaporkan kegiatan ke bagian penjualan pusat, untuk ditindak lanjuti. The sales team at the branch routinely do canvassing activities and reports activities to the central sales department, for follow up. • Monitoring dan evaluasi informasi, potensi dan tantangan yang ada di setiap cabang secara berkala. Monitoring and evaluating information, potential and challenges in each branch on a regular basis. • Memberikan feedback dan tindak lanjut terkait kebutuhan cabang untuk menunjang produksi dengan potensi yang ada dicabang. Give feedback and follow-up related to branch needs to support production with existing potential in the Branches. • Koordinasi berkala (bulanan) via *zoom meeting*. Monthly coordination via zoom meeting.
		Tim kerja Cabang yang terdiri dari Kepala Cabang dan tim sales secara aktif melakukan kegiatan canvassing di daerah masing – masing, terutama untuk muatan balik dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, PT PELNI (Persero) juga melakukan pendekatan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan mengingat perusahaan pada akhir Tahun 2019 mendapat pelimpahan operasional sebanyak 8 trayek swasta yang tidak dapat dilanjutkan oleh pihak swasta. The Branch work team consisting of Head of Branches and the sales team is actively canvassing activities in their respective regions, especially for backloading in collaboration with local governments. In addition, PT PELNI (Persero) also approached the Ministry of Transportation and the Ministry of Trade considering that the company received an operational delegation of 8 private routes which could not be continued by the private sector at the end of 2019 .

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
9	Direksi perlu mempertimbangkan transformasi proses bisnis yang memungkinkan cabang untuk menyusun konsep pengembangan bisnis untuk mengembangkan pasar angkutan kapal dengan menyelaraskan remunerasi/*reward consequences* dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan. The Board of Directors needs to consider a business transportation process that enables the branches to make business development concepts for the ship transportation market by aligning remuneration/reward consequences for improving the performance and productivity of the Company.	Pengembangan usaha dibidang Jasa Pengamanan di daerah cabang tersebut Business development in the field of Security Services in the branch areas. • Dalam hal keagenan kapal cabang diberikan keleluasaan untuk mencari dan bekerjasama dengan mitra keagenan serta diberikan keleluasaan untuk bernegosiasi dengan mitra mengenai biaya keagenan dengan batasan jasa keagenan sebesar 20% dari biaya operasional. In the case of branch ship agencies, they are given the freedom to find and cooperate with agency partners and are given the freedom to negotiate with partners regarding agency costs with an agency service limit of 20% of operational costs. • Masing - masing cabang diberikan target penghasilan dan dipantau secara terus menerus serta telah diusulkan untuk menjadikan penghasilan keagenan cabang sebagai indikator penilaian cabang. Each branch has had an income target and has been monitored continuously and it has been proposed to make the branch agency income as an indicator of branch assessment. Melakukan pertemuan dan koordinasi dengan PT Mahesa Bahari Internasional mengenai penjajakan Trayek Liner Belawan - Port Klang yang akan direalisasikan pada akhir tahun 2020 Conducted meetings and coordinated with PT Mahesa Bahari Internasional regarding the exploration of Belawan - Port Klang Route which will be conducted at the end of 2020.
10	Direksi agar selalu melakukan akselerasi maupun penyesuaian rencana aksi perusahaan dan inovasi-inovasi untuk memenuhi tantangan/*challenge* dari *stakeholder* terkait. The Board of Directors needs to always accelerate and adjust the company's action plans and innovations to meet the obstacles/ challenges from the relevant stakeholders.	Sejalan program Digitalisasi Perusahaan, Tim Divisi Pengadaan bersama Tim Divisi TI sedang dalam proses pengembangan aplikasi sbb : In line with the Company Digitization program, the Procurement Division and IT Division Teams are in the process of application development as follows: 1. *E-procurement* PT PELNI (Persero) E-procurement of PT PELNI (Persero) 2. *Digital Signature* untuk dokumen *Purchase Order* (PO) Digital Signature for Purchase Order document (PO) Mengubah sistem Pengamanan konvensional menjadi sistem preventive modern berbasis teknologi Upgrading the Conventional Security system is to be a high-tech preventive system. • Pada kegiatan keagenan dan *lifestyle* kapal akan dilaksanakan kerjasama dengan pihak *cruise* asing sebagai partner dalam menyediakan layanan *domestic sailing.* Agencies and Lifestyle ships will be cooperated with international cruise ship as a partner in providing domestic sailing. • Pada kegiatan l*ifestyle* mengupayakan secara terus menerus untuk kegiatan *tour* dapat terus berjalan dengan menyesuaikan kondisi saat ini yaitu melalui virtual baik itu *virtual tour on board* maupun v*irtual explore* nusantara pada pulau terdepan dan terluar. We strive continuously for lifestyle tour activities by adapting to nowadays conditions, which is either a virtual tour on board or virtual explore nusantara to the foremost and outermost islands. Perusahaan telah melakukan penjajakan dengan beberapa BUMN, khususnya BUMN pertambangan dan BUMN karya, untuk meningkatkan performansi kapal barang The Company has explored several State-owned Enterprises, particularly mining and construction State-owned Enterprises, to increase the performance of cargo ships.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		1. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Armada : Modifikasi *propeller* menggunakan Energi Protein di beberapa kapal untuk menambah kecepatan kapal dan efisiensi BBM. Some innovations have been made by the Fleet Directorate; the Propeller modification using Eco-protein Energy for some ships to improve ship speed and fuel efficiency. 2. Modifikasi pemasangan *In Water Serviceable Seals (IWWS)* sehingga kapal tidak perlu melaksanakan docking pada saat ada kendala kebocoran *seal* atau tersangkut jaring. In water Serviceable Seals (IWWS) instalment modification so that the ships do not need to do docking when there is a seal leak or snagging on toils.
		3. Monitoring pemakaian BBM berbasis digitalisasi di kapal menggunakan *Vessel Web Analysis* (VWA). Fuel consumption monitoring based on digitalization on board uses Vessel Web Analysis (VWA). 4. Bekerjasama dengan PT Sucofindo dalam implementasi perawatan kapal berbasis IT (Aplikasi *Planned Maintenance System*/PMS) Cooperating with PT Sucofindo for IT-Base ship maintenance (Planned Maintenance System/PMS Application).
11	Direksi agar dapat meningkatkan kinerja usaha non perkapalan, salah satunya dengan membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga yang relevan untuk meningkatkan okupansi. The Board of Directors is to be able to improve the performance of the non-shipping business, one of which is by opening up opportunities for collaborating with relevant third parties to increase occupancy.	Menjalankan tugas dengan baik dan sesuai aturan perusahaan agar target kinerja tercapai. Well-managed duties and aligned with the Company's regulations for achieving the performance target.
		Pengembangan usaha dibidang pengadaan peralatan melekat dan teknologi pengamanan. Business development in the field of equipment and security technology procurement.
		Pada semester I/2020 kolaborasi pengelolaan aset dicabang atau *terminal point* mulai terdapat geliat yang lebih baik. Dimana cabang atau terminal poin mampu mewakili Divisi Pengelolaan Aset (dengan arahan dan pendampingan secara virtual) untuk bernegosiasi kepada calon mitra lokal hingga mendampingi saat survey dan renovasi. Kontrak baru selama pandemi ini : In the first semester of 2020, asset management collaboration at branches or terminal points began to get better. Where branches or terminal points are able to represent the Asset Management Division (with virtual direction and assistance) to negotiate with potential local partners to assist during surveys and renovations. New contracts during this pandemic are: 1. Penggunaan bangunan oleh PT Garuda Indonesia di pangkalpinang (kontrak selesai). The use of building by PT Garuda Indonesia Tbk on Pangkalpinang (contract expired). 2. Penawaran kerjasama jangka panjang untuk aset Ternate dan Jayapura oleh PT Sari Melati Kencana utk Pizza Hut (progress persetujuan BOD pizza HUT). Long-term cooperation offer for Ternate and Jayapura assets by PT Sari Melati Kencana for Pizza Hut (on BOD pizza HUT approval progress). 3. Kerjasama sharing profit untuk aset di banjarmasin dengan PT Kula Makmur Baimbai (tahap renovasi lokasi sewa). Profit sharing cooperation for assets in Banjarmasin with PT Kula Makmur Baimbai (on renovation process). 4. Kerjasama sewa space iklan di kapal dan kantor pusat dengan PT Pegadaian (Persero). Rent advertising space on board and head office cooperation with PT Pegadaian (Persero). 5. Kerjasama sewa aset Surabaya Heritage dan Kintamani untuk gerai Indomart (tahap pengurusan izin PEMDA) Rent Surabaya Heritage and Kintamani assets cooperation for Indomaret outlets (asked for a Local Government permit).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		Upaya SBU Galangan Surya dalam meningkatkan kinerja salah satunya yaitu dengan melakukan Kerjasama dengan pihak yang potensial, antara lain Pertamina Trans Kontinental yang memiliki 200 kapal dengan panjang dibawah 80 meter. Selain itu SBU Galangan Surya juga akan melakukan canvassing ke pemilik-pemilik kapal di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara untuk mendapatkan mitra/pelanggan baru dan menjaga hubungan dengan pelanggan lama. One of SBU Galangan Surya's efforts in improving performance was by collaborating with potential parties, including Pertamina Trans Kontinental which has 200 vessels with a length of less than 80 meters. In addition, SBU Galangan Surya will also conduct canvassing for ship owners in East Java, Bali and Nusa Tenggara to get new partners/ customers and maintain relationships with loyal customers.
		• Divisi Keagenan dan Tour telah melakukan monitor dan pengawasan yang intensif untuk kegiatan operasional keagenan di cabang dengan sistem zonasi. The Agency and Tour Division has had intensive monitoring and supervision for agency operational activities in branches with a zoning system. • Melakukan MOU secara B to B dengan principal agar menggunakan jasa PT PELNI (Persero) untuk mengageni kapalnya seperti saat ini dengan Meratus dan sedang dilakukan prospek kepada perusahaan - perusahaan lainnya yang saat ini sudah diajukan penawaran ke beberapa perusahaan tersebut seperti GAC dan whilemsen Malaysia serta ke kapal - kapal *cruise management international UK* yang akan masuk ke Indonesia pada tahun 2021. B to B MOU with the principal in order to use PT PELNI (Persero) services is to open an agent for its ships, as currently with Meratus, and prospects to other companies that have currently submitted bids to several of these companies such as GAC and Whilemsen Malaysia as well as to UK international cruise management ships that will enter Indonesia in 2021.
12	Direksi agar segera merealisasikan penggunaan Teknologi Informasi dalam hal reservasi, tiketing, pembayaran dan konsolidasi pelaporan keuangan, mulai dari cabang maupun pusat, serta mekanisme pengendalian pelaporan keuangan di perusahaan induk sebagai akselerasi proses bisnis perusahaan. The Board of Directors immediately applies the use of Information Technology f;or reservations, ticketing, payments and financial reporting consolidation, at branches and head office, as well as financial reporting control mechanisms in the parent company as an acceleration of the company's business processes.	• Melakukan implementasi *e-payment (payment gateway & host to host)* yang terintegrasi dengan aplikasi ERP keuangan PT PELNI (Persero), dimana tujuannya adalah memudahkan dan memperluas kanal pembayaran tiket kapal PELNI serta dalam rangka mengamankan penghasilan dari penjualan tiket. Applied e-payment (payment gateway & host to host) which is integrated with PT PELNI (Persero)'s financial ERP application to facilitate and expand PELNI ship ticket payment channels and in order to secure income from ticket sales. • Mengintegrasikan aplikasi tiketing (PPSS) dengan aplikasi keuangan (*EBS Finance*) untuk percepatan pencatatan pelaporan keuangan antara cabang dan pusat. Integrating the ticketing application (PPSS) with the financial application (EBS Finance) is to accelerate the recording of financial reporting between branches and head office.
		Secara berkesinambungan Divisi Pengelolaan Aset bekerjasama dengan Divisi Teknologi Informasi tengah mengembangkan aplikasi web dan sistem transaksi WINONA yang dapat dipergunakan sebagai sarana promosi kepada masyarakat, informasi kepada calon mitra dan transaksi pembayaran dengan mitra. Saat ini sistem transaksi tersebut sudah dipergunakan untuk penawaran dan negosiasi dengan mitra sebagai berikut : The Asset Management Division and the Information Technology Division is continuously developing a web application and the WINONA transaction system that can be used for the public promotion, information for potential partners and payment transactions with partners. Currently, the transaction system has been used for offering and negotiating process with the partners as follows: 1. Kerjasama sewa aset di cabang PELNI Palu dengan CV. Akar Daya Mandiri (proses penerbitan kontrak). Cooperated asset rental at the PELNI Palu branch with CV. Akar Daya Mandiri (contract issuance process). 2. Perpanjangan kontrak di cabang PELNI Surabaya dengan STIE Artha Bodhi Iswaran dan CV. Gracia Blue Logistic (proses penerbitan kontrak). Contract extension for PELNI Surabaya branch with STIE Artha Bodhi Iswaran and CV. Gracia Blue Logistic (contract issuance process). 3. Kerjasama pengelolaan space di kapal dengan CV Qadri Bangun Persada (proses penerbitan kontrak). Cooperated available space on board with CV Qadri Bangun Persada (contract issuance process).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		Upaya penggunaan digitalisasi di Direktorat armada antara lain: Digitizing efforts to Fleet Directorate are as follows: 1. Monitoring pemakaian BBM berbasis digitalisasi di kapal menggunakan *Vessel Web Analysis* (VWA). Fuel consumption monitoring used Vessel Web Analysis (VWA) on board. 2. Bekerjasama dengan PT Sucofindo dalam implementasi perawatan kapal berbasis IT (Aplikasi *Planned Maintenance System*/PMS) In collaboration with PT Sucofindo for IT-Base ship maintenance (Planned Maintenance System Application/PMS).
		• Saat ini telah digunakan sistem e-*reservation* untuk pemesanan tiket kapal secara online, *e-payment* untuk melakukan pembayaran tiket secara cashless dengan edc dan *e-wallet,* dan *e-ticketing* dengan cara menukarkan kode *booking* menjadi tiket *boarding pass* yang dicetak dengan mesin cetak tiket mandiri. Currently, the e-Reservation system has been used for ticketing online booking, this e-Payment is to make cashless ticket payments with EDC and e-wallet and e-ticketing by changing a self-printed ticket boarding pass by ticket printing machine.
		• Saat ini dilakukan sistem check in di DCS (*Departure Control System*) dengan *barcode* sebelum naik ke atas kapal, validasi tiket dan tanda pengenal, dan pengecekan ulang tiket dan tanda pengenal setelah naik ke kapal. Currently, there is a check - in system at DCS (Departure Control System) with a barcode before boarding the ships, validating the ticket and ID boarding the ship. • Sistem pelaporan di atas kapal menggunakan "Admin Kapal." Onboard reporting system using "Ship Admin." • Saat ini dilakukan konsolidasi data tiket penumpang antara data DCS dan Kapal, untuk bisa melacak penumpang tanpa tiket yang berada di atas kapal. Currently, passenger ticket data is being consolidated between DCS and Ship data, to be able to track ticketless passengers on board. • Pembuatan sistem portal aplikasi Manajemen Keagenan sudah dalam tahap develop 80% bekerjasama dengan Divisi TI. The Agency Management application portal system is in the 80% development stage in collaboration with the IT Division.
		• Pelaksanaan Pengangkutan Muatan Menggunakan Aplikasi *Booking & Reservasi Online* Di seluruh Kapal Penumpang PT PELNI (Persero). Cargo transport using the Online Booking & Reservation Application within PT PELNI (Persero) passenger ships. • Rencana *Go-Live* Aplikasi Muatan Perintis (*Pecasy*) pada kuartal ke -4 2020 di seluruh kapal perintis dan cabang yang disinggahi. Go-Live Feeder Load Application (Pecasy) in the 4th quarter of 2020 in all pioneer ships and branches visited.
		Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk penyempurnaan aplikasi LCS yang digunakan untuk reservasi muatan Tol Laut agar *shipper* merasa aman dan nyaman dalam proses pengiriman barang. Coordinating with the Ministry of Transportation to improve the LCS application which is used for Tol Laut cargo reservation so that shippers feel safe and comfortable in the process of shipping goods.
		Untuk pelaporan antara kantor cabang, SBU dan kantor Pusat sudah terintegrasi dengan aplikasi *oracle EBS finance*, sedangkan untuk laporan dengan entitas anak (PELNI group) masih dalam tahap pengenalan aplikasi dari calon vendor (Oracle Indonesia) untuk modul *budgeting & consolidation.* The reporting between branch offices, SBUs and the head office has been integrated with the Oracle EBS finance application, while for reports with subsidiaries (PELNI group) it is still in the stage of introducing applications from prospective vendors (Oracle Indonesia) for the budgeting & consolidation module.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
13	Direksi agar tetap memperhatikan pelayanan yang baik, keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang, khususnya dalam masa peak season. The Board of Directors must pay attention to good service, safety, security and passenger comfort continuously, especially during the peak season.	Divisi Teknologi Informasi bersama Satuan Pengawas Internal sudah mengembangkan aplikasi *Audit Management* yang dapat diakses melalui Portal PELNI guna me-*monitoring* tindak lanjut dari temuan-temuan baik pihak internal maupun eksternal. The Information Technology Division together with the Internal Supervisory Unit have developed an Audit Management application that can be accessed through the PELNI Portal to monitor the follow-up of the findings in both internal and external parties. • Pelayanan Keamanan penumpang sesuai SOP dan selalu berkoordinasi dengan Mualim 1. Passenger security services according to SOP and always in coordination with 1st Officer. • Selain Keamanan,agar memperhatikan aspek keselamatan penumpang. Beside the security but also to pay attention to aspects of passenger safety. Dalam mengoperasikan kapal, PT PELNI (Persero) selalu mengutamakan Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan Penumpang. Pemeriksaan peralatan keselamatan dan keamanan kapal secara berkala dilakukan oleh pihak ketiga dan regulator, antara lain BKI, Marine Inspector dan Auditor. Termasuk terkait penambahan penumpang saat peak season akan dikoordinasikan dengan regulator, dan akan ditindaklanjuti dengan penambahan peralatan keselamatan sesuai rekomendasi regulator. Selain itu, Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (SPPAL) telah diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan RI No.37 Tahun 2015 dan perubahannya (PM No.119 Tahun 2015). Dalam PM tersebut telah ditetapkan standar pelayanan penumpang angkutan laut antara lain Keselamatan, Keamanan, Kehandalan, Kenyamanan, Kemudahan dan Kesetaraan. Untuk pemantauan pelaksanaan SPPAL tersebut dilakukan verifikasi lapangan secara berkala oleh Kemenhub. In operating the ships, PT PELNI (Persero) always prioritizes the passenger's Safety, Security and Comfort. Periodic inspection on ship safety and security equipment is taken by third parties and regulators, including BKI, Marine Inspector and Auditor. And the addition of passengers during peak seasons will be coordinated with regulators and will be added for safety equipment according to the recommendations. In addition, Sea Transport Passenger Service Standards (SPPAL) have been regulated by the Minister of Transportation Regulation (PM) of the Republic of Indonesia No. 37 of 2015 and its amendments (PM No. 119 of 2015). In Minister Regulation, sea transportation passenger service standards have been set, including Safety, Security, Reliability, Convenience, Ease and Equality. The periodic field verification is to monitor the SPPAL conducted by the Ministry of Transportation. • Telah diberlakukannya SOP Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi dalam rangka penerapan *New Normal Life* di PT PELNI (Persero) The SOP for Embarkation and Debarkation Services has been implemented for applying New Normal Life at PT PELNI (Persero). • Koordinasi antara Pusat, Cabang, dan Instansi Pelabuhan pada saat masa *Peak Season* terkait Dukungan Pelayanan Penumpang Coordination between the Center, Branches, and Port Agencies during the Peak Season regarding Passenger Service Support. Dalam rangka untuk memenuhi layanan dan memonitor terlaksananya standar pelayanan penumpang di atas kapal, kegiatan layanan yang telah dilakukan: In order to fulfill services and to monitor the implementation of passenger service standards on board, the following service activities have been conducted: 1. SOP Layanan *On Board Standar Operasional Prosedur On Board* telah disusun sebagai panduan dalam pemberian layanan kepada penumpang, Prosedur ini mengatur seluruh kegiatan pelayanan kepada penumpang di atas kapal mulai dari validasi data penumpang, fasilitas pelayanan di kapal, pengelolaan kebersihan fasilitas pelayanan, implementasi pengelolaan kebutuhan makanan dan minuman, dan pengelolaan layanan hiburan penumpang dengan tetap berpedoman pada protokol new normal life sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Standard Operating Procedures for On Board Services has been prepared as a guidance in providing services for passengers, this procedure regulates all service activities for passengers on board starting from passenger data validation, service facilities on board, cleanliness of service facilities, needs of food and beverages, and passenger entertainment services by adhering the new normal life protocol so that can run effectively and efficiently.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		2. Penyusunan Pedoman Mutu Layanan Pedoman Mutu Layanan sedang dalam proses penyusunan, pedoman ini mengatur seluruh kegiatan operasional pelayanan di kapal mulai dari pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan dan ketertiban, pelayanan kehandalan dan keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan sampai pelayanan kesetaraan sehingga diharapkan setiap penumpang di kapal dapat merasa puas dengan setiap pelayanan yang diberikan. Service Quality Guidelines are in the process of being drafted, these guidelines regulate all service operational activities on ships ranging from safety services, security and order services, reliability and regulatory services, comfort services, convenience services to equality services so that it is expected that every passenger on the ship is satisfied with every service provided.
		3. Pelaksanaan *Pest Control Pest Control* pada kapal penumpang PT PELNI (Persero) adalah suatu proses pengendalian serangga dan hama dengan metode: Pest Control on passenger ships of PT PELNI (Persero) is a process of controlling insects and pests with the following methods: • *Isolating* bertujuan untuk memutuskan trafik hama dari darat ke atas kapal dan sebaliknya melalui pemasanga alat rat guard pada lobang pengantar tali tros pada saat kapal sanndar di dermaga. Isolating aimed to cut off pest traffic from land to ship and vice versa by installing a rat guard tool in the tros rope delivery hole when the ship docks. • *Zoning & Blocking* bertujuan untuk memblokir area sehingga jika terdapat hama serangga, kecoa, dan tikus yang masuk tidak dapat menyebar ke seluruh area kapal melalui pemasangan alat penutup/penyekat di setiap saluran air dan ventilasi udara. Zoning & Blocking aims to block the area so that if there are insect pests, cockroaches, and rats that enter, they cannot spread to the entire area of the ship through the installation of sealing devices in each water channel and air vent. • *Eradication* bertujuan membatasi populasi dan perkembang biakan hama serangga, kecoa, dan tikus hanya berada di tempat tertentu saja. Eradication aims to limit the population and breeding of insect pests, cockroaches, and mice only in certain places. • Serta pelaksanaan penyemprotan (*spraying*). Dimana salah satu usaha dalam pemberian kenyamanan terhadap penumpang dengan mengurangi atau mematikan berbagai serangga dan hama yang bersifat mengganggu atau merusak atau yang tidak diinginkan yang berada di atas kapal. As well as the implementation of spraying (spraying), one of the efforts in providing comfort to passengers is to reduce or kill various insects and pests that are disturbing or destructive or unwanted on board. *4.* *Check On The Spot* (COTS) Pelaksanaan COTS (*Check On The Spot*) merupakan tindakan mengontrol dan memonitor layanan, kebersihan, dan kelengkapan fasilitas layanan di atas kapal dengan melaksanakan kunjungan ke kapal-kapal, mengingat saat ini pandemi Covid-19 dan dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19, maka ada perubahan metode fungsi kontrol dan monitoring yaitu dengan cara pihak kapal mengisi *report* beserta foto kondisi terkini standar pelayanan penumpang angkutan laut, kemudian report tersebut dikirimkan kembali ke Divisi Pelayanan Angkutan Penumpang untuk selanjutnya diperiksa dan diteruskan ke unit terkait jika ada diperlukan perbaikan ataupun penggantian fasilitas layanan yang mengalami kerusakan. The implementation of COTS (Check On The Spot) is an act of controlling and monitoring services, cleanliness, and completeness of service facilities on board by site visits to ships, considering the current Covid-19 pandemic and in order to break the chain of transmission of Covid-19, then there is a change in the method of control and monitoring functions, namely by the way the ship fills out a report along with photos of the latest conditions of sea transportation passenger service standards, then the report is sent back to the Passenger Transportation Service Division for further inspection and forwarded to the relevant unit if there is a need for repair or replacement of service facilities which was damaged.
		Melakukan koordinasi secara berkala ke Tim kerja cabang dan kapal yang termasuk dalam rute Tol Laut untuk selalu mengutamakan Keselamatan Kerja. Coordinating regularly with branch work teams and ships included in the Tol Laut route is to always prioritize Work Safety.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
14	Direksi agar mengkaji efektivitas rute kapal yang dilayani dan menyusun rencana *rerouting* sejalan dengan perkembangan yang ada. The Board of Directors needs to review the effectiveness of the ship routes served and to prepare a rerouting plan in line with existing developments.	Dukungan yang diberikan Direktorat Armada dengan menjaga kehandalan kapal agar dapat melayani trayek yang telah ditentukan. Optimalisasi trayek akan dikoordinasikan dengan pihak - pihak terkait. Support from Fleet Directorate was by maintaining the ship reliability to serve the specified route. This route optimization will be coordinated with the relevant parties.
		• Sehubungan dengan dampak Covid-19 sehingga beberapa pemda melakukan kebijakan daerah untuk melakukan penutupan Pelabuhan. Pengoperasian kapal penumpang melakukan penyesuaian trayek yaitu omisi (tidak menyinggahi pelabuhan) karena penutupan pelabuhan dan deviasi (penambahan pelabuhan singgah) yang memiliki potensi penumpang maupun barang seperti Namlea disinggahi Km. Ciremai dan Km. Gunung Dempo. Due to the impact of Covid-19 pandemic, several regional governments have established policies to restrict ports mobility that insist us to make some adjustments on passenger ships routes, which is omissions (not stopping by the port) due to restricted ports and deviations (additional a stopover ports) that have the potential for passengers and goods such as Namela to be served by MV. Ciremai and MV. Gunung Dempo.
		• Saat ini telah berjalan pengkajian rute kapal penumpang untuk kapal tipe 2000 dengan mempertimbangkan efisiensi dan potensi sesuai dengan perkembangan yang ada Currently, passenger ship routes for 2000 types of ships have been assessed by considering efficiency and potential based on current development.
		Divisi PABKPP : *Berkoordinasi dengan Lintas Fungsi Terkait (Div OKPP, Div PAPKPP) untuk Mengoptimalkan muatan container pada ruas terjauh untuk shipper reguler & kontrak. PABKPP Division: *Coordinating with Related Cross Functions (OKPP Div, PAPKPP Div) to optimize container loads on the farthest segment for regular & contract shippers.
		Melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan Tol Laut dan Kapal Ternak dengan Kemenhub dan Pemda, terutama untuk perubahan trayek Tol Laut dan Ternak yang dilayari oleh PT PELNI (Persero) Evaluating the implementation of Tol Laut and Livestock ships with the Ministry of Transportation and the Regional Governments periodically, which is especially for changes in Tol Laut and Livestock ships route navigable by PT PELNI (Persero).
15	Direksi agar terus meningkatkan *good corporate governance* (GCG) Perusahaan dan melaporkan implementasinya secara berkala kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors needs to increase good corporate governance (GCG) of the Company and report its implementation to the Board of Commissioners.	Unit GCG setiap tahunnya minimal 1x selalu melaporkan kepada Direktur Utama implementasi gcg antara lain melaporkan hasil skor gcg baik *self assessment* maupun *assessment gcg*, pelaksanaan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja baik kantor pusat, cabang dan kapal serta pelaksanaan pembuatan *Annual Report* dan *Sustainability Report* setiap tahunnya. The GCG Unit always reports to the President Director for the implementation of gcg at least 1x every year, among others, reporting the results of the gcg score both self-assessment and gcg assessment, the implementation of gratuities reporting by each work unit, both head office, branch and ship as well as making of Annual Reports and Sustainability Reports every year.
		Unit GCG setiap tahunnya minimal 1x selalu melaporkan kepada Direktur SDM & Umum sebagai Direktur Penanggung Jawab gcg implementasi gcg antara lain melaporkan hasil skor gcg baik *self assessment* maupun *assessment gcg,* pelaksanaan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja baik kantor pusat, cabang dan kapal serta pelaksanaan pembuatan *Annual Report* dan *Sustainability Report* setiap tahunnya dan kinerja - kinerja gcg lainnya. The GCG Unit reports to the Director of Human Resources & General Affairs as Director in Charge of gcg implementation at least 1x every year, among others reporting the results of gcg scores both self-assessment and gcg assessment, implementation of gratuities reporting by each work unit both head office, branch and ship as well as annual reports and sustainability reports and other gcg performances.
		Melaporkan hasil cetak laporan *self-assessment gcg* atau *assessment gcg* dan melaporkan pelaksanaan pembuatan *Annual Report* dan *Sustainability Report* setiap tahunnya. Reporting the printed results of gcg self-assessment report or gcg assessment as well as annual and sustainability report each year.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		Melaporkan hasil cetak laporan *self assessment gcg* atau *assessment gcg* dan melaporkan pelaksanaan pembuatan *Annual Report* dan *Sustainability Report* setiap tahunnya. Reporting the printed results of gcg self-assessment report or gcg assessment as well as annual and sustainability report each year.
		Melaporkan hasil cetak laporan *self assessment gcg* atau *assessment gcg* dan melaporkan pelaksanaan pembuatan *Annual Report* dan *Sustainability Report* setiap tahunnya. Reporting the printed results of gcg self-assessment report or gcg assessment as well as annual and sustainability report each year.
		Melakukan koordinasi secara berkala ke Tim kerja cabang dan kapal yang termasuk dalam rute Tol Laut untuk selalu berpegangan dengan CoC Perusahaan dan selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam bekerja dan menjaga nama baik perusahaan. Coordinating regularly with branch and ship work teams included in Tol Laut is to always stick to the Company's CoC and always uphold honesty in work and care for the good name of the Company.
		Melaporkan hasil cetak laporan *self assessment gcg* atau *assessment gcg* dan melaporkan pelaksanaan pembuatan *Annual Report* dan *Sustainability Report* setiap tahunnya. eporting the printed results of gcg self-assessment report or gcg assessment as well as annual and sustainability report each year.
		Dit.UAB berkomitmen untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG) UAB Directorate is committed to increase good corporate governance (GCG).
		Melakukan koordinasi secara berkala ke Tim kerja cabang dan kapal yang termasuk dalam rute Tol Laut untuk selalu berpegangan dengan CoC Perusahaan dan selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam bekerja dan menjaga nama baik perusahaan. Coordinating regularly with branch and ship work teams included in Tol Laut is to always stick to the Company's CoC and always uphold honesty in work and care for the good name of the Company.
		Penyusunan draft revisi SOP (*Standard Operational Procedure*) Pelayanan Keagenan dan *Lifestyle* disesuaikan dengan perubahan kondisi operasional saat ini. Preparing a revised draft of SOP (Standard Operational Procedure) for Agency and Lifestyle Services adjusted to changes in current operational conditions.
		Melakukan *Refreshment* setiap tahun terkait *good corporate governance* (GCG) Perusahaan dengan melakukan sosialisasi, pemasangan pamflet dan himbauan-himbauan pada lorong-lorong ruang kerja. Annual Refreshment related to good corporate governance (GCG) of the Company through socialization, installing pamphlets and notice banners at the work's hall.
		Bekerja dengan jujur,memberi pelayanan yang baik dan inovatif Work honestly, provide good and innovative service
		Saat ini Tim Divisi Pengadaan bersama Tim Biro Hukum masih dalam proses review Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PELNI (Persero) untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Currently, the Procurement Division Team together with the Legal Bureau Team are still reviewing the Guidelines for Goods and Services Procurement of PT PELNI (Persero) that is to be adjusted to the Minister of SOE Regulation Number PER-08/MBU/12/2019 regarding General Guidelines for the Goods and Services Procurement of State-owned Enterprises.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
16	Direksi agar mempercepat penyelesaian temuan dan rekomendasi BPK RI, KAP dan SPI yang belum diselesaikan dalam rangka perbaikan dan kemajuan perusahaan. The Board of Directors needs to accelerate the completion of the findings and recommendations from BPK RI, KAP and SPI that have not been completed for future improvement and development of the Company.	1. Atas temuan dan rekomendasi pemeriksaan BPK-RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, selanjutnya segera dilakukan tindak lanjut dalam jangka waktu maksimal 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Monitoring Tindak Lanjut dikirimkan kepada BPK-RI dan ditembuskan kepada Inspektorat Kementerian BUMN. For these findings and recommendations from BPK RI examination contained in the Audit Result Report, further follow up is immediately held within a maximum period of 60 days after the Audit Result Report is received. Follow-up Monitoring is sent to BPK-RI and copied to the Inspectorate of the Ministry of SOE. 2. Atas temuan dan rekomendasi pemeriksaan KAP Tahun 2018 dan sebelumnya, telah ditindaklanjuti dan direview oleh KAP Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan yang merupakan KAP PT PELNI (Persero) untuk Tahun Buku 2019 yang pemeriksaannya dilaksanakan pada Tahun 2020. Atas temuan dan rekomendasi pemeriksaan KAP Tahun 2019 telah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada KAP Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan sesuai Surat Direktur Utama Nomor : 07.02/03/S-B/090/2020 dan 07.08/01/S-B/090/2020. These findings and recommendations from KAP audits in 2018 and the previous findings have been followed up and reviewed by Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan Public Accounting Firm, which is Public Accounting Firm of PT PELNI (Persero) who examines for the 2019 Financial Year in 2020. These findings and recommendations in 2019 have been followed up and submitted to Hadori, Sadori, Adi & Partners based on the Letter of President Director's Decree Number: 07.02/03/SB/090/2020 and 07.08/01/SB/090/2020. 3. Saat ini SPI tengah mengembangkan sistem aplikasi pemantauan tindak lanjut, yang digunakan untuk memantau tindak lanjut temuan dan rekomendasi baik internal (SPI) maupun eksternal (BPK dan KAP). Selanjutnya pemantauan tindak lanjut dapat dilaksanakan secara optimal dan presisi. Currently, Internal Audit is developing a follow-up monitoring application system, which is used to monitor follow-up findings and recommendations for both Internal Audit (SPI) and external (BPK and Public Accounting Firm). Furthermore, this follow-up monitoring can be optimal and precise.
		Divisi Teknologi Informasi bersama Satuan Pengawas Internal sudah mengembangkan aplikasi Audit Management yang dapat diakses melalui Portal PELNI guna me-monitoring tindak lanjut dari temuan-temuan baik pihak internal maupun eksternal. The Information Technology Division joint with the internal Audit Unit has developed an Audit Management application that can be accessed through PELNI Portal to monitor follow-up findings from both Internal and External parties.
		Segera menindaklanjuti apabila ada temuan. Immediately follow up if there are any findings.
		Menyiapkan arsip dalam bentuk *soft file* pada setiap pekerjaan sehingga apabila terdapat temuan dan rekomendasi BPK RI, KAP dan SPI dalam diselesaikan dengan cepat. Preparing files in kind of soft files for every work so that if there are findings or recommendations for BPK RI, Public Accounting Firm, and Internal Audit Unit can be solved immediately.
		Saat ini Tim Divisi Pengadaan bersama Tim Biro Hukum masih dalam proses review Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PELNI (Persero) untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Currently, the Procurement Division team with the Legal Bureau team is still on the process of reviewing the guidelines for the goods and services to be adjusted into the Ministry of SOE regulations Number: PER-08/MBU/12/2009 regarding General Guidelines for Goods Procurement and SOE services.
		Direktorat Armada akan berkoordinasi dengan SPI dan pihak - pihak terkait dalam rangka penyelesaian temuan audit. Fleet Directorate will coordinate with Internal Audit Unit related parties in the context of settling audit findings.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		A. Sistem Pengendalian atas Beban Permakanan ABK dan Penumpang Kapal PSO Belum Memadai Control system for PSO Crews and Passengers ship food consumption has been inadequate. 1. Rekomendasi: - Membuat sistem yang dapat memantau jumlah riil beban permakanan yang dikeluarkan untuk ABK dan penumpang baik ekonomi maupun non ekonomi di kapal. Recommendation: - Creating a system that can monitor the real number of stress loads issued for Crews and passengers both economics and non-economics on board. 2. Rencana Aksi & Target: - Divisi Pelayanan Angkutan Penumpang akan melakukan addendum kontrak untuk menetapkan spesifikasi bahan makanan kemasan secara cermat dan terukur dengan mempertimbangkan perbedaan pelabuhan suplai. (Triwulan 1 tahun 2021) - Divisi Pelayanan Angkutan Penumpang akan mengembangkan aplikasi Admin Kapal berupa otomasi hari makan penumpang berdasarkan data DCS untuk menghitung jumlah riil beban permakanan penumpang kelas ekonomi maupun non ekonomi serta jumlah riil beban permakanan ABK. (Triwulan 1 tahun 2021) Action & Target plan: - The Passenger Transportation Services Division will have an addendum contract to determine carefully and measurably food packaging specification by port supply. (1st quarter of year 2021) - The Passengers Transport Services Division will develop a Ship Administration application in the form of passenger eating time automation based on DCS data to calculate the real number of economy and non-economy class passenger and ship crews. (1st Quarter of the year 2021). 3. Realisasi Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK-RI - Telah dikomunikasikan dengan PIDC terkait spesifikasi bahan baku makanan kemasan yang tersedia di 12 pelabuhan *suply* sebagai persiapan negosiasi kontrak baru di bulan Oktober 2020. - Telah dikomunikasikan dengan Div. IT terkait *scan barcode* pengambilan makan penumpang berdasarkan data DCS dan inputan perhitungan beban permakanan ABK. Follow up on BPK-RI Recommendations- has been communicated with PIDC related food packaging material for 12 port supplies as for negotiating new contract in October 2020 and also has been communicated with IT Division related scan barcode for passengers food distribution based on DCS data and crews food calculation input.
		B. Terdapat Realisasi Beban Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*) dan Pengelola Kasur Kelas Ekonomi Tahun 2019 yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian antara PT PELNI (Persero) dan PIDC Sebesar Rp6.878.750.534,00 There was cleaning service and economy class mattress expenses in 2019, which was not fitted with the agreement between PT PELNI (Persero) and PIDC as much as Rp6.878.750.534. 1. Rekomendasi: - Memperhitungkan kelebihan pembebanan biaya pekerjaan Pengadaan Jasa Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Service*) dan Pengelolaan Kasur Kelas Ekonomi kepada PIDC sebesar Rp6.878.750.534,00 pada tagihan PIDC yang belum terbayar. Recommendation: - Calculating these extra costs of cleaning service and economic class mattresses procurement to PIDC was Rp6.878.750.534,00 on PIDC bills that have not been paid.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		2. Rencana Aksi & Target: - PT PELNI (Persero) Cq. Divisi Pelayanan Angkutan Penumpang akan menerbitkan surat kepada PT PIDC untuk segera melaksanakan pembayaran atas kekurangan pemberian upah/gaji ke petugas kebersihan (Cleaning Service) dan petugas Kasur dengan nominal sesuai hasil rekomendasi dari BPK R.I. (30 Juni 2020) - Sebagai langkah pengawasan terhadap kinerja pengelolaan jasa kebersihan (*Cleaning Service*) dan pengelolaan Kasur di atas kapal yang dilakukan oleh PT PIDC, PT PELNI (Persero) Cq. Divisi Pelayanan Angkutan Penumpang segera meminta kepada PT PIDC untuk wajib melaporkan secara rutin tiap bulan bukti pembayaran upah atau gaji petugas kebersihan/*cleaning service* dan petugas kasur. (Triwulan 4 Tahun 2020). Action Plan & Targets: - PT PELNI (Persero) Cq. The Passenger Transportation Service Division will issue a letter to PT PIDC to immediately pay the lack of wages/salaries to the cleaning service (Cleaning Service) and mattress officers with nominal according to the recommendation from BPK R.I. (30 June 2020) - As a monitoring measure on the performance of cleaning service management (Cleaning Service) and mattress management on board by PT PIDC, PT PELNI (Persero) Cq. The Passenger Transportation Service Division immediately asked PT PIDC to report regularly every month proof of payment of wages or salaries for cleaning service and mattress workers. (4th Quarter of 2020). 3. Realisasi Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK-RI - PT PELNI (Persero) Cq. Divisi Pelayanan Angkutan Penumpang telah bersurat ke PT PIDC sebagaimanan surat Nomor : 06.12/01/S-B/010/2020 Tanggal 12 Juni 2020 perihal Pembayaran Upah Petugas Kebersihan (*Cleanning Service*) dan Kasur di atas Kapal Penumpang PT PELNI (Persero), dan PT PIDC wajib melaporkan bukti pembayaran upah/gaji Petugas Kebersihan *(Cleaning Service*) dan Petugas Kasur setiap bulan kepada PT PELNI (Persero) Cq. Pelayanan Angkutan Penumpang terhitung sejak Juli 2020. - Surat PT PIDC Nomor : 07.06/DIRUT/SB/003/100/2020 perihal usulan pengembalian dengan mekanisme diangsur selama 12 bulan. - Untuk kelanjutannya PT PELNI (Persero) bersurat ke PT PIDC sebagaimana surat dari Dirut PT PELNI (Persero) dengan nomor 07.30/01/S-B/090/2020 perihal Pengembalian Kewajiban PT PIDC. Dan telah masuk pembayaran angsuran tahap 1 pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp.1.146.458.422 dan akan dibayarkan kembali setiap bulannya sampai dengan Januari 2021. Follow-up on Recommendations from BPK-RI - PT PELNI (Persero) Cq. The Passenger Transportation Service Division has sent a letter to PT PIDC as per letter Number: 06.12/01/SB/010/2020 dated 12 June 2020 regarding Payment of Wages for Cleaning Service and Mattresses on Passenger Ships of PT PELNI (Persero), and PT PIDC obliged to report proof of payment of wages/ salaries for Cleaning Service and Mattress Officers every month to PT PELNI (Persero) Cq. Passenger Transport Services as of July 2020. - Letter of PT PIDC Number: 07.06/DIRUT/SB/003/100/2020 regarding the proposed return with an installment mechanism for 12 months. - PT PELNI (Persero) wrote a letter to PT PIDC according to the letter from the President Director of PT PELNI (Persero) with number 07.30/01/S-B/090/2020 regarding the Refund of PT PIDC's obligations. And has entered the first installment payment in August 2020 was Rp. 1,146,458,422 and will be paid every month until January 2021.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
		C. Peraturan yang mengatur pemberian Tunjangan Layak Huni (TLH) kepada Anak Buah Kapal dalam pertanggungjawaban penggunaan dana PSO belum memadai. The regulations has governed the provision of Livable Allowances (TLH) for crews in accountability for the use of PSO funds is not sufficient. 1. Sebab : - Kondisi tersebut disebabkan penyusunan aturan mengenai komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO tidak dilaksanakan dengan cermat dengan mempertimbangkan adanya komponen biaya TLH. Cause: - This condition is arised due to the preparation of rules regarding the cost components that can be taken into account in the PSO which is not carefully by considering a TLH cost component. 2. Penjelasan : - Bahwa Tunjangan Tidak Layak Huni untuk Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) diberikan kepada Nakhoda dan ABK pada saat Kapal melaksanakan *Floating Dock Repair (FRD), Running Repair (RR)* serta saat fumigasi, yang menyebabkan akomodasi/kabin tidak memadai seperti listrik di nonaktifkan/mati sehingga tidak dapat melakukan aktivitas memasak di atas kapal dan sanitasi tidak berfungsi secara normal, atas dasar tersebut perusahaan dipandang perlu memberikan Tunjangan Tidak Layak Huni kepada Nakhoda dan ABK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Direksi PT PELNI (Persero) Nomor: 05.30/01/SK/HKO.01/2018 Tanggal 30 Mei 2018. Explanation: - Temporary Lodging Allowance for the Captain and Crews (ABK) is given to the Master and ABK when the ship is under Floating Dock Repair (FRD), Running Repair (RR) and during fumigation, which causes inadequate accommodation/cabin such as disabled/off electricity so that cooking activities on board and sanitation does not function normally. For this reaseon, the Company is deemed necessary to provide Temporary Lodging Allowances to the captain and crews as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) Number: 05.30/01/SK/HKO.01/2018 on 30 May 2018. 3. Tanggapan : - Sebagai upaya tindaklanjut, Divisi Pelayanan Angkutan Penumpang telah mengusulkan kepada pihak terkait agar Tunjangan Layak Huni menjadi penjelasan/pengertian serta dapat ditambahkan sebagai formulasi ke dalam komponen biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi. Response: - the Division of Passenger Transportation Services has proposed to the relevant parties that the Allowance for Livability to be an explanation/ understanding and can be added into the components of costs and revenues as formulation for Public Service Obligatory Transportation in the Sea Transportation Sector for Economy Class Passengers.
		Temuan Audit BPK dan KAP PIC. Akuntansi Audit Findings from BPK and Public Accounting Firm PIC. Accounting 1. Temuan Audit BPK (lama) sebelum tahun 2019: ada 3 temuan status TL belum sesuai saat ini telah di tindak lanjuti kembali dan telah diusulkan kembali untuk TL selesai, 4 temuan status diusulkan selesai masih menunggu konfirmasi. BPK Audit Findings (old) before 2019: there have been 3 findings that have been re-followed up and proposed currently to complete, the completion of 4 findings has been still waiting for confirmation. 2. Temuan Audit BPK tahun 2019: 1 temuan telah ditindaklanjuti dan telah diusulkan untuk TL selesai. BPK Audit Findings 2019: 1 finding has been followed up and proposed to complete. 3. Temuan Audit KAP tahun 2018: 1 temuan status BD telah ditindaklanjuti, 3 temuan status BS telah ditindaklanjuti. Public Accounting Firm audit findings in 2018: 1 finding in BD status has been followed up, 3 findings in BS status have been followed up. 4. Temuan Audit KAP tahun 2019: 15 temuan telah ditindaklanjuti. Public Accounting Firm audit findings in 2019: 15 findings have been followed up. 5. Untuk konfirmasi status temuan audit KAP yang telah ditindaklanjuti , menunggu hasil Reviu Auditor KAP tahun 2020. To confirm the status of KAP audit findings that have been followed up, waiting for the results from the 2020 Public Accounting Firm Auditor's Review.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

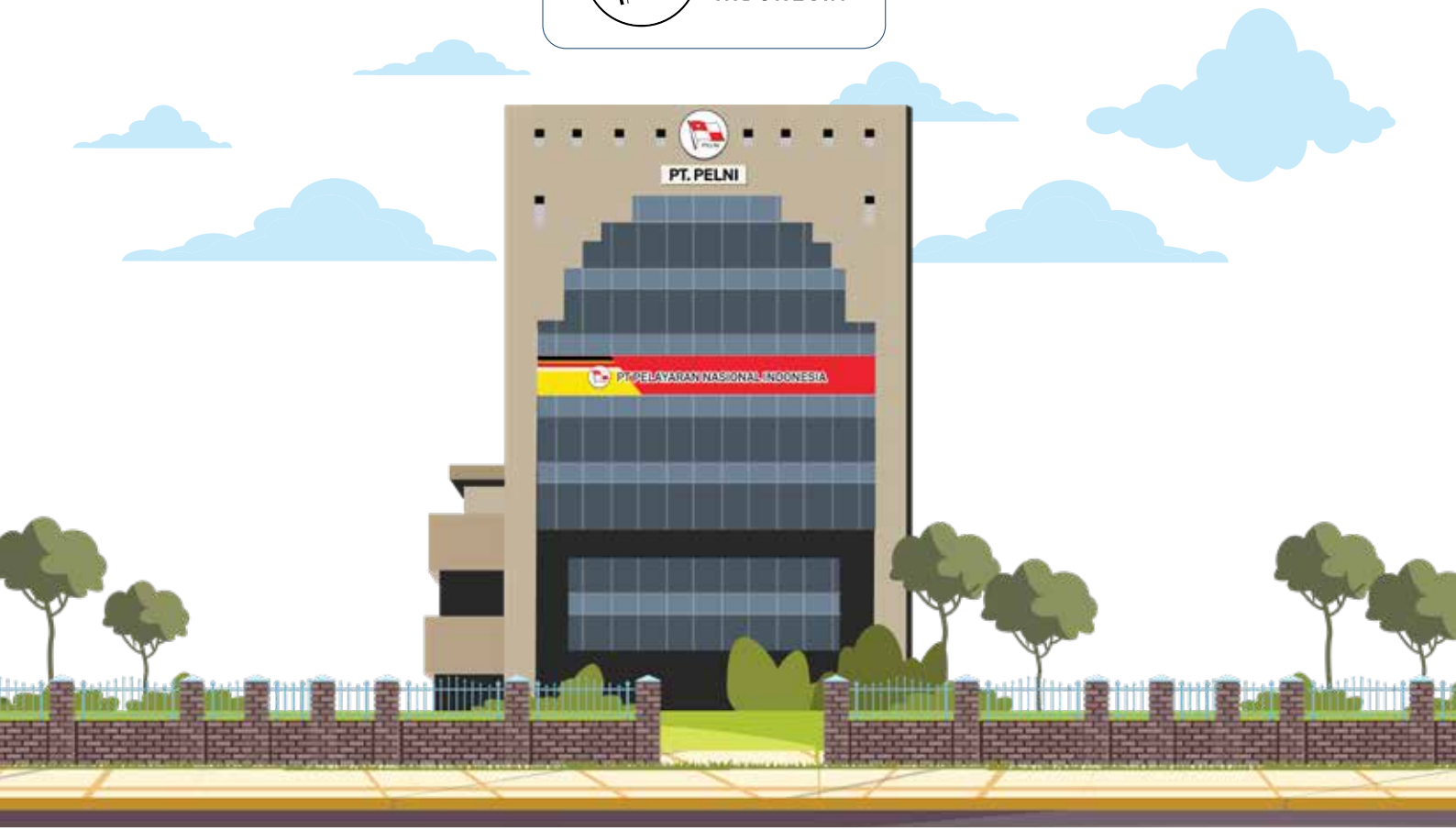
No	Arahan RUPS Direction of GMS	Status Tindak Lanjut Followed-Up Status
17	Direksi agar menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman/MOU beserta realisasi capaiannya. The Board of Directors shall prepare Key Performance Indicators (KPI) to measure the effectiveness of the Memorandum of Understanding/MOU and with the realization of its achievements.	Menjalankan tugas dengan baik dan sesuai aturan perusahaan agar target kinerja tercapai. Executing tasks properly based on Company's rules so that performance targets will achieve.
		Akan dilakukan evaluasi implementasi MoU yang dilakukan terkait Perbaikan Kapal antara PT PELNI (Persero) dengan galangan - galangan BUMN yaitu diantaranya PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan PT Dok Kodja Bahari (Persero). There will be an evaluation on the MoU related to Ship Repair between PT PELNI (Persero) and the State-owned shipyards, including PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok and Shipping Surabaya (Persero) and PT Dok Kodja Bahari (Persero).
18	Direksi agar meningkatkan fungsi humas dalam melakukan sosialisasi kepada pengguna dalam rangka peningkatan kinerja kapal Tol Laut. The Board of Directors shall improve the function of public relations in conducting socialization to users for improving the performance of the Sea Toll ships.	Melakukan koordinasi kepada cabang - cabang yang dilewati rute Tol Laut untuk membuat dan memasang media pemasaran mengenai Tol Laut di setiap cabang dengan memperhatikan ketentuan dari Humas Perusahaan Coordinating to the branches that the Sea Toll ships passes by, to create and to install marketing media regarding the Sea Toll at each branch by taking into account the provisions of the Company's Public Relations
19	Direksi agar mengkaji kembali potensi bisnis dan kebutuhan kapal PT PELNI (Persero) dimasa mendatang dengan menggunakan jasa lembaga independen. The Board of Directors shall review the shipping business potential and needs of PT PELNI (Persero) in the future cooperating with an independent institution.	Direktorat Armada senantiasa mendukung penyediaan kapal sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diharapkan oleh Direktorat terkait selaku user baik dalam bidang angkutan penumpang maupun barang guna memenuhi kebutuhan potensi bisnis. The Fleet Directorate always supports the provision of ships in accordance with the needs and specifications expected by the relevant Directorate as a user both in the field of passenger and cargo transportation to meet potential business needs.
20	Direksi agar mengawal pengembangan kebijakan bisnis anak perusahaan. The Board of Directors shall monitor the development of subsidiary business policies.	• Memberi informasi apabila menemukan adanya penyimpangan kebijakan terkait keamanan dan ketertiban Providing information if there is any policy deviations related to security and order • Menjaga dan mengendalikan situasi agar selalu aman dan tertib Maintaining and controlling the situation is always safe and ordered
		Melakukan koordinasi kepada anak perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat untuk menetapkan tarif agar selalu berada di dalam batas kewajaran sehingga tidak memberatkan pengguna jasa Coordinating to subsidiaries whose is engaged in loading and unloading to determine reasonable tariffs so that do not become a burden for service users
		Direktorat keuangan PT PELNI (Persero) telah melakukan monitoring laporan keuangan/ laporan manajemen entitas anak perusahaan setiap bulan The finance directorate of PT PELNI (Persero) has monitored the financial reports/ management reports of subsidiaries every month

INFORMASI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS INFORMATION

Sampai dengan saat ini, pemegang saham utama dan pengendali dari PT PELNI (Persero) adalah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan jumlah kepemilikan saham 100% atau kepemilikan penuh.

Currently, the main and controlling shareholders of PT PELNI (Persero) is Indonesian Government through the Ministry of State-owned Enterprises with 100% shares or full ownership.





DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas fungsi pengawasan atas pelaksanaan strategi dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta pemberian rekomendasi pada Direksi guna memastikan kesinambungan aktivitas bisnis. Selain itu, Dewan Komisaris juga diharapkan mampu melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan efektivitas penerapan GCG termasuk di dalamnya memberikan saran konstruktif untuk penyempurnaan implementasi GCG oleh Perseroan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar PT PELNI (Persero), Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta Board Manual Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

KOMPOSISI DAN PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2020, komposisi Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) mengalami beberapa perubahan yang tertuang pada Akta Notaris Ida Adiningsih. SH No 2 tanggal 9 November 2020 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 November 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0405631 tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisaris PT PELNI (Persero). Maka Per 31 Desember 2020 susunan komposisi Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

In line with the functions and authorities set out in the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is responsible for the oversight function of the strategy and management of the Company applied by the Directors as well as provides recommendations to the Directors to ensure the sustainable business operations. In addition, the Board of Commissioners is expected to be able to monitor the implementation and effectiveness of GCG, including providing constructive suggestions for improving the implementation of GCG within the Company.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners appointment and Dismissal are determined in the General Meeting of Shareholders (GMS). The decision of appointment and dismissal of the Board of Commissioners is guided by the Articles of Association of PT PELNI (Persero), Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, Law Number 19 of 2003 concerning SOE, Ministry of SOEs' Regulation No. PER-04/MBU/2009 on Appointment and Discharge of Board of Commissioners and Directors in SOE as well as the Board of Commissioners' Board Manual in PT PELNI (Persero).

THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF ITS DUTIES

During 2020, the composition of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) expeienced several changes as stated in the Notary Deed of Ida Adiningsih. SH No. 2 on 9 November 2020 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0405631 on 10 November 2020 regarding the dismissal and appointment of the Commissioner of PT PELNI (Persero). As of 31 December 2020, the composition of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) can be seen in the table below:

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
1	Ali Masykur Musa	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan Kementerian BUMN No. SK-98/MBU/05/2019 Letter of Decision of the Ministry of State Enterprises No. SK-98/MBU/05/2019
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020 Letter of Decision of the Ministry of State Enterprises Number: SK-354/MBU/11/2020
3	Haryo indratno	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 SK-234/MBU/10/2019 dated 17 October 2019
4	Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 SK-234/MBU/10/2019 dated 17 October 2019
5	Iwan Taufiq Purwanto	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020 Letter of Decision of the Ministry of State Enterprises Number: SK-354/MBU/11/2020
6	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020 Letter of Decision of the Ministry of State Enterprises Number: SK-354/MBU/11/2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut pedoman kerja Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) :

1. Tugas Pengawasan.
2. Tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Tugas dalam Manajemen Risiko.
4. Tugas dalam Sistem Pengendalian Internal.
5. Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi.
6. Tugas dalam Sistem Teknologi Informasi.
7. Tugas dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
8. Tugas dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
9. Tugas dalam Sistem Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*).
10. Tugas dalam pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan.
11. Tugas dalam Pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
12. Tugas menilai kinerja Direksi.
13. Tugas dalam Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
14. Tugas dalam Nominasi dan Seleksi Calon Direksi.

THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Duties and responsibilities of the Board of Commissioners according to the Board of Commissioners' Board Manual in PT PELNI (Persero) are as follows:

1. Supervision.
2. Duties in the General Meeting of Shareholders.
3. Risk Management.
4. Within the Internal Control System.
5. Transparency and Confidentiality of Information.
6. Information Technology Systems.
7. The Management of Human Resources.
8. Procurement of Goods and Services.
9. The Management and Follow-up of Whistleblowing Reporting System.
10. The management of a Subsidiary/Joint Venture.
11. The election of candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Joint Ventures.
12. Assessing the performance of the Board of Directors.
13. The Remuneration for the Board of Commissioners and the Directors.
14. Nomination and Selection of Prospective Directors.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang dan keahliannya. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya:

In performing their duties, each member of the Board of Commissioner has duties and responsibilities in accordance with their position and expertise. The following are their duties and responsibilities:

No	Nama Name	Posisi Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duty and Responsibility
1	Ali Masykur Musa	Komisaris Utama President Commissioner	Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap hal-hal strategis dan *Good Corporate Governance*. Coordinate Board of Commissioners' duty and activity implementation as well as recommendation to the Board of Directors regarding strategic issues and Good Corporate Governance.
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha Perusahaan bidang akuntansi, keuangan dan anggaran serta pengawasan internal. Merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Conduct the supervisory and advisory duties to the Board of Directors related the Company's business management on accounting, financial, internal supervisor and also concurrently as Head of Audit Committee.
3	Haryo indratno	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha dalam bidang transformasi perusahaan, pengelolaan anak perusahaan dan *non-core business*. Conduct the supervisory and advisory duties to the Board of Directors related business management in the Company transformation, Subsidiaries management and non-core business.
4	Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha Perusahaan dalam bidang *core business* dan komersial serta pengelolaan teknologi informasi. Perform the supervisory and advisory duties to the Board of Directors related business management in core business, commercial and Information technology management
5	Iwan Taufiq Purwanto	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha Perusahaan bidang sumber daya manusia, hukum, dan organisasi serta sebagai Ketua Komite Kebijakan Risiko. Execute supervisory and advisory duties to the Board of Directors in human resources, legal and organization as well as concurrently as a Head of Risk Policy Committee.
6	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan bidang investasi, perkapalan, armada dan teknik. Conduct supervisory and advisory duties to the Board of Directors related the Company management in Investment, Shipping, Fleet and Engineering

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan menyelenggarakan program pengenalan Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan memahami kegiatan dan kondisi Perusahaan. Program pengenalan Dewan Komisaris diadakan ketika ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan.

Materi program pengenalan setidaknya memuat:
1. Prinsip-prinsip GCG.
2. Gambaran umum perusahaan.
3. Kewenangan yang didelegasikan.
4. Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris.

Pada tahun 2020, program orientasi Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris baru yaitu Marwanto Harjowiryono dan Eddy Susanto Soepadmo pada tanggal 22 April 2020 dan kepada iwan Taufiq Purwanto dan Kristia Budiyarto pada tanggal 6 November 2020.

BOC'S ORIENTATION PROGRAM

The Company conducts an orientation program for the Board of Commissioners to enable the Board of Commissioners who have various backgrounds and experiences to be well known and understand the Company's activities and conditions. This Board of Commissioners orientation program is held if there is a new appointment of the Board of Commissioners. This orientation program is charged to the Corporate Secretary.

Orientation program material at least includes:
1. GCG Principles.
2. Company overview.
3. Delegated authority.
4. Duties and responsibilities of the Board of Directors and Commissioners.

In 2020, the Board of Commissioners orientation program was given to Marwanto Harjowiryono and Eddy Susanto Soepadmo on 22 April 2020 and iwan Taufiq Purwanto dan Kristia Budiyarto on 6 November 2020 as new member of the Board of Commissioners.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2020, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

THE BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The following is training and development programs participated by the Board of Commissioners in 2020:

Nama Name	Jabatan Position	Program Peningkatan Kapasitas Capability Building Program	
		Tanggal Date	Pelatihan Training
Marwanto Harjowiryono	Komisaris Commissioner	14-16 September 2020 14-16 September 2020	*Master Class Corporate Governance* Master Class Corporate Governance
Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	14-16 September 2020 14-16 September 2020	*Master Class Corporate Governance* Master Class Corporate Governance
Marwanto Harjowiryono	Komisaris Commissioner	17-18 September 2020 17-18 September 2020	*GRC Summit 2020* GRC Summit 2020
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner	5-6 Oktober 2020 5-6 October 2020	*Master Class Risk Governance* Master Class Risk Governance

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Jabatan Position	Program Peningkatan Kapasitas Capability Building Program	
		Tanggal Date	Pelatihan Training
Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	5-6 Oktober 2020 5-6 October 2020	*Master Class Risk Governance* Master Class Risk Governance
Haryo Indratno	Komisaris Commissioner	5-6 Oktober 2020 5-6 October 2020	*Master Class Risk Governance* Master Class Risk Governance
Kristia Budiyarto	Komisaris Commissioner	10-11 November 2020 10-11 November 2020	7th Komisaris Profesional 7th Professional Commissioner
Haryo indratno	Komisaris Commissioner	15-18 Desember 2020 15-18 December 2020	*Corporate Law for Executive:* Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive: Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN
Iwan Taufiq	Komisaris Commissioner	15-18 Desember 2020 15-18 December 2020	Online Executive Education Series – Directorship Program: "High Performance Boards" Online Executive Education Series – Directorship Program: "High Performance Boards"

PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan yang dilakukan Dewan Komisaris pada tahun 2020, meliputi hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris beserta organ pendukung minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang dan ke atas kapal serta berkoordinasi dengan Direksi beserta jajarannya.

B. Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap jalannya perusahaan di PT PELNI (Persero) pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan, saran dan pendapat kepada Direksi, sebagai berikut:

   1) Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar perusahaan benar-benar melakukan perencanaan yang matang mengenai bisnis trading ini sehingga nanti pengelolaannya bisa selaras dengan bisnis yang sudah ada yakni *logistic* dan pelayaran.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES IMPLEMENTATION IN 2020

Based on duties, authorities and obligations as regulated in Article 15 in the Articles of Associations of the Company, the activities conducted by the Board of Commissioners in 2020, including:

A. In conducting supervisory duties during 2020, the Board of Commissioners has held Internal Meetings with supporting organs at least once in a month, the Board of Commissioners and Directors joint meetings once in a month, also site visits to the ships as well as coordinated with the Directors with the management.

B. In conducting supervisory duties within PT PELNI (Persero) in 2020, the Board of Commissioners has given direction, suggestion and opinions to the Directors, as follows:

   1) The Board of Commissioners suggested to the Board of Directors to make accurate planning regarding this business trading for the future management that can be in line with core business of logistics and shipping.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

2) Dewan Komisaris menyarankan agar perusahaan segera menerapkan *plan maintenance system* yang efektif karena mengingat usia kapal yang rata-rata di atas 20 tahun. Selain itu rencana penggantian kapal secara utuh tidak memungkinkan bila melihat kondisi keuangan perusahaan saat ini dan beberapa tahun ke depan. Kecuali perusahaan mau mengambil langkah pengajuan kapal ke pemerintah.
3) Dewan Komisaris menyarankan agar perusahaan benar-benar memformulasikan *cost structure* yang efisien sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain.
4) Dewan Komisaris menyarankan agar perusahaan hendaknya memberikan sosialisasi peraturan kepada cabang-cabang terkait PSO. Selain itu pendokumentasian PSO juga harus menjadi salah satu kinerja cabang agar meningkatkan kepedulian cabang terhadap pertanggungjawaban PSO.
5) Dewan Komisaris menyarankan agar segera membentuk tim kajian mengenai rencana pelepasan aset kapal Caraka dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.
6) Dewan Komisaris menyarankan agar tata kelola pegawai laut hendaknya dilakukan secara sistem yang dapat dipantau dan dikendalikan oleh pusat. Sehingga pemerataan pengawakan di atas kapal dapat tercapai. Selain itu pengawakan yang tepat juga merupakan bagian dari *plan maintenance system* yang efektif karena kompetensi awak yang sesuai dapat menjamin perawatan yang lebih pas.
7) Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, Dewan Komisaris mengharapkan Perusahaan dapat melaksanakan penugasan dengan lebih baik, mengingat kebijakan tol laut dan penugasan kapal telah memiliki payung hukum yang lebih memadai.

2) The Board of Commissioners recommended that the Company immediately implement an effective maintenance system plan due to the average ship being over 20 years. In addition, the plan to replace the ship is not possible due to the financial condition of the Company for today and some years ahead. Except, the Company will take a step to propose for a new ship to the Government.
3) The Board of Commissioners suggested that the Company genuinely formulate an efficient cost structure to compete with other shipping companies.
4) The Board of Commissioners suggested that the Company shall socialize the regulations to the branches related to PSO. In addition, PSO documenting must be a one of branch performances to increase the branches awareness of PSO responsibility.
5) The Board of Commissioners suggested establishing a study team for the asset release of the Caraka ship and report the work results to the Board of Commissioners immediately.
6) The Board of Commissioners suggested that offshore employee management shall be adapted systematically that can be monitored and controlled by the head office. In addition, equal manning on board can be achieved. On the other hand, the right manning is also to be an effective maintenance system plan because crews competencies reliability can be more fitting care.
7) By the issuance of the President Regulation Number 27 of Year 2021 regarding the implementation of Public Obligation Services for Cargo Transport from and to the remote, outermost, and border areas. The Board of Commissioners hopes that the Company will manage this obligation better, which Tol Laut and ship obligation have had more adequate laws.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

8) Dewan Komisaris menyarankan agar perusahaan juga memperhatikan juga isu *low sulfur*. Perusahaan hendaknya bekerja sama dengan BPDP Sawit untuk meneliti efektivitas penggunaan B30 terhadap mesin kapal dan dampaknya terhadap umur sparepart mesin.
9) Dewan Komisaris menyarankan agar perusahaan segera membuat kajian untuk transformasi bisnis hotel ini apakah merubah nomenklatur ataupun melepaskan usaha tersebut mana yang lebih sesuai dengan peraturan. Bahkan perlu lebih aktif untuk koordinasi dengan Kementerian BUMN menyangkut kebijakan holdingisasi bisnis hotel di lingkungan BUMN.
10) Dewan Komisaris menyarankan agar perusahaan segera menanggulanginya dengan membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap temuan-temuan yang berulang. BOD perlu segera menindaklanjuti temuan BPK, dan penyajiannya harus secara full disclosure, yang memenuhi SAK.
11) Dewan Komisaris menggantikan Direksi agar dilakukan tetap melakukan efisiensi terhadap biaya, khususnya terkait bahan bakar.
12) Dewan Komisaris memiliki *concern* terkait perkiraan dampak Coronavirus Disease (Covid-19) kepada operasional dan bisnis PT PELNI (Persero). Untuk itu, Direksi diminta melakukan upaya-upaya penanggulangan potensi penurunan kinerja akibat penurunan aktivitas klien maupun konsumen melalui peningkatan kinerja anak perusahaan, serta menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris.
13) Dewan Komisaris kembali mengingatkan agar Direksi dapat melakukan pengendalian utang mengingat perusahaan masih memiliki kas yang cukup. Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi mengoptimalkan likuiditas perusahaan dengan menghindari realisasi utang kecuali untuk hal mendesak.

8) The Board of Commissioner suggested that the Company also pays attention to low sulfur issues. The Company also cooperates with BPDP Sawit to research the effectiveness of the use of B30 for the ship's engine and its impact on the age of engine spare parts.
9) The Board of Commissioners suggested that the Company makes a study for this business hotel to change the nomenclature or discharge which business fitted with the regulations. Coordinating with the Ministry of SOE relates to the business hotel holdingization policy within the SOE environment to be more active.
10) The Board of Commissioners recommended that the Company immediately respond to it by building an effective Internal Control system and conducting more intense monitoring of recurring findings. The Board of Directors needs to immediately follow-up on the findings from BPK, and the presentation must be in full disclosure, which complies with SAK.
11) The Board of Commissioners replaced the Board of Directors to conduct cost efficiency, especially for fuel.
12) The Board of Commissioners has a concern related to the impact of Coronavirus Disease (Covid-19) on business and operational of PT PELNI (Persero). By this reason, the Board of Directors needs strategic mitigation to maximize the performance of subsidiary and report it to the Board of Commissioners for ahead of stagnant business performance potential due to client and customer mobility restriction.
13) The Board of Commissioners reminded the Board of Directors to manage the debt because the Company still has sufficient cash flows. The Board of Commissioners suggested that the Board of Directors shall optimize the Company's liquidity by avoiding the debt except for an urgent needs.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

14) Dewan Komisaris meminta Direksi agar melakukan langkah proaktif kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan kuota ternak yang representatif kepada PT PELNI (Persero), khususnya dari Kepulauan Nusa Tenggara ke Pulau Jawa.
15) Dewan Komisaris meminta Direksi agar lebih aktif memasarkan usaha non perkapalan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
16) Dewan Komisaris menyarankan kepada Dewan Direksi agar efisiensi penggunaan BBM tetap memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang.
17) Dewan Komisaris mengingatkan agar proses penghapusan KM Caraka 334 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait perbendaharaan negara. Khusus terhadap Kapal Caraka yang masih dioperasikan, Dewan Komisaris meminta Direksi memastikan aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang di samping proyeksi atas marjin pendapatan.
18) Khusus terkait Terkait pembebanan biaya yang timbul kepada Pemerintah, Dewan Komisaris meminta Direksi memastikan alokasi pembebanan biaya dan mekanisme yang digunakan. Apakah termasuk dalam biaya yang ditanggung melalui subsidi atau menggunakan pos anggaran lain dari pemerintah khusus terkait penanganan Covid-19.
19) Dewan Komisaris meminta Direksi memastikan agar seluruh awak kapal PT PELNI (Persero) dilengkapi dengan alat perlindungan diri yang sesuai dan memastikan semua awak kapal telah divaksin Covid-19 secara lengkap dan tepat waktu, mengingat mereka berada di garda terdepan ketika terjadi kasus Covid-19 di antara penumpang.

14) The Board of Commissioners asked the Board of Directors to have more pro-active steps into the Regional Government for offering representative cattle quota to PT PELNI (Persero), particularly from Nusa Tenggara to Java islands.
15) The Board of Commissioners asked the Board of Directors to be more active promoting non-shipping business to other business players and customer.
16) The Board of Commissioners suggested the Board of Directors to keep maintaining the passenger safety, comfort, and security because of the efficient use of fuel.
17) The Board of Commissioners reminded for the write off process of MV. Caraka 334 that must be aligned with the applicable regulation, especially for state treasury. For the MV Caraka that still have operated, the Board of Commissioners asked the Board of Directors to ensure the security, safety and comfort aspects besides projection for income margin.
18) For imposition of cost from the Government, the Board of Commissioners asked the Board of Directors to maintain cost allocation and mechanism that will be used, neither the cost use from subsidy or other cost from the Government particularly for the handling of Covid-19.
19) The Board of Commissioners asked for the Board of Directors to monitor all ship crews of PT PELNI (Persero) equipped with compatible personal protective equipments and ensure them have been completely and in time vaccinated for Covid-19, they are frontliners when there are positive for Covid-19 amongst the passenger.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

20) Terkait Mitigasi Dampak Pandemi Corona terhadap Angkutan Barang dan Tol Laut, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:
    a) Perusahaan harus memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan angkutan logistic dan Tol Laut, karena selain menjadi sumber pendapatan dari PT PELNI (Persero), Tol Laut ini juga menjadi *icon* Bapak Presiden dalam membangun koneksi antar pulau yang lebih baik. Untuk itu Direksi diminta untuk membuat *blueprint* menyangkut peningkatan angkutan barang (*logistic* dan tol laut).
    b) Perusahaan harus memanfaatkan situasi yang sulit ini, dengan melakukan *action plan* yang baik, serta kerja keras melalui terobosan dalam pengelolaan pasar yang masih terbuka di masa depan.
    c) Dilakukan Evaluasi Rute kapal yang telah ditetapkan (*master schedule*), Evaluasi *cost and benefit analysis* atas operasi kapal setiap *voyage* yang telah terlaksana, dan *Rerouting* atau stop operasi kapal (*Portstay*) yang menimbulkan kerugian operasi yang sangat besar.
    d) Direksi segera menyampaikan laporan perkembangan *progress transhipment* angkutan barang dari kapal penumpang ke kapal barang.
    e) Manajemen melaporkan progres rencana investasi PMN yang sudah dibicarakan sebelumnya, serta perlu dilakukan evaluasi kembali atas rencana kontrak tersebut disesuaikan dengan kondisi terkini (dampak dari pandemi Corona).

20) For the impact of Corona Pandemic mitigation for cargo carrier and Tol Laut, the Board of Commissioners suggested to the Board of Directors to:
    a) The Company must have specific concern to optimize Logistic and Sea Toll transports. Despite these will generate income, Sea Toll is also an Mr. President icon for connecting the islands. The Board of Directors must make a blueprint for increasing cargo carrier (logistic and Sea Toll).
    b) The Company must be aware in this hard situation by doing well action plan and hard work for breakthrough in future wide-open market management.
    c) Evaluating the master schedule, cost and benefit for ship operation of every voyage, and rerouting or stop operating (portstay) that has resulted in immense operating loss.
    d) The Board of Directors shall submit transhipment progress report for cargo from passenger ship to cargo ship immediately.
    e) Management shall report the progress of PMN investment plan that has been discussed before, and needs to be re-evaluated that contract based on latest condition (impact of Corona pandemic).

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

21) Untuk memenuhi target kinerja di masa Pandemi Covid-19 yang mungkin berkelanjutan sampai awal tahun mendatang, Dewan Komisaris meminta Direksi menyusun rencana yang tepat dan menciptakan terobosan baru dalam berbisnis angkutan barang komersial sambil terus meningkatkan pencapaian kinerja keuangan, terutama dengan efisiensi biaya serta mengelola utang perusahaan secara *prudent*.
22) Menghadapi kondisi sekarang ini, manajemen perlu melakukan evaluasi serta menyusun strategi yang tepat agar kinerja keuangan semakin baik, terutama dengan cara meningkatkan pendapatan, lebih khusus lagi meningkatkan pendapatan dari angkutan barang, dan mengefisienkan biaya. Dewan Komisaris agar meminta Direksi untuk meningkatkan pendapatan, khususnya dari sektor angkutan barang.
23) Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah setempat agar dapat segera membuka pelabuhan sehingga ekonomi rakyat bergerak.
24) Dewan Komisaris meminta Direksi dapat memaksimalkan muatan balik pada kapal tol laut supaya kapal selalu terisi muatan. Selanjutnya, Dewan Komisaris juga menyarankan agar Direksi mempertimbangkan biaya penyewaan berdasarkan tonase dan kubikasi untuk membantu pengusaha UMKM yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa dalam satuan Teus.
25) Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk aktif melakukan jemput bola dan penyesuaian strategi bisnis untuk meningkatkan pendapatan, khususnya dari sector angkutan barang dan usaha non perkapalan, dengan tetap memperhatikan efisiensi biaya-biaya dan menjaga *cash flow*-nya dengan baik. Sebagian usaha non perkapalan memerlukan strategi bisnis yang lebih *visible* untuk dilakukan karena terus membukukan kerugian.

21) To achieve the performance target in the ongoing of Covid-19 pandemic outbreak that might continue until the beginning of the following year, the Board of Commissioners asked the Board of Directors to plan the right move and create new breakthrough for commercial freight transport, increasing the financial performance especially for cost efficiency as well as maintaining the Company's debt prudently.
22) Management shall evaluate and make proper strategies to face the latest condition for better financial performance, by increasing income from cargo carrier and streamlining the cost. The Board of Commissioners asked the Board of Directors to increase the income, especially from cargo carrier.
23) The Board of Commissioners encouraged the Board of Directors to approach the Regional Government to open the port immidiately for people economic recovery.
24) The Board of Commissioners inquired the Board of Directors to be able to maximize the return load on sea toll ship so that the ship is always fully loaded. The Board of Commissioners also sugessted the Board of Directors to consider the rent cost based on tonnage and in cubic for helping the small business units which do not have financial capacity to rent in teus calculation.
25) The Board of Commissioners advised the Board of Directors to be being proactive and adjusting the business strategies to increase the income, from cargo carriers and non-shipping business, mantaining cost efficiency and retaining cash flows. Non-shipping business partially necessitates visible strategic business due to always record continuously loss.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

26) Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk memacu tenaga Sales meningkatkan penjualan dengan menerapkan sistem *reward and punishment*. Lebih lanjut Dewan Komisaris menyarankan perlunya dibentuk unit yang khusus menangani Sales dan Marketing di PT PELNI (Persero) untuk mendorong kegiatan komersial (non penugasan) lebih optimal.
27) Dalam rangka mengendalikan pemakaian bahan bakar Kapal Perintis, Dewan Komisaris merekomendasikan agar segera dilakukan pemasangan sistem *Vessel Web Analyze* sebagaimana diterapkan pada kapal-kapal penumpang/barang.
28) Dewan Komisaris meminta Direksi melakukan upaya peningkatan *security awareness* kepada seluruh pegawai secara berkesinambungan, serta mengimplementasikan *Disaster Recovery Center (DRC)* dengan lokasi yang berbeda-beda berdasarkan Disaster Recovery Plan (DRP) untuk menjaga perusahaan dari risiko virus computer yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Selain itu, Direksi juga perlu menugaskan pegawai khusus yang ahli di bidang teknologi untuk mengatasi *Slow Response Service*.
29) Dewan Komisaris berpendapat perlunya dukungan dan arahan Direksi kepada cabang-cabang perusahaan untuk melakukan koordinasi dengan divisi asset guna meningkatkan komersialisasi aset serta merekomendasikan Direksi untuk memberikan dukungan penuh supaya komersialisasi dan penyelesaian aset bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan koridor hukum positif yang berlaku dan memberikan dampak positif bagi perusahaan, khususnya sebagai sumber pendapatan pasif perusahaan.

26) The Board of Commissioners adviced the Board of Directors to encourage Sales staff to increase sales by implementing a reward and punishment system. Furthermore, the Board of Commissioners suggested the need to form a unit that specifically handles Sales and Marketing at PT PELNI (Persero) for more optimal (non-assigned) commercial activities.
27) In order to control the use of fuel for Pioneer Ships, the Board of Commissioners recommended to instal Vessel Web Analyze as has been applied into Passenger/Cargo ships.
28) The Board of Commissioners asked the Board of Directors to continously increase security awareness to all employee, also to implement Disaster Recovery Center (DRC) in different locations based on Disaster Recovery Plan (DRP) to avoid computer viruses which can affect the operation of the Company. The Board of Directors must assign a specific staff who has technology expertise for tackling Slow Response Service.
29) The Board of Commissioners views that the need of support and direction from the Board of Directors to the branches is essential to coordinate with asset division to commercialize assets and recommended the Board of Directors to give full of support for these commercialization and settlement of dispute assets through the applicable laws and can have positive impact on the Company, particularly as a pasive income for the Company.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

C. Selain saran-saran dan arahan yang disampaikan secara lisan, pada tahun 2020 Dewan Komisaris juga telah mengirimkan beberapa surat kepada Direksi, sebagai berikut :
   1) Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Optimalisasi Sisa Dana PMN Tahun 2015 melalui surat Nomor: 15/DK/II-2020 Tanggal 12 Februari 2020
   2) Tanggapan Dewan Komisaris atas Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelayaran Nasional (Persero) Tahun 2020 melalui surat Nomor: 22/DK/II-2020 Tanggal 28 Februari 2020
   3) Persetujuan Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Penerbitan Saham Bersyarat di PT Rumah Sakit PELNI melalui surat Nomor: 25/DK/III-2020 Tanggal 06 Maret 2020
   4) Penyampaian Usulan Top Talent PT Pelayaran PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/ PT PELNI (Persero) melalui surat Nomor: 36/ DK/IV-2020 Tanggal 30 April 2021
   5) Pemanfaatan Dana Hasil Transaksi Penjualan dan Penerbitan Saham PT Rumah Sakit PELNI melalui surat Nomor: 39/DK/IV-2020 Tanggal 30 April 2020
   6) Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2020 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Nomor: 40/DK/V-2020 Tanggal 4 Mei 2020
   7) Batas Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Bulanan PT PELNI (Persero) melalui surat Nomor: 47 /DK/VI-2020 Tanggal 2 Juni 2020
   8) Potensi Menurunnya Kinerja Perusahaan PT PELNI (Persero) sebagai Dampak Pandemi Covid-19 memalui surat Nomor: 48/DK/VI-2020 Tanggal 2 Juni 2020

C. Beside those verbal suggestions and directions from the Board of Commissioners, has also sent several letters to the Board of Directors in 2020, as follows:
   1) The Board of Commissioners' response to the 2015 PMN Remaining Fund Optimization Plan was through letter Number: 15/DK/II-2020 dated 12 February 2020
   2) The Board of Commissioners' response to the review of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) RKAP for the year of 2020 was through the Letter Number: 22/DK/II-2020 on 28 February 2020
   3) Approval of Sales Transaction and issuance of PT Rumah Sakit PELNI Conditional Share was through Number: 25/DK/III-2020 on 6 March 2020
   4) Proposal of Top Talent of PT Pelayaran Nasional Indonesia/PT PELNI (Persero) was through the Letter Number: 36/DK/IV-2020 on 30 April 2021
   5) Utilization of Funds from sale and issuance of PT Rumah Sakit PELNI Shares was through Number: 39/DK/IV-2020 on 30 April 2020
   6) The Board of Commissioners' response to 1st Quarter Financial Statements 2020 of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through Number: 40/DK/V-2020 on 4 May 2020
   7) Submission Deadline of PT PELNI (Persero) Monthly Management Report was through the Letter Number: 47 /DK/VI-2020 Date 2 June 2020
   8) Potentially decrease in the performance of PT PELNI (Persero) caused by the impact of Covid-19 pandemic was through the Letter Numbe: 48/DK/VI-2020 on 2 June 2020

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

9) Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan *Audited* PT Pelayaran Nasional (Persero) Tahun 2019 melalui surat Nomor: 49/DK/VI-2020 Tanggal 2 Juni 2020
10) Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020, serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 PT PELNI (Persero) melalui surat Nomor: 59/DK/VII-2020 Tanggal 10 Juli 2020
11) Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Pengajuan *Cash Loan* (Kredit Modal Kerja), *Non-Cash Loan* dan *Treasury Line* PT PELNI (Persero) melalui surat Nomor: 60/DK/VII-2020 Tanggal 13 Juli 2020
12) Persetujuan Cuti Direktur Utama melalui surat Nomor: 64/DK/VII-2020 Tanggal 18 Juli 2020
13) Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Semester I tahun 2020 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Nomor: 65/DK/VII-2020 Tanggal 22 Juli 2020
14) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan PKBL PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2020 melalui surat Nomor: 66/DK/VII-2020 Tanggal 22 Juli 2020
15) Usulan Struktur Organisasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Nomor: 67/DK/VII-2020 Tanggal 27 Juli 2020
16) Penyampaian Tambahan Talent PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PT PELNI (Persero) melalui surat Nomor: 68/DK/VII-2020 Tanggal 27 Juli 2020

9) The Board of Commissioners' response to the 2019 Financial Audited Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 49/DK/VI-2020 on 2 June 2020
10) The Board of Commissioners' response to the proposed Salary/Honorarium along with Other Facilities and Benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020, as well as Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2019 of PT PELNI (Persero) was through the letter Number: 59/DK/VII- 2020 10 July 2020
11) The Board of Commissioners' response to the proposed Cash Loan (Working Capital Credit), Non-Cash Loan and Treasury Line of PT PELNI (Persero) was through letter Number: 60/DK/VII-2020 on 13 July 2020
12) Approval of the President Director leave was through the Letter Number: 64/DK/VII-2020 Dated 18 July 2020
13) The Board of Commissioners' response to the 1st Semester of the 2020 Audited Financial Statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 65/DK/VII-2020 on 22 July 2020
14) Appointment of Public Accountant Firm for Auditing Consolidated Financial Statements and PKBL for the year of 2020 of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through letter Number: 66/DK/VII-2020 on 22 July 2020
15) Proposed Organizational Structure of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 67/DK/VII-2020 on 27 July 2020
16) Submission of Additional Talent of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PT PELNI (Persero) was through the Letter Number: 68/DK/VII-2020 on 27 July 2020

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

17) Tanggapan Dewan Komisaris atas Revisi RKAP Tahun 2020 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Nomor: 69/DK/VII-2020 Tanggal 27 Juli 2020
18) Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Anggota Komite Audit PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Nomor: 70/DK/VII-2020 Tanggal 29 Juli 2020
19) Rencana Kunjungan Kerja Komite Audit Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 78/DK/VIII-2020 Tanggal 24 Agustus 2020
20) Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penempatan Wakil Perseroan pada Anak Perusahaan sebagai Direktur Administrasi & Keuangan PT RS PELNI melalui surat Nomor: 80/DK/VIII-2020 Tanggal 31 Agustus 2020
21) Tanggapan Dewan Komisaris atas Revisi RKAP PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2020 PELNI melalui surat Nomor: 81/DK/VIII-2020 Tanggal 28 Agustus 2020
22) Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Penempatan Wakil Perseroan pada Anak Perusahaan sebagai Direktur Administrasi & Keuangan PT RS PELNI melalui surat Nomor: 82/DK/VIII-2020 Tanggal 31 Agustus 2020
23) Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 83/DK/IX-2020 Tanggal 9 September 2020
24) Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Pengajuan Hasil Evaluasi dan Penilaian Tender Jasa Audit Konsolidasi dan PKBL PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun Buku 2020 melalui surat Nomor: 84/DK/IX-2020 Tanggal 7 September 2020
25) Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksana Audit Laporan Keuangan dan PKBL Tahun Buku 2020 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Nomor: 86/DK/IX-2020 Tanggal 17 September 2020

17) The Board of Commissioners' response to the 2020 RKAP revisied of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 69/DK/VII-2020 on 27 July 2020
18) Announcement of Termination of the Audit Committee Members of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 70/DK/VII-2020 Dated on 29 July 2020
19) Site visit plan for the Audit Committee of the Board of Commissioners was through the Letter Number: 78/DK/VIII-2020 on 24 August 2020
20) The Board of Commissioners' response to the proposed management representative on subsidiaries as the Director of Finance & Administration of PT RS PELNI was through Number: 80/DK/VII-2020 on 31 August 2020
21) The Board of Commissioners' response to 2020 RKAP Revised of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number 81/DK/VII-2020 on 28 August 2020
22) Approval from the Board of Commissioners for the Management Representive Placement in subsidiaries as Director of Administration & Finance of PT RS PELNI was through Number: 82/DK/VIII-2020 on 31 August 2020
23) Competency Development Program for the Board of Commissioners and Supporting Organs was through Number: 83/DK/IX-2020 on 9 Sepetember 2020
24) The Board of Commissioners' response to Evaluation and Assessment Result of Audit Service Tender of the 2020 Condolidated Financial and PKBL of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 84/DK/IX-2020 on 7 September 2020
25) Apponintment of Public Accounting Firm whose audit the Financial & PKBL Statements for Fiscal Year 2020 of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 86/DK/IX-2020 on 17 September 2020

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

26) Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Komisaris PT Rumah Sakit PELNI melalui surat Nomor: 92/DK/IX-2020 Tanggal 29 September 2020
27) Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Penempatan Wakil Perseroan pada Anak Perusahaan sebagai Direktur Keuangan PT PBM Sarana Bandar Nasional melalui surat Nomor: 93/DK/IX-2020 Tanggal 30 September 2020
28) Sertifikat Kompetensi Organ Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 94/DK/IX-2020 Tanggal 29 September 2020
29) Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2020-2024 melalui surat Nomor: 95/DK/IX-2020 Tanggal 30 September 2020
30) Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Perbaikan Kinerja PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Nomor: 97/DK/X-2020 Tanggal 2 Oktober 2020
31) Pemberitahuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2020 melalui surat Nomor: 100/DK/X-2020 Tanggal 12 Oktober 2020
32) Revisi Biaya Program Pelatihan dan Sertifikasi Dewan Komisaris serta Organ Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 103/DK/X-2020 Tanggal 21 Oktober 2020
33) Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Tahun 2021 melalui surat Nomor: 107/DK/X-2020 Tanggal 27 Oktober 2020
34) Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA PKBL) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2020 melalui surat Nomor: 108/DK/X-2020 Tanggal 27 Oktober 2020

26) The Board of Commissioners' response to the Proposal of Board of Commissioners of PT Rumah Sakit PELNI was through the Letter Number: 92/DK/IX-2020 on 29 September 2020
27) Approval from the Board of Commissioners for the Management Representative Placement in subsidiaries as the Director of Finance of PT PBM Sarana Bandar Nasional was through the Letter Number: 93/DK/IX-2020 on 30 September 2020
28) The Board of Commissioners' Organs Competency Certificate was through the Letter Number: 94/DK/IX-2020 on 29 September 2020
29) The Board of Commissioners' response to the Long Term Plan 2020-2024 of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 95/DK/IX-2020 on 30 September 2020
30) The Board of Commissioners' response to the Performance Improvement Plan of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 97/DK/X-2020 on 2 October 2020
31) Notification of Concurrent Positions of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2020 was through the letter Number: 100/DK/X-2020 Dated October 12, 2020
32) Cost Revised of the Board of Commissioners' Secretary and Supporting Organs Training and Certification program was through the Letter Number: 103/DK/X-2020 on 21 October 2020
33) Submission of the Work Plan and Budget for the year of 2021 of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) was through the Letter Number: 107/DK/X-2020 On 27 October 2020
34) The Board of Commissioners' response to the work plans and budget (RKAP) and PKBL plans and costs (RKA PKBL) for fiscal year 2020 of PT PELNI (Persero) was through Number: 108/DK/X-2020 on 27 October 2020

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

35) Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2020 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Nomor: 109/DK/XI-2020 Tanggal 3 November 2020
36) Kelengkapan Usulan Calon Komisaris Independen PT Pelita Indonesia Djaya melalui surat Nomor: 110/DK/XI-2020 Tanggal 2 November 2020
37) Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 115/DK/XI-2020 Tanggal 3 November 2020
38) Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksana Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 melalui surat Nomor: 117/DK/XI-2020 Tanggal 4 November 2020
39) Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Rencana Pemanfaatan Kapal Hasil PMN saat Tidak Digunakan untuk Penugasan Tol Laut melalui surat Nomor: 129/DK/XII-2020 Tanggal 11 Desember 2020
40) Reviu Dewan Komisaris terhadap Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PELNI (Persero) melalui surat Nomor: 130/DK/XII-2020 Tanggal 11 Desember 2020
41) Penyesuaian Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA PKBL) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2021 melalui surat Nomor: 131/DK/XII-2020 Tanggal 11 Desember 2020
42) Reviu dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern PT PELNI (Persero) melalui surat Nomor: 136/DK/XII-2020 Tanggal 29 Desember 2020
43) Usulan Calon Direktur Operasi PT Pelita Indonesia Djaya melalui surat Nomor: 137/DK/XII-2020 Tanggal 29 Desember 2020
44) Evaluasi Kebijakan Mutu dan Pelayanan pada KM Nggapulu melalui surat Nomor: 138/DK/XII-2020 Tanggal 29 Desember 2020

35) The Board of Commissioners' Reponse to 3rd quarter of Financial Report 2020 of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 109/DK/XI-2020 on 3 November 2020
36) Completeness of the Proposed Independent Commissioner of PT Pelita Indonesia Djaya was through the Letter Number: 110/DK/XI-2020 Dated 2 November 2020
37) The Board of Commissioners Competency Development Program was through the Letter Number: 115/DK/XI-2020 on 3 November 2020
38) Appointment of Public Accounting Firm whose audit the 2020 Financial Statements was through the Letter Number: 117/DK/XI-2020 on 4 November 2020
39) The Board of Commissioners' response to the utilization plan of PMN Ship result when Not Used for Sea Toll Asignment was through the Letter Number: 129/DK/XII-2020 on 11 December 2020
40) The Board of Commissioners reviewed Procurement Guidelines of PT PELNI (Persero) was through the Letter Number: 130/DK/XII-2020 on 11 December 2020
41) The Board of Commissioners' adjustment response to the work plans and budget (RKAP) and PKBL plans and costs (RKA PKBL) fro fiscal year 2021 of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) was through the Letter Number: 131/DK/XII-2020 on 11 December 2020
42) Review and evaluation of Intenal Control System of PT PELNI (Persero) was through the Letter Number: 136/DK/XII-2020 on 29 December 2020
43) Proposed Director of Operations Candidate for PT Pelita Indonesia Djaya was through the Letter Number: 137/DK/XII-2020 Dated 29 December 2020
44) M.V Ngapulu Quality and Service Policy evaluation was through the Letter Number: 138/DK/XII-2020 on 29 December 2020

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

45) Evaluasi Kebijakan Mutu dan Pelayanan pada KM Labobar melalui surat Nomor: 139/DK/XII-2020 Tanggal 29 Desember 2020
46) Evaluasi Kebijakan Mutu dan Pelayanan pada Cabang Pantoloan melalui surat Nomor: 139/DK/XII-2020 Tanggal 29 Desember 2020

REKOMENDASI DAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Sesuai dengan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) selama Tahun Buku 2019 yang disampaikan melalui surat Nomor: 46/DK/VI/2020, Dewan Komisaris telah memberikan Saran dan Rekomendasi atas Pencapaian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Direksi agar menyusun *roadmap* dan *action plan* mengenai Manajemen Pengelolaan PSO dan Angkutan Barang.
2. Direksi perlu mendorong peningkatan laba konsolidasi melalui pemanfaatan *idle asset*, efisiensi biaya, penyempurnaan serta pemanfaatan teknologi informasi dan sistem aplikasi secara optimal, pengawasan yang ketat terhadap calon penumpang tanpa tiket serta pengendalian penumpang di atas kapal.
3. Direksi perlu mengoptimalkan pemanfaatan kas perusahaan dengan lebih baik dengan mempertimbangkan instrumen keuangan yang aman dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.
4. Direksi agar meningkatkan pendapatan usaha perkapalan yang merupakan bisnis utama induk Perusahaan.
5. Direksi agar selalu berupaya menangani kendala-kendala operasional kapal yang menyebabkan keterlambatan perjalanan kapal sebagai pengendalian mutu layanan angkutan kapal.
6. Direksi agar sigap melengkapi dokumen administrasi pencairan dana PSO/Subsidi pada kesempatan pertama untuk memperlancar proses pencairannya.

45) M.V Labobar Quality and Service Policy evaluation was through the Letter Number: 139/DK/XII-2020 on 29 December 2020
46) Pantoloan Branch Quality and Service Policy evaluation was through the Letter Number: 139/DK/XII-2020 on 29 December 2020

RECOMMENDATION AND DECISION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020

In accordance with the Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) during the Fiscal Year 2019 which was submitted by letter Number: 46/DK/VI/2020, the Board of Commissioners has provided Suggestions and Recommendations for the Achievement of 2020 Performance, as follows:

1. The Board of Directors shall compose the roadmap and action plan related to the management of PSO and Cargo Transports.
2. The Board of Directors needed to increase consolidated income by idle assets utilization, cost efficiency, upgrading and utilizing the information technology and application systems optimally, strict-supervision on passengers without holding tickets and passenger control on board.
3. The Board of Directors needed to optimize better use of Company's cash by considering the financial instruments which are safe and can be utilized by the Company.
4. The Board of Directors shall increase shipping business income which is the core business of the Parent Company.
5. The Board of Directors shall always strive facing the challenges in operating the ships that cause schedule delays as quality control of ships transportation services.
6. The Board of Directors should complete the disbursement administration document of PSO/Subsidise Funds at the first time to smoothen the disbursement process.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

7. Direksi perlu menjalin sinergi dan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah, khususnya kepada Menteri Perhubungan c.q. Ditjen Hubla, agar memperoleh kepastian kontrak penugasan kapal Tol Laut setiap tahunnya.

8. Direksi perlu meningkatkan kinerja serta sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan aktif menjemput bola di masing-masing cabang.

9. Direksi perlu mempertimbangkan transformasi proses bisnis yang memungkinkan cabang untuk menyusun konsep pengembangan bisnis untuk mengembangkan pasar angkutan kapal, dengan menyelaraskan remunerasi/*reward-consequences* dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan.
10. Direksi agar selalu melakukan akselerasi maupun penyesuaian rencana aksi perusahaan dan inovasi-inovasi untuk memenuhi tantangan/*challenge* dari *stakeholder* terkait.
11. Direksi agar dapat meningkatkan kinerja usaha non perkapalan, salah satunya dengan membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga yang relevan untuk meningkatkan okupansi.

12. Direksi agar segera merealisasikan penggunaan Teknologi Informasi dalam hal reservasi, ticketing, pembayaran dan konsolidasi pelaporan keuangan, mulai dari cabang sampai ke Pusat, beserta mekanisme pengendalian pelaporan keuangan di perusahaan induk sebagai akselerasi proses bisnis Perusahaan.
13. Direksi agar tetap memperhatikan pelayanan yang baik, keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang, khususnya dalam masa-masa *peak season*.
14. Direksi agar mengkaji efektivitas rute kapal yang dilayani dan menyusun rencana *rerouting* sejalan dengan perkembangan yang ada.

7. The Board of Directors needed to have a more intense synergy and coordination relationship with the Government, particularly the Ministry of Transportation c.q General Directorate of Sea Transportation, in order to obtain the contract certainty of Sea Toll ships' assignment each year.
8. The Board of Directors shall improve the performance, synergy and coordination with the related parties by actively picking up the projects for each branch.
9. The Board of Directors shall apply business process transformation into all branches to make business development concepts and develop the shipping transport market, as well as align with remuneration/reward-consequences for the performance and productivity of the Company.

10. The Board of Directors shall accelerate or adjust the Corporate Action plan and innovations to face the challenges from the Stakeholders concerned.

11. The Board of Directors shall increase the performance of non-shipping business, which one of the businesses is to welcome the cooperation opportunities from the relevant third parties to increase occupancies.
12. The Board of Directors should immediately instal the Information Technology into reservation, ticketing, payment and consolidated financial report, from the branches to the Head Office, as well as controlling mechanisms for financial report in the Holding Company as a business acceleration process of the Company.
13. The Board of Directors needs to maintain the best services, safety, security and comfort for the passengers, especially for peak seasons.

14. The Board of Directors should review the effectiveness of ships' routes served and should prepare a rerouting plan aligned with the existing developments.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

15. Direksi agar terus meningkatkan *Good Corporate Governance (GCG)* Perusahaan dan melaporkan implementasinya secara berkala kepada Dewan Komisaris.
16. Direksi agar mempercepat penyelesaian Temuan dan Rekomendasi BPK RI, KAP dan SPI yang belum diselesaikan dalam rangka perbaikan dan kemajuan perusahaan.
17. Direksi agar menyusun *Key Performance Indicator (KPI)* untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman/*MoU* beserta realisasi capaiannya.
18. Direksi agar meningkatkan fungsi Humas dalam melakukan sosialisasi kepada pengguna dalam rangka peningkatan kinerja kapal Tol Laut.
19. Direksi agar mengkaji kembali potensi bisnis dan kebutuhan kapal PT PELNI (Persero) di masa mendatang dengan menggunakan jasa lembaga independen.
20. Direksi agar mengawal pengembangan kebijakan bisnis anak Perusahaan.

15. The Board of Directors shall keep improving on the application of Good Corporate Governance and shall report the implementation to the Board of Commissioners.
16. The Board of Directors shall speed up the completion of the uncompleted findings and recommendations from BPK RI, Public Accounting Firm and Internal Control Unit for the improvement and progress of the Company.
17. The Board of Directors shall prepare Key Performance Indicator (KPI) to measure the effectiveness of memorandum of understanding/MoU including the achievements.
18. The Board of Directors shall enhance the Public Relations' functions in socializing the performance of Tol Laut to the customers.
19. The Board of Directors shall re-review the potential business and needs of PT PELNI (Persero) Ships for the years to come by cooperating with an Independent Institution.
20. The Board of Directors shall oversee the business development policies of the Subsidiaries

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan organ perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) bagi Dewan Komisaris, sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 12.29/05/SK/HKO.01/2016 tentang tentang Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Tata laksana kerja tersebut berisi panduan bagi Dewan Komisaris yang berisikan, antara lain:

1. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris;
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
4. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris;
5. Wewenang Dewan Komisaris;

BOARD MANUAL OF BOC

In orchestrating relationship with other Company's Organs regarding implementation of the duties and responsibilities, the Board of Commissioners has Board Manual as working guideline for the Board of Commissioners that is validated under PT PELNI (Persero) Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioners No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 regarding PT PELNI (Persero) Working Manual (Board Manual) for Board of Directors and Board of Commissioners. The Board Manual contains the guidelines for the Board of Commissioners, among others:

1. Board of Commissioners requirement and composition;
2. Board of Commissioners' Responsibility;
3. Board of Commissioners' Duties and Obligation;
4. Board of Commissioners' Duties and Charges;
5. Board of Commissioners' Authority;

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

6. Hak Dewan Komisaris;
7. Etika Jabatan;
8. Rapat Dewan Komisaris;
9. Komite-Komite Dewan Komisaris;
10. Sekretaris Dewan Komisaris;

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Demi terciptanya fungsi dan efektivitas kerja, Dewan Komisaris dibantu oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 dijabat oleh Anton H.G Napitupulu.

Fungsi dan tugas Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Menyiapkan bahan rapat dan menyusun risalah rapat Dewan Komisaris.
2. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
3. Memberikan bantuan ringkasan laporan manajemen.
4. Mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
5. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Mengadministrasikan undangan rapat Dewan Komisaris.
7. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Urusan surat menyurat.

6. Board of Commissioners' Rights;
7. Position Ethics
8. Board of Commissioners Meeting;
9. Committees Under the Board of Commissioners;
10. A Secretary of Board of Commissioners;

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

For the sake of function and effectiveness of work, the Board of Commissioners is assisted with a Secretary. A secretary of the Board of Commissioners as of 31 December 2020 was Anton H.G Napitupulu.

Function and duties of a Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

1. Preparing Board of Commissioners meeting agenda and recording the minutes of meeting.
2. Performing other secretariat duties.
3. Giving assistance to management report summary.
4. Collecting relevant material and information related to the Board of Commissioners' duties implementation.
5. Coordinating with Corporate Secretary regarding any issues related with the Board of Commissioners and Directors.
6. Administering the meetings invitation for the Board of Commissioners.
7. As a liaison officer between the Board of Commissioners and Board of Directors.
8. Managing the Letters of the Board of Commissioners.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Profile of Board of Commissioners' Secretary



Anton H.G Napitupulu
Sekretaris Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Secretary

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
44 tahun per 31 Desember 2020
44 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place DOB
Jakarta, 23 November 1976
Jakarta, 23 November 1976

Domisili | Domicile
Bekasi, Indonesia
Bekasi, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 1 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan KEP-16/DK/XI-2020 tanggal 30 November 2020
Appointed as a Secretary of Board of Commissioners since 1 December 2020 based on the Letter of Decree KEP-16/DK/XI-2020 on 30 November 2020

Masa Jabatan | Term of Serving
2020-2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2003 — Sarjana Ilmu Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu
  Bachelor of Economics, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2020 – Sekarang / 2020 – Present — Sekretaris Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
  Secretary of The Board of Commissioners PT PELNI (Persero)
- 2017 – 2020 — Sekretaris Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
  Secretary of The Board of Commissioners PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- 2016 – 2017 — Sekretaris Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero)
  Secretary of The Board of Commissioners PT Nindya Karya (Persero)
- 2012 – 2017 — Sekretaris Dewan Komisaris PT Perikanan Nusantara (Persero)
  Secretary of The Board of Commissioners PT Perikanan Nusantara (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak Ada
None

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata–mata demi kepentingan Perseroan serta dapat bertindak secara objektif dengan berpedoman pada prinsip– prinsip GCG.

Perseroan memiliki 1 anggota Dewan Komisaris yang menjadi Komisaris Independen yaitu Bapak Kristia Budiyarto.

Kriteria Komisaris Independen

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-83/MBU/06/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Komisaris, maka kriteria Komisaris Independen yaitu sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang berkerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and the controlling shareholder, and is self-determined from any business relationships or other relationships which may affect his ability to act independently or personally for the interest of the company and can act objectively as guided by GCG principles.

The Company has 1 member of the Board of Commissioners that becomes the Independent Commissioners, which is Mr. Kristia Budiarto.

Independent Commissioner Criteria

Referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-83/MBU/06/2015 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners, then the Criteria for Independent Commissioner is as follows:

- Not working or having responsibility to plan, manage, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months.
- Not having any shares either directly or indirectly in the Company.
- Not having any affiliation with the Company, others members of Board of Commissioners, Board of Directors or Majority Shareholders.
- Not having any business relations either directly or indirectly related with the Company's business activity.

DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Pemenuhan Kriteria Komisaris Independen telah sesuai dengan pernyataan diatas dengan lampiran pada tabel dibawah ini.

Independent Statement of Commissioner

The Criteria Fulfillment of Independent Commissioners has been in accordance with the above statement with the attachment in the table below.

Aspek Independensi Independence Aspects	Kristia Budiyarto
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain Not having any affiliation with other members of Directors and/or Board of Commissioners	√
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi dengan Perseroan Not serving as Board or Directors in the Company that is affiliated with the Company	√
Tidak bekerja pada Lembaga Pemerintahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not Working in Government within last three years	√
Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not working in the Company or its affiliation within three last years	√
Tidak mempunyai keterkaitan financial baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya Not having any financial affiliation either directly or indirectly with the Company or other companies which provide services and offers product to the Company and its affiliation	√
Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perseroan Not having business interest and activity or other relationships that may constraint or disrupt the Board of Commissioners' capability to stand and think independently across the Company	√

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2020, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-17/DX/XI-2020 on 30 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero). Maka, PT PELNI (Persero) mempunyai 3 Organ Pendukung yang membantu Dewan Komisaris melakukan tugas-tugasnya yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap tahun komite-komite di bawah Dewan Komisaris mendapat penilaian kinerja sebagai tolok ukur efektivitas kinerjanya.

Pada tahun 2020, komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dengan baik dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan Perseroan. Implementasi program kerja dan dan ketepatan fungsinya senantiasa mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF THE BOC SUPPORTING COMMITTEE

In 2020, the Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-17/DX/XI-2020 on 30 November 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero). Thus, PT PELNI (Persero) has had 3 Supporting Organs that assist the Board of Commissioners in tackling its duties, which are the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee and the Nomination and Remuneration Committee. These committees under the Board of Commissioners has received a performance assessment as the effectiveness benchmarking of their performance.

In 2020, these committees have conducted their duties and have contributed to the growth of the Company. The work programs and the accuracy of their functions always align with the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.Tiap-tiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

The Board of Directors is an organ of the Company that carries out the overall management to achieve the Company's vision and mission for the best interests of the Company. The Board of Directors is also responsible to represent the Company both inside and outside the court in accordance with the applicable Articles of Association of the Company. Each member of the Board of Directors can perform the duties and make decisions according to the distribution of their duties and authority.

PERSYARATAN, KOMPOSISI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mengenai Persyaratan, Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Direksi meliputi persyaratan formal dan persyaratan material.

Selain persyaratan formal dan material, calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*). Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta pengalaman di bidang usaha perusahaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya.

KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2020, tidak terdapat perubahan susunan Direksi PT PELNI (Persero) yang sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-339/MBU/12/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT PELNI (Persero) tanggal 27 Desember 2019. Namun pada tanggal 12 Januari 2021 yang tercatat sebagai informasi kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang

REQUIREMENT, COMPOSITION, APPOINTMENT AND DISMISSAL OF BOD

The Requirement, Composition, Appointment and Dismissal of the Board of Directors refer to Articles of Association and Ministry of SOEs Regulation No. Per-03/ MBU/02/2015 regarding Requirements, Appointment and Discharge procedures of Board of the Directors of State-Owned Enterprises. The mandatory requirements for Board of Directors candidates are formal and material requirements.

Other than formal and material requirements, the Board of Directors candidate shall also meet fit and proper test requirements. The Board of Directors member shall have sufficient and relevant knowledge with the position and have such experiences in the Company's business sector and/or other sectors that are preferably with the positions.

COMPOSITION OF BOD

In 2020, there was no changes in composition of Board of Directors which based on decree of Minister of State Owned Enterprises number SK-339/MBU/12/2019 concerning to termination and appointment of members of Board of Directors of PT PELNI (Persero) on 27 December 2019 the Board of Directors for the year ended 31 December 2020. However in 12 January 2021 that we noted as information of important event after the date of accountant report that based on decree of Minister of State Owned Enterprises number Nomor SK-12/MBU/01/2021 dated on 12 January 2021 concerning

DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS

Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan, sehingga susunan Direksi Perseroan PT PELNI (Persero) sebagai berikut:

termination, Changes of Nomenclature Duties Diversion and appointment of members of Board of Directors of the Company, therefore the composition of BOD of PT PELNI (Persero) as follows:

No	Nama Direksi Name of Directors	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Jabatan Date of Appointment	SK Pengangkatan Jabatan Appointment Decree
1	Insan Purwarisya L. Tobing	Direktur Utama President Director	26 September 2017 26 September 2017	SK-210/MBU/09/2017
2	Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	21 Agustus 2015 21 August 2015	SK-148/MBU/08/2015
3	Robert MP Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	12 Januari 2021 12 January 2021	SK-12/MBU/01/2021
4	Ony Suprihartono	Direktur Keuangan Director of Finance	27 Desember 2019 27 December 2019	SK- 339/MBU/12/2019
5	Ganefi	Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	3 April 2017 3 April 2017	SK-62/MBU/04/2017
6	Yahya Kuncoro	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	12 Januari 2021 12 January 2021	SK-12/MBU/01/2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pengelolaan Perusahaan, Direksi Perusahaan berpedoman pada Piagam Direksi (*BOD Charter*) yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan di bidang pasar modal. Piagam ini dimaksudkan menjadi pedoman bagi Direksi dalam menjalankan peran dan tanggungjawab serta kewenangannya secara objektif dan efektif guna merealisasikan visi dan misi Perusahaan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOD

In executing the Company's management duties and authority, the Company's Board of Directors is guided by BOD Charter composed with due regard to Limited Liability Company Law, Company's Articles of Association, and Capital Market regulations. This Charter is to be a guideline for the Board of Directors to carry out their roles and responsibilities and authorities in objectively and effectively in order to realize the Company's vision and mission.

Pembagian tugas Masing-masing Fungsi Direksi adalah sebagai berikut:

The Distribution of each function of the Board of Directors is as follows:

Direktur Utama

1. Menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan dan melakukan tugas lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemegang Salam;
2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh para Direktur;

President Director

1. Conducting the Company's management in accordance with the prevailing regulations for the company and performing other duties as specified by Shareholders;
2. Controlling the Directors' policies implementation which is conducted by the Board of Directors;

DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS

3. Mengendalikan pelaksanaan tugas Internal Audit, DPA-QHSSE, *Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management,* Legal, bersama dengan para Direktur dalam kedudukannya selaku Direksi perusahaan mengendalikan pelaksanaan fungsi staf Kantor Pusat;
4. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh unit kerja Kapal dan Kantor Cabang/Terminal Point serta Unit Bisnis Strategis/ *Strategic Business Unit* (SBU) perusahaan secara menyeluruh.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Membina pengelolaan pemasaran, operasi dan pelayanan kapal penumpang dan perintis serta ke agenan & *tour* agar dicapai kinerja citra produk jasa (*brand image*), pangsa pasar (*market share*), volume penjualan jasa, pertumbuhan pelanggan jasa perusahaan, pendapatan usaha jasa angkutan penumpang perusahaan yang optimal serta mengutamakan kinerja keselamatan pelayaran, kualitas layanan jasa dan kepuasan pengguna jasa yang optimal;

Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut
Membina pengelolaan kegiatan pemasaran angkutan barang kapal penumpang & perintis, pemasaran kapal tol laut dan ternak, operasi dan pelayanan kapal tol laut & ternak serta pengembangan usaha angkutan barang & tol laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja citra produk jasa (brand image), pangsa pasar (*market share*), volume penjualan jasa, pertumbuhan pelanggan jasa perusahaan, pendapatan usaha jasa angkutan barang perusahaan yang optimal serta mengutamakan kinerja keselamatan pelayaran, kualitas layanan jasa dan kepuasan pengguna jasa yang optimal;

3. Controlling the duties implementation of Internal Audit, DPA-QHSSE, Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management, Legal, along with other Directors in its position as the Company's Board of Directors which are in charge of Staff implementation in Head Office;
4. Controlling the Board of Directors' policies implementation which is organized by the Ship and Branch/Terminal Point work units as well as the overall Business Strategic Unit (SBU) of the Company.

Director of Passenger Transportation Business
Fostering the management of marketing, operation and service of passenger, perintis ships and the agent & tour that is to maintain the performance of brand image, market share, sales volume of services, customer service growth, optimal revenue of passenger transportation business, as well as to prioritize safety performance of shipping, service quality and optimal customers satisfaction;

Director of Freight & Sea Toll Business
Building the marketing management of passenger & perintis ships, Tol Laut and Cattle ships marketing, operation and service of Sea Toll & Cattle ships and also the development of Tol Laut & freight shipping transport business in accordance with the prevailing provisions that is to achieve the performance of the service products image (brand image) , market share, sales volume of services, The Company's customers growth, optimal revenues of freight transport and to prioritize shipping safety performance, service quality and optimal customers satisfaction;

DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS

Direktur Armada dan Teknik
Membina pengelolaan kegiatan penyediaan dan penyiapan pakai sertifikat, fasilitas serta peralatan nautika, teknika, penyediaan dan modifikasi kapal, bahan bakar kapal dan surveyor serta parenting SBU Galangan PELNI Surya Surabaya agar dicapai kinerja kelaikan laut (*seaworthiness*), kesiapan pakai (*semi capability performance*), kehandalan (*reliability performance*), efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penyiapan pakai alat produksi jasa angkutan laut perusahaan yang optimal;

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Membina kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi, administrasi dan pelayanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan di wilayah kerja perusahaan serta pengelolaan aset dan sebagai parenting untuk SBU Hotel Bahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja produktivitas sumber daya manusia dan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan administrasi serta layanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan dan ketertiban umum serta pemanfaatan aset pada wilayah kerja perusahaan yang optimal, mengendalikan pelaksanaan tugas Information Technology serta pengadaan barang dan jasa.

Direktur Keuangan
Membina pengelolaan keuangan perusahaan yang meliputi pengelolaan kegiatan akuntansi, perbendaharaan, serta kewajiban layanan publik (*Public Service Obligation*/PSO) dan subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja pengelolaan keuangan, serta PSO dan subsidi yang optimal;

Director of Fleet and Engineering
Fostering the management of supply and preparatory activities using certificates, facilities and nautical equipment, technics, provision and modification of ships, ship fuel and surveyors and parenting SBU PELNI Surya Surabaya shipyard to achieve the performance of seaworthiness, semi capability performance, , reliability (reliability performance), effectiveness and efficiency of the provision and preparation of the optimal production equipment of the company's sea transportation services;

Director of Human Capital & General Affair
Fostering the management of human resource and organization, administration and public service of office household, the Company's work area security and asset management and as parenting for SBU Hotel Bahtera in accordance with applicable provisions that is to achieve the productivity performance of human resources and organizational, quality improvement of human resources, order and smoothness of administration implementation and public service of office household, security and general order as well as optimal assets utilization in Company's work area, controlling the Information Technology implementation and goods and services procurement.

Director of Finance
Fostering the Company's financial management that includes the management of accounting activities, treasury, public service obligations (PSO) and subsidies along with the prevailing provisions in order to achieve financial management performance, as well as the optimal PSO and subsidies;

DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bentuk antisipasi atas masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT OF BOD

Capability enhancement is deemed for the Board of Directors to keep updating information on the latest developments of the Company's business and the prevailing laws and regulations and to anticipate the future problems for the sustainability and progress of the Company.

Nama Direksi Name of Directors	Jabatan Position	Program Peningkatan Kapasitas Capability Building Program		
		Tanggal Date	Subyek Subject	Tempat Place
Robert MP Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	16-25 November 2020 16-25 November 2020	*Palm Oil Product Knowledge and Handling* Palm Oil Product Knowledge and Handling	Webinar Webinar
Masrul Khalimi*	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	10 Desember 2020 10 December 2020	*Shipping & Port 2021 Outlook* Shipping & Port 2021 Outlook	Webinar Webinar
O.M Sodikin	Direktur Keuangan Director of Finance	10 Desember 2020 10 December 2020	*Shipping & Port 2021 Outlook* Shipping & Port 2021 Outlook	Webinar Webinar
Insan Purwarisya L. Tobing	Direktur Utama President Director	4 November 2020 4 November 2020	Pelatihan Penerapan GCG pada BUMN Application of GCG within SOE	Webinar Webinar
O.M Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	4 November 2020 4 November 2020	Pelatihan Penerapan GCG pada BUMN Application of GCG within SOE	Webinar Webinar
Ony Suprihartono	Direktur Keuangan Director of Finance	4 November 2020 4 November 2020	Pelatihan Penerapan GCG pada BUMN Application of GCG within SOE	Webinar Webinar
Ganefi	Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	4 November 2020 4 November 2020	Pelatihan Penerapan GCG pada BUMN Application of GCG within SOE	Webinar Webinar
M. Tukul Harsono*	Direktur Armada Director of Fleet	4 November 2020 4 November 2020	Pelatihan Penerapan GCG pada BUMN Application of GCG within SOE	Webinar Webinar
Yahya Kuncoro	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	4 November 2020 4 November 2020	Pelatihan Penerapan GCG pada BUMN Application of GCG within SOE	Webinar Webinar

* Menjabat sampai dengan 12 Januari 2021 berdasarkan SK Kementerian BUMN No.SK-12/MBU/01/2021.
Served until 12 January 2021 based on the Decree of Ministry of SOE No.SK-12/MBU/01/2021.

DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS

PROGRAM PENGENALAN DAN ORIENTASI DIREKSI

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wajib diberikan program pengenalan dan pendalaman pengetahuan bagi Anggota Direksi Perusahaan. Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan, karena Anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan.

Program Pengenalan yang diberikan kepada Anggota Direksi antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh Perusahaan.
3. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Pada tahun 2020, telah dilakukan program orientasi Direksi kepada Ony Suprihantoro dan Masrul Khalimi sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut.

THE BOARD OF DIRECTORS ORIENTATION AND INTRODUCTION PROGRAM

For subtle implementation of the Duties, the Board of Directors shall be provided with orientation and knowledge development programs. The orientation program is essential to be conducted due to the Board of Directors members may be appointed from various backgrounds. Therefore, this Orientation Program becomes mandatory to make a solid teamwork.

The orientation program provided for members of the Board of Directors contains several aspects as follows:

1. Explanation about duty and responsibility of the Board of Commissioners and the Directors based on the legal standpoints.
2. Implementation of Good Corporate Governance principles by the Company.
3. Explanation about the Company relating to the purpose, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plan, competitive position, risk and other strategic issues.
4. Explanation about the delegated authority, Internal and External Audit, System and Policy for Internal Control and Audit Committee

In 2020, this Directors orientation program was given to Ony Suprihartoro and Masrul Khalimi as Director of Finance and Director of Freight & Tol Laut Transport.

DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan organ perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris & Direksi PT PELNI (Persero) Nomor: 12.29/05/SK/HKO.01/2016 tentang Tata Laksana Kerja (*Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Tata laksana kerja tersebut berisi panduan bagi Dewan Komisaris yang berisikan, antara lain:

1. Kriteria Anggota Direksi dan Masa Jabatan Direksi;
2. Tanggung Jawab Direksi;
3. Tugas dan Kewajiban Direksi;
4. Wewenang Direksi;
5. Hak-Hak Direksi;
6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
7. Etika Jabatan;
8. Penetapan Kebijakan Pengurusan;
9. Komposisi dan Pembidangan Tugas;
10. Rapat Direksi;
11. Organ Pendukung Direksi.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

In relation with other corporate structures related with duty and responsibility implementation, the Board of Commissioners has Working Guideline (Board Manual) for the Board of Commissioners as working guideline for the Board of Commissioners that is ratified under PT PELNI (Persero) Board of Commissioners and Directors' Joint Decree No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 regarding PT PELNI (Persero) Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors that has substances as follows:

1. The Board of Directors Criteria and Tenure;
2. Board of Directors' Responsibility;
3. Board of Directors' Duties and Obligations;
4. Board of Directors' Authorities;
5. Board of Directors' Rights;
6. Orientation Program and Capacity Building;
7. Position Ethics;
8. Stipulation of Company's Management Policy;
9. Composition and Distribution of Duties;
10. Board of Directors Meeting;
11. Board of Directors' Supporting Organs.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Hingga 31 Desember 2020, Direksi Perseroan belum membentuk komite-komite di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai Organ Pendukung Direksi.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

As of 31 December 2020, the Board of Directors had not established a Committee under the Board of Directors yet. Implementation of the Board of Directors' duties is assisted with a Corporate Secretary and Internal Audit Unit as Board of Directors' Supporting Structure.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM

AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN BOD, BOC AND SHAREHOLDERS

Antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda.

Between members of the Board of Commissioners and the Directors and the Majority Shareholders and/or controlling Shareholder do not have any blood relation up to the third degree, either on a straight or a lateral line or in law relationship.

Hubungan keluarga dan keuangan antara Anggota Dewan Komisaris dengan sesama Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perusahaan periode tahun 2020 digambarkan dalam tabel berikut:

Family and financial relation between the Board of Commissioners with Board of Directors and/or Board of Commissioners and Shareholders in 2020 are explained in the table below:

TABEL HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM
Table of Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders Affiliation

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation With						Financial Relationship with Financial Relation with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris Board of Commissioners												
Ali Masykur Musa		√		√		√		√		√		√
Kristia Budiyarto		√		√		√		√		√		√
Haryo indratno		√		√		√		√		√		√
Wahju Adji Herpriarsono		√		√		√		√		√		√
Iwan Taufiq Purwanto		√		√		√		√		√		√
Eddy Susanto Soepadmo		√		√		√		√		√		√
Direksi Board of Directors												
Insan Purwarisya L. Tobing		√		√		√		√		√		√
Olih Masolich Sodikin		√		√		√		√		√		√
Robert MP Sinaga		√		√		√		√		√		√
Ony Suprihartono		√		√		√		√		√		√
Ganefi		√		√		√		√		√		√
Yahya Kuncoro		√		√		√		√		√		√

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

Diantara anggota Dewan Komisaris dan keluaga, maupun anggota Direksi dan keluarga, masing-masing tidak memiliki saham Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Commissioners and their family, Board of Directors and their family do not have any shares with detail below:

No	Nama Name	Kepemilikan Saham di Shares Ownership at		
		Anak Perusahaan Subsidiaries	Perusahaan Lain Other Companies	Institusi Lain Other Institutions
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
1	Ali Masykur Musa	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
2	Kristia Budiyarto	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
3	Haryo indratno	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
4	Wahju Adji Herpriarsono	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
5	Iwan Taufiq Purwanto	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
6	Eddy Susanto Soepadmo	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

No	Nama Name	Kepemilikan Saham di Shares Ownership at		
		Anak Perusahaan Subsidiaries	Perusahaan Lain Other Companies	Institusi Lain Other Institutions
Direksi Board of Directors				
1	Insan Purwarisya L. Tobing	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
2	Olih Masolich Sodikin	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
3	Robert MP Sinaga	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
4	Ony Suprihartono	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
5	Ganefi	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
6	Yahya Kuncoro	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Penjelasan rangkap jabatan di perusahaan atau instansi lain dijabarkan dalam tabel berikut:

Concurrent Position in the Company or other Institution explained in the table below:

No	Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Position	
		Anak Perusahaan Subsidiaries	Perusahaan/Institusi Lain Other Companies/Institutions
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1	Ali Masykur Musa	Tidak ada None	Tidak ada None
2	Kristia Budiyarto	Tidak ada None	Tidak ada None
3	Haryo indratno	Tidak ada None	Tidak ada None
4	Wahju Adji Herpriarsono	Tidak ada None	Tidak ada None
5	Iwan Taufiq Purwanto	Tidak ada None	Tidak ada None
6	Eddy Susanto Soepadmo	Tidak ada None	Tidak ada None

No	Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Position	
		Anak Perusahaan Subsidiaries	Perusahaan/Institusi Lain Other Companies/Institutions
Direksi Board of Directors			
1	Insan Purwarisya L. Tobing	Tidak ada None	Tidak ada None
2	Olih Masolich Sodikin	Tidak ada None	Tidak ada None
3	Robert MP Sinaga	Tidak ada None	Tidak ada None
4	Ony Suprihartono	Tidak ada None	Tidak ada None
5	Ganefi	Tidak ada None	Tidak ada None
6	Yahya Kuncoro	Tidak ada None	Tidak ada None

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

COMPOSITION DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

PT PELNI (Persero) meyakini bahwa keragaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengurusan Perusahaan oleh Direksi dengan tidak mengenal perbedaan gender. Dewan Komisaris dan Direksi PT PELNI (Persero) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan usulan Pemegang Saham memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi perseroan untuk Periode 2020:

PT PELNI (Persero) believes that the diversity of expertise, experiences, and educational background are indispensable for the supervisory effectiveness of the Board of Commissioners and management of the Company by the Board of Directors without gender contention. The Board of Commissioners and Directors of PT PELNI (Persero) are appointed by the resolution of General Meeting of Shareholders through the proposal from the Shareholders that has a fairly diverse composition, based on their age, educational background, expertise and experience requirements for the performance of their duties and responsibilities. The following is composition diversity of the Boards of Commissioners and Directors of the Company for the period of 2020:

Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Akademik dan Keahlian Academic and Expertise Qualification	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Ali Masykur Musa	Komisaris Utama President Commissioner	Hukum Laws	58	Pria Male
Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ilmu Komunikasi Communication Science	42	Pria Male
Haryo indratno	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ekonomi Manajemen Management Economics	51	Pria Male
Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	Ekonomi dan Manajemen Bisnis Economics and Business Management	54	Pria Male
Iwan Taufiq Purwanto	Komisaris Commissioner	*Business Administration* Business Administration	52	Pria Male
Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Ekonomi Economics	61	Pria Male
Direksi Board of Directors				
Insan Purwarisya L. Tobing	Direktur Utama President Director	Hubungan Internasional International Relations	53	Pria Male
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Ilmu Pelayaran Shipping	61	Pria Male
Robert MP Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Manajemen Logistik & Teknik Transportasi Logistic Management & Transportation Engineering	53	Pria Male
Ony Suprihartono	Direktur Keuangan Director of Finance	Manajemen Management	51	Pria Male
Ganefi	Direktur SDM dan Umum Director of HC and General Affairs	Perbankan dan Keuangan Banking and Finance	57	Wanita Female
Yahya Kuncoro	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll	*Transportation Management* Transportation Management	44	Pria Male

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

COMPOSITION DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan belum memiliki kebijakan spesifik yang mengatur mengenai keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, dalam kebijakan *Board Manual* PT PELNI (Persero) telah mengatur kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang secara umum kebijakan tersebut mendorong terpilihnya orang-orang dari latar belakang yang beragam sebagai kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

By the end of 2020, the Company has not formulated specific policy regulating the composition diversity in the Board of Commissioners and Directors. However, Board Manual Policy of PT PELNI (Persero) stipulated criteria for every member of Board of Commissioners and Board of Directors, which generally this policy encouraged the selection of candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors coming from various backgrounds.



FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Demi terciptanya efektifitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan, maka selama 2020 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 26 kali (13 kali Rapat Internal dan 13 kali rapat gabungan) Rapat Dewan Komisaris. Adapun tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

THE BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

For the effective and efficient management of the Company, the Board of Commissioners held 26 meetings (13 Internal Meetings and 13 Joint Meetings) during 2020. Thus, the attendance levels of the Board of Commissioners are as follows:

FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020
Attendance and Frequency of the Board of Commissioners Meetings in 2020

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Total Board of Commissioners Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Ali Masykur Musa	Komisaris Utama President Commissioner	13	13	100%
Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	13	8	65%
Haryo indratno	Komisaris Commissioner	13	13	100%
Iwan Taufiq Purwanto*	Komisaris Commissioner	2	2	100%
Kristia Budiyarto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	2	100%
Eddy Susanto Soepadmo**	Komisaris Commissioner	11	11	100%

* Menjabat sejak 6 November 2020
Served since 6 November 2020

** Menjabat sejak 19 Maret 2020
Served since 19 March 2020

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS 2020
BOC Meeting Agenda in 2020

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Dewan Komisaris 2020 Board of Commissioners Meeting Agenda 2020
1	27 Januari 2020 27 January 2020	1. Persiapan RUPS RKAP Tahun 2020; Preparation for GMS RKAP in 2020;
		2. Pembahasan Laporan Keuangan *unaudited* PT PELNI (Persero) Tahun 2019; dan Discussion on unaudited Financial Report PT PELNI (Persero) 2019; and
		3. Lain-lain. Others.
2	26 Februari 2020 26 February 2020	1. Pembahasan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) Bulan Januari Tahun 2020; Discussion on Financial Report in January 2020 of PT PELNI (Persero);
		2. Pembahasan Laporan Komite Pemantau Manajemen Risiko; dan Discussion on Report from the Risk Management Monitoring Committee; and
		3. Lain-lain. Others.
3	24 Maret 2020 24 March 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result;
		2. Pembahasan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) Bulan Februari Tahun 2020; Discussion on Financial Report in February 2020 of PT PELNI (Persero);
		3. Lain-lain. Others.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Dewan Komisaris 2020 Board of Commissioners Meeting Agenda 2020
4	30 April 2020 30 April 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result; 2. Pembahasan Laporan Keuangan Audited PT PELNI (Persero) Tahun 2020; Discussion on audited Financial Report PT PELNI (Persero) 2020; 3. Pembahasan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) bulan Maret Tahun 2020; Discussion on Financial Report in March 2020 of PT PELNI (Persero); 4. Penyampaian Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi; Submission of Nomination and Remuneration Committee report; 5. Lain-lain. Others.
5	27 Mei 2020 27 May 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result; 2. Pembahasan Laporan Keuangan Audited PT PELNI (Tahun 2019); Discussion on Audited Financial Report PT PELNI (2019); 3. Pembahasan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) bulan April Tahun 2020; Discussion on Financial Report in April 2020 of PT PELNI (Persero);
6	8 Juni 2020 8 June 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d April Tahun 2020; Discussion on Management Report until April 2020; 3. Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2020; Discussion on RKAP Revision 2020; 4. Lain-lain. Others.
7	24 Juni 2020 24 June 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Mei Tahun 2020; Discussion on Management Report until May 2020; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; The Board of Commissioners' Committee Report; 4. Lain-lain. Others.
8	22 Juli 2020 22 July 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result; 2. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I Tahun 2020; Discussion on I Semester of 2020 Management Report; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; The Board of Commissioners' Committee Report; 4. Lain-lain. Others.
9	26 Agustus 2020 26 August 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Juli Tahun 2020; Discussion on Management Report until July 2020; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; The Board of Commissioners' Committee Report; 4. Lain-lain. Others.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Dewan Komisaris 2020 Board of Commissioners Meeting Agenda 2020
10	30 September 2020 30 September 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result;
		2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Agustus Tahun 2020; Discussion on Management Report until August 2020;
		3. Laporan Komite Dewan Komisaris; The Board of Commissioners' Committee Report;
		4. Lain-lain. Others.
11	27 Oktober 2020 27 October 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result;
		2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d September Tahun 2020; Discussion on Management Report until September 2020;
		3. Laporan Komite Dewan Komisaris; The Board of Commissioners' Committee Report;
		4. Evaluasi dan Progress Pemenuhan KPI Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2020; Evaluation and Progress of KPI Fulfillment of Board of Commissioners Quarter III 2020;
		5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Sebagai Dasar Penyusunan RKA Dewan Komisaris; Work Plan and Budget (RKA) Committee as the Basis for the Preparation of Council Commissioner's Work Plan;
		6. Lain-lain. Others.
12	25 November 2020 25 November 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result;
		2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Oktober Tahun 2020; Discussion on Management Report until October 2020;
		3. Laporan Komite Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Committee Report; a. Hasil Telaah Komite Audit terkait Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya Results of audit committee review related to procurement policy and the implementation b. Hasil Telaah Komite Pemantau Manajemen Risiko terkait Results of the Related Risk Management Monitoring Committee 1) Perkembangan Manajemen Risiko Perusahaan; Development of The Company's Risk Management; 2) Izin Pemanfaatan Kapal Hasil PMN Saat Tidak Digunakan Untuk Penugasan Tol Laut Permit for Utilization of PMN-Produced Ships When not used for Sea Toll Assignment 3) Kebijakan Mutu dan Pelayanan Quality and Service Policy
		4. Lain-lain. Others.
13	29 Desember 2020 29 Desember 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on previous meeting's result;
		2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d November Tahun 2020; Discussion on Management Report until November 2020;
		3. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan The Board of Commissioners' Committee Report; and
		4. Lain-lain. Others.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

RAPAT DIREKSI

Direksi dapat menyelenggarakan rapat untuk mengambil keputusan penting terkait kegiatan operasional dan bisnis Perseroan. Keputusan Direksi harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka keputusan rapat akan diputuskan oleh Direktur Utama.

Selama tahun 2020, Rapat Direksi secara internal telah terselenggara sebanyak 40 kali.

Berikut adalah frekuensi kehadiran rapat Direksi yang terselenggara selama tahun 2020, antara lain :

THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

The Board of Directors may organize meetings to make essential decisions related to the Company's operational and business activities. The Board of Directors' decisions shall be taken based on collective consensus. If the consensus is not achieved, the decision will be taken through a voting mechanism and if agree and disagree votes are still equal, then will be decided by the President Director.

Throughout 2020, the Board of Directors Internal Meetings were 40 meetings.

The following is a List of attendance and frequency of the Board of Directors meetings in 2020 as follows:

FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DIREKSI 2020
Attendance Frequency of the Board of Directors Meetings in 2020

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Direksi Total Board of Directors Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Insan Purwarisya L. Tobing	Direktur Utama President Director	40	35	87,5%
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Business Transportation	40	36	90%
Muhammad Tukul Harsono	Direktur Armada Director of Fleet	40	37	92,5%
Ony Suprihartono	Direktur Keuangan Director of Finance	40	38	95%
Ganefi	Direktur SDM & Umum Director of HC & General Affairs	40	35	87,5%
Masrul Khalimi	Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Director of Freight & Tol Laut	40	36	90%

* Menjabat sampai dengan 12 Januari 2021 berdasarkan SK Kementerian BUMN No.SK-12/MBU/01/2021.
Served until 12 January 2021 based on the Decree of Ministry of SOE No.SK-12/MBU/01/2021.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

Agenda Rapat Direksi 2020

Dalam pelaksanaannya, rapat Direksi memiliki agenda untuk mengatur topik bahasan rapat yang akan dibahas.

Berikut ini adalah rapat Direksi tahun 2020:

The Board of Directors Meetings Agenda 2020

In its implementation, the Board of Directors meeting has some agenda of the material topics that will be discussed.

The following is the Board of Directors Meeting 2020:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2020 Board of Directors Meeting Agenda 2020
1	2 Januari 2020 2 January 2020	Pembahasan RKAP 2020 terkait kontrak Penugasan PSO dan Subsidi Discussion of RKAP 2020 related to PSO Assignment Contracts and Subsidy
2	13 Januari 2020 13 January 2020	1. Mobil Operasional Direksi Operational Car of BOD 2. Pembahasan Pelepasan Saham PT Rumah Sakit PELNI Discussion of Share Release of PT Hospital PELNI 3. Pembahasan penggunaan Sisa Dana PMN 2015 Discussion of the use of Remaining PMN Funds 2015 4. Bahan *Town Hall Meeting* Material of Town Hall Meeting
3	22 Januari 2020 22 January 2020	1. Kunjungan Menteri Perhubungan Ke Surabaya Visit of the Minister of Transportation to Surabaya 2. *Progress Holding* PT RS PELNI Progress Holding PT RS PELNI 3. Pemanfaatan sisa dana PMN Utilization of remaining PMN funds 4. Lomba nama dan logo *New* BL Competition of New BL name and logo
4	25 Februari 2020 25 February 2020	1. Pengisian dan pergantian Dekom dan Dewan Pengawas Filling and changing of BOC and the Board of Supervisors 2. Laporan Manajemen Bulan Januari 2020 Management Report January 2020 3. Tindak Lanjut Sisa Dana PMN Follow Up remaining PMN Funds 4. Digital *Transformation* Digital Transformation
5	3 Maret 2020 3 March 2020	1. *Cost Structure* kapal penumpang dan kapal barang Cost Structure of passenger and cargo ships 2. Mitigasi Risiko Issue Covid19 Risk Mitigation of Covid-19 Issue 3. Pengelolaan YKPP Management of YKPP
6	9 Maret 2020 9 March 2020	Reviu kajian Optimalisasi penggunaan Sisa Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) PT PELNI (Persero) TA 2015 Review the study of Optimization of the use of The Remaining State Capital Participation Fund (PMN) of PT PELNI (Persero) FY 2015
7	1 April 2020 1 April 2020 (virtual)	1. Skenario Pemulangan WNI Malaysia Ke Indonesia Scenario of Repatriation of Indonesian Citizens from Malaysia to Indonesia 2. Audit BPK RI atas PSO 2019 BPK RI audit of PSO 2019 3. Proses pengadaan kontainer oleh PT BCI Container procurement process by PT BCI

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2020 Board of Directors Meeting Agenda 2020
8	21 April 2020 21 April 2020 (virtual)	1. Persiapan Materi Progress Tol Laut oleh Litbang KPK Preparation of Sea Toll Material Progress by KPK R&D 2. Laporan keuangan s/d TW I 2020 Financial statements up to 1st Quarter 2020 3. Klasifikasi Talenta PELNI dan Rencana Penyesuaian Organisasi PELNI Talent Classification and Organizational Adjustment Plan 4. Finalisasi *Job Grade BoD-1* Finalization of Job Grade BoD-1
9	5 Mei 2020 5 May 2020 (virtual)	1. Pembahasan Hasil *Survey Risk Maturity Level* Discussion of Risk Maturity Level Survey Results 2. Progres Laporan Keuangan Audited 2019 Progress of Audited Financial Statements 2019 3. Progres Angkutan Barang Logistik dengan Kapal Penumpang Progress of Logistics Freight Transportation with Passenger Ships 4. Progres Pelepasan Aset KM CJN III -4 Progress of Asset Release KM CJN III -4
10	14 Mei 2020 14 May 2020 (virtual)	Optimalisasi Sisa Dana PMN Optimization of Remaining PMN Funds
11	2 Juni 2020 2 June 2020 (virtual)	1. Progres *Road Map* Angkutan Barang Road Map Progress of Freight Transport 2. Progres Revisi RKAP 2020 RKAP Revision Progress 2020
12	9 Juni 2020 9 June 2020 (virtual)	1. Progres *New Normal Life* Kapal Progress of Ship's New Normal Life 2. Revisi RKAP Tahun 2020 RKAP Revision 2020 3. Progres Digitalisasi *New Normal Life* Digitalization Progress of New Normal Life
13	11 Juni 2020 11 June 2020 (virtual)	Revisi RKAP 2020 RKAP Revision 2020
14	16 Juni 2020 16 June 2020 (virtual)	1. Progres *New Normal Life* Progress of New Normal Life 2. Persiapan RUPS Laporan Tahunan Tahun 2019 Preparation of GMS Financial Year 2019 3. Laporan Manajemen Sd Bulan Mei 2020 Management Report up to May 2020 4. Lain-lain others
15	17 Juni 2020 17 June 2020 (virtual)	Kinerja Perusahaan dan Persiapan RUPS Audit Tahun 2019 Company Performance and Preparation of GMS audit 2019
16	18 Juni 2020 18 June 2020 (virtual)	Sosialisasi Desain Penilaian Kinerja Individu dengan *Fed Insight* Socialization of Individual Performance Assessment Design with Fed Insight
17	22 Juni 2020 22 June 2020 (virtual)	1. Persiapan ragab dengan Komisaris (Lapkeu sd Mei 2020 dan Digitalisasi TI) Preparation of joint-meeting with Commissioner (Financial Report up to May 2020 and IT Digitalization) 2. Persiapan *Breakfast Meeting* dengan Kemenhub Preparation for Breakfast Meeting with Ministry of Transportation
18	10 Juli 2020 10 July 2020 (virtual)	Finalisasi Revisi RKAP Tahun 2020 Finalization of RKAP Revision in 2020

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2020 Board of Directors Meeting Agenda 2020
19	14 Juli 2020 14 July 2020 (virtual)	Finalisasi RKAP Tahun 2020 Finalization of RKAP 2020
20	21 Juli 2020 21 July 2020 (virtual)	1. Laporan Manajemen Smt I 2020 Management Report 1st Quarter 2020 2. Finalisasi Revisi RKAP TA 2020 Finalization of RKAP Revision 2020
21	28 Juli 2020 28 July 2020 (virtual)	1. Progres Aplikasi Penjualan (*e-ticketing, New BL*, Keagenan), admin kapal dan audit IT Sales Application Progress (e-ticketing, New BL, Agency), ship admin and IT audit 2. Progres kerjasama dengan Pemda Subang Progress in cooperation with Subang local government
22	7 Agustus 2020 7 August 2020 (virtual)	1. Penanganan Covid-19 di PT PELNI (Persero) Handling Covid-19 at PT PELNI (Persero) 2. Rencana Strategis Dasar RKAP TA 2021 Basic Strategic Plan of RKAP 2021
23	11 Agustus 2020 11 August 2020	Lanjutan Renstra Dasar RKAP Tahun 2021 Continuation of RKAP Policy Plan for 2021
24	19 Agustus 2020 19 August 2020	Finalisasi Paparan Revisi RKAP TA 2020 Finalization of RKAP Revision Exposure FY 2020
25	26 Agustus 2020 26 August 2020 (Video Conference)	Persetujuan Penggunaan Sisa Dana PMN TA 2015 Approval of the use of remaining PMN Funds FY 2015
26	3 September 2020 3 September 2020 (Video Conference)	Hasil Temuan Audit SPI Results of SPI Audit Findings
27	21 September 2020 21 September 2020 (Video Conference)	Revisi RKAP TA 2020 Revision of RKAP FY 2020
28	24 September 2020 24 September 2020 (Video Conference)	1. Lap Manajemen sd Agustus 2020 Management Report up to August 2020 2. Revisi RKAP TA 2020 RKAP Revision FY 2020 3. RJPP TA 2020-2024 RJPP FY 2020-2024
29	13 Oktober 2020 13 Oktober 2020 (Video Conference)	RJPP PT PELNI (Persero) 2020-2024 RJPP PT PELNI (Persero) 2020-2024
30	18 Oktober 2020 18 Oktober 2020 (Video Conference)	Pembahasan terkait BNI Sekuritas Discussions related to BNI Sekuritas
31	22 Oktober 2020 22 Oktober 2020 (Video Conference)	1. Pembahasan Lapkeu s.d September 2020 Discussion of Financial Report until September 2020 2. Pembahasan RKAP 2021 Discussion of RKAP 2021
32	26 Oktober 2020 26 Oktober 2020 (Video Conference)	Proses bisnis PT PELNI (Persero) Business Process PT PELNI (Persero)
33	17 November 2020 17 November 2020	1. Realisasi sd Oktober 2020 dan Rencana Proker Pencapaian Prognosa Th 2020 Realization until October 2020 and Work Program Plan for Prognosis Achievement 2020 2. Sosialisasi aspirasi pemegang saham Th 2021 Socialization of shareholder aspirations 2021

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2020 Board of Directors Meeting Agenda 2020
34	24 November 2020 24 November 2020	1. Laporan Manajemen sd Oktober 2020 Management Report until October 2020 2. Persiapan Nataru 2020 Preparation for Nataru (Christmas and New Year) 2020 3. *Car Owner Program* Car Owner Program 4. Lain-lain Others
35	26 November 2020 26 November 2020 (Video Conference)	Strategi pencapaian Penugasan PSO Dan Subsidi sesuai Kontrak dan Target s.d Desember 2020 Strategy of PSO Assignment Achievement and Subsidy in accordance with Contract and Target until December 2020
36	26 November 2020 26 November 2020 (Video Conference)	Strategi rencana *Write off* Kapal Caraka Plan strategy to Write off MS Caraka
37	1 Desember 2020 1 Desember 2020 (Video Conference)	1. Pembahasan Evaluasi Lognus 5 Discussion of Lognus 5 Evaluation 2. Progress penggunaan dan penghapusbukuan kapal Caraka Progress of the use and removal of MS Caraka 3. Paparan pergerakan Penumpang dan Barang (OD) per ruas, per kapal, per voyage Exposure to passenger and freight movements (OD) per segment, per ship, per voyage 4. Progres pemanfaatan dana PMN Progress in the utilization of PMN funds 5. Lain-lain Others
38	8 Desember 2020 8 Desember 2020 (Video Conference)	1. Pembahasan RKAP 2021 dan KPI 2021 Discussion of RKAP 2021 and KPI 2021 2. Pembahasan Prognosa Kinerja 2020 dan KPI 2020 Discussion of Performance Prognosis 2020 and KPI 2020
39	14 Desember 2020 14 Desember 2020 (Video Conference)	Usulan RKAP TA 2021 PT PELNI (Persero) Proposal of RKAP FY 2021 PT PELNI (Persero)
40	30 Desember 2020 30 Desember 2020 (Video Conference)	Laporan Manajemen s.d November 2020 Management Report until November 2020

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sebagai Realisasi dari hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Selama tahun 2020. Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 13 Rapat Gabungan. Adapun agenda dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

To orchestrate a work relationship realization between the Board of Commissioners and Directors. Throughout 2020, the Board of Commissioners and Directors held 13 Joint meetings. The agenda and attendance level of the Board of Commissioners and Directors in Joint meeting described in the following table below:

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 2020
Attendance and Frequency of Board of Commissioners and Directors Joint Meeting 2020

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Ali Masykur Musa	Komisaris Utama President Commissioner	13 kali 13 times	13 kali 13 times	100%
Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	13 kali 13 times	9 kali 9 times	69%
Haryo indratno	Komisaris Commissioner	13 kali 13 times	12 kali 12 times	92%
Iwan Taufiq Purwanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	2 kali 2 times	2 kali 2 times	100%
Kristia Budiyarto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	2 kali 2 times	2 kali 2 times	100%
Eddy Susanto Soepadmo**	Komisaris Commissioner	11 kali 11 times	11 kali 11 times	100%
Direksi Board of Directors				
Insan Purwarisya L. Tobing	Direktur Utama President Director	13 kali 13 times	13 kali 13 times	100%
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Business Transportation	13 kali 13 times	13 kali 13 times	100%
Muhammad Tukul Harsono	Direktur Armada Director of Fleet	13 kali 13 times	13 kali 13 times	100%
Ony Suprihartono	Direktur Keuangan Director of Finance	13 kali 13 times	13 kali 13 times	100%
Ganefi	Direktur SDM & Umum Director of HC & General Affairs	13 kali 13 times	13 kali 13 times	100%
Masrul Khalimi	Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Director of Freight & Tol Laut	13 kali 13 times	13 kali 13 times	100%

* Menjabat sejak 6 November 2020
Served since 6 November 2020

** Menjabat sejak 19 Maret 2020
Served since 19 March 2020

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2020

Dalam pelaksanaannya, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi memiliki agenda untuk mengatur topik bahasan rapat yang akan didiskusikan. Berikut adalah agenda Rapat Gabungan yang dilaksanakan pada 2020:

The Board Commissioners and Directors Joint Meeting Agenda 2020

In its implementation, Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors has some agenda to organize the discussion topics. There are the joint meeting agenda in 2020 as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	27 Januari 2020 27 January 2020	1. Persiapan RUPS RKAP Tahun 2020; Preparation for GMS RKAP in 2020;
		2. Pembahasan Laporan Keuangan unaudited PT PELNI (Persero) Tahun 2019; Discussion of unaudited Financial Statements of PT PELNI (Persero) 2019;
		3. Presentasi Direksi mengenai Roadmap dan Action Plan Manajemen Pengelolaan PSO dan Subsidi serta Angkutan Barang; Presentation of the Board of Directors on Roadmap and Action Plan of PSO Management and Subsidies and Freight Transport;
		4. Laporan Perkembangan Digitalisasi Teknologi Informasi; Report on the Development of IT Digitalization;
		5. Tindak Lanjut Rencana Penggunaan Sisa Dana PMN Tahun 2015. Follow Up on the Use Plan of 2015 PMN Remaining Fund.
2	26 Februari 2020 26 February 2020	1. Pembahasan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) Bulan Januari Tahun 2020; Discussion on Financial Report in January 2020 of PT PELNI (Persero);
		2. Tindak Lanjut Rencana Penggunaan Sisa Dana PMN Tahun 2015; dan Follow-up to the Use Plan of 2015 PMN Fund; and
		3. Perkembangan Digitalisasi Teknologi Informasi. Development of IT Digitalization;
3	24 Maret 2020 24 March 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings;
		2. Pembahasan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) Bulan Februari Tahun 2020; Discussion on Financial Report in February 2020 of PT PELNI (Persero);
		3. Presentasi Direksi mengenai Kebijakan Perusahaan terkait Pencegahan Covid 19, baik di Internal Perusahaan maupun Titik-Titik Pelayanan. Presentation of the Board of Directors on Company Policy related to Covid 19 Prevention, both in the Company's Internal and Service Points.
4	30 April 2020 30 April 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings;
		2. Pembahasan Laporan Keuangan *Audited* PT PELNI (Persero) Tahun 2020; Discussion of Audited Financial Statements of PT PELNI (Persero) 2020;
		3. Pembahasan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) bulan Maret Tahun 2020; Discussion on Financial Report in March 2020 of PT PELNI (Persero);
		4. Progress Penanganan Covid-19 di lingkungan Perusahaan; Progress of Handling Covid-19 in the Company's environment;
		5. Lain-lain. Others.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
5	27 Mei 2020 27 May 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings; 2. Pembahasan Laporan Keuangan *Audited* PT PELNI (Persero) Tahun 2019; Discussion of Audited Financial Statements of PT PELNI (Persero) Year 2019; 3. Pembahasan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) bulan April Tahun 2020; Discussion on Financial Report in April 2020 of PT PELNI (Persero); 4. Lain-lain. Others.
6	8 Juni 2020 8 June 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d April Tahun 2020; Discussion on Management Report until April 2020; 3. Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2020; Discussion of RKAP 2020 Revision; 4. Pemaparan *Roadmap* Angkutan Barang oleh Direksi; Exposure of Freight Roadmap by the Board of Directors; 5. Lain-lain. Others.
7	24 Juni 2020 24 June 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Mei Tahun 2020; Discussion on Management Report until May 2020; 3. Pemaparan *Roadmap* Teknologi Informasi dan Digitalisasi New Normal oleh Direksi; Presentation of Information Technology Roadmap and Digitalization of New Normal by the Board of Directors; 4. Lain-lain. Others.
8	22 Juli 2020 22 July 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings; 2. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I Tahun 2020; Discussion of Management Report Semester I 2020; 3. Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2020; Discussion of RKAP 2020 Revision; 4. Pembahasan Kebijakan Manajemen Risiko; Discussion of Risk Management Policy; 5. Lain-lain. Others.
9	26 Agustus 2020 26 August 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings; 2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Juli Tahun 2020; Discussion on Management Report until July 2020; 3. Pembahasan Persiapan Paparan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Wakil Menteri BUMN II Discussion of Preparation for Exposure of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Deputy Minister BUMN II 4. Lain-lain. Others.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
10	30 September 2020 30 September 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings;
		2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Agustus Tahun 2020; Discussion on Management Report until August 2020;
		3. Pemaparan Revisi RKAP PT PELNI (Persero) Tahun 2020 Pasca Pembahasan dengan Kementerian BUMN; Presentation of RKAP Revision of PT PELNI (Persero) in 2020 After Discussion with Ministry of BUMN;
		4. Pembahasan RJPP PT PELNI (Persero) Tahun 2020-2024; Discussion of RJPP PT PELNI (Persero) Year 2020-2024;
		5. Lain-lain. Others.
11	27 Oktober 2020 27 October 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings;
		2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d September Tahun 2020; Discussion on Management Report until September 2020;
		3. Pembahasan RKAP Tahun 2021 PT PELNI (Persero); Discussion of RKAP 2021 PT PELNI (Persero);
		4. Progress Roadmap Angkutan Barang untuk Penguatan Logistik; Progress of Cargo Roadmap for Logistics Strengthening;
		5. Lain-lain. Others.
12	25 November 2020 25 November 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings;
		2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d Oktober Tahun 2020; Discussion on Management Report until October 2020;
		3. Rencana Pemanfaatan Kapal Hasil PMN Saat Tidak Digunakan Untuk Penugasan Tol Laut; Plan on PMN Ship Utilization when not in use for Sea Toll Assignment;
		4. Persiapan Libur Natal dan Tahun Baru Tahun 2020; Preparation for Christmas and New Year Holidays in 2020;
		5. Lain-lain. Others.
13	30 Desember 2020 30 Desember 2020	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluation on the results of previous meetings;
		2. Pembahasan Laporan Manajemen s.d November Tahun 2020; dan Discussion on Management Report until November 2020;
		3. Lain-lain. Others.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

Mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi di Perseroan mengacu pada surat Kementerian BUMN Nomor SK S-676/ BUMN/ MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen. Berdasarkan ketentuan tersebut, landasan penilaian kinerja Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan dalam *Key Performance Indicators (KPI)* Manajemen dan menjadi suatu Kontrak Manajemen antara Pemegang saham dengan Direksi Perseroan. Target-target yang telah disepakati bersama tertuang dalam Kontrak Manajemen berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) mencakup aspek finansial, operasional termasuk pelanggan dan aspek dinamis. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

MEKANISME PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penerapan *Key Performance Indicators* (KPI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada saat melakukan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk Badan Usaha Milik Negara.
2. Kuasa Pemegang Saham bersama Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempersiapkan *Key Performance Indicators (KPI)* yang akan dituangkan dalam Kontrak Manajemen antara pihak Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan Pihak Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas PT PELNI (Persero).
3. *Key Performance Indicators (KPI)* yang dipilih haruslah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mencerminkan kegiatan yang dominan pada perusahaan yang sekurang-kurangnya mencakup Aspek Operasional/Teknis dan Aspek Finansial.
4. Kontrak Manajemen dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada saat Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

The assessment mechanism for Board of Commissioners and the Directors performances refers to Ministry of SOEs' Letter No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract. According to this regulation, the basis for the performance assessment of the Board of Commissioners and Directors is explained in the Key Performance Indicators (KPI) of management and formulated into Management Contract between Shareholders and Directors. The agreed targets are disclosed in the Management Contract and based on the Key Performance Indicators (KPI), including financial, operational, customer and dynamic aspects. This performance assessment of the Board of Commissioners and Directors is undertaken in General Meeting of Shareholders (GMS).

ASSESSMENT MECHANISM OF BOC PERFORMANCE

The performance appraisal of the Board of Commissioners is carried through the following mechanism:

1. Implementation of Key Performance Indicators (KPI) in the General Meetings of Shareholders to approve the Company's Budget Plan (RKAP) of the State-Owned Enterprise.
2. Altogether with the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board, and the Shareholders Attorney prepare Key Performance Indicators (KPI) that will be disclosed into Management Contract between the Shareholders/ Capital Owner with the Board of Diretors and Board of Commissioners/ Supervisory Board of PT PELNI (Persero).
3. The selected Key performance Indicators (KPI) shall be adjusted with characteristic of each State-Owned Enterprise (SOE) and reflected dominant activity in the Company at least covering operational/technical aspect and financial aspect.
4. The concerned Management Contract is an integrated part of General Meetings of Shareholders (GMS)' Minutes of Meeting on Budget Plan (RKAP) ratification.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Pada tahun 2020, diperoleh hasil penilaian Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan KPI sebagai berikut:

ASSESSMENT RESULT OF BOC PERFORMANCE IN 2020

In 2020, has obtained the Assessment Result of the Board of Commissioners performance based on KPI as follows:

Perspektif Perspective		Key Performance Indicator Key Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Output Output		Keterangan Description
					Target 2020 Target 2020	Realisasi 2020 Realisasi 2020	
RUPS GMS	1	Ketepatan Waktu Penyampaian Tanggapan atas RKAP PT PELNI (Persero) Tahun 2021 dan Tanggapan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) Tahun 2019 In time response submission for RKAP for Fiscal Year 2021 and the 2019 Financial Audited Report of PT PELNI (Persero)	Persentase Percentage	5,0%	Penyampaian Tanggapan 14 hari kerja sejak diterima RKAP 2021 dan Laporan Keuangan 2019 Submission of Responses in 14 working days since the 2019 RKAP and financial report have been received	5,00%	1. Buku RKAP 2021 disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui surat Direksi Nomor: 10.26/03/S-B/050/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2021 disampaikan melalui surat Nomor: 108/DK/X-2020 tanggal 27 Oktober 2020 The 2021 RKAP was submitted to the Board of Commissioners through the Board of Directors' Letter Number: 10.26/03/S-B/050/2020 on 26 October 2020 and the Board of Commissioners' response to the 2021 RKAP was submitted through the Letter Number: 108/DK/X-2020 on 27 October 2020 2. Laporan Manajemen Audited disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui surat Direksi Nomor: 05.18/01/S-B/090/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Audited 2019 disampaikan melalui surat Nomor: 49/DK/VI-2020 tanggal 2 Juni 2020 The Audited Management Report was submitted to the Board of Commissioners through the Board of Directors' Letter Number: 05.18/01/SB/090/2020 on 18 May 2020 and the Board of Commissioners' Response to the 2019 Audited Management Report was submitted through the Letter Number: 49/DK/VI-2020 on 2 June 2020.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

Perspektif Perspective		Key Performance Indicator Key Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Output Output		Keterangan Description
					Target 2020 Target 2020	Realisasi 2020 Realisasi 2020	
Pengawasan Pengelolaan Perseroan Supervising the Management of the Company	2	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direksi dalam Mengelola Perusahaan: Monitoring and Evaluating the Performance of Directors in Managing the Company 1.) Penyelesaian Tindak Lanjut Keputusan Rapat, Following up the Decision of the Meetings 2.) Pencapaian KPI Direktorat dalam Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan Tahun Buku 2020, Achievement of Directorate KPI in Quarterly Management Report 2020 3.) Kepatuhan Direksi dalam Mengelola Perseroan Kesesuaiannya dengan Ketentuan Perundang-undangan & Pemenuhan Perjanjian dengan Pihak ke-3, Compliance of the Board of Directors with the Applicable Laws and Regulations in Managing the Company & Completion of Aggreement with 3rd Party, 4.) Realisasi Pencapaian Realization of Achievement	Jumlah/ Frekuensi Total/ Frequency	5,0%	24 Kali Monitoring & Evaluasi (Melalui 12 kali Rapat Gabungan BOC dan BOD dan 12 kali rapat Internal BOC) 24 Monitoring & Evaluation (through 12 joint meetings with BOD and 12 Internal Meetings)	5,0%	1. Rapat Gabungan : 12 Kali Joint Meeting : 12 Times 2. Rapat Internal : 17 Kali Internal Meeting : 17 Times

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

Perspektif Perspective		Key Performance Indicator Key Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Output Output		Keterangan Description
					Target 2020 Target 2020	Realisasi 2020 Realisasi 2020	
Pengawasan Atas Implementasi Rencana & Kebijakan Perusahaan Supervising the Plans and Policies of the Company	3	Pengawasan & Monev. Kepatuhan Direksi Menjalankan Perusahaan Sesuai RKAP dan/atau RJPP Supervising, Monitoring & Evaluating the Compliance of BOD in Running the Company based on RKAP and/or RJPP	Bulan Month	2,50%	3 kali *Monitoring* & Evaluasi 3 times Monitoring and Evaluation	2,50%	Telah disampaikan laporan Triwulan dan Semester dengan rincian: Quarter and Semester reports were submitted with more details: 1. Laporan TW I 2020 : 40/DK/V-2020 tanggal 4 Mei 2020 1st Quarter 2020 report: 40/DK/V-2020 on 4 May 2020 2. Laporan Semester I 2020 : 65/DK/VII-2020 tanggal 22 Juli 2020 1st Semester 2020 report: 65/DK/VII-2020 on 22 July 2020 3. Laporan TW III 2020 : 109/DK/XI-2020 tanggal 3 November 2020 3rd Quarter year of 2020 Report: 109/DK/XI-2020 on 3 November 2020
	4	Ketepatan Waktu Usulan Agenda RUPS Tahun Buku 2019 untuk/dan Mendapat Persetujuan RUP In time submission of the proposed GMS Fiscal Year 2019 Agenda for/and Approval from GMS	Bulan Month	2,50%	3 minggu (RUPS Tahunan tahun Buku 2019 dilaksanakan April 2020) 3 weeks (AGMS for Fiscal Year 2019 held on April 2020)	2,50%	RUPS Audit Tahun Buku 2019 : 2 Juli 2020 Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas LK Audited 2019 Nomor 49/DK/VI-2020 tanggal 2 Juni 2020 GMS Audit for Fiscal Year 2019: 2 July 2020 the Letter from the Board of Commissioners' Response to Statements of 2019 Financial Audited Number 49/DK/VI-2020 on 2 June 2020
	5	Dewan Komisaris Memberikan Persetujuan atas Rancangan RKAP Tahun Buku 2021 The Board of Commissioners Approve the RKAP Draft for Fiscal Year 2021	Minggu Week	5,0%	RKAP Tahun 2021 Disetujui Bulan Desember 2020 RKAP 2021 was approved on December 2020	5,0%	Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2021 disampaikan melalui surat Nomor: 108/DK/X-2020 tanggal 27 Oktober 2020 The Board of Commissioners' response to RKAP 2021 submitted through the Letter Number: 108/DK/X-2020 on 27 October 2020
	6	Penyampaian Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan KPI-nya Submitting the annual work plans of BOC and its KPI	Minggu Week	5,0%	Program Kerja Tahunan Dekom Tahun 2021 disampaikan kepada Direksi sesuai ketentuan Annual Work Plans of BOC for 2021 was submitted to BOD based on Regulations.	5,0%	Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan KPI disampaikan melalui surat Nomor: 107/DK/X-2020 tanggal 27 Oktober 2020 BOC Annual Program and KPI submitted through the Letter Number: 1077/DK/X-2020 on 27 October 2020

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

Perspektif Perspective	Key Performance Indicator Key Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Output Output		Keterangan Description
				Target 2020 Target 2020	Realisasi 2020 Realisasi 2020	
	7 Terselenggaranya Kunker Ke Cabang/ Kapal Site Visits to the Branch/ Ships	Bulan Month	5,0%	12 Kali 12 Times	5,0%	1. Tanjung Priok: 27-29 Agustus 2020 Tanjung Priok: 27-29 August 2020 2. Ternate-Morotai : 17-22 Oktober 2020 Ternate-Morotai : 17-22 October 2020 3. Bima : 4-9 November 2020 4-9 November 2020 4. Tual: 3-5 November 2020 Tual: 3-5 November 2020 5. Manokwari: 12-13 November 2020 Manokwari: 12-13 November 2020 6. Bitung: 12-14 November 2020 Bitung: 12-14 November 2020 7. Tarakan: 12-16 November 2020 Tarakan: 12-16 November 2020 8. Surabaya: 12-14 November 2020 Surabaya: 12-14 November 2020 9. Bau-bau: 18 November 2020 Bau-bau: 18 November 2020 10. Jayapura: 20 November 2020 Jayapura: 20 November 2020 11. Pantoloan : 29 November-Desember 2020 Pantoloan : 29 November-December 2020 12. Namlea : 2-6 Desember 2020 Namlea : 2-6 December 2020 13. Makassar : 18-20 Desember 2020 Makassar : 18-20 December 2020 14. Denpasar : 28 Des 2020 - Jan 2021 Denpasar : 28 Dec 2020 - Jan 2021

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

Perspektif Perspective	Key Performance Indicator Key Performance Indicator		Satuan Unit	Bobot Weight	Output Output		Keterangan Description
					Target 2020 Target 2020	Realisasi 2020 Realisasi 2020	
	8	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 untuk dipertanggungjawabkan di RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 the 2019 Supervisory Duties of BOC report can be accountable at AGMS for Fiscal Year 2019	Persentase Angka Percentage of Numbers	10,0%	Laporan Tersusun dan Disetujui Dekom Akhir Maret 2020 The Report was prepared and approved by BOC on March 2020	5,0%	Telah disampaikan melalui Surat Nomor 50/DK/VI-2020 tanggal 2 Juni 2020 Was submitted through the Letter Number: 50/DK/VI-2020 on 2 June 2020
Dewan Komisaris Memberikan Arahan Kepada Direksi Atas Implementasi Rencana & Kebijakan Perusahaan The Board of Commissioners Advices the Board of Directors for the Planning and Policies of The Company	9	Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan Subsidiaries Policies Management	Jumlah/ Frekuensi Total/ Frequency	5,0%	4 Kali 4 Times	3,8%	1. Rapat Internal tanggal 26 Agustus 2020 : usulan Calon Direktur Administrasi dan Keuangan PT RS PELNI Internal Meeting was on 26 August 2020: the Director of Administration and Finance Candidates for PT RS PELNI 2. Rapat Internal tanggal 30 September 2020 : usulan Direktur Keuangan PT PBM SBN dan usulan Komisaris RS PELNI Internal Meeting was on 30 September 2020: the Director of Finance candidates for PT PBM SBN and Commissioner Candidates for RS PELNI 3. Rapat Internal tanggal 27 Oktober 2020 : usulan Komisaris Independen PT PIDC Keseluruhan pembahasan telah disampaikan melalui catatan Dekom kepada Direksi Internal Meeting was on 27 October 2020; Independent Commissioner Candidates for PT PIDC, all minutes of meeting was submitted through the Letter to BOD

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

Perspektif Perspective	Key Performance Indicator Key Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Output Output		Keterangan Description
				Target 2020 Target 2020	Realisasi 2020 Realisasi 2020	
	10 Arahan tentang Hal-Hal Mengenai Perubahan Lingkungan Bisnis Yang Berdampak Besar Pada Usaha & Kinerja Perusahaan Direction related to the Changes in Business Environment that has significat impact to the Company's Business and Performance	Jumlah/ Frekuensi Total/ Frequency	5,0%	2 Kali 2 Times	5,0%	Pada Rapat Gabungan tanggal 24 Maret 2020 dan 30 April 2020 mengenai Covid-19 Joint Meetings were on 24 March 2020 and 30 April 2020 regarding the Covid-19
	11 Arahan tentang Penguatan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan Directions for Strengthening Internal Control System of the Company	Minggu Week	5,0%	4 Kali 4 Times	1,3%	Pada Rapat Internal tanggal 22 Juli 2020 dan telah disampaikan sebagai Catatan Dekom kepada Direksi. Selain itu telah menjadi saran dan rekomendasi dekom terhadap Kinerja Semester I 2020 melalui surat Nomor 65/DK/VII-2020 tanggal 22 Juli 2020 Was submitted as BOC notes to BOD at Internal Meeting on 22 July 2020 and became recommendation and advice on the performance of 1st Semester 2020 through the Letter Number: 65/DK/VII-2020 on 22 July 2020
	12 Arahan tentang Manajemen Risiko Perusahaan Direction for Risk Management	Minggu Week	5,0%	2 Kali 2 Times	5,0%	Pembahasan pada rapat gabungan tanggal 22 Juli 2020 dan pada setiap rapat internal serta disampaikan pada rapat gabungan sebagai catatan Dekom Discussed at Joint Meeting on 22 July 2020 and internal meeting as well as presented in Joint Meetings as BOC notes.
	13 Arahan tentang Sistem Teknologi Directions from Technology System	Minggu Week	5,0%	3 Kali 3 Times	5,0%	Pembahasan pada rapat Gabungan: Discussion at the joint meeting: 1. 27 Januari 2020 27 January 2020 2. 26 Februari 2020 26 February 2020 3. 24 Juni 2020 24 June 2020
	14 Arahan tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier Direction for Policies and Carrer Development	Bulan Month	5,0%	1 Kali 1 Times	5,0%	Rapat Internal dan bersama dengan Dir. SDM pada tanggal 11 Maret Internal and Joint Meeting with Director of HR on 11 March

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

Perspektif Perspective		Key Performance Indicator Key Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Output Output		Keterangan Description
					Target 2020 Target 2020	Realisasi 2020 Realisasi 2020	
	15	Arahan tentang kebijakan Akuntansi & Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Direction for Accounting Policy & Financial Statement based on Financial Accounting Standards	Persentase Angka Percentage of Numbers	5,0%	2 Kali 2 Times	5,0%	Pembahasan KPMR pada rapat Dekom tanggal 26 Februari 2020 dan 24 Juni 2020 Discussed KPMR at internal meeting on 26 February 2020 and 24 June 2020
Dewan Komisaris Memberikan Arahan Kepada Direksi Atas Implementasi Rencana & Kebijakan Perusahaan The Board of Commissioners Advices the Board of Directors for the Planning and Policies of The Company	16	Arahan tentang kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya Direction for Procurement and its Implementation	Jumlah/ Frekuensi Total/ Frequency	5,0%	2 Kali 2 Times	2,5%	Surat Dewan Komisaris Nomor 130/DK/XII-2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Reviu Dewan Komisaris terhadap Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT PELNI (Persero) The Letter of the Board of Commissioners Number 130/ DK/XII-2020 on 11 December 2020 regarding Review from the Board of Commissioners on Goods/Services Procurement Guidelines of PT PELNI (Persero)
	17	Arahan tentang Kebijakan Mutu dan Pelayanan serta Pelaksanaannya Direction for Quality and Services Policies and its Implementation	Minggu Week	5,0%	3 Kali 3 Times	5,0%	KPMR telah mengirimkan 3 Nota Dinas perihal kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya namun belum disampaikan ke Dewan Komisaris KPMR sent 3 Official Memos regarding the quality and service policies as well as its implementation have not been submitted to the Board of Commissioners
Dewan Komisaris Memantau Dan Memastikan Bahwa Prinsip Gcg Telah Diterapkan Dengan Efektif Dan Berkelanjutan The Board of Commissioners Supervises and Ensures that GCG Principles was Applied Effectively and Sustainably	18	Pencapaian Target Skor Hasil Penilaian Konsultan Independen terhadap Penerapan GCG Di Lingkungan Dekom Tahun Buku 2019 The Target Score Achievement from the Independent Consultant's Assessment on GCG within the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2019	Minggu Week	5,0%	Pencapaian Skor Penilaian > 88% Assessment Score was >88%	4,9%	Skor GCG 2019 : 86,73 GCG Score 2020 : 86.73

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

Perspektif Perspective		Key Performance Indicator Key Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Output Output		Keterangan Description
					Target 2020 Target 2020	Realisasi 2020 Realisasi 2020	
	19	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris (Baik sebagai peserta Diklat maupun sebagai Narasumber bagi Perusahaan) BOC Competency Development (Both as Training Participant or Source Person)	Kali Times	5,0%	Terlaksana sebanyak 5 kali 5 Events	5,0%	1. *Master Class Corporate Governance:* 14-16 September 2020 Master Class Corporate Governance: 14-16 September 2020 2. *GRC Summit* 2020: 17-18 September 2020 GRC Summit 2020: 17-18 September 2020 3. *Master Class Risk Governance*: 5-6 Oktober 2020 Master Class Risk Governance: 5-6 October 2020 4. 7th Komisaris Profesional: 10-11 November 2020 7th Professional Commissioner: 10-11 November 2020 5. *Corporate Law for Executive*: Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN, 15-18 Desember 2020 Corporate Law for Executive: Law Aspect In Managing SOE, 15-18 December 2020 6. *Online Executive Education Series – Directorship Program: "High Performance Boards"*, 15-18 Desember 2020. Online Executive Education Series – Directorship Program: "High Performance Boards", 15-18 December 2020.
	20	Pencapaian Target Skor Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2019 Score Target for BOC Performance for the Year of 2019	Minggu Week	5,0%	Pencapaian Skor Penilaian > 4,75 Score Achievement was >4,75	4,6%	Pencapaian KPI 2019 adalah 92% Achievement of KPI 2019 was 92%
		JUMLAH TOTAL		**100,0%**		**82,0%**	

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi Perseroan akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara kolektif. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris akan disampaikan dalam RUPS. Adapun penilaian Direksi diukur berdasarkan kriteria umum, yang meliputi: Komposisi, Kriteria, Perencanan Strategis, Peran dan Tugas Tanggung Jawab, Program Pelatihan, Rapat Direksi, Efektivitas organ penunjang, Hubungan komunikasi, Pertanggung jawaban serta Komitmen Standar Etika.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Indikator kinerja atau yang disebut sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi Perseroan, terdiri dari 5 (lima) perspektif berikut:

1. **Perspektif Keuangan dan Pasar**
   Perspektif ini memfokuskan hasil-hasil finansial pasar utama dari perusahaan, yang bertujuan menunjukkan kesinambungan finansial dan pencapaian pasar

2. **Perspektif Fokus Pelanggan**
   Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil kinerja fokus pada pelanggan dari perusahaan, yang bertujuan menunjukkan sebaik apa perusahan telah memuaskan pelanggan dan keterkaitannya dalam hubungan jangka panjang

3. **Perspektif Efektivitas Produk dan Proses**
   Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil kinerja produk dan operasional utama dari perusahaan, yang bertujuan memeragakan mutu dan nilai produk dan jasa yang menimbulkan kepuasan dan keterikan pelanggan. Selain itu, perspektif ini juga memfokuskan pada hasil-hasil proses utama lainnya dari perusahaan yang tidak dilaporkan dalam perspektif lainnya yang bertujuan memeragakan efektivitas dan efisiensi sistem kerja dan proses kerja.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOD

The Board of Commissioners will evaluate the Board of Directors performance collectively. The evaluation results of the Board of Directors' performance will be submitted to GMS. The Board of Directors assessment is measured based on general criteria, which includes: Composition, Criteria, Strategic Planning, Roles and Duties of Responsibility, Training Programs, Directors Meetings, Effectiveness of supporting organs, Communication, Accountability and Ethical Standards Commitments.

Assessment Criteria of BOD Performance

The performance indicator or Key Performance Indicators (KPI) used to measure the performance of the Company's Directors, consisting of 5 (Five) perspectives:

1. **Financial and Market Perspectives**
   These perspectives focus on financial results of the Company's main market, which aims to show financial sustainability and market achievement.

2. **Customers Focus Perspective**
   This perspective focuses on the performance results focusing on the customers of the company, which aims to show how the company satisfied the customer and its relevance in long-term relationships.

3. **Product and Process Effectiveness Perspectives**
   This perspective focuses on the results of the main product and operational performance of the company, which aims to demonstrate the quality and value of products and services that lead to customer satisfaction and interest. In addition, this perspective also focuses on the results of other main processes from Company that are not reported in other perspectives aimed to demonstrate the effectiveness and efficiency of work systems and processes.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

4. **Perspektif Fokus Tenaga Kerja**
   Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil kinerja perusahaan dalam aspek fokus pada tenaga kerja, yang tujuannya adalah mengetahui seberapa baik perusahaan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang produktif, peduli, dan membangun keterikatan dan lingkungan pembelajaran untuk semua tenaga kerja.

5. **Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan**
   Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil utama perusahaan di bidang kepemimpinan senior dan tata kelola yang bertujuan untuk menunjukkan perusahaan yang mapan secara keuangan dan beretika yang memenuhi tanggung jawab sosialnya dan mendukung komunitas utamanya.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2020

Berdasarkan surat Kementerian BUMN No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen, maka setiap perusahaan BUMN diwajibkan membuat *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen dan menjadi suatu Kontrak Manajemen antara Pemegang saham dengan Direksi BUMN.

Kontrak manajemen merupakan kesanggupan manajemen untuk mencapai target-target yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Target-target yang telah disepakati bersama tertuang dalam Kontrak Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) mencakup aspek finansial, operasional termasuk pelanggan dan aspek dinamis.

4. **Manpower Focus Perspective**
   This perspective focuses on the results of Company's Performance in manpower, which aim is to find out how well the company creates and maintains a productive, caring and constructive work environment and learning environment for all workers.

5. **Leadership, Governance and Social Responsibility Perspective**
   This perspective focuses on the main Company's result in the area of senior leadership and governance that aim to show financially and ethically established companies that fulfill their social responsibilities and support their main communities.

Assessment Results of BOD Performance in 2020

Based on the letter of the Ministry of SOEs No. SK S-676 / BUMN / MBU / 2004 dated December 24, 2004 concerning the Management Contracts, each of State-owned Enterprises requires to make Key Performance Indicators (KPI) of Management and It becomes the Management Contract between the Shareholders and the Directors of State-owned Enterprises.

Management contract refers to the ability of management to achieve the agreed targets from both parties, which is Shareholders, Directors and Board of Commissioners. The mutually agreed target were contained upon the Management Contract based on Key Performance Indicators (KPI), including financial, operational, customers and dynamic aspects.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

Pada tahun 2020 telah diperoleh hasil penilaian skor KPI sebagai berikut:

In 2020 had the assessment results of KPI Score as follows:

No	Uraian Analysis	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2020 2020 Target	Realisasi Tahun 2020 2020 Realization	Nilai Capaian Tahun 2020 2020 Score Achievement	Nilai Skor KPI Tahun 2020 2020 KPI Score
I.	**Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia** Economic and Social Values for Indonesia						
	EBITDA Margin EBITDA Margin	%	8	17,01	8,84	51,96%	4,17
	Efisiensi Biaya Overhead Overhead Cost Efficiency	%	5	2.00	28,03	110,00%	5,50
	Debt to EBITDA Debt to EBITDA	Kali Times	5	0.008	0,036	50,00%	2,50
	Kinerja PKBL PKBL Performance	%	5	95	83	87,37%	4,38
	Pemenuhan Jumlah Voyage Kapal Tol Laut Total Voyage Sea Toll Ship	%	7	95	94,67	99,65%	6,98
II.	**Inovasi Model Bisnis** Business Model Innovation						
	Indeks Kepuasan Pelanggan (reservasi + on board) Customer Satisfaction Index (Reservation = on board)	Skor Score	5	4.2	4.12	98,10%	4,90
	Indeks Kepuasan Shipper Shipper Satisfaction Index	Skor Score	5	4.1	4.13	100.73%	5,04
	Optimalisasi Kerjasama Strategi Melalui Sinergi BUMN, BUMS & UMKM Optimalization of Strategy Cooperating through SOE, Private Companies, Small Business Units	Perusahaan/ Instansi Companies/ Institutions	5	4	5	110,00%	5,50
	Optimalisasi Bisnis Non Penugasan Optimalization of Non-Assignment Business	%	5	5	-40.89	50,00%	2,50
III.	**Kepemimpinan Teknologi** Leading Technology						
	Proses bisnis yang telah terdigitalisasi Integrated Business process	%	10	70.00	80.00	110%	11,00
	Lower number of breakdowns Lower number of breakdowns	%	5	3.00	2.15	110%	5,50
	Compliance to safety regulation Compliance to safety regulation	%	5	80.00	100	110%	5,50

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOC AND BOD

No	Uraian Analysis	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Tahun 2020 2020 Target	Realisasi Tahun 2020 2020 Realization	Nilai Capaian Tahun 2020 2020 Score Achievement	Nilai Skor KPI Tahun 2020 2020 KPI Score
IV.	**Pengembangan Investasi** Investment Development						
	Implementasi Investasi *Repowering* Kapal Repowering Ships Investments	Kapal Ship	5	5	5	100%	5,00
V.	**Pengembangan Talenta** Talent Development						
	Pegawai satu tingkat di bawah Direksi yang memenuhi syarat *talent pool* BUMN Employee is one level under BOD that complies SOE talent pool requirements	Orang Person	8	21	21	100%	8,00
	Pegawai PELNI yang memenuhi standar kompetensi Employee of PELNI fit the competency standard	%	10	70	74.65	106.64%	10,66
	Produktivitas pegawai Employee Productivity	Rp. Juta/ Pegawai Rp. Million/ Employees	7	91	55,51	61,00%	4,27
Jumlah Total			**100,00**				**91,40**

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Sesuai dengan surat Kementerian BUMN No. SK S-676/ BUMN/MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen, maka setiap BUMN diwajibkan membuat *Key Performance Indicator* (KPI) Manajemen yang dijadikan Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham dengan Direksi BUMN tersebut.

Pihak yang melakukan assessment terhadap Perusahaan adalah Akuntan Publik, dalam hal ini dilakukan melalui audit *Key Performance Indicator* (KPI). Pada tahun 2020 dilakukan oleh KAP Hendrawinata Hanny, Erwin & Sumargo.

PARTY WHO CONDUCT THE ASSESSMENT

According to Minister of SOE Letter No. SK S-6767/ BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract that each of SOEs requires to formulate Key Performance Indicators (KPI) of Management, becoming Management Contract between the Shareholders with the Board of Directors of SOEs.

The Party who conducts assessment is a Public Accountant, which was through Key Performance Indicators (KPI) audit. In 2020, the assessor was KAP Hendrawinata Hanny, Erwin & Sumargo.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendukung pengawasan atas pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dalam hal nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Nominasi dan Remunerasi dari Dewan Komisaris sendiri, serta kriteria dan aturan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dibahas dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan sesuai dengan Risalah RUPS PT PELNI (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Pengesahan Laporan Keuangan dan mengacu kepada peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER: 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN; dan surat keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-128/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2019; dan memperhatikan surat Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 59/DK/VII-2020 tanggal 10 Juli 2020 serta menindaklanjuti Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 2 Juli 2020.

The Board of Commissioners forms a Nomination and Remuneration Committee to support supervising the development and implementation of policies in nominations and remuneration of the Board of Commissioners and Directors. The nomination and remuneration of the Board of Commissioners, criteria and rules for appointing the members of the Nomination and Remuneration Committee, which are discussed and decided at the Board of Commissioners' Meeting.

Remuneration for BOC and BOD is given in accordance with the Minutes of the GMS of PT PELNI (Persero) regarding the Approval for the Ratification of Financial Statements in Annual Report and refers to the regulation of the Ministry of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: PER: 04/MBU/014 dated 10 March 2014 concerning Guidelines for Determining the Income for BOD, BOC or the Supervisory Board of State Owned Enterprises as amended several times, most recently by the Ministry of SOE Regulation Number: PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 concerning the Fourth Amendment to the the Ministry of SOE Regulation Number: PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration for BOD and BOC or Supervisory Board of SOE; and Decree of the Ministry of SOE Number: SK-128/MBU/05/2019 dated 31 May 2019 concerning Determining the Income of BOD and BOC or Supervisory Board of SOE in 2019; and paying attention to the Decree of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) No: 59/DK/VII-2020 dated 10 July 2020 and following up on the Resolution of the Annual GMS for the 2019 Fiscal Year dated 2 July 2020.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS. Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan atas capaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai hasil analisis dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan hal tersebut kepada Dewan Komisaris, untuk kemudian hasilnya diteruskan kepada RUPS. Pada tahun 2020, Prosedur Pengusulan dan Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2021 serta tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2020 untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp.170.000.000- (seratus tujuh puluh juta rupiah) per bulan. Gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 95% dari gaji Direktur Utama, gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia sebesar 90% dari gaji Direktur Utama, dan Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
   b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, honorarium Wakil Komisaris Utama ditetapkan sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama, dan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
   c. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan sebagaimana tabel terlampir.
   d. Gaji/honorarium serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2020 berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2020.

RECOMMENDATION AND DETERMINATION PROCEDURES FOR THE REMUNERATION OF THE BOC AND BOD

The amount of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors is determined through an AGMS. The amount of Remuneration for BOC and BOD is based on the performance achievements of BOC and BOD, according to the results of the analysis and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee proposes this to BOC. Then, the results are forwarded to the AGMS. In 2020, the Procedure for Proposing and Determining Salary/Honorarium, Allowances and facilities for the fiscal year of 2020 and bonuses for the Fiscal Year Performance of 2020 for BOC and BOD were as follows:

1. Salary/Honorarium, Benefits and Facilities
   a. The President Director's salary was determined at Rp170.000.000 (one hundred and seventy million rupiah) per month. The salary of other Directors was 95% from the President Director's salary. the Director's salary in charge of Human Resources is 90% of the President Director's salary, and the other members of the Board of Directors are 85% of the President Director's salary.
   b. The President Commissioner's honorarium was set at 45% of the President Director's salary, while the honorarium of the Board of Commissioner members is set at 90% from the President Commissioner's honorarium.
   c. Benefits and/or facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners are given as the attached table.
   d. The salary/honorarium, allowances and facilities for the BOD and the BOC for the year of 2020 that have been effective from 1 January 2020.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

2. Bagi anggota Direksi yang sudah ada (*existing*) dalam hal berdasarkan komposisi factor jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf 1.a mengakibatkan gaji yang diterima menjadi lebih kecil dari gaji pada tahun buku sebelumnya maka gaji anggota Direksi yang sudah ada (*existing*) tersebut menggunakan gaji yang diterima pada tahun buku sebelumnya.
3. Total tantiem/insentif kerja (IK) untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2019 ditetapkan sebesar Rp.7.978.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan:
   a. Tantiem/IK Direktur Utama, anggota Direksi lainnya, dan Komisaris Utama masing-masing sebesar 100%, 85%, dan 45% dari tantiem/IK Direktur Utama, sedangkan tantiem/IK anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem/IK Komisaris Utama. Besaran tantiem/IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2019.
   b. Pajak penghasilan (Pph) atas tantiem/ IK menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai Biaya Perusahaan.
4. BUMN wajib memberlakukan pedoman penetapan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang perubahan keempat atas peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.
5. Hal - hal yang diatur dalam surat ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

2. For existing members in terms of the position factor of composition as referred in letter 1.a, the salary is smaller than the salary in the previous financial year, the salary of the existing members of the Board of Directors using the salary received in the previous financial year.
3. Total bonuses/work incentives (IK) for the Board of Commissioners and Directors for the financial year of 2019 was set at Rp7.978.000.000, - (seven billion nine hundred and seventy eight million rupiah), under the condition:
   a. Tantiem/Incentive for President Director, other BOD, BOC were respectively 100%, 85% and 45% from tantiem/incentive of President Director. And tantiem/incentive for BOC was 90% from President Commissioner. These amounts of tantiem/incentive was propotional based on their term of office of each BOD and BOC for Fiscal Year 2019.
   b. Income tax (Pph) for bonuses/work incentives is borne by the recipient and not to be charged as a Company Fee.
4. SOE must apply the stipulation of income guideline which has been stipulated in the Minister of SOE Regulation Number: PER-04/MBU/2014 as lastly amended by The Minister of State-owned Enterprises Regulation Number: PER-01/MBU/05/2019 concerning the third amendment on The Minister of State-owned Enterprises regulation Number: PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning guidelines for determining the income of BOC, BOD and Supervisory Board of SOE, in determining the income of BOC and BOD in the relevant of State-owned Enterprise subsidiaries.
5. These Matters are stipulated in this letter if there are errors in the future and will be corrected accordingly.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

STRUKTUR DAN JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari Gaji/ Honorarium, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya keagamaan, transportasi, dan santunan purna jabatan. Fasilitas yang diberikan adalah fasilitas kesehatan dan bantuan hukum. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan merujuk kepada Surat Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Nomor: S-17/Wk2.MBU.F/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Tahun 2020.

STRUCTURE AND AMOUNT OF REMUNERATION FOR BOC

The remuneration of the Board of Commissioners consists of Salary/Honorarium, benefits consisting of religious holiday, transportation, and post-service benefits. The facilities provided are health facilities and legal assistance. The Board of Commissioners Remuneration Structure refers to the Ministry of State-owned Enterprises Letter as Shareholder Number: S-17/Wk2.MBU.F/08/2020 on 4 August 2020 regarding the Determination of Income for the Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) in 2020.

Uraian Penghasilan Remuneration Type	Keterangan Description
Honorarium Honorarium	• Komisaris Utama = 45% dari gaji Direktur Utama. President Commissioner = 45% of President Director Salary. • Komisaris = 90% dari honorarium Komisaris Utama. Commissioner = 90% of President Commissioner honorarium.

Tunjangan/Fasilitas Allowance/Facility	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Commissioner
Pendapatan bulanan Monthly Salary		
Honorarium Honorarium	Rp.76.500.000	Rp. 68.850.000
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium perbulan 20% of monthly honorarium	20% dari honorarium perbulan 20% of monthly honorarium
Pendapatan Tahunan Annual Salary		
Tunjangan Hari Raya Religious Day Allowance	Dibayarkan 1 kali Honorarium Paid equal with 1 month honorarium	Dibayarkan 1 kali Honorarium Paid equal with 1 month honorarium
Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Benefit	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun Premium Paid by the Company is 25% of 1 year honorarium	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun Premium Paid by the Company is 25% of 1 year honorarium
Tantiem Incentives	Dibayarkan sebesar 45% dari Tantiem Direktur Utama Paid 45% of President Director's Incentives	Dibayarkan sebesar 90% dari Tantiem Komisaris Utama Paid 90% of President Commissioner's Incentives
Fasilitas Facilities		
Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)
Bantuan Hukum Legal Assistance	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2019
The Board of Commissioners Remuneration 2019

Nama Name	Jabatan Position	Honor per Bulan (Rp) Monthly Salary (Rp)	Tantiem (Rp) Incentives (Rp)
Ali Masykur Musa	Komisaris Utama President Commissioner	Rp76.500.000	45% dari Tantiem Direktur Utama 45% of President Director's Incentives
Kristia Budiyarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Rp68.850.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Haryo indratno	Komisaris Commissioner	Rp68.850.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Wahju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	Rp68.850.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Iwan Taufiq Purwanto	Komisaris Commissioner	Rp68.850.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Rp68.850.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives

STRUKTUR DAN JUMLAH REMUNERASI DIREKSI

Remunerasi Direksi didasarkan kepada Surat Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Nomor: S-17/Wk2.MBU.F/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Tahun 2020.

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun Buku 2020 ditetapkan sebagai berikut:

1. Tantiem Direktur Utama, Direktur & Komisaris Utama masing-masing 100%, 90% dan 45% dari Tantiem Direktur Utama sedangkan insentif Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama. Besaran tantiem dihitung proporsional sesuai dengan masa kerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2020.

2. PPH menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

STRUCTURE AND AMOUNT OF REMUNERATION FOR BOD

The remuneration for the Board of Directors is based on the Letter of the Minister of State-owned Enterprises as Shareholder Number: S-17/Wk2.MBU.F/08/2020 on 4 August 2020 regarding the Determination of Income for BOD and BOC of PT PELNI (Persero) in 2020.

Bonuses for the Board of Commissioners and Directors for fiscal year of 2018 were set as follows:

1. President Director's Bonuses, Director & President Commissioner are 100%, 90% and 45% respectively from the President Director's Tantiem while BOC's incentives are 90% of the President Commissioner's tantiem. The tantiem amount was calculated proportionally according to the working period of each member of BOD and BOC in the Financial Year of 2020.
2. Income Tax is borne for the recipient and not to be charged into a company expense.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 ditetapkan sebagai berikut:

Tantiem for the BOD and BOC for Fiscal Year 2019 was as follows:

Uraian Penghasilan Remuneration Description	Keterangan Description
Gaji Salary	• Direktur Utama = Rp150.000.000 President Director = Rp150.000.000 • Direksi = 85% dari Direktur Utama Board of Directors = 85% of President Director • Direktur SDM = 90% dari Direktur Utama Director of HC = 90% of President Director

Tunjangan/Fasilitas Allowance/Facility	Director Utama President Director	Direktur Director
Pendapatan bulanan Monthly Salary		
Gaji Pokok Basic Salary	Rp170.000.000	Rp144.500.000
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Rp27.500.000	Rp27.500.000
Pendapatan Tahunan Annual Remuneration		
Tunjangan Hari Raya Religious Day Allowance	Dibayarkan 1 kali Gaji Paid at Cost	Dibayarkan 1 kali Gaji Paid at Cost
Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Benefit	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun Premium paid by the Company is 25% of a year salary.	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun Premium paid by the Company is 25% of a year salary.
Fasilitas Facilities		
Kendaraan Vehicle	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan 1 (one) unit with maintenance and operational cost by considering the Company's financial condition	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan 1 (one) unit with maintenance and operational cost by considering the Company's financial condition
Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)
Bantuan Hukum Legal Assistance	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

REMUNERASI DIREKSI PADA 2020
Board of Directors Remuneration 2020

Nama Name	Jabatan Position	Honor per Bulan (Rp) Monthly Salary (Rp)	Tantiem (Rp) Incentives (Rp)
Insan Purwarisya L. Tobing	Direktur Utama President Director	Rp170.000.000	100%
Olih Masolich Sodikin	Direktur Director	Rp144.500.000	85% dari Tantiem Direktur Utama 85% of President Director's Incentives
Robert MP Sinaga	Direktur Director	Rp144.500.000	85% dari Tantiem Direktur Utama 85% of President Director's Incentives
Ony Suprihartono	Direktur Director	Rp144.500.000	85% dari Tantiem Direktur Utama 85% of President Director's Incentives
Ganefi	Direktur Director	Rp144.500.000	85% dari Tantiem Direktur Utama 85% of President Director's Incentives
Yahya Kuncoro	Direktur Director	Rp144.500.000	85% dari Tantiem Direktur Utama 85% of President Director's Incentives

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Untuk memastikan struktur di perseroan berjalan dengan baik, Perseroan memiliki sistem penilaian kinerja untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Indikator Pengukuran Kinerja untuk mengukur kinerja Direksi tahun 2020 ditetapkan dalam Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020.

DETERMINATION INDICATOR OF BOC AND BOD REMUNERATION
To ensure the structure in the Company has been running well. The Company has an appraisal performance system to determine remuneration for Board of Commissioners and Directors, which was implemented during the General Meetings of Shareholders (GMS). Key performance indicators to evaluate Board of Directors in 2020 is stipulated in Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners in 2020.



KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung Komisaris yang pembentukannya berdasarkan Salinan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Peraturan Nomor IX.I.5 serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Komite Audit Perseroan dibentuk untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Prinsip-prinsip yang membuat Perseroan menjadi kian transparan, akuntabel, patuh pada perundangan-undangan dan peraturan, independen dalam mempertahankan sustainability dan secara setara memperlakukan para pemangku kepentingan. Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas akuntansi dan proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pengendalian internal, dan terjaminnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan seluruh pemangku kepentingan untuk tercapainya keberlanjutan Perseroan.

PIAGAM KOMITE AUDIT DAN PEDOMAN KERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Audit PT PELNI (Persero), sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit Nomor: 01/DK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016, perlu disusun Rencana Kerja Komite Audit sebagai panduan dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan Perseroan, monitoring dan mengevaluasi proses pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dan auditor internal.

Audit Committee is one of Commissioners' Supporting Organs established based on Decision Letter of the Capital Market and Financial Supervisory Agency Number: KEP-643/BL/2012 dated on 7 December 2012 concerning the establishment and guidelines of Audit Committee's work implementation as stated in Regulation Number: IX.I.5 and Ministry of State-owned Enterprises Regulation Number: PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 regarding Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-owned Enterprises.

An Audit Committee is formed to bolster up the consistent implementation of GCG Principles. These principles help the Company to be more transparent, accountable, compliance on regulations and laws, independent in maintaining sustainability and equal treatment for the Stakeholders. Audit Committee has professional and independent of duties and responsibilities aligned with the prevailing regulations in order to assist the Board of Commissioners in conducting the supervisory duties and functions in accounting and financial reporting process, audit implementation, internal control, and the creation of corporate governance conducted by the Directors and all of our Stakeholders for the sustainability of the Company.

AUDIT COMMITTEE CHARTER AND WORK MANUAL

In order to execute the duties of Audit Committee in PT PELNI (Persero), stated in the Audit Committee's Charter Number: 01/DK/I/2016 dated January 8, 2016. It is essential to formulate the Audit Committee's Work Plan for guidelines in supervising the Company's financial reporting process, monitoring and evaluating the audit implementation process taken by external auditors and internal auditors.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Audit Committee Charter (Piagam Komite Audit) mengatur hal-hal mengenai Struktur Komite Audit, Persyaratan Keanggotaan, Tanggung Jawab Komite Audit, Tugas Komite Audit, Wewenang Komite Audit, Rapat Komite Audit, Tanggung Jawab Pelaporan dan Masa Tugas.

Audit Committee's Charter regulates aspects related to Audit Committee Structure, Position Requirement, Responsibilities, Duties, and Authority of Audit Committee, Audit Committee Meeting, Reporting Responsibility and Tenure.

PERSYARATAN KOMITE AUDIT

1. Pihak ekstern yang diangkat menjadi Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas.
2. Memiliki integritas yang tinggi, Kemampuan, Pengetahuan dan Pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang Pendidikan Akuntansi atau Keuangan.

AUDIT COMMITTEE REQUIREMENT

1. The external party appointed as Audit Committee shall not have any business relation or affiliation with the Company, Director, Commissioner or Majority Shareholders.
2. Have high integrity, competency, sufficient knowledge and experience in the working field and good communication skill.
3. One of the Audit Committee Members shall have Accounting or Finance educational background.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF AUDIT COMMITTEE

Appointment and discharge of the Audit Committee members are the authority of the Board of Commissioners based on a Decree issued by the Board of Commissioners.

The Audit Committee member's discharge may be administered in the event of the concerned member entering end of his serving period or through the Board of Commissioners' Decision which is due to not complying with the expected performance and/or being incompetent in exercising the duties.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

KOMPOSISI KOMITE AUDIT
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-14/DK/XI-2020 tanggal 03 November 2020 Tentang Pemberhentian Wakil Ketua dan Pengangkatan Ketua Komite dan Perubahan Susunan Komite Audit PT PELNI (Persero). Susunan Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE
Based on the Decree of Board of Commissioners No. KEP-14/DK/XI-2020 on 3 November 2020 regarding Dismissal of Vice Chairman and Appoinmnet of Head of Audit Committee and Changes in Composition of Audit Committee of PT PELNI (Persero). Composition of Audit Committee as of 31 December 2020 is as follows:

KOMPOSISI KOMITE AUDIT 2020
Audit Committee Composition in 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Iwan Taufiq Purwanto	Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	KEP-14/DK/XI-2020
Wahyu Adjie Herpriharsono	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP-14/DK/XI-2020
Joko Murdyono	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP-14/DK/XI-2020
Baliya Munadjat	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP-14/DK/XI-2020

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT
Komite Audit memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya, hal itu tersurat dalam Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/ BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Peraturan Nomor IX.I.5, serta Piagam Komite Audit Nomor: 01/DK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur terkait independensi anggota komite audit, Perseroan menunjuk anggota Komite Audit yang memenuhi syarat independensi atau tidak berbenturan kepentingan dengan Perseroan. Anggota Komite Audit tidak memiliki usaha atau memiliki saham pada perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perseroan. Ketua dan Anggota Komite Audit tidak memiliki usaha atau memiliki saham pada perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perseroan. Ketua dan Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan yang terafiliasi dengan pihak KAP pelaksana audit atas Laporan Keuangan Perseroan.

INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE
Audit Committee stands out independently in managing the duties, referring to the Decision of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Number: KEP-643/ BL/2012 dated 7 December 2012 concerning the Establishment and Work Guidelines of Audit Committee as outlined in Attachment of the Rule Number: IX.1.5, and Audit Committee's Charter Number: 01/DK/I/2016 dated 8 January 2016.

In line with the provision regulation which governs the independence of Audit Committee members, the Company appoints Audit Committee members who meet the independence requirements or do not conflict the interest of the Company. Audit Committee members do not have a business and shares in companies that conduct business deals with the Company. Head or member of the Audit Committee does not have a business deal and shares in companies that conduct business deals with the Company. Head or member of the Audit Committee has no affiliated relation with the Public Accounting Firm which conducts audit on the Company's Financial Report.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

TABEL PENGUNGKAPAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT TAHUN 2020
Table of Independence Statements of Audit Committee in 2020

Komite Audit Audit Committee	**Pejabat Eksekutif Kantor Akuntan Publik** Executives of Public Accounting Firm	**Afiliasi dengan Pemegang Saham** Affiliation With Shareholders	**Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi** Family Affiliation with Board of Commissioners and Directors	**Memiliki Saham Perusahaan (Langsung/ Tidak Langsung)** Shares Ownership at the Company (Direct/Indirect)	**Hubungan Bisnis dengan Perusahaan** Business Affiliation with the Company
Iwan Taufiq Purwanto	x	x	x	x	x
Wahyu Adjie Herpriharsono	x	x	x	x	x
Joko Murdyono	x	x	x	x	x
Baliya Munadjat	x	x	x	x	x

HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN KOMITE AUDIT
Semua anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, anggota komite lainnya serta pemegang saham pengendali. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komite Audit tidak memiliki benturan kepentingan yang mungkin terjadi dan dapat menjamin independensi tertinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Piagam Komite Audit Nomor: 01/DK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit Perseroan adalah Tugas dari Komite Audit Perseroan dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Perseroan. Adapun tugas Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Melakukan *review* atas perencanaan audit Satuan Pengawasan Intern;
2. Melakukan *review* atas pelaksanaan audit yang dilakukan Satuan Pengawasan Intern untuk memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai rencana, dan supervisi audit telah dilakukan secara memadai untuk menjamin mutu pelaksanaan audit;

FAMILY AND FINANCIAL RELATIONSHIP OF AUDIT COMMITTEE
All members of the Audit Committee have no affiliation with the Board of Commissioners, Directors, other Committee members and Controlling Shareholders. Therefore, to handle their duties, all members of the Audit Committee are impeded from any conflict of interest that may occur and can secure their highest independence in managing the duties and responsibilities.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE
The scope of duties and responsibilities of Audit Committee stipulated based on the established charter of Audit Committee Number: 01/DK/1/2016 dated on January 8, 2016. The duties and responsibilities of the Audit Committee stated in Audit Committee's Charter of the Company are the work manual of the Audit Committee in order to assist the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties and functions in the Company. The following is the duties of Audit Committee:

1. Review the audit planning of Internal Control Unit;
2. Review the audit implementation conducted by Internal Control Unit to ensure that the audit has been aligned with scheduled plan and audit supervising has performed correctly to guarantee the quality of audit implementation;

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

3. Melakukan *review* atas pelaporan Satuan Pengawasan *Intern*;
4. Melakukan penilaian atas tindak lanjut hasil audit untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal audit tidak menindak lanjuti laporan Satuan Pengawasan Intern;
5. Melakukan komunikasi secara periodik dengan Satuan Pengawasan Intern;
6. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan;
7. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal;
8. Menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. Review Internal Control Unit reporting;
4. Assess the follow up result of audit and then taking the essential steps in audit process in the event which leads to no following up on the report from Internal Control Unit;
5. Communicate periodically with Internal Control Unit;
6. Review the financial statements quality issued by the Company;
7. Review internal control effectiveness;
8. Analyze the compliance level of the Company with the applicable laws and regulations;
9. Perform other duties given by the Board of Commissioners.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit selama tahun 2020 melakukan rapat sebanyak 44 (empat puluh) kali pertemuan yang seluruhnya telah didokumentasi dalam notulen rapat. Rincian jumlah kehadiran masing-masing Anggota Komite Audit sesuai tabel berikut:

FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL OF AUDIT COMMITTEE IN MEETING

The Audit Committee held 44 (forty four) meetings in 2020, which all meetings documented in Minutes of Meeting. Detail attendance of Audit Committee member is presented in table below:

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PADA RAPAT
Attendance of the Audit Committee Members in the Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Iwan Taufiq Purwanto**	Ketua Chairman	8	8	100%
Wahyu Adji Herpriharsono**	Anggota Member	8	8	100%
Joko Murdyono	Anggota Member	44	44	100%
Baliya Munadjat*	Anggota Member	19	19	100%

* Menjabat sejak September 2020
Served since September 2020
** Menjabat sejak November 2020
Served since November 2020

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT 2020
Audit Committee Meetings Agenda in 2020

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	02 Januari 2020 02 January 2020	Evaluasi Sistem Akuntansi, *Ticketing* dan PSO Evaluation of Accounting, Ticketing and PSO Systems
2	08 Januari 2020 08 January 2020	PKAT SPI Tahun 2020 Annual Audit Work Program (PKAT) SPI 2020
3	09 Januari 2020 09 January 2020	Sisa Dana PMN Government Capital remaining funds
4	15 Januari 2020 15 January 2020	Calon Komisaris Candidates for the Board of Commissioners
5	22 Januari 2020 22 January 2020	Laporan Audit Tahun 2019 Audit Report in 2019
6	27 Januari 2020 27 January 2020	Internal Dekom Lapmen Tahun 2019 Internal Board of Commissioners Management Report 2019
7	29 Januari 2020 29 January 2020	Lap Audited Tahun 2019 Audited Report in 2019
8	05 Februari 2020 05 February 2020	LHA TW IV 4th Quarter Audit Report
9	18 Februari 2020 18 February 2020	TL BPK Follow Up Findings from BPK
10	19 Februari 2020 19 February 2020	*Progress* KAP Progress KAP
11	26 Februari 2020 26 February 2020	LapMen Jan 2020 Management Report January 2020
12	28 Februari 2020 28 February 2020	RKAP Tahun 2020 RKAP 2020
13	18 Maret 2020 18 March 2020	Lapmen Feb Tahun 2020 Management Report February 2020
14	27 Maret 2020 27 March 2020	*Internal Audit Charter* Internal Audit Charter
15	23 April 2020 23 April 2020	LapMen Maret Tahun 2020 Management Report March 2020
16	30 April 2020 30 April 2020	Lap TW I Tahun 2020 1st Quarter of 2020 report
17	27 Mei 2020 27 May 2020	LapMen April Tahun 2020 Management Report April 2020
18	30 Mei 2020 30 May 2020	Internal Dekom Internal Board of Commissioners
19	22 Juni 2020 22 June 2020	LapMen Mei Tahun 2020 Management Report May 2020
20	27 Juni 2020 27 June 2020	Internal Dekom Internal Board of Commissioners
21	08 Juli 2020 08 July 2020	Kredit Modal Kerja Tahun 2020 Working Capital Credit in 2020
22	09 Juli 2020 09 July 2020	Kredit Modal Kerja Tahun 2020 Working Capital Credit in 2020

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
23	16 Juli 2020 16 July 2020	Divestasi RS PELNI Divestitures RS PELNI
24	20 Juli 2020 20 July 2020	Penunjukan KAP Tahun 2020 Appointment of Public Accounting Office 2020
25	24 Juli 2020 24 July 2020	Revisi RKAP Tahun 2020 Revision of RKAP 2020
26	26 Agustus 2020 26 August 2020	LapMen Juli Tahun 2020 Management Report July 2020
27	27 Agustus 2020 27 August 2020	Kunjungan Kerja Ke Tj Priok Work visit to Tanjung Priok
28	21 September 2020 21 September 2020	TL-AOI GCG Internal Follow Up - Areas of Improvement GCG Internal
29	22 September 2020 22 September 2020	TL-AOI-GCG dengan SPI Follow Up - Areas of Improvement GCG Internal with Internal Audit unit
30	28 September 2020 28 September 2020	*Audit Charter* Audit Charter
31	29 September 2020 29 September 2020	RJPP Long-Term Plan
32	30 September 2020 30 September 2020	LapMen Agustus Tahun 2020 Management Report August 2020
33	15 Oktober 2020 15 October 2020	Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement
34	20 Oktober 2020 20 October 2020	Program Kerja Komite Audit Tahun 2021 Work Program of Audit Committee 2021
35	26 Oktober 2020 26 October 2020	LHA TW II-III 2nd - 3rd Quarter Audit Report
36	27 Oktober 2020 27 October 2020	LapMen Sept Tahun 2020 Management Report September 2020
37	09 November 2020 09 November 2020	Perkenalan Ketua Komdit Head of Audit Committee introduction
38	20 November 2020 20 November 2020	Reviu Penerapan Pengendalian Intern SPI Review Application of SPI Internal Control
39	23 November 2020 23 November 2020	LapMen Oktober Tahun 2021 Management Report October 2021
40	27 November 2020 27 November 2020	Internal Dekom Internal Board of Commissioners
41	30 November 2020 30 November 2020	Penerapan Pengendalian Intern Implementation of Internal Control
42	08 Desember 2020 08 December 2020	Reviu RKAP Th 2021 Review RKAP 2021
43	10 Desember 2020 10 December 2020	Perubahan RKAP setelah adanya APS RKAP revised after APS
44	29 Desember 2020 29 December 2020	LapMen Nov. Tahun 2020 Management Report November 2020

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melakukan berbagai aktivitas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas aktivitas dan operasional Perseroan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit menyusun program kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi yang dicantumkan dalam Piagam Komite Audit. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Komite Audit berkoordinasi dengan internal audit untuk pelaksanaan pengumpulan dan pengujian bukti yang selanjutnya menjadi kajian Komite Audit. Adapun pelaksanaan program kerja Komite Audit pada sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan, meliputi:
   a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit;
   b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
2. Aspek Pelaksanaan:
   a. Rapat internal audit setiap bulan.
   b. Rapat dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
   c. *Monitoring* proses audit oleh KAP;
   d. Kunjungan kerja ke Cabang dan Kapal PT PELNI (Persero);
   e. Penugasan khusus lainnya dari Dewan Komisaris.
3. Aspek pelaporan:
   a. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan.
   b. Laporan Kinerja Triwulanan
   c. Laporan Kinerja Tahunan.

DUTIES IMPLEMENTATION REPORT OF AUDIT COMMITTEE IN 2020

Throughout 2020, Audit Committee conducted various activities to assist the Board of Commissioners in performing the oversight function of the Company's operational. In performing its function, Audit Committee prepare the work program based on the responsibility, point of view and function stated in the charter of Audit Committee. In its implementation, Audit committee coordinate with Internal Audit to collect and discover the evidances as a review of Audit Committee. The work program implementation of Audit Committee throughout 2020 is as follows:

1. Planning Aspect:
   a. Preparing work plans and budget of the Audit Committee;
   b. Preparing work plans and budget of Board of Commissioners;
2. Implementing aspect:
   a. Internal Audit Monthly Meeting.
   b. Meeting with Internal Audit Unit;
   c. Monitoring auditing process by Public Accounting Firm;
   d. Site visit to branches and ships of PT PELNI (Persero);
   e. Specific assignment from the Board of Commissioners.
3. Reporting aspect:
   a. Evaluating monthly, quarterly, and annually management reports.
   b. Quarterly performance report
   c. Annually performance report

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

PROFIL KOMITE AUDIT
Profile of Audit Committee



Iwan Taufiq Purwanto
Ketua Komite Audit
Head of Audit Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
52 tahun per 31 Desember 2020
52 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place DOB
Magelang, 7 Juni 1958
Magelang, 7 June 1958

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK- KEP-14/DK/XI-2020
Appointed as a Head of Committee Audit based on Decree of Board of Commissioner No. : KEP-14/DK/XI-2020

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 1999 — Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Nanzan University Nagoya, Jepang
  Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Nanzan University Nagoya, Jepang
- 1996 — Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta
  Bachelor Degree of Economy, Economic Faculty, Accounting Major, Indonesia University, Jakarta

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2020–Sekarang / 2020–Present — Ketua Komite Audit PT PELNI (Persero)
  Head of Audit Committee of PT PELNI (Persero)
- 2020 — Deputi Kepala BPKP
  Deputy of BPKP
- 2019 — Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan SDM & Kebudayaan
  Director of Talent Development & Culture
- 2017 — Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial & Keamanan Lainnya
  Director of Government Institutions Supervision for Political, Social & Security Other
- 2016 — Kepala Pusat Informasi Pengawasan
  Head of Information Center Supervision
- 2015 — Kepala Perwakilan, BPKP Prov. Gorontalo
  Branch Manager, BPKP Gorontalo

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
- Komisaris Perseroan
  Commissioner of the Company
- Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
  Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

PROFIL KOMITE AUDIT
Profile of Audit Committee



Wahju Adji Herpriarsono
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
55 tahun per 31 Desember 2020
55 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place DOB
Purbalingga, 22 Oktober 1965
Purbalingga, 22 October 1965

Domisili | Domicile
Bekasi, Indonesia
Bekasi, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-14/DK/XI-2020
Appointed as Committee Audit member based on decree of board of Commissioner No. : KEP-14/DK/XI-2020

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 1998 — Magister Hukum Maritim dan Hukum Transportasi, Universite Aix-Marseille
  Masters in Maritime Law and Transportation Law, Universite Aix-Marseille
- 1990 — Sarjana Jurusan Hukum, UNTAG, Semarang
  Bachelor of Law, UNTAG, Semarang

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2017 — Kepala Biro Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Perhubungan
  Head of the Legal Secretariat General of the Ministry of Transportation
- 2015–2017 — Kepala Biro Hukum dan Organisasi di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  Head of Legal and Organizational Bureau at Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG)
- 2013–2015 — Inspektur di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  Inspector at Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG)
- 2009–2013 — Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  Head of Regulations and Legal Aid at Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Anggota Kebijakan Risiko
Member of Risk Policy Committee

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak Ada
None

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

PROFIL KOMITE AUDIT
Profile of Audit Committee



Joko Murdyono
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
49 tahun per 31 Desember 2020
49 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place DOB
Pati, 7 Oktober 1971
Pati, 7 October 1971

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-14/DK/XI-2020
Appointed as Committee Audit member based on decree of board of Commissioner No : KEP-14/DK/XI-2020

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2006 — Magister Administrasi Bisnis STIA LAN
  Master of Business Administration at STIA LAN

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2016–Sekarang / 2016–Present — Anggota Komite Audit PT PELNI (Persero)
  Audit Committee of PT PELNI (Persero)
- 2014–Sekarang / 2014–Present — Kabag Akuntansi dan BLU, Biro Keuangan dan Perlengakapan
  Head of Accounting and public service agency, Finance and Equipment Bureau
- 2010–2014 — Kasubag Akuntansi dan Verifikasi, Biro Keuangan dan Perlengkapan
  Head of Accounting and Verification, Finance and Equipment Bureau

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

PROFIL KOMITE AUDIT
Profile of Audit Committee



Baliya Munadjat
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
43 tahun per 31 Desember 2020
43 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place DOB
Balikpapan, 12 Januari 1977
Balikpapan, 12 January 1977

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-10/DK/VII-2020.
Appointed as Committee Audit member based on decree of board of Commissioner No : KEP-10/DK/VII-2020

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2017 — Magister Management Pamulang University
  Master Management, Pamulang University

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2020–Sekarang / 2020–Present — Anggota Komite Audit PT PELNI (Persero) / Audit Committee of PT PELNI (Persero)
- 2017–Sekarang / 2017–Present — Dosen Universitas Pamulang / Lecturer of Universitas Pamulang

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Dalam menunjang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) membentuk Komite Kebijakan Risiko melalui Keputusan Nomor: KEP-21/DK.V/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Pembentukan pada Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Tujuan dibentuknya Komite ini adalah untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban pemantauan, pengawasan dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko yang mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) pada Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2019, terjadi perubahan nama Komite ini menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/XII-2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Nama Komite Kebijakan Risiko Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

In smoothing the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) established the Risk Policy Committee by Decree Number: KEP-21/DK.V/2008 on 26 May 2008 regarding the establishment of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero). The purpose of establishing this committee is to assist the Board of Commissioners in fulfilling their duties of supervising, monitoring, and assessing on the effectiveness of risk management based on the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-01/MBU/2011 on 1 August 2011 as amended to the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. In 2019 had change in the name of this committee into Risk Management Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-01/DK/XII-2019 on 19 December 2019 on the Changes on the Name of Risk Policy Committee of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

KOMPOSISI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.SK: KEP-15/DK/XI-2020 tanggal 03 November 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komite Kebijakan Risiko pada Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Susunan komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun buku 2020 sebagai berikut:

COMPOSITION OF RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Based on the Board of Commissioners' Decree No. No.SK: KEP- 15/DK/XI-2020 concerning termination and appointment of members of the risk Policy Committee on the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero). The composition of Risk Policy Committee as of 31 December 2020 is explained in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Eddy Susanto Soepadmo	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Head of Risk Management Monitoring Committee	SK: KEP- 15/DK/XI-2020
Kristia Budiyarto	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of Risk Management Monitoring Committee	SK: KEP- 15/DK/XI-2020
Radjalis	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of Risk Management Monitoring Committee	KEP-03/DK/VIII-2017
Abdul Kholik Sutrisno	Sekretaris Komite Pemantau Manajemen Risiko Secretary of Risk Management Monitoring Committee	KEP-03/DK/VIII-2017

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan pribadi yang profesional, berpengalaman, dan tidak memiliki hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal ini untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

Komite Pemantau Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tabel pengungkapan Independensi dari Komite Pemantau Manajemen Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

INDEPENDENCE OF RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

All members of the Risk Management Monitoring Committee are professionals, experienced, and have no business relations either directly or indirectly to the Company's business activities, which aimed to maintain the independence in carrying out their duties and responsibilities.

The Risk Management Monitoring Committee has met the criteria of independence, ability, experience and integrity required in the provision regulation. The following is the table of Independence statements of Risk Management Monitoring Committee as of 31 December 2020:

TABEL PENGUNGKAPAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO 2020
Table Of Independence Statements Of Risk Management Monitoring Committee In 2020

Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee	Pejabat Eksekutif Kantor Akuntan Publik Executives of Public Accounting Firm	Afiliasi dengan Pemegang Saham Affiliation With Shareholders	Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi Family Affiliation with Board of Commissioners and Directors	Memiliki Saham Perusahaan (Langsung/ Tidak Langsung) Shares Ownership at the Company (Direct/Indirect)	Hubungan Bisnis dengan Perusahaan Business Affiliation with the Company
Eddy Susanto Soepadmo	x	x	x	x	x
Kristia Budiyarto	x	x	x	x	x
Radjalis	x	x	x	x	x
Abdul Kholik Sutrisno	x	x	x	x	x

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko PT PELNI (Persero) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko semua bidang Perusahaan sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Risk Management Monitoring Committee of PT PELNI (Persero) has duties and responsibilities as follows:

1. Provide input to the Board of Commissioners regarding the preparation of risk management improvements related to risk control all areas of the company prior to the approval of the Board of Commissioners;

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

2. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, jika diperlukan;
3. Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi;
4. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaanya serta semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko tersebut;
5. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko; dan
6. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar melakukan tidak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite Kebijakan Risiko.

2. Discuss with the Board of Directors or unit of work related to risk management, if necessary;
3. Research and review the policies and regulations on risk management policies made by the Board of Directors;
4. Conduct periodic review of the risk management policies and their implementation guidelines as well as all the changes and adjustments to the risk management policies;
5. Evaluate the model's accuracy and validity of the data used to measure the risk; and
6. Deliver input to the Board of Commissioners on matters that received attention and which need to be discussed with the Board of Directors, so could be followed up from the evaluation of the risk management by the Risk Policy Committee

RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko selama tahun 2020 melakukan rapat sebanyak 4 kali pertemuan dan telah didokumentasi dalam notulen rapat. Rincian jumlah kehadiran rapat masing-masing Anggota Komite sesuai tabel berikut:

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETINGS

During 2020, the Risk Management Monitoring Committee conducted 4 meetings and has been documented in the minutes of the meetings. The total attendance of each member of this Committee shown in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran AttendancePercentage
Eddy Susanto Soepadmo*	Ketua Head	1	1	100%
Kristia Budiyarto*	Anggota Member	1	1	100%
Radjalis	Anggota Member	4	4	100%
Abdul Kholik Sutrisno	Anggota Member	4	4	100%

* Mulai menjabat sejak 3 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020
Served since 3 November 2020 based on the Decree of Board of Commissioners No. KEP-15/DK/XI-2020

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO 2020
Risk Management Monitoring Committee Meetings Agenda 2020

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	20 Januari 2020 20 January 2020	1. Monitoring Laporan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2019. Monitoring of the Risk Management Report for the 4th Quarter of 2019. 2. Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2019. Performance Evaluation of the Risk Management & Monitoring Committee in 2019.
2	27 April 2020 27 April 2020	Pembahasan Laporan Manajemen Risiko Triwulan I tahun 2020. Discussion on the Risk Management Report for the first quarter of 2020
3	24 Agustus 2020 24 August 2020	Pembahasan Laporan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2020 Discussion on the Risk Management Report for the second quarter of 2020
4	14 Desember 2020 14 December 2020	Pembahasan Laporan Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2020 Discussion on the Risk Management Report for the third quarter of 2020

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO 2020

Pada tahun 2020, Komite Kebijakan Risiko telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 19 (sembilan belas) Rapat Internal Komite Kebijakan Risiko dan membahas laporan kinerja Perseroan, Laporan Manajemen Risiko dan hal lain yang dianggap perlu.
2. Melakukan pertemuan dengan Unit Manajemen Risiko guna membahas potensi risiko, proses mitigasi risiko dan kecukupan staf yang ditugaskan serta pelaporan.
3. Melakukan pertemuan dengan Direksi PT PELNI (Persero) dan melakukan monitoring potensi dan mitigasi risiko di Direktorat SDM, Direktorat Armada, Direktorat Usaha Angkutan Penumpang, Direktorat Usaha Angkutan Barang, Direktorat Usaha Tol Laut serta Direktorat Keuangan secara periodik.
4. Melakukan evaluasi manajemen risiko Perusahaan disertai dengan penyampaian laporan evaluasi manajemen risiko perusahaan kepada Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan penugasan khusus dari Dewan Komisaris serta memberikan saran dan/atau pendapat atas penugasan tersebut.

WORK PROGRAM REALIZATION OF RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE IN 2020

In 2020, Risk policy committee managed work program and activities, as follows:

1. Organized 19 (nineteen) Internal Risk Committee Meetings and discussed on the Company's performance reports, Risk Management Reports and other things deemed necessary.
2. Meeting with the Risk Management Unit to discuss potential risks, the risk mitigation process and the adequacy of the assigned staff and its reporting.
3. Periodically meeting with the Board of Directors of PT PELNI (Persero) and monitoring potential and its mitigation in the HR Directorate, Fleet Directorate, Passenger Transport Business Directorate, Directorate of Cargo Transport Business, Tol Laut directorate and Financial Directorate.
4. Evaluated the Company's risk management with the submission of the company's risk management report to the Board of Commissioners.
5. Carried out special assignments from the Board of Commissioners and provided suggestions and / or opinions on the assignment.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
Profile of Risk Management Monitoring Committee



Eddy Susanto Soepadmo
Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko
Head of Risk Management Monitoring Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
61 tahun per 31 Desember 2020
61 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Madiun, 26 Januari 1959
Madiun, 26 January 1959

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan No.SK: KEP- 15/DK/XI-2020 tanggal 03 November 2020.
Appointed as a Head of Risk Management Committee based on the Letter of Decision of the Ministry of State Enterprises No.SK: KEP-15/DK/XI-2020 dated 3 November 2020.

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2003 — S1 Ekonomi Universitas Indonesia
  Bachelor of Economics, Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2018 — *Special Advisor to the chief of Staff, Executive Office of the President Repiblic of indonesia*
  Special Advisor to the chief of Staff, Executive Office of the President Repiblic of indonesia
- 2016 — *Advisior, E bus Technology Innovation*
  Advisior, E bus Technology Innovation
- 2015 — *Deputy Secretary General of Innovation to the* Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
  Deputy Secretary General of Innovation to the Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
- 2015 — *Advisior, Agricultural Technology Innovation*
  Advisior, Agricultural Technology Innovation
- 2014 — *Program Director to the* Planet Inovasi Indonesia
  Program Director to the Planet Inovasi Indonesia
- 2013–2015 — *Special Advisor to the Commander of the National Armed Forces*
  Special Advisor to the Commander of the National Armed Forces

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
Profile of Risk Management Monitoring Committee



Kristia Budiyarto
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of Risk Management Monitoring Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
42 tahun per 31 Desember 2020
42 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Cirebon, 17 Januari 1978
Cirebon, 17 January 1978

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan No.SK: KEP- 15/DK/XI-2020 tanggal 03 November 2020.
Appointed as a Member of Risk Management Committee based on the Letter of Decision of the Ministry of State Enterprises No.SK: KEP-15/DK/XI-2020 dated 3 November 2020.SK-354/MBU/11/2020 dated on 02 November 2020.

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2002 — S1 FIKOM Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan
  Bachelor of Communication, Faculty of Communication Science, Universitas Hasanuddin, South Sulawesi

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2019 — Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin (Koordinator Sosial Media)
  National Team Campaign Jokowi-Ma'ruf Amin (Social Media Coordinator)
- 2017–2019 — Tim Media & Sosial Media dibawah Stafsus Kemenko Perekonomian Darmin Nasution
  Media & Social Media Team under Special Staff Coordinating Minister for Economics Darmin Nasution
- 2014–2018 — *Media Planner/Social Media Analysis PT-G Indonesia, Asia Pulp Paper (APP) (Group Sinar Mas) & MRC (Media Group)*
  Media Planner/Social Media Analysis PT-G Indonesia, Asia Pulp Paper (APP) (Group Sinar Mas) & MRC (Media Group)
- 2014 — Koordinator War Room Tim Media Social Jokowi-Jusuf Kalla (Jasmev)
  War Room Social Media Coordinating Team Jokowi-Jusuf Kalla (Jasmev)
- 2012–2013 — *General Manager E-Commerce PT Planet Tecno, Jakarta (Makanja.com/Online Store)*
  General Manager E-Commerce PT Planet Tecno, Jakarta (Makanja.com/Online Store)
- 2009–2011 — Direktur Operational Jaringan Etnikom Bens Radio Jakarta (Jakarta, Bandung, Cirebon, Batam, Baturaja, Kayuagung, Banten)
  Operational Director of Bens Radio Etnikom Network Jakarta (Jakarta, Bandung, Cirebon, Batam, Baturaja, Kayuagung, Banten).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
Profile of Risk Management Monitoring Committee



Radjalis
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of Risk Management Monitoring Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
57 tahun per 31 Desember 2020
57 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place DOB
Padang, 3 Desember 1962
Padang, December 3, 1962

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Anggota Komite Kebijakan Risiko berdasarkan SK No. Kep-06/DK/XII-2017
Appointed as Committee Audit member based on SK No. Kep-06/DK/XII-2017

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2006 — Magister Administrasi Bisnis STIA LAN
  Master of Business Administration at STIA LAN
- 1988 — Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya
  Bachelor Degree of Jayabaya University

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2016–Sekarang / 2016–Present — Anggota Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Persero)
  Member of the National Committee for Risk at PT PELNI (Persero)
- 2016 — Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi
  Head of Governance of Transportation Services Infrastructure System
- 2015 — Kepala Kajian Kemitraan dan Pelayanan Transportasi laut & Manajemen Transportasi
  Head of Partnership Studies and Services of Marine Transportation & Transportation Management
- 2013 — Kasubag Perlengkapan Transportasi Laut Biro Keuangan
  Head of the Sea Transportation Division of the Finance Bureau

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
- Anggota Komite Kebijakan Risiko
  Member of Risks Policy Committee
- Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
  Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak ada
None

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
Profile of Risk Management Monitoring Committee



Abdul Kholik Sutrisno
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of Risk Management Monitoring Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
35 tahun per 31 Desember 2020
35 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place DOB
Tasikmalaya, 14 April 1984
Surakarta, April 14, 1984

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Anggota Komite Kebijakan Risiko berdasarkan SK No. Kep-06/DK/XII-2017
Appointed as Committee Audit member based on SK No. Kep-06/DK/XII-2017

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2009	Sarjana Ekonomi, STIE Muhammadiyah Jakarta Bachelor Degree of Economics at STIE Muhammadiyah, Jakarta
2005	Diploma Akuntansi STAN Diploma of Accountant at STAN

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017–Sekarang 2017–Present	Anggota Komite Kebijakan Risiko Perseroan Member of Risk Policy Committee of the Company
2016	PT Barata Indonesia (Persero) PT Barata Indonesia (Persero)
2013	PT Bina Karya (Persero) PT Bina Karya (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak ada
None

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Dalam menunjang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT PELNI (Persero) membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas membantu Dewan Komisaris. Tujuan dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban pemantauan, pengawasan dan penilaian atas talenta dan pengelolaan SDM PT PELNI (Persero). Kebijakan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Badan Usaha Milik Negara termasuk PT PELNI (Persero) tertuang dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020. Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) SK: KEP – 04/DK/IV - 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero).

In supporting the implementation of good corporate governance, PT PELNI (Persero) formed Nomination and Remuneration Committee that has responsible to assist BOC. This Committee is aimed to assist BOC in conducting their responsibilities as supervisor, advisor and assessor for talent and HR management of PT PELNI (Persero). The regulation to establish the Nomination and Remuneration Committee within State-owned Enterprises including PT PELNI (Persero) was stated in the Decree of Ministry of State-owned Enterprises Number S-254/MBU/04/2020 on 17 April 2020. The Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) was formed based on the Decree of Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) SK: KEP-04/DK/IV-2020 on 20 April 2020 regarding the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee Members of PT PELNI (Persero).

KOMPOSISI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP–04/DK/IV-2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

THE COMPOSITION OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-04/DK/IV-2020 dated 20 April 2020 regarding Determination of Nomination and Remuneration Committee Member of PT PELNI (Persero) as of 31 Decemeber 2020 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ali Masykur Musa	Ketua Chairman	KEP-04/DK/IV-2020
Haryo Indratno	Sekretaris Secretary	KEP-04/DK/IV-2020
Fadli Yasir	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member	KEP-04/DK/IV-2020

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pribadi yang profesional, berpengalaman, dan tidak memiliki hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal ini untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah tabel pengungkapan Independensi dari Komite Kebijakan Resiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2020:

THE INDEPENDENCE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBER

All members of Nomination and Remuneration Committee are professionals, experienced, and have no business relations either directly or indirectly related to the Company's business activities, which is to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities.

Nomination and Remuneration Committee has meet the criteria of independence, ability, experience and integrity required in the provision regulation.

The following is the table of Independency statements from Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2020:

TABEL PENGUNGKAPAN INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 2020
Table of Independency Statements of Nomination And Remuneration Committee in 2020

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	**Pejabat Eksekutif Kantor Akuntan Publik** Executives of Public Accounting Firm	**Afiliasi dengan Pemegang Saham** Affiliation With Shareholders	**Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi** Family Affiliation with Board of Commissioners and Directors	**Memiliki Saham Perusahaan (Langsung/ Tidak Langsung)** Shares Ownership in the Company (Direct/Indirect)	**Hubungan Bisnis dengan Perusahaan** Business Affiliation with the Company
Ali Masykur Musa	x	x	x	x	x
Haryo Indratno	x	x	x	x	x
Fadli Yasir	x	x	x	x	x

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja individu Direksi PT PELNI (Persero).
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan talenta PT PELNI (Persero) yang terdiri dari pejabat setingkat di bawah Direksi yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) has duties and responsibilities as follows:

1. Provide input to the Board of Commissioners regarding individual valuation the Board of Directors;
2. Provide input to the Board of Commissioners regarding talents of PT PELNI (Persero) which consists of 1 level below the Board of Directors.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia;
4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan diskusi dengan Direksi dan/atau unit kerja yang terkait dengan talenta, pengelolaan SDM, dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta hal-hal yang terkait jika diperlukan;

3. Provide input to the Board of Commissioners regarding Human Resource management.
4. Provide input to the Board of Commissioners regarding proposal on Director and Commissioner remuneration.
5. Discuss with the Board of Directors or unit of work related to talents, human resource management, and Director and Commissioner remuneration, and all matters related, if necessary;

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2020 melakukan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali pertemuan dan telah didokumentasi dalam notulen rapat. Rincian jumlah kehadiran rapat masing-masing Anggota Komite Kebijakan sesuai tabel berikut:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

During 2020, Nomination and Remuneration Committee conducted 9 meetings and has been documented in the minutes of the meetings. The total attendance of each member of Nomination and Remuneration Committee elaborated in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran AttendancePercentage
Ali Masykur Musa	Ketua Head	9	9	100%
Haryo Indratno	Anggota Member	9	9	100%
Fadli Yasir	Anggota Member	9	9	100%

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 2020
Nomination And Remuneration Committee Meetings Agenda 2020

No	Bulan/Tanggal Month/Date	Agenda Agenda
1	28 April 2020 28 April 2020	Usulan BOD-1 PT PELNI (Persero) Proposal of BOD-1 PT PELNI (Persero)
2	13 Mei 2020 13 May 2020	Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) Nomination And Remuneration PT PELNI (Persero)
3	22 Juni 2020 22 June 2020	Peningkatan Infrastruktur dan Protokoler SDM Improvement of HR Infrastructure and Protocol
4	20 Juli 2020 20 July 2020	Model Organisasi dan Nomenklatur pada Roadmap Transformasi Perusahaan Organizational Model and Nomenclature on the Company Transformation Roadmap
5	24 Agustus 2020 24 August 2020	Persetujuan Direktur Administrasi dan Keuangan PT RS PELNI dan Rencana Penyegaran Masa Jabatan Approval of Director of Administration and Finance of PT RS PELNI and Tenure Refreshment Plan

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

No	Bulan/Tanggal Month/Date	Agenda Agenda
6	29 September 2020 29 September 2020	1. Kebijakan Peningkatan Kompetensi bagi Pegawai PT PELNI (Persero) serta Progress Pelaksanaannya; Competency Improvement Policy for Employees of PT PELNI (Persero) and Its implementation Progress; 2. Pembahasan Usulan Direktur Keuangan PT PBM Sarana Bandar Nasional; Discussion of Finance Director's proposal of PT PBM Sarana Bandar Nasional; 3. Pembahasan Usulan Anggota Dewan Komisaris PT RS PELNI dari Menteri BUMN selaku RUPS PT PELNI (Persero). Discussion of Members of the BOC's Proposal of PT RS PELNI from the Minister of SOEs as GMS PT PELNI (Persero).
7	26 Oktober 2020 26 October 2020	1. Kebijakan Talent Succession PT PELNI (Persero) serta Progress Pelaksanaannya; Talent Succession Policy of PT PELNI (Persero) and Its Implementation Progress; 2. Tindak Lanjut Ketentuan Masa Kerja Pejabat BOD-1; Follow-up to the Terms of Working Period of BOD-1 Officials; 3. Kelengkapan Struktur Organisasi dan Pengisian Pengurus Anak Perusahaan Completeness of Organizational Structure and Filling of Subsidiary Managers
8	23 November 2020 23 November 2020	1. Mutasi, Promosi dan Demosi Pegawai Mutation, Promotion and Demosion of Employees 2. Penjenjangan Karir dan Pelatihan Career Path and Training 3. Alur, Mekanisme Kerja dan Penggajian Flow, Work Mechanism and Payroll
9	23 Desember 2020 23 December 2020	1. Pembahasan atas Jawaban Nota Dinas Ketua KNR Perihal Temuan Dewan Komisaris terkait Isu SDM di Cabang dan Kapal; dan Discussion of the Answer of the KNR Chairman's Office Note regarding the BOC's Findings related to HR Issues in Branch Offices and Ships; and 2. Pembahasan Usulan Direktur Operasi PT Pelita Indonesia Djaya. Discussion on Proposal from Director of Operations PT Pelita Indonesia Djaya.

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 2020

Pada tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

1. Menyusun Data Talent BOD-1
2. Mengusulkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.
3. Mengusulkan Persetujuan Direktur Administrasi dan Keuangan PT RS PELNI.
4. Mengusulkan Persetujuan Direktur Keuangan PT PBM Sarana Bandar Nasional.
5. Mengusulkan Persetujuan Anggota Dewan Komisaris PT RS PELNI.
6. Mengusulkan Persetujuan Direktur Operasi PT Pelita Indonesia Djaya.

REALIZATION ON NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE WORK PROGRAM 2020

In 2020, Nomination and Remuneration Committee realized work program and activity, among others:

1. Preparing Talents of Company 1 level below of Board of Directors.
2. Preparing proposal of remuneration of Board Directors and Board of Commissioners Year 2020.
3. Proposing approval for Director of Administration and Finance of PT RS PELNI.
4. Proposing approval for Director of Finance of PT PBM Sarana Bandar Nasional.
5. Proposing approval for Commissioner of PT RS PELNI.
6. Proposing approval for Director of Operation of PT Pelita Indonesia Djaya.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PROFIL PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Profile of Nomination and Remuneration Committee Member



Ali Masykur Musa
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (Komisaris)
Nomination and Remuneration Committee Chairman (Commissioner)

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
58 tahun per 31 Desember 2020
58 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Tulungagung, 12 September 1962
Tulungagung, September 12, 1962

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Dekom PT PELNI (Persero) Nomor : KEP-03/DK/IV-2020
Appointed as a Head of Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of Board of Commissioners Number: KEP-03/DK/IV-2020

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2010 — Sarjana Hukum, Universitas Sahid Jakarta
  Law, University of Sahid, Jakarta
- 2009 — Master of Humaniora (Hukum Bisnis), Universitas Gadjah Mada
  Master of Humaniora, (Business Law), University of Gadjah Mada
- 2007 — S3 Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta
  Doctorate, Education Management, State University of Jakarta
- 1988 — *Master of Science* (Ilmu Politik), Universitas Indonesia
  Master of Science, Faculty of Politics, University of Indonesia
- 1986 — Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Jember
  International Relation, Universitas Gajah Mada

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2019 — Komisaris Utama PT Reasuransi Indonesia Utama
  President Commissioner at PT Reasuransi Indonesia Utama
- 2014–2019 — Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI
  Member of the People's Consultative Assembly (MPR) Study Institute, Republic of Indonesia
- 2013–2016 — Ketua Komite Pelaksanaan INTOSAI WGEA di BPK RI
  Head of INTOSAI WGEA Implementation Committee at Indonesian Supreme Audit Institution (BPK), Republic of Indonesia
- 2009–2014 — Anggota IV BPK RI
  Member IV at Indonesian Supreme Audit Institution (BPK), Republic of Indonesia
- 2006–2009 — Anggota Komisi XI DPR-RI
  Member of XI Commission at The People's Representative Council (DPR), Republic of Indonesia

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
- Komisaris Perseroan
  Commissioner of the Company
- Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
  Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PROFIL PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Profile of Nomination and Remuneration Committee Member



Haryo Indratno
Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi (Komisaris)
Nomination and Remuneration Committee Chairman (Commissioner)

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
51 tahun per 31 Desember 2020
51 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Surakarta, 09 April 1969
Surakarta, 09 April 1969

Domisili | Domicile
Bekasi, Indonesia
Bekasi, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Dekom PT PELNI (Persero) Nomor : KEP-03/DK/IV-2020
Appointed as a Secretary of Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of Board of Commissioners Number: KEP-03/DK/IV-2020

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2008 — Magister Manajemen Keuangan, Universitas Bhayangkara, Jakarta
  Masters in Financial Management, Bhayangkara University, Jakarta
- 1995 — Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Slamet Riyadi
  Bachelor of Economic Management, Universitas Slamet Riyadi

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2018–Sekarang / 2018–Present — Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Ib
  Indonesian Aviation Navigation Services, Head of Energy, Logistics, Regional and Tourism Business Ib
- 2014–2019 — Anggota Dewan Pengawas Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
  Member of the Supervisory Board of the Indonesian Public Aviation Navigation Service Provider
- 2012–2014 — Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan
  Commissioner at PT Perkebunan Mitra Ogan
- 2011–2013 — Sekretaris Dewan Komisaris Perum Jasa Tirta I
  Secretary of the Board of Commissioners at Perum Jasa Tirta I
- 2008–2013 — Sekretaris Dewan Komisaris PT Len Industri (Persero)
  Secretary of the Board of Commissioners at PT Len Industri (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
- Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Ib
  Indonesian Aviation Navigation Services, Head of Energy, Logistics, Regional and Tourism Business Ib
- Anggota Komite Audit Perseroan
  Member of Audit Committee of the Company

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PROFIL PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Profile of Nomination and Remuneration Committee Member



Fadli Yasir
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
44 tahun per 31 Desember 2020
44 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Tanjung Balai, 3 Juni 1976
Tanjung Balai, 3 June 1976

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Dekom PT PELNI (Persero) Nomor : KEP-03/DK/IV-2020
Appointed as a Member of Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of Board of Commissioners Number: KEP-03/DK/IV-2020

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

- 2021–Sekarang / 2021–Present — S3 Aqidah Filsafat Islam UINSU
  Doctoral Decree of Islamic Philosophy Aqidah, UINSU
- 2020 — Magister Managemen Bisnis Meneger IMBT
  Master of Business Management of IMBT
- 2018 — Magister Pemikiran Politik Islam UINSU
  Master of Islamic Political Phylosophy, UINSU
- 1999 — Sarjana Perbandingan Agama IAINSU
  Bachelor of Comparison Between Region, IAINSU
  Sarjana Ekonomi USBM Medan
  Bachelor of Economics, USBM Medan

Pengalaman Kerja | Work Experiences

- 2020–Sekarang / 2020–Present — Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero)
  Member of the National Committee for Risk at PT PELNI (Persero)
- 2008–2010 — Tim Ahli Bidang Komunikasi Gubernur Sumatera Utara
  North Sumatera Governor Communication Expert Team
  Direktur Umum/SDM PT Papan Dayan
  Director of General Affairs of PT Papan Dayan
  Direktur Umum/SDM PT Gardanews Mandiri
  Director of General Affairs/HR of PT Gardanews Mandiri
- 2006–2008 — Wartawan/ Redaktur Harian Global Sumatera Utara
  Journalist/Editor of Daily Global Sumatera Utara
- 2005–2008 — Wartawan/ Redaktur Harian Mimbar Unum
  Journalist/Editor of Daily Mimbar Unum
- 2004–2005 — Wartawan/Redaktur Harian Bersama
  Journalist/Editor of Daily Bersama
- 2003–2004 — Wartawan/Redaktur Harian Bintang Sumatera
  Journalist/Editor of Daily Bintang Sumatera
- 2000–2003 — Wartawan Harian Mediator
  Journalist of Daily Mediator

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
  Member of Nomination and Remuneration Committee
- Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
  Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None


tex

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY



Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat penghubung (*liaison officer*) antara Perseroan dengan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) serta menjaga kepatuhan PT PELNI (Persero) terhadap hukum dan perundang-undangan. Sekretariat Perusahaan juga mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam menjalankan fungsinya tersebut *Corporate Secretary* memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:

a. Menyiapkan rencana kerja (jangka panjang, menengah dan pendek) dan program kerja Perseroan yang berkaitan dengan Humas, Kelembagaan & CSR, Kesekretariatan Direksi & GCG serta Pengelolaan Dokumen Korporat;

Corporate Secretary is a liaison officer between the Company and stakeholders as well as to maintain compliance of PT PELNI (Persero) with the Law and regulatory frameworks. The Corporate Secretary also carries a mission to support positive corporate image building consistently and continuously through effective communication program management to all Stakeholders

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

Description of duties and responsibilities of the Corporate Secretary is as follows:

a. Preparing the work plans (long, medium and short term) and corporate work programs related to Public Relation, Institutional & CSR, Secretariat of the Board of Directors & GCG and Corporate Document Management;

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

b. Menyiapkan konsep peraturan kebijakan dan sistem prosedur dalam pengelolaan hubungan korporat, GCG, CSR, dokumentasi dan keprotokolan Perseroan, kesekretariatan layanan umum rumah tangga kantor Direksi;
c. Menyelenggarakan kegiatan hubungan korporat, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dokumentasi dan keprotokolan Perseroan, kesekretariatan serta layanan umum rumah tangga kantor Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direksi di Kantor Cabang, Kapal, SBU, Instansi terkait di lingkup internal dan eksternal Perseroan;
e. Melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Perusahaan;
f. Menyiapkan laporan berkala dan/atau laporan khusus kegiatan Sekretariat Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2020

Adapun kegiatan-kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 antara lain:

a. Sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) meliputi hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham, regulator, lembaga lain dan publik;
b. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan;
c. Memastikan bahwa PT PELNI (Persero) mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku;
d. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan komunikasi terhadap publik internal dan eksternal;
e. Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan Perseroan untuk mematuhi peraturan tersebut;
f. Membuat dokumentasi;
g. Mengawal jalannya GCG dan CSR.

b. Preparing the concept of regulatory policies and system procedures in management of corporate relationships, GCG, CSR, corporate documentation and protocol, secretarial, household general services of the Board of Directors;
c. Conducting corporate relations activities, good corporate governance and corporate social responsibility (CSR), corporate documentation and protocol, secretarial and the household general services of the Board of Directors in accordance with applicable regulations;
d. Coordinating the activities implementation of the Board of Directors in Branch Offices, Ships, SBUs, related Institutions covering internal and external of the Company;
e. To manage and mitigate risks in the implementation of the secretariat activities of the Company;
f. Preparing periodic reports and / or special reports on the secretariat activities of the Company in accordance with applicable regulations.

DUTIES IMPLEMENTATION REPORT OF CORPORATE SECRETARY IN 2020

Activities of the Corporate Secretary in 2020 are among others:

a. As a liaison officer including the company's relationship with shareholders, regulators, other agencies and the public;
b. Responsible for Corporate Secretariat;
c. Ensured that PT PELNI (Persero) has obliged the applicable regulations on disclosure's terms;
d. Made the planning, implementation and control of public communication activities to internal and external parties;
e. Updated the development of the applicable regulations and ensured the Company complying with these regulations;
f. Made documentations;
g. Escorted the implementation of GCG and CSR.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN
Profile of Corporate Secretary



Opik Taufik
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
38 tahun per 31 Desember 2020
38 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Garut, 6 Januari 1982
Garut, 6 Januari 1982

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat menjadi Kepala Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 01.28/01/SK/HKO.01/2021 tanggal 28 Januari 2021
Appointed as a Corporate Secretary based on Letter of Directors' Decree Number: 01.28/01/SK/HKO.01/2021 dated 28 January 2021

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 2008 — Sarjana Sistem Komputer, Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indonesia
  Bachelor of Computer System, School of Management and Computer Indonesia

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2021–Sekarang / 2021–Present — Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan / Interim Head of Corporate Secretary
- 2019–2021 — Manajer Layanan Operasional & Administrasi Keagenan & *Lifestyle* / Operational & Branch Administration & Lifestyle Services Manager
- 2019 — Manajer Pengelolaan *Tour* / Tour Management Manager
- 2017–2019 — Manajer Fasilitas Layanan Angkutan Penumpang / Passenger Transport Facilities Manager
- 2015–2017 — Manajer Layanan *Hospitality* / Hospitality Manager
- 2015 — Manajer *Event* / Event Manager
- 2014 — Manajer Jaminan Kualitas Pelayanan / Quality of Services Assurance Manager

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
- *Workshop of Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)*
  Workshop of Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
- *Corporate Governance Officer Workshop Series Batch 7*
  Corporate Governance Officer Workshop Series Batch 7

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemangku Kepentingan lainnya
Has no affiliation with Shareholders, Board of Commissioners, Directors or Other Stakeholders

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

* Diangkat setelah tanggal Laporan Akuntan, SK Direksi No. 01.28/01/SK/HKO.01/2021 tanggal 28 Januari 2021
Appointed after the date of Accountant Report, Decree of Directors No. 01.28/01/SK/HKO.01/2021 on 28 January 2021

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
INTERNAL AUDIT UNIT

Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perseroan membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang menjalankan fungsi Audit Internal untuk mengamankan aset dan kepentingan perusahaan. Pembentukan SPI tersebut mengacu kepada Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 11.17/01/SK/HKO.01/2020 yang menjelaskan visi, misi, tujuan, ruang lingkup struktur, standar dan kode etik, wewenang, tugas dan tanggung jawab dari unit Satuan Pengawasan Intern.

Our efforts to apply the principles of GCG, the Company established an Internal Audit Unit that manages the Internal Audit function to secure the company's assets and interests. The establishment of Internal Audit Unit is based on the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2003 of Chapter VI concerning State-Owned Enterprises, Government Regulation No.12 of 1998 concerning Limited Liability Companies, the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOE), and Internal Audit Charter stipulated in Directors Decree No. 11.17/01/SK/HKO.01/2020 date December 22, 2014 which explains the vision, mission, objectives, scope of the structure, standards and codes of conduct, authority, duties and responsibilities of the Internal Audit Unit.

KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DAN PIHAK YANG MENGANGKAT/MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan di atas, Perseroan telah membentuk Satuan Pengawasan Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama ditempatkan dalam struktur organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dan dalam mengungkapkan pandangan dan pemikiran terkait dengan pelaksanaan pengawasan kepada Manajemen yang dilakukan secara bebas dan tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan oleh Manajemen maupun pihak lainnya dalam organisasi perusahaan.

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern di Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam struktur organisasi Perusahaan, SPI berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
b. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT AND PARTY WHO APPOINTING /DISMISSING THE HEAD OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

In order to meet the above terms, the Company formed an Internal Audit Unit and is directly responsible to the President Director. The position of Internal Audit Unit as an organ to assists the President Director is equivalently placed in organizational structure based on their roles and responsibilities, and in expressing their views and thoughts of the supervision implementation for the Management is unrestrained and cannot be influenced or suppressed by Management and other parties within the Company's organization.

The position of the Internal Audit Unit in the Company is explained in the following terms:

a. In the organizational structure of the Company, the Internal Audit Unit is under the President Director and led by a Head of Internal Audit Unit.
b. The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval from the Board of Commissioners.

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
INTERNAL AUDIT UNIT

c. Kepala SPI secara struktural bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

d. Personil SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

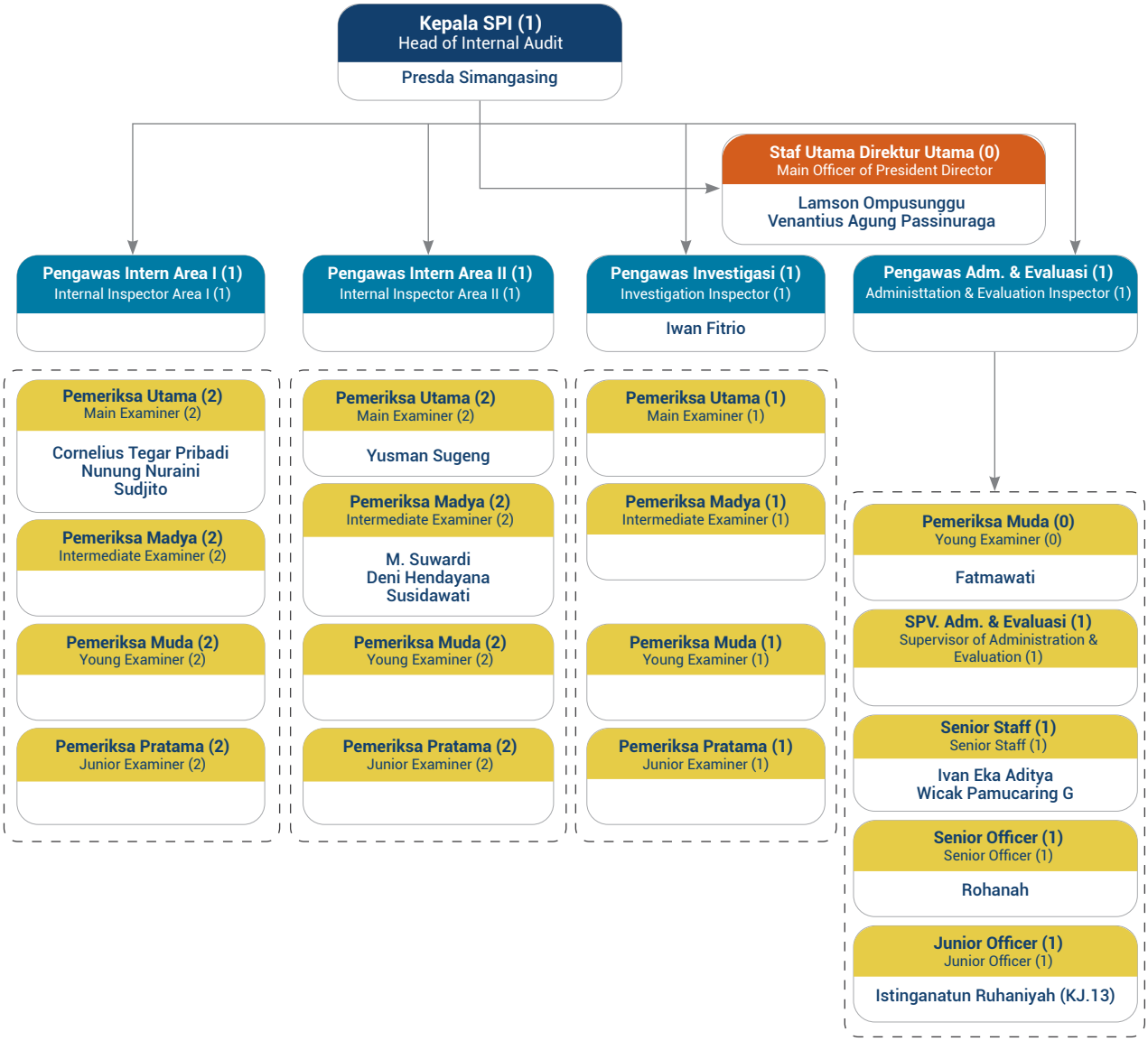
Jabatan Kepala Satuan Pengawasan Intern (KaSPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

c. The Head of Internal Audit Unit is structurally responsible to the President Director and functionally to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

d. The Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of SPI.

The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.

STRUKTUR ORGANISASI SPI
SPI ORGANIZATION STRUCTURE



SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
INTERNAL AUDIT UNIT

JUMLAH PERSONIL AUDITOR INTERN

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pengawasan Intern dalam pelaksanaan pekerjaannya dibantu oleh Pengawas Intern Area I, Pengawas Intern Area II, Pengawas investigasi, Pengawas Administrasi & Evaluasi. Saat ini, jumlah pegawai SPI Perseroan berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan susunan internal auditor Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NUMBER OF INTERNAL AUDITORS

IIn carrying out its duties, the Head of the Internal Audit Unit is assisted by Internal Auditor Area I, Internal Auditor Area II, Investigation Auditor, Administration and Evaluation Auditor. Currently, the total number of Internal Audit Unit employees of the Company is 18 (eighteen) personnel with this internal auditor composition of the Company as of 31 December 2020 as follows.

No	Nama Name	Jabatan Position
1.	Presda Simangasing	Kepala SPI Head of Internal Audit
2.	Lamson Ompusunggu	Staff Utama Direktur Utama Expert Staff of President Director
3.	Venantius Agung Passinuraga	Staff Utama Direktur Utama Expert Staff of President Director
4.	Iwan Fitrio	Pengawas Investigasi Investigation Auditor
5.	Dahlia Ginting	Pengawas Adm & Evaluasi Adm & Evaluation Auditor
6.	Damli	Pemeriksa Utama Expert Auditor
7.	Deni Hendayana	Pemeriksa Utama Expert Auditor
8.	Yusman Sugeng	Pemeriksa Utama Expert Auditor
9.	Sudjito	Pemeriksa Utama Expert Auditor
10.	Nunung Nuraeni	Pemeriksa Utama Expert Auditor
11.	Cornelius Tegar Pribadi	Pemeriksa Utama Expert Auditor
12.	M. Suwadi	Pemeriksa Madya Intermediate Auditor
13.	Susidawati	Pemeriksa Madya Intermediate Auditor
14.	Fatmawati	Pemeriksa Muda Junior Auditor
15.	Ivan Eka Aditya	Senior Staff Senior Staff
16.	Wicak Pamucaring G	Senior Staff Senior Staff
17.	Rohanah	Senior Officer Senior Officer
18.	Istinganatun Ruhaniyah	Junior Officer Junior Officer

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
INTERNAL AUDIT UNIT

PIAGAM AUDIT INTERNAL

SPI merujuk Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 17 November 2020 sebagai landasan formal tertulis yang menjadi pedoman bagi Satuan Pengawasan Intern Perseroan dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Piagam Pengawasan Internal memuat:
1. Pendahuluan
2. Visi dan Misi
3. Tujuan
4. Struktur dan Kedudukan
5. Persyaratan SPI
6. Akuntabilitas
7. Independensi dan Objektivitas
8. Tugas dan Tanggung Jawab
9. Wewenang
10. Lingkup Pekerjaan
11. Standar
12. Kode Etik
13. Larangan Rangkap Tugas
14. Hubungan dengan Auditee
15. Hubungan dengan Auditor Eksternal
16. Hubungan dengan Komite Audit
17. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI

Uraian Tugas dan tanggung jawab SPI yang ditetapkan berdasarkan Internal Audit Charter adalah sebagai berikut:
a. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
b. Mengevaluasi integritas dan keandalan, informasi dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut;

CHARTER OF INTERNAL AUDIT

Internal Audit Unit (SPI) refers to the Internal Audit Charter stipulated by the President Director dated 17 November 2020 as a written formal basis which guides the Company's Internal Audit Unit in exercising its authorities, duties, and responsibilities competently, independently and accountability.

The Internal Audit's Charter includes:
1. Introduction
2. Vision and Mission
3. Objectives
4. Structure and Position
5. SPI Requirement
6. Accountability
7. Independency and Objectiveness
8. Duty and Responsibility
9. Authority
10. Scope of Work
11. Standard
12. Code of Conducts
13. Dual Position Prohibition
14. Relationship with Auditee
15. Relationship with External Auditor
16. Relationship with Audit Committee
17. Closing.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT

Description of duties and responsibilities of Internal Audit Unit stipulated based on Internal Audit Charter, is as follows:
a. Develop and implement the Annual Audit Work Program (PKAT);
b. Evaluate the integrity and reliability, information and the tools used to identify, measure, classify and report such information;

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
INTERNAL AUDIT UNIT

c. Mengevaluasi sistem yang diciptakan untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja, prosedur, peraturan perundangan yang memiliki dampak besar terhadap organisasi Perusahaan;
d. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
e. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan penggunaan aset/alat produksi serta kegiatan lainnya.
f. Melakukan audit atas badan usaha afiliasi dan Anak Perusahaan, atas permintaan Direktur Utama dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
g. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
h. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, up. Komite Audit;
i. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh SPI dan/atau Auditor Eksternal;
j. Melakukan evaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
k. Melakukan audit khusus, apabila diperlukan atas permintaan Direktur Utama atau sebagai pengembangan hasil audit sebelumnya.
l. Melakukan kegiatan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, serta praktik tata kelola dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan secara berkesinambungan.

c. Evaluate system created to ensure compliance with policies, plans, procedures, laws and regulations that have a major impact on the organization of the company;
d. To test and evaluate the implementation of the internal control and risk management system in accordance with the company's policies;
e. Perform an audit and assessment of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and the use of assets/tools of production and other activities.
f. Conduct an audit of business affiliation and subsidiaries, at the request of the President Director and the report submitted to the Director and the Board of Commissioners of the subsidiaries;
g. Provide suggestions for improvements and information on the activities examined at all levels of management;
h. Create audit reports and submit the report to the Director and the Board of Commissioners, up. Audit Committee;
i. Monitor, analyze and report on implementation of the improvements that have been suggested by Internal Audit Unit and/or the External Auditors;
j. Evaluate the quality of internal audits that being carried out;
k. Conduct a special audit, if necessary, at the request of the President Director or as a development of the previous audit results.
l. Conduct consultations with regard to risk management, internal control systems, as well as corporate governance practices in an effort to improve the Company's performance and value.

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
INTERNAL AUDIT UNIT

SERTIFIKASI INTERNAL AUDITOR 2020

Demi menunjang kebutuhan, tingkat efektifitas dan lancarnya operasional perusahaan dalam melakukan Audit Internal, maka selama tahun 2020, Perseroan telah memberikan pelatihan bagi para personil SPI. Rincian pelatihan yang diikuti oleh masing-masing internal auditor, sebagai berikut:

INTERNAL AUDITOR CERTIFICATION 2020

To support the needs, the level of effectiveness, and smooth operation of the company in conducting Internal Audit, then during 2020, the Company provided training for each of SPI personnel. The detail explanation of trainings participated by each internal auditors is as follows:

No	Nama Name	Pelatihan Training
1.	Presda Simangasing	
2.	Lamson Ompusunggu	DDA, AO
3.	Venantius Agung Passinuraga	KTY, PKKN, AA, KTS, PT, ACL, PK, SAI, PKN, PKD, RBA
4.	Iwan Fitrio	PIA
5.	Dahlia Ginting	DDA, AO, AK, KPA
6.	Damli	DDA, AO, KPA
7.	M. Suwadi	DDA, IAD1, AO, PTTA
8.	Deni Hendayana	AUP, AFD
9.	Yusman Sugeng	IAD 1
10.	Sudjito	IAD 1, AO
11.	Nunung Nuraeni	DDA, AO, KPA
12.	Cornelius Tegar Pribadi	DDA, AO, AK, KPA
13.	Susidawati	
14.	Fatmawati	IAD 1
15.	Ivan Eka Aditya	IAD1, IAD 2, AIAL
16.	Wicak Pamucaring G	
17.	Rohanah	DDA
18.	Istinganatun Ruhaniyah	DDA

Catatan | Notes
- DDA = Dasar Dasar Audit | Audit Basic
- AO = Audit Operasional | Operational Audit
- KPA = Komunikasi dan Psikologi Audit | Audit Communication And Psychology
- AK = Audit Kecurangan | Fraud Audit
- IAD1 = Internal Audit Tingkat Dasar 1 | 1st Basic of Internal Audit
- IAD2 = Internal Audit Tingkat Dasar 2 | 2nd Basic of Internal Audit
- ACL = *Audit Command Language*
- RBA = *Risk Based Audit*
- AIAL= Audit Intern Tingkat Lanjutan
- PIA = Professional Internal Auditor
- PKKN = Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
- KTY = Ketua Tim Yunior
- PT = Pengendali Teknis
- PK = Pemeriksaan Kinerja
- SAI = Sistem Akuntansi Instansi
- PKN = Pemeriksa Keuangan Negara
- PKD = Pemeriksa Keuangan Daerah

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
INTERNAL AUDIT UNIT

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2020

a. Audit Reguler

- LHA No. 03.20/02/ND-T/091/2020 tanggal 20 Maret 2020, Cabang Pontianak
- LHA No. 03.20/03/ND-T/091/2020 tanggal 20 Maret 2020, Cabang Kumai
- LHA No. 03.20/04/ND-T/091/2020 tanggal 20 Maret 2020, Cabang Sampit
- LHA No. 04.17/01/ND-T/091/2020 tanggal 17 April 2020, Cabang Luwuk
- LHA No. 04.17/02/ND-T/091/2020 tanggal 17 April 2020, Cabang Palu
- LHA No. 04.17/03/ND-T/091/2020 tanggal 17 April 2020, Cabang Tolitoli

b. Reviu PSO

- LHR No. 09.11/01/ND-T/091/2020 tanggal 11 September 2020, Kertas Kerja Tagihan PSO Semester I Tahun 2020

DUTIES IMPLEMENTATION REPORT OF INTERNAL AUDIT UNIT IN 2020

a. Regular Audit

- LHA No. 03.20/02/ND-T/091/2020 dated 20 March 2020, Pontianak Branch
- LHA No. 03.20/03/ND-T/091/2020 dated 20 March 2020, Kumai Branch
- LHA No. 03.20/04/ND-T/091/2020 dated 20 March 2020, Sampit Branch
- LHA No. 04.17/01/ND-T/091/2020 dated 17 April 2020, Luwuk Branch
- LHA No. 04.17/02/ND-T/091/2020 dated 17 April 2020, Palu Branch
- LHA No. 04.17/03/ND-T/091/2020 dated 17 April 2020, Tolitoli Branch

b. PSO Review

- LHR No. 09.11/01/ND-T/091/2020 on 11 September 2020, 1st Quarter of 2020 PSO Invoice



SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
INTERNAL AUDIT UNIT

MONITORING TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI
MONITORING OF SUPREME AUDIT AGENCY OF REPUBLIC OF INDONESIA EXAMINATION FINDINGS

MONITORING TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK - RI TAHUN BUKU 2007 S.D . 2019
Monitoring Follow-up on Audit Findings from BPK RI 2007 until 2019

Posisi : 31 Desember 2020
Position : 31 December 2020

Tahun Buku Fiscal year	Tujuan Audit Audit Purpose	Jumlah Total		Hasil Review BPK RI (27-08-2020) BPK RI Review Result		
				Selesai Complete		Selesai % Complete %
		Temuan Finding	Rek Rec	Temuan Finding	Rek Rec	
1	2	3	4	5	6	7 = 6:4
2007	GA	18	32	16	30	93,8%
2009 SD SM I 2010	SPI	7	20	5	18	90,0%
2010	PSO	9	26	6	22	84,6%
2011	PSO	11	17	10	16	94,1%
2012	PSO	7	12	3	7	58,3%
2013	PSO	6	17	2	11	64,7%
2014	PSO	10	21	6	15	71,4%
2015	PSO	10	20	6	14	70,0%
2016	PSO	13	28	5	18	64,3%
2017	PSO	15	41	7	26	63,4%
2017 SD SM I 2018	Kinerja | Performance	24	52	5	13	25,0%
2018	PSO	10	37	3	14	37,8%
2019	PSO	10	18	0	0	0,0%
Jumlah Total		**150**	**341**	**74**	**204**	**59,8%**

REKAPITULASI STATUS REKOMENDASI PER TAHUN PEMERIKSAAN BPK - RI
Recapitulation of Recommendation Status per Year of BPK - RI Inspection

Posisi : 31 Desember 2020
Position : 31 December 2020

No	Status Status	Tahun Pemeriksaan Year of Inspection					
		GA 2007	SPI 2009 SM I-2010	PSO 2010	PSO 2011	PSO 2012	PSO 2013
1	Sesuai Rekomendasi (SR) According to Recommendation	26	18	20	16	7	11
2	Belum Sesuai Rekomendasi (BS) Not According to Recommendation	1	1	3	0	5	0
3	Diusulkan Selesai (DS) Proposed Complete	1	1	1	1	0	6
4	Belum Ditindaklanjuti (BD) Not Following Up	0	0	0	0	0	0
5	Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) Non-actionable	4	0	2	0	0	0
Jumlah Total		**32**	**20**	**26**	**17**	**12**	**17**

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
INTERNAL AUDIT UNIT

Sisa Setelah Review BPK Remaining After the BPK Review				Diusulkan : (OS) Proposed				Sisa Posisi 31 Desember 2020 Remaining Position 31 December 2020			
Temuan Finding	Rekomendasi Recommendation		Selesai % Complete %	Temuan Finding	Rekomendasi Recommendation		Selesai % Complete %	Temuan Finding	Rekomendasi Recommendation		%
	PT PELNI (Persero)	Kementerian Minister			PT PELNI (Persero)	Kementerian Minister			PT PELNI (Persero)	Kementerian Minister	
8 = 3-5	9	10	11 = 9:4	12	13	14		15	16	17	18 = 16:4
2	2	0	6,3%	1	1	0	3,1%	1	1	0	3,1%
2	2	0	10,0%	1	1	0	5,0%	1	1	0	5,0%
3	4	0	15,4%	1	1	0	3,8%	2	3	0	11,5%
1	1	0	5,9%	1	1	0	5,9%	0	0	0	0,0%
4	2	3	41,7%	0	0	0	0,0%	4	2	3	41,7%
4	6	0	35,3%	4	6	0	35,3%	0	0	0	0,0%
4	3	3	28,6%	3	3	2	23,8%	1	0	1	4,8%
4	6	0	30,0%	3	5	0	25,0%	1	1	0	5,0%
8	9	1	35,7%	7	8	1	32,1%	1	1	0	3,6%
8	15	0	36,6%	4	11	0	26,8%	4	4	0	9,8%
19	39	0	75,0%	16	35	0	67,3%	3	4	0	7,7%
7	23	0	62,2%	5	19	0	51,4%	2	4	0	10,8%
10	18	0	100,0%	10	18	0	100,0%	0	0	0	0,0%
76	**130**	**7**	**40,2%**	**56**	**109**	**3**	**32,8%**	**20**	**21**	**4**	**7,3%**

Tahun Pemeriksaan Year of Inspection							
PSO 2014	PSO 2015	PSO 2016	PSO 2017	Kinerja | Performance 2017 SM - 2018	PSO 2018	PSO 2019	Jumlah Total
15	13	18	26	13	14	0	197
1	1	1	4	4	4	0	25
5	5	9	11	35	19	18	112
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	7
21	**20**	**28**	**41**	**52**	**37**	**18**	**341**

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
INTERNAL AUDIT UNIT

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN
Profile of Internal Audit Unit



Presda Simangasing
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
49 tahun per 31 Desember 2020
49 years old as of 31 December 2020

Tempat & Tanggal Lahir | Place & DOB
Surabaya, 2 Februari 1971
Surabaya, February 2, 1971

Domisili | Domicile
Bekasi,Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, East Java, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan sejak tanggal 21 Februari 2019 berdasarkan SK No. IV/A/Kantor Pusat/02.21/02/SK/HKO.01/2019
Appointed as Head of Internal Control Unit since February 21, 2019 based on Decision Letter No, IV/A/Kantor Pusat/02.21/02/SK/HKO.01/2019

Masa Jabatan | Term of Serving
2020–2025

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- 1995 — Sarjana Hukum Pidana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
  Bachelor of Criminal Law University 17 August 1945, Surabaya

Pengalaman Kerja | Work Experiences
- 2019–Sekarang / 2019–Present — Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan / Head of Internal Audit Unit of PT PELNI (Persero)
- 2013–2019 — Kepala Cabang Surabaya / Surabaya Branch Manager
- 2012–2013 — GM Cabang Bau-Bau / Bau - Bau General Manager
- 2011–2012 — Manager Cabang Ternate / Ternate Branch Manager

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development
Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships
Tidak Ada
None

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI
Tidak Ada
None

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Selain mengoptimalkan pengelolaan risiko di seluruh aspek bisnis dan operasional, Perseroan juga mengaplikasikan Sistem Pengendalian Internal secara terstruktur dan komprehensif di semua lini bisnis guna meminimalisir *error* dan agar terhindar dari aksi kecurangan. Pada implementasinya, system pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan merupakan sebuah proses penyatuan Tindakan dan kegiatan secara berkesinambungan baik yang dilakukan oleh pimpinan Perseroan maupun karyawan untuk memberi keyakinan bahwa tujuan Perseroan telah teralisasi melalui kinerja yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

Despite optimizing the risk management in all business and operational aspects, the Company also applies a structured and comprehensive Internal Control System into all lines of business in order to minimize errors and avoid fraud actions. In its implementation, this applied system is a process of continuous integration of actions and activities conducted by both corporate leaders and employees to provide more confidence that the objectives achievement can be realized through effective and efficient performance, financial reporting reliability, asset security, and compliance with laws and regulations.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Agar implementasi sistem pengendalian internal Perseroan senantiasa berjalan efektif dan efisien, Direksi telah menetapkan sistem pengendalian internal yang ketat untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. Lingkup sistem pengendalian internal yang dijalankan Perseroan terdiri dari Lingkungan Pengendalian Internal, pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta *Monitoring* terhadap efektivitas sistem pengendalian internal yang berjalan di Perseroan.

INTERNAL CONTROL SYSTEM OBJECTIVES

In order to implement internal control system effectively and efficiently, the Board of Directors has determined a strict internal control system to secure the Company's investment and assets. Internal control system is consisted of Internal Control Environment, Assessment of Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication System and Monitoring on effectiveness of internal control system.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan mencakup aktivitas pengendalian keuangan dan operasional, yaitu:

1. **Pengendalian Keuangan**
   Sistem pengendalian internal dalam hal keuangan dilakukan guna memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL

Internal control system implemented by the company covers financial and operational activities:

1. **Financial Control**
   Internal control system in financial is done to guarantee the validity of financial information, effectiveness and efficiency of the Company process and compliance aspect to the regulations. The Board of Directors must determine an effective internal control system to secure the Company's investment and asset.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

2. **Pengendalian Operasional**
   Pengendalian dalam kegiatan operasional yang meliputi kegiatan produksi, penjualan, operasi maupun investasi dilakukan agar tercapainya target Perseroan yang terbebas dari kecurangan dan sesuai dengan peraturan di dalam Perseroan.

KEPATUHAN PERSEROAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan terbuka, Perseroan senantiasa mematuhi seluruh regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, Perseroan secara proaktif mengikuti setiap perubahan ataupun update terkait peraturan di bidang pasar modal, khususnya yang relevan dengan bidang usaha Perseroan. Pada tahun ini, Perseroan telah mengikuti berbagai seminar dan sosialisasi yang berkaitan dengan perundang-undangan.

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2020

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif serta berbasis Manajemen Risiko. Sehingga setiap level organisasi memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab dalam mereview tingkat pengendalian risiko diseluruh aktivitas di unit kerja. Dan untuk menjaga efektivitas pengendalian SPI bekerja sama dengan Bagian Manajemen Risiko dan QSHE dalam melaksanakan audit baik itu di unit, proyek, maupun di Biro kantor pusat.

Hasil Evaluasi atas Pengendalian Internal telah disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Hasil evaluasi selama tahun 2020 diperoleh hasil Sistem Pengendalian Internal di PT PELNI (Persero) telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perusahaan.

2. **Operational Control**
   Operational control covers a range of production, sales, operations as well as investment activities in order for the Company target to be achieved that is free from fraud and according to regulations of the Company.

THE COMPANY'S COMPLIANCE ON LAWS AND REGULATIONS

In its capacity as a public company, the Company continuously complies to all prevailing regulations and legislations. In principle, the Company proactively follows all amendments and updated regulations in the stock market, especially those relevant to the Company's business. This year, the Company has participated in various seminars and socialization in relations to those legislations.

EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION IN 2020

Management is responsible to implement a reliable and effective Internal Control System based on Risk Management. So that every level of organization has a massive obligation to enhance a risk awareness culture.

Internal Audit Unit (SPI) is also responsible to review the level of risk control in all activities in the work unit. And to maintain the effectiveness of Internal Audit Unit, together with the Risk Management and QSHE Division in conducting audits both in units, projects, Bureaus of Headquarter.

Evaluation Results of Internal Control have been submitted to the Directors then to be followed up and monitored on their implementation. The evaluation results in 2020 shown that the results of the Internal Control System in PT PELNI (Persero) has been running well and compiled with the standards set by the Company.

AUDITOR EKSTERNAL
EXTERNAL AUDITOR

Auditor Eksternal berkewajiban memberikan pendapat tentang kewajaran dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan yang benar akan membantu menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi terkait, termasuk untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penyajian laporan keuangan dengan benar sesuai standar adalah kewajiban di mata hukum, dan sebagai Perusahaan yang baik selayaknya kita patuh terhadap hukum dan peraturan yang telah diatur. Dan terakhir, audit eksternal akan membantu mengidentifikasi bila sistem yang dijalankan selama ini masih kurang efektif dan efisien.

External auditor is responsible to provide the fairness and compliance opinion of the Financial Statements with accounting principle that commonly exists in Indonesia. Correct financial statements will help public confidence increasing with the company or related organization, including improving the company's performance. The presentation of correct financial statements based on the financial standards is a legal obligation cases, and as a good Company should comply with the regulated laws and regulations. By doing so, External Audit will help identifying process which leads to the ineffective and inefficient implementation of the system.

AUDIT LAPORAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020, PT PELNI (Persero) telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan etika profesi yang berlaku. Adapun Fee Audit 5 tahun Terakhir adalah sebagai berikut:

FINANCIAL STATEMENTS AUDIT

In the implementation of Financial Statements Audit for Fiscal Year 2020, PT PELNI (Persero) appointed Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo Public Accounting Firm to perform the duty based on the financial audit standard prevailed by Indonesia Accountant Association and applicable professional ethics. The following is audit fee for the 5 recent years:

Tahun Buku Fiscal Year	Nama KAP Name of PAF	Biaya Audit (Rp) Audit Fee (RP)	Opini Audit Audit Opinion
2020	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo	Rp440.000.000	Wajar, dalam semua hal yang material Unqualified opinion, in all material aspect
2019	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Rp527.750.000	Wajar, dalam semua hal yang material Unqualified opinion, in all material aspect
2018	KAP Djoko, Sidik & Indra	Rp887.580.000	Wajar, dalam semua hal yang material Unqualified opinion, in all material aspect
2017	KAP Djoko, Sidik & Indra	Rp658.000.000	Wajar, dalam semua hal yang material Unqualified Opinion, in all material aspect
2016	KAP Djoko, Sidik & Indra	Rp652.025.000	Wajar, dalam semua hal yang material Unqualified Opinion, in all material aspect

Selama tahun 2020, KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo memberikan jasa lain selain jasa audit laporan keuangan yaitu jasa audit kepatuhan dan laporan kinerja Perseroan.

Throughout 2020, Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo Public Accounting Firm provided other services outside financial statements audit which was the Company's compliance and performance report Audit.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

GAMBARAN UMUM MANAJEMEN RISIKO PT PELNI (PERSERO) TAHUN 2020

Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) memahami pentingnya pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan berkesinambungan. Mengingat pentingnya kontribusi manajemen risiko bagi keberhasilan perusahaan, maka PT PELNI (Persero) dalam mengelola risiko perusahaan melakukan integrasi antara *Balance Scorecard* dengan *Risk Management Based on* ISO 31000:2018 sehingga dapat ditemukenali dan dilakukan pengelolaan *key performance indicator* (kpi) perusahaan yang berkualitas untuk mendorong kinerja organisasi dengan menetapkan *key risk indicator* (kri) sebagai *early warning system* untuk mengendalikan ancaman terhadap pencapaian *strategic objective* perusahaan. Sehingga dapat dikendalikan dan diminimalisir faktor-faktor penghambat kegagalan pencapaian sasaran strategis perusahaan. Disamping itu tetap dilakukan *risk assessment* terhadap risiko-risiko lain yang berbasis di luar risiko integrasi tersebut. Risiko-risiko diluar *integrated bsc* tersebut ditetapkan sebagai *Corporate Risk*.

Kebijakan – Kebijakan Manajemen Risiko selama Tahun 2020

Untuk mendapatkan proses manajemen risiko yang efektif, sebuah standar kerangka kerja manajemen risiko perlu dibangun dan diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Oleh sebab itu, semua pemilik risiko maupun fasilitator manajemen risiko diharuskan untuk melaksanakan kerangka kerja dan proses manajemen risiko dengan basis prioritas. Dewan Direksi menetapkan risiko-risiko utama sebagai prioritas, yaitu risiko yang mempunyai dampak besar jika tidak ditangani secara baik. Penanganan risiko utama dapat ditambahkan seiring dengan meningkatnya kemampuan internal dalam menangani risiko.

GENERAL OVERVIEW OF PT PELNI (PERSERO) RISK MANAGEMENT IN 2020

The Board of Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) understood how important Risk Management implementation, which is to pursue the Company's vision effectively and sustainably. Considering the significant contribution of risk management for the success of the Company, thus PT PELNI (Persero) in overcoming the risks of the Company integrate between the Balance Scorecard and Risk Management Based on ISO 31000:2018 resulting the execellence of identifying and applying key performance indicator of the Company to boost the Organizations performance by key risk indicator (KRI) as early warning system to control threats to the achievement of the company's strategic objectives. So that it can be controlled and minimized the inhibiting factors of failure to achieve the company's strategic goals. Besides that, risk assessment is still being carried out on other risks that are based outside of the risk of integration. Risks outside of the integrated bsc are determined as Corporate Risk.

Risk Management Policies During 2020

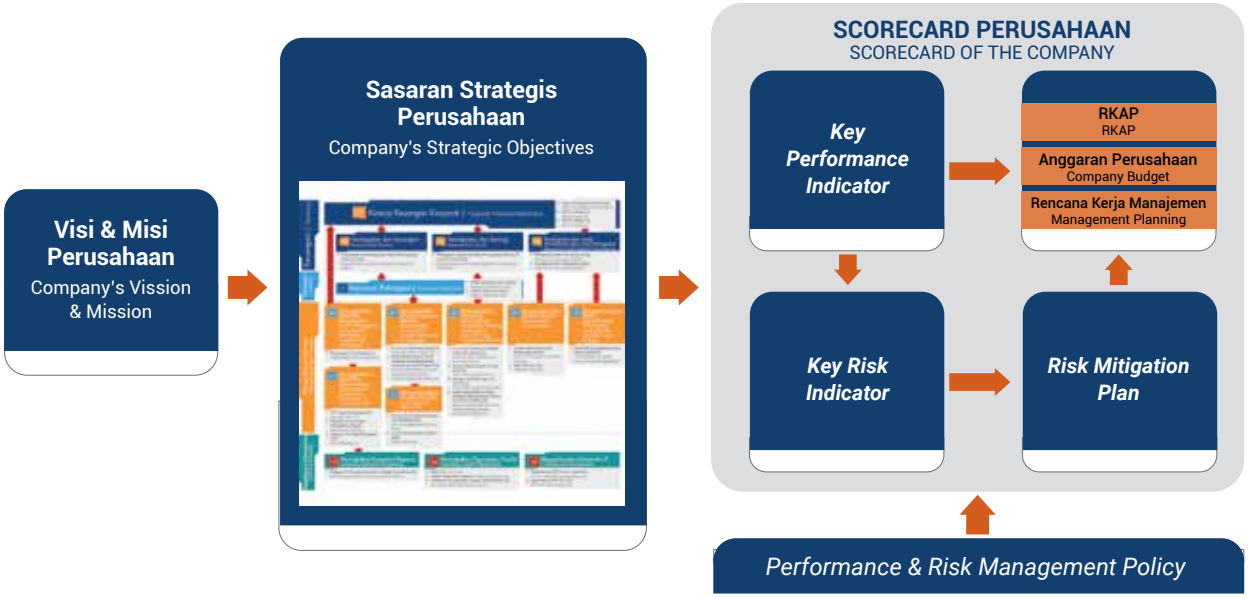
A well prepared, effective and comprehensive risk management must be applied and implemented consistently. By doing so, the risk register or risk management facilitator shall make the work plan and handle the risk management process in priority scale of which risks has bad impact if the risk does not handle properly. The handling of main risk can be upgraded while the internal capability in handling risk is also increasing.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Direksi menetapkan Manajemen Risiko Perusahaan berbasis ISO 31000 edisi Tahun 2018 sebagai kerangka kerja bagi PT PELNI (Persero). Manajemen Risiko ISO 31000:2018 dipilih karena lebih mudah diaplikasikan secara komprehensif dan diintegrasikan ke dalam proses pembuatan keputusan strategis maupun keputusan operasional.

The Board of Directors established Risk Management based on ISO 31000:2018 as a framework for Risk Management of PT PELNI (Persero). ISO 31000:2018 Risk Management is easier to apply comprehensively and to integrate into strategic or operational decisions-making.

BASIS INTEGRASI BALANCE SCORECARD DENGAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT :
Integrated Balance Scorecard Basis with Enterprise Risk Management:



Pada tahun 2020, PT PELNI (Persero) memasuki tahapan yang sangat penting yaitu penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Periode Tahun 2020-2024. Bagaimana perusahaan di masa depan mampu mempertahankan keberlangsungan usaha dan menciptakan pertumbuhan laba yang berkesinambungan *(sustainable profitability growth)* serta melakukan ekspansi bisnis dalam 5 tahun ke depan. Salah satu elemen perusahan yang cukup penting dalam menciptakan dan melindungi nilai-nilai perusahaan adalah manajemen risiko.

In 2020, PT PELNI (Persero) is entry into the important period of the long term plan for the years of 2020-2024. This future plan is important to look how the Company continues to pursue the sustainable business and to create more sustainable profitability growth as well as expand the busniess for 5 more years to come. One of the elements important element to create and nurture the value of the Company is risk management.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Kemudian salah satu proses yang mendasar pada tahun ini sebagai pijakan transisi dari RJPP sebelumnya yaitu *survival, consolidation and growth* adalah kesinambungan pertumbuhan perusahaan. Beberapa syarat perusahaan untuk dapat tumbuh harus dilakukan oleh manajemen dan seluruh SDM PT PELNI (Persero) pada saat ini adalah :

1. **Melihat kesempatan peluang dan memanfaatkannya;**
   Setiap elemen di Perusahaan harus memahami dan mengerti dengan jelas lingkungan bisnisnya seperti apa, memahami bagaimana karakteristik konsumennya dan mengerti apa yang dibutuhkan konsumen kedepan, perusahaan akan mampu menjadi *market leader* dan memiliki pangsa pasar yang luas. Ketika perusahaan mengetahui bagaimana karakteristik dan kebutuhan konsumen seperti apa maka ini menjadi peluang yang besar bagi perusahaan. Tetapi hal ini bergantung apakah perusahaan mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik atau tidak.

   Dalam hal tersebut, pada *risk register* angkutan penumpang dan angkutan barang telah dipetakan salah satu *response plan*-nya adalah melakukan kajian atas rute kapal untuk melihat potensi pasar atau *customer.*

2. **Adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis;**
   Pada saat ini era yang dihadapi dalam industri bisnis apapun adalah VUCA : *volatility, uncertainty, complexity & ambiguity* termasuk dalam industri moda transportasi laut (pelayaran), bisnis logistik dan *trading*.

One of the cornerstone processes in this transition from previous RJPP (survival, consolidation and growth) is sustainable growth of the Company. some condition must be performed by all management and HR of PT PELNI (Persero) to keep growing are:

1. **Observing and maximizing the opportunities.**
   Every element of the Company must understand and know how the business circumstances work clearly, understand the characteristics of customers and observe what the customers' needs for the years to come, the Company is able to be a market leader and new entry to the large-market. By doing so, it becomes the opportunities and chances for the Company regardless of depending on the Company's capability to empower those opportunities and chances.

   Concerning this matter, the risk register of passengers and carrier ships has been mapped one of its response plans, which is to review the route of the ships to know the potential market or the customers.

2. **Adapting to the changes in business environments;**
   Over this era, the obstacles faced by every business industry is VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity, including in sea transportation (sailing) industry, logistic and trading businesses.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Salah satu metodologi yang tepat untuk menganalisa secara terukur dan sistematis hal-hal ketidakpastian adalah melalui manajemen risiko karena *terminology* risiko adalah ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran, sehingga menyesuaikan diri dengan lingkungan bisa dilakukan dengan cara memperbaharui apa yang sudah ada di dalam perusahaan atau perusahaan bisa mengadaptasi dari perusahaan lain bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

One of precise methodology to analyze the uncertainty condition systematically is coming from risk management because of risk terminology is the uncertainty against target achievement, thus adapting to the environment by fixing the existing factors within the Company or the Company can adopt from others companies how they adapt to their environment.

Pergerakan *trend* gaya hidup masyarakat yang demikian cepat berubah mengakibatkan model bisnis yang ada harus mampu beradaptasi termasuk adalah cara PT PELNI (Persero) mendistribusikan jasanya kepada *customer* yaitu *modern channel ticketing*. Dalam *risk register integrasi balance scorecard* dan *enterprise risk management* yang dijalankan oleh PT PELNI (Persero) telah menyerap konteks eksternal VUCA tersebut yaitu sebagai contoh pada risk register angkutan penumpang terdapat :

a. *Risk cause* aplikasi tiket modern channel belum dikenal luas;
b. *Key risk indicator* : *percentage* penumpang yang menggunakan aplikasi tiket modern channel;

Our business model must adapt to rapid development of community's lifestyle trends, including how PT PELNI (Persero) provides services for the customers through modern channel ticketing. In integrated risk register of balance scorecard and enterprise risk management applied by PT PELNI (Persero) has mitigated with the VUCA external contexts as example risk register of passenger ships consisting of:

a. Risk cause of modern channel ticketing application is not widely known
b. Key risk indicator : percentage of passengers using modern channel ticketing;

Layanan bisnis yang berkarakter konvensional semakin lama akan ditinggalkan oleh customer apabila tidak mampu mengikuti perubahan kebiasaan masyarakat. Tetapi PT PELNI (Persero) telah memperhitungkan risiko tersebut dengan menetapkan dalam *risk register* angkutan penumpang.

Conventional business services are no longer used by the customers if we can adapt to the changes of social behaviour. Instead, PT PELNI (Persero) has calculated these risks into the risk register of passenger ships.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

3. **Mengetahui sumber daya yang dimiliki secara jelas;**
   Perusahaan harus mengetahui sumber daya apa saja yang ia miliki dalam mencapai tujuannya. Perusahaan yang mengerti sumber daya apa yang ia miliki maka perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan perusahaan.

   Dalam *risk register* integrasi *balance scorecard* dan *enterprises risk management* dapat ditemukenali beberapa *resources* yang dimiliki perusahaan sekaligus mengetahui sampai sejauh mana *progress* yang diperoleh pada saat pembahasan *risk register* tersebut. Contoh pada *risk register* Direktorat UAB terdapat *risk event* aplikasi *system logistic* dengan *key risk indicator*-nya adalah *percentaged delay system* aplikasi sehingga dapat diketahui kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis P.4 Mengembangkan bisnis *logistic & trading*.

4. **Perusahaan harus mampu melakukan rekonsiliasi antara sumber daya yang dimiliki dengan memenuhi permintaan pasar (*market requirement*) serta melakukan manajemen eksekusi strategi dengan tepat.**
   Sebagai gambaran adalah portfolio angkutan barang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan perusahaan dan mampu tumbuh pangsa pasar maupun pendapatan muatan (tambang).

   Oleh karena itu, beberapa indikator yang ditetapkan dalam *strategy map* PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut :
   a. Perspektif keuangan indikatornya adalah *percentaged* pertumbuhan pendapatan tambang;
   b. Perspektif *customer* indikatornya adalah pertumbuhan *market share* angkutan barang;

3. **Acknowledging the owned resources**
   The Company shall know what resources we own to achieve the purposes. Which the Company conceives what the resources owned will know the weakness and strength of the Company.

   In the integrated risk register of balance score cards and risk management enterprises can be identified several resources owned by the company and knowing the progress at the time of the risk register discussed. An example in the UAB Directorate has risk event application of logistic system with key risk indicator that is percentage delay system application so it can be known its contribution to the achieve P.4 strategic objectives of developing logistic & trading business.

4. **The company must be able to reconcile between its resources by fulfilling market demands and proper strategy management execution.**

   As an illustration, the freight transportation portfolio is expected to provide an optimal contribution to the company's revenue and be able to grow market shares and cargo revenues (mining).

   Therefore, some of the indicators set out in the strategy map of PT PELNI (Persero) as follows:

   a. The financial perspective indicator is percentage of mining revenue growth;

   b. The customer perspective indicator is the growth of the freight transport market share;

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

c. Perspektif *internal business process* indikatornya adalah meningkatkan penjualan dari angkutan barang & mengembangkan bisnis *logistic* dan *trading* oleh anak perusahaan.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kenaikan pendapatan tambang (di luar pendapatan subsidi) di kapal penumpang maupun kapal tol laut.

c. The internal business process perspective indicator is to increase sales of cargo transport and develop logistics & trading business of subsidiaries.

These indicators are used to measure the level of increase in mining revenues (excluding subsidized income) for passenger ships and Tol Laut vessels.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PT PELNI (PERSERO) TAHUN 2020

Beberapa gambaran kondisi perusahaan dalam perspektif manajemen risiko sebagai berikut :

Perusahaan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini lingkungan bisnisnya akan mampu memenuhi permintaan pasar *(market requirement)* serta melakukan manajemen eksekusi strategi dengan tepat. Oleh karena itu pada Tahun 2020 *risk assessment based on integrated balance scorecard* tetap dilakukan tetapi juga dilakukan penilaian risiko lain yang sangat berdampak signifikan terhadap perusahaan pada saat ini dan di masa depan.

Sesuai dengan kerangka kerja (*framework*) metodologi ISO 31000 maka diperoleh beberapa jenis risiko yang dapat dikategorikan sebagai risiko yang cukup signifikan dampaknya bagi perusahaan dimasa yang akan datang sebagai *Corporate Risk* PT PELNI (Persero).

Corporate Risk merupakan risiko perusahaan di luar risiko-risiko yang terintegrasi dengan sasaran strategis perusahaan *(strategic objective) based on balance scorecard* namun memiliki dampak yang cukup siginfikan bagi Perusahaan di masa depan. Kerangka kerja risk assessment tetap menggunakan *format risk register* yang telah baku dan selama ini digunakan dalam pengelolaan risiko perusahaan.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT OF PT PELNI (PERSERO) IN 2020

Some conditions of the Company from risk management perspective are as follows:

Companies who can adopt to their latest business industry situation led to answer market requirement as well as execute the decent management strategies. In 2020, risk assessment based on integrated balance scorecard keep applied while focusing on other risk assessment which have significant impact for today and in the future business.

Based on ISO:31000 framework methodology comprise of some categories that has significant impact on PT PELNI (Persero) to be the Corporate Risk for the years to come.

Corporate Risk is the Company's risks beyond the risks that integated to strategic objectives based on balance scorecard but these risks may have significant impact on the Company in the future. Risk assessment framework keep using standard risk register format that has been used for risk management of the Company so far.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Namun pada *corporate risk* ini, metode analisis risiko yang digunakan adalah metode analisis kualitatif atau metode yang didasarkan pada suatu keahlian *subject matter expert (SME) risk management* pada departemen *risk management*, pengetahuan atau pengalaman dari para *risk owner* dan informasi dari para *risk performance management officer* selaku *risk champion* di divisi masing-masing sehingga data yang digunakan lebih bersifat tidak dalam bentuk terukur, melainkan suatu pernyataan atau gambaran karena presisi kuantitatif tidak diperlukan dan digunakan untuk pemeriksaan awal sebelum diputuskan apakah perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam lagi.

Analysis method used in this corporate risks is qualitative analysis method based on subject matter expert (SME) of risk management, knowledge or experience from risk owners and information from risk performance management officer as a risk champion at each division. So the data is most likely unmeasurable, but the statements and overview of the risks from quantitative presision are no needed and can be used for the initial measurement that the risk need more deeply analysis or not.

Proses analisis risiko seringkali dimulai dengan pendekatan metode kualitatif sederhana untuk memberikan pemahaman umum terlebih dahulu karena yang terpenting adalah kesesuaian pendekatan analisis dengan kebutuhan berdasarkan situasi yang berkembang saat ini.

The risk analysis process is often started using a simple qualitative method to provide common understanding at first because the most important case is suitable analysis approach to the dinamic today's business situation.

Oleh karena itu pada *corporate risk* lebih diutamakan pendekatan yang menggambarkan kondisi riil tanpa dilakukan analisis dampak secara kuantitatif agar dapat diketahui dampak secara umum bagi Perusahaan. Contoh pada corporate risk No: 8 yaitu risiko Ketentuan penggunaan BBM B30 pada tahun 2020, apabila menggunakan metode kuantitatif harus dilakukan analisis mendalam yang terukur seberapa besar dampak penggunaannya pada kapal-kapal PT PELNI (Persero).

The corporate risk focuses on the real condition approach to business situation without qualitative analysis to be known what the general impact for the Company. For example, corporate risk No:8 is use of B30 Fuels in 2020, if using qualitative method must have deep measurable analysis how is the impact of that use of fuels for the ships of PT PELNI (Persero).

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA TAHUN 2020
Types of Risk and the Management in 2020

No	*Top Risk* Top Risk	Periode Period	Mitigasi Mitigation
1	Kepastian Atas Keberlangsungan Kegiatan Seluruh Usaha PT PELNI (Persero) Assurance of All Businesses Activities' Sustainability of PT PELNI (Persero)	Triwulan I 1st Quarter	• Melakukan kontrol yang ketat atas pelaksanaan kegiatan usaha, utamanya dengan melihat *cost and benefit analysis* Doing strict control over the implementation of business activities, mainly by looking at cost and benefit analysis. • Melakukan reviu terhadap rencana operasi atas setiap kapal, hitung *cost and benefit analysis* secara ketat atas rencana operasi setiap kapal Review the operation plan of each ship, calculate cost and benefit analysis strictly on the operating plan on every ship • Pemberlakuan SOP *Business Continuity Plan* Implementation of Business Continuity Plan SOP

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No	*Top Risk* Top Risk	Periode Period	Mitigasi Mitigation
2	Adanya Kemungkinan Dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Beberapa Pegawai PT PELNI (Persero) There is a possibility to terminate some employees of PT PELNI (Persero)	Triwulan I 1st Quarter	• Melakukan berbagai efisiensi di berbagai bidang sebagai upaya awal untuk menekan beban usaha Perform efficiencies in various fields as an effort to reduce business expenses • Meninjau kembali rencana rekruitmen, baik untuk Kantor Pusat, Cabang maupun awak kapal. Reviewing recruitment plans, for the Head Office, Branch Office or crew. • Dengan melakukan efisiensi anggaran, salah satunya dengan beberapa biaya yang bisa diefisiensikan dengan pemberlakuan *Work From Home* di antaranya biaya penggunaan listrik dan air, biaya perjalanan dinas, biaya diklat dan pelatihan, biaya kendaraan dinas, biaya rumah tangga kantor, dan lain-lain. By making budget efficiency, one of them is implementation of Work From Home, can reduce the cost of electricity and water, official travel expenses, training fees, office vehicle costs, household expenses, and others.
3	Kesiapan Perusahaan Menghadapi *New Normal Life* dalam Menjalankan Proses Bisnis The Company's readiness in facing the New Normal Life is a must for Business Processes	Triwulan II 2nd Quarter	• Pembentukan Tim *Task Force* guna memastikan penerapan protokol *New Normal Life* telah dilaksanakan secara konsisten Forming a Task Force Team to ensure the New Normal Life protocol has been implemented consistently • Digitalisasi proses bisnis guna meminimalisir pelaksanaan proses bisnis secara manual Business processes digitalization to minimize the implementation of the business process manually
4	Penggunaan Anggaran Perusahaan dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Di PT PELNI (Persero) The use of Company's Budget in Prevention of Spread Covid-19 Virus at PT PELNI (Persero)	Triwulan II 2nd Quarter	• Evaluasi penggunaan anggaran perusahaan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 dilakukan setiap bulan Evaluate the use of company budgets to prevent the spread of the Covid-19 virus is done monthly • Pelaksanaan *risk-based audit* oleh Satuan Pengawas *Intern* PT PELNI (Persero) Implementation of risk-based audit by Internal Supervisory Unit PT PELNI (Persero)
5	Risiko Penyebaran Virus Covid-19 di Lingkungan PT PELNI (Persero) Yang Berdampak pada Kegiatan Operasional Perusahaan Risk of Covid-19 virus spread in the Environment of PT PELNI (Persero) which has an impact on Company Operations activities	Triwulan III 3rd Quarter	• Sosialisasi dan penerapan protokol *new normal life*/adaptasi kebiasaan baru secara konsisten Socialization and implementation of new normal life protocols/adaptation to new habits consistently • Pengenaan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar protokol new normal life/adaptasi kebiasaan baru The imposition of disciplinary penalties for employees who violate new normal life protocol/adaptation of new habits • Evaluasi terhadap sistem shifting work from home Evaluation to shifting work from home system • Melakukan sterilisasi ruangan-ruangan dengan penyemprotan cairan disinfektan Sterilize the rooms with spraying disinfectant liquid • Pengawasan/*monitoring* terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tenaga kebersihan (*cleaning service* dan janitor) khususnya dalam menjaga kebersihan fasilitas bersama yang rentan akan penyebaran virus Covid-19 seperti lift, toilet, dan perangkat kerja Supervision/monitoring of tasks and responsibilities of cleaning personnel (cleaning service and janitor) especially in maintaining the cleanliness of shared facilities that susceptible to the spread of the Covid-19 virus such as elevators, toilets, and work device
6	Risiko Kinerja Produksi, Operasional dan Keuangan Perusahaan di Masa Pandemi Covid-19 Production Performance Risks, Operational and Companies Financial during Covid-19 pandemics	Triwulan III 3rd Quarter	• Melakukan revisi RKAP Conduct RKAP Revision • Memaksimalkan tenaga-tenaga sales yang dimiliki Perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia Maximize the sales power owned by the Company spread across several regions in Indonesia • Meningkatkan efisiensi Increase efficiency

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No	*Top Risk* Top Risk	Periode Period	Mitigasi Mitigation
7	Persiapan Kehandalan Kapal dalam Menghadapi Natal & Tahun Baru di Masa Pandemi Preparation of Ship Reliability facing Christmas & New Year during Pandemic	Triwulan IV 4th Quarter	• Sosialisasi terkait penerapan protokol pencegahan dan penanganan covid-19 secara berkala kepada ABK Socialization related to the implementation of prevention protocols and handling of covid-19 periodically to Crew • Penyiapan APD, obat-obatan dan ruang isolasi di kapal Preparation of PPE, drugs and isolation rooms on board • Pelaksanaan perawatan permesinan secara berkala Implementation of machinery maintenance periodically • Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kapal sesuai ketentuan yang berlaku Fulfillment of ship equipment in accordance with the applicable conditions • Memastikan validitas sertifikasi dan dokumen kapal Ensuring the validity of certifications and ship documents • Pelaksanaan running repair dan emergency docking Conduct running repair and emergency docking
8	Pagu Anggaran Dengan Realisasi dalam Pencairan Dana PSO/ Subsidi Budget Ceilings with Realization in Disbursement of PSO Funds/ Subsidy	Triwulan IV 4th Quarter	• Perhitungan estimasi biaya secara cermat dan detail Careful and detailed calculation of cost estimates • Melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran Billing against underpayment • Meningkatkan intensitas komunikasi dengan pihak terkait Increase the intensity of communication with relevant parties • Meningkatkan akurasi data dan kelengkapan dokumen tagihan Improve data accuracy and completeness of billing documents • Memangkas birokrasi yang mengakibatkan proses pencairan menjadi lama Cutting bureaucracy that results in the disbursement taking long time in the process

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dalam implementasinya, manajemen risiko berbasis kualitatif secara empiris banyak menyebabkan bias. Dalam hal ini, unit manajemen risiko melakukan diskusi dan penilaian bersama dengan pemilik risiko untuk mendapatkan profil risiko kuantitatif yang lebih akurat.

Untuk jangka panjang, manajemen risiko dengan pendekatan kesadaran dan budaya risiko jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan dengan cara lain. Keberhasilan dalam menjalin komunikasi antara semua unit terkait, kesadaran adanya risiko dan fokus terhadap rencana penanganan risiko menjadi barometer adalam membangun budaya risiko.

EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT OVERVIEW

In its implementation, empirically qualitative risk management causes a lot of bias. In this case, the risk management unit discuss and assess with risk owners to obtain a more accurate quantitative risk profile.

Risk management with full of awareness and risk culture approaches is more effective to apply for the long term than other approaches. The success of building communication with all related units, awareness of risk and focusing on risk management plans are barometers to build a risk culture.

ETIKA BISNIS
BUSINESS ETHICS

PEDOMAN PERILAKU

Perseroan menyusun Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan. Pedoman Perilaku berlaku bagi seluruh Insan PELNI di seluruh tingkat organisasi. Pedomam Perilaku PT PELNI (Persero) telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 12.29/01/SK.HKO.01/2016 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

ISI PEDOMAN PERILAKU

Perseroan dengan konsisten mengaitkan *Code of Conduct* dengan nilai-nilai utama Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

I. Pendahuluan
II. Pedoman Etika
- A. Standar Hubungan dengan Stakeholders
  1. Hubungan dengan Pemegang Saham
  2. Hubungan dengan Pegawai
  3. Hubungan dengan Pelanggan
  4. Hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa
  5. Hubungan dengan Mitra Kerja
  6. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan
  7. Hubungan dengan Kreditor
  8. Hubungan dengan Pemerintah
  9. Hubungan dengan *Principal* Kapal Keagenan
  10. Hubungan dengan Media Massa
  11. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundang-Undangan
  12. Persaingan Usaha

- B. Standar Etika Pengelolaan Perusahaan
  1. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan
  2. Penggunaan Aset Perusahaan
  3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
  4. Pengelolaan Anak Perusahaan

CODE OF CONDUCT

The Company formulates Code of Conducts for the conduct manual of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees. The Code of Conducts prevails for all PELNI People in all organization levels. PT PELNI (Persero) Code of Conducts has been updated and validated under Board of Directors' Letter of Decision No. 12.29/01/SK/HKO.01/2016 regarding Code of Conducts within PT PELNI (Persero) environment.

CONTENT OF CODE OF CONDUCT

The Company consistently matched the Code of Conducts with the Company's core values, which is as follows:

I. Introduction
II. Code of Ethics
- A. Accustomed Relationship with the Stakeholders
  1. Relationship with Shareholders
  2. Relationship with Employees
  3. Relationship with Customers
  4. Relationship with Suppliers and Goods and Services Providers
  5. Relationship with Work Partners
  6. Relationship with the Community and the Environment
  7. Relationship with Creditors
  8. Relationship with Goverment
  9. Relationship with Principal Ship Agency
  10. Relationship with Mass Media
  11. Compliance with Laws and Regulations
  12. Business competition

- B. Corporate Management Ethics Standards
  1. Accounting and Financial Policies
  2. Use of Company Assets
  3. Health, Safety and the Environment
  4. Management of Subsidiaries

ETIKA BISNIS
BUSINESS ETHICS

III. Pedoman Kerja:

A. Nilai-Nilai Luhur Perusahaan
B. Menjaga Citra Perusahaan
C. Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan
   1. Integritas
   2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
   3. Kerahasiaan Informasi
   4. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi
   5. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan
   6. Penggunaan Komunikasi Elektronik
   7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Masyarakat
   8. Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Alkohol.
   9. Keterlibatan dalam Aktivitas Politik.
D. Benturan Kepentingan
   1. Menghindari Benturan Kepentingan
   2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Pegawai
   3. Kegiatan di Luar Perusahaan
   4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan teman
   5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan Bisnis/Hiburan dan lainnya.
E. Hubungan Kerja
   1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan.
   2. Kerjasama Atasan dan Bawahan.
F. Hubungan Dengan Konsumen
   1. Pelayanan Kepada Konsumen
   2. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif
G. Perlakuan Terhadap Mitra Bisnis
H. Perlakuan Terhadap Pesaing
I. Hubungan Dengan Pemerintah
   1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan/Peraturan Terkait
   2. Pola Hubungan dan Komunikasi

III. Work Guidelines:

A. The Company's Values
B. Maintain Company Image
C. Responsibility to the Company
   1. Integrity
   2. Compliance with Laws and Regulations
   3. Information Confidentiality
   4. Data Recording, Reporting and Documentation
   5. Protection and Use of Company Assets
   6. Use of Electronic Communication
   7. Occupational Health and Safety, Environment and Society
   8. Drug and alcohol abuse.
   9. Involvement in Political Activities.
D. Conflict of Interest
   1. Avoiding Conflicts of Interest
   2. Investment and Employee Private Share Ownership
   3. Activities Outside the Company
   4. Treatment of family and friends
   5. Giving and Receiving Bribes, Gifts, Business/Entertainment Entertainment and others.
E. Work relationship
   1. Work Environment Free from Discrimination, Harassment, Actions of Immoral, Threats and Violence.
   2. Cooperation between Superiors and Subordinates.
F. Relations with Consumers
   1. Services to Consumers
   2. Fair and non-discriminatory treatment
G. Treatment of Business Partners
H. Treatment of Competitors
I. Relations with the Government
   1. Compliance With Related Provisions/ Regulations
   2. Relationship and Communication Patterns

ETIKA BISNIS
BUSINESS ETHICS

J. Hubungan Dengan Masyarakat
   1. Pelayanan Masyarakat
   2. Pemberian Donasi
   3. Kesadaran akan Lingkungan Alam

IV. Penerapan Pedoman Perilaku, mencakup:
   A. Sosialisasi Pedoman Perilaku.
   B. Pernyataan Kepatuhan INSAN PELNI.
   C. Saluran Pengaduan Masalah.
   D. Sanksi Pelanggaran Pedoman Perilaku.

PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Implementasi *Code of Conduct* dilaksanakan oleh seluruh Insan PELNI. Untuk itu, Perseroan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi untuk memastikan *Code of Conduct* diketahui dan dijalankan oleh seluruh Insan Perusahaan. Pedoman GCG dan *Code of Conduct* telah di-*upload* pada website PELNI www.pelni.co.id dan dapat diunduh secara langsung. Seluruh Insan PELNI diharuskan untuk membaca dan memahami dengan baik Pedoman Perilaku Perusahaan serta wajib secara berkala setiap tahunnya untuk menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen atas kepatuhan tersebut.

Bagi setiap Insan Perseroan yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar *Code of Conduct* harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi. Perusahaan akan melindungi kerahasiaan setiap Insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan untuk menegakkan *Code of Conduct* Perusahaan. Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah.

J. Community Relations
   1. Community Service
   2. Donations
   3. Awareness of the Natural Environment

IV. Application of the Code of Conduct, including:
   A. Socialization of the Code of Conduct.
   B. INSAN PELNI Compliance Statement.
   C. Problem Complaint Channel.
   D. Customer Sanctions Code of Conduct.

APPLICATION AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct implemented by all PELNI People. Therefore, the Company has socialization and internalization to ensure that the Code of Conduct is acknowledged and implemented by all Company People. The Code of GCG and Code of Conduct have been uploaded on the PELNI website www.pelni.co.id and can be downloaded directly. All PELNI People are required to read and understand the Code of Conduct properly and annually sign the Statement of Compliance as a manifestation of their commitment.

For every Company's People who know the potential situation against the Code of Conduct must immediately report to the superior or higher position in written text, including the identity of the reporter with full and accountable evidence and it does not indicate the libel and personal interests. The Company will protect the confidentiality of any PELNI people who reported the violation and will follow up immediately unless the report is incorrect/misleading, the complainant may be subjected with the sanctions in accordance with applicable regulations. The sanction of the Code of Conduct violation is aimed to enforce the Company's Code of Conduct. The Company's People who have proven violated the Code of Conduct shall be punished. The sanction could be regulated through a separate law regulation in accordance with government regulations.

ETIKA BISNIS
BUSINESS ETHICS

SOSIALISASI CODE OF CONDUCT

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Perusahaan, karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam terciptanya insan PELNI yang berperilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Pedoman Perilaku dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai yaitu antara lain melalui penandatanganan Pakta Integritas yang memuat komitmen pelaksanaan Pedoman Perilaku.

Dalam ketentuan Bab IV mengenai sosialisasi *Code of Conduct,* disebutkan bahwa seluruh Insan PELNI harus membaca dan memahami dengan baik isi Buku Pedoman dan bertanggung jawab untuk menaatinya. Direktorat SDM dan Umum berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan PELNI dengan menyampaikan daftar baca. Setiap Insan PELNI dapat meminta penjelasan dari atasan langsung apabila kurang memahami kebijakan Pedoman Perilaku.

KEBIJAKAN PENEGAKKAN DISIPLIN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Seluruh insan PELNI wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen untuk memenuhi Pedoman Perilaku. Pedoman Penandatanganan Surat Kepatuhan Pedoman perilaku dilakukan secara berkala setiap tahun. Direktorat SDM dan Umum mendokumentasikan Surat Pernyataan Kepatuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Perilaku Perseroan.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dijabarkan dalan Bab IV, yaitu dilakukan untuk menegakkan Pedoman Perilaku Perseroan. Setiap Insan PELNI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai Peraturan Perseroan.

CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION

The Company always socializes the Company's Code of Conduct, considering the socialization as an important step in creation of PELNI People behaving the Corporate Culture into their attitude. The Code of Conduct is communicated and socialized with the Board of Commissioners and its supporting organs, the Board of Directors and the one-level executives under the Board of Directors and all employees by signing of the Integrity Pact which contains the commitment of the Code of Conducts implementation.

In the provisions of Chapter IV on the socialization of the Code of Conduct mentioned that all PELNI people must well read and understand the contents of the Manual Book and be responsible for obeying it. The Directorate of Human Resources and General Affairs is obliged to socialize the Code of Conduct to all PELNI People by submitting the reading list. PELNI People can ask an explanation from their supervisor if he/she is not familiar with the Code of Conduct policy.

DISCIPLINE POLICY AND VIOLATION MANAGEMENT

All PELNI People require to sign the Statement of Compliance as the commitment to meet the Code of Conduct. This signing of Compliance Behavioral guidelines conducted periodically every year. The Directorate of Human Resources and the General Affairs records this Statement of compliance as an integral part of the Company's Code of Conduct.

Punishment for any violations against the Code of Conduct outlined in Chapter IV, which is to enforce the Company's Code of Conduct. Every PELNI People who proven violating the Code of Conduct will be punished. The granting of sanctions shall be governed by a separate regulation as stipulated in the Company's Regulations.

ETIKA BISNIS
BUSINESS ETHICS

Setiap insan PELNI yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar Pedoman Perilaku harus segera melaporkan kepada atasan langsung atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi. Pelaporan pelanggaran juga dapat dilakukan melalui mekanisme *whistleblowing system* (WBS) dan email: upg@pelni.co.id.

Every PELNI People who know any situation that is believed to have the potential of violation against the Code of Conduct shall promptly report to a superior or a higher leader in written form, including the identity of the complainant based on the basis of complete and accountable evidence and not containing any slander and personal

Perseroan akan melindungi kerahasiaan setiap insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya, kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

The Company will protect the confidentiality of any PELNI People who reported the violation and will follow up immediately, unless the report is incorrect/ misleading and the complainant may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ETIKA PERUSAHAAN

Evaluasi terhadap penerapan Pedoman Perilaku dilakukan secara berkala kepada Insan PELNI. Berdasarkan Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan rasa kepemilikan dari setiap Insan PELNI serta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan karyawan secara konsisten. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Perilaku akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan.

EFFECTIVENESS EVALUATION OF CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION

Evaluation of the Code of Conduct implementation is done periodically to the PELNI People. Based on this evaluation is expected to encourage and increase the sense of ownership of every PELNI people and to improve the competence and ability of employees consistently. As a dynamic guideline, the Code of Conducts is reviewed periodically and continuously.

JUMLAH PELANGGARAN ETIKA PERUSAHAAN TAHUN 2020

Pada tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran etika Perusahaan dan tidak ada sanksi yang diberikan untuk pelanggaran etika Perusahaan.

NUMBER OF THE COMPANY'S ETHICAL VIOLATION IN 2020

In 2020, there was no the Company's ethical violation and no sanction given for the Company's ethical violation.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN
IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN ENTITAS ANAK

Per 31 Desember 2020, Perseroan mencatat beberapa perkara penting yang melibatkan Perseroan, antara lain:

IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY AND SUBSIDIARIES

As of 31 December 2020, The Company recorded some important cases involving the Company as follows:

PERKARA PERDATA
Civil Law

No	Para Pihak The Parties		Nomor Perkara Case Number	Objek Perkara Case Objects	*Progress* Progress	Status Status	Dampak Impact
	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant					
1	**Menteri BUMN** Ministry of SOE	1. **Hasan Ismail** (Termohon PK I) Defendant I 2. **PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)** (Termohon PK II) Defendant II 3. **Negara Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional** Republic of Indonesia cq Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Termohon PK III) Defendant III 4. **Negara Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta cq Kantor Pertanahan Jakarta Pusat** Republic of Indonesia cq Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency cq Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency Jakarta Office Area cq Central Jakarta Land Office (Turut Termohon PK IV) Defendant IV	**705 K/ Pdt/2018 jo. 110/Pdt/ Plw/2015/ PN.Jkt.Pst**	Aset di Jalan Angkasa Nomor 18 Kemayoran Asset on Angkasa Street Number 18, Kemayoran	1. PN, PT, Kasasi MA, PK (Pokok Perkara) **Kalah** District Court, High of Court, Cassation, (Statement of Claim) **Lose** 2. PN, PT, Kasasi MA District Court, High of Court, Cassation (Derden Verzet) **Kalah** **Lose** 3. Pihak Menteri BUMN sudah menyatakan PK di PN Jakarta Pusat sekaligus menyampaikan Memori PK Oleh Menteri BUMN pada tanggal 27 Mei 2019 The Ministry of SOE has stated the statement of claim in the Central Jakarta District Court at the same time conveying the Memory of Statement of Claim by the Ministry of SOE on May 27, 2019 4. Penyampaian Kontra Memori PK oleh PT PELNI (Persero) pada tanggal 9 Juli 2019 sebagai termohon PK II. Submission of the Memory Counter of Statement of Claim by PT PELNI (Persero) on July 9, 2019 as Defendant II.	PK dimenangkan Menteri BUMN sesuai Putusan Nomor: 42PK/ PDT/2020 Minister of SOEs won PK (Juridical Review) in accordance with Verdict Number: 42PK/PDT/2020	1. Preseden bagi BUMN lain karena terkait *Legal Standing* Menteri BUMN dalam perkara ini ditolak Majelis Hakim, "menyatakan Pelawan (Menteri BUMN) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan ini." Precedent for other SOEs because it's related to Minister of SOEs Legal Standing in this matters was rejected by The Judge, "Declaring Contrarian (Minister BUMN) doesn't have Legal position (legal standing) to ask for This Resistance." 2. Aset di Jl. Angkasa Nomor 18 Kemayoran Jakarta Pusat dapat mulai dioptimalkan Assets at Angkasa street, Number 18 Kemayoran, Central Jakarta can start to be optimized

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY

No	Para Pihak The Parties		Nomor Perkara Case Number	Objek Perkara Case Objects	*Progress* Progress	Status Status	Dampak Impact
	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant					
2	**PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)** (Pemohon Kasasi) Applicant of Cassation	1. **Daeng Abdul Karim bin Lambeng alias Abdul Karim Bilambeng** (Termohon Kasasi) Defendant of Cassation 2. **Kepala Kanwil BPN Sulawesi Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar** Head of South Sulawesi Land Office cq. Head of Makassar Land Office (Termohon Kasasi) Defendant of Cassation 3. **PT Djakarta Lloyd (Persero)** (Turut Termohon Kasasi) Defendant of Cassation	3517 K/ Pdt/2018 jo. 324/ Pdt.G/2012/ PN.Mks	Aset Milik PT PELNI (Persero) di Jalan Sudirman Nomor 14/14A Makassar Asset owned by PT PELNI (Persero) at Sudirman Street, Number 14/14A, Makassar	PN, PT **Menang** Eksepsi Kasasi **Kalah** PN,PT **Kalah** Pokok Perkara **Menang** tingkat Kasasi MA, PK **Menang** District Court, High Court Won Exception on Cassation Lost District Court, High Court Loses Main Case Won Supreme Court Cassation, Review Won	PK dimenangkan PT PELNI (Persero) sebagaimana informasi pada Website kepaniteraan mahkamahagung go.id Nomor Register 576PK/ PDT/2020, dengan pemohon Daeng Abdul Karim bin Lambeng telah diputus dengan amar Putusan Tolak. The review was won by PT PELNI (Persero) according to the information on the court's website mahkamahagung. go.id with Register Number 576PK/ PDT/2020, who the applicant Daeng Abdul Karim bin Lambeng has been being dismissed with a Rejection Decision.	1. PT PELNI (Persero) tidak bisa memproses perpanjangan sertifikat Jl. Sudirman Nomor 14/14A Makassar karena masih dalam tahap perkara PT PELNI (Persero) cannot process the asset's certificate extension at Sudirman Street, Number 14/14A Makassar because of still in the case stage 2. Kredibilitas kepemilikan PT PELNI (Persero) diragukan oleh Calon Mitra yang tertarik untuk bekerjasama dengan PT PELNI (Persero) The ownership credibility of PT PELNI (Persero) is doubtful by Prospective Partners who are interested in working with PT PELNI (Persero)

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN
IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY

PERKARA PIDANA
Criminal Law

No	Terlapor Reported	Perkara Case	Nomor Perkara Case Number	Status Perkara Case Status
1	Hasan Ismail	Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat terkait aset milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jalan Angkasa Nomor 18 Kemayoran di Mabes Bareskrim Polri Alleged Criminal Acts on Falsification of mail related to assets owned by PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) on Angkasa Street Number 18 Kemayoran in Mabes Bareskrim Polri	LP/B/824/VII/2018/ BARESKRIM	Status perkara telah ditingkatkan dari Penyelidikan menjadi Penyidikan sebagaimana Surat Polisi Nomor: B/246/III/2020/Dittipidum tanggal 4 Maret 2020 The case status has been intensified from Inspection to Investigation according to the Police Letter Number: B/246/III/2020/ Dittipidum dated 4 March 2020
2	Abdul Karim bin Lambeng	Dugaan Tindak Pidana pemalsuan Akta Kematian yang tidak tercatat di catatan sipil terkait aset milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jalan Sudirman Nomor 14/14 A di Polda Sulawesi Selatan Makassar Alleged Criminal Acts on Falsification of the Death Certificate not recorded in civil records related to assets belonging to PT Pelayaran Indonesian National (Persero) in Sudirman Street Number 14/14 A in Polda South Sulawesi Makassar	LPB/154/IV/2018/ SPKT	Putusan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: 362/ PID/2020/PT MKS menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1541/ Pid.B/2019/PN.Mks bahwa Terdakwa Daeng Abdul Karim Bin Lambeng terbukti bersalah dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan. The decision at the Appeal level at the South Sulawesi High Court Number: 362/PID/2020/ PT MKS confirmed the decision Makassar District Court Number: 1541/Pid.B/2019/ PN.Mks that the Defendant Daeng Abdul Karim Bin Lambeng was proven guilty with a prison sentence of 4 (four) months.
3	Sulaiman Sia (eks pegawai PT PELNI (Persero))	Dugaan Tindak Pidana pemalsuan Surat dengan Laporan di Polda Sulawesi Selatan Makassar Alleged Criminal Acts on Falsification of letters with Report in Sulawesi Police South of Makassar	LP-B/400/XI/2019/ SPKT POLDA SUL-SEL	Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.B/2020/PN.MKS yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan Makassar District Court Decision Number 635/ Pid.B/2020/PN.MKS, sentenced the defendant to prison for 3 year and 6 months
4	PT PELNI (Persero)	Laporan Polisi atas Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Tg Perak Surabaya Police Report on Allegations Criminal Acts of Persecution in Polres Tg Perak Surabaya	LPB/007/I/2020/ JATIM/RES PEL TG PRK	Perkara ini dihentikan oleh Polres Tg Perak Surabaya karena belum ditemukannya peristiwa tindak Pidana. This was stopped by Tg. Perak Police Surabaya because it has not been proofed as a criminal act.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2020

Selama periode tahun 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2020

Selama periode tahun 2020, Perseroan tidak menerima sanksi administrasi baik yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi baik oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, Bursa Efek Indonesia maupun otoritas lainnya yang terkait dengan Perseroan.

LEGAL CASES FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN 2020

Throughout 2020, there were no active members of the Board of Directors and Board of Commissioners who were involved in law cases either civil or criminal cases.

ADMINISTRATIVE SANCTION IN 2020

Throughout 2020, the Company did not have any administrative sanction for the Company, Board of Commissioners or Directors members from Ministry of SOEs as Shareholder, Indonesia Stock Exchange or other authorities, which has authorization in the Company.



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO CORPORATE DATA AND INFORMATION

PT PELNI (Persero) secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perusahaan kepada para stakeholders agar mengetahui kondisi Perusahaan secara jelas dan terbuka. PT PELNI (Persero) memiliki berbagai sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, di antaranya sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) regularly updates its information and provides the access to information regarding the Company's activities and performance for Stakeholders who want to know the Company's condition clearly and openly. PT PELNI (Persero) has various facilities provided for the channels of information disclosure, as follows:

Media Media	Keterangan Description
Email: info.corporate@pelni.co.id infopelni162@pelni.co.id	• Email info.corporate@pelni.co.id dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi seputar kebijakan (contoh Surat Keputusan Direksi) kepada seluruh pegawai. Email info.corporate@pelni.co.id be used to disseminate information about the policy (eg Decree of the Board) to all employees. • Email infopelni162@pelni.co.id dimanfaatkan untuk penyampaian keluhan pelanggan. Email infopelni162@pelni.co.id be used for customer complaints media.
Website: www.pelni.co.id	Biro Teknologi dan Informasi bertindak sebagai admin, dengan penyuplai konten dari tiap divisi yang berkepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk konten Berita & Informasi. Technology and Information Bureau acts as admin, with suppliers of content from each division concerned. The Corporate Secretary is responsible for the content of News & Information.
Portal BUMN SOE's Portal	Website yang dikelola Kementerian BUMN yang menyediakan laman untuk tiap-tiap BUMN. Diperbaharui setiap kali Perusahaan memiliki informasi yang layak diketahui oleh publik. Website is managed by the Ministry of SOEs that provides a page for each SOE. Updated whenever the Company has adequate information known to the public.
Media Internal Internal Media	Majalah Camar dengan 62 halaman diterbitkan secara berkala. Memuat informasi tentang peristiwa Perusahaan yang disebarkan ke kantor pusat, cabang dan kapal. Camar magazine with 62 pages is published periodically. Contains information about events which are propagated to the company's head office, branches and boats.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO CORPORATE DATA AND INFORMATION

PT PELNI (Persero) juga menyediakan akses informasi lain bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi relevan mengenai berita dan kinerja Perseroan, melalui media, sebagai berikut:

Call Center	: 162/ 021 162
e-Mail	: infopelni162@pelni.co.id
Website	: www.pelni.co.id
SMS Masking	: Pelni162
Facebook	: pelni162
Twitter	: @pelni162
Instagram	: pelni162

PT PELNI (Persero) also provides other information access for the Shareholders and Stakeholders to obtain relevant information about the Company's news and performance, channeling media as follows:

Call Center	: 162/ 021 162
e-Mail	: infopelni162@pelni.co.id
Website	: www.pelni.co.id
SMS Masking	: Pelni162
Facebook	: pelni162
Twitter	: @pelni162
Instagram	: pelni162



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan PT PELNI (Persero).

The Whistleblowing System is a system for processing complaints/information submitted directly or indirectly connecting with actions against the law, regulations/ standards, codes of ethics and policies, and other similar actions of direct threats to the public interest, and Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) that occurred in PT PELNI (Persero) environment.

Landasan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PT PELNI (Persero) merujuk pada SK Pedoman WBS No 12.29/04/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) PT PELNI (Persero). Merujuk pada pedoman tersebut, implementasi WBS di PT PELNI (Persero) bertujuan untuk membangun, menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) agar berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan standar etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terdeteksi secara dini (*early warning system*) dan dapat mengurangi/meminimalisir risiko yang dihadapi oleh Perseroan akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi yang berdampak pada pengurangan biaya (*cost reduction*) dalam mengelola akibat dari terjadinya suatu pelanggaran.

Policy Basis for Violation Reporting System at PT PELNI (Persero) refers to Letter of WBS Guidelines No 12.29/04/SK/ HKO.01/2016 on Guideline for Whistleblowing Management of PT PELNI (Persero). Concluding to these guidelines, WBS implementation at PT PELNI (Persero) aims to build, implement and manage a Reporting System of Violations (WBS) so that various issues within the Company which not fitting with prevailing ethical standards, laws and regulations can be detected earlier (Early warning system and can reduce/minimize the risks faced by the Company due to financial, operational, legal, work safety and reputation violations that result in cost reduction in managing the consequences caused by a violation.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- Melalui e-mail perusahaan: wbs@pelni.co.id
  Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat:
  Direksi PT PELNI (Persero) u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130

SUBMITTING VIOLATION REPORT

All employees can submit the indicated violation report in written form through the following mechanism:

- The Company's email : wbs@pelni.co.id
  Sending an official letter addressed to the Board of Directors by personal or post mail delivery to the address:
  The Board of Directors PT PELNI (Persero) u.p Whistleblowing Management Team, Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Penunjang Direksi dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- Melalui e-mail perusahaan: wbs@pelni.co.id
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantara langsung atau melalui pos ke alamat:
  PT PELNI (Persero) Board of Commissioners u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130.

Beberapa ketentuan terkait penyampaian laporan pengaduan pelanggaran, sebagai berikut:

1. Pengaduan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi oleh fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang disampaikan.
2. Pengaduan pelanggaran tanpa identitas sebaiknya dilengkapi oleh bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang disampaikan.
3. Perseroan wajib memberikan tanda terima jika pengaduan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
4. Apabila pengaduan pelanggaran diajukan oleh perwakilan Stakeholders maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu fotokopi identitas Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders, surat kuasa.
5. Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan pelanggaran kepada Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders yang mengajukan pengaduan.

To report violation committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners and Head of Work Unit of the Board of Directors' Supporting Organ can be taken in written form with the following mechanism:

- Through Company's email: wbs@pelni.co.id
- Sending an official letter to The Board of Directors by personal or post mail delivery to the address:
  The Board of Commissioners PT PELNI (Persero) u.p Whistleblowing Management Team, JL. Gadjahmada No. 14 Jakarta 10130.

Terms and condition of complaint violation report submission are as follows:

1. Written violation report shall be attached with an identity copy and other supporting evidences, such as documents related to the committed transaction and/or allegation of submitted report.
2. Violation submission without the name should be completed with other supporting documents related to the committed transaction and allegation of submitted report.
3. The Company shall provide a receipt if the written violation report filled in with a name of Whistleblower.
4. If a violation report from one of Stakeholders, other than completing the above documents shall also attach another document which is an identity copy of Stakeholders and/or representative Stakeholders, the power of attorney letter.
5. The Company shall provide a receipt of the violation report to the Stakeholders and/or Representative Stakeholders who report the violation.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kebijakan Perlindungan Pelapor mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Melindungi Pelapor
2. Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
3. Perlindungan pelapor meliputi:
    - Jaminan fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, e-mail) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.
    - Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
    - Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakukan merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor.
    - Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.
4. Perlindungan di atas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroan dapat diselamatkan dimana penghargaan akan diberikan melalui kebijakan Direksi. Di sisi lain, Perseroan juga menerapkan sanksi bagi pelapor yang menyampaikan laporan palsu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WHISTLEBLOWER PROTECTION

Whistleblower Protection Policy regulates the following aspects:

1. Protecting the Whistleblower.
2. Whistleblower protection is to encourage the Whistleblower to report the violation.
3. Whistleblower protection covers:
    - Reporting facilities guarantee (Telephone, Mail, e-mail) or Independent Ombudsman, which is free and classified.
    - The confidential guarantee of Whistleblower identity and the content of the report, this protection is taken when the Whistleblower giving the identity and information that can be used to reach the Whistleblower.
    - Protection guarantee for the retaliation from the violation subjects or organization, which is protection from pressures, postponement of promotion, termination, lawsuit charges, property destruction, physical contacts and other harmful treatments. This protection is not only for the Whistleblower but also for other family members of the Whistleblower.
    - Classified Lines of Communication for the Whistleblower, follow up implementation of information, including when and how as well as the name of institution that will follow up the report, this information is confidentially given to the Whistleblower who state the Complete Identity.
4. Those protections could not be granted to the Whistleblower who gives the fake information and/or containing the libel information. The Company may give the reward to Whistleblower for the proven violation report, thus the asset/financial of the Company can be safe and the reward will be given from the Board of Directors' Decision. Furthermore, the Company could also give the sanction to Whistleblower who state the fake information in accordance with the prevailing laws and regulations.

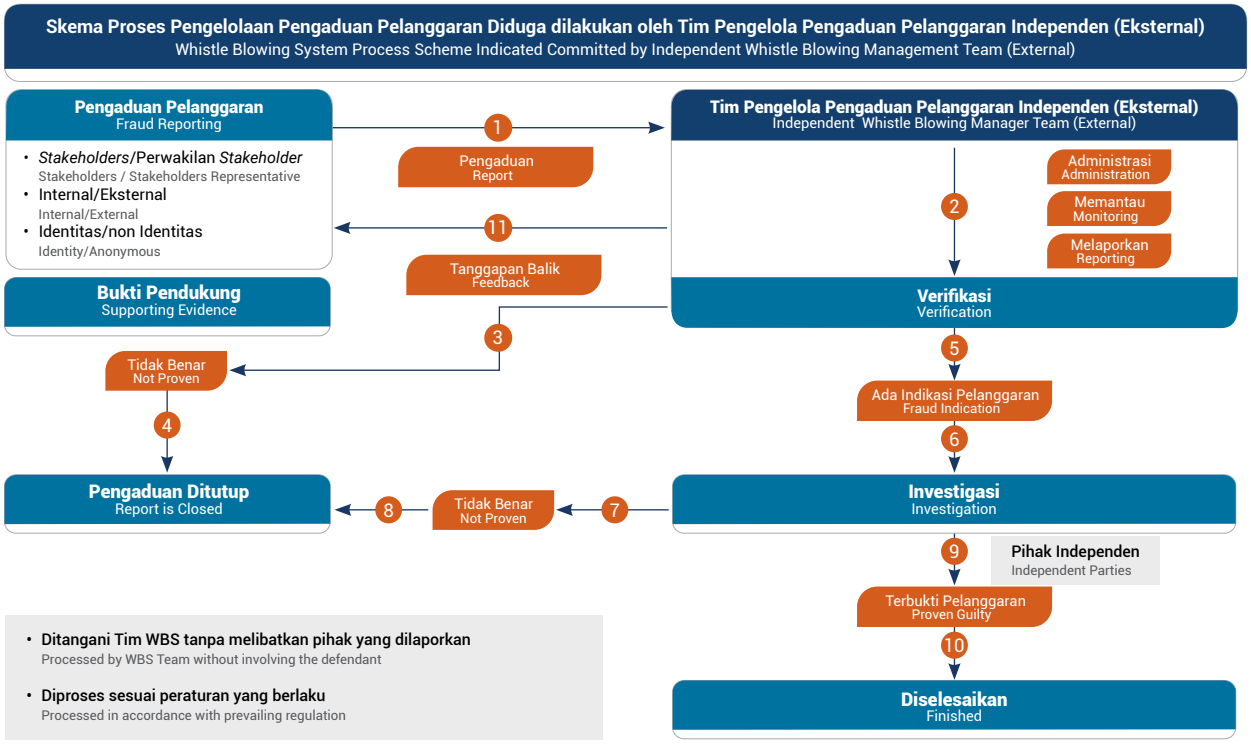
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

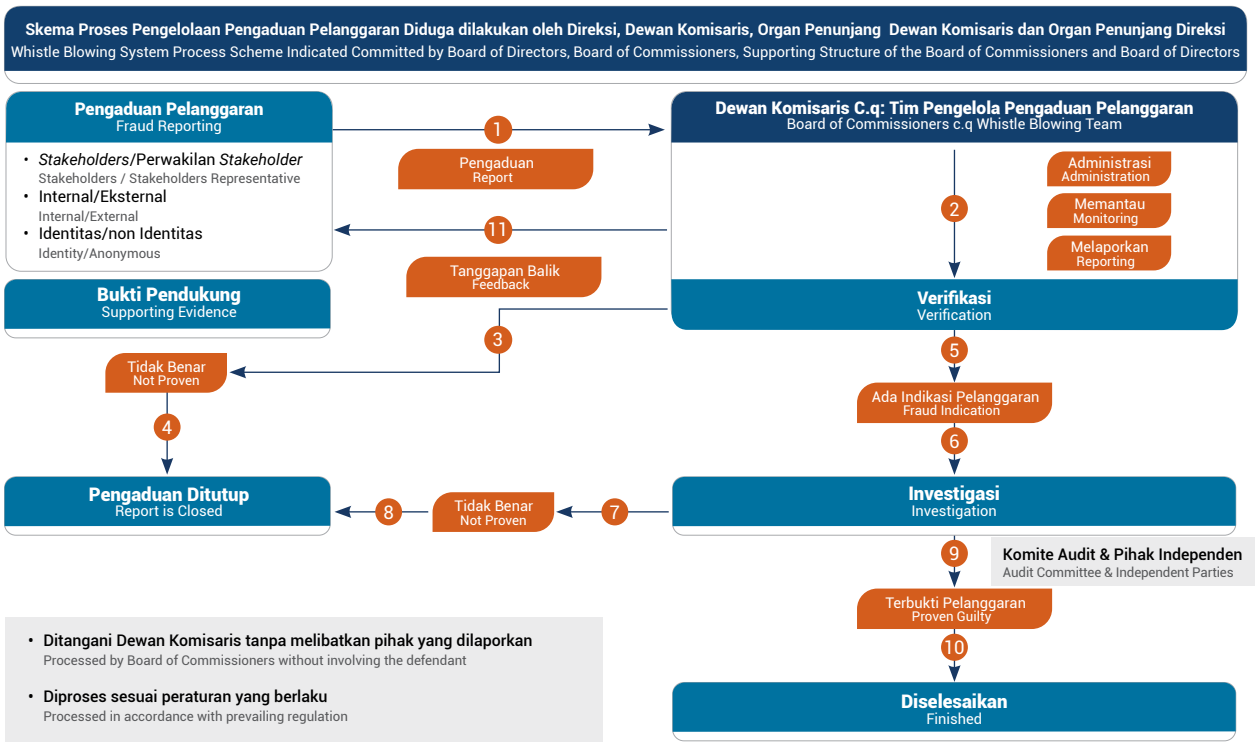
PENANGANAN PENGADUAN

Mekanisme penanganan pengaduan di PT PELNI (Persero), sebagai berikut:

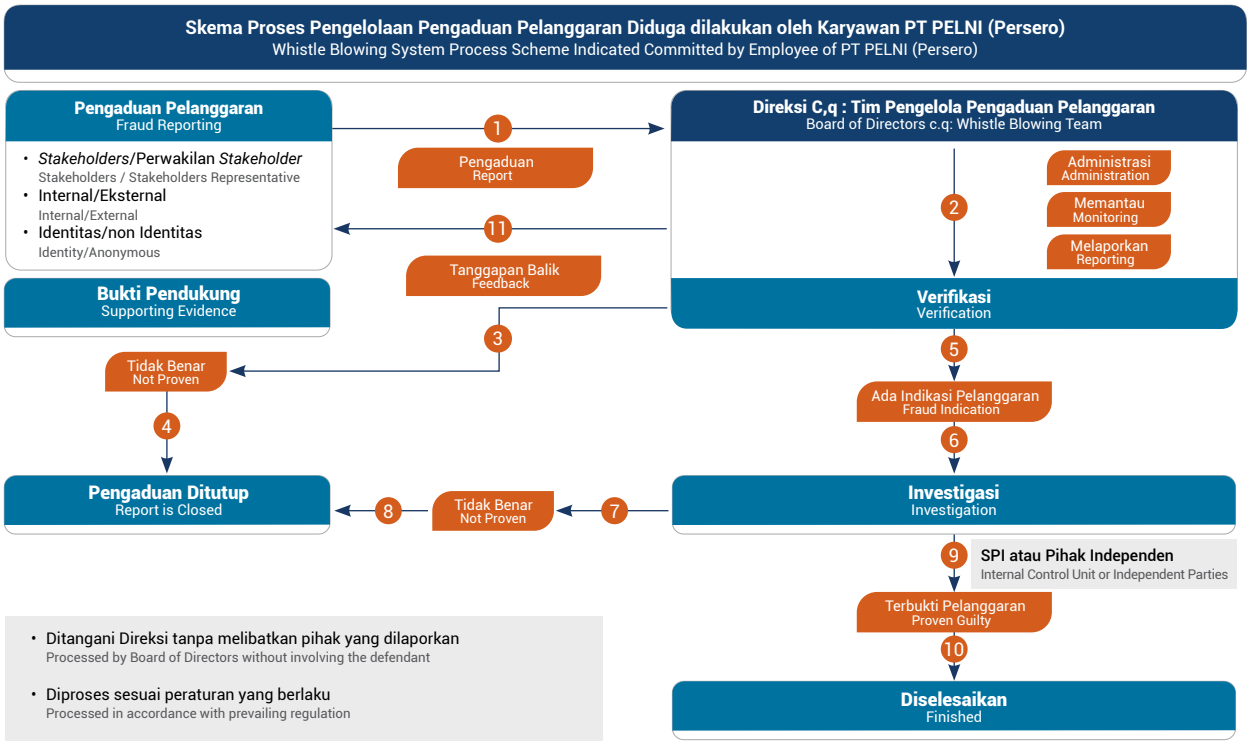
REPORT HANDLING

The report handling mechanism at PT PELNI (Persero) is as follows:





SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM



PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Untuk menangani laporan dugaan pelanggaran, Direksi telah membentuk:

1. Pengelola *Whistleblowing System*
   Pengelola *Whistleblowing System* adalah Unit yang melekat pada Struktur Sekretaris Perusahaan.
   Tugasnya meliputi: Menerima hasil dari laporan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (KP3), menyiapkan laporan berkala dan sosialisasi WBS.
2. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, maka Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (KP3) dan ditetapkan oleh Direksi meliputi unsur yang mewakili Direksi, SPI, Divisi SDM dan Divisi Hukum dengan susunan Tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Direktur dan Direktur yang ditunjuk
Pengawas	: Head of Internal Audit
Ketua Tim	: SPI
Anggota	: Divisi SDM dan Divisi Hukum

THE PARTY WHO HANDLE THE REPORT

To handle the violation report, the Board of Directors established:

1. The Whistleblowing System Unit
   Whistleblowing system unit is a unit within the Corporate Secretary Structural of the Company.
   The Duties of this unit are: Receiving the result of the report from Violation Handling Management Team, Providing periodic report and WBS socialization.
2. For violation committed by the employee, the Board of Directors has established and appointed Violation Handling Management Team which includes the elements of representing the Directors, Internal Audit Unit, HC Division and Legal Division with the Following Team Composition:

Person in charge	: Directors and the appointed Directors
Supervisor	: Head of Internal Audit
Head of the Team	: Internal Audit Unit
Member	: HC and Legal Divisions

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

3. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Direksi, dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris meliputi unsur Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dengan susunan Tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Komisaris Utama
Pengawas	: Ketua Komite Audit
Ketua Tim	: Anggota Komite Audit
Anggota	: Komite Manajemen Risiko

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Per 31 Desember 2020, tidak ada laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggan Perseroan.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES PADA TAHUN BUKU

Per 31 Desember 2020, tidak ada laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan sehingga tidak terdapat sanksi/tindak lanjut atas pengaduan atau laporan yang diterima melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

3. For the violation committed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Board of Commissioners' Supporting Organ, has appointed and established by the Board of Commissioners, which includes the elements of commissioners, Audit Committee, Risk Management Committee with the following composition:

Person in charge	: President Commissioner
Supervisor	: Head of Audit Committee
Head of the Team	: Members of Audit Committee
Member	: Risk Management Committee

TOTAL REPORT RECEIVED AND PROCESSED IN RECENT FISCAL YEAR

As of 31 December 2020 was no incoming report or complaint submitted via Whistleblowing System of the Company.

SANCTION/FOLLOW UP PROCESS OF THE ACCOMPLISHED COMPLAINTS IN THE FISCAL YEAR

As of 31 December 2020 there was no report or violation report submitted via the Whistleblowing System of the Company, so there was no sanction/follow up on the incoming report received from the Whistleblowing System.



PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION PREVENTION

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan tata perilaku dalam hubungan bisnis antara Perusahaan dan mitra perusahaan, PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan korupsi dilingkungan perusahaan. PT PELNI (Persero) memiliki pedoman gratifikasi yang diatur dalam SK Direksi Nomor: 12.29/03/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PELNI (Persero) dan SK Direksi Nomor: 12.29/02/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

Kebijakan ini telah mengacu pada Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan Pengendalian Gratifkasi ini telah dipublikasikan dalam portal internal dan website Perusahaan.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Untuk memperkuat pengendalian gratifikasi di dalam Perusahaan, PT PELNI (Persero) telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki kedudukan yang independen dan berada dibawah Sekretaris Perusahaan serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Perusahaan.

Unit Pengendalian Gratifikasi PT PELNI (Persero) memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan pengendalian praktek Gratifikasi di lingkungan Perusahaan;

GRATIFICATION PREVENTION

In order to increase the Company's value and code of conduct in business relationships between the Company and its partners, PT PELNI (Persero) is committed to implementing gratification controls to support efforts to eradicate corruption within the company. PT PELNI (Persero) has a gratification guideline stipulated in the Directors Decree Number: 12.29/03/SK/HKO.01/ 016 concerning Guidelines for Gratification Control within PT PELNI (Persero) and Directors' Letter of Decision Number: 12.29/02/SK/HKO.01/2016 regarding Work Manual of Gratification Control Unit (UPG) across the Environment of PT PELNI (Persero).

This policy has referred to the State Owned Enterprises Regulation Number: PER-05 / MBU / 2014 concerning the Gratification Control Program within the Ministry of State-Owned Enterprises. This Gratification Control Policy has been published on the Company's internal portal and website.

GRATIFICATION CONTROL UNIT

To strengthen gratification control in the Company, PT PELNI (Persero) has formed a Gratification Control Unit (UPG). The Gratification Control Unit has an independent position and is under the Corporate Secretary and responsible to the Corporate Secretary.

PT PELNI (Persero) Gratification Control Unit has the following authorities, duties and responsibilities:

1. Prepare the rules relating to the implementation of the Gratification control in the Company;

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION PREVENTION

2. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktek Gratifikasi, baik dari penerimaan laporan Gratifikasi sampai dengan pengiriman Surat Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari Gratifikasi apabila diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi milik Negara;

3. Membuka rekening untuk menampung uang yang diterima dari Gratifikasi yang menjadi kewenangan Perusahaan dalam memutuskan peruntukannya;

4. Mendiseminasikan/mensosialisasikan kebijakan Perusahaan terkait dengan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga, masyarakat pada umumnya dan para *stakeholders*;

5. Bekerjasama dengan seluruh Direktorat dan Non Direktorat, seluruh cabang dan Kapal agar masing-masing membuat laporan Gratifikasi paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulannya;

6. Menerima laporan benda Gratifikasi dari Insan PT PELNI (Persero) yang telah dilengkapi dengan dokumen yang terkait;

7. Menelaah laporan Gratifikasi dan memberikan rekomendasi atas laporan dimaksud dan hasil dari rekomendasi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Melakukan pemilihan kategori Gratifikasi dan pemrosesan laporan Gratifikasi dalam kedinasan dan bukan Gratifikasi dari Wajib Lapor Gratifikasi bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;

2. Prepare work equipment and facilities related to the Gratification control, both from receipt of Gratification reports to the sending of Decisions of the Corruption Eradication Commission to recipients and/or reporters as well as retention of received money evidence from Gratification if decided by the Corruption Eradication Commission (KPK) belonging to the State;

3. Open an account to save money from gratification which is the authority of the Company for deciding its allocation;

4. Disseminate/socialize Company policies related to Gratification to Third Parties, common community and stakeholders;

5. Collaborate with all Directorate and Non-Directorate, all branches and Ships to make a report on Gratification at least in 5th date of each month;

6. Receive Gratification report from PT PELNI (Persero) personnel that equipped with related documents;

7. Review Gratification report and provide recommendations on the intended report and the recommendations results that reported to the Corruption Eradication Commission;
8. Select the Gratification category and process the Gratification report in the officially and not Gratification from the Compulsory Report of Gratification with the Corruption Eradication Commission;

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION PREVENTION

9. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan pengelolaan dan pengendalian Gratifikasi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan SPI;

10. Melakukan *monitoring* dan evaluasi efektifitas pengelolaan dan pengendaliannya Gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi per triwulan atau sesuai kebutuhan Perusahaan;

11. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengelolaan dan pengendalian Gratifikasi kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang dapat digunakan sebagai salah satu management tools bagi Direksi;

12. Menindaklanjuti laporan dugaan praktek Gratifikasi yang berasal dari dan/atau bersumber dari WBS, instansi yang berwenang dan/atau informasi yang diperoleh dari masyarakat;

13. Menyusun rencana kerja UPG setiap tahunnya;

14. Membuat laporan perkembangan dan evaluasi kegiatan UPG setiap bulan yang ditunjukkan kepada Direktur SDM & Umum dengan tembusan BOC & Direksi lainnya.

9. Submit a recapitulation report on the handling of management and control of Gratification no later than the 10th date of each month to the Corruption Eradication Commission with a copy to the Directors, Board of Commissioners and Internal Audit Unit;

10. Monitor and evaluate the effectiveness of management and control of Gratification with the Corruption Eradication Commission quarterly or according to the needs of the Company;

11. Provide information and data related to the development of the Gratification management and control system to the Corporate Secretary which can be used as one of the management tools for the Board of Directors;

12. Follow up on reports of alleged Gratification practices originating from and/or WBS, the authorized agency and/or information obtained from the community;

13. Prepare UPG work plan in each year;

14. Make reports on the progress and evaluation of UPG activities in every month that are shown to the Director of HR & General Affairs with copies to the BOC & other Directors.

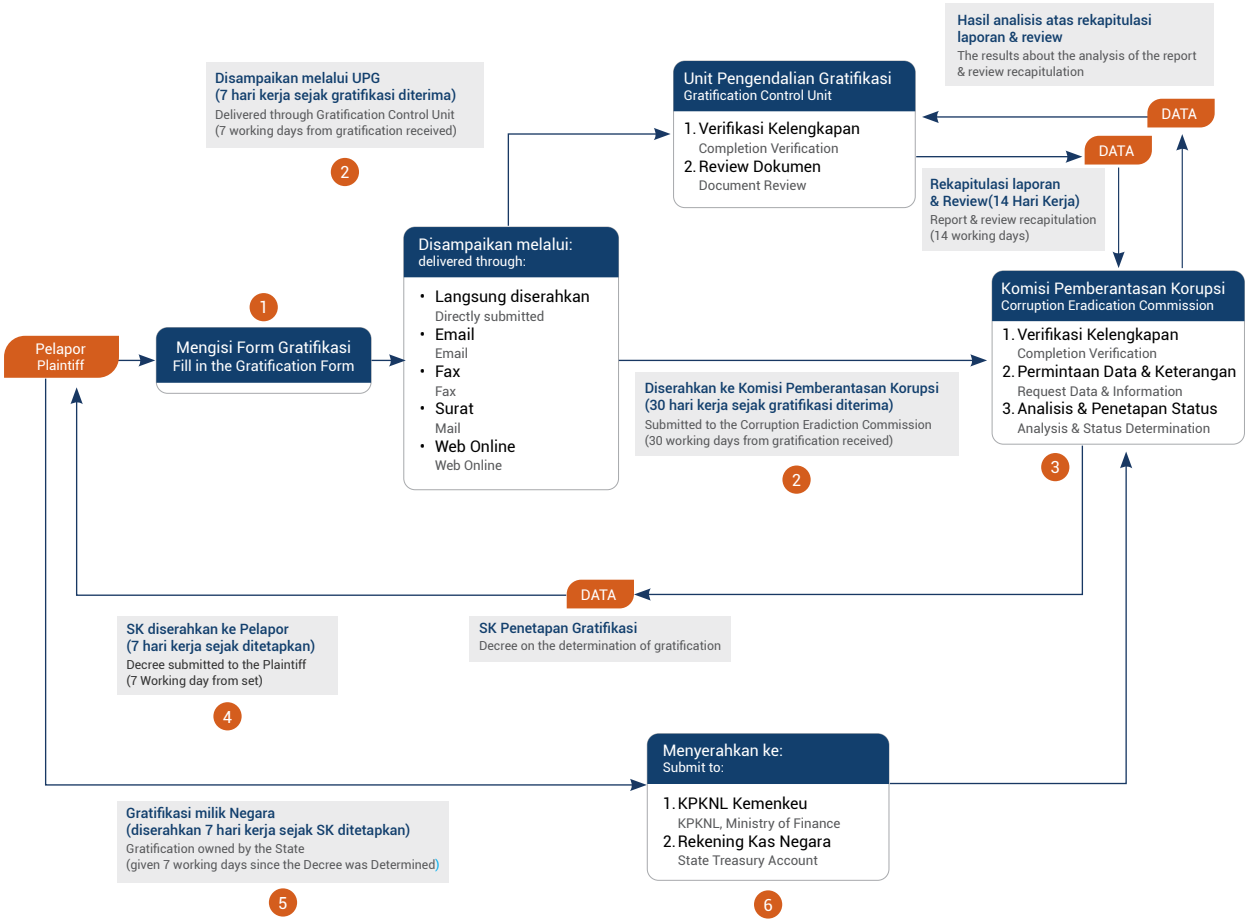
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION PREVENTION

MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Mengacu pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT PELNI (Persero), mekanisme pelaporan dan penetapan status gratifikasi di Perseroan adalah sebagai berikut:

REPORTING MECHANISM AND GRATIFICATION STATUS DETERMINATION

Referring to Gratification Control Guidelines of PT PELNI (Persero), the reporting mechanism and determination of gratification status in the Company are as follows:



LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI 2020

Selama tahun 2020, tidak ada laporan penerimaan gratifikasi.

GRATIFICATION REPORT IN 2020

Throughout 2020, there was no report on gratification cases

06





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

PT PELNI (Persero) sebagai Perusahaan yang seluruh kegiatan usaha dan operasionalnya berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan khususnya adalah lingkungan, masyarakat, karyawan dan konsumen tentu selalu memperhatikan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan dampak yang positif agar kelangsungan usahanya selalu berkelanjutan.

Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Perseroan berkomitmen memberikan hubungan timbal balik yang positif antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Hubungan antara Perusahaan dan Pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha Perusahaan sehingga Perusahaan dapat senantiasa memberikan kontribusinya terhadap lingkungan.

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility atau CSR*) di PT PELNI (Persero) merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Merujuk pada landasan kebijakan tersebut, PT PELNI (Persero) melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan PKBL tersebut juga melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) as a company whose entire business activities and operations directly relate to the stakeholders, especially the environment, community, employees and consumers certainly always pay attention to the needs and impacts caused. To that end, the Company is committed to continue to have a positive impact to ensure its business continuity is always sustainable.

Through its Corporate Social Responsibility activities, the Company is committed to providing a positive mutual relationship between the Company and its stakeholders. The relationship between the Company and Stakeholders is expected to maintain the Company's business continuity so that the Company can always contribute to the environment.

GENERAL POLICY

Corporate Social Responsibility (CSR) implementation at PT PELNI (Persero) refers to the Minister of State-Owned Enterprise (BUMN) regulation No. PER-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 regarding the Partnership and Community Development Programs of State-owned Enterprises and the latest amendment in accordance with the Minister of State-Owned Enterprise regulation. PER-02/MBU/07/2017 dated July 5, 2017 about the Second Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises regulation no. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.

Referring to the policy foundation, PT PELNI (Persero) implemented the Partnership and Community Development Program (PKBL) with the aim of assisting the Government in implementing more equitable development and improving the community welfare. PKBL's activities also involve the stakeholders, especially the communities that are located around the business area of PT PELNI (Persero).

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

LANDASAN HUKUM

Penerapan seluruh kegiatan Tanggung Jawab Sosial PT PELNI (Persero) telah sesuai dengan landasan-landasan hukum sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 60/KMK.016/96 tanggal 9 Februari 1996 tentang perubahan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RINo. 316/KMK.016/1994.
- Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: 100MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Keputusan Menteri BUMN Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007.
- Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: SE-03/MBU/S/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Penetapan Wilayah Binaan, tahun 2007.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

LEGAL BASIS

All activities of PT PELNI (Persero) Social Responsibility implementation has complied with the following legal basis:

- The Minister of Finance of the Republic of Indonesia decree No. 60/KMK.016/96 dated February 9, 1996 regarding to the amendment of article 3 of the Minister of Finance decree RINo. 316/KMK.016/ 1994.
- The Minister of State Owned Enterprises Decree Number: 100MBU/2002 dated 04 June 2002 about the health rating of State-Owned Enterprises.
- The Minister of SOE decree Kep-236/MBU/2003 on Partnership Program of the Small Business agency and Community Development Program.
- The Minister of State Owned Enterprises regulation PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 on partnership program With Small Business And Community Development Program of State Owned Enterprises.
- The Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-08/MBU/2007 dated 27 April 2007 Concerning the fourth Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-05/MBU/2007.
- The Minister of State-Owned Enterprises Circular Letter No. SE-03/MBU/S/2007 dated July 17, 2007 on the Establishment of Assistance Areas, 2007.
- The Minister of State Owned Enterprises regulation PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 on Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
- The Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 concerning Amendment to The Minister of SOEs regulation no. PER-09/MBU/07/2016 about Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
- The Minister of State-Owned Enterprises regulation Number PER-02/MBU/7/2017 About Second Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises regulation Number PER-09/MBU/07/2015 About the Partnership and Community Development Program of State-owned enterprises.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

STRUKTUR ORGANISASI PKBL

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT PELNI (Persero) Nomor 02.28/02/SK/HKO.01/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat PT PELNI (Persero), maka Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berada di bawah Divisi Perbendaharaan (*Treasury*) dan Direktur Keuangan. Dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Kantor Pusat dilakukan oleh *Vice President* Perbendaharaan dan dibantu oleh Manager PKBL beserta satu orang supervisor dan satu orang staf, sedangkan di daerah-daerah untuk pelaksanaan pembinaan Mitra dilakukan oleh staf PT PELNI (Persero) di cabang-cabang setempat.

PKBL ORGANIZATION STRUCTURE

In accordance with the Board of Directors decree of PT PELNI (Persero) Number 02.28/02/SK/HKO.01/2017 dated February 28, 2017 on Organizational Structure, Main Duties and Functions of PT PELNI (Persero) Head Office, Partnership and Community Development program (PKBL) is under the Treasury Division and the Finance Director. In implementing the Partnership and Community Development Program for the Head Office is performed by Vice President of Treasury and assisted by PKBL Manager along with one supervisor and one staff member, while in the areas for the implementation of coaching Partners are conducted by PT PELNI (Persero) staff in local branches.

PEMANGKU KEPENTINGAN

Bisnis yang berkelanjutan merupakan bisnis yang operasinya dikelola secara bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Maka dari itu Perseroan senantiasa menjaga hubungan baik kepada para pemangku kepentingan dengan cara memperhatikan kebutuhan serta isu-isu yang penting bagi mereka melalui aspirasi dari setiap pemangku kepentingan. Aspirasi dari pemangku kepentingan yang diterima oleh PT PELNI (Persero) dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi terhadap strategi bisnis perusahaan.

STAKEHOLDERS

Sustainable business is a responsible operation to all stakeholders. Accordingly, the Company always maintains good relationships with the stakeholders by caring their important needs and issues into the aspirations from each stakeholder. This incoming aspiration from stakeholders to PT PELNI (Persero) is used as a reference in making decisions and evaluating the Company's business strategy.

Dari banyaknya pemangku kepentingan, Perseroan telah memetakan pemangku kepentingan utama. Penetapan pemangku kepentingan utama ditentukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan relasi yang telah terbangun. Berikut adalah daftar pemangku kepentingan utama yang telah dipetakan oleh Perseroan:

- Pemegang Saham
- Regulator
- Pegawai
- Rekanan/Mitra
- Pelanggan
- Masyarakat
- Kreditur
- Media

From some of these stakeholders, the Company has been mapped primary stakeholders by engagement level and relation that has been built. the following is a list of primary stakeholders mapped by the Company:

- Shareholder
- Regulator
- Employee
- Partner/Supplier
- Customer
- Community
- Creditor
- Media

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

ISU-ISU UTAMA SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

PT PELNI (Persero) telah melakukan identifikasi isu-isu penting terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pada setiap pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan interaksi. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisa dampak atas isu-isu pada pemangku kepentingan dilakukan dengan menjalin komunikasi pada setiap pemangku kepentingan secara rutin melalui berbagai kegiatan.

Sepanjang tahun 2020 telah ditetapkan isu-isu yang memiliki signifikansi terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yakni:

- Kinerja Ekonomi
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Energi
- Pelatihan dan Pendidikan

Penjelasan lebih lanjut terkait isu-isu penting (*material*) Perusahaan tercantum dalam *Sustainability Report* PT PELNI (Persero) Tahun Buku 2020.

SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES

PT PELNI (Persero) has identified important issues relating to social, economic and environmental impacts on each stakeholder by stakeholder engagement and interaction activities. One of the methods to analyze the impact of issues on the stakeholders is by establishing good communication with each stakeholder routinely through those activities.

During 2020 has been set out the issues that have significant impact to social, economic and environmental as follows:

- Economic Performance
- Occupational Health and Safety
- Energy
- Training and Education

For further explanation related to material issues of the Company is contained in PT PELNI (Persero) Sustainability Report 2020.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA

PT PELNI (Persero) telah memiliki strategi dan program kerja dalam mengelola isu-isu penting terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

STRATEGIES AND WORK PROGRAM

PT PELNI (Persero) had strategy and work programs in dealing with important issues impacting social, economic and environmental.

Kategori Category	Fokus Area Focus Area	Strategi dan Program Kerja Strategy and Work Program
Ekonomi Economy	Kinerja Bisnis dan Operasional Business Performance and Operational	• Melakukan pengembangan pangsa pasar Market Development • Penguatan Budaya Perusahaan Strengthening Corporate Culture • Peningkatan Kualitas Layanan Improved Quality of Service
	Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	• Terus menjadi penghubung antar pulau. Keep connecting the islands.
	Tata Kelola Governance	• Melakukan penyusunan rencana dan peta jalan Tata Kelola Perusahaan 2019-2024. Prepare a plan and road map for Corporate Governance 2019-2024. • Melakukan sosialisasi program anti korupsi dan gratifikasi. Promote anti-corruption and gratification programs.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Kategori Category	Fokus Area Focus Area	Strategi dan Program Kerja Strategy and Work Program
Sosial Social	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety	• Melakukan audit rutin SMK3. Conduct routine audits on occupational health and safety management systems.
	Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Labor and HR Development	• Penerapan budaya Perusahaan. Application of Company culture. • Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi SDM Perseroan Providing training and development to employees to improve the Company's HR competencies
	Bantuan Masyarakat Community Service	• Melakukan kegiatan berupa bantuan pendidikan kepada masyarakat melalui program PKBL. Conducting activities in the form of educational assistance to the community through the partnerships and community development program program. • Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar wilayah operasi usaha berupa sumbangan dan bantuan pembangunan sarana peribadahan. Providing social assistance to the community around the area of business operations in the form of donations and assistance in the construction of worship facilities. • Memberikan bantuan sosial kepada wilayah terdampak bencana. Providing social assistance to affected areas.
Lingkungan Environment	Pengelolaan Bisnis Ramah Lingkungan Environmentally friendly Business Development	• Melaksanakan program restorasi terumbu karang. Implement a coral reef restoration program. • Melaksanakan program efisiensi penggunaan bahan bakar. Implement fuel efficiency programs. • Menerapkan kebijakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan yaitu biodiesel B30. Implement policies on the use of environmentally friendly fuels, namely biodiesel B30. • Membangun Rumah Kelola Sampah. Building a Waste Management House.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu bagian dari isu sosial yang selalu diperhatikan oleh Perseroan. Pemangku kepentingan sebagai objek dalam isu ini mencakup pemangku kepentingan yang berada dalam Perusahaan dan di luar Perusahaan.

Human Rights (HAM) is one of social issues that is always maintained by the Company. Stakeholders as objects in this issue cover stakeholders inside and outside the Company.

Tanggung jawab sosial terkait HAM dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip dasar kemanusiaan, budaya, adat istiadat dan nilai-nilai sosial. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat operasi bisnis Perseroan melibatkan insan dengan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya yang beragam. Selain insan yang terlibat langsung dengan Perusahaan, operasi bisnis Perseroan juga melibatkan masyarakat yang beragam mengingat lokasi operasi Perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Social responsibility related to human rights is conducted based on the basic principles of human race, culture, customs and social values. This becomes very relevant with the Company's business operations which involve people from diverse backgrounds, ethnicity, religion and culture. Alongside the people who are directly involved, the Company's business operations also engage a diverse community due to the operations located in some regions across Indonesia.

Untuk itu, PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk selalu konsisten menjaga keharmonisan dan keberagaman ini melalui penerapan praktik non-diskriminasi yang ketat.

For this reason, PT PELNI (Persero) is committed to maintain these harmonious and diversity relationship consistently towards strict non-discrimination practices.

KESETARAAN GENDER DAN KESEMPATAN KERJA

Per 31 Desember 2020, jumlah pegawai PT PELNI (Persero) adalah 5.327 orang dengan persentase adalah 89,1% pegawai laki-laki dan sisanya adalah pegawai perempuan. Dominasi pegawai laki-laki ini didorong oleh faktor karakteristik industri konstruksi yang lebih diminati oleh kaum laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

GENDER EQUALITY AND JOB OPPORTUNITY

As of 31 December 2020, total employees of PT PELNI (Persero) was 5.327 employees with the percentage of 89,1% male employees and the rest were female employees. This male employee's domination is driven by characteristics of the shipping transport industry which are more attractive for men than women.

Meskipun mayoritas pegawai adalah laki-laki, dalam menjalankan proses rekrutmen calon pegawai Perseroan selalu menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Proses rekrutmen yang dijalankan Perseroan senantiasa dilakukan secara adil yang berorientasi pada kompetensi dan keahlian calon pegawai.

However, the majority of employees are male, in the recruitment process prospective employees always uphold the principles of equality and nondiscrimination. This recruitment process of the Company is conducted fairly and oriented to the competencies and expertise of prospective employees.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

PERLINDUNGAN HAK ADAT ISTIADAT, BUDAYA DAN AGAMA

Lokasi operasi Perseroan yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia menjadi sebuah keuntungan sekaligus tantangan bagi Perseroan. Perbedaaan wilayah ini memungkinkan adanya perbedaan budaya, suku, ras, dan agama. Kaya nilai perbedaan di setiap wilayah Indonesia menjadi sebuah nilai tambah keberagaman akan SDM baik di dalam Perusahaan maupun diluar Perusahaan.

Untuk menjaga harmonisasi pada insan di luar Perusahaan khususnya masyarakat lokal, Perusahaan senantiasa menjaga komunikasi dan interaksi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan. Pendekatan yang dilakukan juga selalu dilandasi dengan prinsip toleransi terhadap adat budaya tanpa harus bertentangan dengan adat dan budaya setempat.

Selain pada adat dan budaya, Perseroan juga selalu memperhatikan hak asasi dalam menganut kepercayaan. Perseroan memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing individu. Perseroan juga rutin mengadakan acara keagamaan pada setiap hari besar seluruh agama yang berlaku di Indonesia.

PROTECTION OF CIVIL RIGHTS, CULTURAL AND RELIGIOUS

Our operations are located across the regions in Indonesia which is a benefit and also to be the challenges for us. The different regions may arise from the immense diversity of culture, ethnic, race and religion. This archipelago state of Indonesia is an added-value of our human resources diversity, across the Company's environment.

To maintain a harmonious relationship with people outside the Company, especially the local community around us, we always build strong communication and interaction and conduct activities involving our Stakeholders. The approach also relies on the tolerance principle of cultural-customs without having to conflict with local customs and culture.

Despite tradition and culture, the Company always heeds on human rights in adhering to the beliefs. The Company provides a tolerance norm to pray according to the beliefs of each individual employee. The Company also routinely holds religious events in every major religious day in Indonesia.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATION

Pada dasarnya tanggung jawab Perusahaan pada praktik operasi yang adil mencakup pada perilaku etis dalam transaksi Perusahaan dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Sebagai entitas yang dikelola secara profesional, perilaku bisnis yang etis menjadi sebuah keharusan demi menunjang hubungan yang baik kepada para pemangku kepentingan terkait.

Basically, the Company's responsibility for fair operating practices includes ethical behavior in every business transaction with other companies or organizations. As a professional Public company, our ethical business behavior is a must in order to help us bear up good relations with relevant stakeholders.

Komitmen Perseroan dalam menjalankan praktik bisnis yang berlandaskan etika ditunjukkan melalui adanya kebijakan kode etik yang tertuang dalam Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang mengatur tentang hubungan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

The Company's commitment to carry out clean business practices based on ethics, which is through the existence of our code of ethics policy that is contained in the Code of Conduct, governing the relationship between us and our stakeholders.

Perseroan berkomitmen menjalankan praktik bisnis dengan integritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, menghindari bentuk-bentuk kecurangan (*fraud*), tidak mentoleransi suap, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

The Company is committed to conducting business practices with integrity and professionalism, avoiding conflicts of interest, preventing fraud, not tolerating bribery, corruption, collusion and nepotism (KKN).

ANTI KORUPSI

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah. Perseroan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan Perseroan termasuk interaksi para pegawai dengan para pemangku kepentingan.

Komitmen PT PELNI (Persero) dalam mencegah praktik korupsi telah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan iklim bisnis yang bersih dan transparan. Kebijakan anti korupsi yang dimiliki PT PELNI (Persero) telah tertuang dalam pedoman etika perilaku Perseroan. Pencegahan praktik korupsi pada Perseroan juga mencakup larangan praktik suap, pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain.

ANTI CORRUPTION

Our efforts to prevent and eradicate corruption have become the main focus of our government. The Company fully supports these government's efforts to prevent and eradicate corruption within the Company, including the interaction between our employees and stakeholders.

The Company's commitment to preventing corruption practices is in line with the government's goal of conducting a clean and transparent business circumstances. Our anti-corruption policy has been set out in the Company's code of conduct. This corruption practices prevention within the Company also includes banning bribery, money laundering, gratuities and others misbehave actions.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATION

Keseriusan Perseroan dalam mencegah tindak KKN ditunjukkan dengan dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) memiliki kedudukan yang independen dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Perusahaan. Dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi ini diharapkan dapat mendorong setiap insan Perseroan untuk menjaga independensinya dan mencegah adanya praktik gratifikasi dan korupsi di lingkungan Perseroan.

The Company is serious about preventing corruption, collusion and nepotism by establishing a Gratification Control Unit (UPG). This Gratification Control Unit stands independently and is responsible to the Corporate Secretary. With the existence of the Gratification Control Unit is hoped that can encourage every person of the Company to foster its independence and prevent the actions of gratification and corruption within the Company.

Kebijakan PT PELNI (Persero) tentang anti korupsi juga dilakukan dengan mewajibkan seluruh insan Perseroan untuk menandatangani pakta integritas yang melarang praktik-praktik korupsi. Pada tahun 2020, upaya pencegahan praktik korupsi juga dilakukan melalui Deklarasi Penandatanganan Kesepakatan Anti Penyuapan pada tanggal 7 Juni 2020 demi terciptanya Perseroan yang bersih dari korupsi dan penyuapan.

The Company's policy on anti-corruption is also carried out by requiring all of our people to sign an integrity pact that prohibits corrupt practices. In 2020, our efforts to prevent corrupt practices were also carried out through signing the Declaration of Anti Bribery for Clean Company from corruption and bribery on 7 June 2020.

PRAKTIK PENGADAAN YANG TRANSPARAN

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing, transparan, serta akuntabel. Adapun untuk menjaga prinsip transparansi dalam penentuan pemasok atau vendor, proses pengadaan yang harus dilakukan melalui tahapan prosedur:

- Kualifikasi dan evaluasi vendor
- Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan
- Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang
- Pengukuran kepuasan dan pembinaan vendor

Tanpa mengurangi kualitas dan mutu barang atau jasa yang diperoleh, praktik pengadaan yang diterapkan di Perseroan Senantiasa mengutamakan pemasok lokal, sesuai program pemerintah untuk memberdayakan pemasok domestik (lokal dan nasional) dan meningkatkan prosentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TRANSPARENT PROCUREMENT PRACTICE

The Company in operating its business activities always maintains the creation of fair competition in accordance with applicable laws and regulations by upholding the principles of effective and efficient, openness and competitive, transparent, and accountable. To maintain the principle of fairness in determining suppliers or vendors, the procurement process must be carried out through the procedures:

- Vendor qualification and evaluation
- Procurement planning and implementation
- Receiving, storing and releasing goods
- Measurement of vendor satisfaction and guidance

Without reducing the quality of goods and services obtained, procurement practice that applied in the Company is always to prioritize local suppliers, according to government programs to empower domestic (local and national) suppliers and increase the percentage of Domestic Component Levels (TKDN).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATION

KETERLIBATAN POLITIK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Setiap Insan PT PELNI (Persero), selaku warga Negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perusahaan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Segala konsekuensi yang timbul akibat aktivitas karyawan dalam politik ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.

Bagi Insan PT PELNI (Persero) yang mencalonkan diri menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif maka yang bersangkutan harus non-aktif selama pencalonannya. Jika yang bersangkutan telah menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi anggota legislatif maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PERSAINGAN SEHAT

Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat, jujur dan fair dengan para pesaing (*competitor*).Perkembangan bisnis ke depan yang semakin ketat dan terbuka menuntut Perusahaan untuk terus berinovasi. Oleh karenanya Perusahaan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Perusahaan menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pelanggan.

RESPONSIBLE POLITICAL INVOLVEMENT

Every person of PT PELNI (Persero), as a citizen, has the rights to gather, associate, organize and devote political and social aspirations. The company does not force, influence or direct the people in contributing to politics. All consequences arising from employee activities in politics are borne by the employee concerned.

For the employee of PT PELNI (Persero) who is electing for political party and/or legislative member, the person concerned shall be non-active as an employee during the nomination. If the person concerned has become an official of a political party and/or is a member of the legislative body then the person concerned shall resign from the Company in accordance with the relevant laws and regulations.

FAIR COMPETITION

The Company upholds business ethics and competes in a healthy, honest and fair manner with other competitors. Future business developments which are increasingly stringent and open requiring the Company to continue to innovate. Therefore, the Company views and puts the competitors as a trigger to continuously improve, so that we can compete in business. The Company avoids making unfair agreements with other industry players to get more profit instead of respecting customers interests.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO LIVING ENVIRONMENT

Faktor lingkungan hidup menjadi perhatian khusus bagi Perusahaan mengingat operasi bisnis PT PELNI (Persero) memiliki risiko dan dampak pada kelestarian lingkungan. Perseroan menilai bahwa aspek pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang keberlanjutan usaha di masa yang akan datang.engan mengorbankan kepentingan pelanggan.

Environmental factors are becoming our particular concern, considering that the Company's business operations have risks and impacts on environmental sustainability. The Company realizes that the environmental sustainability aspect is one of the main factors to support business sustainability for the years to come.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Perseroan telah memiliki upaya sistematis dan terpadu demi mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dan upaya dalam pencegahan yang dilakukan oleh Perseroan pun selalu didasari oleh prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasi bisnisnya.

In accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH), the Company had a systematic and integrated effort to prevent environmental pollution and damage. And these prevention efforts by the Company are always based on the principle of prudence in carrying out our business operations.

Kebijakan tanggung jawab sosial dalam lingkungan hidup juga telah ditetapkan dalam program PKBL dimana salah satu objek programnya mewajibkan Perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada kelestarian lingkungan.

The social responsibility policy on the environment has also been established in the PKBL program where one of the programs necessitates the Company to have social responsibility to environmental sustainability.

Implementasi pengelolaan dan pencegahan dampak lingkungan Perseroan berpedoman pada dokumen Sistem Manajemen Keselamatan . Perseroan juga selalu memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan telah memenuhi standar perizinan dan baku mutu lingkungan.

The management and prevention of the Company's environmental impact is guided by the Safety Management System document. The Company always ensures that every project meets the licensing standards and environmental quality standards.

Berdasarkan bidang usaha yang dijalankan , Perusahaan memiliki potensi dan risiko atas dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya antara lain:

- Energi
- Emisi
- Limbah
- Keanekaragaman Hayati

Aligned to the line of business, the Company has potential and risk impact on environment from the operating activities, among others:

- Energy
- Emission
- Waste
- Biodiversity

Dari potensi dampak lingkungan tersebut, Perseroan telah memiliki mekanisme mitigasi atas segala risiko yang mungkin akan dihasilkan pada setiap jenis dampak lingkungan.

From those potential environmental impacts, the Company has a mitigation mechanism for all risks that may be classified by each type of environmental impact.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO LIVING ENVIRONMENT

Pada tahun 2020, Perseroan telah memiliki rencana kerja tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup antara lain adalah:

1. Melaksanakan kebijakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan.
2. Melakukan perawatan kapal dalam rangka mendorong efisiensi penggunaan energi.
3. Melakukan pemasangan alat pencacah limbah padat pada kapal.
4. Melakukan pemberdayaan terumbu karang.

In 2020, the Company had some work programs of social responsibility related to living environment as follows:

1. Enforced the policy on use of environmentally friendly fuel.
2. Ship maintenance to boost efficient use of energy.
3. installed the solid waste counter on board.
4. Coral reef conservation.

PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL APPRECIATION



PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mendapatkan dua penghargaan bergengsi dari *Top Business* dalam kategori "*Top CSR Awards* 2020 # *Star* 4" dan "*Top Leader on CSR Commitment* 2020".

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) received two awards from Top Business category of "Top CSR Awards 2020 # Star 4" and "Top Leader on CSR Commitment 2020".



PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) memenangkan kembali *Gold Rank* dalam acara Asia *Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) ke 16 tahun 2020.

PT Pelayaran Nasional Indonesia won a Gold Rank in The 16th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO LIVING ENVIRONMENT

PENGELOLAAN ENERGI

Pengelolaan energi secara efektif dan efisien menjadi penting karena penggunaan energi berdampak langsung pada kontribusi emisi dan karbon. Upaya pengelolaan energi yang optimal juga penting terkait efisiensi sumber daya demi biaya operasi yang lebih rendah.

Penggunaan sumber energi pada operasi bisnis PT PELNI (Persero) dibagi menjadi dua yaitu energi listrik dan bahan bakar. Energi listrik didapatkan dari listrik PLN sebagai pendukung pada operasional kantor. Sedangkan energi bahan bakar digunakan sebagai bahan bakar utama operasional kapal.

Manajemen energi khususnya bahan bakar dilakukan dibawah Divisi Pengelolaan Bahan Bakar. Divisi Pengelolaan Bahan Bakar memiliki fungsi menyiapkan rumusan kebijakan, penelaahan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan serta kegiatan *monitoring*, Divisi Pengelolaan Bahan Bakar sesuai fungsinya juga melaksanakan perencanaan dan pengendalian bahan bakar serta minyak pelumas kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja efektivitas dan efisiensi penyediaan bahan bakar dan minyak pelumas kapal yang optimal.

Selama tahun 2020, penggunaan energi bahan bakar tercatat turun sebesar 8,24% dari tahun sebelumnya menjadi 3,4 Gjoule. Angka ini diperoleh dari penjumlahan seluruh pemakaian energi berdasarkan sumbernya seperti Listrik PLN, Diesel, BBM, Gas Alam, dan MFO.

ENERGY MANAGEMENT

Effective and efficient energy management is important because the use of energy has a direct impact on emissions contribution and carbon footprints. Optimal efforts of energy management are also important relating resource efficiency for lower operating costs.

The use of energy for the business operations of PT PELNI (Persero) is divided into two, which is electricity and fuel. Electrical energy is obtained from PLN as a support for office operations. While fuel energy is used for ship operations.

Energy management, especially for fuel, is under the Fuel Management Division. The Fuel Management Division has the functions of preparing policy formulation, reviewing, implementing, controlling and reporting management and monitoring activities, the Fuel Management Division in line with its function also carries out the planning and control for ship's fuel and lubricants in accordance with applicable regulations to achieve effective performance and optimal supply of ship's fuel and lubricating oils.

During 2020, the use of fuel has decreased by 8.24% from the previous year to 3,4 Gjoule. This figure was obtained from the sum of all energy usage based on sources such as Electricity from PLN, Diesel, Fuel, Natural Gas, and MFO.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO LIVING ENVIRONMENT

PENGELOLAAN LIMBAH

Sistem pengelolaan limbah menjadi sangat penting bagi operasi bisnis PT PELNI (Persero) mengingat limbah memiliki potensi pencemaran terhadap laut.

Manajemen pengelolaan limbah di Perseroan dilakukan berdasarkan SK Direksi No: 01.18/01/SK/HKO.01/2019 tentang Standar Operating Prosedur Pengelolaan BBM,Pelumas (LO), dan Pelumas Bekas (B3) tanggal 18 Januari 2019 dan SK Direksi No. 01.18/02/SK/HKO.01/2018 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Manual Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (*Safety Management System Manual*).

Sesuai dengan kebijakan tersebut, metode pengolahan limbah juga dibedakan berdasarkan penggolongannya yaitu limbah padat dan limbah cair. Setiap jenis limbah memiliki metode pengelolaan khusus agar tidak membuat pencemaran kepada lingkungan. Rincian mengenai metode pengelolaan limbah dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan PT PELNI (Persero).

Pada tahun 2020, volume limbah yang dihasilkan dari masing-masing jenis limbah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

WASTE MANAGEMENT

The waste management system is significant for business operations of PT PELNI (Persero), considering that waste has the potential to pollute the sea.

Waste management of the Company is carried out based on Decree of Board of Directors No: 01.18/01/SK/HKO.01/2019 concerning Standard Operating Procedures for Managing Fuel, Lubricants and Used Lubricants (B3) on 18th January 2019 and Decree of the Board of Directors No. 01.18/02/SK/HKO.01/2018 dated 18 January 2021 concerning Establishment of Safety Management System Manual (Safety System Manual).

Referring to those policies, waste processing methods are also distinguished by the classification, namely solid and liquid waste. Each type of waste has a special management method so that it does not pollute the environment. the details about waste management methods can be seen in PT PELNI (Persero) Sustainability Report.

In 2020, waste volume resulted from each type of waste can be seen in the table below:

Jenis Limbah Type of Waste	Kategori Category	Volume Volume
Limbah Air Water Waste	Limbah Cair Liquid Waste	740.838 m^3
Limbah Sampah Kapal Waste from ships	Limbah Padat Solid Waste	7.238,44 ton

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

Aspek ketenagakerjaan dan K3 merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang keberlanjutan Perusahaan. Untuk itu, Perseroan menempatkan aspek Ketenagakerjaan dan K3 menjadi salah satu tanggung jawab sosial Perusahaan. Perseroan yakin bahwa praktik ketenagakerjaan dan K3 yang dikelola dengan baik akan mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompeten.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menciptakan praktik ketenagakerjaan yang sehat dan iklim kerja yang kondusif, serta berupaya untuk meminimalisir tingkat kecelakaan kerja menuju angka kecelakaan kerja nol (*zero accident*) agar visi, misi, dan tujuan Perseroan dapat terealisasi. Untuk itu, Komitmen tersebut telah dituangkan melalui Manual Sistem Manajemen Keselamatan.

Landasan kebijakan praktik Ketenagakerjaan dan K3 yang diterapkan Perseroan juga telah sesuai dengan peraturan keselamatan internasional (SOLAS) yang tertuang dalam *ISM Code*.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Perseroan memiliki target dan rencana kerja dalam bidang K3 dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan audit sistem manajemen keselamatan kapal
- Mengikuti program pelatihan dan sertifikasi
- Pengadaan peralatan SMK3 & LH
- Menerapkan prosedur kesehatan yang ketat dan sosialisasi 3M (mencuci tangan, memakai masker dan selalu menjaga jarak) di era pandemik bagi *crew* kapal *on Board*, kantor cabang dan kantor pusat.
- Melaksanakan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada kantor pusat dan kantor cabang.

Labor and OHS aspects are the essential aspects in supporting the Company's sustainability. For this reason, the Company takes these aspects of Employment and OHS into one of the Company's social responsibilities. The Company is confident that well-managed practices of labor and OHS will encourage the creation of excellent and competent Human Resources.

The Company is committed to continuously creating healthy labor practices and a conducive work climate, and strives to minimize the level of work accidents towards zero accident rates. Thus, the vision, mission and goals of the Company can be achieved. By doing so, this commitment has been made through the Safety Management System Manual.

The policy basis of the Labor and OHS practices applied by the Company is also in accordance with international safety regulations (SOLAS) as set out in the ISM Code.

TARGET AND ACTIVITIES PLANS 2020

In 2020, the Company had targets and work plans for OHS and Labor fields as follows:

- Conducted an audit to the ship's safety management system
- Participated in training and certification programs
- Procurement of OHS system and environmental equipments
- Has applied strict health protocols and socialized 3M (washing hands, wearing mask and physical distancing) in pandemic era to ship crews on Board, branches, and head office.
- Conducted an audit of work safety and health management systems at headquarters and branch offices.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Ketenagakerjaan

1. **Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja**

   Dalam menjalankan proses rekrutmen calon Pegawai, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada siapapun tanpa memandang aspek gender, perbedaan etnis, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik tertentu. Perseroan berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip non-diskriminasi di dalam proses rekrutmen Pegawai dengan membuka kesempatan kerja yang sama bagi perempuan (*gender equity and equality*), sejauh memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Penerimaan ataupun pengangkatan calon Pegawai dilakukan secara transparan dimana hasil keputusannya senantiasa mengacu pada hasil seleksi dan evaluasi selama masa percobaan dan orientasi Pegawai.

2. **Kesempatan Untuk Mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan**

   Perseroan secara berkesinambungan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan SDM yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi setiap Pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Uraian lebih rinci mengenai program pendidikan dan pelatihan Pegawai yang telah dijalankan Perseroan di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab profil halaman 133.

IMPLEMENTATION AND ACTIVITIES

Employment

1. **Gender Equality and Career Opportunity**

   In recruitment process of prospective Employees, the Company always upholds the principles of Human Rights by opening the broadest job opportunities for anyone, without regardless with aspects of their sex, ethnic, religion, race, social class, gender, or certain physical conditions. The Company is committed to always applying the principle of non-discrimination into our employee recruitment process by equal employment opportunities for women (gender equity and equality), as long as they meet the specified requirements. Acceptance or appointment decision of our prospective Employees is always in a transparent manner that refers to the selection and evaluation results during their trial period and orientation.

2. **Opportunity to Participate Education and Training Programs**

   The Company continuously organizes HR education and training programs that aim to meet the competency needs for each Employee in accordance with their fields. The more detailed description of the Employee education and training program that has been carried out by the Company during 2020 can be seen in profile chapter page 133 in this report.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

3. Fasilitas Pendukung Kesejahteraan Pegawai

Perseroan telah menyediakan tempat/sarana ibadah baik di kantor pusat, cabang, maupun kapal yang bertujuan agar setiap Pegawai tetap dapat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

4. Kesejahteraan Pegawai

Perseroan senantiasa memperhatikan kualitas kesejahteraan seluruh Pegawainya dengan memberikan kompensasi dan manfaat yang sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan oleh setiap Pegawai terhadap Perseroan demi terciptanya level produktivitas kerja yang optimal. Adapun kompensasi dan manfaat yang diberikan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan yang nilainya disesuaikan dengan golongan dan/atau jabatan masing-masing. Selain menerima sejumlah kompensasi dan manfaat di atas, setiap Pegawai Perseroan juga memiliki jatah cuti yang disesuaikan dengan skala/golongan masing-masing berikut ini:

- Cuti Tahunan: 12 hari kerja (untuk Pegawai yang telah memenuhi masa kerja satu tahun).
- Cuti Bersalin/Keguguran:
  - 1,5 bulan sebelum perkiraan kelahiran.
  - 1,5 bulan setelah melahirkan.
- Cuti Bersama yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Selain cuti diatas, Pegawai juga berhak mengambil izin tidak masuk kerja seperti izin sakit, izin haid, izin penting, serta izin meninggalkan pekerjaan di luar tanggungan Perseroan.

3. Employee Welfare Supporting Facilities

The Company has provided a place/facility for praying both at the head office, branches and ships in order that each employee can continue to perform worship and religious activities in accordance with their beliefs.

4. Employee welfare

The Company always sharpens our focus on the welfare quality for all Employees by providing compensation and benefits fitted with their contributions made to the Company to create an optimal level of their work productivity. The compensation and benefits provided consist of basic salary and welfare benefits, which the value is adjusted to each class and/or position. Despite of those compensations and benefits, each Employee of the Company also has a ration of leave that is also adjusted to the following scale/class:

- Annual leave: 12 working days (for employees who have one year work period).
- Maternity/Miscarriage Leave:
  - 1.5 months before the estimated birth.
  - 1.5 months after giving birth.
- Public Leave in accordance with relevant laws and regulations.
- Besides those leaves, Our employees are also entitled to take permission not to come to work, such as sick leave, menstrual permits, important permits, as well as permission to leave their work beyond the responsibility of the Company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

5. Kebebasan Berserikat

Seluruh hak dan kewajiban Pegawai telah tertuang di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh pihak manajemen dan Serikat Pekerja Sebagai entitas bisnis yang selalu siap menghadapi berbagai tantangan dan fleksibel terhadap pengembangan organisasi, Perseroan bersikap terbuka terhadap setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan SDM. Sampai dengan tahun 2020, PT PELNI (Persero) memiliki 2 Serikat Pekerja/Serikat Pegawai yaitu SP PELNI dan Sekar PELNI. Sedangkan jumlah pegawai yang terdaftar dalam Serikat Pekerja/Serikat Pegawai sebanyak 3.821 Orang pegawai atau setara dengan 71.7% Pegawai.

6. Remunerasi Pegawai

Sebagai wujud kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah menetapkan kebijakan pemberian Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/P) yang besarannya disesuaikan dengan wilayah kerja operasional masing-masing Pegawai. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, maka gaji terendah yang diterima oleh Pegawai baru di Perseroan sekurang kurangnya sama dengan standar UMR/P yang berlaku di wilayah kerja operasional masing-masing Pegawai. Selain itu, setiap Pegawai juga menerima tunjangan lain yang disesuaikan dengan prestasi dan golongan jabatan. Secara rinci remunerasi pegawai PT PELNI (Persero) dapat dilihat pada sub bab Sumber Daya Manusia halaman 144.

5. Freedom to Associate

The rights and obligations of all employees have been stated in the Collective Labor Agreement (PKB) signed by the management and Labor Unions. As a business entity that is always ready to face varieties of challenges and flexibility in organizational development, the Company is open to any policy changes related to HR. Until 2020, PT PELNI (Persero) has 2 Labor Unions/Employees' Union, which are SP PELNI and Sekar PELNI. While the number of employees registered in these Labor Union/Employees' Union are 3.821 Employees or equal to 71.7% of our employees.

6. Remuneration for Employees

As a manifestation of our compliance with applicable manpower regulations, the Company has established a policy of giving Regional/Provincial Minimum Wages (R/PMW), which is the amount of employee salary adjusted to the operational working area. With this policy, the lowest salary received by entry level Employees of the Company fitted with the applicable PMW standard for each employee in the operational working area. In addition, each employee also receives other allowances according to the performance and position. The detail information of remuneration for employees of PT PELNI (Persero) contained in the Human Resources chapter, page 144.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

7. Tingkat *Turnover* Pegawai

Dalam rangka menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi semua Pegawai, Perseroan berupaya untuk mengelola tingkat *turnover* Pegawai dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2020, tingkat *turnover* Pegawai tercatat sebesar 6.13%, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

7. Employee Turnover Level

To create a conducive work climate for all employees, the Company strives to maintain turnover levels. In 2020, employee turnover level recorded 6,13% with the detail can be seen below:

Keterangan Description	Jumlah Total
Meninggal Dunia Passed away	29
Pengunduran Diri Resignation	14
Pemutusan Hubungan Kerja Work termination	-
Pensiun Retired	192
Lainnya Others	-
Jumlah Total	**235**

8. Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Apabila terjadi keluh kesah dan perselisihan terkait ketenagakerjaan, maka tahapan penyelesaian pada tingkat pertama dapat dilakukan oleh atasan langsung masing-masing Pegawai. Selanjutnya, jika keluh kesah dan perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan di level atasan langsung, maka Pegawai dapat mengajukan keluhan kepada level atasan yang memiliki jabatan lebih tinggi. Selanjutnya, jika belum juga dapat ditemukan solusinya, maka Pegawai dapat meneruskan aduannya kepada Serikat Pekerja untuk disampaikan kepada Direksi dan diselesaikan. Pada implementasinya, apabila persoalan yang dimaksud tetap tidak dapat diselesaikan pada tingkat Direksi, maka laporan tersebut dapat diteruskan oleh pihak yang bersengketa kepada Departemen Tenaga Kerja atau lembaga yang berwenang menurut peraturan perundangan untuk memperoleh jasa-jasa baik dalam penyelesaian masalahnya.

8. Manpower Complaint Mechanism

If there are complaints and dissensions related to our manpower, the settlement stage can pass through the supervisor of each employee at the first level. Furthermore, if these complaints and dissensions can not be resolved at the level of the direct supervisor, then the Employee can submit a complaint to a higher position level. And if a solution can not be found, the Employee can send forward the complaint to the Labor Union then to be submitted and resolved by the Directors. In its implementation, if the dissenting problem cannot be resolved at the Directors level, then the report can be forwarded by both concerned parties to the Department of Labor or the authorized institution according to the laws and regulations to obtain the best decision to solve the problem.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

1. **Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

   Guna memperlancar implementasi K3 di lingkungan kerja, PT PELNI (Persero) telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja. Selain itu, pembentukan P2K3 juga untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mengatur perusahaan yang mempekerjakan pegawai paling sedikit 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi atau pekerja berisiko tinggi wajib membentuk SMK3 dan LH, serta P2K3. Tugas P2K3 secara umum yaitu memberikan saran dan pertimbangan mengenai masalah K3. P2K3 PELNI berada di bawah naungan SMK3 dan mengkoordinir serta bertanggung jawab atas seluruh pegawai PELNI tanpa terkecuali. P2K3 PT PELNI (Persero) telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta guna menjamin perencanaan dan implementasi SMK3 LH terlaksana sesuai dengan ketentuan.

2. **Audit ISM-Code, ISPS-Code, dan SMK3**

   Secara rutin Perseroan telah melaksanakan audit Sistem Manajemen Keselamatan melalui program kerja *DPA-QHSSE* yaitu *ISM-Code* dan *ISPS-Code* yang didasari oleh regulasi *IMO (International Maritime Organization)* yang juga dikonsolidasikan pada *SOLAS (Safety of Life at Sea)* 1974 *Chapter IX* (untuk *ISM-Code*) dan XI-2 (untuk *ISPS-Code)* serta *SMK3* yang didasari oleh konvensi *ILO (International Labour Organization)* beserta turunannya seperti UU No.1 Th.1970 tentang Kesehatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Occupational Health and Safety (K3)

1. **Establishment of a Occupational Health and Safety Commission**

   In order to embody the occupational health and safety in work environments, we formed an occupational health and safety committee (P2K3) based on the laws No. 1 year of 1970 regarding work safety and the Ministry of Workforce of Republic of Indonesia Regulation No. 04/MEN/1987 related to occupational health and safety committee and work safety experts appointment. Furthermore, the forming of P2K3 team is to meet the Government Regulation No. 50 year of 2012 on the implementation of occupational health and safety management system, which regulates the companies who employing at least 100 employees and having the highest level of hazards or high risk job that must form occupational health, safety and environmental management system and its advisory committee (P2K3). The general duties of this P2K3 team are to give advice and suggestions relating to occupational health and safety problems. The P2K3 team is under the auspices of OHS Management System, coordinating and is responsible to the entire employees without any concerns. The P2K3 team of PT PELNI (Persero) has reported its duties based on the applicable regulations through the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office to ensure the planning and implementation of SMK3 LH was in line with the provisions.

2. **Audits of ISM-Code, ISPS-Code and OHS systems**

   The Company routinely carries out audits of the Safety Management System through the DPA-QHSSE work program, which is ISM-Code and ISPS-Code based on IMO (International Maritime Organization) regulations consolidated in SOLAS (Safety of Life at Sea) 1974 Chapter IX (for ISM-Code) and XI-2 (for ISPS-Code) as well as OHS systems based on ILO (International Labor Organization) conventions and their derivatives such as Law No.1 of 1970 on Occupational Health and the Government Regulation No. 50 of 2012 concerning Application of Work Safety and Health Management Systems.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

3. Fasilitas Kesehatan Bagi Pegawai

Adapun untuk layanan kesehatan pegawai, Sesuai PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT PELNI (Persero) Tahun 2014 Bab XII tentang Pemeliharaan Kesehatan & Keselamatan Pegawai, Pasal 57 mengenai Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan Pasal 58 tentang Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan lingkungan. Dibuktikan dengan adanya dokter perusahaan (klinik pegawai di Lantai X), asuransi kesehatan BPJS, *Bringinlife* dan jamsostek untuk pegawai dan keluarganya.

3. Health Care Facilities For Employees

Health care for employees is stated in the 2014 Collective Labor Agreement of PT PELNI (Persero) Chapter XII concerning Employee Health and Safety Maintenance, on Article 57 regarding Health Service Facilities and Article 58 concerning Safety, Security, Health and Environment. The Company provides the doctors, BPJS health insurance, Bringinlife and social security for employees and their families.

4. Laporan Keadaan Darurat Kapal

PT PELNI (Persero) mempunyai suatu Tim Lintas Direktorat yang akan merespon dan memberikan panduan, apabila diterima laporan dari salah satu kapal PT PELNI (Persero) tentang terjadinya suatu insiden atau keadaan darurat yang disebut dengan MRT (*Management Response Team*) maka Tim ini akan segera mengadakan rapat untuk menindaklanjuti. Selama tahun 2020, terdapat 8 laporan keadaan darurat kapal yang terdiri dari 1 keadaan darurat pada kapal penumpang, 1 kapal barang & tol laut, dan 4 kapal perintis serta 2 kapal rede. Dari seluruh laporan keadaan darurat tidak terdapat korban cidera maupun korban jiwa.

Tidak semua kasus keadaan darurat yang dilaporkan kepada DPA akan masuk Mahkamah Pelayaran. Hanya kasus menyebabkan kerugian pihak lain dan korban jiwa/pencemaran lingkungan *maritime* serta viral di media baik media sosial maupun media elektronik. Selama tahun 2020 tidak terdapat keadaan darurat pada kapal PT PELNI (Persero) yang masuk ke Mahkamah Pelayaran.

4. Ship Emergency Report

PT PELNI (Persero) has an inter-Directorate Team that will respond immediately and provide guidance, which leads to an emergency or incident report from one of PT PELNI (Persero) ships called the MRT (Management Response Team). This team will immediately hold a meeting to follow up. During 2020, this team has received 8 emergency reports which were 1 from passenger ship, 1 from cargo & Tol Laut ship, and 4 from pioneer ships as well as 2 from rede ships. From those emergency reports were no human injuries or casualties.

Not all cases of emergencies which were reportedly to the DPA appealing to the Shipping Court. Only cases cause loss of other parties and casualties/ pollution to the maritime environment and go viral in the media both social media and electronic media. During 2020, there were no emergencies on PT PELNI (Persero) ships that entered the Shipping Court.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

5. Sistem Manajemen Mutu

Dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga proses, dan memperluas jaringan pemasaran serta menjadi perusahaan berstandar Internasional, maka PT PELNI (Persero) menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan cakupan aktivitas operasional pelayanan kapal.

Pedoman Mutu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan peningkatan jasa pelayanan transportasi kapal laut dengan memperhatíkan pengelolaan Pelayanan dan Keselamatan Kapal sesuai dengan prosedur berbasis Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Adapun ruang lingkup penetapan Sistem Manajemen Mutu adalah "*Management Procedure of Passenger Service and Safety*".

Adapun Pedoman Mutu ini digunakan sebagai manual system dalam pelaksanaan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Rencana sertifikasi ISO 9001:2015 akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

5. Quality Management System

In increasing and looking forward the quality of services and human resources, maintaining the process and expanding the market to be the leading international standard Company, PT PELNI (Persero) practices Quality Management System into range activities of all operational services of the ships.

This quality guideline is designed to fulfill the sea transport demand by looking more closely the services and safety management of the ships that fit with ISO 9001:2015 International Standard Quality Management System. This quality management system has the scope of work which is "Management Procedure of Passenger Service and Safety".

This quality guideline is also used for manual system in implementing ISO 9001:2015 Quality Management System that will be applied in Fiscal Year 2021.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO COSTUMERS

PT PELNI (Persero) menyadari bahwa kepuasan pelanggan menjadi sebuah faktor kunci keberlangsungan usaha di masa yang akan datang terkait dampaknya secara langsung pada kinerja keuangan Perusahaan. Untuk itu, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik yang dihasilkan.

PT PELNI (Persero) is aware that customer satisfaction is an essential key factor of business sustainability for the years to come which has a direct impact on the Company's financial performance. For this reason, the Company is always committed to delivering service excellence.

Kebijakan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan terdapat dalam Proses penyampaian dan tindak lanjut keluhan pelanggan merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 04.28/03/SK/HKO.01/2016 tentang Penetapan *Standard Operating Procedures (SOP) Contact Center* Info PELNI yang mengatur standar pelayanan pelanggan melalui "Info PELNI 162."

The policy of social responsibility to customers is in the process of delivering and following up the customer complaints that refers to the Directors Decree No. 04.28/03/SK/HKO.01/2016 concerning Establishment of Contact Center Standard Operating Procedure (SOP) for PELNI Info which regulates customer service standards through "PELNI Info 162."

Guna mendukung pelayanan kepada pelanggan, PT PELNI (Persero) juga menyediakan layanan *Contact Center* sebagai berikut:

Other than through these divisions, to support service to the customers, PT PELNI (Persero) also provides Contact Center services, as follows:



TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA PELANGGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO COSTUMERS

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN 2020

Pada tahun 2020 Perseroan memiliki rencana kerja dan kegiatan mengenai tanggung jawab sosial di bidang konsumen antara lain:

1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut dalam aspek kenyamanan dan keselamatan mencakup mutu dan citarasa makanan, kebersihan, *hospitality*, hiburan, dan fasilitas kesehatan di atas kapal.
2. Tertib administrasi.
3. Efsiensi dalam penggunan peralatan dapur.
4. Peningkatan *control* terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penumpang dan awak kapal.
5. Tersedianya informasi produk perusahaan (Jadwal, Tarif, Reservasi, *customer care* dan informasi lainnya).

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Sepanjang tahun 2020 Perseroan telah melakukan kegiatan yang menyangkut tanggung jawab terhadap konsumen baik kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan yang baru dilakukan antara lain:

- Melakukan pengembangan pada website Perusahaan untuk memudahkan pemesanan tiket melalui website;
- Melakukan perbaikan dan pengembangan fasilitas pada kapal;
- Menindaklanjuti keluhan pelanggan;
- Menerapkan tata kelola pelayanan calon penumpang menggunakan protokol kesehatan yang ketat selama masa pandemi;
- Menyediakan *hand-washing station on board*.

TARGET AND ACTIVITIES PLANNING IN 2020

In 2020, the Company had work program and activity plan related with Corporate Social Responsibility to our customer, including:

1. Compliance of passenger sea transport service standard for comfort and safety aspects has been covering the quality and food taste, hygiene, hospitality, entertainment, and health facilities on board.
2. Well-manage administration
3. Efficiency in using kitchen equipments
4. More control in conducting hospitality to passenger and crews
5. Availability of Product Information (Schedule, Tariff, Reservation, Customer Care and other informations).

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO CUSTOMER

Throughout 2020, the Company has conducted responsibility activities for customer, both routine and new activities, including:

- Developing the Company's website to facilitate ticket ordering via the website;
- Repairing and development of facilities on ships;
- Follow up on customer complaints;
- Applying passenger service governance under strict health protocol during the pandemic situation;
- Providing hand-washing stations on board.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program PKBL ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam setiap kegiatannya, PT PELNI (Persero) selalu berusaha untuk melibatkan para pemangku kepentingan terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha PT PELNI (Persero).

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan PT PELNI (Persero) diterapkan melalui program PKBL. Setiap tahunnya PT PELNI (Persero) telah mencanangkan target dan rencana kerja program PKBL. Rencana kerja tersebut dibagi dalam dua bagian yaitu Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). Target Dan rencana kerja tersebut dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Melakukan penyaluran dana dalam program kemitraan dan melakukan pembinaan terhadap mitra binaan;
2. Mengelola, mengevaluasi dan *monitoring* laporan dan pengembalian kredit Dana Kemitraan untuk peningkatan kolektibilitas pinjaman;

COMMITMENT AND POLICY

The Partnership and Community Development Program(PKBL) refers to the Minister of State Owned Enterprises Regulation No.PER-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 regarding the Partnership and Community Development Programs and amended the latest changes in accordance with Regulation of the Minister ofState-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/07/2017 dated July 5, 2017 concerning Second Amendment of SOEMinister Regulation No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership Program and Community Development Program. This PKBL program aims to assist the Government in implementing more equitable development and improving community welfare.In each of its activities, PT PELNI (Persero) always strives to involve stakeholders, especially the community who are around the business area of PT PELNI (Persero).

TARGET AND ACTIVITY PLAN

Corporate Social Responsibility in the social and community of PT PELNI (Persero) is implemented through PKBL program. Every year, PT PELNI (Persero) has launched the target and work plan for the PKBL program. The work plan is divided into two parts, namely Partnership Program (PK) and Community Development (BL). The target and workplan can be seen in the details below:

1. Distributed funds for partnership programs and fostered partners coaching;
2. Managed, evaluated and monitored reports and repayments of Partnership Fund loans to increase loan collectability;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

3. Penyaluran Dana Bina Lingkungan yang dipergunakan untuk bantuan kemanusiaan dalam bentuk sebagai berikut:
   - Bantuan bencana alam.
   - Bantuan pendidikan.
   - Peningkatan kesehatan masyarakat.
   - Pengembangan prasarana dan sarana umum.
   - Bantuan Sarana ibadah.
   - Pelestarian alam.
   - Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

3. Distributed Community Development Funds for humanity assistance in the following activities:
   - Natural disaster.
   - Educational.
   - Improved public health.
   - Development of public infrastructure and facilities.
   - Assistances for worship facilities.
   - Nature conservation.
   - Social assistance for poverty alleviation

REALISASI KEGIATAN

Di sepanjang 2020, Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan CSR terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti:

Program Kemitraan

Pada tahun 2020 untuk penyalurannya terdapat penambahan mitra binaan sebanyak 40 unit usaha kecil, dengan total dana pinjaman mitra binaan yang telah disalurkan sebesar Rp1.790.000.000.

PROGRAM REALIZATION

During 2020, The Company has organized some CSR programs on social and community developments, such as:

Partnership Program

In 2020, for partnership program distribution funds, there was an additional assisted partner up to 40 small-business units, with a total of Rp1.790.000.000 in loans to the assisted partners.

Mitra Binaan Fostered Partners	Jumlah Penyaluran Total Distribution	Jumlah Mitra Binaan Total Fostered Partners
Usaha Kecil Small Enterprises	Rp42.348.508.264	1.311
Usaha Kecil Small Enterprises	Rp3.593.412.007	199
Jumlah Total	Rp45.941.920.271	1.510

Realisasi sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2020 berasal dari pengembalian pinjaman mitra binaan yaitu hutang pokok ditambah dengan bunga sedangkan sumber dana lainnya adalah dari jasa giro, pendapatan lain-lain.

The realization of the Partnership and Community Development program fund sources in 2020 derived from the repayment of the loan from the assisted partners,namely principal plus interest, while other fund sources are from demand deposit services, other income.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Dana yang terhimpun untuk program kemitraan tahun 2020 adalah sebesar Rp1.960.869.256 miliar atau 81% dari anggaran sebesar Rp2.430.000.000 miliar. Dana tersebut berasal dari saldo awal tahun lalu ditambah pengembalian pokok pinjaman, jasa administrasi pinjaman, jasa giro dan pendapatan lain-lain. Adapun tidak tercapainya rencana penerimaan angsuran pokok pinjaman dari mitra binaan dikarenakan adanya dampak pandemi Covid 19.

The Collected funds for the 2020 partnership program was Rp1.960.869.256 billion or 81% from the budget of Rp2.430.000.000 billion. The funds were derived from loan principal repayments plus loan administration services, demand deposit services, additional allocation of funds from StateOwned Enterprises builder (cost) and other income.

Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dalam bentuk pinjaman modal usaha sampai dengan akhir Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp1.790.000.000 miliar atau 80,27% dari anggaran 2020 sebesar Rp2.230.000.000 miliar, sedangkan pembinaan mitra binaan di tahun 2020 sebesar Rp98.995.000 juta.

Assisted partners loans in the form of business capital loans at the end of December 2020 was Rp1.790.000.000 billion or 80.27% of the 2019 budget was Rp2.230.000.000 billion, while the assisted partners development in 2020 was at Rp98.995.000 million.

Program Pembinaan

Pada tahun 2020 pelaksanaan program pembinaan mitra binaan telah dilakukan kepada 23 mitra binaan di lampung dengan biaya sebesar Rp98.995.000 juta. Dana hibah ini diberikan dalam bentuk seminar tentang peningkatan kemampuan manajemen pengembangan dan pengelolaan usaha perikanan.

Development Program

In 2020, the implementation of this partnership program was for 23 development partners at a cost of Rp98.995.000 million. This cost spent for some seminars regarding management and development capacity of fishery business.

Program Bina Lingkungan

Dalam realisasi program Bina Lingkungan tahun 2020, PT PELNI (Persero) telah berhasil menyalurkan dana sebesar Rp2.850.000.000 miliar atau terealisasi sebesar 100% dalam bentuk pemberian sumbangan/ bantuan korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan untuk penanggulangan wabah Covid 19, pembangunan dan renovasi sarana ibadah, pelestarian alam dan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Environmental Program

PT PELNI (Persero) has been successful to distribute Rp2.850.000.000 billion or 100% for Community development programs 2020 in the form of donations/ assistance for natural disaster victims, education, health, the prevention of the Covid-19 Outbreak, worship construction and renovation, nature conservation and social activities to alleviate poverty.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Rincian penyaluran dana pada program Bina Lingkungan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The detail distribution of funds for the Community Development program in 2020 can be seen in the following table:

Bantuan Penanggulangan Wabah Covid-19
Covid-19 Handling Assistance

Jenis Bantuan Kind of Assistances	Realisasi Realization
Pembelian Alat Kesehatan atau Medical Multi Zone Purchasing of Medical Tools or Medical Multi Zone	Rp65.925.272
Pembelian Masker untuk ABK Purchasing of Masks for Ship Crews	Rp54.209.000
Pengadaan Konsumsi untuk Relawan Covid-19 Food assistance for Covid-19 volunteers	Rp10.000.000
Sharing Pembelian Masker Sinergi BUMN Share Purchasing of Mask in Sinergi BUMN program	Rp5.000.000
Pemberian Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid 19 Food and Groceries for the community affected Covid-19	Rp50.000.000
Bantuan Kuota Internet Untuk Guru Dan Masyarakat Kurang Mampu Saat Belajar Daring Internet quota for the teacher and poor community for online learning	Rp10.000.000
Jumlah Total	**Rp195.134.272**

Bantuan Lainnya
Other Assistances

Jenis Bantuan Kind of Assistances	Realisasi Realization
Bantuan korban bencana alam Natural disaster victims assistance	Rp85.013.050
Bantuan bencana non-alam Non-Natural Disaster Assistance	Rp250.000.00
Bantuan pendidikan/pelatihan Education/training assistance	Rp56.500.000
Bantuan peningkatan kesehatan Health improvement assistance	Rp255.134.272
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum Development of infrastructure and/or public facilities assistance	Rp265.925.000
Bantuan sarana ibadah Place of worship assistance	Rp196.082.000
Bantuan pelestarian alam Nature conservation assistance	Rp632.205.000
Bantuan sosial kemasyarakatan Social community assistance	Rp1.079.870.414
Jumlah Total	**Rp2.850.000.000**

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN PT PELNI (PERSERO) TAHUN 2020

Statement of Board of Commissioner and Board of Director Members on Accountability for the Annual Reports PT PELNI (Persero) 2020

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT PELNI (PERSERO)

STATEMENT OF BOARD OF COMMISSIONER AND BOARD OF DIRECTOR MEMBERS ON ACCOUNTABILITY FOR THE ANNUAL REPORTS 2020 OF PT PELNI (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PELNI (Persero) Tbk tahun buku 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Agustus 2021

We undersigned below, testify that all information in PT PELNI (Persero) Annual Report 2020 is presented in its entirely and we are fully responsible for content accuracy in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements. This statement hereby made in all truthfullness.

Jakarta, August 2021

DEWAN KOMISARIS
The Board of Commissioners



Ali Masykur Musa
Komisaris Utama
President Commissioner



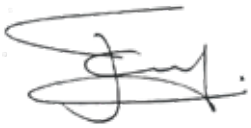
Wahju Adji Herpriarsono
Komisaris
Commissioner



Haryo Indratno
Komisaris
Commissioner



Eddy Susanto Soepadmo
Komisaris
Commissioner



Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris
Commissioner



Kristia Budiyarto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT PELNI (PERSERO)

STATEMENT OF BOARD OF COMMISSIONER AND BOARD OF DIRECTOR MEMBERS ON ACCOUNTABILITY FOR THE ANNUAL REPORTS 2020 OF PT PELNI (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PELNI (Persero) Tbk tahun buku 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Agustus 2021

We undersigned below, testify that all information in PT PELNI (Persero) Annual Report 2020 is presented in its entirely and we are fully responsible for content accuracy in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements. This statement hereby made in all truthfullness.

Jakarta, August 2021

DIREKSI
The Board of Directors

Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Director

Olih Masolich Sodikin
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Transportation Business

Yahya Kuncoro
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut
Director of Freight Cargo and Sea Toll Business

Robert MP Sinaga
Direktur Armada dan Teknik
Director of Fleet and Engineering

Ony Suprihartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

Ganefi
Direktur SDM dan Umum
Director of HR and General Affairs

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016:
Annual Report of Public Company

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		**I. General Provision**
1. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√	1. Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making an investment decision, and is a means of monitoring issuers or public company.
2. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√	2. Along with the development of Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through an annual report.
3. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√	3. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.	√	4. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.
II. Bentuk Laporan Tahunan		**II. Format of Annual Report**
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√	3. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.
III. Isi Laporan Tahunan		**III. Format of Annual Report**
1. Ketentuan Umum	√	1. General Provision
a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	√	a. Annual Report should contain at least the following information:
1. Ikhtisar data keuangan penting;	**12-15**	1. Summary of key financial information;
2. Informasi saham (jika ada);	**N/A**	2. Stock information (if any);
3. Laporan Direksi;	**55-73**	3. The Board of Directors report;
4. Laporan Dewan Komisaris;	**39-47**	4. The Board of Commissioners report;
5. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	**84-203**	5. Profile of Issuer or Public Company;
6. Analisis dan pembahasan manajemen;	**206-261**	6. Management Discussion and Analysis
7. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	**264-459**	7. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	**464-491**	8. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	**538-706**	9. Audited annual report; and
10. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	**493-495**	10. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;
b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;	√	b. Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Uraian Isi Laporan Tahunan	√	2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	**12-15**	**a. Summary of Key Financial Information** Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1. Pendapatan/penjualan;	√	1. Income/sales;
2. Laba bruto;	√	2. Gross profit;
3. Laba (rugi);	√	3. Profit (loss);
4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	4. Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;
5. Total laba (rugi) komprehensif;	√	5. Total comprehensive profit (loss);
6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	6. Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7. Laba (rugi) per saham;	√	7. Earning (loss) per share;
8. Jumlah aset;	√	8. Total assets;
9. Jumlah liabilitas;	√	9. Total liabilities;
10. Jumlah ekuitas;	√	10. Total equities;
11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	√	11. Profit (loss) to total assets ratio;
12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	√	12. Profit (loss) to equities ratio;
13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	√	13. Profit (loss) to income ratio;
14. Rasio lancar;	√	14. Current ratio;
15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	√	15. Liabilities to equities ratio;
16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	√	16. Liabilities to total assets ratio; and
17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	√	17. Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b. Ikhtisar Data Keuangan Penting Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	**N/A**	**b. Summary of Key Financial Information** Stock Information (if any) at least contains:
1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	-	1. Shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a. Jumlah saham yang beredar;	-	a. Number of outstanding shares;
b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	-	b. Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on
c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	-	c. Highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on;
d. volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	-	d. Share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;		Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;		Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham *(stock split)*, penggabungan saham *(reverse stock)*, dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	-	2. In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	-	a. Date of corporate action;
b. Rasio pemecahan saham *(stock split)*, penggabungan saham *(reverse stock)*, dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;	-	b. Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	-	c. Number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	-	d. Share price prior to and after corporate action;
3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)*, dan/atau penghapusan pencatatan saham *(delisting)* dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau penghapusan pencatatan saham *(delisting)* tersebut; dan	-	3. In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau penghapusan pencatatan saham *(delisting)* sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau penghapusan pencatatan saham *(delisting)* tersebut;	-	4. In the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat:	**55-73**	**c. The Board of Directors Report** The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1. Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	**57-63**	1. The performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	**59-63**	a. Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	**60-61**	b. Comparison between achievement of results and targets; and
c. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	**62-63**	c. Challenges faced by the Issuer or Public Company;
2. Gambaran tentang prospek usaha;	**63-66**	2. Description on business prospects;
d. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	**39-47**	**d. The Board of Commissioners Report** The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	**39-41**	1. Assessment of the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;
2. Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	**41-42**	2. Supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	**42**	3. View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;
4. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	**42-43**	4. View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
5. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	**46-47**	5. Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and
6. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	**45**	6. The frequency and procedure of providing advice to members of the Board of Directors;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	**84-203**	**e. Profile of the Issuer or Public Company** Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	**84-85**	1. Name of Issuer or Public Company, including change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	**84-85**	2. Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where the public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a. Alamat;	√	a. Address;
b. Nomor telepon;	√	b. Telephone number;
c. Nomor faksimile;	√	c. Facsimile number;
d. Alamat surat elektronik; dan	√	d. E-mail address; and
e. Alamat Situs Web;	√	e. Website address;
3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	**86-87**	3. Brief history of the Issuer or Public Company;
4. Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	**102-103**	4. Vision and mission of the Issuer or Public Company;
5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	**92-95**	5. Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	**108-111**	6. Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
7. Profil Direksi, paling sedikit memuat:	**74-81**	7. The Board of Directors profiles include:
a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	√	a. Name and short description of duties and functions;
b. Foto terbaru;	√	b. Latest photograph;
c. Usia;	√	c. Age;
d. Kewarganegaraan;	√	d. Citizenship;
e. Riwayat pendidikan;	√	e. Education;
f. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f. History position, covering information on:

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	1. Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
2. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	2. Dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and
3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	3. Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	√	g. Competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Directors during the year under review (if any); and
h. Hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	√	h. Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party;
8. Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	**48-53**	8. The Board of Commissioners profiles, at least include:
a. Nama;	√	a. Name;
b. Foto terbaru;	√	b. Latest photograph;
c. Usia;	√	c. Age;
d. Kewarganegaraan;	√	d. Citizenship;
e. Riwayat pendidikan;	√	e. Education;
f. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f. History position, covering information on:
1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	1. Legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
2. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	2. Dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and
3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	3. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	√	g. Competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Commissioner during the year under review (if any);
h. Hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan	√	h. Affiliation with other members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party; and
i. Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	√	i. Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
9. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	**74-81, 48-53**	9. In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
10. Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;	**115-119**	10. Number of employees and description of the distribution of education level and age of the employee in the year under review;
11. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	**186**	11. Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	**N/A**	a. Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	**N/A**	b. Board of Commissioners and Board of Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and
c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masingmasing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	**N/A**	c. Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
12. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	**N/A**	12. Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a. Kepemilikan institusi lokal;	**-**	a. Ownership of local institutions;
b. Kepemilikan institusi asing;	**-**	b. Ownership of foreign institutions;
c. Kepemilikan individu lokal; dan	**-**	c. Ownership of local individual; and
d. Kepemilikan individu asing;	**-**	d. Ownership of foreign individual;
13. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	**187**	13. Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
14. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	**188-190**	14. Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any); For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
15. Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	**N/A**	15. Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
16. Kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);	**N/A**	16. Chronology of securities listing in addition to the said security in point 15), which at least should contain the name of the Securities, year of issuance, date of maturity, bid price, and rating of the securities (if any);

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
17. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	**191**	17. Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals;
18. Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi *(fee)*, dan periode penugasan; dan	**191**	18. In the event that the capital market supporting professionals provide services on a regular basis to the Issuer or the Public Company, then information on the services provided, fee and period of assignment should be disclosed; and
19. Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	**28-35**	19. Awards and/or certification of national and international scales bestowed on the Issuer or Public Company during the last fiscal year (if any), covering:
a. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	a. Name of award and/or certification;
b. Badan atau lembaga yang memberikan; dan	√	b. Organization/institution that gives the awards; and
c. Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada);	√	c. Award/certificate validity period (if any);
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	**206-261**	**f. Management Discussion and Analysis** Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1. Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	**210-218**	1. Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	√	a. Production, which includes process, capacity and its development;
b. Pendapatan/penjualan; dan	√	b. Income/sales; and
c. Profitabilitas;	√	c. Profitability;
2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai	**219-233**	2. Comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	√	a. Current assets, non-current assets, and total assets;
b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	√	b. Current liabilities, non-current liabilities, total liabilities;
c. Ekuitas;	√	c. Equity;
d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	√	d. Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e. Arus kas;	√	e. Cash flows;
3. Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	**236-237**	3. The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4. Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	**236-237**	4. Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Struktur modal *(capital structure)* dan kebijakan manajemen atas struktur modal *(capital structure)* tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	**238-239**	5. Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	**240**	6. Discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a. Tujuan dari ikatan tersebut;	√	a. The purpose of such ties;
b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	√	b. Source of funds expected to fulfill the said ties;
c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan	√	c. Currency of denomination; and
d. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	√	d. Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	**240-241**	7. Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a. Jenis investasi barang modal;	√	a. Type of investment of capital goods;
b. Tujuan investasi barang modal; dan	√	b. Objective of the investment of capital goods;and
c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	√	c. Value of the investment of capital goods;
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	**245-248**	8. Material Information and facts that occurring after thedate of the accountant's report (if any);
9. Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	**258-261**	9. Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	**242-244**	10. Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a. Pendapatan/penjualan;	√	a. Income/sales;
b. Laba (rugi);	√	b. Profit (loss);
c. Struktur modal (capital structure); atau	√	c. Capital structure; or
d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	d. Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11. Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	**242**	11. Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a. Pendapatan/penjualan;	√	a. Income/sales;
b. Laba (rugi);	√	b. Profit (loss);
c. Struktur modal (capital structure); atau	√	c. Capital structure; or
d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	d. Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12. Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	**257**	12. Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
13. Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	**249**	13. Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a. Kebijakan dividen;	√	a. Dividend policy;
b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/ atau tanggal distribusi dividen non kas;	√	b. The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	√	c. Amount of cash per share (cash and/ or non cash); and
d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	√	d. Amount of dividend per year paid;
14. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	**N/A**	14. Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	-	a. During the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	-	b. In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	**N/A**	15. Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, along others include:
a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	-	a. Transaction date, value, and object;
b. Nama pihak yang melakukan transaksi;	-	b. Name of transacting parties;
c. Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	-	c. The nature of the Affiliate relationship (if any);
d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	-	d. Description of the fairness of the transaction; and
e. Pemenuhan ketentuan terkait;	-	e. Compliance with related rules and regulations;
16. Perubahan ketentuan peraturan perundangundangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	**250**	16. Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	**251-252**	17. Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);
g. **Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik** Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	**262-459**	g. **Corporate Governance of the Issuer or Public Company** Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1. Direksi, mencakup antara lain:	**344-350**	1. The Board of Directors, covering:
a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	√	a. The tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam *(charter)* Direksi;	√	b. Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c. Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. Procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration of each member of the Board of Directors, relation between remuneration and performance of the Issuer or Public Company;
d. Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	√	d. The policies and the frequency of the meeting of the Board of Directors, including the joint meeting with Board of Commissioners, and attendance of member of the Board of Directors in the said meeting;
e. Informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	√	e. Information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:
1. Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	√	1. AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
2. Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;	√	2. Explanation for the unrealized resolution;
f. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	√	f. Information on the resolution from the AGM of the year, covering:
1. Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	√	1. AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
2. Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;	√	2. Explanation for the unrealized resolution;
g. Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	√	g. Assessment of the performance of the committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors
2. Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	**321-343**	2. The Board of Commissioners, cover:
a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	√	a. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam *(charter)* Dewan Komisaris;	√	b. Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c. Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;	√	c. Procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration for each member of Board of Commissioners
d. Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	√	d. Policies and frequency of meeting of the Board of Commissioners, including meeting with the Board of Directors, and attendance of each member of the Board of Commissioners in the said meetings;
e. Kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	√	e. Policies of the Issuer or Public Company regarding the assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
1. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	√	1. Procedure for the implementation of performance assessment;
2. Kriteria yang digunakan; dan	√	2. Criteria for assessment; and
3. Pihak yang melakukan penilaian;		3. Assessor;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
f. Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	√	f. Assessment on the performance of the committees under the Board of Commissioners; and
g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	√	g. In the event that the Board of Commissioners does not establish the Nomination and Remuneration Committee, then should contain at least:
1. Alasan tidak dibentuknya komite; dan	√	1. Reason not to establish the committee; and
2. Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	√	2. Procedure of nomination and remuneration performed in the year under review;
3. Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	**N/A**	3. Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a. Nama;	-	a. Name;
b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	-	b. Duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
c. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	-	c. Frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles of the Issuer or Public Company in the Capital Market;
4. Komite Audit, mencakup antara lain:	**388-399**	4. Audit Committee, among others covering:
a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a. Name and position in the committee;
b. Usia;	√	b. Age;
c. Kewarganegaraan;	√	c. Citizenship;
d. Riwayat pendidikan;	√	d. Education background;
e. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e. History of position; including:
1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	1. Legal basis for the appointment as member of the committee;
2. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	2. Dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	3. Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f. Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	√	f. Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g. Pernyataan independensi Komite Audit;	√	g. Statement of independence of the Audit Committee;
h. Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	√	h. Policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee;
i. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√	i. Education and/or training during the year under review (if any); and

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
j. Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam *(charter)* Komite Audit;	√	j. The activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
5. Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	**400-414**	5. Another committee of the Issuer or the Public Company formed to support the function and duty of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, such as Nomination and Remuneration Committee, containing:
a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a. Name and position in the committee;
b. Usia;	√	b. Age;
c. Kewarganegaraan;	√	c. Citizenship;
d. Riwayat pendidikan;	√	d. Education background;
e. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e. History of position; including:
1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	1. Legal basis for the appointment as member of the committee;
2. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	2. Dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	3. Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f. Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	√	f. Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g. Uraian tugas dan tanggung jawab;	√	g. Description of duty and responsibility;
h. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	√	h. Statement that the Committee has already had the Charter;
i. Pernyataan independensi komite;	√	i. Statement of independence of the Committee;
j. Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	√	j. Policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;
k. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√	k. Education and/or training during the year under review (if any); and
l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	√	l. Brief description on the activities of the committee;
6. Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	**416-418**	6. Corporate Secretary, including:
a. Nama	√	a. Name;
b. Domisili;	√	b. Domicile;
c. Kewarganegaraan;	√	c. Citizenship;
d. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e. History of position; including:
1. Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	√	1. Legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
2. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2. Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
e. Riwayat pendidikan;	√	e. Education background;
f. Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	√	f. Education and/or training during the year under review; and
g. Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	√	f. Brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
7. Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	**419-428**	7. Internal Audit Unit, among others including:
a. Nama kepala Unit Audit Internal;	√	a. Name of Head of Internal Audit Unit;
b. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	b. History of position, including:
1. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan	√	1. Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
2. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2. Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	√	c. Qualification or certification as internal auditor (if any);
d. Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	√	d. Education and/or training during the year under review;
e. Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	√	e. Structure and position of Internal Audit Unit;
f. Uraian tugas dan tanggung jawab;	√	f. Description of duties and responsibilities;
g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam *(charter)* Unit Audit Internal; dan	√	g. Statement that the Internal Audit Unit has already had Internal Audit Unit charter; and
h. Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	√	h. Brief description of on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;
8. Uraian mengenai sistem pengendalian internal *(internal control)* yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	**429-430**	8. Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan lainnya; dan	-	a. Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	-	b. Review on the effectiveness of internal control systems;
9. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	**432-440**	9. Risk management system implemented by the company, at least includes:
a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a. General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	√	b. Types of risk and the management; and
c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company;
10. Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, asaris (jika ada), antara lain meliputi:	**446-449**	10. Important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others include:

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
a. Pokok perkara/gugatan;	√	a. Substance of the case/claim;
b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	√	b. Status of settlement of case/claim; and
c. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
11. Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	**449**	11. Information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
12. Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	**441-445**	12. Information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a. Pokok-pokok kode etik;	√	a. Key points of the code of conduct;
b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	√	b. Socialization of the code of conduct and enforcement; and
c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;
13. Informasi mengenai budaya perusahaan *(corporate culture)* atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	**104-107**	13. Information about corporate culture (if any) of the Issuer or Public Company;
14. Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	**249**	14. Description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others contains:
a. Jumlah saham dan/atau opsi;	√	a. Number of share and/or option;
b. Jangka waktu pelaksanaan;	√	b. Period;
c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	√	c. Requirement for eligible employee and/or management; and
d. Harga pelaksanaan;	√	d. Exercised price;
15. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system)* di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	**452-457**	15. Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a. Cara penyampaian laporan pelanggaran;	√	a. Mechanism for violation reporting;
b. Perlindungan bagi pelapor;	√	b. Protection for the whistleblower;
c. Penanganan pengaduan;	√	c. Handling of violation reports;
d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan	√	d. Unit responsible for handling of violation report; and
e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	√	e. Results from violation report handling, at least includes:
1. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	√	1. Number of complaints received and processed during the fiscal year; and
2. Tindak lanjut pengaduan;	√	2. Follow up of complaints;
16. Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	**N/A**	16. Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	-	a. Statement regarding the recommendation that has been implemented; and/or
b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	-	b. Description of recommendation that has not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	**462-491**	**h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company**
1. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	**474-477**	1. Information on the social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company that covers policies, types of programs, and cost, among others related to:
a. Lingkungan hidup, antara lain:	√	a. Environment, among others:
1. Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;	√	1. The use of environmentally friendly and recyclable materials and energy;
2. Sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2. The waste treatment systems of the Issuer or Public Company;
3. Mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan	√	3. Mechanism for filing a complaint on environmental issues; and
4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	√	4. Environmental certifications;
b. Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	√	b. Employment practices, occupational health and safety, among others:
1. Kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja;	√	1. Gender equality and equal work opportunity;
2. Sarana dan keselamatan kerja;	√	2. Work and safety facilities;
3. Tingkat perpindahan *(turnover)* karyawan;	√	3. Employee turnover;
4. Tingkat kecelakaan kerja;	√	4. Work incident rate;
5. Pendidikan dan/atau pelatihan;	√	5. Education and/or training;
6. Remunerasi; dan	√	6. Remuneration; and
7. Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	√	7. Mechanism for filling complaint on employment issues;
c. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	√	c. Social and community development, among others:
1. Penggunaan tenaga kerja lokal;	√	1. The use of local work force;
2. Pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;	√	2. Empowerment of local communities among others through the use of raw material produced by the community or by providing education;
3. Perbaikan sarana dan prasarana sosial;	√	3. Improvement of public social facilities and infrastructure;
4. Bentuk donasi lainnya; dan	√	4. Other form of donation; and
5. Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	√	5. Dissemination of the policies and procedures of anti-corruption at the Issuers or Public Company, and training on anti-corruption (if any);

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK REFERENCE NO. 30-SEOJK.04-2016: ANNUAL REPORT OF PUBLIC COMPANY

Keterangan	Halaman Page	Description
d. Tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	√	d. Products and/or services responsibilities, among others:
1. Kesehatan dan keselamatan konsumen;	√	1. Consumers' health and safety;
2. Informasi barang dan/atau jasa; dan	√	2. Products and/or services information; and
3. Sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	√	3. Facilities, number, and resolution of consumer complaint.
2. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan *(sustainability report),* Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan	√	2. In the event that the Issuer or the Public Company imparts information on social and environmental responsibility as referred to in point 1) in separate report such corporate social and environmental responsibility report, or sustainability report, then the Issuers or the Public Company is excluded from disclosing information on social and environmental responsibility in Annual Report; and
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;	√	4. The said report in point 2) should be submitted to the Financial Service Authority along with the Annual Report;
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	**538-706**	**i. Audited Annual Financial Statement** Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with the statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislation in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislation in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	**493-495**	**j. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting** Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 Annual Report Award Criteria

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Umum		**I. General**
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.	√	1. The Annual Report shall be written in good and correct Indonesian, and is recommended to be presented in English.
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca..	√	2. The Annual Report shall be printed with good quality using readable type and size of fonts.
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:	√	3. The Annual Report shall present clear identity of the company name and the annual report financial year shall be presented on:
1. Sampul muka;	√	1. Front Cover;
2. Samping;	√	2. Side Cover;
3. Sampul belakang; dan	√	3. Back Cover; and
4. Setiap halaman.	√	4. Every page
4. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan, mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√	4. Annual reports shall be displayed on the company's website, including the latest annual reports and at least the last 4 years.
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting		**II. Key Financial Highlights**
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	**12-15**	1. Income statement in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.
Informasi memuat antara lain:	√	Information contains the following:
1. Penjualan/pendapatan usaha;	√	1. Front Cover;
2. Laba (rugi):	**12-15**	2. Profit (loss):
a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	√	a. Attributable to equity holders of the parent entity; and
b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali;	√	b. Attributable to non controlling interest;
3. Penghasilan komprehensif periode berjalan:	√	3. Total comprehensive profit (loss):
a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	√	a. Attributable to equity holders of the parent entity; and
b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali;	√	b. Attributable to non controlling interest;
4. Laba (rugi) per saham.	√	4. Earning (loss) per share.
Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.		Note: If the company does not have subsidiaries, the profit (loss) and other comprehensive income is presented in total.
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	**12-15**	2. Financial position in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.
Informasi memuat antara lain:	√	Information contains the following:
1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;	√	1. Total investment on associates;
2. Jumlah aset;	√	2. Total assets
3. Jumlah liabilitas; dan	√	3. Total liabilities; and
4. Jumlah ekuitas.	√	4. Total equity.

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	**12-13**	3. Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.
Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	√	Information covers 5 (five) financial ratios, which are generally applied and relevant to the company's industry.
4. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	**N/A**	4. Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.
1. Jumlah saham yang beredar;	-	1. Number of shares outstanding;
2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:	-	2. The table forms contain the following information:
a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	-	a. Market capitalization based on the share price on the Stock Exchange where the share are listed;
b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	-	b. Highest, lowest and closing the share price based on share price on the Stock Exchange where the share are listed; and
c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	-	c. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed.
3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:	-	3. The graph forms contain at least the following information:
a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	-	a. The closing price of shares based on the share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and
b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	-	b. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.		Note: Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	**N/A**	5. Information regarding outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, in 2 (two) latest financial years.
Informasi memuat:		Information contains:
1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar *(outstanding);*	-	1. Number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds;
2. Tingkat bunga/imbalan;	-	2. Interest rate/yield;
3. Tanggal jatuh tempo; dan	-	3. Maturity date; and
4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2018 dan 2019.	-	4. Rating of bonds/sukuk in 2018 and 2019.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/ sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.		Note: Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.
III. Laporan Manajemen		**III. Management Report**
1. Laporan Dewan Komisaris	**39-47**	1. Board of Commissioners' Report
Informasi memuat:		Information contains:
1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;	√	1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis for such evaluation;

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;	√	2. Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors and the basis for such consideration;
3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan *whistle blowing system* (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan	√	3. Views on the implementation/management of the company's whistleblowing system (WBS), and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and
4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	√	4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reason for such changes.
2. Laporan Direksi	**56-73**	2. Board of Directors' report
Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contain the following:
1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:	√	1. Analysis of the company's performance, covering among others:
a. Kebijakan strategis;	√	a. Strategic policies;
b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	√	b. Comparison between targets and achievements; and
c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya;	√	c. Challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges;
2. Analisis tentang prospek usaha;	√	2. Analysis on business prospects;
3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan	√	3. Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and
4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	√	4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes.
3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	**493-495**	3. Signatures of members of the Board of Commissioners and Board of Directors
Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contain the following:
1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;	√	1. Signatures on a separate page;
2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;	√	2. Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report;
3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan	√	3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by stating their names and position; and
4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	√	4. Written explanation in a separate letter from the person(s) concerned in the event that member(s) of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or: written explanation a separate letter from other member(s) in the event that there is no written explanation from the person(s) concerned.
IV. Profil Perusahaan		**IV. Company Profile**
1. Nama dan alamat lengkap perusahaan	**84-85**	1. Name and address of the company
Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.		Information contains, among others, name and address, postcode, telephone number, fax, email and website.
2. Riwayat singkat perusahaan	**86-87**	2. Brief history of the company
Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.		Contain among others: date/year of establishment, name of the company, change of name (if any), and effective date of the change of name.
Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		Note: to be disclosed if the company never had a change of name

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Bidang usaha	**92-95**	3. Line of business
Uraian mengenai antara lain:		Description of, among others:
1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;	√	1. The line of business as stated in the latest Articles of Association;
2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan	√	2. Business activities; and
3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	√	3. Product and/or services offered.
4. Struktur Organisasi	**108-111**	4. Organization structure
Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.		Diagram of organization structure, containing name and position of personnel up to one level below Director, at least
5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup:	**102-103**	5. Vision, Mission and Corporate Culture Covers:
1. Visi perusahaan;	√	1. Vision;
2. Misi perusahaan;	√	2. Mission;
3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah di-*review* dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan	√	3. Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners/ Directors in the fiscal year; and
4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan *(corporate culture)* yang dimiliki perusahaan.	√	4. Statement on the corporate culture.
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	**48-53**	6. Profiles of members of the Board of Commissioners
Informasi memuat antara lain:		Contain information on:
1. Nama;	√	1. Name;
2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	√	2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);
3. Umur;	√	3. Age;
4. Domisili;	√	4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	√	5. Education (study field and education institution);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	√	6. Work experience (position, company, and period in position); and
7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	√	7. History of assignments (period and position) as a member of the Board of Commissioners at the company since the first appointment.
7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain:	**74-81**	7. Profiles of members of the Board of Directors Contain information on:
1. Nama;	√	1. Name;
2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	√	2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);
3. Umur;	√	3. Age;
4. Domisili;	√	4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	√	5. Education (study field and education institution);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	√	6. Work experience (position, company, and period in position); and
7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	√	7. History of assignments (period and position) as member of the Board of Directors at the company since the first appointment.

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi.	**115-150**	8. Total number of employees (comparative for 2 years) and data on employee competence development programs reflecting equal opportunities for each level of the organization.
Informasi memuat antara lain:		Information contains, among others:
1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;	√	1. Number of employees at each level of the organization;
2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;	√	2. Number of employees by education;
3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;	√	3. Number of employees by employment status;
4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan	√	4. Data on employee competence development programs during the fiscal year, concerning the position of participants, type of training, and purpose of training; and
5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	√	5. The costs of employee competence development programs in the fiscal year.
9. Komposisi Pemegang saham	**N/A**	9. Shareholders composition
Mencakup antara lain:		Covering among others:
1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;	-	1. Names of the 20 largest shareholders and their shareholding percentage;
2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:	-	2. Details of shareholders and shareholding percentage:
a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan	-	a. Names of shareholders with 5% or more shareholding; and
b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	-	b. Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each.
3. Saham yang dimiliki Direksi dan Komisaris	-	3. Share own by the Board of Directors and the Board of Commissioners
Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	-	Note: should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.
10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	**188-190**	10. List of subsidiaries and/or associated entities
Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:		In table form, containing:
1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;	√	1. Name of subsidiary and/or associated entity;
2. Persentase kepemilikan saham;	√	2. Share-ownership percentage;
3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan	√	3. Line of business of subsidiary and/or associated entity; and
4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	√	4. The operational status of subsidiary and/or associated entity (in commercial operation/ not yet in commercial operation).
11. Struktur grup perusahaan	**187**	11. Corporate group structure
Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV).		Diagram of corporate group structure involving relationship of the parent company, subsidiary, associated entity, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
12. Kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	**N/A**	12. Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year
Mencakup antara lain:		Covers, among others:
1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi *(corporate action);*	-	1. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action;
2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi *(corporate action);* dan	-	2. Total number of shares outstanding following the corporate action; and
3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.	-	3. The stock exchange where the shares are listed.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if the company does not have the chronology of share listing.
13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	**N/A**	13. Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year
Mencakup antara lain:		Covers, among others:
1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;	-	1. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date;
2. Nilai penawaran efek lainnya;	-	2. Offering price of other securities;
3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan	-	3. The stock exchange where the securities are listed; and
4. Peringkat efek.	-	4. Rating of securities.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if the company does not have the chronology of share listing.
14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	**191**	14. Name and address of supporting institutions and/or professionals
Mencakup antara lain:		Covering among others:
1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;	√	1. Name and address of the company's Share Registrar;
2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan	√	2. Name and address of Public Accountant Firm; and
3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	√	3. Name and address of rating agencies.
15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	**26-35**	15. Awards received during the fiscal year, or valid certification in the fiscal year, at both national and international levels
Informasi memuat antara lain:		Information covers, among others:
1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	1. Name of award and/or certification;
2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	2. Year received/issued;
3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	√	3. Name of institution that issued the award/certification; and
4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	√	4. Validity period (certification).

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	**188-190**	16. Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any)
Informasi memuat antara lain:		Information covers, among others:
1. Nama dan alamat entitas anak; dan	√	1. Name and address of subsidiaries; and
2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.	√	2. Name and address of branch/representative office.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	√	Note: should be disclosed if the company does not have a subsidiary, branch office or representative office.
17. Informasi pada Website Perusahaan	**202-203**	17. Information in the corporate website
Meliputi paling kurang:		Covers at the very least:
1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;	√	1. Information of shareholders up to the individual ultimate shareholder;
2. Isi Kode Etik;	√	2. Contents of the Code of Conduct;
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;	√	3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, the summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, an announcement of summary GMS resolutions;
4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);	√	4. Annual financial statements (last 5 years);
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan	√	5. Profiles of the Board of Commissioners and Directors; and
6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komitekomite, dan Unit Audit Internal.	√	6. Board manual/Charter of the BoC. BoD, Committees and Internal Audit Unit.
18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	√	18. Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit
Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):		Cover at least information of type of training and participant of:
1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;	√	1. Training and/or education for Board of Commissioners;
2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;	√	2. Training and/or education for Board of Directors;
3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;	√	3. Training and/or education for Audit Committee;
4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	√	4. Annual financial statements (last 5 years);
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan	√	5. Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee;
6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan	√	6. Training and/or education for Corporate Secretary; and
7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku.	√	7. Training and/or education for Internal Audit Unit. During the fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/ atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan		Note: should be disclosed if there are no training and/ or education during the fiscal year

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		**V. Management Discussion and Analysis on the Company Performance**
1. Tinjauan operasi per segmen usaha	**210-218**	1. Operation review per business segment
Memuat uraian mengenai:		Includes analysis on:
1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	√	1. Elaboration on each business segment.
2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:	√	2. Performance of each business segment, among others:
a. Produksi;	√	a. Production;
b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;	√	b. Increase/Decrease of production capacity;
c. Penjualan/pendapatan usaha; dan	√	c. Sales/income; and
d. Profitabilitas.	√	d. Profitability.
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	**219-233**	2. Description on the Company's financial performance
Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:		An analysis comparing the performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) and the reasons for the increase/decrease of the accounts, including in:
1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	√	1. Current assets, non-current assets, and total assets;
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;	√	2. Current liabilities, Non-current liabilities, and total liabilities;
3. Ekuitas;	√	3. Equity;
4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan	√	4. Sales/operating revenues, expenses, Profit (Loss), other comprehensive income, comprehensive income for the current year; and
5. Arus kas.	√	5. Cash flows.
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	**234-237**	3. Discussion and analysis on solvability and level of the company receivables collectibility, by presenting relevant ratio calculation in line with the company's type of industry
Penjelasan tentang:		Explanation on:
1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan	√	1. Solvability, both short term and long term; and
2. Tingkat kolektibilitas piutang.	√	2. Level of receivables collectibility.
4. Bahasan tentang struktur modal *(capital structure)* dan kebijakan manajemen atas struktur modal *(capital structure policy)*	**238-239**	4. Discussion on capital structure and Capital Structure Policy
Penjelasan tentang:		Explanation on:
1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas;	√	1. Details of capital structure comprising of interestbearing debts/sukuk and equity;
2. Kebijakan manajemen atas struktur modal *(capital structure policies)*; dan	√	2. Capital structure policies; and
3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	√	3. Basis for the determination of capital structure policies.

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	**241**	5. Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year
Penjelasan tentang:		Explanation on:
1. Nama pihak yang melakukan ikatan;	√	1. Parties in the commitments;
2. Tujuan dari ikatan tersebut;	√	2. Objectives of the commitments;
3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;	√	3. Sources of funds to meet the commitments;
4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan	√	4. Denomination currency of commitments; and
5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	√	5. Initiatives taken to mitigate exchange rate risk.
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if the company does not have any material commitment to capital investments in the fiscal year.
6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	**240-241**	6. Discussion on capital investment realized at the latest financial year
Penjelasan tentang:		Explanation on:
1. Jenis investasi barang modal;	√	1. Type of capital investment;
2. Tujuan investasi barang modal; dan	√	2. Objectives of capital investment; and
3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	√	3. The nominal value of capital investment realized in the last fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no capital investment.
7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.	**242-244**	7. Information on the comparison between initial target at the beginning of the financial year and the realization and target or the projection for the next year concerning income, profit, capital structure, and others considered a significant target for the company.
Informasi memuat antara lain:		Contain information on:
1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan	√	1. Comparison of targets at the beginning of fiscal year and achievements; and
2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	√	2. Targets or projections set for the next 1 (one) year.
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	**246-248**	8. Information and material facts following the date of accounting report (Subsequent events)
Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.	√	Description of significant events following the date of accounting report including its impact on business risk and performance in the future.
Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no subsequent events.
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan	**258-261**	9. Description about Company's Business prospects
Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	√	The description of on business prospects related to the general industry and economy including quantitative supporting data from reliable resources
10. Uraian tentang aspek pemasaran	**257**	10. Description about Marketing Aspects
Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	√	The description of on marketing aspects of the company's products and/or services, among others marketing strategy and market shares

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	**249**	4. The description of on dividend policy and total cash dividend per share and total dividend per year that are published or disbursed during last 2 (two) financial years
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Kebijakan pembagian dividen;	√	1. Dividend payout policy;
2. Total dividen yang dibagikan;	√	2. Total dividend disbursement;
3. Jumlah dividen kas per saham;	√	3. Total cash dividend per share;
4. Payout ratio; dan	√	4. Payout ratio; and
5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun.	√	5. Announcement date and cash dividend payout for each year.
Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		Note: To disclose if there are no dividend disbursement and its reasons.
12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/ atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	**249**	12. Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/ MSOP) still ongoing in the fiscal year
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;	√	1. Number of ESOP/MSOP shares and its execution;
2. Jangka waktu;	√	2. Period;
3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	√	3. Eligible employee/management; and
4. Harga *exercise*.	√	4. Exercise price.
Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no such programs
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	**250**	13. Realization of initial public offering proceeds (in the event of the company is obligated to submit the report)
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Total perolehan dana;	√	1. Total proceeds;
2. Rencana penggunaan dana;	√	2. Proceeds utilization plan;
3. Rincian penggunaan dana;	√	3. Proceeds utilization details;
4. Saldo dana; dan	√	4. Proceeds balance; and
5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	√	5. The date of GMS/GMB resolution on the change of proceeds utilization (if any).
Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no such information of realization of proceeds of public offering.
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	**249**	14. Material transaction information with conflict of interest and/or transaction with related parties
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;	√	1. Name of transacting parties and the nature of related parties;
2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	√	2. Description of the transaction fairness;
3. Alasan dilakukannya transaksi;	√	3. Transaction background;
4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;	√	4. Transaction realization at the last financial year;
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme *review* atas transaksi; dan	√	5. Company policy related with transaction review mechanism; and
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.	√	6. Compliance to relevant regulations and provisions.
Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.		Note: To disclose if there are no transactions.

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	**250**	15. Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company
Uraian memuat antara lain:		Name of regulations; and
1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	√	1. Name of regulations; and
2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	√	2. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant or statement that this impact not significant.
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	**251-252**	16. Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year
Uraian memuat antara lain:		Descriptions include among others:
1. Perubahan kebijakan akuntansi;	√	1. Changes in accounting policy;
2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan	√	2. Reasons for the change; and
3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	√	3. Quantitative impact on the financial statements.
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year
17. Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai:	**254-256**	17. Information on business continuity Disclosures on:
1. Hal–hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;	√	1. Significant issues on the company business continuity at the last financial year;
2. *Assessment* manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan	√	2. Management assessment on point 1; and
3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan *assessment*.	√	3. Assumption implemented by the management in conducting the assessment.
Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal–hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.		Note: if there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year, to disclose the basis of management assumption in ensuring that there are no issues that potentially have significant influences on the company's business continuity at the last financial year.
VI. Good Corporate Governance		**VI. Good Corporate Governance**
1. Uraian Dewan Komisaris	**321-343**	1. Description of the Board of Commissioners
Uraian memuat antara lain:		Covers the following:
1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;	√	1. Board of Commissioners responsibilities;
2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan	√	2. Assessment of performance of committees under the Board and the basis for such assessment; and
3. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	√	3. Board Charter disclosures (Board of Commissioners work guidelines and procedures).

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	**342-343**	2. Independent Commissioners (at least 30% of the total personnel of the Board of Commissioners)
Meliputi antara lain:		Covers the following:
1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan	√	1. Assignment criteria of Independent Commissioners; and
2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	√	2. Independence statement of each Independent Commissioner.
3. Uraian Direksi	**344-350**	3. Description of the Board of Directors
Meliputi antara lain:		Covers the following:
1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	√	1. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;
2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan	√	2. Assessment of performance of committees under the Board (if any); and
3. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Direksi)	√	3. Board Charter disclosures (Board of Directors work guidelines and procedures)
4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2020 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	**270-286**	4. GCG implementation assessment for 2020, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors
Memuat uraian mengenai:		Covers the following:
1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian;	√	1. Assessment criteria;
2. Pihak yang melakukan penilaian;	√	2. Assessor;
3. Skor penilaian masing-masing kriteria;	√	3. Assessment score on each criteria;
4. Rekomendasi hasil penilaian; dan	√	4. Recommendations on results of assessment; and
5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.		5. Reasons for the delay or non implementation of such recommendations.
Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2019, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no GCG assessment for fiscal 2019.
5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	**381-387**	5. Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors
Mencakup antara lain:		Covers the following:
1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;	√	1. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Commissioners;
2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;	√	2. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Directors;
3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;	√	3. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Commissioners;
4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;	√	4. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Directors;
5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan	√	5. Disclosure of indicators for the remuneration of the Board of Directors; and

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).	√	6. Disclosure of performance bonus, nonperformance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any).
Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.
6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	**356-367**	6. Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in 2 months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of BoC and BoD (at least once in 4 months)
Informasi memuat antara lain:		Covers among others:
1. Tanggal Rapat;	√	1. Date;
2. Peserta Rapat; dan	√	2. Attendance; and
3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	√	3. Agenda. Of each of the meetings of BoC, BoD and Joint Meetings of BoC and BoD.
7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu.	**320**	7. Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder.
Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.	√	Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders
Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.		Note: majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder
8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	**351**	8. Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority/Controlling Shareholders
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;	√	1. The affiliation between a member of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	√	2. The affiliation between a member of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;	√	3. The affiliation between a member of the Board of Directors with Majority and/or Controlling Shareholder;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan	√	4. The affiliation between a member of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.	√	5. The affiliation between a member of the Board of Commissioners with Majority and/or Controlling Shareholder.
Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there is no affiliation relationship

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
9. Komite Audit	**388-399**	9. Audit Committee
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;	√	1. Name, position and tenure of audit committee members;
2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;	√	2. Education qualifications (study field and institution) and work experience (position, company and tenure) of audit committee members;
3. Independensi anggota komite audit;	√	3. Independency of audit committee members;
4. Uraian tugas dan tanggung jawab;	√	4. Duties and responsibilities;
5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan	√	5. Brief report of audit committee activity; and
6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	√	6. Meeting frequency and attendance of audit committee.
10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	**408-414**	10. Nomination and/or Remuneration Committee
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	√	1. Name, position and brief profiles of members of the Nomination and/or Remuneration Committee;
2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;	√	2. Independency of Nomination and/or Remuneration Committee;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	√	3. Duties and responsibilities;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/ atau remunerasi pada tahun buku;	√	4. Brief report of Nomination and/or Remuneration committee activity; and
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;	√	5. Meeting frequency and attendance of nomination and/or remuneration committee.
6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan	√	6. Statement of nomination and/or remuneration committee charter; and
7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	√	7. Policies on Director succession.
11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	**400-407**	11. Other committees under the Board of Commissioners
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;	√	1. Name, position and brief profile of members of committee;
2. Independensi komite lain;	√	2. Independency of committee;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	√	3. Duties and responsibilities;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan	√	4. Committee activity in the fiscal year; and
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	√	5. Committee meeting frequency and attendance.
12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	**416-418**	12. Description of duties and functions of Corporate Secretary
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;	√	1. Name and brief work experience of Corporate Secretary;
2. Domisili;	√	2. Domicile;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan	√	3. Duties and responsibilities; and

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	√	4. Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year
13. Uraian mengenai unit audit internal	**419-428**	13. Description on Internal Audit Unit
Mencakup antara lain:		Covers among others:
1. Nama ketua unit audit internal;	√	1. Name of internal audit unit head;
2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;	√	2. Total employees (internal auditors) in internal audit unit;
3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	√	3. Certification on internal audit profession;
4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;	√	4. Internal audit unit composition in the company's structure;
5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan	√	5. Brief report on internal audit unit activity implementation; and
6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	√	6. The parties responsible to appoint/terminate the internal audit unit head.
14. Akuntan Publik	**431**	14. Public Accountant
Informasi memuat antara lain:		Information, among others:
1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	√	1. Name and year of the public accountant that audits the annual financial statements in the last 5 years;
2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	√	2. Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years;
3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	√	3. The amount of fee for each service provided by public accountant at the last financial year; and
4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	√	4. Other services provided by the accountant apart from the audit service of annual financial statements at the last financial year.
Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		Note: to disclose if there are no other services rendered
15. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait tata kelola Tanggung jawab sosial	**462-468**	15. Description about corporate social responsibility related to social responsibility governance
1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial;	√	1. Information commitment to social responsibility;
2. Informasi mengenai methoda dan lingkup *due diligent* terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan;	√	2. Information regarding methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of company activities;
3. Informasi tentang *stakeholder* penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan;	√	3. Information about important stakeholders who are affected or influence the impact of the company's activities
4. Informasi tentang isu isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan;	√	4. Information about important socio-economic and environmental issues related to the impact of company activities
5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban;	√	5. Information about the scope of corporate social responsibility, both those which constitute obligations and those that exceed obligations
6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya *stakeholders engagement* dan meningkatkan value untuk *stakeholder* dan *shareholder;*	√	6. Information about the company's strategy and work program in handling social, economic and issues the environment in the efforts of stakeholders and engagement increase value for stakeholders and shareholders

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan; dan	√	7. Information about various programs that exceed the company's minimum responsibilities that are relevant to the business being described; and
8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial.	√	8. Information about financing and social responsibility budgets
16. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait *core subject* Hak Asasi Manusia	**469-470**	16. Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights
1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial *core subject* Hak Asasi Manusia;	√	1. Information about commitments and core social responsibility policies on the subject of Human Rights;
2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial *core subject* Hak Asasi Manusia;	√	2. Information about the formulation of corporate social responsibility core subjects on Human Rights;
3. Informasi tentang perencanaan *corporate social responsibility* bidang Hak Asasi Manusia;	√	3. Information about corporate social responsibility planning in the field of Human Rights;
4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia; dan	√	4. Information about initiative implementation of CSR in the field of Human Rights; and
5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia.	√	5. Information about the achievements and awards of CSR initiatives in the field of Human Rights.
17. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait *core subject* Operasi yang adil	**471-473**	17. Description of corporate social responsibility related to the core subject of fair operation
1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil;	√	1. Information about commitments and core social responsibility policies on the subject of Fair Operation;
2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial *core subject* Operasi yang adil;	√	2. Information about the formulation of corporate social responsibility core subjects on Fair Operation;
3. Informasi tentang perencanaan *corporate social responsibility* bidang Operasi yang adil;	√	3. Information about corporate social responsibility planning in the field of Fair Operation;
4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Operasi yang adil; dan	√	4. Information about initiative implementation of CSR in the field of Fair Operation; and
5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Operasi yang adil;	√	5. Information about the achievements and awards of CSR initiatives in the field of Fair Operation;
18. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang	**474-477**	18. Description of corporate social responsibility related to the environment, delivery of information about
1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan;	√	1. Information about environmental commitments and policies;
2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan	√	2. Information about important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company
3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2019 yang ditetapkan manajemen;	√	3. Information about the 2019 activity targets / plans set by management;
4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;	√	4. Information about activities carried out and related to environmental programs related to the company's operational activities;
5. Informasi tentang pelaksanaan inisitaif CSR terkait lingkungan hidup;	√	5. Information about implementing CSR initiatives related to the environment;

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain; dan	√	6. Information about achieving quantitative impacts on the activity; and, such as the use of environmentally friendly and recyclable materials and energy, the company's waste treatment system, environmental complaints mechanism, consideration of environmental aspects in granting credit to customers, and others; and
7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	√	7. Certification in the environmental field owned.
19. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang	**478-485**	19. Description of corporate social responsibility related to employment, health and work safety, including information about
1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan *core subject* ketenagakerjaan;	√	1. Corporate social responsibility policies and commitments core subject to employment;
2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan;	√	2. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of employment;
3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2019 yang ditetapkan manajemen;	√	3. Information related to targets / planned activities for 2019 set by management;
4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan	√	4. Activities undertaken and quantitative impact on these activities; and
5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	√	5. Information related to employment practices, health and occupational safety, such as gender equality and job opportunities, facilities and work safety, employee turnover rates, work accident rates, remuneration, mechanisms for complaints of labor problems, and others.
21. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Mencakup antara lain:	**486-487**	20. Description of corporate social responsibility related to responsibility to consumers, including among others:
1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2019 ditetapkan manajemen;	√	1. Targets/planned activities for 2019 set by management; and
2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan	√	2. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of employment;
3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	√	3. Related to product responsibility, such as health and safety for the customers, product information, facilities, number and customers complaint handling, and others.
21. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang:	**488-491**	21. Description of corporate social responsibility related to social and community development, including information on:
1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan *core subject* pengembangan sosial dan kemasyarakatan;	√	1. Corporate social responsibility policies and commitments core subject to social and community development;
2. Informasi tentang isu isu sosial yang relevan dengan perusahaan;	√	2. Information about social issues that are relevant to the company
3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan;	√	3. Information about social risks managed by the company;
4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan;	√	4. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of social and community development;
5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2019 yang ditetapkan manajemen;	√	5. Targets/activity plans for 2019 set by management;

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut;	√	6. Activities undertaken and their impact;
7. Biaya yang dikeluarkan; dan	√	7. Cost incurred; and
8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	√	8. Related to social and community development, such as the use of local labor, empowerment of the community around the company, improvement of social facilities and infrastructure, other forms of donations, communication regarding anticorruption policies and procedures, training on anti-corruption, etc.
22. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	**432-440**	22. Description on risk management of the company
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;	√	1. Explanation on risk management system implemented by the company;
2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;	√	2. Explanation on risk management system effectiveness evaluation;
3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan	√	3. Explanation on risks faced by the company; and
4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	√	4. Risk mitigation.
23. Uraian mengenai sistem pengendalian intern	**N/A**	23. Description of internal control system
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;	-	1. Brief explanation on internal control system, among others on financial and operational control;
2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – *internal control framework*); dan	-	2. Explanation on internal control system alignment with international standard framework (COSO – internal control framework); and
3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	-	3. Explanation on internal control system effectiveness evaluation.
24. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan, mencakup antara lain:	**446-449**	24. Description of corporate social responsibility related to responsibility to consumers, including among others:
1. Pokok perkara/gugatan;	√	1. Case/ Claim;
2. Status penyelesaian perkara/gugatan;	√	2. Settlement status of litigation/claims;
3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan	√	3. Impact to the company's condition; and
4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).	√	4. Administration sanctions charged to the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking and others) at the last fiscal year (or a statement of no administration sanction being charged).
Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		Note: in the case of a Corporate, a subsidiary, a member of the Board of Commissioners, and a member of the Board of Directors has no important case to disclose.

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
25. Akses informasi dan data perusahaan	**450-451**	25. Access to company information and data
Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.		Description on the availability of company information and data for public access, including dissemination through company website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst gatherings, and others.
26. Bahasan mengenai kode etik, memuat uraian antara lain:	**441-445**	26. The description on code of ethic, which contains, among others:
1. Pokok-pokok kode etik;	√	1. Contents of Code of Conduct;
2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	√	2. Disclosure of code of conduct application in all level of organization;
3. Penyebarluasan kode etik;	√	3. Code of conduct dissemination;
4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	√	4. Sanctions on code of conduct violations; and
5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	√	5. Number of violation and sanction in the last fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no violations of code of conduct in the last fiscal year.
27. Pengungkapan mengenai *whistleblowing system*	**452-457**	27. Disclosure on whistleblowing system
Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing system* antara lain:		Includes the following mechanism of whistleblowing system:
1. Penyampaian laporan pelanggaran;	√	1. Violations report submission;
2. Perlindungan bagi *whistleblower;*	√	2. Whistleblowers protection;
3. Penanganan pengaduan;	√	3. Complaints handling;
4. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan	√	4. Total claims registered in the fiscal year; and
5. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.	√	5. Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures.
Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there is no report and follow up action in the last fiscal year.
28. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.	**356-357**	28. Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition. Description of written policy regarding diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition regarding education, work experience, age, and gender.
Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.		Note: to disclose the reasons and considerations, if there is no policy applied.
VII. Informasi Keuangan		**VII. Financial Information**
1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	**493-495**	1. Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statements regarding the Responsibility for the Financial Statements
Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	√	Conformity with related regulations regarding the Financial Statements Responsibility.
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan	**541-544**	2. Independent auditor opinion on financial statements
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini	**541-544**	3. Independent Auditor Description in the Opinion
Deskripsi memuat tentang:		Description contains the following:
1. Nama dan tanda tangan;	√	1. Name & signatures;
2. Tanggal Laporan Audit; dan	√	2. Audit Report date; and
3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	√	3. License of Public Accountant Firm and license of Public Accountant

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
4. Laporan keuangan yang lengkap	**538-706**	4. Comprehensive financial statements
Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:		Comprehensively covers the financial statements elements:
1. Laporan posisi keuangan;	√	1. Statements of financial position;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	√	2. Statements of profit (loss) and other comprehensive income;
3. Laporan perubahan ekuitas;	√	3. Statements of changes in equity;
4. Laporan arus kas;	√	4. Statements of cash flows;
5. Catatan atas laporan keuangan;	√	5. Notes to financial statements¡
6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	√	6. Comparative information on previous periods; and
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pospos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	√	7. Statements of financial position at the beginning of previous periods upon the application of retrospective accounting policy by the entity or representation of financial statements postings, or reclassifications of postings in the financial statements (if relevant).
5. Perbandingan tingkat profitabilitas	**547**	5. Profitability level comparison
Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	√	Comparison of current profit (loss) with the previous year.
6. Laporan Arus Kas	**549**	6. Statements of Cash Flows
Memenuhi ketentuan sebagai berikut:		Conformity to the following provisions:
1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;	√	1. Grouping into three category of activities: operations, investment, and financing¡
2. Penggunaan metode langsung *(direct method)* untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;	√	2. Direct method application in the statements of cash flows from operations activity;
3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan	√	3. Separation of presentation between cash in and or cash out during current year in the operation, investment and financing activities; and
4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	√	4. Disclosure of non cash transaction shall be stated in the notes to financial statements.
7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	**579-621**	7. Accounting policies highlights
Meliputi sekurang-kurangnya:		Including at least:
1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;	√	1. Compliance statement to SAK;
2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;	√	2. Basis of measurement and formulation of financial statements;
3. Pajak penghasilan;	√	3. Income tax;
4. Imbalan kerja; dan	√	4. Employee benefits; and
5. Instrumen Keuangan.	√	5. Financial instrument.
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi	**688-690**	8. Disclosure of related parties transactions
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		The disclosures includes:
1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	√	1. Name of related parties, and the nature and relationship with related parties;
2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	√	2. Transaction values and its percentage to total income and expense; and
3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	√	3. Total balance and its percentage to total assets or liabilities.

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	**637-639**	9. Disclosure related to taxes
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	√	1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation;
2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;	√	2. Explanation of relationship between tax expenses (income) and accounting profit;
3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016;	√	3. Statement that Taxable Income as a result of reconciliation is used as the basis in completing the 2016 Annual corporate income tax return;
4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan	√	4. The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial position statements for every presentation period, and total deferred tax expenses (income) recognized in the income statements if the total are not visible from the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial position statements; and
5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	√	5. Disclosure of availability or un-availability of tax disputes.
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	**603-606**	10. Disclosure related to fixed assets
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Metode penyusutan yang digunakan;	√	1. Used depreciation method;
2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;	√	2. Description on accounting policies selected between revaluation model and cost model;
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan	√	3. Significant methods and assumptions used in estimation of fixed assets fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model)¡ and
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	√	4. Reconciliation of gross total recorded and accumulation of fixed assets depreciation at the beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.
11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	**686-688**	11. Disclosure related to operations segments
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;	√	1. General information covering factors used to identify reported segments;
2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;	√	2. Information on segment's reported profit loss, assets, and liabilities;
3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan	√	3. Reconciliation of segment's total revenues, segment's reported profit loss, segment's assets, segment's liabilities, and segment's other material elements to related total in entity; and
4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	√	4. Disclosure of entity level, which covers information on products and/or services, geographic areas and main customers.

KRITERIA ANNUAL REPORT 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Keterangan	Halaman Page	Description
12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	**600-601**	12. Disclosure related to Financial Instruments
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;	√	1. Financial instrument classification;
2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;	√	2. Fair value of every financial instrument group;
3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;	√	3. Explanation on risks related to financial instrument: market risk, credit risk and liquidity risk;
4. Kebijakan manajemen risiko; dan	√	4. Risk management policies; and
5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.		5. Risk analysis related to financial instrument in quantitative way.
13. Penerbitan laporan keuangan	**540**	13. Financial statements publication
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		The disclosures includes:
1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan	√	1. Date of financial statements authorized for publication; and
2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	√	2. Parties responsible to authorize the financial statements.

BUMN UNTUK INDONESIA

PELAYARAN NASIONAL INDONESIA



2020 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

DAFTAR ISI | ***TABLE OF CONTENTS***

	Halaman/ *Pages*	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		***BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT***
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i-iii	***INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA		***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-2	***Consolidated Statements of Financial Position***
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	***Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	***Consolidated Statements of Changes in Equity***
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	***Consolidated Statements of Cash Flows***
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-156	***Notes to the Consolidated Financial Statements***
Informasi Tambahan:		***Additional Information:***
LAPORAN KEUANGAN POKOK PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)		***BASIC FINANCIAL STATEMENTS PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)***
(Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri)		***(Financial Information - Parent Entity Only, As a Separate Financial Statements)***
Laporan Posisi Keuangan - Induk Saja	1-2	*Statements of Financial Position - Parent Only*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja	3	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Only*
Laporan Perubahan Ekuitas - Induk Saja	4	*Statements of Changes in Equity - Parent Only*
Laporan Arus Kas - Induk Saja	5	*Statement of Cash Flows - Parent Only*

AKHLAK
AMANAH KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

PELAYARAN NASIONAL INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 (Penyajian Kembali) DAN 2018 (Penyajian Kembali)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

DIRECTORS' STATEMENT LETTER

REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 (Restatement) AND 2018 (Restatement)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

Nama	:	Insan Purwarisya L. Tobing	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta, 10130	:	Official Address
NIK	:	3175021703650003	:	ID Number
Jabatan	:	Direktur Utama/ *President Director*	:	Position
Nama	:	Ony Suprihartono	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta, 10130	:	Official Address
NIK	:	3201133112690001	:	ID Number
Jabatan	:	Direktur Keuangan / *Finance Director*	:	Position

Menyatakan bahwa : / *State that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasi PT Pelayaran Nasional Indonesia Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

1. *We are responsible for preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pelayarab Nasional Indonesia (Persero);*
2. *The consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information contained in the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) is complete and correct;*
   b. The consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. *We are responsible for the internal control system of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 19 Mei 2021/ *May 19, 2021*
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Direktur Utama
/ President Director



Insan Purwarisya L Tobing.

Direktur Keuangan
/ Finance Director

Ony Suprihartono

KRESTON HHES

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen
Independent Auditors' Report

No : 00174/2.1127/AU.1/05/0060-1/1/V/2021

Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries ("The Group") which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Registered Public Accountants | License No. 678/KM.1/2017
Intiland Tower 18th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta 10220, Indonesia
T : +62 21 571 2000, +62 21 570 7997 | F : +62 21 570 6118, +62 21 571 1818 | Email : hhes.jakarta@kreston.co.id | www.kreston.co.id
A Member of Kreston International | A global network of independent accounting firms

People do business with people they know, like and trust.

KRESTON HHES

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

The original report included herein is in the Indonesian language.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries as of December 31, 2020, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Registered Public Accountants
A Member of Kreston International | A global network of independent accounting firms

People do business with people they know, like and trust.

KRESTON HHES

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

The original report included herein is in the Indonesian language.

Halaman 3

Penekanan suatu hal

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan PT Pelita Indonesia Djaya (entitas anak) melakukan penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018. Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Perseroan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2018. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan opini atau bentuk asurans lainya atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara keseluruhan.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Pelayaran Nasional Indonesia (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Emphasis of matters

PT Pelayaran Nasional Indonesia and PT Pelita Indonesia Djaya (subsidiary) restated its financial statement for the years ended December 31, 2019 and 2018. As part of our audit of the financial statements of the companies as of December 31, 2020 and for the years then ended, we also audited the adjustment described in Note 6 that were applied to amend the consolidated financial statements as of December 31, 2019 and the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018. In our opinion, such adjustments are appropriate and have been properly applied. We were not engaged to audit, review, or apply any procedures to the financial statements as of December 31, 2019 and 2018 and for the year than ended other than with respect to the adjustments and, accordingly, we do not express an opinion or any other form assurance the consolidated financial statements as of December 31, 2019 and 2018 and for the year than ended taken as a whole.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries as at December 31, 2020 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on these consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Pelayaran Nasional Indonesia (parent entity only), which comprises the statement of financial position as at December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

KRESTON HHES

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal lain (Lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebelum penyajian kembali, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya bertanggal 24 April 2020.

Other matters (Continued)

The consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its subsidiaries for the year ended December 31, 2019 prior to restatement, which are presented as correspondent figures to the financial statements for the year ended December 31, 2020, were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on April 24, 2020.

Laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal. Laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen masing-masing dalam laporan kami nomor AU107/01/WA/I/21 dan AU108/01/WA/I/21 tanggal 19 Mei 2021.

Reports on the provisions of laws and regulations

We also performed procedures to test the adherence Company's compliance with laws and regulations and internal control. Report on compliance with laws and internal control is submitted separately to the management in our report respective number AU107/01/WA/I/21 and AU108/01/WA/I/21 dated May 19, 2021.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO Registered Public Accountants

Welly Adrianto, CPA
No. Ijin Akuntan Publik / *Public Accountant License Number*: AP. 0060
Jakarta, 19 Mei 2021/ *May 19, 2021*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh. kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed In Full Rupiah. Unless Otherwise Stated)

	Catatan / *Notes*	2020	2019*	2018*	
ASET					***ASSETS***
Aset Lancar					***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	7	2.284.861.630.577	1.666.914.538.163	1.521.886.980.235	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha (Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. masing-masing sebesar Rp24.607.838.762, Rp7.089.686.477 dan Rp7.899.955.168)	8	281.167.247.454	232.488.270.948	253.601.377.657	*Accounts Receivables (Net of provision for expected credit loss as of December 31, 2020, 2019 and 2018. respectively Rp24,607,838.762, Rp7,089,686,477 and Rp7,899,955,168)*
Aset Keuangan Lancar Lainnya (Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. masing-masing sebesar Rp6.095.635.850, Rp358.015.157 dan Rp176.105.864)	9	666.495.434.802	761.807.625.933	491.606.698.167	*Other Current Financial Assets (Net of provision for expected credit loss as of December 31, 2020, 2019 and 2018 respectively Rp6,095,635,850, Rp358,015,157 and Rp176,105,864)*
Persediaan	10	436.431.543.376	445.747.237.759	474.549.818.548	*Inventories*
Pajak Dibayar Dimuka	11a	25.631.284.712	43.760.847.780	49.309.224.101	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	12	48.902.020.637	55.473.417.004	65.967.774.304	*Advances Payment*
Biaya Dibayar Dimuka	13	33.988.000.202	36.291.263.524	29.379.297.808	*Prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar		**3.777.477.161.760**	**3.242.483.201.111**	**2.886.301.170.820**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar					***Non Current Assets***
Investasi Pada Entitas Asosiasi	14	159.910.656.913	-	-	*Investment in Assosiate*
Properti Investasi	15	122.382.750.000	262.311.136.000	131.882.386.310	*Invesment Properties*
Alat Produksi (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. masing-masing sebesar Rp5.887.362.122.386, Rp5.533.091.752.306 dan Rp5.197.459.401.632.)	16	2.747.319.661.056	3.004.629.880.354	3.048.365.774.736	*Production Equipment (Net of accumulated depreciation as of December 31, 2020, 2019 and 2018. respectively Rp5,887,362,122.386, Rp5,533,091,752,306 and Rp5,197,459,401,632)*
Aset Tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tanggal 31 Desember 2020, 2019 and 2018 masing-masing sebesar Rp316.491.088.650, Rp460.728.948.830 dan Rp417.711.187.978)	17	362.950.828.500	495.416.697.962	437.003.713.878	*Fixed Assets (Net of accumulated depreciation as of December 31, 2020. 2019 and 2018 respectively Rp316,491,088,650, Rp460,728,948.830 and Rp417,711,187,978)*
Aset Tak Berwujud	18	20.019.451.897	20.951.306.967	28.435.630.520	*Intangible Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya	20	442.744.548	231.843.369	305.678.011	*Other Non Current Assets*
Aset Pajak Tangguhan	11d	58.025.132.594	35.258.244.042	51.363.032.618	*Deferred Tax Assets*
Aset Hak Guna	19	4.510.881.641	-	-	*Right of Use Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**3.475.562.107.149**	**3.818.799.108.694**	**3.697.356.216.073**	***Total Non Current Asset***
TOTAL ASET		**7.253.039.268.909**	**7.061.282.309.805**	**6.583.657.386.893**	***TOTAL ASSETS***

*Disajikan Kembali (Catatan 6)

**As Restated (Catatan 6)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh. kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed In Full Rupiah. Unless Otherwise Stated)

	Catatan / *Notes*	2020	2019*	2018*	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
Liabilitas Jangka Pendek					***Short Term Liabilities***
Utang Usaha	21	97.619.849.232	190.082.677.190	164.446.179.524	*Accounts Payable*
Beban Akrual	22	373.233.573.563	275.769.924.191	165.465.747.030	*Accrued Expenses*
Utang Pajak	11b	24.174.276.073	49.126.608.602	62.971.030.209	*Tax Payables*
Bagian Lancar atas Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	25,26	9.599.072.667	118.557.626.450	54.376.603.506	*Current Portion of Long Term Financial Institution and Bank Loan*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	24	79.811.730.195	73.206.765.416	48.580.534.542	*Other Short Term Financial Liabilities*
Liabilitas Hak Guna	28	4.140.589.786	-	-	*Lease Liabilities*
Liabilitas Kontrak	23	59.089.365.707	67.997.523.551	51.383.229.687	*Contract Liability*
Sub Jumlah		**647.668.457.223**	**774.741.125.400**	**547.223.324.498**	***Sub Total***
Liabilitas Jangka Panjang					***Long Term Liabilities***
Utang Non Usaha Jangka Panjang	25	33.287.964.838	25.054.588.234	31.113.840.160	*Long Term Debt*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	26	3.537.422.000	59.358.063.180	67.131.464.234	*Long Term Finacial Institution and Bank Loan*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	27	187.102.219.433	176.055.015.918	125.753.592.383	*Long Term Employee Benefits*
Liabilitas Hak Guna Jangka Panjang	28	848.144.557	-	-	*Non-Current Portion Lease Liabilities*
Sub Jumlah		**224.775.750.828**	**260.467.667.332**	**223.998.896.777**	***Sub Total***
Jumlah Liabilitas		**872.444.208.051**	**1.035.208.792.732**	**771.222.221.275**	***Total Liabilities***
Ekuitas					***Equity***
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal dasar 13.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 7.629.900 saham per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018	29	7.629.900.000.000	7.629.900.000.000	7.629.900.000.000	*Share Capital - par value of Rp1.000.000 per share. Authorized - 13.000.000 share. Issued and fully paid – 7.629.900 share as of December 31, 2020, 2019 and 2018*
Penyertaan Modal Pemerintah	30	143.585.642	143.585.642	143.585.642	*Government Capital*
Tambahan Modal Disetor	32	397.878.907.712	-	-	*Additional paid in Capital*
Cadangan	31	1.097.752.050.509	892.643.118.797	689.011.932.749	*Appropriated Related Earning*
Saldo Rugi (Defisit)	33	(2.623.468.802.171)	(2.427.746.001.578)	(2.404.249.412.464)	*Accumulated Deficit*
Komponen Ekuitas Lainnya	34	(124.433.947.148)	(71.872.380.147)	(104.755.741.217)	*Other Equity Component*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**6.377.771.794.544**	**6.023.068.322.714**	**5.810.050.364.710**	***Total equity atributable to owners of the company***
Kepentingan Non Pengendali	35	2.823.266.314	3.005.194.359	2.384.800.908	*Non Controlling Interest*
Jumlah Ekuitas		**6.380.595.060.858**	**6.026.073.517.073**	**5.812.435.165.618**	***Total Equity***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**7.253.039.268.909**	**7.061.282.309.805**	**6.583.657.386.893**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

*Disajikan Kembali (Catatan 6)

*As Restate (Catatan 6)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh. kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
*For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed In Full Rupiah. Unless Otherwise Stated)*

	2020	**Catatan/ *Notes***	**2019***	
Pendapatan Usaha	4.167.427.547.155	36	5.547.751.267.294	*Operating Revenues*
Reduksi Pendapatan Usaha	(801.889.070)	36	(3.521.144.800)	*Reduction in Operating Revenues*
Pendapatan Usaha Bersih	**4.166.625.658.085**		**5.544.230.122.494**	***Net Operating Revenues***
Beban Pokok Usaha	3.747.496.814.510	37	4.776.617.357.076	*Operating Expenses*
Laba Kotor	**419.128.843.575**		**767.612.765.418**	***Gross Profit***
Beban Pemasaran dan Distribusi	23.060.492.366	38	28.189.221.779	*Distribution and Marketing Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	410.399.759.628	39	561.132.273.445	*General and Administrative Expenses*
Laba (Rugi) Usaha	**(14.331.408.419)**		**178.291.270.194**	***Operating Profit or (Loss)***
Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih	94.403.987.233	40	114.313.394.546	*Non Operating Income (Expense) Net*
Laba Sebelum Pajak	**80.072.578.814**		**292.604.664.740**	***Profit Before Tax***
Beban Pajak	(49.105.917.477)	11c	(111.849.674.355)	*Tax Expense*
Jumlah Beban Pajak	(49.105.917.477)		(111.849.674.355)	***Total Tax Expenses***
Laba Tahun Berjalan	**30.966.661.337**		**180.754.990.385**	***Profit for the Current Year***
Penghasilan Komprehensif Lain				***Other Comprehensive Income***
Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				*Items That Will Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss:*
Entitas Asosiasi	(298.400.960)		-	*Share from Associate*
Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				*Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss:*
Kerugian Aktuarial Periode Berjalan	(27.472.510.987)		(40.488.030.701)	*Actuarial loss Current Period*
Perubahan nilai wajar Properti Investasi	9.780.647.255	4y	73.371.391.771	*Change on Revaluation of Property Investment*
	(17.990.264.692)		32.883.361.070	
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**12.976.396.645**		**213.638.351.455**	***Total Comprehensive Income of The Current Year***
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				***Profit for the Current Year Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk	30.737.343.238	4d, 4j	180.134.596.934	*Owner of the Company*
Kepentingan Nonpengendali	229.318.099	4d, 4j	620.393.451	*Non Controlling Interest*
Laba Tahun Berjalan	**30.966.661.337**		**180.754.990.385**	***Profit for Current Year***
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:				***Total Comprehensive Income Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk	12.977.408.729	4d, 4i	213.017.958.004	*Owners of the Company*
Kepentingan Nonpengendali	(1.012.084)	4d, 4i	620.393.451	*Non Controlling Interest*
Jumlah Laba Komprehensif	**12.976.396.645**		**213.638.351.455**	***Total Comprehensive Income***
Laba Bersih Per Saham Dasar	**4.058,59**	4ab	**23.690,35**	***Basic Earnings Per Share***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh. kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed In Full Rupiah. Unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh/ Share Capital	Penyertaan Modal Pemerintah/ *Goverment Capital*	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Cadangan di Tentukan Penggunaannya/ *Appropriated Retained Earning*	Saldo Rugi (Defisit)/ *Retained Earnings (Accumulated Deficits)*	Komponen Ekuitas lainnya/ *Other Equity Components*	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	*Jumlah Ekuitas/ Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2018 (sebelum penyajian kembali)	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**-**	**689.011.932.749**	**(2.323.451.656.541)**	**(104.755.741.217)**	**2.384.800.908**	**5.893.232.921.541**	***Balance as of December 31, 2018 (before restatement)***
Dampak penyajian kembali	-	-	-	-	(80.797.755.923)	-	-	(80.797.755.923)	*Restatement Adjusments*
Saldo per 1 Januari 2019	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**-**	**689.011.932.749**	**(2.404.249.412.464)**	**(104.755.741.217)**	**2.384.800.908**	**5.812.435.165.618**	***Balance as of January 1, 2019***
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	180.134.596.934	-	620.393.451	180.754.990.385	*Profit for the Current Year*
Cadangan	-	-	-	203.631.186.048	(203.631.186.048)	-	-	-	*Reserve*
Kerugian Aktuaria	-	-	-	-	-	(40.488.030.701)	-	(40.488.030.701)	*Actuarial Losses*
Perubahan nilai wajar Properti Investasi	-	-	-	-	-	73.371.391.771	-	73.371.391.771	*Change on Revaluation of Property Investment*
Saldo per 31 Desember 2019	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**-**	**892.643.118.797**	**(2.427.746.001.578)**	**(71.872.380.147)**	**3.005.194.359**	**6.026.073.517.073**	***Balance as of December 31, 2019***
Dampak dari Adopsi PSAK 71 dan 73	-	-	-	-	(15.657.613.276)	-	(53.779.346)	(15.711.392.622)	*Effect of Addoption PSAK 71 and 73*
Dampak dari Adopsi PSAK 71 pada Entitas Asosiasi	-	-	-	-	(5.826.956.802)	-	-	(5.826.956.802)	*Effect of Addoption PSAK 71 from Investment Associate*
Saldo per 1 Januari 2020	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**-**	**892.643.118.797**	**(2.449.230.571.656)**	**(71.872.380.147)**	**2.951.415.013**	**6.004.535.167.649**	***Balance as of January 1, 2020***
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	30.737.343.238	-	229.318.099	30.966.661.337	*Profit for the Current Year*
Cadangan	-	-	-	205.108.931.712	(205.108.931.712)	-	-	-	*Reserve*
Dividen	-	-	-	-	-	-	(149.611.524)	(149.611.524)	*Dividen*
Penyesuaian Entitas Anak	-	-	-	-	133.357.959	-	(133.357.959)	-	*Adjustment of Subsidiaries*
Kerugian Aktuaria	-	-	-	-	-	(27.471.498.903)	(1.012.084)	(27.472.510.987)	*Actuarial Losses*
Kerugian Aktuaria Asosiasi	-	-	-	-	-	(298.400.960)	-	(298.400.960)	*Share From Associate*
Perubahan nilai wajar PI	-	-	-	-	-	9.780.647.255	-	9.780.647.255	*Change on Revaluation Property Investmentt*
Pengaruh Divestasi	-	-	408.189.595.647	-	-	(31.106.509.833)	(73.485.231)	377.009.600.583	*Effect Divesment*
Dilusi investasi	-	-	(10.310.687.935)	-	-	(3.465.804.560)	-	(13.776.492.495)	*Dilution of Investment*
Saldo per 31 Desember 2020	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**397.878.907.712**	**1.097.752.050.509**	**(2.623.468.802.171)**	**(124.433.947.148)**	**2.823.266.314**	**6.380.595.060.858**	***Balance as of December 31, 2020***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh. kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Years Ended December 31, 2020
(Expressed In Full Rupiah. Unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	1.270.204.432.883	2.442.994.660.279	*Receipt from Customers*
Penerimaan Public Service Obligation dan Subsidi	2.794.142.980.505	2.677.763.686.340	*Receipt from Public Service Obligation and Subsidies*
Pembayaran Kepada Pemasok	(2.244.851.805.324)	(3.405.749.907.517)	*Payment to Suppliers*
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	104.901.469.228	110.375.216.782	*Receipt of other operating activities*
Pembayaran Biaya Operasional	(488.999.117.258)	(475.301.918.102)	*Payment of Operating Expenses*
Pembayaran Biaya *Overhead*	(1.105.913.062.928)	(976.525.283.887)	*Payment of Overhead Expense*
Pengeluaran dari Aktivitas Operasi Lainnya	(12.005.448.761)	(33.908.069.739)	*Payment of Other Operating Expenses*
Penerimaan (Pembayaran) Uang Jaminan Dari Pelanggan	(5.313.978.414)	16.614.293.864	*Receipt (Payement) of Cash Collateral from Customer*
Pembayaran Pajak	(71.858.763.449)	(120.428.952.874)	*Tax Payments*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**240.306.706.482**	**235.833.725.146**	***Net Cash Flows from Operating Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			***Cash Flows from Investing Activities***
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	51.166.905.846	39.313.292.965	*Interest Deposit and Demand Deposit Receipt*
Perolehan atas Pelepasan pengendalian Invetasi pada anak	503.800.000.000	-	*Proceeds from Divest Control in Subsidiary*
Perolehan Alat Produksi dan Aset Tetap	(158.326.784.907)	(324.337.472.725)	*Acquisition Production Equipment and Fixed Assets*
Perolehan Aset Dalam Penyelesaian	(14.211.194.725)	(36.425.311.654)	*Acquisition Construction in Progress*
Perolehan Aset Takberwujud	(5.483.749.415)	(738.994.650)	*Acquisition Intangible Assets*
Perolehan Aset Sewa Guna Usaha	(7.843.461.300)	(5.641.324.760)	*Purchase of Leases for Assets*
Perolehan Aset Lain-lain	(378.713.975)	-	*Acquisition Other Asset*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**368.723.001.524**	**(327.829.810.824)**	***Net Cash Flows from Investment Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			***Cash Flows from Financing Activities***
Penerimaan Pinjaman Bank / Pihak Ketiga	5.000.000.000	60.000.000.000	*Receipt from Bank Loan / Third Parties*
Penerimaan (Pengeluaran) Deviden	-	(201.588.898)	*Payment Deviden*
Pembayaran bunga Pinjaman	(792.527.890)	-	*Interest Paid*
Pembayaran Utang Bank	(804.202.657)	(18.063.684.026)	*Payment of Bank Loan*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**3.403.269.453**	**41.734.727.076**	***Net Cash Flows from Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DANSETARA KAS	**612.432.977.459**	**(50.261.358.603)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**1.839.520.843.648**	**1.889.782.202.251**	***BEGINNING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**2.451.953.821.107**	**1.839.520.843.648**	***ENDING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT***
Saldo akhir kas dan setara kas terdiri dari:			*Cash end balances and cash equivalents consist of:*
Kas dan setara kas	2.284.861.630.577	1.666.914.538.163	*Cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan pada akun aset keuangan lancar lainnya	167.092.190.530	172.606.305.485	*Restricted Cash and cash equivalents presented in other curent financial asset accounts*
	2.451.953.821.107	**1.839.520.843.648**	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M

1.1 Pendirian Perusahaan

Berdirinya PT PELNI (Persero) bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA).

Pada tanggal 28 April 1952 Yayasan Pepuska resmi dibubarkan. Pada saat yang sama didirikanlah PT PELNI (Persero) dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952. serta Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 1952.

Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Usaha. Pada tahun 1961 pemerintah menetapkan perubahan status dari Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Negara (PN) dan dicantumkan dalam Lembaran Negara RI No. LN 1961. Kemudian pada tahun 1975 status perusahaan diubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PELNI sesuai dengan Akte Pendirian No. 31 tanggal 30 Oktober 1975. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Berita Negara RI No. 562-1979 dan Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 27 Juni 1976. Dan Akte Perubahan No. 22 tanggal 4 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 No. 31 tambahan Berita Negara No.2203.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dituangkan dengan Akta Notaris Ida Adiningsih. SH..No. 02 tanggal 7 April 2017 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-AH.01.030126086 tanggal 11 April 2017.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

a. Pengadaan armada dan kelengkapannya untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal dan pelayaran yang melayani potensi pasar.

b. Menjalankan kegiatan keagenan usaha pelayaran.

c. Melakukan kegiatan operasi terminal, perdagangan, rute dan ekspedisi/forwarding .

d. Melakukan kegiatan usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dock /reparasi kapal.

e. Melakukan kegiatan charter dan broker kapal.

f. Kegiatan jasa konsultasi, pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pelayaran dan pelayanan kesehatan.

1. *G E N E R A L*

1.1 Company Establishment

PT PELNI (Persero) establishment was began with the issuance of a joint Decree of Three Ministers that issued by the Minister of Transportation and the Minister of Public Works on September 5, 1950 to established of Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA).

On April 28, 1952 Yayasan PEPUSKA was officially dissolved. At the same time was established of PT PELNI (Persero) based on the Decree of Minister of Transportation No.M.2/1/2 on February 28, 1952 and No.A.2/1/2 on April 19. 1952. and by the National Gazette of Republic of Indonesian No.50 on June 20, 1952.

The Company underwent several changes in form of business entities. In 1961, government of Indonesia set a change of status from Company to State Company (PN) and was stated in the National Gazette of the Republic of Indonesia No. LN 1961. Then in 1975 the status of company was changed to Limited Company (PT) PELNI based on the Articles of Incorporation No.31 on October 30. 1975. The amendment was included in RI State Gazette No. 562-1976 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 60 dated June 27.1976. This was amended based on No.22 on March 4. 1998 about Articles Association of PT PELNI (Persero) which was published on the National Gazette of the Republic of Indonesian on April 16. 1999 No.31 that it was announced in Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesian No.2203.

The latest amendment of Articles of Association to Company is set forth with Notarial Deed of Ida Adiningsih. SH..No. 02 on the date of April 7, 2017 which has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No.:AHU-AH.01.03-0126086 dated April 11, 2017.

1.2 Purposes and Objectives

Purposes and objectives of the Company are:

a. Fleet procurement and its equipment to carry out the transportation of passengers and goods with scheduled of shipping networks and cruise that it's serve of potential market.

b. Carry out of shipping agency business activities.

c. Conducting of terminal operation, trading, route and expedition/forwarding.

d. Conducting of maintenance services business activities and ship dock business/repair ships.

e. Undertake of charter and ship brokerage activities.

f. Consulting services, education and training that is related to shipping business and health care.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.3 Modal

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 100% Penyertaan Pemerintah sesuai dengan Akta Notaris Ida Adiningsih.SH tanggal 01 Februari 2016 yang telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AH.01.030012165 Tahun 2016 tanggal 02 Februari 2016. Penambahan modal dasar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 melalui konversi uang pokok Subsidiary Loan Agreement (SLA) serta kapitalisasi sebagian cadangan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan tahun buku 2015. Perubahan Akta Terakhir No. 2 Tanggal 7 April 2017, dari notaris Ida Adiningsih, S.H. Notaris di Jakarta, dengan yang telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0126086 tahun 2017.

1.4 Tempat dan Kedudukan

Perseroan berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 14. Jakarta Pusat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki 45 Cabang, 115 Terminal point, 1 cabang khusus di Singapura dan 2 Unit Bisnis Strategi (Galangan Surya, Surabaya dan Hotel Bahtera Cipayung).

1.5 Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Notaris Ida Adiningsih. SH No 2 tanggal 09 November 2020 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 November 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0405631 tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Susunan Dewan Komisaris untuk tahun 2020 sebagai berikut:

1. ***G E N E R A L*** *(Continued)*

1.3 Capital

Capital Stock of the Company is owned 100% by Government in accordance with Notarial Deed Ida Adiningsih SH. dated of February 01. 2016 which has been approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.030012165 Year 2016. dated February 02. 2016. The addition of authorized capital was from Revenue and Expenditure Budgeted of State on the year of Budgeted Years of 2016 and through Money Conversion Subsidiary Loan Agreement (SLA) and part of capitalized reserves of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) until the year of 2015. The last amendment was deed No. 2 April 7, 2017 with Notarial from Ida Adiningsih SH, Notary in Jakarta which has been approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126086 year 2017.

1.4 Place and Domicile

The Company domiciled in Gajah Mada No. 14. Central Jakarta.

In carrying out business activities the Company has 45 branches 115 Terminal Points 1 Special Branch in Singapore and 2 Strategic Business Units (Galangan Surya, Surabaya and Hotel Bahtera Cipayung).

1.5 Management of Company

Boards of Commissioners and Directors

Based on the Notary Deed of Ida Adiningsih. SH No. 2 dated November 09, 2020 whose notification has been received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated November 10, 2020 Number AHU-AH.01.03-0405631 concerning Dismissal and Appointment of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) it's composition of Board of Commissioners for the year of 2020 as follows:

Komisaris Utama	:	Ali Masykur Musa	:	*Chief Commisioner*
Komisaris Independen	:	Kristia Budiarto	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Wahju Adjie Herpriarsono	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Haryo Indratno	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Eddy Susanto Soepadmo	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Iwan Taufiq Purwanto	:	*Commissioner*

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-339/MBU/12/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tanggal 27 Desember 2019, maka susunan Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Based on decree of Minister of State Owned Enterprises number SK-339/MBU/12/2019 concerning to termination and appointment of members of Board of Directors of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) on December 27, 2019 the Board of Directors for the year ended December 31, 2020 are as follows:

Direktur Utama	:	Insan Purwarisya L. Tobing	:	*President Director*
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	:	Olih Masolich Sodikin	:	*Director of Passenger Transportation*
Direktur Keuangan	:	Ony Suprihartono	:	*Director or Finance*
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut	:	Masrul Khalimi	:	*Director of Maritime Goods and Toll Road Transport*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Ganefi	:	*Director of Human Resources and General Affairs*
Direktur Armada	:	M. Tukul Harsono	:	*Director of the Fleet*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. **U M U M** (Lanjutan)

1.5 Pengurus Perusahaan (Lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Remunerasi Dewan Komisaris diberikan sesuai dengan Risalah RUPS PT PELNI (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan mengacu kepada peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya keagamaan, transportasi, komunikasi dan santunan purna jabatan dan tunjangan transportasi. Fasilitas yang diberikan adalah fasilitas kesehatan. bantuan hukum dan perkumpulan profesi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-128/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan memperhatikan Surat Keputusan Surat Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Nomor : 38/DK/V/-2019 tanggal 9 Mei 2019 serta menindak lanjuti Rapat Umum Pemegang Saham PT PELNI (Persero) tahunan tahun buku 2018 tanggal 27 Mei 2019 maka ditetapkan Penghasilan Dewan Komsaris dan Direksi serta insentif kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

a. Gaji Direktur Utama ditetapkan naik dari gaji tahun 2018. Gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia sebesar 90% dari gaji Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

b. Honorarium Komisaris ditetapkan 45 % dari Gaji Direktur Utama. Honorarium Dewan Komisaris ditetapkan 90 % dari Komisaris Utama.

c. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi BOD & BOC ditetapkan mengacu pada PER-01/MBU/05/2019.

d. Gaji/Honorarium bagi Direksi & Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2019 berlaku efektif 1 Januari 2019.

Selain itu Direksi dan Dewan Komisaris juga menerima insentif kinerja tahun buku 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Insentif Kinerja Direktur & Komisaris Utama masing masing 100%, 85%, dan 45% dari insentif kinerja Direktur Utama sedangkan insentif Dewan Komisaris sebesar 90% dari insentif Komisaris Utama dan pembayarannya dihitung proporsional dengan memperhitungkan masa kerja efektif tahun buku 2019.

- PPh menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan sebagai biaya perusahaan.

1. ***G E N E R A L*** *(Continued)*

1.5 Management of Company *(Continued)*

Board of Commissioners and Directors *(Continued)*

The Board of Commissioners remuneration is given in accordance with the treatise of GMS of PT PELNI (Persero) on the approval of the annual report of the Consolidated financial statements ratification and referring to the regulation of the Minister of State of BUMN No: PER01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 concerning Income determination guideline of BOD, BOC and supervisory Board of state owned enterprises. The Board of Commissioners remuneration consists of salary/honorarium, allowance consisting of religious holidays, transportation, communication and compensation for full tenure and transportation allowances. Facilities provided are health facilities. legal aid and professional associations.

Based on Decree of Minister of State Owned Enterprises number SK-128/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 and pay attention to decree of Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number: 38/DK/V/-2019 dated May 9, 2019 based on General Meeting of Shareholders of PT PELNI (Persero) on the year of 2018 dated May 27, 2019 remunerations and incentive of Board of Commissioners and Directors are as follows:

a. The salary of President Director was set to rise from 2018 salary. The director's salary in charge of human resources amounted to 90% of the salary of the President Director and other members of the board of directors by 85% of the salary of the President Director.

b. Honorarium of Commissioners was set in 45% of the salary of President Director. Honorarium of Board of Commissioners is set in 90% of President Commissioner.

c. Benefits and/or facilities for BOD and BOC are determined according to PER- 01/MBU/05/2019.

d. Salary/Honorarium for Board of Directors and Commissioners as well as allowances and facilities for 2019 has been applicable effectively on January 1, 2019.

In addition the Board of Commissioner also received performance incentives for the fiscal year 2020 subject to the following conditions:

- *Performance Incentives of Director & President Commissioner are 100%, 85%, and 45% respectively, While the incentives of Board of Commissioners are 90% of President Commissioner incentive and it's payment will be in proportional calculation with taking into account of effective service life on the year of 2019.*

- *PPh is should by the recepient and it is not allowed as a company fee.*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. **U M U M** (Lanjutan)

1.5 Pengurus Perusahaan (Lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan Akta Notaris Ida Adiningsih. SH No. 9 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Susunan Dewan Komisaris untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Ali Masykur Musa	:	*Chief Commisioner*
Komisaris Independen	:	Johanes Widodo Hario Mumpuni	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Danang Parikesit	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Loto Srinaita Ginting	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Haryo Indratno	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Wahju Adjie Herpriarsono	:	*Commissioner*

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-339/MBU/12/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tanggal 27 Desember 2019 maka susunan Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Insan Purwarisya L. Tobing	:	*President Director*
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	:	Olih Masolich Sodikin	:	*Director of Passenger Transportation*
Direktur Keuangan	:	Ony Suprihartono	:	*Director or Finance*
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut	:	Masrul Khalimi	:	*Director of Maritime Goods and Toll Road Transport*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Ganefi	:	*Director of Human Resources and General Affairs*
Direktur Armada	:	M. Tukul Harsono	:	*Director of the Fleet*

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Tahun 2020 dan 2019 secara berurutan Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Erwin Fajrin.

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ dari Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Komite Audit bersifat independen dan mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan. dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

1. ***G E N E R A L*** *(Continued)*

1.5 Management of Company *(Continued)*

Board of Commissioners and Directors *(Continued)*

Based on Decree of Minister of State Owned Enterprises No. SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019 and Notarial Deed of Ida Adiningsih. SH No. 9 dated October 31, 2019 on the Decree of Minister of State Owned Enterprises of General Meeting of Shareholders of Company PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) it's composition of Board of Commissioners for the year of 2019 are as follows:

Based on decree of Minister of State Owned Enterprises number SK-339/MBU/12/2019 concerning to termination and appointment of members of Board of Directors of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) on December 27, 2019 then Board of Directors for the year ended December 31, 2019 as follows:

In supporting of implementation of functions and role effectiveness of Board of Commissioners. BOC is assisted by Secretary of Board of Commissioners. In 2020 and 2019 sequentially the Secretary of Board of Commissioners held by is Erwin Fajrin.

The Audit Committee

The Audit Committee is an organ of Board of Commissioners which was formed by Board of Commissioners as mandated by Constitution No. 19 of 2003 concerning on State Owned Enterprises. The Audit Committee serves to assist the Board of Commisioners in carrying out supervisory duties. Audit Committee is independent and self-sufficient both in the execution of it duties and reporting directly responsible to Board of Commissioners.

Audit Committee members are appointed and dismissed by Board of Commissioners and is reported to General Meeting of Shareholders (RUPS). Audit Committee members tenure should not be longer than term of Board of Commissioners in accordance with Articles of Association of Company and may be reelected only for next one (1) term.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. **U M U M** (Lanjutan)

1.5 Pengurus Perusahaan (Lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Komite Audit (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-14/DK/XI-2020 tertanggal 03 November 2020 Tentang Pemberhentian Wakil Ketua dan Pengangkatan Ketua Komite dan Perubahan Susunan Komite Audit PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Susunan Komite Audit tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Iwan Taufiq Purwanto	:	*Chairman of Audit Committee*
Anggota (juga selaku Dewan Komisaris)	:	Wahju Adjie Herpriarsono	:	*Members (also as Commissioner)*
Anggota	:	Joko Murdyono	:	*Members*
Anggota	:	Baliya Munadjat	:	*Members*

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. Ket- 07/DK/X-2019 tanggal 22 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Wakil Ketua dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Susunan Komite Audit tahun buku 2019 sebagai berikut:

Ketua Komite Audit (merangkap Komisaris Independen)	:	Johanes Widodo Hario Mumpuni	:	*Chairman of Audit Committee (also as Independent Commissioner)*
Anggota (juga selaku Dewan Komisaris)	:	Haryo Indratno	:	*Members (also as Commissioner)*
Anggota	:	Joko Murdyono	:	*Members*
Anggota	:	Subagio	:	*Members*

Pelaksanaan tugas Komite Audit PT PELNI (Persero) berlandaskan pada Piagam Komite Audit yang disahkan pada tanggal 8 Januari 2016.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk menerapkan GCG. Terkait implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Kebijakan Risiko menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No.SK: KEP- 15/DK/XI-2020 tanggal 03 November 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komite Kebijakan Risiko pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Susunan Komite Kebijakan Risiko tahun buku 2020 sebagai berikut:

Ketua Komite Kebijakan Risiko (merangkap sebagai Anggota Komisaris)	:	Eddy Susanto Soepadmo	:	*Chairman of the Risk Policy Committee (Also as Members of Commissioner)*
Anggota (merangkap sebagai Anggota Komisaris)	:	Kristia Budiyarto	:	*Members (Also as Members of Commissioner)*
Anggota	:	Radjalis	:	*Members*
Anggota	:	Abdul Kholik Sutrisno	:	*Members*

1. ***G E N E R A L*** *(Continued)*

1.5 Management of Company *(Continued)*

Board of Commissioners and Directors *(Continued)*

The Audit Committee (Continued)

Based on decision of Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP – 14/DK/XI-2020 dated November 03, 2020, concerning Deputy Chairman's termination and appointment of PT Pelayaran Nasional Indonesia Audit Committee (Persero) The Audit Committee composition on the year of 2020 and 2019 are as follows:

For the next. that based on decision of Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. Ket-07/DK/X-2019 dated October 22. 2019 concerning Deputy Chairman's termination and appointment of PT Pelayaran Nasional Indonesia Audit Committee (Persero). the Audit Committee arrangement on the year of 2019 as follows:

Tasks Implementation of Audit Committee in PT PELNI (Persero) has been based on the Audit Committee Charter which was endorsed on January 8, 2016.

Risk Management Monitoring Committee

Formationed of Management Monitoring Committee is part of company's efforts to implement the GCG. Related to the implementation of good corporate governance. the role and functions of Risk Policy Committee are to be very strategic in assisting and enhancing the role of Board of Commissioners in performing its supervisory function.

Based on the Decision of Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No.SK:KEP-15/DK/XI-2020 dated November 03, 2020 concerning to termination and appointment of members of the risk Policy Committee on the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Formation of the Risk Policy Committee on the year of 2020 as follows:

1. U M U M (Lanjutan)

1.5 Pengurus Perusahaan (Lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Komite Pemantau Manajemen Risiko *(Lanjutan)*

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No.SK: KEP- 08/DK/X-2019 tanggal 22 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komite Kebijakan Risiko pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Susunan Komite Kebijakan Risiko tahun buku 2019 sebagai berikut:

Ketua Komite Kebijakan Risiko (merangkap sebagai Anggota Komisaris)	:	Danang Parikesit	:	Chairman of the Risk Policy Committee *(Also as Members of Commissioner)*
Wakil Ketua (merangkap sebagai Anggota Komisaris)	:	Loto Srinaita Ginting	:	*Vice Chairman (Also as Members of Commissioner)*
Anggota (merangkap sebagai Anggota Komisaris)	:	Wahju Adjie Hetriarsono	:	*Members (Also as Members of Commissioner)*
Anggota	:	Radjalis	:	*Members*
Anggota	:	Abdul Kholik Sutrisno	:	*Members*

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasar Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Talent & Succession Management Direksi BUMN, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasar Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-02/DK/IV-2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesai (Persero), susunan Komite Nominasi dan Remunerasipaling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite Numerasi dan Remunerasi	:	Komisaris Utama/ *President Commisioner*	:	*Chairman of the Numeration and Remuneration Committe*
Sekretaris	:	Anggota Dewan Komisaris/ *Member of the Board of Commissioners*	:	*Secretary*
Anggota	:	Berasal dari luar Perusahaan/ *Coming from outside the Company*	:	*Members*

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-02/DK/IV-2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.5 Management of Company *(Continued)*

Board of Commissioners and Directors *(Continued)*

Risk Management Monitoring Committee (Continued)

Based on the Decision of Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No.SK:KEP-08/DK/X-2019 dated October 22, 2019 concerning to termination and appointment of members of the risk Policy Committee on the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Formation of the Risk Policy Committee on the year of 2019 as follows:

Risk Management Monitoring Commitee

Based on the Letter of the Minister for State-Owned Enterprises Number: S-254 / MBU / 04/2020 dated April 17, 2020 regarding the Talent & Succession Management of the Directors of BUMN, the Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-02 / DK / IV-2020 dated April 20, 2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee on the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesai (Persero), the composition of the Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members as follows

The Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities as stated in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-02 / DK / IV-2020 dated April 20, 2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee on the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.6 Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki

Usaha pokok PT PELNI (Persero) adalah menyediakan jasa angkutan transportasi laut yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau. Berdasarkan usaha pokok tersebut, bidang usaha yang dijalankan oleh PT PELNI (Persero) antara lain:

a. Jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran tetap teratur dan terjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu.

b. Jasa keagenan.

c. Jasa operasi terminal, Pergudangan, angkutan Red dan ekspedisi/forwarding.

d. Jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal.

e. Charter dan broker kapal.

f. Jasa konsultan, pelatihan, dan usaha perhotelan.

Jasa Perkapalan

a. Kapal *2 in 1*

Kapal jenis 2 *in* 1 adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Welf dan dibangun di galangan Pepenburg, Jerman. Kapal 2 *in* 1 ini memiliki kapasitas 1.583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu Kapal tipe 2 in 1 ini secara resmi diberi nama KM Gunung Dempo. dibuat sejak pertengahan 2006 dan panjang 146.80 m dengan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot.

b. Kapal Penumpang Serbaguna

Kapal jenis 3 *in* 1 adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan mobil sekaligus. Kapal Motor Dobonsolo dan Kapal Motor Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis 3 *in* 1. yaitu kapal serbaguna yang dapat mengangkut kontainer di bagian depan dan belakang serta penumpang dan mobil. Kapal ini telah dimodifikasi di galangan Sembawang Singapura.

c. Kapal Barang

Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, PT PELNI (Persero) memiliki 3 kapal barang yaitu KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 dan KM Caraka Jaya Niaga – 32 dengan kapasitas muat yang berbeda-beda untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.6 Business Line and Owned Business Unit

The main business of PT PELNI (Persero) is to provide sea transportation services which includes passenger transport services and inter-island freight cargo services. Based on that main business the services provided by PT PELNI (Persero) are:

a. Passengers and freight transportation services with a fixed regular and scheduled shipping lines as well as a cruise that to serves certain requests.

b. Agency services.

c. Terminal operatio, Warehouse, Red transportation, and expedition/forwarding services.

d. Ship maintenance and dock business or ship reparation services.

e. Ship charter and broker.

f. Consultant. of and hotel business.

Shipping Services

a. 2 in 1 Ship

2 in 1 Ship is a type of ship with capacity to carry passenger and containers that is designed by Meyer Welf and built at Pepenburg Shipyard Germany. The 2 in 1 ship has capacity of 1.583 passengers and 98 containers. One of the 2 in 1 ships is officially named KM Gunung Dempo and built in mid of 2006 with total length of 146.80 m and sailing speed over 20 knots.

b. Multipurpose Passenger Ship

The 3 in 1 ship type is multipurpose passengers ship that is able to carry containers, passengers and cars at once. KM Dobonsolo and KM Ciremai are passenger ships which has been modified into 3 in 1 ship type, that is multipurpose ships for carrying container at the front and back sides as well as passengers and cars. The ships had been modified at Sembawang Shipyard, Singapore.

c. Cargo Ship

For puproses of goods logistic distribution to all regions of Indonesia, PT PELNI (Persero) has 3 cargo ships, among others, KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 and KM Caraka Jaya Niaga – 32 with different capacities to provide cargo ship and carry large volume cargo with excellent services and supported by professional personnel.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

Jasa Perkapalan (Lanjutan)

c. Kapal Barang (Lanjutan)

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 9 (sembilan) armada Kapal Tol Laut yaitu KM.Logistik Nusantara I, II, III, IV, V, VI, KM Kendhaga Nusantara 01, KM Kendhaga Nusantara 07 dan KM Kendhaga Nusantara 11.

PT PELNI (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana penyelenggarakan kewajiban pelayanan publik tersebut atau yang disebut sebagai program Tol Laut (layanan angkutan barang yang terjadwal, tetap, dan teratur).

d. Kapal Ternak

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 2 (dua) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dan KM Camara Nusantara III dengan rute Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

e. Kapal Perintis

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak.

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 51 (lima puluh satu) Kapal Perintis yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

f. Kapal Rede

Kapal rede merupakan bagian dari penugasan penerintah kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 20 kapal rede yang tersebar diseluruh Indonesia.

Unit Bisnis Strategis

a. Hotel Bahtera

Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

b. Galangan Surya Surabaya

Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PELNI tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI Maintenance Facilities (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin space dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

Shipping Services (Lanjutan)

c. Cargo Ship (Continued)

PT PELNI (Persero) was operating 9 (nine) Sea Toll fleet namely KM. Logistik Nusantara I, II, III, IV, V, VI, KM Kendhaga Nusantara 01. KM Kendhaga Nusantara 07 and KM Kendhaga Nusantara 11.

PT PELNI (Persero) was appointed to carry out these public service obligations or what is known as the Sea Toll program (scheduled, fixed, and regular freight services).

d. Cattle Ship

PT PELNI (Persero) operates 2 (two) Cattle Ships. KM Camara Nusantara I and KM Camara Nusantara III with routes of Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. The operation of cattle ships are aim to help the Government to press of meat price and increase welfare of breeders in domestic cow breeding center.

e. Pioneer Ship

Pioneer ships fleet are part of Government's assignment to PT PELNI (Persero) besides Sea Toll and Cattle ships.

PT PELNI (Persero) operates 51 (fifty one) Pioneer Ships covering remote area across Indonesia.

f. Rede Ship

Rede ship is part of the assignment of the authority to PT PELNI (Persero) by operating 20 Rede vessels spread throughout Indonesia.

Strategic Business Unit

a. Hotel Bahtera

Hotel with meeting and training center facilities which is equipped with meeting rooms facilities with a capacity of more than 200 people and other supporting facilities.

b. Galangan Surya Surabaya

Established since May 20, 1996, the Shipyard handled 500 types of PELNI ships, such as KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI Maintenance Facilities (PMF) is strategic projection to guarantee of docking and repair spaces for all vessels (including large ships) those are operated by PT PELNI (Persero).

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.6 Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (Lanjutan)

Unit Usaha Lainnya

a. Keagenan Kapal

Jenis keagenan kapal. meliputi:

1) *Clearance in / out*
2) *Bunker, Fresh Water and Provision Supply*
3) *Crew Attendance*
4) *Protecting Agent*
5) *Custom Clearance*
6) *Layanan Sea Pollution*
7) *Layanan Garbage Removal*

b. Pengusahaan Aset

Persewaaan gedung atau ruang kantor dari aset gedung perusahaan yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PELNI serta persewaaan toko dan cafe di atas kapal.

Sebagai perusahaan pelayaran. saat ini PT PELNI (Persero) mengoperasikan 25 unit armada kapal penumpang, 1 unit kapal ferry cepat dan mengoperasikan 9 unit armada kapal barang dengan total bobot mati sebesar 35.044 ton. Untuk melayani penumpang dan barang tersebut. kami membagi armada menjadi:

1) Tipe 3000 pax
2) Tipe 2000 pax (2 unit dimodifikasi 3 in 1)
3) Tipe 1000 pax
4) Tipe 500 pax
5) Ro-Ro tipe cargo 3 unit
6) Kapal Barang Tipe Caraka
7) Kapal Logistik Nusantara (Tipe Kontainer)

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.6 Business Line and Owned Business Unit *(Continued)*

Others Business Unit

a. Ship Agency

Type of Agency Services:

1) *Clearance in / out*
2) *Bunker, Fresh Water and Provision Supply*
3) *Crew Attendance*
4) *Protecting Agent*
5) *Custom Clearance*
6) *Sea Pollution Services*
7) *Garbage Removal Services*

b. Asset Management

Leasing of buildings or office space from company building assets scattered in all branches of PT PELNI (Persero). Apart from that, the property business also includes rental of advertising space on board PELNI ships as well as renting out shops and cafes on board.

As a shipping company PT PELNI (Persero) operates 25 units of passenger vessels fleet, one fast ferry vessels and operates a fleet of 9 units of goods with a total deadweight of 35.044 tons. To serve passengers and goods we divided the fleet into:

1) *Type 3000 pax*
2) *Type 2000 pax (2 unit modificated to be 3 in 1)*
3) *Type 1000 pax*
4) *Type 500 pax*
5) *Ro-Ro type cargo 3 unit*
6) *Cargo Ship Type Caraka*
7) *Logistik Nusantara Ship (Type Container)*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.6 Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (Lanjutan)

PT Pelni (Persero) dalam menjalankan kegiatan operasinya memiliki unit-unit usaha yang terdiri dari:

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.6 Business Line and Owned Business Unit *(Continued)*

PT Pelni (Persero) in managing the business operation has business units that consists as below:

	Total	
• **Kantor Pusat**	**1**	***Head Office*** •
• **Kantor Cabang A, lokasi di:**	**3**	***Branch Office A, location at:*** •
1) Tanjung Priuk		*Tanjung Priuk 1)*
2) Surabaya		*Surabaya 2)*
3) Makasar		*Makasar 3)*
• **Kantor Cabang B, lokasi di:**	**10**	***Branch Office B, location at:*** •
1) Ambon		*Ambon 1)*
2) Sorong		*Sorong 2)*
3) Bau-bau		*Bau-bau 3)*
4) Bitung		*Bitung 4)*
5) Kupang		*Kupang 5)*
6) Tanjungpinang		*Tanjungpinang 6)*
7) Jayapura		*Jayapura 7)*
8) Manokwari		*Manokwari 8)*
9) Balikpapan		*Balikpapan 9)*
10) Semarang		*Semarang 10)*
• **Kantor Cabang C, lokasi di:**	**18**	***Branch Office C, location at:*** •
1) Larantuka		*Larantuka 1)*
2) Denpasar		*Denpasar 2)*
3) Batam		*Batam 3)*
4) Ternate		*Ternate 4)*
5) Namlea		*Namlea 5)*
6) Biak		*Biak 6)*
7) Serui		*Serui 7)*
8) Pare-pare		*Pare-pare 8)*
9) Nabire		*Nabire 9)*
10) Kumai		*Kumai 10)*
11) Sampit		*Sampit 11)*
12) Tarakan		*Tarakan 12)*
13) Nunukan		*Nunukan 13)*
14) Tual		*Tual 14)*
15) Medan		*Medan 15)*
16) Maumere		*Maumere 16)*
17) Pontianak		*Pontianak 17)*
18) Fak Fak		*Fak Fak 18)*
• **Kantor Cabang D, lokasi di:**	**14**	***Branch Office D, location at:*** •
1) Bima		*Bima 1)*
2) Waingapu		*Waingapu 2)*
3) Timika		*Timika 3)*
4) Ende		*Ende 4)*
5) Dobo		*Dobo 5)*
6) Kotabaru/Batulicin		*Kotabaru/Batulicin 6)*
7) Palu		*Palu 7)*
8) Kendari		*Kendari 8)*
9) Merauke		*Merauke 9)*
10) Tanjung Balai Karimun		*Tanjung Balai Karimun 10)*
11) Labuan Bajo		*Labuan Bajo 11)*
12) Luwuk		*Luwuk 12)*
13) Kaimana		*Kaimana 13)*
14) Toli - Toli		*Toli – Toli 14)*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.6 Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (Lanjutan)

- **Terminal Penghubung lokasi di:**

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.6 Business Line and Owned Business Unit *(Continued)*

- ***Terminal Point location at:***

	Total	
1) Pangkal Pinang		*Pangkal Pinang 1)*
2) Tanjung Pandan		*Tanjung Pandan 2)*
3) Palembang		*Palembang 3)*
4) Bengkulu		*Bengkulu 4)*
5) Jambi		*Jambi 5)*
6) Padang		*Padang 6)*
7) Kalianget		*Kalianget 7)*
8) Bawean		*Bawean 8)*
9) Masalembo		*Masalembo 9)*
10) Laga		*Laga 10)*
11) Probolinggo		*Probolinggo 11)*
12) Gresik		*Gresik 12)*
13) Selayar		*Selayar 13)*
14) Biringkasih		*Biringkasih 14)*
15) Bandanaira		*Bandanaira 15)*
16) Saumlaki		*Saumlaki 16)*
17) Amahai		*Amahai 17)*
18) Bula		*Bula 18)*
19) Geser		*Geser 19)*
20) Larat		*Larat 20)*
21) Ilwaki		*Ilwaki 21)*
22) Moa		*Moa 22)*
23) Tepa		*Tepa 23)*
24) Mangole		*Mangole 24)*
25) Sidangole		*Sidangole 25)*
26) Buli		*Buli 26)*
27) Cirebon		*Cirebon 27)*
28) Karimun Jawa		*Karimun Jawa 28)*
29) Sami		*Sami 29)*
30) Wanci		*Wanci 30)*
31) Raha		*Raha 31)*
32) Samarinda		*Samarinda 32)*
33) Banjarmasin		*Banjarmasin 33)*
34) Bontang		*Bontang 34)*
35) Paser		*Paser 35)*
36) Tanah Grogot		*Tanah Grogot 36)*
37) Kalabahi		*Kalabahi 37)*
38) Rote		*Rote 38)*
39) Sabu		*Sabu 39)*
40) Atampupu/Atambua		*Atampupu/Atambua 40)*
41) Gorontalo		*Gorontalo 41)*
42) Tahuna		*Tahuna 42)*
43) Amurang		*Amurang 43)*
44) Marore		*Marore 44)*
45) Togian		*Togian 45)*
46) Kwandang		*Kwandang 46)*
47) Lirung		*Lirung 47)*
48) Miangas		*Miangas 48)*
49) Siau		*Siau 49)*
50) Karatung		*Karatung 50)*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.6 Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (Lanjutan)

- **Terminal Penghubung. lokasi di:** (Lanjutan)

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.6 Business Line and Owned Business Unit *(Continued)*

- ***Terminal Point. location at:*** *(Continued)*

	Total	
51) Ulisiau		*Ulisiau 51)*
52) Kahikitang		*Kahikitang 52)*
53) Wasior		*Wasior 53)*
54) Bintuni		*Bintuni 54)*
55) Tj Uban		*Tj Uban 55)*
56) Tarempa		*Tarempa 56)*
57) Letung		*Letung 57)*
58) Tambelan		*Tambelan 58)*
59) Natuna/Ranai		*Natuna/Ranai 59)*
60) Midai		*Midai 60)*
61) Selat Panjang		*Selat Panjang 61)*
62) Serasan		*Serasan 62)*
63) Bagan siapi-api		*Bagan siapi-api 63)*
64) Kualaenok		*Kualaenok 64)*
65) Perawang		*Perawang 65)*
66) Dumai		*Dumai 66)*
67) Tambilahan		*Tambilahan 67)*
68) Palopo		*Palopo 68)*
69) Belang-belang		*Belang-belang 69)*
70) Barru		*Barru 70)*
71) Malili		*Malili 71)*
72) Tobelo		*Tobelo 72)*
73) Galela		*Galela 73)*
74) Babang		*Babang 74)*
75) Morotai		*Morotai 75)*
76) Gebe		*Gebe 76)*
77) Labuha		*Labuha 77)*
78) Gunung Sitoli		*Gunung Sitoli 78)*
79) Sibolga		*Sibolga 79)*
80) Lhoksumawe		*Lhoksumawe 80)*
81) Enggano		*Enggano 81)*
82) Sikakap/Mentawai		*Sikakap/Mentawai 82)*
83) Teluk Talam		*Teluk Talam 83)*
84) Malahayati		*Malahayati 84)*
85) Meulaboh		*Meulaboh 85)*
86) Sintete		*Sintete 86)*
87) Ketapang		*Ketapang 87)*
88) Kendawang		*Kendawang 88)*
89) Pemangkat		*Pemangkat 89)*
90) Sinkawang		*Sinkawang 90)*
91) Teluk Air		*Teluk Air 91)*
92) Batu Ampar		*Batu Ampar 92)*
93) Ampenan/Lembar		*Ampenan/Lembar 93)*
94) Banyuwangi		*Banyuwangi 94)*
95) Jampea		*Jampea 95)*
96) Buleleng		*Buleleng 96)*
97) Celukan Bawang		*Celukan Bawang 97)*
98) Padang Bai		*Padang Bai 98)*
99) Nusa Penida		*Nusa Penida 99)*
100)Kisar		*Kisar 100)*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.6 Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (Lanjutan)

- **Terminal Penghubung lokasi di:** (Lanjutan)

	Total
101) Loweleba	
102) Bade	
103) Sanana	
104) Namrole	
105) Letsula	
106) Reo	
107) Marapokot	
108) Parigi	
109) Poso	
110) Kolondale	
111) Agast	
112) Amamapare	
113) Badas	
114) Buol	
115) Banggai	
• **SBU :**	**2**
1) Galangan Surya Surabaya	
2) Hotel Bahtera Cipayung	
• **Cabang Khusus, lokasi di :** Singapore	**1**
Jumlah	**164**

***1. G E N E R A L** (Continued)*

***1.6 Business Line and Owned Business Unit** (Continued)*

***Terminal Point location at:** (Continued)* •

Loweleba 101)
Bade 102)
Sanana 103)
Namrole 104)
Letsula 105)
Reo 106)
Marapokot 107)
Parigi 108)
Poso 109)
Kolondale 110)
Agast 111)
Amamapare 112)
Badas 113)
Buol 114)
Banggai 115)
• ***SBU :***
Galangan Surya Surabaya 1)
Hotel Bahtera Cipayung 2)
• ***Representative Branch, location at:*** *Singapore*
Total

1.7 Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Perseroan memiliki pegawai tetap masing-masing sebanyak 4.487 dan 4.367 karyawan.

Dari jumlah karyawan tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang masuk dalam perhitungan kewajiban atas imbalan pasca kerja sebagai berikut:

1.7 Human Resources and Organizational Structure

As of December 31. 2020 and 2019 Company and it's subsidiaries have 4,487 and 4,367 permanent employees.

From the total number of permanent employees of the Company as of December 31, 2020 and 2019 which are included in the calculation of liabilities for post-employment benefits as follows:

	31 Des./ *Dec.* 2020	**31 Des./ *Dec.* 2019**	
Program Santunan Meninggal dan Cacat.			*Death and Disability Compensation Program*
Uang Pisah. THT dan MPP	3.692	4.370	*Separate Money. THT and MPP*
Program UU No. 13 Tahun 2003	2.229	2.883	*UU No. 13 Year 2003 Program*
Program Dana Pensiun	2.496	2.736	*Pension Fund Program*
Program Selisih UU No. 13/2003 dan DPLK	1.463	1.487	*Difference Program UU No.3 / 2003 and DPLK*

1.8 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan menerapkan struktur dan mekanisme GCG dengan tujuan untuk menjalankan suatu proses dan struktur untuk mencapai target kinerja serta mewujudkan akuntabilitas Perseroan guna menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

1.8 The Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

The Company has been implementing of GCG structure and mechanism to aim of operating process and structure to achieve of performance target and accountability of the Company to generate of added value for the Shareholders and Stakeholders by considering interests to other Stakeholders.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
*As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

1. U M U M (Lanjutan)

1.8 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (lanjutan)

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di PT PELNI (Persero) merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/MMBU/ 2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diperbaharui melalui Nomor PER-09/MBU/2012. bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Komitmen pelaksanaan GCG di Perseroan diwujudkan dalam rangkaian pedoman terkait pelaksanaan GCG dan penandatanganan Pakta Integritas GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

a. Pedoman GCG
b. Pedoman Code of Conduct
c. Tata Laksana Kerja (Board Manual) Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
d. Pedoman Benturan Kepentingan
e. Pakta Integritas
f. Pedoman Penanganan Gratifikasi

Perseroan melaksanakan evaluasi praktik GCG melalui kegiatan Asesmen GCG (GCG *Assessment*) secara berkala guna mengukur kualitas pelaksanaan GCG pada masing-masing Organ Perseroan. Untuk periode tahun buku 2019, *assessment* GCG dilakukan oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta sesuai dengan skor 83.17 atau predikat baik sesuai dengan Laporan hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* tahun 2019 tanggal 17 Juni 2020.

1.9 Manajemen Risiko

PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan *framework* ISO 31000 untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas. mudah dipahami. terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan.

Kebijakan Sistem Manajemen Risiko di Perseroan telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10.06/2/SK/HKO.01/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko PT PELNI (Persero).

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.8 The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) *(continue)*

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices at PT PELNI (Persero) refers to number of laws and regulations in Indonesia among others Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Minister of State Owned Enterprise Decree Number Kep-117/M-MBU/2002 on the date of July 31, 2002 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises (SOE) and the Regulation of Minister of State Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 on the date of August 1, 2011 on Application of Corporate Governance (Good Corporate Governance) in State Owned Enterprises, as updated through No. PER-09 / MBU / 2012. GCG that State Owned Enterprises (BUMN) must implement GCG consistently and it's sustainable by referring to this Ministrial Regulation while still observing the provisions, norms that apply and the articles of association of BUMN.

GCG implementation commitment in the Company is manifested in a series of guidelines related to GCG implementation and signing of GCG integrity pact by Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

a. Manual of GCG
b. Manual of Code of Conduct
c. PT PELNI (Persero) Board Manual for Board of Directors and Board of Commissioners
d. Manual of Conflict of Interest
e. Integrity Pact
f. Anti-Gratification Manual

The company to evaluate of GCG practices through it's periodic GCG Assessment activities to measure the quality of GCG implementation in each of the company's organs. For the period of 2019 book year. GCG hase been assessment conducted by BPKP representatives of DKI Jakarta in accordance with achiecement score 83,17 or well predicate with report implementation Self Assesment Good Corporate Governance year 2019 on the date of June 17, 2020.

1.9 Risk Management

PT PELNI (Persero) has been implemented of Risk Management System that it's based on ISO 31000 framework to establish risk management practices with more wider perspective. easier to be understood. measured and to support of all coordination and integration inter of working unit of the Company.

Risk Management System policy has been updated according to Board of Directors Decree No. 10.06/2/SK/HKO.01/2016 on the date of October 6, 2016 regarding establishment of PT PELNI (Persero) Risk Management Policy.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.9 Manajemen Risiko (lanjutan)

Guna mendukung penerapan Manajemen Risiko ISO 31000, dilakukan peningkatan kesadaran risiko diseluruh lapisan organisasi. membangun ketahanan dan melakukan mitigasi risiko serta menjaga risiko yang tersisa *(residual risk)* pada tingkat yang dapat ditoleransi *(tolerable level)*. Hal ini dimaksudkan agar daya saing *(*competitiveness*)* dan kelangsungan usaha *(going concern)* perusahaan dapat selalu terjaga. Pedoman ini dapat diterapkan juga pada anak usaha sepanjang telah disetujui oleh Direksi anak usaha. Penerapan manajemen risiko pada anak usaha perlu dilakukan dengan beberapa adaptasi mengingat karakter usaha yang berbeda dengan induk usaha.

1.10 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Perseroan telah memperoleh sertifikasi atas aset yang digunakan dalam kegiatan usaha utama dibidang pelayaran, meliputi:

***1. G E N E R A L** (Continued)*

***1.9 Risk Management** (continued)*

In order to support the implementation of ISO 31000 risk management. there is an increase in risk awareness across the organizational layer. build resilience and mitigate risk and maintain residual risk at a tolerable level. It is intended so that the competitiveness and the business continuity company can always be awake. These guidelines may be applied also to subsidiaries as long as approved by the BOD subsidiaries. The application of risk management in subsidiaries needs to be done with some adaptations considering the different business characters with the parent business.

1.10 Certification of Quality Management System

The Company has obtained certificates for assets those used in the main business activities in the shipping sector, including:

No.	Nama Sertifikat/ *Name of Certificate*	Lembaga Penerbit Sertifikat/ *Certificate Issuer Institution*	Masa Berlaku/ *Validity Period*
1.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang/*Passengers Vessels Safety Certificate*	Dirjen Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan RI/*Marine Transportation General Directorate. Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	
	a. KM Tilong kabila		03 September 2020
	b. KM Egon		7 April 2021
	c. KM Pangrango		13 Januari 2021
	d. KM Lambelu		05 Mei 2021
	e. KM Bukit Siguntang		29 Desember 2020
	f. KM Sirimau		20 April 2021
	g. KM Nggapulu		10 Agustus 2021
	h. KM Jetliner		06 Desemeber 2021
	i. KM Sangiang		17 September 2021
	j. KM Bukit Raya		25 Agustus 2020
	k. KM Leuser		19 Maret 2020
	l. KM Awu		19 November 2019
	m. KM Lawit		16 September 2021
	n. KM Kelimutu		28 Mei 2020
	o. KM Dorolonda		03 April 2021
	p. KM Sinabung		01 April 2021
	q. KM Ciremai		10 Juli 2021
	r. KM Kelud		19 Mei 2021
	s. KM Binaiya		24 Februari 2020
	t. KM Tatamailau		08 Agustus 2021
2.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum/*Minimum Safe Manning Document*	Dirjen Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan RI/ *Marine Transportation General Directorate. Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	
	a. KM Sangiang		10 Mei 2021
	b. KM Bukit Raya		07 Desember 2021
	c. KM Lambelu		07 Maret 2021
	d. KM Lawit		07 Desember 2021
	e. KM Labobar		02 Januari 2021
	f. KM Tidar		21 Januari 2021
	g. KM Ciremai		16 Januari 2019
	h. KM Dobonsolo		20 Januari 2022
	i. KM Sinabung		20 Januari 2021
	j. KM Tatamailau		13 Agususstus 2021
	k. KM Kelud		11 Desember 2020
	l. KM Dorolonda		02 Juli 2021
	m. KM Nggapulu		09 November 2021

1. U M U M (Lanjutan) / **1. *G E N E R A L*** *(Continued)*

1.10 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (Lanjutan) / ***1.10 Certification of Quality Management System*** *(Continued)*

No.	Nama Sertifikat/ *Name of Certificate*	Lembaga Penerbit Sertifikat/ *Certificate Issuer Institution*	Masa Berlaku/ *Validity Period*
2.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum/*Minimum Safe Manning Document (Continued)*	Dirjen Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan RI/ *Marine Transportation General Directorate. Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	
	n. KM Gunung Dempo		6 Desember 2020
	o. KM Kelimutu		14/02/2019 - 13/02/2020
	p. KM Sirimau		12 Desember 2020
	q. KM Awu		23 Januari 2020
	r. KM Leuser		02 Januari 2021
	s. KM Binaiya		30 Juli 2019
	t. KM Tilongkabila		26 Oktober 2021
	u. KM Jetliner		27 Maret 2021
	v. KM Egon		16 September 2021
	w. KM Wilis		04/12/2019 - 03/12/2020
	x. KM Pangrango		12 November 2021
3.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal/N*ational Certificate Of Prevention Of Pollution From Ships*	Dirjen Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan RI/ *Marine Transportation General Directorate. Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	
	a. KM Sangiang		01 Juli 2023
	b. KM Bukit Raya		05 Januari 2021
	c. KM Lambelu		17 Februari 2022
	d. KM Lawit		27 Agustus 2022
	e. KM Labobar		02 Januari 2023
	f. KM Tidar		23 November 2021
	g. KM Ciremai		27 Mei 2023
	h. KM Sinabung		24 Januari /2021
	i. KM Bukit Siguntang		10 Maret 2022
	j. KM Tatamailau		14 Mei 2023
	k. KM Kelud		12 September 2022
	l. KM Nggapulu		23 Februari 2023
	m. KM Kelimutu		07/09/2019 - 27/05/2020
	n. KM Awu		11 September 2021
	o. KM Leuser		14/12/2016 - 13/12/2021
	p. KM Binaiya		16 November 2021
	q. KM Tilongkabila		13 Februari /2021
	r. KM Jetliner		11 Feberuari 2023
	s. KM Egon		02 September 2022
	t. KM Wilis		12/05/2019 - 04/05/2020
	u. KM Gunung Dempo		2 Mei 2020
	v. KM Pangrango		5 Mei 2023
	w. KM Dobonsolo		16 April 2023
	x. KM Dorolonda		09/06/2019 - 08/06/2020

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.10 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (Lanjutan)

1. ***G E N E R A L*** *(Continued)*

1.10 Certification of Quality Management System *(Continued)*

No.	Nama Sertifikat/ *Name of Certificate*	Lembaga Penerbit Sertifikat/ *Certificate Issuer Institution*	Masa Berlaku/ *Validity Period*
4.	Sertifikat Garis Muat. Lambung dan Mesin - Kapal Penumpang/*Load Line. Hull and Machine - Passenger Ships Certificate:*		
	a. KM Awu	PT Biro Klasifikasi Indonesia *(Persero)* /	08 Juni 2021
	b. KM Bukit Raya		27 Maret 2024
	c. KM Binaiya		25 Maret 2024
	d. KM B. Siguntang		23 Mei 2021
	e. KM Ciremai		01 Agustus 2023
	f. KM Dobonsolo		10 Maret 2023
	g. KM Dorolonda		11 Juli 2021
	h. KM Egon		29 Juni 2025
	i. KM G. Dempo		20 Juni 2023
	j. KM Kelimutu		04 Februari 2025
	k. KM Kelud		27 Oktober 2023
	l. KM Lawit		31 Agustus 2024
	m. KM Leuser		28 Mei 2023
	n. KM Lambelu		15 Mei 2022
	o. KM Labobar		26 Juni 2024
	p. KM Nggapulu		05 April 2022
	q. KM Pangrango		09 November 2021
	r. KM Sirimau		17 Mei 2025
	s. KM Sinabung		18 April 2022
	t. KM Sangiang		12 Mei 2024
	u. KM Tilong Kabila		04 Maret 2025
	v. KM Tatamailau		25 Maret 2025
	w. KM Tidar		26 November 2021
	x. KM Umsini		30 September 2020
	y. KM Wilis		25 Oktober 2024
	z. KM Caraka Jn III-4		25 Oktober 2021
	aa. KM Caraka Jn III-22		12 November 2022
	ab. KM Caraka Jn III-32		20 September 2023
	ac. KFC Jet Liner		04 Juni 2023

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.11 Entitas Anak

a. Kepemilikan Langsung

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan sebagai berikut:

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.11 *Subsidiaries*

a. *Direct Controlling*

As of December 31. 2020 and 2019, the subsidiaries which were consolidated. including the respective percentages of ownership held by the Company. are as follows:

Entitas Anak/ ***Subsidiaries***	**Bidang Usaha/** ***Line of Business***	**Tahun Operasi Komersial/** ***Start of Commercial Operations***	**Persentase Kepemilikan /*Persentage of Ownership***	**Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/** ***Total Assets (Before Elimination)***	
				2020	2019
PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)	Angkutan transportasi. bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan. operator terminal laut, truk, custom clearance, pedalaman depo / Transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.	1987	99.47%	420.079.022.044	417.838.600.594
PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)	Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan. jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal/General trading services, port services, customs delivery companies, cleaning services, security services, mattress management services, bottled water supply services, hotel management services, entertainment services on board.	1970	99.50%	271.142.277.071	269.786.565.685
PT Rumah Sakit Pelni	Rumah Sakit/ *Hospital*	2007	99,98%	-	597.431.408.037

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.11 Entitas Anak (lanjutan)

Pada tanggal 4 Oktober 2019, Perseroan menandatangani perjanjian pengalihan hak atas saham sehubungan dengan pelepasan hak atas 51 % kepemilikan saham Perseroan di PT RS Pelayaran Nasional Indonesia. kepada PT RS Pertamedika dengan nilai akuisisi sebesar Rp503.800.000.000. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan PT Pertamedika merupakan entitas yang dimiliki dan dikuasai oleh Kementerian BUMN, dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian mengadopsi PSAK 38 tentang Bisnis Entitas Sepengendali, maka selisih nilai pelepasan PT RS Pelayaran Nasional Indonesia dicatat sebagai berikut :

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.11 *Subsidiaries* *(continued)*

On October 4, 2019. the Company entered into a share transfer agreement with respect to the transfer of rights to 51 % of the Company's share ownership in PT RS Pelayaran Nasional Indonesia to PT RS Pertamedika with an acquisition value of Rp503,800,000,000. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and PT RS Pertamedika are entities owned and controlled by the Ministry of BUMN in presenting the consolidated financial statements adopting PSAK 38 concerning Business Entities under Common Control the difference in value of the release of PT RS Pelayaran Nasional Indonesia is recorded as follows:

Imbalan yang diterima	503.800.000.000	*Benefit Received*
Pengaruh pelapasan investasi	(22.698.275.101)	*Effect Divestment*
Nilai Kepentingan Non-Pengendali	(55.281.944)	*Non-Controling Interest-Value*
Akumulasi nilai penghasilan komprehensif lainnya	(72.856.847.308)	*Accumulated value other comprehensive income*
Jumlah Sebelum Dilusi	**408.189.595.647**	***Total Before Dilution***
Dilusi	(10.310.687.935)	*Dilution*
Tambahan Modal Disetor	**397.878.907.712**	***Paid In Capital***

Sehubungan dengan divestasi tersebut, dikarenakan telah hilangnya pengendali Perseroan atau PT RS Pelayaran Nasional Indonesia, maka laporan keuangan PT RS Pelayaran Nasional Indonesia tidak lagi dikonsolidasikan.

Connecting with the disvestment, due to the loss of control over PT RS Pelayaran Nasional Indonesia,the financial statement are no longer consolidated.

b. Kepemilikan Tidak Langsung

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan sebagai berikut:

b. Indirect Controlling

As of December 31, 2020 and 2019, the subsidiaries which were consolidated. including the respective percentages of ownership held by the Company. are as follows:

Entitas Anak/ ***Subsidiaries***	**Bidang Usaha/** ***Line of Business***	**Tahun Operasi Komersial/** ***Start of Commercial Operations***	**Persentase Kepemilikan /*Persentage of Ownership***	**Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/** ***Total Assets (Before Elimination)***	
				2020	**2019**
PT Sarana Bandar Logistik	Bergerak dalam bidang, transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan dan bidang kepabeanan.	2015	99,96%	32.400.746.338	18.502.115.378
PT Pelita Bandar Nasional	Bongkar Muat	1989	98,00%	7.606.502.728	4.203.086.985
PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya	Asuransi	2019	95,00%	4.203.086.985	4.065.059.858

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.11 Entitas Anak (Lanjutan)

1.11.1 PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)

PT PBM Sarana Bandar Nasional didirikan berdasarkan Akte Notaris Soelaiman Arjasasmita di Jakarta No. 59 tanggal 31 Maret 1986 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundangundangan dengan Surat Keputusan Nomor 02- 1932 HT 01.01 tahun 1987 tanggal 5 Maret 1987. Anggaran Dasar Entitas diperbaharui dengan Akte Notaris Ny. Imah Fatimah. SH No. 17 tanggal 12 Agustus 1998. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp15.000.000.000.

Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Notaris Saifullah. SH No. 9 tahun 2008 pada tanggal 12 Agustus 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-5912.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 4 September 2008.

Perubahan terakhir tertuang dalam Akta Anggaran Dasar Nomor: 01 tanggal 02 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ida Adiningsih. SH.. Notaris di Jakarta. dan telah mendapatkan persetujuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor: AHU-0078035.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Sarana Bandar Nasional.

Modal Saham

Modal Dasar Perseroan ini sebagaimana tertuang pada pasal 4 Akta Anggaran Dasar Nomor: 11 tanggal 30 Nopember 2015 dibuat dihadapan Yulkhaizar Panuh. SH. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0947214.AH.01.02 tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PBM Sarana Bandar Nasional adalah sebesar Rp60.000.000.000 terbagi atas 60.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 15.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000.000.

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.11 *Subsidiaries* *(Continued)*

1.11.1 *PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)*

PT PBM Sarana Bandar Nasional was established based on the Notary Deed Soelaiman Arjasasmita in Jakarta No. 59 March 31, 1986 and has received approval by the Minister of Law and legislation with the Decree HT 01.01 02-1932 Number 1987 on March 5, 1987. The basic budget entity updated with the Notary Deed Mrs. Imah Fatimah. SH No. 17 on August 12, 1998. The capital placed and paid in full is Rp15,000,000,000.

The last basic budget changes based on the Deed Notary Saifullah. SH No. 9 Year 2008 on August 12, 2008 and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-5912.AH.01.02 dated September 4, 2008.

The latest amendment was stated in the Articles of Association Deed Number: 01 dated October 2, 2019. made before Ida Adiningsih. SH. Notary in Jakarta and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Number: AHU-0078035.AH.01.02 Year 2019 concerning Approval of Amendment to the Articles of Association of Limited Liability Companies of PT Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Sarana Bandar Nasional.

Capital Stock

The company's basic capital as stipulated in article 4 of the Constitution Act Number: 11 dated November 30, 2015. was made in front of Yulkhaizar Panuh. SH. notary in Jakarta and has obtained approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia. Number: AHU-0947214 AH. 01.02 year 2016 on approval of amendment of the company's limited liability of PT PBM Sarana Bandar Nasional. is Rp 60,000,000,000 divided into 60.000 shares. each shares with a nominal value of Rp 1.000.000. From The underlying capital has been placed and deposited 25% or a total of 15.000 shares with a total nominal niai of Rp 15,000,000,000.

Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Jumlah Saham /** ***Shares***	**Nilai Nominal/** ***Par Value*** **(Rp)**	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Issued and Fully Paid Shares Value* (Rp)**	**Persentase Kepemilikan/** ***Ownership Percentage***
PT Pelni (Persero)	14.920	1.000.000	14.920.000.000	99,47%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	80	1.000.000	80.000.000	0,53%
Jumlah / *Total*	**15.000**	1.000.000	**15.000.000.000**	**100,00%**

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) Nomor: 07.06/01/SK/HKO.01/2020 tanggal 06 Juli 2020 sebagai berikut:

Board of Commissioners and Directors

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) of PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) concerning the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT SBN) Number: 07.06/01/SK/HKO.01/2020 dated July 06, 2020 are as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.11 Entitas Anak (Lanjutan)

1.11.1 PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) (Lanjutan)

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.11 *Subsidiaries* *(Continued)*

1.11.1 *PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)* *(Continued)*

		31 Desember/ *December* 2020		
Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Masrul Khalimi	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Tri Andayani	:	*Commissioner*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PELNI (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT PBM Sarana Bandar Nasional Nomor: 09.29/01/SK/HKO.01/2020 tanggal 29 September 2020 tentang, Perpanjangan Masa Jabatan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional, maka susunan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional sebagai berikut:

Based on the decision letter of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) as the general meeting of shareholders of PT PBM Sarana Bandar Nasional Number: 09.29/01/SK/HKO.01/2020 dated Seftember 29, 2020 concerning. the extension of the tenure of directors of PT PBM Sarana Bandar Nasional. then the composition of board of directors of PT PBM Sarana Bandar Nasional as follows:

		31 Desember/ *December* 2020		
Direksi				***Director***
Direktur Utama	:	Suharyanto	:	*President Director*
Direktur Operasional	:	Murdiyoto	:	*Operation Director*
Direktur Keuangan	:	Edward Tobing	:	*Finance Director*

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) tanggal 12 Nopember 2013 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT PELNI (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor: 01/DIR/SBN/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Sarana Bandar Nasional. maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarana Bandar Nasional sebagai berikut:

Based on the Minutes of the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) of PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) on dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) dated November 12, 2013. and. the Decree of the President Director of PT Pelni (Persero) as the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) Number: 01 / DIR / SBN / X / 2014 dated October 16, 2014. on Termination and Appointment of Directors of PT Sarana Bandar Nasional. the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Sarana Bandar National as follows:

		31 Desember/ *December* 2019		
Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Harry Boediarto Soewarto	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Tri Andayani	:	*Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur Utama	:	Suharyanto	:	*President Director*
Direktur Operasional	:	Murdiyoto	:	*Operation Director*
Direktur Keuangan	:	Nofiyetti Edizar	:	*Finance Director*

Tempat dan Kedudukan

Dalam menjalankan usahanya PT Sarana Bandar Nasional berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Tengah II Blok B 13-14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510.

Place and Position

Currently, PT Sarana Bandar National is located in Jl. Cempaka Putih. Central II Block B 13-14 Cempaka Putih 10510.

Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 233 dan 255 karyawan.

Human Resources

The number of employees of the company on December 31, 2020 and 2019 are 233 and 255 employees.

1. U M U M (Lanjutan)

1.11 Entitas Anak (Lanjutan)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting

	31 Desember/ *December 2020*	31 Desember/ *December 2019*	
Aset	420.079.022.045	448.641.907.782	*Assets*
Liabilitas	63.964.606.330	97.310.188.332	*Liabilities*
Ekuitas	356.114.415.714	351.331.719.450	*Equity*
Pendapatan	417.287.866.312	537.561.787.988	*Revenues*
Beban	(294.216.746.186)	(380.111.472.547)	*Expenses*
Laba Tahun Berjalan	30.124.081.062	60.516.130.916	*Profit for The Year*

1.11.2 PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

PT Pelita Indonesia Djaya. Jakarta didirikan berdasarkan Akte Notaris Djojo Mulyadi. SH di Jakarta No. 3 tanggal 29 September 1969 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 1969.

Anggaran Dasar Perseroan diperbaharui dengan Akte Notaris SP. Henny Singgih. SH No. 21 tanggal 10 April 2001. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp2.010.000.000.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT PID merubah Anggaran Dasar Perusahaan sesuai Akta Notaris No. 7 tanggal 10 Juni 2009 oleh Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto. SH. SpN. Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU-4380.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 04 September 2009, perubahan terakhir Akta Notaris No 6 tanggal 15 Maret 2016 oleh Notaris Dewi Sugina Mulyani. S.H Persetujuan Menhumkam Nomor :AHU-AH.01.03.0031933 tanggal 16 Maret 2016.

Modal Saham

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 99.5% penyertaan PT Pelayaran Nasional Indonesia dan 0.5% penyertaan Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni sesuai dengan Akta Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto. SH No. 7 tanggal 10 Juni 2009 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.AHU- 43800.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 4 September 2009.

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.11 *Subsidiaries* *(Continued)*

Summary of Key Financial Information

1.11.2 *PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)*

PT Pelita Indonesia Djaya. Jakarta was established based on the Notary Act Djojo Mulyadi. SH in Jakarta No. 3 dated September 29, 1969 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on December 9, 1969.

The Articles of Association of the Company are updated by Notarial Deed SP. Henny Singgih. SH. No. 21 dated April 10. 2001. The issued and fully paid capital amounted to Rp2,010,000,000.

Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. PT PID amended the Articles of Association of the Company. in accordance with Notarial Deed No. 7 dated June 10, 2009 by Notary Raden Mas Soediarto Soenarto. SH. SpN. Approval from the Ministry of Law and Human Rights No: AHU- 4380.AH.01.02.Tahun 2009 On September 4, 2009. the latest amendment to Notarial Deed No. 6 dated March 15, 2016 by Notary Dewi Sugina Mulyani. SH Menhumkam Approval Number: AHU-AH.01.03.0031933 dated March 16, 2016

Shares Capital

Shares Capital paid to the entity is 99.5% ownership of PT Pelayaran Nasional Indonesia and 0.5% ownership in accordance Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni Deed Raden Mas Soediarto Soenarto. SH No. 7 dated June 10, 2009 were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU- 43800.AH.01.02 in 2009 on September 4, 2009.

Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Jumlah Saham /** ***Shares***	**Nilai Nominal/** ***Par Value*** **(Rp)**	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Issued and Fully Paid Shares Value* (Rp)**	**Persentase Kepemilikan/** ***Ownership Percentage***
PT Pelni (Persero)	2.000	1.000.000	2.000.000.000	99.50%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	10	1.000.000	10.000.000	0.50%
Jumlah / *Total*	**2.010**	1.000.000	**2.010.000.000**	**100.00%**

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (Lanjutan)

1.11 Entitas Anak (Lanjutan)

1.11.2 PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) (Lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 5 tanggal 12 Februari 2020 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih. SH mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0116585 tanggal 12 Februari 2020, maka susunan Direksi dan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) adalah sebagai berikut :

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.11 *Subsidiaries* *(Continued)*

1.11.2 *PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)* *(Continued)*

Board of Commissioners and Directors

Based on the statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Number: 5 dated February 12. 2020 which was notarized before Ida Adiningsih. SH regarding changes in the composition of the Directors and Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights Number: AHU-AH.01.03-0116585 dated February 12, 2020, the composition of the Directors and Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) is as follows:

		31 Desember/ *December* 2020		
Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Plt. Muhammad Tukul Harsono	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Muhammad Tukul Harsono	:	*Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur Utama	:	Effendi	:	*President Director*
Direktur Operasi	:	Plt. Effendi	:	*Operation Director*

Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 5 tanggal 13 Desember 2019 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih. SH mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0373318 tanggal 16 Desember 2019. maka susunan Direksi dan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) adalah sebagai berikut :

Based on the statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Number: 5 dated December 13, 2019 which was notarized before Ida Adiningsih. SH regarding changes in the composition of the Directors and Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights Number: AHU- AH.01.03-0373318 dated December 2019. the composition of the Directors and Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) is as follows:

		31 Desember/ *December* 2019		
Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Olih Masolich Sodikin	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Muhammad Tukul Harsono	:	*Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur Utama	:	Effendi	:	*President Director*
Direktur Operasi	:	Plt. Effendi	:	*Operation Director*

1. U M U M (Lanjutan)

1.11 Entitas Anak (Lanjutan)

1.11.2 PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) (Lanjutan)

Tempat dan Kedudukan

Entitas berkedudukan di Jalan Palmas No 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 1.433 dan 1.098.

Ringkasan Informasi Keuangan Penting

	31 Desember/ *December 2020*	31 Desember/ *December 2019*	
Aset	271.142.277.070	270.581.345.880	*Assets*
Liabilitas	117.816.550.978	130.726.319.653	*Liabilities*
Ekuitas	153.556.881.980	139.855.026.227	*Equity*
Pendapatan	368.210.585.149	485.847.640.062	*Revenues*
Beban	(295.856.738.925)	(368.406.382.425)	*Expenses*
Laba Tahun Berjalan	22.424.056.760	51.555.914.743	*Profit for The Year*

2. KETENTUAN JASA PERKAPALAN

PT PELNI (Persero) dalam menjalankan kegiatan jasa perkapalan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan, serta ketentuan - ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan jasa perkapalan:

a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.

b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

c. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik untuk Angkutan Barang di Laut.

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.

e. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis.

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 tahun 2019 diubah tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*).

1. *G E N E R A L* *(Continued)*

1.11 *Subsidiaries* *(Continued)*

1.11.2 *PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)* *(Continued)*

Place and Position

Entities domiciled in Palmas No 2. Tanjung Priok Port in North Jakarta.

Human Resources

The number of employees of the company on December 31, 2020 and 2019 are 1.433 and 1.098 employees.

Summary of Key Financial Information

2. SHIPPING SERVICES REGULATION

PT PELNI (Persero) in carrying out of shipping services activities is subject to the Law of the Republic of Indonesia for number 17 of 2008, concerning of Shipping and Regulation of the Government of the Republic of Indonesia number 64 of 2015, on Ports. as well as the provisions stipulated by the Minister of Transportation. Some important provisions that are related to shipping services such as follows :

a. Presidential Regulation Number 2 on the year of 2016 concerning of State Owned Pioneer Ship Public Service Obligation Implementation.

b. Presidential Regulation Number 71 on the year of 2015 concerning of Stipulation and Storing of Groceries and Valuable Goods.

c. Presidential Regulation Number 106 on the year of 2015 concerning of Public Service Obligation Implementation for Marine Cargo.

d. Minister of Transportation Regulation Number PM. 4 on the year of 2018 concerning of Public Service Obligation for Marine Cargo.

e. Minister of Transportation RI Regulation Number PM. 48 in the year of 2018 concerning the Implementation of Pioneering Public Service Obligations.

f. Minister of Transportation Regulation Number 23 on year of 2019 is amended on the second amendment to Regulation of Minister of Transportation Number PM 29 on the year of 2018 concerning Tariffs for freight Goods at Sea in Context of Implementing Public Service Obligations.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. KETENTUAN JASA PERKAPALAN (Lanjutan)

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2019. Pemeriksaan kesehatan pelaut. tenaga penunjang keselamatan pelayaran. dan lingkungan kerja pelayaran.

h. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 119 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 37 tahun 2015 tentang Standar pelayanan penumpang angkutan laut.

i. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 2 tahun 2019 tentang Komponen biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi.

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi.

k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 tahun 2017 tentang tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi.

l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 182 tahun 2015, tentang Tarif muatan untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN(PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Dalam tahun 2020 ini, Grup telah menerapkan semua Standar Akuntansi revisi serta Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan ini, termasuk bilamana terdapat standar baru dan revisi, serta interpretasinya yang berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi Grup yang mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan komparasi untuk periode berjalan dan periode komparasi sebelumnya.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Grup telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing- masing standar dan interpretasi.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan beberapa pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) baru.

Penerapan dari standar-standar dan amandemen yang relevan terhadap kegiatan operasional sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- PSAK 71 “Instrumen keuangan”
- PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”
- PSAK 73 “Sewa”

***2. SHIPPING SERVICES REGULATION** (Continued)*

g. Minister of Transportation Regulation Number PM 40 on the year of 2019. Sailors' health checks. shipping safety support personnel. and shipping work environment.

h. Minister of Transportation Regulation number PM 119 on the year of 2015 concerning of changes to the Minister of Transportation Regulation number PM 37 on the year of 2015 concerning Sea transport passengers service standards.

i. Minister of Transportation Regulation number PM 2 on the year of 2019 concerning of components of costs and revenues that are calculated in the implementation of public service obligation transportation in the field of sea transportation for economy class passengers.

j. Minister of Transportation Regulation Number PM 49 on the year of 2017 concerning of administration and operation of transportation management services.

k. Minister of Transportation Regulation Number PM 109 on the year of 2017 concerning of rate limits on domestic economy class sea passengers transportation.

l. Minister of Transportation Regulation Number PM 109 on the year of 2018 concerning of fourth amendment to Regulation of Minister of Transportation number PM 182 on the year of 2015, concerning of cargo rate for subsidy cattle ship operations.

3. APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SFAS) AND INTERPRETATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (ISAK)

In 2020, the Group has implemented all revised Accounting Standards and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants Association that are relevant to their operations and effective for the accounting period presented in these financial statements. including when there are new and revised standards. and its interpretation has an impact on changes in the Group's accounting policies that affect the presentation and disclosure of comparative financial statements for the current period and the previous comparative period.

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards

Effective January 1, 2020, the Group adopted new SFAS and IFAS that are effective for application from that date. Changes to the Groups accounting policies have been made as required. in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

On January 1, 2020, the Group adopted certain new statements of financial accounting standards (“SFAS”).

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Group’s operations are as follows:

- *SFAS 71 “Financial instruments”*
- *SFAS 72 “Revenue from contract with customers”*
- *SFAS 73 “Leases”*

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (Lanjutan)

Dampak terhadap laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

- PSAK 71 "Instrumen keuangan"

  PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan. klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. penghentian pengakuan keuangan. penurunan nilai aset keuangan dan instrumen akuntansi lindung nilai.

  Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" sejak 1 Januari 2020 mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (Lanjutan)

Dampak terhadap laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- PSAK 71 "Instrumen keuangan" (Lanjutan)

  Total dampak pada laba ditahan grup pada 1 Januari 2020 adalah Rp15.257.250.837. (Catatan 48)

  Pada tanggal 1 Januari 2020, manajemen grup telah menilai model bisnis mana yang berlaku untuk aset keuangan yang dimiliki grup dan telah mengklasifikasikan instrumen keuangannya ke dalam kategori PSAK 71 yang sesuai.

  Tabel berikut menjelaskan kategori pengukuran asli berdasarkan PSAK 55 dan kategori pengukuran baru berdasarkan PSAK 71 untuk masing masing aset grup pada tanggal 1 Januari 2020:

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (ISAK) *(Continued)*

Impact of adoption these new accounting standards is as follows:

- *SFAS 71 "Financial Instruments"*

  SFAS 71 replaces the provisions of SFAS 55 that relate to the recognition. classification and measurement of financial assets and financial liabilities. derecognition of financial instruments. impairment of financial assets and hedge accounting.

  The adoption of SFAS 71 "Financial instruments" from January 1, 2020 resulted in changes in accounting policies and adjustments to the amounts recognised in the consolidated financial statements.

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards (*Continued)*

Impact of adoption these new accounting standards is as follows: (Continued)

- *SFAS 71 "Financial Instruments" (Continued)*

  The total impact on the group's retained earnings as at January 1, 2020 is amounting to Rp15,257,250,837. (Notes 48)

  On January 1, 2020, the group's management has assessed which business models apply to the financial assets held by the group and has classified its financial instruments into the appropriate SFAS 71 categories.

  The following table sets out the original measurement categories under PSAK 55 and the new measurement categories under PSAK 71 for each of the group's financial assets as at January 1, 2020:

	Klasifikasi awal berdasarkan PSAK 55/ *Original classification under SFAS 55*	Klasifikasi baru berdasarkan PSAK 71/ *Original classification under SFAS 71*	Nilai tercatat awal berdasarkan PSAK 55/ *Original carrying amount under SFAS 55*	Nilai tercatat baru berdasarkan PSAK 71/ *New carrying amount under SFAS 71*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas dan setara kas	Pinjaman dan piutang/ *Loans and receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost*	1.666.914.538.163	1.666.914.538.163	*Cash and cash equivalent*
Piutang usaha	Pinjaman dan piutang/ *Loans and receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost*	232.488.270.948	217.806.103.208	*Trade receivables*
Aset keuangan lancar lainnya	Pinjaman dan piutang/ *Loans and receivables*	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost*	761.807.625.933	756.997.856.102	*Other Current Financial Assets*
Total aset keuangan			**2.661.210.435.044**	**2.641.718.497.473**	***Total financial assets***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (Lanjutan)

Dampak terhadap laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- PSAK 71 "Instrumen keuangan" (Lanjutan)

  Penurunan nilai aset keuangan

  Grup memiliki dua jenis aset keuangan yang merujuk pada model kerugian kredit diharapkan yang baru dari PSAK 71:
  - Piutang Usaha
  - Aset Keuangan Lancar Lainnya

  Grup diwajibkan untuk merevisi metodologi penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 untuk masing-masing kelompok aset tersebut. Dampak dari perubahan metodologi penurunan nilai pada laba ditahan dan ekuitas grup diungkapkan Rp15.257.250.837. (Catatan 48).

  Sementara kas dan setara kas dan deposito dijaminkan juga merujuk pada persyaratan penurunan nilai PSAK 71, kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi tidak material.

  Piutang Usaha

  Grup menerapkan pendekatan sederhana PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang dagang dan aset kontrak. Hal ini mengakibatkan peningkatan penyisihan kerugian pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp.14.682.167.739 untuk piutang usaha (Catatan 8) dan Rp.4.809.769.831 pada aset keuangan lancar lainnya. (Catatan 9).

- PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

  Perusahaan telah mengadopsi PSAK 72 Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sejak 1 Januari 2020 yang mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK 72. Perusahaan telah mengadopsi aturan baru secara retrospektif dan telah mencatat dampaknya pada saldo awal laba ditahan. Singkatnya, penyesuaian berikut telah dilakukan terhadap jumlah yang diakui di neraca pada tanggal penerapan awal (1 Januari 2020) sebesar nihil.

- PSAK 73 "Sewa"

  Grup telah menerapkan PSAK 73 Sewa secara retrospektif sejak 1 Januari 2020, tetapi belum menyajikan kembali komparatif untuk periode pelaporan 2020, seperti yang diizinkan berdasarkan ketentuan transisi spesifik dalam standar. Oleh karena itu, reklasifikasi dan penyesuaian yang timbul dari aturan sewa guna usaha yang baru diakui dalam saldo awal neraca pada tanggal 1 Januari 2020.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (ISAK) *(Continued)*

Impact of adoption these new accounting standards is as follows: (Continued)

- *PSAK 71 "Financial Instruments" (Continued)*

  Impairment of financial assets

  The Group's has two types of financial assets that are subject to PSAK 71's new expected credit loss model:
  - *Trade Receivables*
  - *Other Current Financial Assets*

  The Group was required to revise its impairment methodology under PSAK 71 for each of these classes of assets. The impact of the change in impairment methodology on the group's retained earnings and equity is amounting to Rp15,257,250,837. (Note 48).

  While cash and cash equivalents. and guarantee deposit are also subject to the impairment requirements of PSAK 71, the identified impairment loss was immaterial.

  Trade Receivables

  The group applies the SFAS 71 simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables and contracts assets. This resulted in an increase of the loss allowance on January 1, 2020 by Rp14,682,167,739 for trade receivables (Note 8) and Rp4,809,769,831 for other current financial asset (Note 9).

- *SFAS 72. "Revenue from contract with customers"*

  The Company has adopted SFAS 72 Revenue from contracts with customers from January 1, 2020 which resulted in changes in accounting policies and adjustments to the amounts recognised in the financial statemetns. In accordance with the transition provisions in SFAS 72. The Company has adopted the modified retrospectively and has recorded the impact in the beginning retained earnings. The impact on the Company's retained earnings as at January 1, 2020 is amounting to Nil.

- *SFAS 73. "Leases"*

  The group has adopted SFAS 73 Leases modified retrospectively from January 1, 2020, but has not restated comparatives for the 2020 reporting period, as permitted under the specific transition provisions in the standard. The reclassifications and the adjustments arising from the new leasing rules are therefore recognised in the opening balance sheet on January 1, 2020.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (Lanjutan)

Dampak terhadap laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- PSAK 73 "Sewa" (Lanjutan)

  Berdasarkan penerapan PSAK 73. grup mengakui liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya telah diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip sewa PSAK 30. Liabilitas ini diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan lessee per 1 Januari 2020. Tingkat pinjaman inkremental rata-rata tertimbang penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah Rp 454.141.786

  Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya. Grup telah menggunakan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

  - Menerapkan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang mirip secara wajar
  - Akuntansi sewa operasi dengan sisa jangka waktu sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek
  - Menggunakan peninjauan kembali dalam menentukan jangka waktu sewa di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa.

  Aset hak pakai diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa yang dibayar di muka atau yang masih harus dibayar terkait sewa tersebut yang diakui di neraca pada tanggal 31 Desember 2020.

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan. Perusahaan telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan" dan PSAK 25 "Kebijakan akuntansi. perubahan estimasi akuntansi. dan kesalahan"

  Kebijakan tersebut mengklarifikasi beberapa susunan kata dan definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan.

- Konsesi sewa terkait Covid 19 – Amandemen PSAK 73

  Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amandemen terhadap PSAK 73 Sewa yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (ISAK) *(Continued)*

Impact of adoption these new accounting standards is as follows: (Continued)

- *PSAK 73. "Leases" (Continued)*

  On adoption of SFAS 73. the group recognised lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as 'operating leases' under the principles of SFAS 30 leases. These liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the lessee's incremental borrowing rate as of January 1, 2020. The weighted average lessee's incremental borrowing rate applied to the lease liabilities on January 1, 2020 was Rp 454,141,786.

  In applying SFAS 73 for the first time. the Group has used the following practical expedients permitted by the standard:

  - *Applying a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics*
  - *Accounting for operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at January 1, 2020 as short term leases; and*
  - *Using hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease.*

  Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognised in the balance sheet as at December 31, 2020.

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2020 and have not been early adopted by the Company. The Company has assessed the impact of these new standards and interpretations as set out below:

- *SFAS 1 "Presentation of financial statement" and SFAS 25 "Accounting policies. changes in accounting estimates and errors"*
  The Policiy clarifies several wording and material definitions in order to align with the definitions used in the conceptual framework and some relevant SFAS. Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements".

- *Covid-19-related Rent Concessions – Amendments to SFAS 73*

  As a result of the COVID-19 pandemic rental concessions have been awarded to tenants. Such concessions can take a variety of forms. including forgiveness of payments and suspension of lease payments. The standard board made amendments to SFAS 73 Leases that give tenants the option to treat eligible lease concessions in the same way as if they were not lease modifications. In many cases this will result in the accounting treatment of the concession as a variable lease payment over the period it is awarded.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (Lanjutan)

Dampak terhadap laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- Konsesi sewa terkait Covid 19 – Amandemen PSAK 73 (Lanjutan)

  Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

  Implementasi dari standar-standar. amandemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 dari standar di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya:

  - ISFAS 35 "Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba"
  - Amendemen to SFAS 62 "Kontrak Asuransi"
  - SFAS 102 "Akuntansi Murabahah"
  - IFAS 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan"
  - IFAS 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah" dan
  - Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, dan Amendemen PSAK 60 tentang "Reformasi Acuan Suku Bunga"

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (ISAK) *(Continued)*

Impact of adoption these new accounting standards is as follows: (Continued)

- *Covid-19-related Rent Concessions – Amendments to SFAS 73 (Continued)*

  An entity applying a practical policy must disclose this fact. whether the policy has been applied to all eligible lease concessions or, if not, information about the nature of the contracts that have been applied. as well as the amounts recognized in profit or loss, arising from lease concessions.

  The implementation of the following new standards. amendments and annual improvements which are effective from January 1, 2020 did not result in changes to the group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for current or prior financial periods:

  - *ISFAS 35 "Presentation of non-profit oriented entities financial statements"*
  - *Amendment to SFAS 62 "Insurance Contracts"*
  - *SFAS 102 "Murabahah Accounting"*
  - *ISAK101 "Recognition of Murabahah Unearned Revenue without Significant Risk Related to Inventory Ownership"*
  - *ISAK 102 "Impairment of Murabahah Receivables" and*
  - *Amendement to SFAS 71. Amendment to SFAS 55. and Amendement to SFAS 60 "Interest Rate Benchmark Reform"*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyajian laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Amandemen 2017). "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Penyusunan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi tertentu dan asumsi-asumsi.

Hal ini juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi di dalam Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 5.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. The Statement of Compliance

These consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) in Indonesia and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants. The Company's consolidated financial statements have been prepared by the Board of Directors and authorized

b. Basic of Presentation and Preparation of the Consolidated Financial Statement

Presentation of financial statements has been prepared in accordance to Statements of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 1 (Amendment 2017). "Presentation of Financial Statements".

Accounting policies that has been implemented in preparation of financial statements for the year ended December 31, 2019 are consistent with those implemented in preparation of financial statements on the year ended December 31, 2020.

Financial statements except for statements of cash flows it's been prepared by an accrual basis that using of historical cost concept except for certain accounts which it's measured based on described in the related accounting policies of each account.

The statements of cash flows prepared using the direct method the cash flows into operating investing and financing activities. For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents comprise of cash on hand, cash in bank and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

Preparation of financial statements has been prepared based on Indonesian Financial Accounting Standards that it's required to using of certain critical accounting estimates and assumptions.

It's been also required by management to consider in process of implementing the accounting policies within Company. Complex areas or require higher levels of consideration or areas where assumptions and estimates may have significant impact on the financial statements are disclosed in Note 5.

Although these estimates are based on management's best knowledge of the event and the current action, it's results may differ with originally estimated amount in the beginning.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

Seluruh angka keuangan dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh kecuali apabila dinyatakan lain.

Transaksi dan Saldo

Sesuai PSAK No.10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (Penyesuaian 2014). Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional (yaitu: Rupiah). Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungional dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir setiap periode pelaporan:

Pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;

- Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
- Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Mata Uang Penyajian Berbeda dengan Mata Uang Fungsionalnya

Ketika penggunaan mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsionalnya. maka:

- Aset dan liabilitas disajikan/dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
- Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Foreign Currency Translation

Functional Currencies and Reporting

Transaction those included in financial statements has been measured by using of primary economic environmental currency which entity to operate (the functional currency). Financial statements are presented in Rupiah which is Company's currency functional and presentation .

All financial figures in financial statements is presented in Indonesian Rupiah unless otherwise stated.

Transactions and Balances

In accordance with SFAS No.10 The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates (Adjustment 2014). On initial recognition, foreign exchange transactions are recorded in the functional currency (ie: Rupiah). The amount of foreign currency is calculated into the functional currency at the spot rate between the fungional and foreign currencies on the date of the transaction.

At the end of each reporting period:

Foreign exchange monetary items are translated using the closing exchange rate;

- *Items nonmonetary measured in historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date of the transaction; and*
- *Items nonmonetary measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date when fair value is measured.*

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency by using of exchange rate on the date of the transaction. Exchange arising as result of gains or losses from transaction settlement and from translation at the end of the year exchange rates on monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognized in profit or loss.

Presentation Currency Differs from its Functional Currency

When the use of a presenting currency differs from its functional currency then:

- *Assets and liabilities are presented/ translated at the closing rate at the statement of financial position date;*
- *Income and expenses for each income statement and other comprehensive income are translated at the transaction exchange rate; and*
- *Resulting of foreign exchange difference is recognized in other comprehensive income.*

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Penjabaran Mata Uang Asing (Lanjutan)

Kurs penutup yang digunakan pada akhir periode pelaporan adalah kurs tengah Bank Indonesia sebagai berikut:

	2020	2019	
1 EURO	Rp 17.330	Rp 15.589	*1 EURO*
1 USD	Rp 14.105	Rp 13.901	*1 USD*
1 SGD	Rp 10.644	Rp 10.321	*1 SGD*
1 AUD	Rp 10.771	Rp 9.739	*1 AUD*
1 JPY	Rp 136	Rp 128	*1 JPY*

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah dan dicatat sesuai dengan 'kurs pajak mingguan' yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

d. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Grup dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahaan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan diatas.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas *investee*. ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak.

Grup mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara atas *investee* tersebut mencukupi untuk memberinya kekuasaan termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan. pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa investor memiliki atau tidak memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan pada saat keputusan perlu dibuat. termasuk pola pemilihan suara dalam RUPS sebelumnya.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***c. Foreign Currency Translation** (Continued)*

Closing exchange rate that used at the end of reporting is the middle exchange rate of Bank Indonesia as follows:

For the next, the collection and remittance of taxes (VAT and income tax) in relationship to claims and liabilities in foreign currency would be pay in dollars and it's recorded in accordance by 'weekly tax rate" that applicable at the date of issuance of tax invoice.

d. Basic of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Group and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed. or has rights. to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Group reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Group has less than a majority of the voting rights of an investee. it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally.

The Gruop considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power. including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company. other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicates that the Company has. or does not have. the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made. including voting patterns at previous shareholders' meetings.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Dasar Konsolidasian (Lanjutan)

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak tersebut dan tidak mengkonsolidasikan entitas anak ketika kehilangan pengendaliannya. Secara khusus pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisi atau dilepas selama tahun berjalan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada Grup dan kepentingan non pengendali.

Grup juga mengatribusikan jumlah laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan. penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha. ekuitas. pendapatan. biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Selisih antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non pengendali.

Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 71 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" atau ketika berlaku biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Basic of Consolidation *(Continued)*

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company losses control of the subsidiary. Specifically income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non controlling interest.

Total comprehensive income are attributed to owners of the Group and the non controlling interest even if this results in the non controlling interest having a deficit balance.

When necessary. adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities. equity. income. expenses and cash flows relating to transaction between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group losses control of a subsidiary a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill). and liabilities of the subsidiary and any non controlling interest.

All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under SFAS 71. Financial Instruments: Recognition and Measurement or when applicable. the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Dasar Konsolidasian (Lanjutan)

Kepentingan non pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan non pengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi.

Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi. nilai tercatat kepentingan non pengendali adalah jumlah kepentingan non pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan non pengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah penghasilan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non pengendali. bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit.

Bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset neto entitas anak disajikan sebagai ”kepentingan non pengendali” pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

Hak non pengendali atas laba (rugi) neto entitas anak pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian disajikan sebagai ”Laba/Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non pengendali”.

e. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup. Liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Basic of Consolidation *(Continued)*

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented in equity. The interests of a non controlling shareholders may initially be measured at fair value or on the proportion of non controlling interest in the identifiable net assets of the acquired party.

Measurement options are made at the time of acquisition on an acquisition basis. After the acquisition. the carrying amount of non controlling interest is the amount of non controlling interest in initial recognition plus the proportion of non controlling interest in subsequent changes in equity. The amount of comprehensive income is attributable to non controlling interests. even if this results in a non controlling interest having a deficit balance.

The portion of minority shareholders 'ownership of the subsidiaries' net assets is presented as "non controlling interests" in the Consolidated Statements of Financial Position.

The non controlling interest in net income (loss) of the subsidiaries in the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income is presented as "Income or Loss for the Period Attributable to Non Controlling Interests".

e. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value which is calculated as the sum of the acquisition date fair values of the assets transferred by the Group. Liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree. and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisitionrelated costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred the amount of any non controlling interests in the acquiree. and the fair value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Jika, setelah penilaian kembali jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada). Selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi pada saat kehilangan pengendali.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Grup menerapkan PSAK 7 (Revisi 2014), "Pengungkapan Pihak- pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (Entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor. jika orang tersebut:
   1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
   2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor. atau
   3) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***e. Business Combinations** (Continued)*

If after the reassessment the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred the amount of any non controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any). the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

f. Business Combinations of Entities Under Common Control

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as Additional Paid in Capital and is not recycled to profit and loss when control is lost.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period in which the merging entities were placed under common control.

g. Transactions with Related Parties

The Group adopted SFAS 7 (Revised 2014) "Related Party Disclosure". The revised SFAS requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the consolidated financial statements. There is no significant impact of the adoption of the revised SFAS on the consolidated financial statements.

Related party is a person or Entity that it's related to Entity that prepared of financial statements (Entity complainant):

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   1) Has control or joint control over the reporting entity.
   2) Has significant influence over the reporting entity; or
   3) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   1) The entity. and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).

7) Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) angka (1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

8) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak diungkapkan pada laporan keuangan Konsolidasian.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas. bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain:

1) deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk *deposit on call*); dan

2) instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

i. Kas dan Setaran Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai bank garansi. jaminan pelaksanaan dan lainnya untuk tujuan tertentu disajikan sebagai ”kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya" dan dikelompokkan pada aset keuangan lancar lainnya.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***g. Transactions with Related Parties** (Continued)*

3) Both of entities are joint ventures of the same third parties.

4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

5) The entity is a post-employment benefit plan for employees benefit from one of the reporting entities. or entity that are related to reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program. the sponsoring entity is also related to the reporting entity.

6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

7) A person who is identified in (a) (1) has significant influence over the entity or key of management entity personnel (or parent of the entity).

8) The entity. or members of a group of which it's a part of the group it's provides key management personnel services to reporting entity or to parent of entity reporter.

Significant transactions into related parties whether conducted with conditions or conditions with third parties or not. are disclosed in the Consolidated financial statements.

h. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents consist of cash on hand. bank and instruments that can be classified as cash equivalents include:

1) time deposits with original maturities of three months or less from the date of placement and is unrestricted and not warranted (including deposits on call); and

2) market instruments and can be liquid within a period of not more than three (3) months.

i. Restricted cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents which are placed as bank guarantees. performance bond and others for a particular purpose are classified as “restricted cash and cash equivalents” and are classified into other current financial assets.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Penghasilan operasi aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. sesuai dengan PSAK 58. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu.

Bagian Perseroan atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang secara substansi merupakan bagian dari Perseroan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perseroan telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi atau ventura bersama.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat investee menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama.

Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Perseroan atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Perseroan dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode di mana investasinya diperoleh.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

j. Investments in Associates and Joint Ventures

Associate entity is an entity which Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of investee but it is not control or joint control over those policies. A joint venture is arrangement whereby the parties that have joint control of arrangement that it has rights to net assets of joint arrangement. Joint control is contractually agreed to sharing of arrangement control which it's exists only when decisions about relevant activities requires unanimous approval of all parties control sharing.

Result of operations assets and liabilities of associates entities that joint into consolidated financial statements those it's using the equity method. except when investment would be classified as held for sale. it's in accordance to PSAK 58 Non current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. An investment in an associate entities is recorded in statement of financial position at acquisition cost and then it will be adjusted for changes of part Company ownership to net associates entities assets that it happened after acquisition. then it lessed by value impairment which is determined to every individually investment.

Company's share of an associate's entities loss that exceeds of investment carrying amount (which includes all long term interests. substantially is part of the Company and the net investment value of a subsidiary in an associate entities) is recognized only to extent that Company has legal law obligations or constructive obligations or make payments for obligations of associates or joint ventures.

An investment in an associate entities or joint venture is recorded by using equity method from the date on which the investee becomes associate entities or a joint venture.

Any excess of the cost of the acquisition part of Company over net fair value of identified assets, liabilities and contingent liabilities of the associates entities or joint venture that is recognized on the date of aqcuisition as goodwill. Goodwill is included within the carrying amount of the investment. Any excess of Company ownership of net fair value of the identified assets. liabilities and contingent liabilities over the investment cost acquisition. after reassessment. it will be recognized immediately in profit or loss statements in the period in which the investment is acquired.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (Lanjutan)

Persyaratan dalam PSAK 71 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama Perseroan. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48. Penurunan Nilai Aset sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perseroan menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perseroan mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan. Perseroan mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 71.

Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi atau ventura bersama pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya. dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi atau ventura bersama.

Selanjutnya, Perseroan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi atau ventura bersama akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan dari aset atau liabilitas terkait. Perseroan mereklasifikasi laba rugi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas dihentikan penggunaannya.

Perseroan melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

j. Investments in Associates and Joint Ventures *(Continued)*

Requirements of SFAS 71, Financial Instruments: Recognition and Measurement are applied to determine whether it's necessary to recognize any impairment value in connection with investment of associate entities or Company joint venture. When it's necessary, amount received by the investment (including goodwill) is tested for impairment value in accordance with SFAS 48. Impairment value of Assets. as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with it's carrying amount. Impairment loss that recognized in the situation it's not allocated to any asset those forms of investment recorded value parts. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 as long as it's recoverable amount of investment subsequently increases.

Company has been discontinued of equity method using from date when investment stopped to be associate entities investment or joint venture. or when investment is classified as held for sale. When Company maintain of interest in associate entities or joint venture previously and remaining interest is financial asset. Company measured of interest remaining at fair value in the date and it's considered as it's fair value upon initial recognition in accordance with SFAS 71.

Difference between of carrying amount of associate entities or joint venture on the date of equity method was discontinued. and fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in associate entities or joint venture is included in the determination of gain or loss or loss of associate entities or joint venture release.

Continue, the Company recorded all amounts previously that recognized in other comprehensive income related to associate entities or joint venture on same basis as required if associate entities or joint venture had directly released of related assets and liabilities. Therefore, if gain or loss previously that recognized in other comprehensive income by an associate entities or joint venture it's will be reclassified to profit or loss upon disposal of it's related to asset or liability. Company had reclassified of profit or loss from equity to profit or loss (as an adjustment to reclassification) of association entity or joint ventures when the equity method is terminated.

Company has been continue to apply of equity method if investment in associate entities become investment in joint ventures or investment in joint ventures become investments in associate entities. There is no remeasurement back to fair value when it's interest changes.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (Lanjutan)

Ketika Perseroan mengurangi kepemilikannya di entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Perseroan terus menggunakan metode ekuitas. Perseroan mereklasifikasi ke dalam laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang berkaitan dengan penurunan kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas terkait).

Ketika Perseroan melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Perseroan hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Perseroan.

k. Aset Keuangan

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan diakui ketika Perseroan merupakan bagian dari salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut.

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang regular mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu tertentu yang umumnya ditetapkan dalam peraturan atau kebiasaan yang berlaku dipasar dimana pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya. Pada pengakuan awal biaya transaksi diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan atau penerbitan aset keuangan (selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) yang ditambahkan atau dikurang secara tepat ke nilai wajar aset keuangan. Biaya transaksi yang diatribusikan langsung pada perolehan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung ke laba rugi.

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah (dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

j. Investments in Associates and Joint Ventures *(Continued)*

When Company was reduced it's ownership in associate entities or joint venture but Company keep continue to use of equity method. Company reclassified to profit or loss of proportion of profits or losses that previously recognized in other comprehensive income it's related to decrease in ownership (if gain or loss will be reclassified to profit loss on disposal of related assets or liabilities).

When Company engaged in transactions with associated entities or joint ventures. gain and losse arising from it's transactions with associated entities are recognized in Company's financial statements it's only to extent of ownership in associates entities or joint ventures is not related to Company.

k. Financial Assets

Accounting Policy before January 1, 2020

Financial assets are recognized when Company is part of one of parties in provisions to instruments of contract.

All financial assets are recognized and derecognized based on trade date. Purchase or sale of financial assets it's required of assets delivery within certain period of time which it's generally specified in regulations or customs that apply in market where at initial recognition measured at fair value. At beginning recognition, transaction costs are directly attributable to the acquisition or issuance costs of financial assets (other financial assets measured at fair value through profit or loss) which it's appropriately added or reduced to fair value of financial assets. Transaction costs that directly attributable to acquisition of financial assets that measured at fair value through profit or loss are recognized directly to profit or loss.

Initial recognition

Financial assets within scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified into 4 categories, namely (i) financial assets are measured at fair value through profit and loss, (ii) loans and receivables, (iii) held to maturity investments, and (iv) available for sale financial assets. This classification depends on company's purpose of financial asset's acquisition.

Management determined of financial assets classification at beginning acquisition, if it's allowed and necessary, it's re evaluate of classification of these assets at every end of each financial period.

Financial assets at the beginning had recognized at fair value plus (in case of investments which it's not measured at fair value through profit and loss statement) of transaction costs are directly attributable.

Purchase or sales of financial assets that required delivery of assets within a period which has been specified by regulation or custom prevailing in market (commonly trade) are recognized on trade date, it's date of Company committed to buy or sell the asset.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Pengakuan awal (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan memiliki aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan aset keuangan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo tidak diungkapkan.

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan di amortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif.

Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset keuangan lancar lainnya yang dimiliki oleh Perseroan.

Piutang

Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perseroan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut melunasi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pada saat pengakuan awal, piutang usaha yang mempunyai masa angsuran lebih dari 1 (satu) tahun diukur sesuai dengan nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***k. Financial Assets** (Continued)*

***Accounting Policy before January 1, 2020** (Continued)*

***Initial recognition** (Continued)*

As of December 31, 2019 and 2018, Company have been owned of financial assets in category of loans and receivables.

Therefore, accounting policies that has related to financial assets in category of it's measured in fair value through profit or loss, available of sale financial assets and held-to-maturity investment are not disclosed.

Measurement after Initial Recognition

Loans and Receivables

Loans and receivables are non derivative financial assets with fixed payment or it's determined and it's not quoted in an active market. It's not meaned to be sale in close period and it's not to be cllasified as financial assets those are measured in fair value through profit or loss statement, investment that has been owned to due date or available assets to be sale.

After beginning measurement, loan that has gaved and receivables measured at acquisition cost that it's amortized by using effective interest method, less allowance of value impairment. The Acquisition cost that it has amortized were calculated of premium and discount that arised at acquisition and fees and cost that part of integral of effective interests.

Amortization is recorded as part of interest income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when loans and receivables are derecognized or has decreased in value, as well as during the amortization process.

As of December 31, 2020 and 2019, this category includes of cash and cash equivalents, accounts receivable and other current financial assets held by Company.

Trade Receivables

Trade receivables represent rights arising from the delivery of goods or services as the business of the Company, on the basis of an agreement or agreement between the company and another party, requiring that the other party repay the payment of the goods or services it has received or the debt after a certain period in accordance with deal.

At beginning recognition, trade receivables with installment of more than one (1) year are measured according to their fair value. After beginning recognition, trade receivables are measured at acquisition that it's amortized cost with using the effective interest rate.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Pengukuran setelah Pengakuan Awal (Lanjutan)

Piutang (Lanjutan)

Perseroan dan entitas anak menetapkan cadangan penurunan nilai piutang secara kolektif dengan menggunakan metode roll rate method atau dikenal sebagai *Migration Analysis* atau *Flow Model*. Model ini menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghitung rata-rata persentase perpindahan (roll rate average) dan disesuaikan secara statistik untuk persentase-persentase yang berubah secara signifikan.

Penghapusbukuan piutang harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar.

Piutang yang telah dihapusbukukan, dicatat secara ekstra-kontabel dan tidak menghilangkan kewajiban penagihan. Apabila ternyata piutang tersebut dapat dibayar/dilunasi oleh debitur, dicatat dan diklasifikasikan dalam akun "pendapatan non usaha".

Penyisihan penurunan nilai (yaitu cadangan kerugian penurunan piutang tak tertagih yang sudah 100% dari jumlah piutang), tetap disajikan sebagai bagian piutang.

Metode bunga efektif

Metode bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode terkait.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Aset keuangan, selain yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti yang objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Financial Assets *(Continued)*

Accounting Policy before January 1, 2020 *(Continued)*

Measurement after Initial Recognition *(Continued)*

Trade Receivables (Continued)

The company and its subsidiary establishes reserves for impairment of receivables are collectively using the roll rate or the method known as the Migration Analysis or Flow Model. These model uses past experience to calculate the average percentage of displacement (roll rate average) and adjusted statistically for significantly changed percentages.

Write off of receivables must have prior approval from Board of Commissioners in accordance of Articles of Association.

Receivables that have been written off, are recorded in an extra-comtapble and did not eliminate billing obligations. If it turns out these receivables can be paid / paid off by the debtor, recorded and classified in the "non-business income" account.

Allowance of impairment losses (ie allowance of uncollectible trade receivable that it's had 100% of total trade receivables), is presented as part of trade receivables.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

Effective interest rate is interest rate that precisely discounts of estimated future cash receipts (including all commissions and other forms paid and received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and premiums and other discounts) as long as the estimated life of the debt instrument, or, if more appropriate, it's uses a shorter period to obtain the net carrying amount of financial asset at beginning recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial assets classified as FVTPL.

Impairment of Financial Assets

Financial assets, other than those at fair value through profit and loss (FVTPL), are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (Lanjutan)

- **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi**

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan melakukan penurunan nilai untuk kelompok tersebut dengan metode 'kolektif'. Aset yang penurunan nilainya menggunakan metode 'individual', penyisihan atas kerugian penurunan nilainya dikeluarkan dari perhitungan secara 'kolektif'.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pinjaman yang diberikan dan Piutang

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa, aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam atau penerbit instrumen keuangan;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Financial Assets *(Continued)*

Accounting Policy before January 1, 2020 *(Continued)*

Impairment of Financial Assets (Continued)

- ***Financial assets measured at amortized cost***

Management first determines whether there is objective evidence of impairment individually on financial assets that are individually significant, or collectively, for financial assets that are insignificant individually.

If management determines that there is no objective evidence of impairment of the individually assessed financial assets, whether they are significant or insignificant, they are included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and impairment of the group with the 'collective' method. Assets that decrease in value use the 'individual' method, allowance for impairment losses are excluded from 'collective' calculations.

If there is objective evidence that impairment has occurred on assets under the category of loans and receivables, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of the estimated future cash flows (excluding future unexpected credit losses) which is discounted using the original effective interest rate of the asset (which is the effective interest rate calculated at the time of initial recognition). The carrying amount of the asset is immediately deducted by any impairment or use of an allowance account. The amount of the losses incurred is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Loans and Receivables

At each reporting date, the Group evaluate whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

Financial assets or groups of financial assets are written down in value and any impairment loss has occurred, if and only where, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events occurring after the initial recognition of the asset (adverse event) and events that adversely affects the estimated future cash flows of financial assets or groups of financial assets that can be reliably estimated.

Objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired includes:

- *Significant financial difficulty of the obligor or issuer of financial instruments;*
- *A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan Piutang (Lanjutan)

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi (Lanjutan):

- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - I. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
  - II. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Perseroan dapat mengukur penurunan terhadap nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka pembalikan atas kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Financial Assets *(Continued)*

Accounting Policy before January 1, 2020 *(Continued)*

Loans and Receivables (Continued)

Objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired includes (Continued):

- *The lender, for economic or legal reasons in connection with the financial difficulties experienced by the borrower, provide relief (*concessions*) on the part of borrowers who do not may be given if the borrower did not experience such difficulties;*
- *There is a probability that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- *Disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:*
  - *I. Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and*
  - *II. National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.*

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of future estimated future cash flows (excluding future unexpected loan losses) discounted using the original effective interest rate of the asset.

The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

If the loan and receivable have a variable interest rate, the discount rate used to measure any impairment loss is the applicable effective interest rate stipulated in the contract. As a practical guide, the Company can measure the decrease in the fair value of the instrument using the observable market price.

If, in the subsequent period, the amount of the impairment loss is reduced and the deduction may be objectively attributed to an event occurring after the impairment is recognized (such as an increase in the credit rating of the debitor), the reversal of a previously recognized impairment loss is recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan Piutang (Lanjutan)

Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan yang signifikan yang terdapat indikasi penurunan nilai (piutang yang bukan berasal dari transaksi jasa kepelabuhanan). Uji penurunan nilai dilakukan secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan dan aset keuangan yang signifikan tetapi tidak memiliki indikasi penurunan nilai berdasarkan data historis.

Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan secara langsung melalui kerugian penurunan nilai untuk seluruh aset keuangan, kecuali untuk piutang usaha dan piutang non usaha dimana nilai tercatat diturunkan melalui akun penyisihan penurunan nilai piutang. Bila piutang usaha atau piutang non usaha tidak tertagih, piutang dihapuskan terhadap akun penyisihan penurunan nilai piutang.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang (terpulihkan) karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Financial Assets *(Continued)*

Accounting Policy before January 1, 2020 *(Continued)*

Loans and Receivables (Continued)

Impairment test performed individually for financial assets that are significant indications of impairment (receivables which are not derived from seaport services transactions). Impairment test performed collectively for financial assets that are not significant and significant financial assets but has no indication of impairment based on historical data.

The present value of estimated future cash flows discounted using the beginning effective interest rate of the financial asset. If the loans and receivables which have variable interest rates, the discount rate for measuring any impairment loss is the recent effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced directly through impairment losses for all financial assets, except for trade receivables and non-trade receivables from which the carrying amount is reduced through an allowance for impairment value. When a trade receivable or non-performing receivable is not collectible, the receivables are written off against the allowance for impairment value.

If, in the subsequent years, the amount of any impairment loss increases or decreases (recovered) due to an event occurring after the impairment is recognized, an adjustment of the allowance for impairment losses previously recognized is recognized. Recovery of impairment is subsequently recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, provided that the carrying value of the assets after the recovery of the impairment has not exceeded the amortized cost on the date of the recovery.

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.

If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (Lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020

Klasifikasi

Mulai 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain atau melalui laba rugi), dan
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah grup telah melakukan pemilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada pengakuan awal grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Financial Assets *(Continued)*

Accounting Policy before January 1, 2020 *(Continued)*

Derecognition of Financial Assets (Continued)

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Accounting Policy after January 1, 2020

Classification

From January 1, 2020. the Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *those to be measured subsequently at fair value (either through other* comprehensive *income. or through profit or loss). and*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

At initial recognition. the group measures a financial asset at its fair value plus in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Klasifikasi (Lanjutan)

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

- **Instrumen Utang**

  Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

  - Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

  - Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI): Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, dimana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Pendapatan bunga dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam keuntungan/kerugian lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan dan kerugian lain-lain dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

  - Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya. dalam periode kemunculannya.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***k. Financial Assets** (Continued)*

***Accounting Policy after January 1, 2020** (Continued)*

***Classification** (Continued)*

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

- ***Debt Instrument***

  Subsequent measurement of debt instruments depends on the group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

  - *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

  - *Fair value through other comprehensive income (FVOCI): Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI. except for the recognition of impairment gains or losses. Interest revenue and foreign exchange gains or losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised. The cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other gains/losses. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses and impairment expenses in other expenses.*

  - *Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and is not part of a hedging relationship, is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it arises.*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Klasifikasi (Lanjutan)

- **Instrumen Ekuitas**

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perseroan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain. tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Perseroan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan / (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Saat membuat penilaian perusahaan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan bukan perubahan jumlah kerugian kredit yang diharapkan. Untuk membuat penilaian tersebut, perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yaitu tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit yang diharapkan ("ECL") tersebut untuk piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset kontrak tanpa komponen pembiayaan yang signifikan.

ECL adalah estimasi kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo pada entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup). ECL didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.

Cadangan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah tercatat bruto aset tersebut.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Financial Assets *(Continued)*

Accounting Policy after January 1, 2020 *(Continued)*

Classification *(Continued)*

- ***Equity Instrument***

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income. there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the group's right to receive payments is established.

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognized in other gain/(losses) in the statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

Impairment of Financial Assets

From January 1, 2020 the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment the company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss ("ECL") for trade receivables, other receivables, and contract assets without a significant financing component.

ECLs are a probability-weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

Loss allowances for financial assets measured at amortized cost are deducted from the gross carrying amount of the assets.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (Lanjutan)

Nilai tercatat bruto dari aset keuangan dihapuskan (sebagian atau seluruhnya) sepanjang tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Ini umumnya terjadi ketika perusahaan menentukan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut, namun demikian aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan kegiatan penegakan hukum untuk memenuhi prosedur perusahaan untuk pemulihan jumlah yang telah jatuh tempo.

Pada setiap akhir periode pelaporan, grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (peristiwa kerugian) dan peristiwa kerugian (atau peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.

- **Aset Dicatat Sebesar Harga Perolehan Diamortisasi**

  Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan memiliki tingkat bunga mengambang tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis. Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

  Jika, pada periode selanjutnya jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur) pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Financial Assets *(Continued)*

Accounting Policy after January 1, 2020 *(Continued)*

Impairment of Financial Assets (Continued)

The gross carrying amount of a financial asset is written off (either partially or in full) to the extent that there is no realistic prospect of recovery. This is generally the case when the company determines that the debtor does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off, however financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the companys procedures for recovery of amounts due.

At the end of each reporting period, the company and Subsidiaries assess whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets has been impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and an impairment loss occurs only if there is objective evidence that the impairment is the result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event) and that loss event (or event) has an impact on the estimate. future cash flows on a financial asset or group of financial assets that can be estimated reliably.

For investments in equity instruments classified as available-for-sale, a significant and prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an indicator that the asset is impaired.

- ***Assets are carried at amortized cost***

  For loans and receivables category, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not yet been incurred) discounted using the asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognized in the profit or loss. If a loan has a floating interest rate. the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate determined in the contract. For practical reasons. the Company and Subsidiaries can measure impairment based on the fair value of the instrument using observable market prices.

  If, in a subsequent period the amount of impairment decreases and the decrease can be objectively linked to an event that occurred after the impairment was recognized (for example an increase in the debtor's credit rating) the recovery of the previously recognized amount of impairment is recognized in the consolidated statements of income.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (Lanjutan)

- **Aset diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual**

Jika terdapat bukti objektif dari penurunan nilai aset keuangan yang tersedia untuk dijual. kerugian kumulatif diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar saat ini. dikurangi rugi penurunan nilai aset keuangan tersebut yang sebelumnya diakui pada laporan laba rugi – dihapus dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi. Jika, di periode selanjutnya. nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah rugi penurunan nilai diakui di laporan laba rugi. rugi penurunan nilai tersebut dibalik melalui laporan laba rugi konsolidasian.

Penurunan nilai atas instrumen ekuitas yang diakui di laporan keuangan konsolidasian tidak dibalik melalui laporan laba rugi konsolidasian pada periode berikutnya.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir. atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan. selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Financial Assets *(Continued)*

Accounting Policy after January 1, 2020 *(Continued)*

Impairment of Financial Assets (Continued)

- ***Assets are* classified *as available for sale***

If there is objective evidence of impairment of an available-for-sale financial asset. the cumulative loss is measured as the difference between cost and current fair value. less impairment loss on the asset previously recognized in profit or loss - removed from equity and recognized in the statement. profit and loss. If, in a subsequent period. the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale has increased and the increase can be objectively linked to an event that occurs after an impairment loss is recognized in the profit or loss. the impairment loss is reversed through the consolidated statement of income.

Impairment of equity instruments recognized in the consolidated financial statements is not reversed through the following consolidated statements of income.

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire. or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset. the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.

If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset. the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received

On derecognition of financial asset in its entirety. the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulat ed in equity is recognized in profit or loss.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (Lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer). Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan. dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Saat membuat penilaian. Perusahaan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. bukan perubahan jumlah kerugian kredit yang diharapkan. Untuk membuat penilaian tersebut. Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung. yaitu tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit yang diharapkan ("ECL") tersebut untuk piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset kontrak tanpa komponen pembiayaan yang signifikan.

l. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam akuisisi atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi) dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan. sesuai dengan pengakuan awal.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui segera dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Financial Assets *(Continued)*

Accounting Policy after January 1, 2020 *(Continued)*

Derecognition of Financial Assets *(Continued)*

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g.. when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset). the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement. and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

From January 1, 2020 the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment. the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment. the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information. that is available without undue cost or effort. that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss ("ECL") for trade receivables, other receivables, and contract assets without a significant financing component.

l. Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction cost that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are deducted from the fair value of the financial liabilities. as appropriate. in initial recognition.

Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilitiesor as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

l. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (Lanjutan)

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil yang diterima setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan – biaya perolehan diamortisasi

Utang bank, utang jangka panjang, utang obligasi, utang usaha dan utang lainnya pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi. dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

m. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian jika dan hanya jika saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

l. Financial Liabilities and Equity Instruments *(Continued)*

Equity instruments

An equity instruments is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received. net of direct issue costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities at FVTPL or at amortized cost. The Group financial liabilities are classified as at amortized cost.

Financial liabilities – at amortized cost

Loans from banks, long-term loans, bonds payable, and trade and other payables are initially measured at fair value net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost. using the effective interest rate method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities if and only if, their obligations are discharged cancelled or expired The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

m. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position (balance sheets) if and only if currently. has the legal entitlement to indemnify the recognized amount and there is an intention to settle the net or to realize assets and settle their obligations simultaneously.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

m. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/*dealer* (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual) tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga. maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini *(net present value)* perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi model harga opsi *(*options *pricing models)* dan model penilaian lainnya.

n. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode *First In First Out*. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih pada tahun berjalan.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Persediaan rusak alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakajn, dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok “aset tidak lancar lainnya”.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

m. Offsetting of Financial Instruments *(Continued)*

The fair value of financial instruments traded on the active market at the date of the statement of financial position is based on the quoted market price or the quoted price of the seller / dealer (bid price for the buy position and ask price for the selling position). regardless of transaction costs. If the current bid price and ask price are not available then the last transaction price used to reflect current fair value evidence as long as there is no significant change in the economy since the transaction. For all financial instruments not listed in an active market, except for investments in equity instruments that do not have quoted prices. fair value is determined using valuation techniques.

Valuation techniques include net present value techniques comparison to similar instruments for which market observable prices exist options pricing models and other relevant valuation models.

n. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value whichever is lower.

Cost is determined using First In First Out method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Allowance for decline in value of the inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable values int the current period.

The allowance for the obsolete inventories is determined using the periodic review on the condition of the inventory on the statements of financial position date.

Defective/spoilage Inventories there is no parent/main asset or economically can not be used are presented in the "other non current assets".

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

o. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Pada akhir periode pelaporan biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan.

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

p. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Selanjutnya setelah penilaian awal. properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar. yaitu setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai.

Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Mulai tahun 2018, Perseroan memilih menggunakan model nilai wajar (sebelumnya menggunakan model biaya perolehan) untuk mengukur properti investasi (tanah dan bangunan) yang berlaku prospektif sebagaimana diatur pada standar yang berlaku. Kenaikan (penurunan) yang berasal dari nilai wajar pada tanggal posisi laporan keuangan dibanding dengan nilai buku atas penerapan pertama kali atau nilai wajar sebelumnya diakui sebagai keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar aset non keuangan dan disajikan pada pendapatan (beban) non usaha.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

o. Prepaid Expenses and Advance Payment

Prepaid expenses are expenses that have been paid for the useful life of twelve months or more. Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight line method.

At the end of the reporting period prepaid expenses are stated at the value of the goods / services / benefits or equivalent which has not been recognized in the current period. Long-term prepaid expenses are presented as "Other Current Assets" in the Statement of Financial Position.

Advances are a number of cash out or costs incurred by the company for an activity or something that will have the responsibility in a certain time and have been assigned.

p. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both.

Costs after the initial acquisition is recognized in the carrying amount of investment property if and only if it is probable that future economic benefits in respect of the investment property will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably. and does not include the cost of the maintenance of investment property.

Investment property is initially measured at cost which includes the purchase price and costs directly attributable. Furthermore. after the initial measurement. property investments valued using fair value. net of accumulated depreciation and accumulated impairment. Gains or losses arising from changes in fair value recognized in profit or loss as incurred.

Investment property includes properties in the process of development and will be used as investment property after completion.

Accumulated acquisition and development costs (including borrowing costs incurred) are amortized when completed and ready for use.

Investment properties shall be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.

Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

Start from 2018, the Company chooses to use the fair value model (previously using the acquisition cost model) to measure investment property (land and buildings) that apply proposition as stipulated in applicable standards. Increase (decrease) arising from fair value at the position date of the financial statements compared to the book value for the first time application or previous fair value. is recognized as gain (loss) of change in the fair value of non financial assets and presented as non operating income (expense).

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

p. Properti Investasi (Lanjutan)

Selanjutnya pada setiap tanggal laporan posisi keuangan atau sekurang-kurangnya pada akhir tahun dengan pilihan model nilai wajar. Perseroan melakukan telaahan atas nilai wajar properti investasi - tanah dan bangunan. Kenaikan (penurunan) yang berasal dari nilai wajar pada tanggal posisi laporan keuangan dibanding nilai wajar sebelumnya. merupakan keuntungan (kerugian) dan disajikan pada kelompok pendapatan (beban) non usaha.

q. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan *(acquisition cost)* setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.,jika ada. Namun, tidak termasuk biaya perbaikan dan perawatan sehari-hari.

Sampai dengan saat ini, Perusahaan masih memilih menggunakan model biaya *(cost model)* dalam melakukan pengukuran untuk seluruh aset tetapnya setelah pengakuan awal aset tetap yang bersangkutan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya *(derecognized)* pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laporan rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***p. Investment Properties** (Continued)*

Furthermore at each financial position report date or at least at the end of the year with a choice of fair value models. the Company conducts a review of the fair value of investment property - land and buildings. Theincrease (decrease) arising from the fair value at the position date of the financial statements compared to the previous fair value. represents gain (loss) and is presented in the group of non operating income (expenses).

q. Fixed Assets

Fixed assets, except land are stated at the acquisition cost. after deducting accumulated depreciation and accumulated impairment losses If any. However, it does not include daily repairs and maintenance costs.

Until now, the Company still chooses to use the cost model in measuring all of its fixed assets after the initial recognition of the fixed assets concerned.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended on use.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized during the period of the land rights.

Major spare parts and stand by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Expenses incurred after fixed assets are used. such as repairs and maintenance expenses are charged to profit or loss when incurred. If these expenses lead to an increase in future economic benefits from the use of these fixed assets that can exceed their normal performance. then these expenses are capitalized in addition to the acquisition cost of fixed assets.

The carrying amount of fixed asset is derecognized at the time of disposal or no future economic benefit is expected from its use or disposal.

Fixed asset sold or disposed of are removed from the accounts with the accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses associated with fixed asset.

Gains or losses arising from the termination of recognition of fixed assets are determined at the difference between the net amount of disposal proceeds if any and the carrying amount of fixed assets and recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the cessation of the recognition.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan (selain tanah) dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan. penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

q. Fixed Assets *(Continued)*

Depreciation (except for land) is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service. depreciation is recognized so as to write off the cost of assets less residual values using the straight line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Jenis Aset Tetap	Umur Manfaat/ *Useful Life*	Tarif Penyusutan/ *Depreciation Rate*	*Type of Assets*
Aset Tetap			***Fixed Assets***
Bangunan			*Building*
- Diperoleh masa PN	12.5 Tahun / *Years*	8%	*Retrieved period PN -*
- Diperoleh setelah PT	40 Tahun / *Years*	2.5%	*Obtained after PT -*
Kendaraan	5 Tahun / *Years*	20%	*Vehicle*
Inventaris			*Inventory*
- Peralatan komputer	7 Tahun / *Years*	15%	*Computer equipment -*
- Peralatan komunikasi	7 Tahun / *Years*	15%	*Communications equipment -*
- Perabotan kantor/rumah tangga	7 Tahun / *Years*	15%	*Office equipment / household -*
Peralatan Wisma	7 Tahun / *Years*	15%	*Homestead equipment*
Alat Produksi			***Production Equipments***
Armada Kapal			*Fleet*
Kapal Penumpang	30 Tahun / *Years*	3.3%	*Passenger ship -*
Kapal Roro	30 Tahun / *Years*	3.3%	*Roro ship -*
Jet Liner	25 Tahun / *Years*	4%	*Jetliner*
Egon	25 Tahun / *Years*	4%	*Egon*
Kapal Eks PT PANN			*Ex ship PT PANN -*
(KM Caraka Th. 1990)	20 Tahun / *Years*	5%	*(KM Caraka years 1990)*
Kapal Sewa Guna Usaha Th. 1990	20 Tahun / *Years*	5%	*Ship Lease years 1990 -*
Galangan dan alat apung	10 Tahun / *Years*	10%	*Shipyard and floating equipment*
Kontainer	10 Tahun / *Years*	10%	*Containers*
Alat mekanik dan non mekanik	10 Tahun / *Years*	10%	*Tools mechanical and non mechanical*

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Nilai residu, umur manfaat serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate. at each financial year end.

Biaya Pinjaman

Borrowing Costs

Biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan.

Borrowing costs that can be distributed directly with the acquisition, construction or manufacture of qualifying assets are borrowing costs that can be avoided if the expenditure on qualifying assets is not carried out.

Pinjaman dana secara spesifik telah ditentukan penggunaannya. jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Specific use of the loan has been determined. the amount of borrowing costs that can be capitalized is equal to the actual borrowing costs incurred during the period less investment income on the temporary investment of the loan.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Aset Tetap (Lanjutan)

Biaya Pinjaman (Lanjutan)

Pinjaman dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian dengan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama periode di luar pinjaman spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pengembangan proyek telah selesai atau pada saat konstruksi selesai dan aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai konstruksi aset tertentu yang memenuhi syarat. dikapitalisasi sampai konstruksi tersebut selesai.

Aset Dalam Konstruksi

Aset dalam konstruksi merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehan berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada akhir tahun sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.

Aset dalam konstruksi disajikan sebagai bagian dari aset tetap yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan yaitu harga perolehan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dan biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah digunakan sesuai tujuannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

q. Fixed Assets *(Continued)*

Borrowing Costs (Continued)

Fund loans generally use it to obtain a qualifying asset the amount of borrowing costs that can be capitalized by applying a capitalization rate to the expenditure on the asset. Rate capitalization is the weighted average borrowing cost for the loan balance during the period outside the specific loan to obtain the qualifying asset. The amount of borrowing costs capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing costs incurred during that period.

Capitalization of borrowing costs discontinued when activities associated with the acquisition and development projects have been completed or when construction is completed and the asset is ready for its use.

Interest expense and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used to finance construction of certain assets are eligible. are capitalized until construction is completed.

Construction in Progress

Construction in progress (CIP) are fixed assets in the construction phase. which are stated at cost based on the physical percentage of work completed at the end of the year in accordance with the Minutes of Physical Progress of Work.

CIP are presented as part of fixed assets. which are stated based on acquisition costs costs directly attributable costs. initial estimates of the costs of dismantling and moving fixed assets and restoring the location of fixed assets and borrowing costs used to finance assets during the period development.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets when the construction is substantially completed and the assets are ready for its intended use. as evidenced by the Minutes of First Taking Over.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Aset Tetap (Lanjutan)

Aset Tidak Produktif / Tidak Berfungsi

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi / usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan / pelepasannya dikategorikan sebagai aset tidak produktif / tidak berfungsi dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 02/MBU/2010. tentang Tata cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Aset tetap tidak produktif dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham.

Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap tidak produktif usulan penghapusan ini diakui pada kelompok pendapatan (beban) non usaha.

r. Penurunan Nilai Aset Non keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai.

Jika terdapat indikasi tersebut jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

q. Fixed Assets *(Continued)*

Non Productive / Non Function Assets

Fixed assets that do not provide benefits in production activity / her business or no future economic benefits are expected from the use / disposal of assets not classified as productive / not functioning and are presented in groups of other non current assets.

Fixed assets in that category of impaired its carrying value at the time no longer provide future economic benefits are expected from its use. Accumulated impairment of non productive assets created as the application of the accounting impairment.

The write off and the alienation of property and equipment following the regulation stated by the Minister of State Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 regarding Procedure for Written off and Transfer of Fixed Assets of State Owned Company.

Unproductive fixed assets are derecognised when the the elimination has received approval from the Board of Commissioners and or Shareholders.

Gain or loss realized from the sale of fixed assets proposed the elimination unproductive it was recognized in the group of other income (expenses).

r. Impairment of Non financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amounts of its tangible and intangible assets to determine whether there is any indication that the assets have suffered an impairment loss.

If any such indication exists the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cashgenerating unit to which the asset belongs.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

r. Penurunan Nilai Aset Non keuangan (Lanjutan)

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya. estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya. maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai biaya "Rugi Penurunan Nilai".

Dalam menghitung nilai pakai. estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. digunakan harga penawaran pasar terakhir. jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut. Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya. nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi kecuali aset tersebut dicatat sebesar nilai revaluasi. dimana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat setelah dikurangi penyusutan seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

r. Impairment of Non financial Assets *(Continued)*

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use. the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as "Impairment Losses".

In assessing the value in use. the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell. recent market transactions are taken into account. if available. If no such transactions can be identified. an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

If the recoverable amount of an asset (or cash generating unit) is estimated to be less than its carrying amount. the carrying amount of the asset (or cash generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in profit or loss. unless the relevant asset is carried at a revalued amount. in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If that is the case the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amoun. nor exceed the carrying amount that would have been determined. net of depreciation had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

r. Penurunan Nilai Aset Non keuangan (Lanjutan)

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi dikurangi nilai sisanya dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill hanya diuji untuk menentukan adanya penurunan nilai pada setiap akhir tahun pelaporan dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai.

Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

s. Aset Takberwujud

Beban perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud. Beban tersebut diamortisasi selama mana yang lebih pendek antara umur legal atau umur ekonomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.

Aset takberwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan.

Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

r. Impairment of Non financial Assets *(Continued)*

Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount. less any residual value on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is only tested to determine of value impairment at the end of each reporting year and when there is an indication that recorded value is impaired.

Impairment of goodwill is determined by determining of recorded amount of each UPK (or group of UPK) to which goodwill is related. If recoverable amount of UPK is less than recorded amount the value impairment lossess are recognized. Value impairment losses for goodwill cannot be reversed to following year.

s. Intangible Assets

Cost incurred for extension or renewal of land rights are recognized as intangible assets. Amortized over the period whichever is shorter between the legal life or economic life of the land. If the cost incurred are not material, then charged in the current period.

Intangible assets are recorded at acquisition cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized over their useful lives. The Group estimates the recoverable value of its intangible assets.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method. as appropriate. and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the profit or loss as the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

s. Aset Takberwujud (Lanjutan)

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud selama 5 (lima) tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra operasi / perintisan usaha.

t. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas dimasa depan tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar saat diterima tidak termasuk pajak penjualan (PPN).

- Pendapatan atas penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik / *Public Service Obligation* (PSO) dan subsidi diakui pada saat pengajuan klaim terhadap seluruh biaya yang terkait langsung dengan kegiatan PSO dan subsidi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

s. Intangible Assets *(Continued)*

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised but are tested for impairment annually either individually or at the cashgenerating unit level. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount. the asset is written down to its estimated recoverable amount. The useful life of an intangible asset that is not being amortised shall be reviewed each period to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Software is amortized using the straight line method. based on the estimated useful lives of the assets of 5 (five) year.

Intangible assets are derecognized when no further economic benefits are expected. either from further use or from disposal. The difference between the carrying amount and the net proceeds received from disposal is recognized in the statement of profit or loss.

The costs that do not have a useful life of more than one period can not be suspended including losses arising from the initial operation and cost of pre operative / pioneering effort.

t. Received in Advance

Received in advance are money received from other parties in connection with the services of products that will be performed by entities in the future but the services are not delivered to that party.

u. Revenue and Expense Recognition

Accounting Policy before January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at fair value of the consideration received excluding sales taxes (VAT).

- *Revenue for the implementation of public service obligations/Public Service Obligation (PSO) and subsidies are recognized at the time of filing a claim against all costs associated directly with PSO and subsidy activities.*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Selisih kekurangan pembayaran atau kelebihan pencairan dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik akan diperhitungkan setelah dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh pihak yang ditunjuk dalam Perjanjian.

- Pendapatan tambang pasasi dan muatan diakui sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar uang tambang pasasi dan uang tambang muatan.
- Pendapatan charter diakui proporsional selama periode perjanjian.
- Pendapatan bongkar muat, komisi keagenan, EMKL dan reparasi diakui pada saat jasa tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Pendapatan sewa, bunga dan lainnya diakui dengan metode akrual.
- Penghasilan dividen dari investasi saham diakui pada saat hak menerima dividen telah ditetapkan.

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

Pendapatan / Beban Keuangan

Beban diakui dengan menggunakan metode akrual dengan penegasan sebagai berikut: beban dikeluarkan dalam usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan beban yang tidak dapat dimanfaatkan untuk periode akuntansi berikutnya beban penurunan aset yang tidak mungkin dihindarkan.

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan kategori tersedia dijual yang memperoleh bunga, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (SBE) yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan atau jika lebih tepat selama periode yang lebih singkat untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020

Sejak 1 Januari 2020 Grup telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelangan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

u. Revenue and Expense Recognition *(Continued)*

Accounting Policy before January 1, 2020 *(Continued)*

The difference in underpayment or excess disbursement of funds for the implementation of Public Service Obligations will be taken into account after document verification and field verification by the party designated in the Agreement.

- *Pasasi mines and cargo revenues are recognized according to the level of completion services on the basis pasasi mine money list and the list of charges mines.*
- *Charter revenue is recognized proportionately over the period of the agreement.*
- *Revenue stevedoring, agency commissions and reparations EMKL recognized when services have been completed.*
- *Rental income, interest and other recognized on an accrual basis.*
- *Dividend income from investment in shares of stock is recognized when the shareholders rights to receive such dividend have been established.*

Expenses are recognized when incurred or based on their beneficial period.

Finance Income / Cost

Expenses are recognized on accrual basis to the assertion as follows: expenses incurred in an attempt to generate revenue in the current period expenses that can not be utilized for the next accounting period asset impairment charges that are unavoidable.

For all financial instruments measured at amortized cost and interest bearing financial assets classified as available-for-sale, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate (EIR) which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period where appropriate. to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Accounting Policy after January ,. 2020

Since January 1, 2020 the Group has implemented PSAK 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 assessment steps:

1. *Identify contracts with customers.*
2. *Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer different goods or services to the customer.*

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel. Perusahaan memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.

4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah marjin.

5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan).
b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

v. Transaksi Sewa

Kebijakan Berlaku Sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dalam sewa pembiayaan Grup *(Lessee)* mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

a. terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual. kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

u. Revenue and Expense Recognition *(Continued)*

Accounting Policy after January 1, 2020 *(Continued)*

3. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration expected to be entitled to the entity in exchange for transferring the promised goods or services to the customer. If the consideration promised in the contract includes a variable amount. the Company estimates the amount of consideration that is expected to be entitled in exchange for the transfer of goods or services promised to the customer less the estimated amount of guaranteed service levels to be paid during the contract period.

4. Allocate the transaction price for each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract. If this cannot be observed directly the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus a margin.

5. Recognizes revenue when performance obligations are fulfilled by transferring the promised goods or services to the customer (that is. when the customer gains control of the goods or services).

The implementation obligation can be fulfilled in the following conditions:

a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer).
b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time. the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

v. Lease Transactions

Accounting Policy Before January 1, 2020

The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases that transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the asset are classified as finance leases. In a Group financing lease (Lessee) recognizes assets and liabilities in the consolidated statement of financial position at the beginning of the lease at fair value of the leased asset. or at the present value of the minimum lease payments if the present value is less than fair value.

A reassessment is made after inception of the lease only if one of the following applies:

a. there is a change in the contractual terms of the agreement. unless such changes only renew or extend the existing agreement;

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

v. Transaksi Sewa (Lanjutan)

Kebijakan Berlaku Sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

b. opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, Kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;

c. terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau

d. terdapat perubahan subtansial atas aset yang disewa.

Perlakuan Akuntansi untuk *Lessee*

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b.

Sewa Pembiayaan

Sewa pembiayaan yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada Perseroan dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan sebagai kerugian pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Aset sewaan disusutkan selama masa manfaat aset tersebut kecuali apabila terdapat ketidakpastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa atau masa manfaat.

Keuntungan yang ditangguhkan dari transaksi penjualan dan sewa balik pembiayaan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa Operasi

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset tersebut tidak ditransfer kepada Grup diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan secara garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana Perseroan dan entitas anak tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

v. Lease Transactions *(Continued)*

Accounting Policy Before January 1, 2020 *(Continued)*

b. a renewal option is exercised or extension granted. Unless the term of the renewal or extension was initially included in the lease term;

c. there is a change in the determination of whether the fulfillment is dependent on a specified asset; or

d. there is a substantial change to the asset.

Accounting Treatment as a Lessee

Where a reassessment is made lease accounting shall commence or cease from the date when the change in circumstances gave rise to the reassessment for scenarios a, c or d and the date of renewal or extension period for scenario b.

Financial Lease

Leases which transfer to the Company substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item. are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or. If lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly as loss at the consolidated comprehensive income statement in current year.

The leased of assets are depreciated over the estimated useful life of the assets except if there is no reasonable certainty that the group will obtain ownership by the end of the lease term in which case the lease of assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term.

Deferred gain from sale and finance leaseback transaction is amortised using straight line method over the lease term.

Operating Lease

Leases where all the risk and benefits of ownership of the assets are not transferred to the group are classified as operating leases. Lease payments under operating leases are recognized as an expense at the consolidated comprehensive income statement in current year on a stright-line basis over the lease term.

Leases where the Company and its subsidiaries retains substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

v. Transaksi Sewa (Lanjutan)

Kebijakan Berlaku Sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Perlakuan Akuntansi untuk *Lessee* (Lanjutan)

Sewa Operasi (Lanjutan)

Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

Kebijakan Berlaku Setelah 1 Januari 2020

Lessor mengklasifikasikan setiap sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Lessor mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus atau sistematik lainnya. Lessor menerapkan dasar sistematis lain jika basis tersebut lebih mewakili pola di mana manfaat dari penggunaan aset yang mendasarinya berkurang.

Lessor mengakui biaya. termasuk penyusutan. yang terjadi dalam memperoleh pendapatan sewa sebagai beban.

Lessor menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam memperoleh sewa operasi ke nilai tercatat aset yang mendasarinya dan mengakui biaya tersebut sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

Kebijakan penyusutan untuk aset dasar yang dapat didepresiasi yang dikenakan sewa operasi harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal lessor untuk aset serupa. Lessor menghitung depresiasi sesuai dengan PSAK 16.

Lessor menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset yang mendasari sewa operasi mengalami penurunan nilai dan mencatat setiap kerugian penurunan nilai yang diidentifikasi.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa berbagai aset tetap. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 3 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perseroan. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodic yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak pakai didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

v. Lease Transactions *(Continued)*

Accounting Policy Before January 1, 2020 *(Continued)*

Accounting Treatment as a Lessee *(Continued)*

Operating Lease (Continued)

Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized at the consolidated statement comprehensive income statement in current year conformity with the lease term on the same basis as rental income.

Accounting Policy After January 1, 2020

A lessor shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

A lessor shall recognize lease payments from operating leases as income on either a straight-line basis or another systematic basis. The lessor shall apply another systematic basis if that basis is more representative of the pattern in which benefit from the use of the underlying asset is diminished.

A lessor shall recognize costs. including depreciation. incurred in earning the lease income as an expense.

A lessor shall add initial direct costs incurred in obtaining an operating lease to the carrying amount of the underlying asset and recognize those costs as an expense over the lease term on the same basis as the lease income.

The depreciation policy for depreciable underlying assets subject to operating leases shall be consistent with the lessor's normal depreciation policy for similar assets. A lessor shall calculate depreciation in accordance with SFAS 16.

A lessor shall apply SFAS 48 to determine whether an underlying asset subject to an operating lease is impaired and to account for any impairment loss identified.

Determining whether an agreement is, or contains, a lease is based on the substance of the agreement itself and assessing whether fulfillment of the agreement depends on the use of certain assets or assets, and whether the agreement conveys the right to use the assets.

The Group leases various fixed assets. Lease contracts are usually drawn up for a fixed period of 1 to 3 years but may have extension options.

Lease terms are negotiated individually and contain a variety of different terms and conditions. The lease agreement does not impose any agreement other than collateral for borrowing purposes.

Leases are recognized as use rights of use assets and related liabilities on the date on which the leased assets are available for use by the Company. Each lease payment is allocated between a liability and finance cost. Finance costs are charged to profit or loss over the lease term, resulting in a constant periodic interest rate on the remaining balance of the liability for each period. Rights of use assets are depreciated over the shorter period between the useful lives of the assets and the lease terms using the straight-line method.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

v. Transaksi Sewa (Lanjutan)

Kebijakan Berlaku Setelah 1 Januari 2020

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- pembayaran sewa sebagian yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran sebagian untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perseroan, suku bunga pinjaman *incremental* penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Perseroan:

- Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima.
- Menggunakan pendekatan build-up yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit, dan
- Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variable berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada ata sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima
- Biaya langsung awal, dan
- Biaya restorasi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

v. Lease Transactions *(Continued)*

Accounting Policy After January 1, 2020

Assets and liabilities arising from leases are initially measured on the present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including fixed payments in substance), less lease incentive receivables*
- *variable lease payments which are based on an index or rate, initially measured using an index or rate at the start date*
- *the amount expected to be paid by the lessee based on a guaranteed residual value*
- *the exercise price of the purchase option if the lessee is confident enough to exercise the option, and*
- *payment of penalties for termination of the lease, if the lease term reflects the lessee exercising the option.*

Lease payments that must be made under certain extension options are also included in the measurement of the liability.

Lease payments are discounted using the implicit interest rate in the lease. If the rate cannot be immediately determined, which is generally the case with leases in the Company, the incremental loan interest rate of the lessee is used, namely the rate that must be paid by the lessee to borrow the funds needed to acquire an asset with a value equal to the right of use assets in similar economic environment with similar terms and conditions.

To determine the incremental interest rate, the Company:

- *Where possible, use the most recent third party financing received by individual lessees as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received.*
- *Uses a build-up approach starting with a risk-free interest rate adjusted for credit risk, and*
- *Make specific adjustments to leases, such as term, country, currency and security.*

The group is faced with the potential for future increases in variable lease payments based on index or tariff, which are not included in the lease liability until enacted. When the adjustment of lease payments based on index or interest rates comes into effect, the lease liability is revalued and adjusted according to the right of use assets.

Lease payments are allocated between principal and finance costs. Finance costs are charged to the income statement over the lease term so as to produce a constant periodic interest rate on the remaining balance of the liability for each period.

Right of use assets are measured at cost, which consists of the following:

- *The initial measured amount of the lease liability*
- *Lease payments made on or before the commencement date less rental incentives received*
- *Initial direct costs, and*
- *Restoration costs.*

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

v. Transaksi Sewa (Lanjutan)

Kebijakan Berlaku Setelah 1 Januari 2020

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya. Sementara grup menilai kembali tanah dan bangunannya yang ada di dalam properti, gedung, dan peralatan, grup memilih untuk tidak melakukannya untuk bangunan hak guna yang dimiliki oleh Grup.

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

Opsi Ekstensi Dan Terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Perseroan. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perseroan dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan Nilai Residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Perseroan terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pada tahun 2020, Grup menerapkan PSAK 73, Sewa yang mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa dan meminta lessee untuk mencatat semua sewa dalam model neraca tunggal yang serupa dengan akuntansi sewa pembiayaan berdasarkan PSAK 30, Sewa. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa – sewa dari aset "bernilai rendah" dan sewa jangka pendek (yaitu, sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang).

Sebagai penyewa, Grup menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi setelah penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 dan memilih untuk menerapkan standar tersebut pada kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK 30 dan ISAK 8. Berdasarkan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi, Grup mengakui aset hak pakai berdasarkan nilai tercatatnya seolah-olah PSAK 73 selalu diterapkan sedangkan liabilitas sewa diakui pada tanggal penerapan, 1 Januari 2020. Perbedaan antara aset hak pakai dan sewa kewajiban diakui pada Saldo Laba awal pada 1 Januari 2020.

Grup juga menerapkan kebijaksanaan praktis untuk menerapkan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik serupa dan cara praktis untuk mengecualikan biaya langsung awal dari aset hak guna.

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai imbalan atas imbalan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

v. Lease Transactions *(Continued)*

Accounting Policy After January 1, 2020

Rights of use assets are generally depreciated over the shorter of the useful lives of the assets and the lease terms using the straight-line method. If the group is confident enough to exercise the purchase option, the rights of use assets are depreciated over the useful life of the underlying asset. While the group reassesses its land and buildings in the property, buildings and equipment, the group chooses not to do so for the use rights buildings owned by the group.

Payments related to short-term leases and leases of low value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in the profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

Extension And Termination Options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases throughout the Company. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of contract management. The majority of extension and termination options that are owned can only be exercised by the Company and not by the respective lessees.

Residual Value Guarantee

To optimize rental costs during the contract period, the Company sometimes provides a residual value guarantee in connection with the equipment lease.

In 2020, the Group adopted SFAS 73, Leases which sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to account for all leases under a single on-balance sheet model similar to the accounting for finance leases under SFAS 30, Leases. The standard includes two recognition exemptions for lessees – leases of "low-value" assets and short term leases (i.e., leases with a term of 12 months or less).

As lessee, the Group adopted SFAS 73 using the modified retrospective approach upon adoption of SFAS 73 on January 1, 2020 and elected to apply the standard to contracts that were previously identified as leases applying SFAS 30 and IFAS. Under the modified retrospective approach, the group has measured the right-of use asset at an amount equal to the lease liability at the date of initial application January 1, 2020

The Group also applied the practical expedient to apply a single discount rate to a portfolio of leases with similar characteristics and the practical expedient to exclude initial direct costs from the right-of-use asset.

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

w. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu. kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan. dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada liabilitas tersebut.

Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan Liabilitas kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini. maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga. piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

x. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun. meliputi antara lain gaji. upah dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja yang akan dibayarkan/terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah yang didiskontokan dan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi dan liabilitas.

Bagian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian kewajiban yang akan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

4.x.1. Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti dan Iuran Pasti

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun setelah memperhitungkan faktor usia masa kerja dan jenjang kepangkatan (golongan) dan nilai kompensasi.

Dalam program ini.manfaat pensiun yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program manfaat pensiun dikelola oleh Dana Pensiun dan iuran pasti dikelola oleh DPLK.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

w. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event. it is probable that the Group will be required to settle the obligation. and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the balance sheet late. taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

The provision is measured using estimated cash flows to settle current liabilities with the carrying amount equal to the present value of the cash flows.

Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation. its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party. a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

x. Employment Benefits

Short Term Employee Benefits

Short term employee benefits are employee benefits payable in less than one year. including the following salaries. wages and social security contributions. The obligation to pay these benefits are recognized at its undiscounted amount and and as an expense in the consolidated statement of comprehensive income for the year and recorded as accrued expenses.

Long Term Employment Benefits

Long term employee benefits are employee benefits that will be paid / payable after workers retire. The obligation to pay these benefits are recognized at amounts discounted and maturing after one accounting period and are recognized as an expense in the consolidated statement of comprehensive income and liabilities.

Part of obligations maturing within one accounting period will be recorded as part of current liabilities and obligations that will mature after one accounting period are recorded as long-term liabilities.

4.x.1. Pension

The Definite Benefit Pension Program and Definite Dues

The defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement after considering factor such as age years of service. rank ladder (grade) and the amount of compensation.

In this program the retirement benefit to be paid is calculated based on the last principal salary and the employee's employment. The retirement benefit Program is managed by pension fund and dues must be managed by DPLK.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

x. Imbalan Kerja (Lanjutan)

4.x.1. Pensiun

Pembayaran kontribusi (iuran dana pensiun) dibiayai oleh karyawan (Peserta) dan Perseroan (Pemberi Kerja). Iuran Dana Pensiun (IDP) beban peserta ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Perseroan.

IDP beban pemberi kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria sesuai dengan kebutuhan dana bagi pembiayaan Program Pensiun setelah dikurangi IDP beban peserta. Perhitungan aktuaria dilakukan secara berkala. sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

Untuk tujuan pelaporan keuangan. imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuaria berdasarkan metode Projected Unit Credit (PUC) seperti yang diharuskan oleh PSAK No. 24 (Revisi 2016) Imbalan Kerja. Untuk tujuan pendanaannya. metode aktuaria yang digunakan adalah Projected Benefit Cost Method dengan capaian usia normal.

Program Pensiun Manfaat Pasti dan Iuran Pasti (Lanjutan)

Seluruh pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

4.x.2. Program Manfaat Karyawan Lainnya

Perseroan juga memberikan imbalan pasca kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan penghargaan / tabungan purna jabatan. program santunan meninggal dan catat. Uang pisah, Tunjangan Hari Tua dan Tunjangan Masa Persiapan Pensiun kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja ini.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***x. Employment Benefits** (Continued)*

4.x.1. Pension

Payment of contributions (pension fund contributions) is financed by employees (Participants) and the Company (Employer). Pension Fund contributions (IDP) of participants' fees are set at 5% of basic pension income and the Company's contribution.

The IDP of the employer's expense is determined based on the actuarial calculation in accordance with the funding requirement for the financing of the Pension Program after deducting the participant's IDP. The actuarial calculations are performed periodically. at least once every three years.

For financial reporting purposes. defined benefit pension plan is calculated using actuarial assumptions based on Projected Unit Credit (PUC) method as required by PSAK No. 24 (Revised 2016). Employee Benefits. For funding purposes. actuarial method used is Projected Benefit Cost Method with attained normal age.

The Definite Benefit Pension Program and Definite Dues (Continued)

The entire remeasurement. consisting of actuarial gains and losses and the yield on pension fund assets (excluding net interest) recognized directly through Other comprehensive income in order for assets or pension liabilities net recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the deficit and surplus pension fund. Remeasurement mengreklasifikasi no profit or loss in subsequent periods.

The entire past service costs are recognized when the first between when the amendment / curtailment occurs or when the cost of restructuring or termination of employment are recognized. As a result. the past service cost not yet vested no longer be deferred and recognized over the vesting period of the future.

4.x.2. Other Employee Benefit Program

The Company also provide other unfunded defined post employment benefit plans such as severance pay, service pay, compensation pay and functional retirement pay death benefit program and record. Money separation. Annuities and Retirement for their qualifying employees based on the Company policies.

These other postemployment benefits are computed based on the salaries and service years of the employees. No funding has been made to this long term benefits.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

x. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (Lanjutan)

4.x.3. Kesejahteraan Karyawan

Untuk mensejahterakan karyawannya PT Pelni (Persero) memiliki beberapa program kesejahteraan. antara lain:

Tantiem

Tantiem dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta dibukukan sebagai beban (expense) tahun berjalan.

Jasa Produksi/Bonus

Bonus dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). dibukukan sebagai beban (*expense*) tahun berjalan.

Cuti Besar dan Cuti Tahunan

Perseroan memberikan kesempatan cuti tahunan (selama 12 hari per tahun) dan cuti besar (selama 30 hari) untuk melengkapi pelaksanaan cuti tersebut. Perseroan memberikan tunjangan cuti tahunan.

Dana Pindah Rumah

Perseroan menyediakan uang pindah bagi karyawan Perusahaan yang dipindahtugaskan dan memasuki masa bebas tugas (MBT).

Asuransi Jiwa dan Jamsostek

Perseroan membiayai program asuransi jiwa bagi karyawan. Perseroan bekerja sama dengan beberapa Perseroan asuransi untuk mendukung program tersebut. Perseroan juga mengikut sertakan karyawannya dalam program jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.

y. Pajak Penghasilan

Beban (manfaat) pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi. kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Beban pajak kini Grup ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

x. Employment Benefits *(Continued)*

Long Term Employment Benefits *(Continued)*

4.x.3. Employee Welfare

For the welfare of their employees PT Pelni (Persero) has several welfare programs such as:

Tantiem

Tantiem is reserved by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (RUPS) charged to the income statement of the current year.

Incentives for Employee/Bonus

Incetives for employee/Bonus is reserved by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (RUPS). charged to expenses of the current year.

Annual and Long Leave

The Company provides annual leave opportunities (for 12 days per year) and long leave (for 30 days) to complete the execution of such leave the Company provides annual vacation allowance.

Relocation Allowance

The company provides the fund for Company's employee who is going to move on his duty free period.

Life Insurance and Jamsostek

The Company entitles its employees in the life insurance program. In supporting this program. the Company has agreement with several insurance companies to provide the insurance products The Company's employees are also entitled to the social security of employee in BPJS Ketenagakerjaan.

y. Income Tax

Expenses (income) tax is the combined sum of current tax and deferred tax are taken into account in determining income in the period. The tax is recognized in the income statement. except when the tax related to the transactions or events directly recognized in equity and other comprehensive income.

Current Taxes

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. The Group's current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pajak Kini (Lanjutan)

Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pospos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Aset dan liabilitas pajak kini diakui jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut. maka kelebihannya diakui sebagai aset. dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Pajak penghasilan tangguhan diakui. dengan menggunakan metode *balance sheet* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

y. Income Tax *(Continued)*

Current Taxes (Continued)

Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income statement because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax assets and liabilities are recognized if the amount of taxes paid for the current period and prior periods exceeds the amount of tax payable for that period. then the excess is recognized as an asset. and if the amount of unpaid taxes is now recognized as a liability.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recoverd from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is decided. Shortage / excess income tax payments are recorded as part of the "Current Tax Expense" in the income statement and other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legal right to offset the recognized amounts and has the intention to finish with a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred Taxes

Deferred income tax is recognized. using the balance sheet method. on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal. sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditinjau kembali pada tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai untuk kompensasi tersebut.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan. kecuali untuk transaksitransaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas. dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perseroan dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

z. Penggunaan Saldo Laba

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/072015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara pasal 8 ayat (1). bahwa Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari:

1) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau

2) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.

Lihat catatan 27 dan 28.

***4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***y. Income Tax** (Continued)*

Deferred Taxes (Continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each consolidated statement of financial position date and is reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction is reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable income would be available.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations. except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax related to transactions both in other comprehensive income or directly charged to shareholders' equity. are recorded in other comprehensive income or equity in question.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

z. The Usage of Retained Earnings

The use of profit balance made on the basis of the decision/treatise of the general Meeting *of Shareholders (AGM).*

As stipulated in regulation of the Minister of State owned enterprises No. PER-02/MBU/7/2017 on the Second amendment of the State Minister of State owned enterprises regulation No. PER-09/MBU/072015 about the Program Partnership and community Development Program *of the State owned enterprises. article 8 paragraph (1) that the Fund partnership Program and Environmental Development Program are sourced from:*

1) Allowance partially net profit of BUMN; and/or

2) Budgets are calculated as cost in BUMN.

See notes 27 and 28.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

aa. Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dihitung setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan asumsi bahwa semua opsi saham dilaksanakan pada saat penerbitan.

ab. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Grup melakukan identifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal tentang komponen Grup yang dianalisa secara berkala oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya berdasarkan segmen dan menilai prestasi mereka.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;

2) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;

3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Untuk tujuan manajemen, Grup membagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen. termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

ac. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian. apabila jumlahnya material telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

aa. Basic Net Earnings (Loss) Per Share

Basic earnings (loss) per share amounts are computed by dividing the profit for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average *number of ordinary shares outstanding during the year.*

Diluted earnings (loss) per share is computed after making necessary adjustments *to the weighted-average number of ordinary shares outstanding assuming the full exercise of employee stock option at the time of issuance*

ab. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing *and presenting the consolidated financial statements.*

Operating segments are required to be identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by *the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.*

An operating segment is a component of an entity:

1) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses;

2) whose operating results are regularly reviewed by the entity's operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and value its performance;

4) for which discrete financial information is available.

For management purposes, the Group are divided into operating segments based on products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of each segment. The segment managers report directly to the management regularly review the operating results as a basis for allocating resources to each of the segments and to assess segment performance.

Additional disclosures on each of the segments contained. incl uding the factors used to identify the reported segments and the measurement basis of segment information.

ac. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Group's financial position at the date of the consolidated statement of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI. PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup pada laporan keuangan konsolidasi. manajemen diminta untuk membuat penilaian estimasi dan asumsi nilai tercatat aset dan liabilitas yang telah disajikan oleh sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut. berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa. pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen. yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi. Grup secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai. maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Provisi kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Akun pinjaman dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES. JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

In the application of the Group accounting policies on consolidated financial statements. management is required to make judgments. estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made by the management. which affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated *financial statements.*

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group accounting *policies that have the significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:*

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets *and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the group accounting policies.*

b. Provision for Impairment of Financial Assets

Provision for impairment of loans and receivables is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables.

The Group assesses specifically at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset have impairment value (uncollectible).

The formed of provision is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is objective evidence of impairment. timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for doubtful accounts is provided on accounts specifically identified as impaired.

Loans and receivables written off are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions will be taken.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI. PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Suatu evaluasi atas piutang. yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk. dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu. saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Grup memiliki akumulasi rugi fiskal dan mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut. Jika hasil pemeriksaan pajak mungkin berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah diestimasi maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun/periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi.

***5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES. JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS** (Continued)*

b. Provision for Impairment of Financial Assets (Continued)

Evaluation on receivables to identify total allowance that should be provided. is performed periodically during the period. Therefore. timing and amount of allowances for impairment value of doubtful accounts recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group has accumulated fiscal loss and recognized deffered tax asset on those fiscal loss. The final tax outcome of the tax audit is different from the amounts that were initially estimated such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values and the disclosure requires the use of estimates.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI. PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar suku bunga). sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Tak berwujud

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud adalah berdasarkan penelaahan Group terhadap praktek industri evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik. keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

Tetapi adalah mungkin hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud akan meningkatkan beban penyusutan dan menurunkan nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud selama tahun berjalan.

c. Penurunan Nilai Harga Perolehan Diamortisasi

Grup menilai penurunan nilai harga perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Grup membuat penilaian apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES. JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(Continued)*

Estimates and Assumptions *(Continued)*

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities (Continued)

Significant component of fair value measurement is determined based onobjective evidence derived from diversification (i.e. foreign exchange interest rate). while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are disclosed in Note to Consolidated Financial Statements.

b. Estimated Useful Lives of Property and Equipment and Intangible Assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on The Group assessment of industry practice. internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each of ending financial period and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear. technical or commercial obsolence and legal or other limitations on the use of the assets.

It is possible however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.The decline in the estimated useful lives of fixed assets and intangible assets will increase depreciation and reduce the carrying value of fixed assets and intangible assets.

There is no change in the estimated useful lives of property and equipment and intangible assets during the year.

c. Impairment of Cost Ammortized

The Group assess for impairment of cost ammortized at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss. The group makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI. PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

c. Penurunan Nilai Harga Perolehan Diamortisasi (Lanjutan)

Grup juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

d. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Penelaahan penurunan nilai dilakukan bila terdapat indikasi adanya penurunan nilai. Penentuan nilai wajar aset memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari penggunaan berkelanjutan dan pelepasan aset tersebut.

Setiap perubahan signifikan pada asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dapat memberikan dampak yang material terhadap penilaian nilai yang terpulihkan dan setiap kerugian penurunan nilai yang dihasilkan dapat memberikan dampak terhadap hasil operasi.

Nilai tercatat properti investasi. alat produksi dan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

e. Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas dan manfaat pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah kewajiban dan imbalan tersebut. Asumsi yang digunakan mencakup antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Walaupun Grup berpendapat bahwa asumsi yang digunakan wajar dan dapat diandalkan. perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat secara material mempengaruhi jumlah liabilitas imbalan pasti pasca kerja Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, liabilitas imbalan pascakerja.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES. JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(Continued)*

Estimates and Assumptions *(Continued)*

c. Impairment of Cost Ammortized (Continued)

The Group also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

d. Impairment of Non Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets.

Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying amounts of investment properties. production equipment and fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 are disclosed in the notes to consolidated financial statements.

e. Post Employment Benefits

The determination of the obligation and post employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts its liabilities and benefit. Those assumptions are described include, among others discount rate and rate of salary increase.

Although the Group believes that assumptions used are reasonable and reliable. significant differentiation on actual results or significant changes in assumptions can materially affect of amount of Company's postemployment benefits liabilities. As of December 31, 2020 and 2019, long term employee benefits liability.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI. PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan

Dalam situasi tertentu, Perseroan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan intepretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti. Perseroan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 (R-2017). “Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi”.

g. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan.

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

h. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan Usang dan Bergerak Lambat

Cadangan persediaan usang dan bergerak lambat diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia. termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES. JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(Continued)*

Estimates and Assumptions *(Continued)*

f. Income Taxes

In certain circumstances, the Company may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by or negotiations with the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining of amount that must be recognized in related with uncertain tax liabilities. that Company applied of same considerations that they will use it in determining of reserves amount that must be recognized in accordance with PSAK 57 (R-2017). "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets".

g. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized.

Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies.

h. Allowance for obsolete and slow moving inventories

Allowance for obsolete and slow moving inventories is estimated based on the best available facts and circumstances including but not limited to the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

6. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLDIASI

Pada tahun 2020, manajemen Perseroan telah memutuskan untuk menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disebabkan oleh adanya koreksi dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan perintis dan angkutan barang (Tol Laut). Sesuai Pernyataan Standar Akutansi Keuangan, manajemen telah menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2019 dan laporan posisi keuangan tahun 2018, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

6. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In 2020, the Company's management has decided to restate the financial statements for the years ended December 31, 2019 and 2018 in accordance with correction of error from pioneer transportation Activities and sea freight (Sea Toll). Appropriate with Financial Accounting Standard, management has decided to restate financial statement in 2019 and financial position report in 2018, as follow:

	31 Desember 2018 / *December 31, 2018*			
	Sebelum penyajian kembali / *before restatement*	**Penyesuaian / *adjustment***	**Setelah penyajian kembali / *after restatement***	
Laporan posisi keuangan				***Statements of financial position***
Liabilitas				***Liability***
Beban Akrual	84.667.991.107	80.797.755.923	165.465.747.030	*Accrued Expenses*
Ekuitas				***Equity***
Saldo Rugi (Defisit)	(2.323.451.656.541)	(80.797.755.923)	(2.404.249.412.464)	*Accumulated Deficit*

	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*			
	Sebelum penyajian kembali / *before restatement*	**Penyesuaian / *adjustment***	**Setelah penyajian kembali / *after restatement***	
Laporan Posisi Keuangan				***Statements of financial position***
Liabilitas				***Liability***
Beban Akrual	169.960.002.155	105.809.922.036	275.769.924.191	*Accrued Expenses*
Ekuitas				***Equity***
Saldo Rugi (Defisit)	(2.321.973.910.877)	(105.772.090.701)	(2.427.746.001.578)	*Retained Earnings (Deficit)*
Kepentingan Non Pengendali	3.043.025.693	(37.831.334)	3.005.194.359	*Non Controlling Interest*

	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*			
	Sebelum penyajian kembali / *before restatement*	**Penyesuaian / *adjustment***	**Setelah penyajian kembali / *after restatement***	
Laporan Laba Rugi dan Komperhensif Lainnya				***Statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan Usaha	5.565.197.166.533	(17.445.899.239)	5.547.751.267.294	*Operating Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	553.566.006.572	7.566.266.873	561.132.273.445	*General and Administrative Expenses*
Laba Bersih Tahun Berjalan	**205.767.156.497**	**25.012.166.112**	**180.754.990.385**	***Profit for the Current Year***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

7. KAS DAN SETARA KAS / *7. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2020	2019	
Kas			***Cash***
Rupiah	5.137.744.258	6.502.465.608	*Rupiah*
Valuta Asing (2020: USD 98.99 ; SGD 1.219.80 2019: USD 1.958.80 ; SGD 32.18)	14.360.519	27.569.749	*Foreign Currency (2020: USD 98.99 ; SGD 1.219.80 and 2019: USD 1.958.80; SGD 32.18)*
Jumlah Kas	**5.152.104.777**	**6.530.035.357**	***Total Kas***
Bank			***Bank***
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero). Tbk	204.351.586.470	238.651.062.501	*PT Bank Mandiri (Persero). Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk	101.373.356.200	-	PT Bank Tabungan Negara *(Persero). Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk	60.960.925.673	37.316.766.764	*PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk	26.304.726.542	57.729.490.209	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk*
Sub Jumlah	**392.990.594.885**	**333.697.319.474**	***Sub Total***
Bank			***Bank***
Pihak berelasi			***Related parties***
Valuta Asing			*Foreign Exchange*
PT Bank Mandiri (Persero). Tbk (2020: USD 1.873.178 dan 2019: USD 1.943.433)	26.421.179.075	26.457.889.340	PT Bank Mandiri (Persero). Tbk *(2020: USD 1,873,178 and 2019: USD 1,943,433)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk (2020: USD 33.600 ; SGD 32.932; EUR 6.680 dan 2019: USD 34.362; SGD 3.035; EUR 6.710)	940.236.595	628.317.708	*PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk (2020: USD 33,600 ; SGD 32,932; EUR 6.680 and 2019: USD 34.362; SGD 3.035 ; EUR 6,710)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk (2020: USD 10.860 dan 2019: USD 10.936)	153.180.300	151.495.044	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk (2020: USD 10,860 and 2019: USD 10,936)*
Sub Jumlah	**27.514.595.970**	**27.237.702.092**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Central Asia. Tbk	491.079.479	754.705.171	*PT Bank Central Asia. Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	-	39.542.028.173	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank DKI	-	8.641.512	*PT Bank DKI*
PT Bank Panin. Tbk	-	19.106.383	*PT Bank Panin.Tbk*
PT Bank Jabar Banten Tbk	288.255.466	-	*PT Bank Jabar Banten Tbk*
Sub Jumlah	**779.334.945**	**40.324.481.239**	***Sub Total***
Jumlah Bank	**421.284.525.800**	**401.259.502.806**	***Total Bank***

7. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / *7. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)*

	2020	2019	
Deposito			***Deposit***
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero). Tbk	251.925.000.000	153.925.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero). Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk	709.600.000.000	634.600.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk	696.900.000.000	470.600.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk	200.000.000.000	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero). *Tbk*
Jumlah Deposito	**1.858.425.000.000**	**1.259.125.000.000**	***Total Deposit***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**2.284.861.630.577**	**1.666.914.538.163**	***Total Cash & Equivalents***

Tingkatan bunga deposito Rupiah per tahun berkisar antara 3,50% - 7,75% pada tahun 2020 dan 4,25% - 7,5% pada tahun 2019.

The interest rate per year of Rupiah deposits ranged between 3,50% - 7,75% in 2020 and 4,25% - 7,5% in 2019.

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perseroan dan entitas anak dan tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaan.

The entire cash and cash equivalents of the Company and subsidiaries are not pledged as collateral for liabilities and other loans and there are no restrictions for use.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 42.

Explanations of related parties refer to Notes 42.

8. PIUTANG USAHA / *8. ACCOUNTS RECEIVABLE*

a. Berdasarkan pelanggan / *a. Based on the customer*

	2020	2019	
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
Kementerian Perhubungan CQ	141.785.155.892	-	*Kementerian Perhubungan CQ*
Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut	12.879.045.000	16.706.944.877	*Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut*
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	8.987.222.242	19.001.214.242	*Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni*
PT Indonesia Power	1.351.988.325	-	*PT Indonesia Power*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	860.817.498	860.817.498	*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
PT Nindya Karya (Persero)	580.023.280	2.873.587.500	*PT Nindya Karya (Persero)*
JKN – BPJS	-	103.381.379.581	*JKN - BPJS*
PT Pupuk Kaltim (Persero)	-	939.985.408	*PT Pupuk Kaltim (Persero)*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	813.735.563	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
PT Sarana Gama Sejahtera	-	609.461.953	*PT Sarana Gama Sejahtera*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		537.552.344	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Lain-lain (dibawah Rp500 juta)	1.603.340.847	2.828.855.519	*Others (below Rp500 Million)*
Sub Jumlah	**168.047.593.084**	**148.553.534.485**	***Sub Total***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

8. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

***8. ACCOUNTS RECEIVABLE** (Continued)*

a. Berdasarkan pelanggan (Lanjutan)

***a. Based on the customer** (Continued)*

	2020	2019	
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
PT Luna Daya Sejahtera	17.558.850.000	-	*PT Luna Daya Sejahtera*
PT Putra Master	5.446.301.318	4.661.209.391	*PT Putra Master*
CV Tri Putra Mandiri	4.164.519.105	1.966.339.800	*CV Tri Putra Mandiri*
PT Armada Rock Karunia (ARK)	3.034.195.200	3.755.695.595	*PT Armada Rock Karunia (ARK)*
PT PP Urban	2.741.966.270	832.575.000	*PT PP Urban*
PT Mahesa Bahari International	2.112.467.567	-	*PT Mahesa Bahari International*
CV Indotrad Berkah Mandiri	1.896.596.915	1.285.096.040	*CV Indotrad Berkah Mandiri*
PT PKM	1.663.516.384	-	*PT PKM*
PT Geoprec Indonesia	1.603.881.628	860.066.913	*PT Geoprec Indonesia*
PT Jembatan Nusantara	1.408.806.017	3.141.607.202	*PT Jembatan Nusantara*
PT Wahana Anugrah Pratama	1.326.282.807	-	
CV MJP Log	1.302.107.650	-	
PT Bahtera Setia	1.293.389.978	2.225.025.783	*PT Bahtera Setia*
PT MNS	1.034.414.286	2.356.549.210	*PT MNS*
PT Tiga Lentera Abadi	936.910.554	932.637.554	*PT Tiga Lentera Abadi*
Sinar Jaya Wijaya	881.675.852	1.120.335.263	*Sinar Jaya Wijaya*
CV Fazza Mitra Usaha	864.790.750	-	*CV Fazza Mitra Usaha*
PT Atosim Lampung Pelayaran	815.291.650	815.291.650	*PT Atosim Lampung Pelayaran*
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	803.936.410	875.731.023	*PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk*
PT Aman Mandiri	802.988.350	890.488.350	*PT Aman Mandiri*
CV Yoga Pratama Jaya	797.076.326	-	*CV Yoga Pratama Jaya*
PT Guheba Indonesia	729.978.678	787.675.678	*PT Guheba Indonesia*
Carnival Uk (MV. Arcadia)	714.619.387	704.283.878	*Carnival Uk (MV. Arcadia)*
PT Karya Bangun Tiga Bersaudara	686.400.000	-	*PT Karya Bangun Tiga Bersaudara*
PT Karya Retra	683.981.360	718.981.360	*PT Karya Retra*
PT Multi Guna Shipping	654.300.000	-	*PT Multi Guna Shipping*
UD Putra Sanjaya Cileungsi	651.779.330	-	*UD Putra Sanjaya Cileungsi*
Alamsyah	622.255.570	861.597.950	*Alamsyah*
PT Indomarco Prismatama	619.717.880	-	*PT Indomarco Prismatama*
PT Pewete Bahtera Kencana	595.234.300	605.234.300	*PT Pewete Bahtera Kencana*
PT Prima Sejahtera Line	587.948.806	392.170.359	*PT Prima Sejahtera Line*
PT Spil	574.273.232	-	*PT Spil*
PT Wahana Ria Chakrawala	565.807.140	-	*PT Wahana Ria Chakrawala*
PT Arjuna Mitra Persada	556.976.400	-	*PT Arjuna Mitra Persada*
CV Anambas Expedisi	-	902.580.895	*CV Anambas Expedisi*
Ratna Nawaripi	-	577.327.200	*Ratna Nawaripi*
PT Parani Artamandiri	-	1.689.610.000	*PT Parani Artamandiri*
PT PEL. Trip	-	831.245.705	*PT PEL. Trip*
PT PLN Batubara	-	814.618.377	*PT PLN Batubara*
PT Polsasu Indah	-	796.400.000	*PT Polsasu Indah*
PT Jejak Jelajah Negeri	-	682.346.753	*PT Jejak Jelajah Negeri*
PT Adi Bahari Nuansa	-	644.991.040	*PT Adi Bahari Nuansa*
PT Prima Eksekutif	-	602.334.902	*PT Prima Eksekutif*
Lainnya (dibawah Rp500 juta)	76.994.256.032	53.694.375.769	*Others (below Rp500 Million)*
Sub Jumlah	**137.727.493.132**	**91.024.422.940**	***Sub Total***
Jumlah	**305.775.086.216**	**239.577.957.425**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(24.607.838.762)	(7.089.686.477)	*Provision for Impairment Losses*
Jumlah	**281.167.247.454**	**232.488.270.948**	***Total***

8. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

a. Berdasarkan pelanggan (Lanjutan)

Piutang kepada Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut merupakan piutang atas penugasan pemerintah.

Piutang kepada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut merupakan piutang atas program "Mudik Gratis" untuk mengangkut kendaraan bermotor di dalam kapal.

Piutang pada PT Luna Daya Sejahtera merupakan piutang PT Sarana Bandar Nasional atas kegiatan usahanya.

Piutang kepada YKPP merupakan piutang atas transaksi sewa ruangan, Toko/Kafe, dan Mini Teater di kapal.

Piutang kepada PT Putera Master dan PT Jembatan Nusantara merupakan piutang atas Floating Repair Docking di SBU Galangan Pelni Surya.

Piutang kepada PT Samudera Energi Tangguh merupakan transaksi atas penyewaan kapal milik PT Pelni (Persero).

Piutang kepada PT Solusi Integrasi Utama merupakan transaksi atas sewa ruangan di gedung PT Pelni (Persero) yang bertempat di Kemayoran. Jakarta.

Terdapat piutang usaha Entitas Anak (PT Rumah Sakit Pelni) yang dijadikan jaminan atas pinjaman Entitas Anak (PT Rumah Sakit Pelni) pada tahun 2019.

Piutang usaha Entitas Anak (PT Rumah Sakit Pelni) sejumlah Rp53.000.000.000 dijadikan jaminan sehubungan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2019.

Piutang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS) PT RS Pelni merupakan piutang atas tagihan pelayanan terhadap pasien peserta program jaminan kesehatan nasional Pemerintah Indonesia untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia secara nasional.

Piutang PT Rumah Sakit Pelni kepada YKPP merupakan piutang atas pelayanan kesehatan yang diperoleh pensiunan pegawai PT Rumah Sakit Pelni dan PT Pelni (Persero) yang akan ditagihkan kepada YKPP. Piutang kepada PT Pelni (Persero) merupakan piutang atas pelayanan kesehatan pegawai PT Pelni (Persero).

***8. ACCOUNTS RECEIVABLE** (Continued)*

***a. Based on the customer** (Continued)*

Receivables from Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut is receivables assigned from the government.

Receivables to Satker the Directorate of Sea Freight Traffic is a receivable on the "Mudik Gratis" program for transporting motor vehicles on board.

Receivables from PT Luna Daya Sejahtera are receivables from PT Sarana Bandar Nasional for their business activities.

Receivable to YKPP are receivables for rent, Shop/Café, and Mini Theater transactions on board.

Receivables to PT Putera Master and PT Jembatan Nusantara are receivables on Floating Repair Docking at SBU Surya Pelni Shipyard.

Receivables to PT Samudera Energi Tangguh are transactions on the rental of ships owned by PT Pelni (Persero).

The receivables to PT. Solusi Integrasi Utama is a deal on renting a room in the building of PT Pelni (Persero) located in Kemayoran. Jakarta.

Trade receivables in Subsidiaries (PT Rumah Sakit Pelni) are pledged as collateral for the loans of Subsidiaries (PT Rumah Sakit Pelni) in 2019.

Trade receivables Subsidiaries (PT Rumah Sakit Pelni) of Rp53.000.000.000 made a guarantee in respect of credit facilities obtained from PT Bank Syariah Mandiri in 2019.

The National Health Insurance Receivables (JKN-BPJS) PT RS Pelni are receivables for service bills against patients participating in the government's National Health Care Security Program to ensure the health of Indonesian people nationwide.

PT Rumah Sakit Pelni receivable to YKPP are receivables from health services obtained by retired PT Rumah Sakit Pelni employees and PT Pelni (Persero) which will be billed to YKPP. Receivables from PT Pelni (Persero) represent receivables from the health services of PT Pelni (Persero) employees.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

8. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

b. Berdasarkan jenis usaha

***8. ACCOUNTS RECEIVABLE** (Continued)*

b. Based of type business

	2020	2019	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Perkapalan	195.019.678.187	38.653.162.399	*Shipping*
Perhotelan	-	428.453.000	*Hospitality*
Perbengkelan	11.235.384.430	12.269.300.395	*Workshop*
Usaha Lainnya	16.270.660.098	21.210.753.587	*Others*
Sub Jumlah	**222.525.722.714**	**72.561.669.381**	***Sub Total***
Dikurangi:			*Less:*
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(11.174.283.620)	(4.478.223.744)	*Provision for Expected Credit Loss*
Sub Jumlah	**211.351.439.095**	**68.083.445.637**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
PT Rumah Sakit Pelni	-	124.046.642.904	*PT Rumah Sakit Pelni*
PT Sarana Bandar Nasional	50.913.826.497	37.895.869.081	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	32.335.537.004	5.073.776.059	*PT Pelita Indonesia Djaya*
	83.299.363.501	**167.016.288.044**	
Dikurangi:			*Less:*
Provisi penurunan nilai	(13.433.555.142)	(2.611.462.733)	*Provision for Expected Credit Loss*
Sub Jumlah	**69.815.808.359**	**164.404.825.311**	***Sub Total***
Jumlah	**281.167.247.454**	**232.488.270.948**	***Total***

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai selama tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Movements of provision for expected credit losses during 2020 and 2019 as follows:

	2020	2019	
Saldo Awal	7.089.689.477	7.899.955.168	*Beginning Balance*
Dampak Implementasi PSAK 71	14.682.167.740	-	*Effect Implementation of FSAS 71*
Provisi Tahun Berjalan	4.771.984.360	2.212.415.816	*Provision*
Penghapusan (Pemulihan)	(1.935.999.815)	(3.022.684.507)	*Reserved (Recovery)*
Saldo akhir	**24.607.838.762**	**7.089.689.477**	***Ending Balance***

Terhadap piutang usaha yang berasal dari pihak-pihak berelasi. Perseroan tidak membentuk cadangan provisi atas penurunan nilai karena manajemen berkeyakinan jumlah piutang tersebut dapat tertagih.

Toward accounts receivable from the related parties. the Company did not set up a reserve provision for impairment as management believes the amount of such receivables are collectible.

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, Manajemen berkeyakinan bahwa provisi kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on a review at the end of the year management believes that the provision for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 42.

Explanations of related parties refer to Notes 42.

9. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA / *9. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS*

		2020	2019		
a.	Aset Kontrak	487.629.159.160	575.676.967.106	*Contract Asset*	*a.*
b.	Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	167.092.190.530	167.606.305.485	*Restricted Cash and Cash Equivalent*	*b.*
c.	Piutang Lain-lain	9.716.785.112	13.524.353.342	*Other Receivables*	*c.*
d.	Penempatan Jangka Pendek	2.057.300.000	5.000.000.000	*Short Term Investment*	*d.*
Jumlah		**666.495.434.802**	**761.807.625.933**	***Total***	

a. Rincian Aset Kontrak / *a. Detail of Contract Assets*

	2020	2019	
Public Service Obligation (PSO) dan subsidi	383.902.795.827	360.391.773.035	*Public Service Obligation (PSO) and subsidies*
PT. Haka Aston	61.159.448.169	109.784.911.032	*PT Haka Aston*
Usaha Penunjang	38.258.398.296	5.774.570.591	*Supporting Business*
Pelayanan kesehatan	-	95.234.499.863	*Health Service*
PT. DSN	355.218.011	409.630.011	*PT DSN*
Lainnya	3.953.298.857	4.081.582.574	*Others*
Jumlah	**487.629.159.160**	**575.676.967.106**	***Total***

Aset Kontrak Public Service Obligation (PSO) dan subsidi merupakan pendapatan PSO dan subsidi tahun berjalan yang belum terealisasi pencairan dananya sampai dengan akhir tahun berjalan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN) (BABUN-BPP) Tahun 2020 Nomor : SP DIPA – 999.07.1.985120/2020 pada tanggal 20 Desember 2019 dan Tahun Anggaran 2019 No. SP DIPA-999.07.1.985120/2019 tanggal 28 Desember 2018.

Contract Asset Public Service Obligation (PSO) PSO and subsidies are PSO income and subsidy for the unrealized year of disbursements until the end of the year in accordance with the implementation of the budget Treasury general (DIPA-BUN) (BABUN-BPP) in 2020 Nomor : SP DIPA – 999.07.1.985120/2020 Dated on December 20, 2019 and of the year ended 2019 No. SP DIPA- 999.07.1.985120/2019 Dated on December 28, 2018.

Pada tahun 2019, Aset Kontrak pelayanan kesehatan merupakan tagihan/klaim pada Entitas Anak PT Rumah Sakit Pelni atas pasien Jaminan Kesehatan Nasional.

On 2019, Revenues are still to be received health services is a bill / claim on Subsidiary PT Rumah Sakit Pelni on the National Health Insurance patients.

Aset Kontrak pada PT Sarana Bandar Nasional merupakan pengakuan pendapatan atas kegiatan pelayanan bongkar muat tol laut. crane dan refeer container yang pada akhir Desember 2020 dan 2019. Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun. manajemen berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pembentukan provisi kerugian penurunan nilai karena jangka waktu pekerjaan masih berlangsung setelah akhir tahun .

Contract Asset by PT Sarana Bandar Nasional is recognition of revenues for the activities of loading and unloading sea toll. crane and refeer containers at the end of December 2020 and 2019. Based on the results of the study at the end of the year management argues that there is no need to do establishment of impairment losses due to the term of employment still lasts after the end of the year.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and For The Year Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

b. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas setara kas yang dicadangkan untuk tujuan tertentu seperti bank garansi. jaminan pelaksanaan dan sebagainya yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya terdiri dari:

***9. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS** (Continued)*

b. Restricted Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents Restricted cash equivalents represent cash reserved for specific purposes such as bank guarantees. performance bonds and so the term of 1 year or less. Cash and cash equivalents restricted as follows:

	2020	2019	
Pihak berelasi :			***Related parties :***
Giro – Rupiah			*Giro - Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero). Tbk	-	4.110.804.878	*PT Bank Mandiri (Persero). Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk	-	930.460.637	*PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk*
Sub Jumlah	**-**	5.041.265.515	***Sub Total***
Pihak berelasi :			***Related parties :***
Deposito – Rupiah			***Deposit - Rupiah***
PT Bank Mandiri (Persero). Tbk	160.000.000.000	160.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero). Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk	-	342.391.990 -	*PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk*
Sub Jumlah	**160.000.000.000**	**160.342.391.990**	***Sub Total***

	2020	2019	
Pihak berelasi :			***Related parties :***
Bank Garansi – Rupiah			*Bank Guarantee - Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero). Tbk	1.782.098.540	2.217.347.980	*PT Bank Mandiri (Persero). Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk	5.000.000	5.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**6.787.098.540**	**2.222.347.980**	***Sub Total***
Pihak ketiga :			***Third parties :***
Deposito – Rupiah			***Deposit - Rupiah***
PT Tirta Investama	-	300.000	*PT Tirta Investama*
CV Nam	55.000.000	-	*CV Nam*
Lainnya	250.091.990	-	*Others*
Sub Jumlah	**305.091.990**	300.000	***Sub Total***
Jumlah	**167.092.190.530**	**167.606.305.485**	***Total***

Deposito pada PT Bank Mandiri (Persero). Tbk sebesar Rp160.000.000.000 merupakan saldo dana Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2020 dan 2019.

Deposits of PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. of Rp160.000.000.000 are the balances of the state capital participation funds as of December 31, 2020 and 2019.

Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., merupakan dana Pelaksanaan Pengadaan Pengangkutan Barang Berharga Milik Negara Bank Indonesia.

Bank Guarantee of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., are the funds for the state Bank Indonesia's valuables administration.

9. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (Lanjutan) / ***9. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS*** *(Continued)*

c. Piutang Lain-Lain / ***c. Other Receivables***

	2020	2019	
Pihak berelasi :			***Related parties :***
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	1.530.400.369	1.530.400.369	*Pelni Pensioners Health Foundation*
PT Pelabuhan Indonesia III	591.614.420	-	*PT Pelabuhan Indonesia III*
Pegawai	4.481.945.075	6.021.260.219	*Employee*
Lainnya	4.128.478.595	1.382.360.719	*Others*
Sub Jumlah	**10.732.438.459**	**8.934.021.307**	***Sub Total***
Pihak ketiga :			***Third parties :***
PT Asuransi Purna Arthanugraha	-	711.322.233	*PT Asuransi Purna Arthanugraha*
Koperasi Karyawan Sejahtera	1.193.905.657	686.870.996	*Koperasi Karyawan Sejahtera*
Lainnya	3.886.076.846	3.550.153.963	*Others*
Sub Jumlah	**5.079.982.503**	**4.948.347.192**	***Sub Total***
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(6.095.635.850)	(358.015.157)	*Provision for Impairment Losses*
Sub Jumlah	**(6.095.635.850)**	**(358.015.157)**	***Sub Total***
Jumlah	**9.716.785.112**	**13.524.353.342**	***Total***

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai tahun 2020 dan 2019. sebagai berikut:

Movements of allowance for impairment losses of 2020 and 2019. as follows:

	2020	2019	
Saldo Awal	358.015.157	176.105.864	*Beginning Balance*
Dampak PSAK 71	4.809.769.831	-	*Effect of PSAK 71*
Pembentukan Provisi	927.850.862	181.909.293	*Reserved (Recovery) Provision*
Saldo akhir	**6.095.635.850**	**358.015.157**	***Ending Balance***

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Based on a review at the end of the year. management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on other receivables uncollectible.

d. Penempatan Jangka Pendek / ***d. Short Term Invesment***

Merupakan deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan namun tidak lebih dari dua belas bulan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk oleh Entitas Anak PT Sarana Bandar Nasional dan PT Pelita Indonesia Djaya sebesar Rp 2.057.300.000 dan Rp 5.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Is a time deposit of more than 3 (three) months but not more than twelve months in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk by Subsidiaries of *PT Sarana Bandar Nasional and PT Pelita Indonesia Djaya amounting to Rp2.057.300.000 and Rp 5.000.000.000 as of December 31, 2020 and 2019.*

Tingkat bunga per tahun deposito Rupiah sebesar 3.5% dan 7% pada tahun 2020 dan 2019.

Interest rate per year rupiah deposits by 3.5% and 7% in 2020 and 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

10. PERSEDIAAN / *10. INVENTORIES*

	2020	2019	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Suku cadang	349.487.179.905	331.245.176.320	*Spareparts*
Bahan bakar	35.516.396.305	44.344.699.670	*Fuel*
Pelumas	23.148.881.305	26.827.758.865	*Lubricants*
Makanan	4.367.894.791	6.127.237.291	*Food*
Tiket Penumpang	5.178.879.365	4.981.075.047	*Passenger Ticket*
Lainnya	471.349.967	415.543.404	*Others*
Sub Jumlah	**418.170.581.638**	**413.941.490.597**	***Sub Total***

	2020	2019	
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	14.708.563.106	17.551.540.481	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Rumah Sakit Pelni	-	9.169.990.463	*PT Rumah Sakit Pelni*
PT Pelita Indonesia Djaya	3.552.398.632	5.084.216.218	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah	**18.260.961.738**	**31.805.747.162**	***Sub Total***
Jumlah	**436.431.543.376**	**445.747.237.759**	***Total***

Persediaan yang tercatat pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan persediaan *Pelnimart,* Alat Bongkar Muat Non Mekanik, Barang Cetakan dan Alat Tulis Kantor.

The supplies listed on the subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) are the supply of Pelnimart, a Non-mechanical stevedoring equipment printed goods and stationery.

Persediaan obat-obatan pada entitas anak PT Rumah Sakit Pelni senilai Rp9.169.990.463 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Catatan 26).

The supply of medicines to the subsidiary PT Rumah Sakit Pelni worth Rp9.169.990.463 is used as collateral for credit facilities obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (note 26).

Persediaan yang tercatat pada entitas anak (PT Pelita Indonesia Djaya) merupakan persediaan bahan makanan dan cairan pembersih/*chemical.*

The supplies listed in subsidiaries (PT Pelita Indonesia Djaya) are supplies of foodstuffs and liquid/chemical cleaners.

Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kemalingan dan resiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perseroan terletak pada beberapa lokasi sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah tidak signifikan.

Inventories are not insured against fire. burglary and other risks. Management believes that. the company's inventory is located in several locations so the possibility of a loss in the same time to multiple locations is not Significant.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau nilai pemulihan aset dan tidak terdapat persediaan usang pada komponen aset lancar.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed replacement or recovery value of assets and there are no obsolete inventories in current assets component.

Persediaan usang telah dilakukan reklasifikasi kedalam aset tidak lancar lainnya.

Inventory obsolescence is reclase into other noncurrent assets.

11. PERPAJAKAN / *11. TAXATION*

a. Pajak Dibayar Dimuka / *a. Prepaid Taxes*

	2020	2019	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Pajak Penghasilan Pasal 28(a)			*Income Tax Article 28(a)*
2020	8.521.815.213	-	*2020*
2019	-	7.731.974.317	*2019*
2018	-	8.259.285.009	*2018*
Pajak Lainnya	5.983.898.016	115.170.928	*Other Tax*
Sub Jumlah	**14.505.713.229**	**16.106.430.254**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
Pajak Penghasilan Pasal 28(a)	846.436.608	-	*Income Tax Article 28(a)*
Pajak Pertambahan Nilai	10.279.134.875	27.654.417.526	*Value Added Tax*
Sub Jumlah	**11.125.571.483**	**27.654.417.526**	***Sub Total***
Jumlah	**25.631.284.712**	**43.760.847.780**	***Total***

Pada Tanggal 15 April 2021, Perseroan menerima Surat Keterangan Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan untuk masa Pajak 2019 dengan nomor: 00015/406/19/093/21 sebesar Rp6.706.778.317 di tahun 2021.

On April 15, 2021. the Company received on Overpayment Tax assessment letter on income Tax for the year 2019 tax period with number: 00015/406/19/093/21 amounting to Rp6,706,778,317 in 2021.

Pada Tanggal 24 Juni 2020, Perseroan menerima Surat Keterangan Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan untuk masa Pajak 2018 dengan nomor: 00039/406/18/093/20 sebesar Rp 8.372.089.917, terdapat selisih penerimaan yang diakui perseroan, atas selisih tersebut dibebankan pada Laporan Laba Rugi tahun 2020.

On June 24, 2020, the Company received on Overpayment Tax assessment letter on income Tax for the year 2018 tax period with number: 00039/406/18/093/20 amounting to Rp 8.372.089.917, There is overpayment difference that is recognized by the company, the difference was charged in the Profit and Loss during the year 2020.

Pajak dibayar dimuka atas pajak lainnya merupakan pajak PPh pasal 15 yang lebih dibayar oleh Perseroan, dimana dilakukan restitusi Peseroan.

The tax paid upfront on other taxes is an Tax Income article 15 that overpaid by Corporate, its on process restitution.

b. Utang Pajak / *b. Tax Payable*

	2020	2019	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Pajak Pertambahan Nilai	1.857.884.570	9.636.961.974	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 21	7.653.446.786	9.264.062.377	*Tax Income Article 21*
Pajak Penghasilan Pasal 15	6.169.219.130	7.738.067.823	*Tax Income Article 15*
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.063.011.005	1.135.134.644	*Tax Income Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 22	1.057.366.506	759.783.260	*Tax Income Article 22*
Pajak Penghasilan Pasal 25	298.745.217	517.724.987	*Tax Income Article 25*
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	69.719.532	77.157.896	*Tax Income Article 4 Paragraph 2*
Pajak Daerah	51.670.885	71.997.354	*Local Tax*
Sub Jumlah	**18.221.063.631**	**29.200.890.315**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
Pajak Pertambahan Nilai	3.660.863.895	3.399.694.591	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 25	815.682.364	6.112.089.707	*Tax Income Article 25*
Pajak Penghasilan Pasal 29	391.615.067	5.774.711.322	*Tax Income Article 29*
Pajak Penghasilan Pasal 21	847.368.319	3.701.792.256	*Tac Income Article 21*
Pajak Penghasilan Pasal 23	117.992.829	587.388.033	*Tax Income Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	76.871.241	266.423.651	*Tax Income Article 4 Paragraph 2*
Pajak Penghasilan Pasal 15	-	40.800.000	*Tax Income Article 15*
Pajak Lainnya	42.818.727	42.818.727	*Other Tax*
Sub Total	**5.953.212.442**	**19.925.718.287**	***Sub Total***
Jumlah	**24.174.276.073**	**49.126.608.602**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***11. TAXATION*** *(Continued)*

c. Beban (Manfaat) Pajak / ***c. Tax Expense (Benefit)***

	2020	2019	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Beban Pajak Final	43.982.228.845	47.811.156.238	*Final Tax Expense*
Beban (Manfaat) Tangguhan	(15.061.182.233)	15.753.798.333	*Deffered Tax Expense (Benefits)*
Beban Pajak Kini	-	2.000.237.000	*Current Tax Expense*
Sub Jumlah	**28.921.046.612**	**65.565.191.571**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
Beban Pajak Final	-	797.905.726	*Final Tax Expense*
Beban PajakTangguhan	830.151.474	688.575.338	*Deffered Tax Expense*
Beban Pajak Kini	19.354.719.391	44.798.001.720	*Current Tax Expense*
Sub Jumlah	**20.184.870.865**	**46.284.482.784**	***Sub Total***
Jumlah	**49.105.917.477**	**111.849.674.355**	***Total***

d. Rekonsiliasi Fiskal / ***d. Fiscal Reconciliation***

	2020	2019	
Laba sebelum pajak penghasilan entitas Induk	59.658.389.850	245.699.788.505	*Profit before income tax of the Parent Entity*
Bagian laba entitas anak yang telah dipungut pajak penghasilan dan PPh Final	(72.733.008.686)	(129.124.494.701)	*Income from subsidiaries And Final tax*
Sub Jumlah	**(13.074.618.836)**	**116.575.293.804**	***Sub Total***
Perbedaan temporer:			***Temporary Differrences:***
Liabilitas imbalan pasca kerja	23.150.826.516	8.699.292.255	*Employee Benefits Liability*
Penyisihan piutang usaha	3.059.143.430	2.394.325.109	*Receivable Allowance*
Penyusutan aset tetap	-	86.761.929	*Fixed Assets Depreciation*
Sub Jumlah	**26.209.969.946**	**11.180.379.293**	***Sub Total***
Perbedaan permanen:			***Permanent Differences:***
PPh 21 ditanggung Entitas	51.341.903.214	17.351.227.405	*Income tax article 21 by entity*
Beban pemasaran	3.831.743.571	3 .551.936.769	*Marketing expenses*
Pendapatan di luar usaha lainnya	(29.034.664.745)	(50.115.677.215)	*Other revenues*
Sub Jumlah	**26.138.982.040**	**(29.212.513.041)**	***Sub Total***

11. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***11. TAXATION*** *(Continued)*

d. Rekonsiliasi Fiskal (Lanjutan) / ***d. Fiscal Recontiliation*** *(Continued)*

	2020	2019	
Beban (pendapatan) terkait yang telah dikenakan Pajak Final:			***Related expenses (income) that have been charged Final Tax:***
PPh final Usaha perkapalan	(770.474.566.067)	(1.741.497.129.786)	*Income Tax Shipping Businessess*
Penghasilan PSO (*Public Service Obligation*)	(2.861.122.956.922)	(2.677.763.686.340)	*Public Service Obligation Income*
Usaha sampingan	(5.856.442.581)	(7.565.482.012)	*Other Income*
Pendapatan deposito dan jasa giro	(52.211.441.828)	(39.313.292.965)	*Revenues deposits. demand deposits and dividends*
Beban usaha perkapalan	3.350.142.761.797	3.948.207.519.771	*Shipping Businessess Expenses*
Beban *overhead*	178.224.299.289	414.061.976.649	*Overhead Expenses*
Beban terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final	1.514.029.240	13.327.883.262	*Expenses related to income subject to Final tax*
Sub Jumlah	**(159.784.317.042)**	**(90.542.211.421)**	***Sub Total***
Penghasilan Kena Pajak	**(120.509.983.992)**	**8.000.948.635**	***Taxable Income***
Pajak Penghasilan Badan Terutang	-	**(2.000.237.000)**	***Corporate Income Tax***
Kredit Pajak:			*Tax Deduction:*
Pajak Penghasilan Pasal 22	2.934.111.633	3.414.887.115	*Income Tax Article 22*
Pajak Penghasilan Pasal 23	250.922.816	104.624.358	*Income Tax Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 25	5.336.780.764	6.212.699.844	*Income Tax Article 25*
Sub Jumlah	**8.521.815.213**	**9.732.211.317**	***Sub Total***
Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar	**8.521.815.213**	**7.731.974.317**	***Corporate Income Tax Over Payment***
Beban Pajak Penghasilan Kini:			***Current Income Tax Expense:***
Entitas Induk	-	**2.000.237.000**	***Parent Entity***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	11.600.749.893	20.772.407.210	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	7.753.969.499	20.486.628.760	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	-	3.538.965.750	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**19.354.719.392**	**44.798.001.720**	***Sub Total***
Jumlah	**19.354.719.392**	**46.798.238.720**	***Total***

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

***11. TAXATION** (Continued)*

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

	2020						
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Dibebankan ke Laba (Rugi) / *Charged to Profit (Loss)***	**Dibebankan ke Ekuitas/ *Charged to Other Comprehensive Income***	**Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ *Impact of Early Adoption SFAS 71***	**Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak/ *Adjustment for Changes in Tax Rates***	**Penyesuaian / Adjustment**	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Entitas Induk:/							
Parent Entity :							
Penurunan Nilai Piutang/							
Expected Credit Loss of Receivables	4.171.506.805	673.011.555	-	1.483.967.995	(500.580.817)	(2.606.953.430)	3.220.952.108
Penyusutan Aset Tetap/							
Depreciation of Fixed Assets	5.930.032.033	-	-	-	(711.603.844)	-	5.218.428.189
Liabilitas Imbalan Kerja/							
Liability for Employee Benefits	13.232.370.620	5.093.181.834	7.695.653.194	-	(1.587.884.474)	14.702.011.410	39.135.332.584
Sub Jumlah/*Sub Total*	**23.333.909.458**	**5.766.193.389**	**7.695.653.194**	**1.483.967.995**	**(2.800.069.135)**	**12.095.057.980**	**47.574.712.881**
Entitas Anak/*Subsidiaries* :							
PT Sarana Bandar Nasional	6.369.501.741	24.708.137	61.322.151	2.803.117.142	(764.340.209)	(175.047.481)	8.319.261.481
PT Pelita Bandar Djaya	2.070.499.252	332.987.990	(8.318.400)	(15.550.700)	(248.459.910)	-	2.131.158.232
PT RS Pelayaran Nasional Indonesia	3.484.333.591	-	-	-	-	(3.484.333.591)	-
Sub Jumlah/*Sub Total*	**11.924.334.584**	**357.696.127**	**53.003.751**	**2.787.566.442**	**(1.012.800.119)**	**(3.659.381.072)**	**10.450.419.713**
Jumlah/*Total*	**35.258.244.042**	**6.123.889.516**	**7.748.656.945**	**4.271.534.437**	**(3.812.869.254)**	**8.435.676.908**	**58.025.132.594**

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

***11. TAXATION** (Continued)*

***e. Deferred Tax (**Continued)*

	2019			
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Dibebankan ke Laba (Rugi) / *Charged to Profit (Loss)***	**Dibebankan ke pendapatan komprehensif lain / *Charged to Other Comprehensive Income***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Entitas Induk:/				
Parent Entity:				
Penurunan Nilai Piutang/ *Impairment of Receivables*	22.121.500.242	(17.949.993.437)	-	4.171.506.805
Penyusutan Aset Tetap/ *Depreciation of Fixed Assets*	5.908.659.993	21.372.040	-	5.930.032.033
Liabilitas Imbalan Kerja/ *Liability for Employee Benefits*	11.057.547.556	2.174.823.064	-	13.232.370.620
Sub Jumlah/*Sub Total*	**39.087.707.791**	**(15.753.798.333)**	**-**	**23.333.909.458**
Entitas Anak/*Subsidiaries* :	12.275.324.827	(688.575.338)	337.585.095	11.924.334.584
Sub Jumlah/*Sub Total*	**12.275.324.827**	**(688.575.338)**	**337.585.095**	**11.924.334.584**
Jumlah/*Total*	**51.363.032.618**	**(16.442.373.671)**	**337.585.095**	**35.258.244.042**

f. Administrasi

Pada tanggal 30 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% untuk tahun fisklal 2022.

Perusahaan telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut pada laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020, berupa penurunan nilai aset pajak tangguhan sebesar Rp 3.812.869.254.

f. Administration

On March 30, 2020. The Government issued Regulation about reduce Corporate Income Tax from 25% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% for fiscal years 2022.

The Company has recorded effect of the change in corporate income tax rate in financial statement for the period ended December 31, 2020 in the form of decreases in deffered tax assets amounting to Rp 3,812,869,254.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

12. UANG MUKA / *12. ADVANCES PAYMENT*

	2020	2019	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Perkapalan	6.671.550.733	24.189.899.746	*Shipping*
Administrasi dan umum	4.131.706.474	7.758.960.030	*General and Administrative*
Penunjang	4.478.450.952	1.599.758.771	*Agency*
Sub Jumlah	**15.281.708.159**	**33.548.618.547**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	4.621.304.549	4.674.433.046	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	28.999.007.929	14.253.936.882	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	-	2.996.428.529	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**33.620.312.478**	**21.924.798.457**	***Sub Total***
Jumlah	**48.902.020.637**	**55.473.417.004**	***Total***

Uang muka perkapalan yang tercatat pada entitas induk merupakan pemberian uang muka atas transaksi pembelian suku cadang kapal.

Shipping advances recorded on the parent entity is the provision of advance payment on the purchase transaction of the ship parts.

Pada tahun 2019, Uang muka perkapalan di biayai melalui fasilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan uraian ringkas perjanjian fasilitas sebagai berikut:

On 2019, Shipping advances purchased through the facilities of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. with a brief description of the facility agreement as follows:

Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung PT Pelni (Persero) No.006/BIN/PFKTL/2019

Agreement PT Pelni (Persero) Number: 006/BIN/PFKTL/2019

Perjanjian No.006/BIN/PFKTL/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit tidak langsung antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Fasilitas kredit tidak langsung diberikan dalam bentuk *Plafond/Revolving*. Bank memberikan fasilitas kredit tidak langsung dengan tujuan untuk:

Agreement No.006 / BIN / PFKTL / 2019 dated July 26. 2019 regarding the approval of the provision of indirect credit facilities between PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Indirect credit facilities are provided in the form of ceiling / revolving. The Bank provides indirect credit facilities with the aim to:

a. Pembukaan LC/SKBDN Sight. Usance. UPAS untuk pengadaan sparepart kapal.

a. Opening LC / SKBDN Sight. Usance. *UPAS for procurement of ship spare parts.*

b. Penerbitan Garansi Bank dan/atau SBLC untuk jaminan tender. uang muka pemeliharaan. pelaksanaan sesuai kontrak yang diperoleh.

b. Publishing Bank Guarantees and / or SBLCs for tender guarantees. maintenance advances*. performance according to contracts obtained.*

Maksimum fasilitas kredit tidak langsung yang diberikan sebesar Rp115.000.000.000 (seratus lima belas miliar rupiah). Jangka waktu permohonan fasilitas kredit tidak langsung dapat diajukan selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatangan perjanjian ini atau terhitung sejak tanggal 26 Juli 2019 - 25 Juli 2020.

Maximum indirect credit facilities granted are Rp115.000.000.000 (one hundred and fifteen billion rupiah). The application period for indirect credit facilities can be submitted for 12 (twelve) months from the signing of this agreement or starting from July 26. 2019 - July 25. 2020.

12. UANG MUKA (Lanjutan)

Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung PT Pelni (Persero) No.006/BIN/PFKTL/2019 (Lanjutan)

Aset yang menjadi agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1864 tanggal 28 Agustus 2007, seluas 16.293 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 00026/2007 tanggal 18 April 2007, terdaftar atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT Pelni (Persero) berkedudukan di Jakarta, terletak di Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yang menurut sifat maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dianggap sebagai benda tidak bergerak berikut segala turutan-turutannya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai sebesar Rp437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Uang muka administrasi dan umum merupakan uang muka operasional unit-unit kerja dilingkungan PT Pelni (Persero).

Uang muka yang tercatat pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan uang muka yang dibayarkan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Uang muka barang dan jasa PT Rumah Sakit Pelni merupakan uang muka kerja dalam rangka kegiatan operasional untuk pengadaan obat CITO dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia melalui workshop.

Uang muka yang tercatat pada entitas anak (PT Pelita Indonesia Djaya) merupakan uang muka yang dibayarkan untuk pelayanan jasa komersil diatas kapal. permakanan dan jasa pengamanan.

***12. ADVANCES PAYMENT** (Continued)*

***Agreement PT Pelni (Persero) Number: 006/BIN/PFKTL/2019** (Continued)*

Assets which become collateral in the form of Certificate of Building Use Rights (SHGB) Number 1864 dated August 28, 2007 covering an area of 16.293 M2 in accordance with Measurement Letter Number 00026/2007 dated April 18, 2007 registered under the name of PT Pelayaran Nasional Indonesia Company abbreviated as PT Pelni (Limited) domiciled in Jakarta, located in North Petojo Sub- District. Gambir Sub-District. Central Jakarta City DKI Jakarta Province. including buildings, plants and works that have been and / or will be existing standing and embedded *which constitute a unity with the said land which according to their nature purpose and designation as well as statutory provisions considered to be immovable objects along with all their derivatives, shall be burdened with a Mortgage Right of I (First) with a value of Rp437,500,000 (four hundred thirty seven billion five hundred million rupiah).*

Administrative and general advances represent operational advances for work units within PT Pelni (Persero)

Advances in the subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) is an advance payment paid for the company's operational activities.

Advances for goods and services PT Rumah Sakit Pelni represent advances for work in the context of operational activities for the procurement of CITO drugs and human resource improvement activities through workshops.

Advances in the subsidiaries (PT Pelita Indonesia Djaya) is an advance payment for the services of Commercial services on board. food and security services.

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA / ***13. PREPAID EXPENSES***

	2020	2019	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Administrasi dan umum	17.680.908.116	18.905.915.446	*General and Administrative*
Usaha Perkapalan	8.316.115.776	24.651.939	*Shipping*
Usaha Perhotelan	60.912.961	121.636.833	*Hotel*
Sewa	-	799.419.392	*Rent*
Lainnya	1.882.187.853	3.163.951.420	*Other*
Sub Jumlah	**27.940.124.706**	**23.015.575.030**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	5.706.906.942	12.333.963.052	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Rumah Sakit Pelni	-	595.650.003	*PT Rumah Sakit Pelni*
PT Pelita Indonesia Djaya	340.968.554	346.075.439	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah	**6.047.875.496**	**13.275.688.494**	***Sub Total***
Jumlah	**33.988.000.202**	**36.291.263.524**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA (Lanjutan)

Biaya dibayar dimuka administrasi dan umum merupakan biaya imbalan kerja, perkapalan, perhotelan. asuransi dan lainnya.

Biaya dibayar dimuka pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional pelabuhan, yang telah dibayarkan namun pada akhir tahun buku, jasa belum seluruhnya dapat dimanfaatkan, sedangkan biaya dibayar dimuka terhadap peralatan bongkar muat mekanik, dan non mekanik merupakan pemakaian peralatan telah dibiayakan seluruh peralatan bongkar muat mekanik dan non mekanik, namun pada akhir tahun peralatan tersebut masih dapat dimanfaatkan dengan melihat nilai sisa peralatan bongkar muat mekanik dan non mekanik yang bersangkutan dan biaya yang berkaitan dengan kegiatan Ekpedisi Muatan Kapal Laut dan kegiatan operasional dipelabuhan lainnya dimana perusahaan membayar lebih dulu biaya yang timbul dipelabuhan dan akan ditagihkan setelah pekerjaan selesai.

***13. PREPAID EXPENSES** (Continued)*

Prepaid administrative and general costs represent the costs of employee benefits, shipping, hospitality, insurance and others.

Prepaid expenses in the subsidiaries (PT Sarana Bandar Nasional) is the cost associated with the operational activities of the port, which has been paid but by the end of the year the book. services have not been fully utilized, while the cost is paid upfront against mechanical and non mechanical loading equipment is the use of equipment has been expensed all equipment and non mechanical unloading equipment, but at the end of the year the equipment can still be utilized by looking at and costs associated with the activities of the Marine cargo expedition and other operational activities in which the company pays the first expense incurred and will be billed after the work is completed.

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Berdasarkan perjanjian Penjualan dan Penerbitan Saham bersyarat di PT Rumah Sakit Pelni tanggal 4 Oktober 2019. Antara PT Pertamina Bina Medika, IHC, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan PT Rumah Sakit PELNI bahwa Perseroan setuju untuk melepas kepemilikan Investasi di PT RS PELNI, dan terlaksana di tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pelepasan Investasi

Perseroan melepas kepemilikan di PT RS PELNI sebanyak 42.721 lembar saham atau sebesar 42,70% sehingga menyebabkan sisa kepemilikan Perseroan di RS PELNI sebanyak 57.314 Lembar Saham atau sebesar 57,28% atau setara dengan Rp 128.629.813.793

b. Dilusi

Berdasarkan pernyataan keputusan di luar RUPS No. 36 Tanggal 31 Maret 2020, PT RS PELNI melakukan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor, dimana atas penambahan Modal tersebut PT Pertamina Bina Medika IHC bersedia mengambil seluruh tambahan Modal, sehingga kepemilikan Investasi Perseroan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 48,98%.

14. INVESTMENT IN ASSOCIATE

Based on agreement of Conditional Sales and Issueance of Shares of PT Rumah Sakit Pelni on October 4th, 2020 between PT Pertamina Bina Medika IHC dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and PT Rumah Sakit PELNI that the Group agreed to release ownership of investment in PT RS PELNI, and do in the year 2020 as follows:

a. Investment Release

The Group has release ownership of PT RS PELNI as much 42,721 of shares or amounting to 42.71% resulting in ownership oh the Group in RS PELNI as much 57,314 of shares or amounting to 57.28% or equivalent to Rp 128,629,813,793.

b. Dilution

Based on decision statement out of RUPS No. 36 dated on March 31, 2020, PT RS PELNI to do improvement Issued and Paid-up Capital , which is additional capital PT Pertamina Bina Medika IHC willing to take all over additional capital, so that the Group's ownership investment in 2020 decreased amounting to 48.98%.

	2020	2019	
PT. Rumah Sakit Pelni	159.910.656.913	-	*PT. Rumah Sakit Pelni*
Jumlah	**159.910.656.913**	**-**	***Total***

	2020	2019	
Saldo Awal	-	-	*Beginning Balance*
Sisa kepemilikan	167.326.895.914	-	*Residual Interest*
Dilusi	(13.776.492.495)	-	*Dilution*
Dividen	(5.070.936.199)	-	*Dividen*
Dampak PSAK 71	(5.826.956.802)	-	*Efect PSAK 71*
Laba tahun 2020	17.556.547.455	-	*Addition from income 2020*
Laba Komprehensif 2020	(298.400.960)	-	*Addition from other comprehensif income 2020*
Saldo Akhir	**159.910.656.913**	**-**	***Ending Balance***

15. PROPERTI INVESTASI / *15. INVESTMENT PROPERTY*

	2020				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Tanah/*Land*	246.096.641.000	11.704.247.255	(153.944.636.000)	5.544.500	103.861.796.755
Gedung/*Building*	16.214.495.000	-	-	2.306.458.245	18.520.953.245
Sub Jumlah/*Sub Total*	**262.311.136.000**	**11.704.247.255**	**(153.944.636.000)**	**2.312.002.745**	**122.382.750.000**
Akumulasi Penyusutan/ *Depreciation Accumulated*					
Gedung/*Building*	-	-	-	-	-
Sub Jumlah/*Sub Total*	-	-	-	-	-
Nilai Buku/*Book Value*	**262.311.136.000**				**122.382.750.000**

	2019				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Tanah/*Land*	115.667.891.310	128.817.837.461	-	1.610.912.229	246.096.641.000
Gedung/*Building*	16.214.495.000	-	-	-	16.214.495.000
Sub Jumlah/*Sub Total*	**131.882.386.310**	**128.817.837.461**	-	**1.610.912.229**	**262.311.136.000**
Akumulasi Penyusutan/ *Depreciation Accumulated*					
Gedung/*Building*	-	-	-	-	-
Sub Jumlah/*Sub Total*	-	-	-	-	-
Nilai Buku/*Book Value*	**131.882.386.310**				**262.311.136.000**

Sesuai kebijakan akuntansi properti investasi bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 dan seterusnya Perseroan memilih menggunakan model nilai wajar yang berlaku prospektif atas nilai properti investasi - tanah dan bangunan dengan pertimbangan sedang dilakukan upaya untuk optimalisasi aset tersebut, dimana pada akhir tahun sebelumnya masih disajikan sebesar nilai buku karena menggunakan model biaya perolehan.

In accordance with the investment property accounting policy that as of December 31, 2018 and beyond, the Company has chosen to use the fair value model that applies prospectively to the value of investment property - land and buildings considering that efforts are being made to optimize the asset, which at the end of the previous year is still presented at book value because it uses the acquisition cost model.

Pengurangan nilai Property Investasi pada Tahun 2020 merupakan Properti Investasi milik PT RS PELNI yang telah dilakukan Divestasi oleh Perseroan pada 31 Maret 2020

Ruduction of Investment Property Value during the year 2020 ownership by PT RS PELNI which had been divested against the Ownership of the Group in March 31, 2020.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

15. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Sesuai dengan laporan penilai independen nomor 00004/2005300/PI/06/0095/1/I/2021, 00005/20053-00/PI/06/0095/1/I/2021 dan 00006/2.0053-00/PI/06/0095/1/I/2021 masing-masing untuk Properti Investasi yang terletak di Medan. Makassar dan Ampenan, diperoleh nilai wajar Properti Investasi sebagai berikut:

***15. INVESTMENT PROPERTY** (Continued)*

In accordance with the independent appraiser's report number 00004 / 20053-00 / PI / 06/0095/1 / I / 2021, 00005 / 20053-00 /PI / 06/0095/1 / I / 2021 and 00006 / 2.0053-00 / PI / 06/0095/1 / I / 2021. for investment properties located in Medan. Makassar and Ampenan. Respectively, the fair value of investment properties is obtained as follows:

	2020			
	Nilai Tercatat/ *Book Value*	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	**Kenaikan (Penurunan) atas Nilai Wajar/ *Increase (Decrease) of Fair Value***	
Tanah				*Land*
- 4 area tanah	92.157.549.500	103.861.796.755	11.704.247.255	*4 land area -*
- Yayasan Sekar Laut	18.520.953.245	18.520.953.245	-	*Yayasan Sekar Laut -*
Jumlah	**110.678.502.745**	**122.382.750.000**	**11.704.247.255**	***Total***

Sedangkan pada tahun 2019, Berdasarkan laporan KJPP Bambang & Ernasapta bernomor 00247/2.0036.00/PI/05/00073/1/III/2020 PT Rumah Sakit Pelni melakukan penilaian kembali aset berupa tanah dengan hasil sebagai berikut:

1. Penilaian kembali nilai wajar tanah untuk area perbankan sisi depan, area kantin sisi tengah, area puskesmas dan akademi perawatan sebesar Rp78.962.013.253 dengan peningkatan sebesar Rp55.446.445.689.

2. Nilai wajar atas tanah untuk area Yayasan Sekar Laut sebesar Rp74.982.304.000 dengan nilai tercatat Rp1.610.912.229. Peningkatan atas nilai wajar sebesar Rp73.371.391.771.

Kenaikan (penurunan) atas metode tersebut dicatat sebagai keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar aset properti investasi dan dicatat sebagai pendapatan non usaha.

3. Penilaian kembali nilai wajar tanah untuk area perbankan sisi depan, area kantin sisi tengah, area puskesmas dan akademi perawatan sebesar Rp78.962.013.253 dengan peningkatan sebesar Rp55.446.445.689.

4. Nilai wajar atas tanah untuk area Yayasan Sekar Laut sebesar Rp74.982.304.000 dengan nilai tercatat Rp1.610.912.229. Peningkatan atas nilai wajar sebesar Rp73.371.391.771.

In 2019, Based on KJPP Bambang & Ernasapta's report number 00247 / 2.0036.00 / PI / 05/00073/1 / III / 2020 PT Rumah Sakit Pelni conducted a revaluation of assets in the form of land with the following results:

1. *Revaluation of land fair value for front side banking area, middle side cafeteria area, Puskesmas area and nursing academy amounting to Rp78,962,013,253 with increase of Rp55,446,445,689.*

2. *Fair value of land for Sekar Laut Foundation area amounting to Rp74,982,304,000 with the noted value of Rp1,610,912,229. Increase in fair value of Rp73,371,391,771.*

The increase (decrease) in the method is recorded as a gain (loss) change in the fair value of investment property assets and recorded as non business income.

3. *Revaluation of land fair value for front side banking area, middle side cafeteria area, Puskesmas area and nursing academy amounting to Rp78,962,013,253 with increase of Rp55,446,445,689.*

4. *Fair value of land for Sekar Laut Foundation area amounting to Rp74,982,304,000 with the noted value of Rp1,610,912,229. Increase in fair value of Rp73,371,391,771.*

	2019			
	Nilai Tercatat/ *Book Value*	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	**Kenaikan (Penurunan) atas Nilai Wajar/ *Increase (Decrease) of Fair Value***	
Tanah				*Land*
- 4 area tanah	23.515.886.310	78.962.332.000	55.446.445.690	*4 land area -*
- Yayasan Sekar Laut	1.610.912.229	74.982.204.000	73.371.291.771	*Yayasan Sekar Laut -*
Jumlah	**25.126.798.539**	**153.944.536.000**	**128.817.737.461**	***Total***

Tidak terdapat properti investasi yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman/kewajiban lainnya dan properti investasi berupa gedung tidak diasuransikan.

There are no investment properties that are pledged as collateral to other loans / liabilities and investment properties in the form of uninsured buildings.

15. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Berdasarkan hasil evaluasi, mengenai nilai yang dapat diperoleh kembali pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi.

***15. INVESTMENT PROPERTY** (Continued)*

Based on evaluation of regarding the recoverable value on December 31, 2020. the Company believes that there are changes in circumstances indicate impairment of investment property.

16. ALAT PRODUKSI

16. PRODUCTION EQUIPMENT

	2020				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Kapal Penumpang/ *Passanger Ship*	8.023.928.015.654	88.785.291.901	-	-	8.112.713.307.555
Kapal Kargo/*Cargo Ship*	453.922.217.006	8.174.858.881	-	-	462.097.075.887
Kontainer/*Container*	40.118.800.000	-	-	19.707.600.000	59.826.400.000
Sub Jumlah/*Sub Total*	**8.517.969.032.660**	**96.960.150.782**	**-**	**19.707.600.000**	**8.634.636.783.442**
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets Under Construction*	19.752.600.000	-	-	(19.707.600.000)	45.000.000
Jumlah/*Total*	**8.537.721.632.660**				**8.634.681.783.442**
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ *Accumulated Depreciation and Impairment*					
Kapal Penumpang/ *Passanger Ship*	5.458.882.290.841	322.369.914.416	-	-	5.781.252.205.257
Kapal Kargo/*Cargo Ship*	71.347.177.497	21.678.646.439	-	-	93.025.823.936
Kontainer/*Container*	2.862.283.968	10.221.809.225	-	-	13.084.093.193
Sub Jumlah/*Sub Total*	**5.533.091.752.306**	**354.270.370.080**	**-**	**-**	**5.887.362.122.386**
Nilai Buku/Book Value	**3.004.629.880.354**				**2.747.319.661.056**

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

16. ALAT PRODUKSI (Lanjutan) / ***16. PRODUCTION EQUIPMENT*** *(Continued)*

	2019				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Kapal Penumpang/ *Passanger Ship*	7.889.621.559.803	134.306.455.851	-	-	8.023.928.015.654
Kapal Kargo/*Cargo Ship*	355.924.795.174	97.997.421.832	-	-	453.922.217.006
Kontainer/*Container*	-	40.118.800.000	-	-	40.118.800.000
Sub Jumlah/*Sub Total*	**8.245.546.354.977**	**272.422.677.683**	-	-	**8.517.969.032.660**
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets Under Construction*	278.821.391	19.752.600.000	-	(278.821.391)	19.752.600.000
Jumlah/*Total*	**8.245.825.176.368**				**8.537.721.632.660**
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ *Accumulated Depreciation and Impairment*					
Kapal Penumpang/ *Passanger Ship*	5.142.726.871.069	316.155.419.772	-	-	5.458.882.290.841
Kapal Kargo/*Cargo Ship*	54.732.530.563	16.614.646.934	-	-	71.347.177.497
Kontainer/*Container*	-	2.862.283.968	-	-	2.862.283.968
Sub Jumlah/*Sub Total*	**5.197.459.401.632**	**335.632.350.674**	-	-	**5.533.091.752.306**
Nilai Buku/Book Value	**3.048.365.774.736**				**3.004.629.880.354**

Penyusutan alat produksi yang tercatat pada entitas induk dibebankan pada beban pokok pendapatan pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp354.270.370.080 dan Rp335.632.350.674.

Depreciation of production equipment in parent entity is charged at the cost of income in the year 2020 and 2019 each of Rp354,270,370,080 and Rp335,632,350,674.

Pada tahun 2019, Perusahaan menambah 1 (satu) unit kapal container KM Logistik Nusantara 6 (Ex MV. Sabo) dengan type 350-450 TEUs diserahkan pada tanggal 02 Agustus 2019 di Singapura sesuai dengan *Protocol of Delivery and Acceptance* tanggal 02 Agustus 2019, biaya perolehan KM Logistik Nusantara 6 sebesar USD 6.700.000.- atau setara dengan Rp94.939.138.750, ditambah dengan biaya yang terkait langsung dengan pengadaan kapal, seperti ROB BBM, jasa konsultan, *legal assistance,* biaya perjalanan dinas dan lainnya sebesar Rp3.058.283.082, sehingga biaya perolehan KM. Logistik Nusantara 6 sebesar Rp97.331.712.055.

In 2019, the Company added 1 (one) unit container ship KM. Logistik Nusantara 6 (Ex MV. Sabo) with type 350-450 TEUs submitted on August 2, 2019 in Singapore in accordance with the Protocol of Delivery and Acceptance on August 2, 2019, the acquisition cost of KM Logistik Nusantara 6 amounting to USD 6,700,000, - or equivalent to Rp94,939,138,750. plus costs directly related to boat procurement. such as ROB BBM. consulting services. legal assistance. official travel and other costs of Rp3,058,283,082. so that the acquisition cost of KM. Logistik Nusantara 6 amounting to Rp97,331,712,055.

16. ALAT PRODUKSI (Lanjutan)

Seluruh pengadaan kapal angkutan barang tersebut dimaksud untuk mendukung penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut (tol laut) merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 161 Tahun 2015 pendanaannya menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat kapal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masih dibawah nilai wajarnya.

Alat produksi berupa armada kapal diasuransikan pada PT Asuransi Jasindo dan Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan cukup memadai untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian terhadap aset yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat alat produksi yang digunakan sebagai jaminan atas kewajiban/pinjaman Grup.

***16. PRODUCTION EQUIPMENT** (Continued)*

All transportation vessel procurement is intended to support the implementation of public service obligations for goods transportation in the sea (sea toll) refers to the regulation of the President of the Republic of Indonesia number 106 year 2015 and regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia number PM 161 year 2015. the funding using state Capital Participation Fund (PMN).

Management is in order that the carrying value of the ship for the year ended December 31, 2020 and December 31, 2019 is still below fair value.

The production equipment in the form of an insured fleet at PT Asuransi Jasindo and the Group believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses to the insured assets.

There are no production equipment used as collateral for Group liabilities.

17. ASET TETAP / *17. FIXED ASSETS*

	2020				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Tanah/*Land*	53.589.211.229	2.200.000.000	(29.870.700.769)	(5.544.500)	25.912.965.960
Gedung/*Building*	340.065.165.314	14.106.114.564	(113.769.852.583)	2.680.575.536	243.082.002.831
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	191.981.280.739	14.296.019.540	(11.217.910.571)	11..046.026.983	206.105.416.691
Inventaris Kantor/ *Office Inventory*	268.864.891.337	10.880.846.012	(175.248.180.265)	5.734.333.300	110.231.890.384
Alat Produksi Lainnya/ *Other Tools*	22.490.292.265	176.054.000	-	-	22.666.346.265
Sub Jumlah/*Sub Total*	**876.990.840.884**	**41.659.034.116**	**(330.106.644.188)**	**19.455.391.319**	**607.998.622.131**
Sewa Pembiayaan/ *Leasing Financing*					
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	23.323.920.603	7.843.461.300	-	-	31.167.381.903
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets UnderConstruction*	55.830.885.306	14.211.194.725	(4.630.276.234)	(25.135.890.690)	40.275.913.107
Jumlah/*Total*	**956.145.646.793**				**679.441.917.141**
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Gedung/*Building*	124.624.552.581	5.859.175.100	(29.128.217.444)	(2.414.550.755)	98.940.959.482
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	98.380.858.274	12.370.811.586	(10.246.723.909)	(938.090.871)	99.566.855.080
Inventaris Kantor/ *Office Inventory*	203.900.860.041	6.432.580.367	(129.885.286.899)	-	80.448.153.509
Alat Produksi Lainnya/ *Other Tools*	21.357.702.239	365.231.342	-	-	21.722.933.581
Sub Jumlah/*Sub Total*	**448.263.973.135**	**25.027.798.395**	**(169.260.228.252)**	**(3.352.641.626)**	**300.678.901.652**
Sewa Pembiayaan/ *Leasing Financing*					
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	12.464.975.696	3.347.211.293	-	-	15.812.186.989
Sub Jumlah/*Sub Total*	**12.464.975.696**	**3.347.211.293**	**-**	**-**	**15.812.186.989**
Jumlah/*Total*	**460.728.948.831**				**316.491.088.641**
Nilai Buku/*Book Value*	**495.416.697.962**				**362.950.828.500**

17. ASET TETAP (Lanjutan) / ***17. FIXED ASSETS*** *(Continued)*

	2019				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Tanah/*Land*	55.082.322.871	117.800.587		(1.610.912.229)	53.589.211.229
Gedung/*Building*	328.355.508.908	11.709.656.406	-	-	340.065.165.314
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	162.804.021.393	29.230.267.346		(53.008.000)	191.981.280.739
Inventaris Kantor/ *Office Inventory*	254.632.674.994	19.163.276.805	-	(4.931.060.462)	268.864.891.337
Alat Produksi Lainnya/ *Other Tools*	22.505.098.928	78.256.500	-	(93.063.163)	22.490.292.265
Sub Jumlah/*Sub Total*	**823.379.627.094**	**60.299.257.644**	**-**	**(6.688.043.854)**	**876.990.840.884**
Sewa Pembiayaan/ *Leasing Financing*					
Kendaraan bermotor/*Vehicle*	17.682.595.843	5.641.324.760	-	-	23.323.920.603
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets Under Construction*	13.458.678.919	42.565.086.387	-	(192.880.000)	55.830.885.306
Jumlah/*Total*	**854.714.901.856**				**956.145.646.793**
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Gedung/*Building*	115.190.382.494	9.434.170.087	-	-	124.624.552.581
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	87.603.829.872	10.830.036.402	-	(53.008.000)	98.380.858.274
Inventaris Kantor/ *Office Inventory*	186.457.189.399	22.369.198.798	-	(4.925.528.156)	203.900.860.041
Alat Produksi Lainnya/ *Other Tools*	20.415.761.732	1.035.003.670	-	(93.063.163)	21.357.702.239
Sub Jumlah/*Sub Total*	**409.667.163.497**	**43.668.408.957**	**-**	**(5.071.599.319)**	**448.263.973.135**
Sewa Pembiayaan/ *Leasing Financing*					
Kendaraan bermotor/*Vehicle*	8.044.024.481	4.420.951.215	-	-	12.464.975.696
Sub Jumlah/*Sub Total*	**8.044.024.481**	**4.420.951.215**	**-**	**-**	**12.464.975.696**
Jumlah/*Total*	**417.711.187.978**				**460.728.948.831**
Nilai Buku/*Book Value*	**437.003.713.878**				**495.416.697.962**

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada periode Maret 2020 perseroan menjual mayoritas saham PT. Rumah Sakit PELNI sehingga perseroan tidak lagi mengonsolidasikan PT. Rumah Sakit PELNI. Hal ini berdampak pada pencatatan Alat Produksi yang berkurang cukup signifikan senilai Alat Produksi milik PT Rumah Sakit PELNI.

Tanah dan Bangunan PT Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620 / Slipi dijadikan jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri termasuk bangunan ruang rawat inap yang telah direnovasi.

1 set alat Angiography/Cathlab merek GE *Healthcare* tipe Innova IGS 520 Gen2 Tahun 2015 dan seluruh alat kesehatan yang dibeli dan dibiayai oleh PT Bank Syariah Mandiri dijadikan jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri.

Peralatan kesehatan berupa 1 unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & OEC Brivo 785 Essential C-Arm dan 1 unit Brivo MR 355 Inspire 1.5T dijaminkan atas fasilitas pinjaman kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai masing-masing sebesar Rp8.143.905.000 dan Rp12.439.680.000.

Alat kesehatan berikut ini dijadikan jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri:

a. 1 set Alat Angiography/Cath Lab Angiography/Cath Lab merek GE Healthcare tipe Innova IGS 520 Gen2;
b. 1 set Alat Ultrasonography (USG) merek Hitachi tipe Hi Vision Avius;
c. 1 set Alat Endoscopy merek Olympus;
d. Mobil Ambulance KIA K2700;
e. Mobil Avanza Veloz 1.5 M/T;
f. Genset *Type Perkirns Prime Power* 500KVA;
g. *Diagnostic Ultrasound System Merk* Aloka;
h. Radiologi *Type Mars* 40/CS/RAD;
i. *Color Dopler Ultrasound System Merk* Aloka;
j. *Ventilator Neonate to Adult Type Respironics;*
k. *Ventilator Pediatric to Adult Type* C *Merk* Hamilton;
l. Meja Operasi Merk Medifa;
m. 118 *set Patient Bed* dan perlengkapan penunjang lainnya;
n. Aset eksisting PT RS Pelni sejumlah 86 item.

Perseroan menilai tidak terdapat indikasi penurunan nilai pada aset tetap sehingga Perseroan tidak melakukan penilaian kembali dan tidak perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun berjalan.

Aset dalam penyelesaian sebesar Rp4.630.276.234 merupakan biaya awal dalam rangka pembangunan Merial Tower seperti jasa konsultan. pemetaan Topografi. fee PMC Merial Tower dan biaya-biaya lainnya yang terkait langsung dalam rangka persiapan pembangunan konstruksi bangunan Merial Tower.

***17. FIXED ASSETS** (Continued)*

In the period of March 2020 the company sold the majority shares of PT. Rumah Sakit PELNI, so that the company no longer consolidates PT. Rumah Sakit PELNI.This has an impact on the recording of Production Equipment which is significantly reduced by the value of Production Equipment belonging to PT Rumah Sakit Pelni.

Land and Building Subsidiary PT Rumah Sakit Pelni with certificate of Right to Building No. 620 / Slipi used as collateral for the credit facilities obtained from PT Bank Syariah Mandiri including inpatient room building that has been renovated.

An set of Angiography / Cathlab devices from the GE Healthcare Innova type IGS 520 Gen2 in 2015 and all medical devices purchased and financed by PT Bank Syariah Mandiri are used as collateral in connection with credit facilities obtained from PT Bank Syariah Mandiri.

The health care equipment as 1 unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & Brivo OEC C-Arm Essential 785 and 1 units Brivo MR 355 Inspire 1.5T pledged against the loan facility obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with the value of each of Rp8.143.905.000 and Rp12,439,680,000.

The following medical devices are used as collateral in connection with credit facilities obtained from PT Bank Syariah Mandiri:

a. 1 set of Angiography / Cath Lab Angiography / Cath Lab Tools GE brand Healthcare Innova type IGS 520 Gen2;
b. 1 set Ultrasonography (USG) merk Hitachi tipy Hi Vision Avius;
c. 1 set Endoscopy merk Olympus;
d. Ambulance KIA K2700;
e. Avanza Veloz 1.5 M/T;
f. Genset Type Perkirns Prime Power 500KVA;
g. Diagnostic Ultrasound System Merk Aloka;
h. Radiologi Type Mars 40/CS/RAD
i. Color Dopler Ultrasound System Merk Aloka;
j. Ventilator Neonate to Adult Type Respironics;
k. Ventilator Pediatric to Adult Type C Merk Hamilton;
l. Medifa Brand Operating Table;
m. 118 sets of Patient Bed and other supporting equipment;
n. The existing assets of PT Rumah Sakit Pelni are 86 items.

The company assesses no indication of impairment on fixed assets so that the company does not re evaluate and does not need to form a reserve of impairment losses in the year.

Assets in completion of Rp4,630,276,234 is the initial cost in the framework of the development of Merial Tower such as consulting services. topography mapping. fee PMC Merial Tower and other related costs directly in order to prepare the construction of Merial Tower building.

17. ASET TETAP (Lanjutan)

Penambahan tahun 2019 berupa *Forklift* meliputi: 2 unit *Forklift* 5 Ton sebesar Rp1.010.000.000. 1 unit *Forklift* 3 Ton sebesar Rp210.000.000 dan 1 unit *Forklift* 7 Ton sebesar Rp680.000.000. sesuai kontrak antara PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan PT Kasana Teknindo Gemilang dengan Nomor SBN/.PBJ/SPK/25.03/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019.

Penambahan Kontainer tahun 2019 sesuai kontrak antara PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan PT Bintang Citra Internasional dengan Nomor SBN/AGR/06.25-16/2019. tanggal 25 Juni 2019 untuk pengadaan 50 unit *Used Reefer Container* 20 *Feet Highcube* sebesar Rp6.330.000.000.

Penambahan Kendaraan Bermotor tahun 2019 merupakan kontrak antara PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan PT Astra Internasional Nomor SBN/PBJ/SPK/230.05/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 untuk pengadaan 11 unit Toyota Avanza sebesar Rp1.880.000.000 dan kontrak Nomor SBN/PBJ/SPK/20.03/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 untuk pengadaan 1 unit Toyota Rush sebesar Rp257.000.000.

Penambahan Alat Angkutan Darat tahun 2019. meliputi:

1. Kontrak antara PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan PT Bypassindo untuk pengadaan:
   - 2 unit TruckTronton sebesar Rp1.654.000.000, sesuai Kontrak No. SBN/PBJ/SPK/04.02/X/2019, tanggal 23 September 2019.
   - 2 unit Truck Tronton sebesar Rp1.654.000.000 sesuai Kontrak No. SBN/PBJ/SPK/25.04/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019.

2. Kontrak antara PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan PT Indomobil Prima Niaga untuk pengadaan:
   - 1 unit Head Truck sebesar Rp629.090.909 sesuai Kontrak No. SBN/PBJ/SPK/09.04/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.
   - 1 unit Head Truck sebesar Rp629.090.909 sesuai Kontrak No. SBN/PBJ/SPK/30.12/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

3. Kontrak antara PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan PT Prabu Pendawa Motor Nomor: SBN /PBJ/SPK/09.03/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019 untuk pengadaan 1 unit Mitsubishi L300 sebesar Rp166.681.818.

***17. FIXED ASSETS** (Continued)*

Additions in 2019 in the form of Forklifts include: 2 units of 5 Ton Forklifts amounting to Rp1,010,000,000, 1 unit of 3 Ton Forklifts amounting to Rp210,000,000 and 1 unit of 7 Ton Forklifts totaling Rp680,000,000 according to the contract between PT PBM Sarana Bandar Nasional and PT Kasana Teknindo Gemilang with Number SBN /. PBJ / SPK / 25.03 / X / 2019, dated October 25, 2019.

The addition of container year 2019 according to the contract between PT PBM Sarana Bandar Nasional with PT Bintang Citra International with the number SBN/AGR/06.25- 16/2019, dated June 25, 2019 for the procurement of 50 units Used Reefer Container 20 Feet Highcube of Rp6,330,000,000.

The addition of Motorized Vehicles in 2019 is a contract between PT PBM Sarana Bandar Nasional and PT Astra International Number SBN / PBJ / SPK / 230.05 / X / 2019 dated October 30, 2019 for the procurement of 11 Toyota Avanza units amounting to Rp1,880,000,000 and contract Number SBN / PBJ / SPK / 20.03 / V / 2019 dated May 20, 2019 for the procurement of 1 unit of Toyota Rush in the amount of Rp257,000,000.

Addition of Land Transport Equipment in 2019, including:

1. *The contract between PT PBM Sarana Bandar Nasional and PT Bypassindo for the procurement of:*
   - *2 units of Truck amounting to Rp1,654,000,000. according to Contract No. SBN / PBJ / SPK / 04.02 / X / 2019, dated September 23, 2019.*
   - *2 units of Truck amounting to Rp1,654,000,000. according to Contract No. SBN / PBJ / SPK / 25.04 / X / 2019, dated Oktober 25, 2019.*

2. *The contract between PT PBM Sarana Bandar Nasional and PT Indomobil Prima Niaga for the procurement of:*
   - *1 unit of Head Truck amounting to Rp629,090,909 according to Contract No. SBN / PBJ / SPK / 09.04 / VII / 2019, dated July 9, 2019.*
   - *1 unit of Head Truck amounting to Rp629,090,909 according to Contract No. SBN / PBJ / SPK / 30.12 / VII / 2019, dated July 30, 2019.*

3. *The contract between PT PBM Sarana Bandar Nasional and PT Prabu Pendawa Motor Number: SBN / PBJ / SPK 09.03/X/2019, dated October 9, 2019 for the procurement of 1 unit of Mitsubishi L300 amounting to Rp166,681,818.*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

17. ASET TETAP (Lanjutan)

Penambahan Alat Angkutan Darat tahun 2019. meliputi: (Lanjutan)

4. Kontrak antara PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan PT Muncul Suryaprima untuk pengadaan:

   - 1 unit Trailer 40 *Feet* sebesar Rp225.000.000. sesuai Kontrak No. SBN/PBJ/SPK/30.12.VII/2019, tanggal 30 Juli 2019.
   - 2 unit Trailer 40 *Feet* sebesar Rp450.000.000. sesuai Kontrak No. SBN/PBJ/SPK/30.05/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019.
   - 1 unit Trailer 20 *Feet* sebesar Rp141.000.000. sesuai Kontrak No. SBN/PBJ/SPK/22.01/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019.
   - 1 unit Trailler 30 *Feet* sebesar Rp393.000.000 sesuai Kontrak No. SBN/PBJ/SPK/09.05/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019.

5. Kontrak antara PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan CV Kuda terbang dengan Nomor: SBN/PBJ/SPK/02.01/VII/2019. tanggal 02 Juli 2019, untuk pengadaan 2 Unit Bak Besi sebesar Rp84.500.000.

Penambahan Aset Dalam Konstruksi tahun 2020 dan 2019, antara lain: Pembangunan Gudang Bizpark di Cakung. Pembangunan *Cold Storage* di Timika, Merauke, Morotai, Tarakan, Saumlaki, Natuna, dan Banggai.

***17. FIXED ASSETS** (Continued)*

Addition of Land Transport Equipment in 2019. including: (Continued)

4. The contract between PT PBM Sarana Bandar Nasional and PT Muncul Suryaprima for the procurement of:

   - *1 unit of 40 Feet Trailer in the amount of Rp225,000,000, according to Contract No. SBN / PBJ / SPK / 30.12.VII / 2019, on July 30, 2019.*
   - *2 units of 40 Feet Trailer in the amount of Rp450,000,000, according to Contract No. SBN / PBJ / SPK / 30.05 / VIII / 2019, on August 30, 2019.*
   - *1 unit of 20 Feet Trailer in the amount of Rp141,000,000, according to Contract No. SBN / PBJ / SPK / 22.01 / VIII / 2019, on August 22, 2019.*
   - *1 unit of 30 Feet Trailler amounting to Rp393,000,000 according to Contract No. SBN / PBJ / SPK / 09.05 / VII / 2019, on July 9, 2019.*

5. The contract between PT PBM Sarana Bandar Nasional and CV Kuda Kuda with Number: SBN / PBJ / SPK / 02.01 / VII / 2019, dated July 2, 2019, for the procurement of 2 Iron Tubs for Rp84,500,000.

The addition of assets in construction in 2020 and 2019, among others: the construction of warehouse Bizpark in Cakung, Cold Storage development in Timika, Merauke. Morotai, Tarakan, Saumlaki, Natuna, and Banggai.

18. ASET TAKBERWUJUD / ***18. INTANGIBLE ASSETS***

	2020				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perangkat lunak/*Software*	25.462.584.013	1.307.599.000	(3.386.915.150)	-	23.383.267.863
HGB/*Building Rights*	2 .908.706.584	9.794.192	-	-	2.918.500.776
Sub Jumlah/*Sub Total*	**28.371.290.597**	**1.317.393.192**	**(3.386.915.150)**	**-**	**26.301.768.639**
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets Under Construction*	9.261.752.251	4.166.356.223	-	-	13.428.108.474
Sub Jumlah/*Sub Total*	**37.633.042.848**				**39.729.877.113**
Akumulasi Amortisasi/ *Amortization Accumulated*					
Perangkat lunak/*Software*	14.455.825.189	3.848.970.924	(1.162.757.822)	-	17.142.038.291
HGB/*Building Rights*	2.225.910.692	342.476.233	-	-	2.568.386.925
Sub Jumlah/*Sub Total*	**16.681.735.881**	**4.191.447.157**	**(1.162.757.822)**	**-**	**19.710.425.216**
Nilai Buku/*Book Value*	**20.951.306.967**				**20.019.451.897**

18. ASET TAKBERWUJUD (Lanjutan) / ***18. INTANGIBLE ASSETS*** *(Continued)*

	2019				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perangkat lunak/*Software*	25.017.641.533	444.942.480	-	-	25.462.584.013
HGB/*Building Rights*	2.614.654.414	294.052.170	-	-	2 .908.706.584
Sub Jumlah/*Sub Total*	**27.632.295.947**	**738.994.650**	-	-	**28.371.290.597**
Aset Dalam Konstruksi/ *Assets Under Construction*	13.042.534.903	194.000.000	3 .974.782.652	-	9 .261.752.251
Sub Jumlah/*Sub Total*	**40.674.830.850**				**37.633.042.848**
Akumulasi Amortisasi/ *Amortization Accumulated*					
Perangkat lunak/*Software*	10.363.014.181	4.092.811.008	-	-	14.455.825.189
HGB/*Building Rights*	1.876.186.149	349.724.543	-	-	2.225.910.692
Sub Jumlah/*Sub Total*	**12.239.200.330**	**4.442.535.551**	-	-	**16.681.735.881**
Nilai Buku/*Book Value*	**28.435.630.520**				**20.951.306.967**

19. ASET HAK GUNA / ***19. RIGHT OF USE ASSETS***

	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Dampak PSAK 73/ Impact of FSAS 73**	**Saldo awal yang disesuaikan/ Adjustment Begining Balance**	**Penambahan /*Addition***	**Pengurangan /*Reduction***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*						
Tanah/ *Land*	-	308.930.207	-	-	-	308.930.207
Gedung/ *Building*	-	340.351.906	-	378.713.975	-	719.065.881
Alat Angkut/ Vehicle	-	15.481.148.547	-	-	-	15.481.148.547
Sub Jumlah/*Sub Total*	**-**	**16.130.430.660**	**-**	**378.713.975**	**-**	**16.509.144.635**
Akumulasi Amortisasi/ *Amortization Accumulated*						
Tanah/ *Land*	-	68.651.160	-	102.976.740	-	171.627.900
Gedung/ *Building*	-	170.175.948	-	190.108.262	-	360.284.210
Alat Angkut/ *Vehicle*	-	5.614.339.198	-	5.852.011.686	-	11.466.350.884
Sub Jumlah/*Sub Total*	**-**	**5.853.166.306**	**-**	**6.145.096.688**	**-**	**11.998.262.994**
Nilai Buku/*Book Value*	**-**					**4.510.881.641**

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

19. ASET HAK GUNA (Lanjutan)

Aset Hak Guna adalah kelompok aset tetap yang terjadi karena dampak penerapan PSAK 73 dengan kontrak sewa lebih dari satu tahun dan aset pendasar yang memenuhi kriteria.

Biaya perolehan diakui sebesar nilai sekarang dari nilai kontrak yang bersangkutan. Disusutkan selama masa kontrak dan tanpa nilai sisa.

Terdapat 4 (empat) Kontrak sewa jangka panjang tercatat yang semuanya memiliki aset pendasar yaitu alat angkut.

Aset Hak Guna entitas anak merupakan sewa pembiayaan kendaraan dan gedung dengan masa kontrak diatas 1(satu) tahun.

***19. RIGHT OF USE ASSETS** (Continued)*

Rights of use assets are groups of fixed assets that occur due to the impact of the application of PSAK 73 with lease contracts of more than one year and basic assets that meet the criteria.

Acquisition cost is recognized at the present value of the respective contract value. Depreciable over the term of the contract and without residual value.

There are 4 (four) recorded long-term lease contracts. all of which have the underlying asset. namely transportation means.

Right of use assets from subsidiaries are lease of building and vehicle with more than 1(one) year.

20. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

20. OTHER NON CURRENT ASSETS

	2020	2019	
Biaya Perolehan:			***Acquisition Cost:***
Piutang Usaha Tak Tertagih	80.540.880.913	79.429.884.594	*Account Receivable Not Collectible*
Aset Tetap Tidak Berfungsi	35.823.213.986	35.417.294.688	*Fixed Assets Damage*
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	1.761.947.845	1.097.502.578	*Inventory Damaged*
Lainnya	1.176.184.655	1.599.818.960	*Other*
Jumlah	**119.302.227.399**	**117.544.500.820**	***Total***
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai			***Accumulated Depreciation and Impairment***
Piutang Usaha Tak Tertagih	(80.540.880.913)	(79.429.884.594)	*Account Receivable Not Collectible*
Aset Tetap Tidak Berfungsi	(35.667.417.383)	(35.310.270.379)	*Fixed Assets Damage*
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	(1.761.947.845)	(1.097.502.578)	*Inventory Damaged*
Lainnya	(889.236.710)	(1.474.999.900)	*Others*
Jumlah	**(118.859.482.851)**	**(117.312.657.451)**	***Total***
Nilai Buku	**442.744.548**	**231.843.369**	***Book Value***

Piutang usaha yang tercatat pada aset tidak lancar lainnya merupakan piutang usaha tidak tertagih milik entitas induk sebesar Rp78.898.206.691 dan entitas anak (PT Pelita Indonesia Djaya) sebesar Rp1.642.674.222.

Aset tetap tidak produktif yang tercatat pada aset tidak lancar lainnya merupakan aset tetap yang tidak digunakan milik entitas induk sebesar Rp31.752.842.389 dan entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) sebesar Rp4.070.371.597.

Persediaan tidak produktif yang tercatat pada aset tidak lancar lainnya merupakan persediaan yang tidak dapat digunakan milik entitas induk sebesar Rp1.761.947.845

Trade receivables recorded on other uncurrent assets are uncollectible business receivables belonging to the parent entity amounting to Rp78,898,206,691 and subsidiary (PT Pelita Indonesia Djaya) amounting to Rp1,642,674,222.

An unproductive fixed asset recorded on other uncurrent assets is a permanent asset that is not used belonging to the parent entity amounting to Rp31,752,842,389 and a subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) of Rp4,070,371,597.

Unproductive inventories recorded in other non-current assets represent unused inventories of the parent entity amounting to Rp1,761,947,845.

21. UTANG USAHA / *21. ACCOUNTS PAYABLE*

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok. sebagai berikut: / *Details of the accounts payable by supplier. as follows:*

	2020	2019	
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
PT Pelindo I. II. III dan IV (Persero)	9.689.182.755	14.290.072.070	*PT Pelindo I. II. III dan IV (Persero)*
PT Telkom Satelit Indonesia	2.358.700.000	-	*PT Telkom Satelit Indonesia*
PT Sucofindo (Persero)	2.039.790.500	734.700.000	*PT Sucofindo (Persero)*
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	1.900.330.297	2.876.903.152	*PT Industri Kapal Indonesia (Persero)*
PT Sarana Gama Sejahtera	1.620.248.456	645.258.571	*PT Sarana Gama Sejahtera*
PT Dok Perkapalan Kodja Bahari	1.048.544.023	-	*PT Dok Perkapalan Kodja Bahari*
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.021.742.672	688.362.100	*PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	512.539.727	554.182.650	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Otoritas Kepelabuhanan	-	1.770.099.480	*Port Authority*
PT Pertamina (Persero)	-	2.540.175.000	*PT Pertamina (Persero)*
PT Jasa Raharja (Persero)	-	768.282.000	*PT Jasa Raharja (Persero)*
PT Garuda Indonesia (Persero)	-	640.287.800	*PT Garuda Indonesia (Persero)*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	600.428.332	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
Lainnya (dibawah Rp500 Juta)	227.373	565.990.975	*Others (below Rp500 Million)*
Sub Jumlah	**20.191.305.803**	**26.674.742.130**	***Sub Total***
Pihak Ketiga:			***Thrid Parties:***
PT Cahaya Samoedra Bersaudara	13.100.950.664	5.168.602.153	*PT Cahaya Samoedra Bersaudara*
PT Wartsila Indonesia	8.033.538.803	764.030.097	*PT Wartsila Indonesia*
PT Global Marinedo Safety Indonesia	7.233.887.877	1.717.781.370	*PT Global Marinedo Safety Indonesia*
PT Dalekesa Asri Cemerlang	5.854.436.621	4.686.914.304	*PT Dalekesa Asri Cemerlang*
Koperasi Bina Sejahtera	4.391.684.613	297.381.171	*Koperasi Bina Sejahtera*
PT Rumah Sakit PELNI	4.205.174.049	-	*PT Rumah Sakit PELNI*
PT Adhitrans Prima	3.634.189.323	2.238.191.151	*PT Adhitrans Prima*
PT Pertalube Nusajaya	2.354.440.736	-	*PT Pertalube Nusajaya*
PT Palka Sarana Utama	2.248.811.808	372.132.316	*PT Palka Sarana Utama*
PT Cipta Solusindo	1.985.558.400		*PT Cipta Solusindo*
CV Makassar Teknik Abadi	1.886.451.994	696.685.509	*CV Makassar Teknik Abadi*
PT Sukanda Jaya	1.639.233.458	82.639.265	*PT Sukanda Jaya*
PT Surya Segara Safety Marine	1.495.372.488	402.141.612	*PT Surya Segara Safety Marine*
PT Sinar Kencana	1.434.943.728	1.744.895.801	*PT Sinar Kencana*
PT ITI Marine & Oilfield Utama	1.305.005.182	1.062.555.360	*PT ITI Marine & Oilfield Utama*
PT Araya Internusa	1.270.649.090	1.338.338.855	*PT Araya Internusa*
PT Karimun Marine Shipyard	1.165.441.473	498.136.967	*PT Karimun Marine Shipyard*
PT Tele Net	1.122.389.355	3.030.240.000	*PT Tele Net*
Synotech Solusi Mandiri	1.015.295.400	-	*Synotech Solusi Mandiri*
PT Eastern Indotech Multitama	956.207.250	956.207.250	*PT Eastern Indotech Multitama*
PT Portal Indonesia Kreasi	919.026.355	328.800.000	*PT Portal Indonesia Kreasi*
PT Daya Radar Utama	842.575.154	624.130.565	*PT Daya Radar Utama*
PT Eastern Citra Bamantara	841.750.060	998.487.641	*PT Eastern Citra Bamantara*
PT Janata Marina Indah	829.208.022	1.324.322.970	*PT Janata Marina Indah*
PT Gading Mas Murni Utama	789.643.687	859.474.315	*PT Gading Mas Murni Utama*
PT Pahala Artha Lestari	770.853.949	231.055.298	*PT Pahala Artha Lestari*
CV Alfa Teknik Mandiri	734.898.573	-	*CV Alfa Teknik Mandiri*
PT Harapan Abadi Niagatama	659.330.317	-	*PT Harapan Abadi Niagatama*
Amidis Tirta Mulia	647.464.940	-	*Amidis Tirta Mulia*
Sqiva Sistem	637.824.474	-	*Sqiva Sistem*
Multi Diesel Service	616.589.650	-	*Multi Diesel Service*
Primaera Mandiri Perkasa	608.278.647	-	*Primaera Mandiri Perkasa*
PT Asuransi Purna Artha Nugraha	607.813.811	-	*PT Asuransi Purna Artha Nugraha*
Tri Agung Sinergi	520.284.450	-	*Tri Agung Sinergi*
PT Hoka Karya Mandiri	-	617.128.816	*PT Hoka Karya*
PT Metito Indonesia	-	785.850.000	*PT Metito Indonesia*
PMI DKI Jakarta	-	9.992.860.000	*PMI DKI Jakarta*
Koperasi Sehat Sejahtera	-	6.637.758.100	*Koperasi Sehat Sejahtera*
Saldo pindahan	**76.359.204.401**	**89.730.757.752**	***Brought forward balance***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

21. UTANG USAHA (Lanjutan) / *ACCOUNTS PAYABLE (Continued)*

	2020	2019	
Pihak Ketiga: (Lanjutan)			***Thrid Parties:*** *(Continued)*
Saldo pindahan	**76.359.204.401**	**89.730.757.752**	***Brought forward balance***
Pembelian Barang Dagangan Pelnimart	-	6.497.603.425	*Pembelian Barang Dagangan Pelnimart*
PT Anugerah Pharmindo Lestari	-	5.822.226.174	*PT Anugerah Pharmindo Lestari*
Anugrah Argon Medica	-	4.511.249.802	*Anugrah Argon Medica*
PT Nugra Karsera	-	3.666.317.164	*PT Nugra Karsera*
PT Segara Permai	-	2.925.232.912	*PT Segara Permai*
PT Indomedika Duta Mandiri	-	2.427.234.755	*PT Indomedika Duta Mandiri*
PT Enseval Putra Megatrading	-	2.071.222.836	*PT Enseval Putra Megatrading*
PT Parit Padang	-	1.945.601.909	*PT Parit Padang*
PT Merapi Utama Farma	-	1.792.990.967	*PT Merapi Utama Farma*
PT Jasaraharja Putera	-	1.536.564.000	*PT Jasaraharja Putera*
Anara Trisakti Medika	-	1.470.604.984	*Anara Trisakti Medika*
PT GE Operations Indonesia	-	1.445.960.000	*PT GE Operations Indonesia*
PT Bina San Prima	-	1.417.898.225	*PT Bina San Prima*
PT Sinar Roda Utama	-	1.305.555.545	*PT Sinar Roda Utama*
PT Eastern	-	1.164.573.630	*PT Eastern*
PT Cardig Anugra Sarana Bersama	-	1.143.749.750	*PT Cardig Anugra Sarana Bersama*
PT Prima Jaya	-	1.129.430.788	*PT Prima Jaya*
PT Cipta karya Mandiri Insani	-	969.783.645	*PT Cipta karya Mandiri Insani*
PT Citas Otis Elevator	-	958.878.600	*PT Citas Otis Elevator*
PT Central Marine Indonesia	-	955.175.756	*PT Central Marine Indonesia*
PT Balato Indonesia	-	903.219.877	*PT Balato Indonesia*
PT Pioneer	-	871.980.369	*PT Pioneer*
PT Tawada Healthcare	-	792.509.938	*PT Tawada Healthcare*
PT Citra Shipyard	-	653.531.019	*PT Citra Shipyard*
Apotek Medika Graha Utama	-	619.150.100	*Apotek Medika Graha Utama*
PT Kimiko Kimberly Indonesia	-	611.938.400	*PT Kimiko Kimberly Indonesia*
PT Kebayoran Farma	-	602.084.607	*PT Kebayoran Farma*
PT Dinani Abadi	-	548.757.793	*PT Dinani Abadi*
Lainnya (dibawah Rp500 Juta)	1.069.399.028	65.190.167.204	*Others (below Rp500 Million)*
Sub Jumlah	**77.428.543.429**	**163.407.935.060**	***Sub Total***
Jumlah	**97.619.849.232**	**190.082.677.190**	***Total***

Utang usaha pada PT Cahaya Samoedra Bersaudara adalah terkait dengan pelumas untuk kapal, sedangkan pada PT Harapan Abadi Niagatama dan Pancura Cahaya Wahyu terkait pengadaan suku cadang kapal.

The accounts payable to PT Cahaya Samoedra Bersaudara are related to lubricants for ships, while PT Harapan Abadi Niagatama and Pancura Cahaya Wahyu are related to the ship spare parts.

Utang usaha pada PT Dalekesa Asri Cemerlang, PT Wartsila Indonesia. PT Global Marinedo Safety Indonesia merupakan Utang pekerjaan running repair.

Accounts payable to PT Dalekesa Asri Cemerlang. PT Wartsila Indonesia. PT Global Marinedo Safety Indonesia are payable for running repair jobs.

Utang pada PT Astra Graphia terkait pengadaan perangkat Disaster Recovery Center

Debt to PT Astra Graphia regarding the procurement of the Disaster Recovery Center equipment

22. BEBAN AKRUAL / *ACCRUED EXPENSES*

	2020	2019	
Entitas Induk:			***Parent entity:***
Usaha Perkapalan	208.872.012.732	162.624.203.886	*Shipping*
Lainnya	82.709.621.976	24.013.119.874	*Other*
Sub Jumlah	**291.581.634.708**	**186.637.323.760**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Pelita Indonesia Djaya	69.594.570.602	67.242.821.135	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Sarana Bandar Nasional	12.057.368.253	21.030.725.035	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Rumah Sakit Pelni	-	859.054.261	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**81.651.938.855**	**89.132.600.431**	***Sub Total***
Jumlah	**373.233.573.563**	**275.769.924.191**	***Total***

22. BEBAN AKRUAL (Lanjutan)

Beban akrual yang tercatat pada entitas anak (PT Pelita Indonesia Djaya) merupakan transaksi untuk usaha permakanan, usaha jasa dan lainnya.

Beban akrual yang tercatat pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan transaksi untuk operasional bongkar muat.

Pengembalian dana Subsidi atas kegiatan tahun 2018

Berdasarkan Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Nomor AL.201/28/11/DA-2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Atas Temuan Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Perintis Tahun Anggaran 2018, maka Perusahaan diharuskan untuk melakukan penyetoran pada Kas Negara atas temuan tersebut sebesar Rp90.160.137.289

Berdasarkan Berita Acara pembahasan tindak lanjut hasil audit dilingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut wilayah Inspekturat II, Inspektorat Jendral Kementrian Perhubungan tanggal 22 Februari 2021. Terdapat verifikasi yang dilakukan Perseroan sebesar Rp9.362.381.366 (termasuk pajak), sehingga jumlah yang harus dikembalikan oleh Perseroan sebesar Rp80.797.755.923.

Pengembalian Dana Subsidi atas kegiatan tahun 2019

Berdasarkan surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral – Perhubungan Laut No. UM. 006/1/12/DA – 2021 tanggal 12 Januari 2021. Perihal tindak lanjut atas temuan kegiatan perintis Tahun Anggaran 2019. Maka Perseroan diharuskan untuk melakukan penyetoran kembali kepada negara sebesar Rp17.445.899.239.

Pengembalian Dana Subsidi atas kegiatan tahun 2019 (PT PID)

Berdasarkan surat no 07.30/01/S-B/090/2020 tanggal 30 Juli 2020 dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) perihal rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas belanja subsidi Kewajiban Pelayaran Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, entitas anak di haruskan melakukan pengembalian atas kekurangan pembayaran upah dan denda keterlambatan sebesar Rp7.566.266.874.

***22. ACCRUED EXPENSES** (Continued)*

The accrual expenses in subsidiaries (PT Pelita Indonesia Djaya) are transactions for the business of food, service business and others.

The accrual expenses in the subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) is a transaction for the operation of loading and unloading.

Refund of subsidies for activities in 2018

Based on the Letter of the Ministry of Transportation of the Directorate General of Sea Transportation Number AL.201 / 28/11 / DA-2020 dated December 30, 2020 regarding Follow-up to the Findings of Pioneer Transportation Activities *for Fiscal Year 2018, the Company is required to make a deposit in the State Treasury for these findings in the amount of Rp90,160,137,289*

Based on discussion of follow-up audit results within the Directorate General of Sea Transportation, Inspectorate II Area, dated February 22, 2021. There is a verification conducted by the Company amounting to Rp9,362,381,366 (included tax)so the amount that must be returned by the Company is Rp80,797,755,923.

Refund of Subsidies for activities in 2019

Based on a letter from the Ministry of Transportation, Directorate General - Sea Transportation No. UM. 006/1/12 / DA - 2021 dated January 12, 2021. Regarding the follow-up to the findings of pioneering activities for the 2019. Therefore the Company is required to Refunds to the State in the amount of Rp17,445,899,239.

Refund of Subsidies for activitiesin 2019 (PT PID)

Based on a letter No. 07.30/01/S-B/090/2020 dated July 30, 2020. From PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) regarding recommendation "Badan Pemeriksa Keuangan" for subsidy expenditure for Public Shipping Liabilities for Economic Passenger Sea Transportation in Domestic Sea Transportation for Fiscal Year 2019, the subsidiary is required to make a refund for the underpayment of wages and late fees of Rp7,566,266,874.

23. LIABILITAS KONTRAK / ***23. CONTRACT LIABILITIES***

	2020	2019	
Pendapatan Diterima Dimuka			***Prepaid Revenues***
Entitas Induk:			*Parent entity:*
Tambang pasasi dan muatan	23.023.000	84.040.000	*Ticket and Freight*
Sewa	713.823.672	680.652.726	*Rental*
Lainnya	1.931.789.056	2.260.524.354	*Others*
Sub Jumlah	**2.668.635.728**	**3.025.217.080**	***Sub Total***
Entitas Anak:			*Subsidiary:*
PT Sarana Bandar Nasional	123.017.247	1.059.620.526	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	403.425.525	395.167.010	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	-	3.282.942.352	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**526.442.772**	**4.737.729.888**	***Sub Total***
Sub Total	**3.195.078.500**	**7.762.946.968**	***Sub Total***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

23. LIABILITAS KONTRAK (Lanjutan) / *CONTRACT LIABILITIES (Continued)*

Uang Muka Diterima			***Advance Received***
Entitas Induk:			***Parent entity:***
Usaha Perkapalan	18.381.004.306	20.201.685.230	*Shipping*
Uang Jaminan	10.327.190.106	11.513.858.038	*Deposits*
Usaha Keagenan	7.464.302.501	6.263.355.497	*Agency*
Usaha Sampingan	14.500.000	32.900.001	*Side Business*
Lainnya	12.815.998.661	6.867.957.396	*Others*
Sub Jumlah	**49.002.995.574**	**44.879.756.162**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	6.091.912.933	14.396.229.567	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	799.378.700	647.353.776	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	-	311.237.078	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**6.891.291.633**	**15.354.820.421**	***Sub Total***
Jumlah Liabilitas Kontrak	**55.894.287.207**	**60.234.576.583**	***Total Contract Liabilities***
Jumlah	**59.089.365.707**	**67.997.523.551**	***Total***

Liabilitas yang tercatat di entitas induk meliputi:

a. Uang jaminan diterima merupakan uang muka/deposit sebagai jaminan atas hubungan kerja sesuai kontrak/ketentuan. dan akan dikembalikan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan/ketentuan yang berlaku. meliputi uang deposit agen/biro perjalanan dan uang jaminan rekanan.

b. Uang muka diterima usaha perkapalan merupakan uang muka yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha perkapalan. meliputi tambang pasasi, tambang muatan, charter kapal, sewa ruang kapal, wisata bahari dan lainnya.

c. Pendapatan diterima di muka tambang pasasi dan muatan merupakan penerimaan hasil penjualan tiket penumpang dan muatan pada suatu jadwal keberangkatan kapal untuk beberapa tujuan pelabuhan singgah.

d. Pendapatan diterima dimuka lainnya antara lain pendapatan atas pelayanan kegiatan wisata bahari, pendapatan subsidi kapal rede, kapal ternak, dan tol laut.

Pada tahun 2019, Pendapatan diterima dimuka yang tercatat pada entitas anak (PT Rumah Sakit Pelni) merupakan pendapatan sewa ruang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan area kantin.

Pendapatan diterima dimuka yang tercatat pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan pendapatan diterima dimuka atas pelayanan usaha kepelabuhanan termasuk didalamnya uang muka usaha pemuatan dan pembongkaran serta uang jaminan berkenaan dengan pelayanan kepelabuhanan.

Contract Liabilities recorded on the parent entity include:

a. The deposit is received as deposit for security of the contractual / contractual relationship. and will be refunded at once or gradually in accordance with the applicable agreement. including the deposit of the agent / travel agency and the security deposit of the counterparty.

b. Advances received by the shipping business are advances received in connection with shipping business activities. including pasang mines. cargo mines. boat charter. space rental vessels. marine tourism and others.

c. Prepaid income of the pasasi mine and the cargo shall be the proceeds of the sale of passenger tickets and cargo on a scheduled departure of the vessel for some of the transit port purposes.

d. Other income received in advance includes. among other things. revenue from services for marine tourism activities. income from subsidized rede ships.livestock vessels. and sea tolls.

In 2019, Prepaid Revenues in subsidiaries (PT Rumah Sakit Pelni) is the lease income of the space of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and canteen area.

Prepaid revenues in the subsidiaries (PT Sarana Bandar Nasional) is an acceptable income on the business services of port. including the advance of loading and disassembling business as well as collateral money regarding the service of the port.

24. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA / *OTHER SHORT TERM FINANCIAL LIABILITIES*

	31 Desember/ *December 2020*	**31 Desember/ *December 2019***	
Entitas Induk:			***Parent entity:***
Pihak Berelasi			*Related Parties*
Pegawai	42.017.780.003	-	*Employee*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	6.745.571.603	5.356.219.592	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	6.684.887.229	1.733.337.751	*PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	5.185.839.747	2.451.590.820	*PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)*
Otoritas Pelabuhan	2.950.341.494	7.590.504.069	*Port Authority*
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2.734.441.943	1.526.486.450	*PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)*
Saldo dipindahkan	**66.318.862.019**	**18.658.138.682**	***Carried forward balance***

24. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA (Lanjutan) / ***24. OTHER SHORT TERM FINANCIAL LIABILITIES*** *(Continued)*

a. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya (Lanjutan) / ***a. Other's Short Term Finance Liability*** *(Continued)*

	31 Desember/ *December 2020*	31 Desember/ *December 2019*	
Entitas Induk: (Lanjutan)			***Parent entity:*** *(Continued)*
Pihak Berelasi (Lanjutan)			*Related Parties (Continued)*
Saldo pindahan	**66.318.862.019**	**18.658.138.682**	***Brought forward balance***
BPJS Ketenagakerjaan	864.961.560	864.961.560	*BPJS Ketenagakerjaan*
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	-	780.096.161	*Pelni Pensioners Health Foundation*
Yayasan Dana Pensiunan Pelni	-	393.506.081	*Pelni Pension Fund Foundation*
Lainnya	87.095.780	820.231.750	*Others*
Sub Jumlah	**67.270.919.359**	**21.516.934.234**	***Sub Total***
Pihak Ketiga			***Related Parties***
PT Asuransi Purna Artanugraha	3.407.636.449	3.463.782.027	*PT Asuransi Purna Artanugraha*
PT Altrak 1978	2.320.279.085	-	*PT Altrak 1978*
PT Citra Bayu Adhiguna	-	2.469.020.679	*PT Citra Bayu Adhiguna*
PT Dekatama Centra	-	1.356.167.946	*PT Dekatama Centra*
PT Asuransi Jasa Raharja Putera	-	1.354.207.184	*PT Asuransi Jasa Raharja Putera*
PT Liandra Kreasi Gemilang	-	933.941.500	*PT Liandra Kreasi Gemilang*
Lainnya	5.393.935.731	12.582.624.025	*Others*
Sub Jumlah	**11.121.851.265**	**22.159.743.361**	***Sub Total***
Sub Jumlah Entitas Induk	**78.392.770.624**	**43.676.677.595**	***Sub Total Parent Entity***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
PT Sarana Bandar Nasional	672.414.154	24.385.736.850	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Rumah Sakit Pelni	-	4.948.850.951	*PT Rumah Sakit Pelni*
PT Pelita Indonesia Djaya	746.545.417	195.500.020	*PT Pelita Indonesia Djaya*
Sub Jumlah Entitas Anak	**1.418.959.571**	**29.530.087.821**	***Sub Total Subsidiaries***
Jumlah	**79.811.730.195**	**73.206.765.416**	***Total***

25. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG (Lanjutan) / ***25. LONG TERM DEBT*** *(Continued)*

31 Desember/*December* 2020					
Nama Kreditur/ *Creditur*	**Tingkat Bunga / *Interest Rate***	**Jatuh Tempo Tahun / *Maturity Year***	**Saldo 31 Des 2020 / *Balance Dec 31. 2020***	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / *Current Portion for Long Term Debt *)***	**Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / *Long Term Portion Maturity***
KFW - *Spare parts*	1.25%	2025	23.426.747.724	2.129.703.630	21.297.044.094
KFW - KM Labobar	1.25%	2025	13.190.012.039	1.199.091.295	11.990.920.744
Jumlah			**36.616.759.763**	**3.328.794.925**	**33.287.964.838**

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

25. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG / *25. LONG TERM DEBT*

Nama Kreditur/ *Creditur*	Tingkat Bunga / *Interest Rate*	Jatuh Tempo Tahun / *Maturity Year*	Saldo 31 Des 2019 / *Balance Dec 31. 2019*	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / *Current Portion for Long Term Debt *)*	Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / *Long Term Portion Maturity*
		31 Desember/*December* 2019			
KFW - *Spare parts*	1.25%	2025	21.204.085.320	3.480.658.332	17.723.426.988
KFW - KM Labobar	1.25%	2025	9.290.883.267	1.959.722.021	7.331.161.246
Jumlah			**30.494.968.587**	**5.440.380.353**	**25.054.588.234**

KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia: SLA-1144/DP3/2001 - Nilai Pinjaman DM 44.000.000

Pinjaman kepada *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar DM 44.000.000 sesuai dengan *Loan Agreement* 1999 66 383 tanggal 31 Juli 2000 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Menteri Keuangan No. S-047/MK.17/2001 tanggal 15 Januari 2001 sebagai *Project Executing Agency* dan *Sub Borrower* dalam rangka pengadaan *Spareparts* untuk kapal penumpang yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank DKI Jakarta sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga. dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

a. Bagian A sebesar DM 28.600.000 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.

b. Bagian B sebesar DM 15.400.000 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 9,54% per tahun.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka menyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 33/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan *cut off date* pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar DM 28.468.125 atau setara dengan Euro 14.555.521 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2040 dan DM 15.328.990 atau setara dengan Euro7.837.588.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA- 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor ; AMA-488/SLA- 1144/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2015 diubah menjadi:

a. Kewajiban pokok pinjaman senilai EUR22.393.109,43 dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. yang terdiri dari:

   1) pinjaman lunak sebesar EUR14.555.521,09.
   2) pinjaman komersil sebesar EUR7.837.588,34.

KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia : SLA-1144/DP3/2001 - Value of Loan DM 44,000,000

Loans to the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to DM 44 million according to the 1999 66 383 Loan Agreement dated July 31, 2000 which was forwarded to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) through the Ministry of Finance letter No. S-047 / MK.17 / 2001 dated January 15.2001 as Project Executing Agency and Sub-borrower in order to procure Spare parts for passenger ships as outlined in the Agreement SLA No.1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of Indonesia with PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and PT Bank DKI Jakarta appoint as an intermediary in the payment of principal and interest costs. with details of the loan as follows:

a. Part A of DM 28,600,000 as soft loans with an interest rate of 1.25% per year.

b. Part B of DM 15,400,000 as a commercial loan with an interest rate of 9.54% per year.

Based on the Minutes of Reconciliation in the Context menyelesaian sourced from the State Receivables Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 33 / PB4.1 / PT Bank DKI / 2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut-off date of March 31, 2007 with total liabilities of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) amounting to DM 28,468,125 or equivalent to Euro14,555,521 to soft loans ended June 30, 2040 and DM 15.328.990 equivalent to Euro7,837,588.

Based on the Amendment Agreement (Amendment) on the Loan Settlement Agreement No. SLA-1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of the Republic of Indonesia and company PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number; AMA-488 / SLA-1144 / DSMI / 2015 dated December 1, 2015 changed to:

a. The principal liability of EUR22,393,109.43 is made into State Equity Participation through the process in accordance with the provisions of the law. which consists of:

   1) a soft loan of EUR14,555,521.09.
   2) a commercial loan of EUR7,837,588.34.

25. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG (Lanjutan)

KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia: SLA-1144/DP3/2001 - Nilai Pinjaman DM 44.000.000 (Lanjutan)

b. Kewajiban non pokok senilai EUR2.457.823.45 dibayarkan selama 10 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2025 yang terdiri dari:

1) pinjaman lunak sebesar EUR431.540.19.
2) pinjaman komersil sebesar EUR2.026.283.26.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia. maka sisa pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (SLA-1144/DP3/2001) sebesar EUR2.457.823,45.

KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro 16.361.340

Pinjaman kepada *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar Euro 81.806.700 sesuai dengan Loan Agreement 2001 65 159 tanggal 1 Februari 2002 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Menteri Keuangan No. S-115/MK.17/2002 tanggal 22 April 2002 sebesar Euro16.361.340 dalam rangka pengadaan Kapal Penumpang Nomor 23 Pelni yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga. dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

a. Bagian A sebesar Euro8.180.670 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.

b. Bagian B sebesar Euro8.180.670 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 6,39% per tahun.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 34/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan *cut-off date* pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Euro7.469.800 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2042 dan Euro7.460.000 untuk pinjaman komersil yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA- 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT *Pelayaran* Nasional Indonesia Nomor ; AMA-489/SLA- 1151/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2015. diubah menjadi:

a. Kewajiban pokok pinjaman senilai EUR14.929.800 dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. yang terdiri dari:

1) pinjaman lunak sebesar EUR7.469.800.
2) pinjaman komersil sebesar EUR7.460.000.

***25. LONG TERM DEBT NON BUSINESS** (Continued)*

***KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia : SLA-1144/DP3/2001 - Value of Loan DM 44,000,000** (Continued)*

b. Non principal liabilities of EUR 2.457.823.45 are payable for 10 years from 2016 to 2025 consisting of:

1) a soft loan of EUR431,540.19.
2) a commercial loan of EUR2,026,283.26.

With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 dated December 30, 2016 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia. the remaining loan to the Government of the Republic of Indonesia (SLA-1144 / DP3 / 2001) of EUR2,457,823.45.

KFW Passenger ship - Government of Republic Indonesia: SLA-1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro 16,361,340

Loans to the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to Euro81,806,700 according to the 2001 65 159 Loan Agreement dated February 1. 2002 which was forwarded to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) through the Ministry of Finance letter No. S-115 / MK.17 / 2002 April 22, 2002 amounted to Euro16,361,340 in order to procure Passenger Vessel No. 23 Pelni as outlined in the Agreement SLA No.1151 / DP3 / 2002 dated May 30, 2002 between the Government of Indonesia with PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and appointed PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) as an intermediary in the payment of principal and interest costs. with details of the loan as follows:

a. Part A of Euro8,180,670 as a soft loan with an interest rate of 1.25% per year.

b. Section B of Euro8,180,670 as a commercial loan with an interest rate of 6,39% per year.

Based on the Minutes of Settlement Reconciliation in the Context of State Receivables sourced from Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Pelayaran Nasional Indonesian No. 34 / PB4.1 / PT Bank DKI / 2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut-off date of March 31, 2007 with total liabilities of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) amounting to Euro 7,469,800 for soft loans ended June 30, 2042 and Euro7,460,000 for commercial loans ended June 30, 2015.

Based on the Amended Agreement (Amendment) to the Loan Forwarding Agreement Number SLA-1151 / DP3 / 2002 dated May 30, 2002 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number; AMA-489 / SLA- 1151 / DSMI / 2015 dated December 1, 2015. changed to:

a. The principal liability of EUR 14,929,800 is made into State Equity Participation through the process in accordance with the provisions of the law. which consists of:

1) a soft loan of EUR 7,469,800.
2) a commercial loan of EUR 7,460,000.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

25. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG (Lanjutan)

KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro 16.361.340 (Lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA- 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor ; AMA-489/SLA- 1151/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2025 diubah menjadi: (Lanjutan)

b. Kewajiban non pokok senilai EUR1.383.833,45 dibayarkan selama 10 tahun dai tahun 2016 sampai dengan 2015 yang terdiri dari:
   1) pinjaman lunak sebesar EUR220.414,14.
   2) pinjaman komersil sebesar EUR1.163.419,31.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia. maka sisa pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (SLA-1151/DP3/2002) sebesar EUR1.383.833,45. (Lihat Catatan 27).

Pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) telah mengajukan usulan penghapusan Utang SLA Non Pokok atas pinjaman AMA-448/SLA-1144/DSMI/2015 dan AMA-489/SLA-1151/DSMI/2015 kepada Pemerintah berdasarkan surat Kementerian BUMN RI Nomor: SR-464/MBU/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal usulan Tambahan Dana PMN Non Tunai dan Penghapusan Piutang pada BUMN untuk APBN TA 2021. Hingga laporan ini diterbitkan, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) masih menunggu keputusan Pemerintah atas pengajuan penghapusan utang SLA non Pokok tersebut.

***25. LONG TERM DEBT NON BUSINESS** (Continued)*

***KFW Passenger ship - Government of Republic Indonesia: SLA-1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro 16.361.340** (Continued)*

Based on the Amended Agreement (Amendment) to the Loan Forwarding Agreement Number SLA-1151 / DP3 / 2002 dated 30 May 2002 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number; AMA-489 / SLA- 1151 / DSMI / 2015 dated December 1, 2025. changed to: (Continued)

b. Non principal liabilities of EUR1,383,833.45 are payable for 10 years from 2016 to 2015 consisting of:
   1) a soft loan of EUR 220,414.14.
   2) a commercial loan of EUR 1,163,419.31.

With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 dated December 30, 2016 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia. the remaining loan to the Government of the Republic of Indonesia (SLA-1151 / DP3 / 2002) of EUR 1,383,833.45. (See Note 27)
On October 2, 2020, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) has submitted a proposal to write off Non-principal SLA Debt for loans AMA-448/SLA-1144/DSMI/2015 and AMA-489/SLA 1151/DSMI/2015 to the Government based on a letter The Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia Number: SR-464/MBU/07/2020 dated July 2, 2020 regarding the proposal for Additional Non-Cash PMN Funds and the Elimination of Receivables from SOEs for the 2021 FY APBN. the Government's decision on the submission of the non-principal SLA debt write-off.

26. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG

26. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS

	31 Desember/*December* 2020				
Nama Kreditur/ *Creditur*	**Tingkat Bunga / *Interest Rate***	**Jatuh Tempo Tahun / *Maturity Year***	**Saldo 31 Des 2020 / *Balance Dec 31. 2020***	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / *Current Portion for Long Term Debt *)***	**Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / *Long Term Portion Maturity***
PT Bank Mandiri (Persero)	14.00%	2021	4.195.797.343	4.195.797.343	-
Sewa Pembiayaan/ *Finance Lease*			5.611.902.400	2.074.480.400	3.537.422.000
Jumlah/*Total*			9.807.699.743	6.270.277.743	3.537.422.000

26. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

26. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS *(Continued)*

			2019		
Nama Kreditur/ *Creditur*	**Tingkat Bunga / *Interest Rate***	**Jatuh Tempo Tahun / *Maturity Year***	**Saldo 31 Des 2019 / *Balance Dec 31, 2019***	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / *Current Portion for Long Term Debt *)***	**Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / *Long Term Portion Maturity***
PT Bank Syariah Mandiri	12.75%	2021	3.312.950.652	1 .861.806.083	1 .451.144.569
PT Bank Syariah Mandiri	12.75%	2021	2.301.889.933	1 .221.857.971	1 .080.031.962
PT Bank Syariah Mandiri	12.75%	2021	1.242.032.147	592.032.859	649.999.288
PT Bank Syariah Mandiri	12.75%	2022	4.152.885.963	1 .318.974.172	2 .833.911.791
PT Bank Syariah Mandiri	9.00%	2028	45.251.540.000	2 .321.250.150	42.930.289.850
PT Bank Syariah Mandiri	9.00%	2024	8.424.584.939	1 .426.439.220	6 .998.145.719
PT Bank Syariah Mandiri	9.00%	2020	42.513.098.643	42.513.098.643	-
PT Bank Syariah Mandiri	9.00%	2020	30.000.000.000	30.000.000.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	9.00%	2020	30.000.000.000	30.000.000.000	-
Sewa Pembiayaan / *Financial Lease*			5.276.327.000	1.861.787.000	3.414.540.000
Jumlah/*Total*			**172.475.309.276**	**113.117.246.097**	**59.358.063.180**

Utang sewa guna usaha per tanggal 31 Desember 2020 tersebut terdiri dari pembelian kendaraan bermotor/alat angkut yang akan disewakan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan kepada pihak ketiga lainnya. (lihat catatan 14).

As of December 31, 2020 the lease payables consists of the purchase of a motorized vehicle / transportation tool that will be leased to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and to other third parties. (see note 14).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Utang Bank yang Jatuh Tempo adalah utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 5.000.000.000 dengan nomor surat RCO.JKB/0045/KMK/2020 dengan Tingkat suku bunga: 8.50% per tahun. Jangka Waktu Kredit 1 oktober 2020 s/d 30 september 2021 (12 bulan). Tujuan Penggunaan Kredit yaitu Pembiayaan kebutuhan produktif usaha *food and beverages, outshourching service, car rent, wisata, informastion technology service management* (ITSM). maintenance service, crewing dan usaha penunjang lainnya untuk pelayani PT PELNI. Penerima Kredit menyerahkan agunan kepada Bank Sebidang tanah SHGB rumah toko 4 (empat) lantai di komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No. 5 Jl. Letjen Suprapto. Kel Sumur Batu Kec Kemayoran Jakarta Pusat.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Maturity of Bank Debt for PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to IDR 5,000,000,000 with number RCO.JKB / 0045 / KMK / 2020 had an interest rate: 8.50% per annum. Period for October 1, 2020 to September 30, 2021 (12 months). The purpose of using credit is to finance the productive needs of a food and beverages business, outshourching service, car rent, travel, Information Technology Service Management (ITSM), maintenance service, crewing and other supporting efforts to serve PT PELNI. The Credit Recipient hands over the collateral to the Bank A plot of land SHGB, a 4 (four) storey shop house in the Mega Grosir Cempaka Mas Ruko complex Blok Q No. 5 Jl. Lt. Gen. Suprapto. Kel Sumur Batu Kec Kemayoran Central Jakarta.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, and for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

26. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

a. Perjanjian Kredit Nomor: 45.- LD1833428722.

Maksimum Kredit yang diberikan sebesar Rp9.694.200.000 dana yang dicairkan sebesar Rp8.757.781.884 dengan tujuan untuk keperluan investasi pembelian alat kesehatan diluar *Merial Tower* dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit Nomor: 45.- LD1833428722. (Lanjutan)

Operating Table + Acessories package	Rp	600.000.000
Complette Set Bubble CPAP + Air-02 Mixer.		
Combined With Optiflow and Compressor	Rp	208.000.000
USG (*Probe convex + Endocavity*) *Merk* :		
Mindray / China *Type* DCN-6	Rp	211.200.000
Laser Mata	Rp	338.250.000
USG (*Probe convex + linier + sector + dycom*)		
Merk : Ben-Q/ Taiwan Type UP 200	Rp	176.000.000
Endoscopy Evis Exera III Series 190	Rp	2.067.762.400
MSCT 32 SLICE / RESOLUTION ACT	Rp	2.431.680.000
Instrument Bedah Jantung	Rp	34.089.484
Dental Chair	Rp	95.600.000
Hearth Lung Machine	Rp	2.403.200.000
Heater Cooler Machine	Rp	212.000.000
Pembiayaan	Rp	**8.777.781.884**

Sifat kredit adalah kredit investasi *Non Revolving* dengan schedule angsuran pokok sebagai berikut angsuran bulan ke-1 s/d ke-72 Rp177.230.309. Kredit diberikan selama jangka waktu 72 bulan sejak pencairan kredit. termasuk grace period 6 (enam) bulan. dikenakan bunga sebesar 9% per tahun atau sesuai tarif suku bunga yang berlaku di BSM pada saat penandatangan Perjanjian Kredit dan selanjutnya akan direview setiap saat untuk di sesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BSM.

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

1) Agunan saat efektif fasilitas 1 :

Sesuai dengan eksisting diikuti dengan pelepasan agunan deposito bank senilai Rp26.315.789.474

2) Dengan tambahan agunan:

a. Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT Rumah Sakit PELNI senilai Rp53.000.000.000. (Lihat Catatan 8).

b. Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi seluas 60.601 M2 yang diuraikan dalam surat ukur nomor 14/2004 tanggal 07 Mei 2004 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tertanggal 19 Mei 2004 yang tercatat atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT PELNI (Persero). (Lihat Catatan 17).

***26. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS** (Continued)*

PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

a. Agreement Number: 45.-LD1833428722

The maximum loan amounting to Rp9,694,200,000 disbursed funds amounting to Rp8,757,781,884 for the purpose of investing in the purchase of medical devices outside the Merial Tower.with details as follows:

a. Agreement Number: 45.-LD1833428722 (Continued)

Operating Table + Acessories package	Rp	600.000.000
Complette Set Bubble CPAP + Air-02 Mixer.		
Combined With Optiflow and Compressor	Rp	208.000.000
USG (Probe convex + Endocavity) Merk :		
Mindray / China Type DCN-6	Rp	211.200.000
Laser eye	Rp	338.250.000
USG (Probe convex + linier + sector + dycom)		
Merk : Ben-Q/ Taiwan Type UP 200	Rp	176.000.000
Endoscopy Evis Exera III Series 190	Rp	2.067.762.400
MSCT 32 SLICE / RESOLUTION ACT	Rp	2.431.680.000
Cardiac Surgery Instrument	Rp	34.089.484
Dental Chair	Rp	95.600.000
Hearth Lung Machine	Rp	2.403.200.000
Heater Cooler Machine	Rp	212.000.000
Financing	Rp	**8.777.781.884**

The nature of credit is Non-Revolving investment credit with a schedule of principal installments as follows: installments of the 1st month to 72nd month Rp177,230,309. Credit is given for a period of 72 months from credit disbursement. including a grace period of 6 (six) months. bears interest at 9% per year or according to the interest rate applicable at BSM at the time of signing the Credit Agreement and will be reviewed at any time to be adjusted with the interest rate applicable at BSM.

Assets submitted as collateral in the form of:

1) Collateral *when effective facility 1:*

In accordance with the existing followed by the release of collateral for bank deposits valued at Rp26,315,789,474.

2) With additional collateral:

a. Effective account receivables and potential trade receivables of PT Rumah Sakit Pelni worth Rp53,000,000,000. (See Note 8).

b. The Land and Building of the Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Building Rights Number 620 / Slipi covering an area of 60.601 M2 described in letter number 14/2004. dated May 7, 2004 issued by the Head of West Jakarta City Land Office dated May 19, 2004 the name of the Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia as PT PELNI (Persero). (See Note 17).

26. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (Lanjutan)

a. Perjanjian Kredit Nomor: 45.- LD1833428722. (Lanjutan)

3) Agunan setelah selesainya proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 620/Slipi menjadi atas nama PT Rumah Sakit Pelni (fasilitas II sampai degan fasilitas V dapat efektif): (Lihat Catatan 15).

a. 1 set alat *Angiography/cathlab* merek GE *Healthcare* tipe Innova IGS 520 Gen2 Tahun 2015.

b. Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi. seluas 60.601 M2 yang diuraikan dalam surat ukur nomor 14/2004. tanggal 07 Mei 2004. dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tertanggal 19 Mei 2004 yang tercatat atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT PELNI (Persero).

c. Seluruh alat kesehatan yang akan dibeli dan dibiayai oleh bank.

d. Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT RS Pelni senilai Rp.53.000.000.000.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 620 telah beralih dari PT Pelni (Persero) kepada PT Rumah Sakit Pelni sebagaimana tercantum dalam Lembar Tambahan untuk Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No.620. efektif tanggal 20 Agustus 2018.

b. Perjanjian Kredit No. 37.- LD1815170377

Perjanjian No. 37.- LD1815170377 perihal persetujuan Pembiayaan berdasarkan prinsip *Musyarakah Muntanaqishah (Non Revolving)* pada tanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah pokok terutang sebesar Rp45.270.540.000 dan *margin* yang ditetapkan 9,00% per anum. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 120 bulan. terhitung sejak tanggal pencairan pembiayaan. Fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk Refinancing Bangunan dan sarana Pendukung *Existing* Rumah Sakit Pelni (selain Bangunan *New Bougenville*).

26. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS *(Continued)*

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. *(Continued)*

a. Agreement Number: 45.-LD1833428722 (Continued)

3) Collateral after the completion of the process of turning the name of the Certificate of Building Rights 620 / Slipi becomes on behalf of PT Rumah Sakit Pelni (facility II to facility V can be effective): (See Note 15).

a. 1 set of GE Healthcare brand Angiography / cath tool type Innova IGS 520 Gen2 in 2015.

b. The Land and Building of the Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Building Rights Number 620 / Slipi. covering an area of 60,601 M2. described in letter number 14/2004. dated May 7, 2004. issued by the Head of West Jakarta City Land Office dated May 19, 2004 the name of the Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia as PT PELNI (Persero).

c. All medical devices that will be purchased and financed by the bank.

d. Effective trade receivables and trade receivables potential PT RS Pelni worth Rp53,000,000,000.

Building Rights Certificate No. 620 has switched from PT Pelni (Persero) to PT Rumah Sakit Pelni as stated in the Additional Sheet for Building Rights Certificate No.620. effective on August 20, 2018.

b. Agreement Number: 37.- LD1815170377

Agreement No. 37.- LD1815170377 concerning Financing approval based on the Musyarakah Muntanaqishah (Non Revolving) principle on May 31, 2018, with the outstanding principal amounting to Rp45,270,540,000 and the margin set at 9.00% per annum. Payments are made in installments for 120 months. starting from the date of disbursement of funds. The financing facility will be used to refit buildings and existing supporting facilities for Rumah Sakit Pelni (other than the New Bougenville Building).

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

26. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (Lanjutan)

b. Perjanjian Kredit No. 37.- LD1815170377 (Lanjutan)

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

1) Agunan saat efektif fasilitas 1 :

Sesuai dengan *existing* diikuti dengan pelepasan agunan deposito bank senilai Rp26.315.789.474.

2) Dengan tambahan agunan:

a) Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT Rumah Sakit PELNI senilai Rp53.000.000.000. (Lihat Catatan 8)

b) Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi. seluas 60.601 M2. (Lihat Catatan 17)

3) Agunan setelah selesainya proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 620/Slipi menjadi atas nama PT Rumah Sakit Pelni (fasilitas II sampai degan fasilitas V dapat efektif): (Catatan 8 dan 17)

a) Satu set alat *Angiography/cathlab* merek GE *Healthcare* tipe Innova IGS 520 Gen2 Tahun 2015.

b) Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi. seluas 60.601 M2.

c) Seluruh alat kesehatan yang akan dibeli dan dibiayai oleh bank.

d) Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT RS Pelni senilai Rp53.000.000.000.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 620 telah beralih dari PT Pelni (Persero) kepada PT Rumah Sakit Pelni sebagaimana tercantum dalam Lembar Tambahan untuk Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No.620. efektif tanggal 20 Agustus 2018.

26. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS *(Continued)*

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. *(Continued)*

b. Agreement Number: 37.- LD1815170377 (Continued)

Assets submitted as collateral in the form of:

1) Collateral when effective facility 1:

In accordance with the existing followed by the release of collateral for bank deposits valued at Rp26,315,789,474.

2) With additional collateral:

a) Effective account receivables and potential trade receivables of PT Rumah Sakit Pelni worth Rp53,000,000,000. (See Note 8)

b) The Land and Building of the Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Building Rights Number 620 / Slipi. covering an area of 60,601 M2. (See Note 17).

3) Collateral after the completion of the process of turning the name of the Certificate of Building Rights 620 / Slipi becomes on behalf of PT Rumah Sakit Pelni (facility II to facility V can be effective): (See Note 8 and 17).

a) 1 set of GE Healthcare brand Angiography / cath tool type Innova IGS 520 Gen2 in 2015.

b) The Land and Building of Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Building Rights Number 620 / Slipi. covering an area of 60,601 M2.

c) All medical devices that will be purchased and financed by the bank.

d) Effective trade receivables and trade receivables potential PT RS Pelni worth Rp53,000,000,000.

Building Rights Certificate No. 620 has switched from PT Pelni (Persero) to PT Rumah Sakit Pelni as stated in the Additional Sheet for Building Rights Certificate No.620. effective on August 20, 2018.

26. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (Lanjutan)

c. Perjanjian No. 02.- 7117838573

Berdasarkan Surat Nomor 02.- LD1527546276 Tanggal 7 Maret 2018 perihal persetujuan pembiayaan a.n PT Rumah Sakit PELNI. Perusahaan memperoleh jenis fasilitas pembiayaan *Musyarakah* (pembiayaan dana berputar), dengan *limit* pembiayaan sebesar Rp53.000.000.000, pinjaman yang dapat dicairkan sebesar Rp38.845.500.330. Proyeksi penjualan tahun 2018 sebesar Rp565.535.230.323. Tujuan pembiayaan untuk modal kerja usaha rumah sakit. dengan jangka waktu penarikan 12 bulan.

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

1) Agunan saat efektif fasilitas 1 :

Sesuai dengan existing diikuti dengan pelepasan agunan deposito bank senilai Rp26.315.789.474.

2) Dengan tambahan agunan:

a) Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT Rumah Sakit PELNI senilai Rp53.000.000.000. (Lihat Catatan 8)

b) Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi. seluas 60.601 M2. (Lihat Catatan 17)

3) Agunan setelah selesainya proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 620/Slipi menjadi atas nama PT Rumah Sakit Pelni (fasilitas II sampai degan fasilitas V dapat efektif): (Lihat Catatan 8 dan 17)

a) Satu set alat *Angiography/cathlab* merek GE *Healthcare* tipe Innova IGS 520 Gen2 Tahun 2015.

b) Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi. seluas 60.601 M2.

c) Seluruh alat kesehatan yang akan dibeli dan dibiayai oleh bank.

d) Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT RS pelni senilai Rp53.000.000.000.

26. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS *(Continued)*

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. *(Continued)*

c. Agreement Number: 02.- 7117838573

Based on Letter Number 02.- LD1527546276 dated March 7. 2018 concerning the financing agreement a.n PT Rumah Sakit PELNI. The company obtained a type of Musyarakah financing facility (revolving fund financing), with a financing limit of Rp53,000,000,000. a loan that could be disbursed in the amount of Rp38,845,500,330. The sales projection for 2018 is Rp565,535,230,323. The financing objectives for working capital of a hospital business. with a withdrawal period of 12 months.

Assets submitted as collateral in the form of:

1) Collateral when effective facility 1:

In accordance with the existing followed by the release of collateral for bank deposits valued at Rp26,315,789,474.

2) With additional collateral:

a) Effective account receivables and potential trade receivables of PT Rumah Sakit Pelni worth Rp53,000,000,000. (See Note 8)

b) The Land and Building of the Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Building Rights Number 620 / Slipi. covering an area of 60,601 M2. (See Note 17)

4) Collateral after the completion of the process of turning the name of the Certificate of Building Rights 620 / Slipi becomes on behalf of PT Rumah Sakit Pelni (facility II to facility V can be effective): (See Note 8 and 17)

a) 1 set of GE Healthcare brand Angiography / cath tool type Innova IGS 520 Gen2 in 2015.

b) The Land and Building of Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Building Rights Number 620 / Slipi. covering an area of 60,601 M2.

c) All medical devices that will be purchased and financed by the bank.

d) Effective trade receivables and trade receivables potential PT RS Pelni worth Rp53,000,000,000.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

26. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (Lanjutan)

c. Perjanjian No. 02.- 7117838573 (Lanjutan)

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 620 telah beralih dari PT Pelni (Persero) kepada PT Rumah Sakit Pelni sebagaimana tercantum dalam Lembar Tambahan untuk Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No.620 efektif tanggal 20 Agustus 2018.

d. Perjanjian No. 17/0114/0741/0058/VIII/MRBH

Berdasarkan Perjanjian No. 17/0114/0741/0058/VIII/MRBH perihal persetujuan Pembiayaan *Al-Murabahah* dengan fasilitas *Wakalah* (*Swing Line Facility - Non Revolving*) pada tanggal 01 Juli 2015 dengan jumlah pokok terutang sebesar Rp8.584.468.750 dan margin yang ditetapkan Rp3.022.734.968. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 39 bulan terhitung sejak tanggal pencairan pembiayaan.

Bank menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk membeli obyek *murabahah* yaitu berupa alat kesehatan *cathlab/angiography* GE *healthcare* tipe Innova IGS 520 gen 2.

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

1) Bangunan ruang rawat inap yang direnovasi.

2) 1 set alat *Angiography/Cath Lab Angiography/Cath Lab* merek GE Healthcare tipe Innova IGS 520 Gen2 atau spesifikasi lain dengan fungsi sama yang dibeli.

3) 1 set alat *Ultrasonography* (USG) merek Hitachi tipe *Hi Vision Avius* atau spesifikasi lain dengan fungsi sama yang dibeli.

4) 1 set alat *Endoscopy* merek Olympus atau spesifikasi lain dengan fungsi yang dibeli.

5) Kumpulan aset eksisting PT RS Pelni sejumlah 86 (delapan puluh enam) item sebagaimana tercantum dalam daftar pengikatan fidusia alat dan perlengkapan PT Rumah Sakit Pelni tertanggal 01 Juli 2015.

26. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS *(Continued)*

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. *(Continued)*

c. Agreement Number: 02.- 7117838573 (Continued)

Building Rights Certificate No. 620 has switched from PT Pelni (Persero) to PT Rumah Sakit Pelni as stated in the Additional Sheet for Building Rights Certificate No.620 effective on August 20, 2018.

d. Agreement No . 17/0114/0741/0058 / VIII / MRBH

Based on Agreement No. 17/0114/0741/0058 / VIII / MRBH regarding Al-Murabahah Financing approval with Wakalah facility (Swing Line Facility - Non Revolving) on July 1, 2015. with the principal amount owed Rp8,584,468,750 and the margin set at Rp3,022,734,968. Payments are made in installments for 39 month. starting from the date of disbursement of funds.

The bank provides financing facilities to customers that will be used to buy murabahah objects namely cathlab / angiography medical devices GE healthcare innova type IGS 520 gen 2.

Assets submitted as collateral in the form of:

1) Remodeled inpatient building.

2) 1 set of Angiography / Cath Lab Angiography / Cath Lab tools brand GE Healthcare type Innova IGS 520 Gen2 or other specifications with the same function purchased.

3) 1 set of Ultrasonography (USG) tools of Hitachi brand type Hi Vision Avius or other specifications with the same function purchased.

4) 1 set of Olympus Endoscopy tools or other specifications with functions purchased.

5) The collection of existing assets of PT RS Pelni is 86 (eighty six) items as listed in the fiduciary binding list of equipment and supplies of PT Rumah Sakit Pelni dated July 1, 2015.

26. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (Lanjutan)

e. Perjanjian No. 18/0201/0741/0058/VIII/MRBH

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.18/0201/0741/0058/VIII/MRBH. tanggal 03 Agustus 2016 a.n. PT Rumah Sakit Pelni tentang akad pembiayaan untuk renovasi dan pembangunan ruang rawat inap tahap IV berdasarkan prinsip *murabahah* . Bank dengan ini menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk membeli obyek *murabahah* dan nasabah dengan ini menerima penyediaan fasilitas pembiayaan tersebut dari bank sejumlah Rp11.108.062.958, sebagai harga jual yang berasal dari :

Harga beli	Rp	6.415.531.250
Margin	Rp	4.692.531.708
Harga jual	Rp	11.108.062.958
Jumlah Kewajiban	**Rp**	**11.108.062.958**

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

1) Bangunan ruang rawat inap yang direnovasi.

2) 1 set alat *Angiography/Cath Lab* yang dibeli.

3) Kumpulan aset *existing* PT RS Pelni antara lain:

a) Mobil *Ambulance* KIA K2700
b) Mobil Avanza Veloz 1.5 M/T
c) Genset *Type Perkirns Prime Power* 500KVA
d) *Diagnostic Ultrasound System Merk* Aloka
e) Radiologi *Type Mars* 40/CS/RAD
f) *Color Dopler Ultrasound System Merk* Aloka
g) *Ventilator Neonate to Adult Type Respironics*
h) *Ventilator Pediatric to Adult Type* C *Merk* Hamilton
i) Meja Operasi Merk Medifa
j) Kumpulan perlengkapan/alat Rumah Sakit sejumlah 86 items yang diperoleh selama 28 Oktober 2013 s.d. 17 April 2015.
k) 118 *set patient bed* dan perlengkapan penunjang lainnya.

f. Perjanjian No.: 21/438/X/RWB III - Thamrin/QARDH / LD1935406004

Berdasarkan syarat dan ketentuan di dalam Akad ini. Bank setuju untuk memberikan dana talangan (*Qardh)* kepada Pemohon sebesar nilai *Accepted Invoice* sebagaimana tercantum di dalam Aplikasi Permohonan *iB Supplier Financing* yaitu Rp30.000.000.000. Bank menyetujui permohonan pemohon berdasarkan *invoice* yang telah diakseptasi oleh BPJS Kesehatan.

Jangka Waktu dan Pelunasan

Jangka Waktu pemberian dana talangan ini adalah sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020.

Pemohon dengan ini menyatakan berhutang kepada Bank sebesar nilai Accepted Invoice dan berjanji akan melunasi secara seketika pada saat jatuh tempo dana talangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatas.

***26. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS** (Continued)*

***PT Bank Syariah Mandiri Tbk.** (Continued)*

e. Agreement No .18/0201/0741/0058/VIII/MRBH

Based on the Credit Agreement No.18 / 0201/0741/0058 / VIII / MRBH. August 3, 2016 a.n. PT Rumah Sakit Pelni regarding financing agreements for renovation and construction of stage IV inpatient rooms based on the murabahah principle. The Bank hereby provides financing facilities to customers that will be used to purchase murabahah objects. and customers hereby accept the provision of these financing facilities from the bank in the amount of Rp11,108,062,958. as the selling price derived from:

Purchase price	*Rp*	*6,415,531,250*
Margin	*Rp*	*4,692,531,708*
Selling price	*Rp*	*11,108,062,958*
Total Liabilities	***Rp***	***11,108,062,958***

Assets submitted as collateral in the form of:

1) Remodeled inpatient building.

2) 1 set of Angiography / Cath Lab tools purchased.

3) The collection of existing assets of PT RS Pelni includes:

a) KIA K2700 Ambulance
b) Avanza Veloz 1.5 M / T
c) Genset Type Perkirns Prime Power 500KVA
d) Diagnostic Ultrasound System Merk Aloka
e) Radiologi Type Mars 40/CS/RAD
f) Color Dopler Ultrasound System Merk Aloka
g) Ventilator Neonate to Adult Type Respironics
h) Ventilator Pediatric to Adult Type C Merk Hamilton
i) Medifa Brand Operating Table
j) A collection of equipment / hospital equipment for 86 items obtained during October 28, 2013 untill April 17, 2015.
k) 118 sets of patient beds and other supporting equipment.

f. Agreement No .21/438/X/RWB III - Thamrin/QARDH / LD1935406004

Based on the terms and conditions in this agreement. the Bank agrees to give the applicant a bailout (Qardh) to the applicants for the value of Accepted Invoice as stated in the application for the iB Supplier Financing. namely Rp30,000,000,000. The Bank approves the applicant's application based on invoices that have been approved by BPJS Kesehatan.

Term and settlement

The term of the awarding Fund is from October 31, 2019 until January 31, 2020.

The applicant hereby declares a debt to the Bank at the value of Accepted Invoice and promises to settle in real time at the maturity of the bailouts as referred to in article 2 paragraph (1) above.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

26. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (Lanjutan)

Jangka Waktu dan Pelunasan (Lanjutan)

Pelunasan dilakukan dengan melakukan debet terhadap rekening No.7120753667 a.n. PT Rumah Sakit Pelni milik supplier.

Berdasarkan prinsip Wakalah Bil Ujrah, Bank setuju untuk menjadi wakil dari pemohon untuk melakukan penagihan kepada *Buyer* (BPJS Kesehatan) yang disepakati oleh Para Pihak dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh Pemohon dengan Buyer tersebut. dimana Buyer berkewajiban melakukan pembayaran tagihan kepada pemohon. Penagihan oleh Bank dilakukan sampai jumlah setinggi-tingginya sebagaimana disebutkan pada Aplikasi iB Supplier Financing ini. Bank akan melakukan penagihan kepada Buyer tersebut saat jatuh tempo pembayaran berdasarkan invoice yang diterima oleh Bank dari pemohon.

Untuk maksud tersebut di atas. Bank berhak memperoleh *Ujrah/Fee* dan pemohon berkewajiban membayar *Ujrah/Fee* sebesar Rp690.431.104 dan biaya administrasi sebesar Rp150.000 untuk Bank melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada *Buyer* (BPJS Kesehatan).

g. Perjanjian No.: 21/476/X/RWB III - Thamrin/QARDH / LD1933360887

Berdasarkan syarat dan ketentuan di dalam Akad ini. Bank setuju untuk memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada Pemohon sebesar nilai *Accepted Invoice* sebagaimana tercantum di dalam Aplikasi Permohonan *iB Supplier Financing* yaitu Rp30.000.000.000. Bank menyetujui permohonan pemohon berdasarkan *invoice* yang telah diakseptasi oleh BPJS Kesehatan.

Jangka Waktu dan Pelunasan

Jangka Waktu pemberian dana talangan ini adalah sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020.

Pemohon dengan ini menyatakan berhutang kepada Bank sebesar nilai Accepted Invoice dan berjanji akan melunasi secara seketika pada saat jatuh tempo dana talangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) diatas.

Pelunasan dilakukan dengan melakukan debet terhadap rekening No.7120753667 a.n. PT Rumah Sakit Pelni milik supplier .

Berdasarkan prinsip Wakalah Bil Ujrah Bank setuju untuk menjadi wakil dari pemohon untuk melakukan penagihan kepada Buyer (BPJS Kesehatan) yang disepakati oleh Para Pihak dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh Pemohon dengan Buyer tersebut dimana Buyer berkewajiban melakukan pembayaran tagihan kepada pemohon. Penagihan oleh Bank dilakukan sampai jumlah setinggi-tingginya sebagaimana disebutkan pada Aplikasi iB Supplier Financing ini. Bank akan melakukan penagihan kepada Buyer tersebut saat jatuh tempo pembayaran berdasarkan invoice yang diterima oleh Bank dari pemohon.

Untuk maksud tersebut di atas Bank berhak memperoleh Ujrah/Fee dan pemohon berkewajiban membayar Ujrah/Fee sebesar Rp666.105.271 dan biaya administrasi sebesar Rp150.000 untuk Bank melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada Buyer (BPJS Kesehatan).

***26. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS** (Continued)*

***PT Bank Syariah Mandiri Tbk.** (Continued)*

***Term and settlement** (Continued)*

The settlement is done by debit against the account No. 7120753667 a.n. PT Rumah Sakit Pelni supplier.

Based on the Wakalah Bil Ujrah principle, the Bank agrees to be a representative of the applicant to bill the Buyer (BPJS Kesehatan) agreed by the parties in a transaction conducted by the applicant with the Buyer. where Buyer is obliged to pay bills to the applicant. Billing by the Bank is done until the amount of highest mentioned in this iB Supplier Financing application. The bank will collect the Buyer when the payment is due based on the invoice received by the Bank from the applicant.

For the purposes above. the Bank is entitled to obtain Ujrah/Fee and the applicant is obliged to pay Ujrah/Fee amounting to Rp690,431,104 and the administrative fee of Rp150,000 for Bank to conduct sales documents and then bill the receivables to Buyer (BPJS Kesehatan).

g. Agreement No.: 21/476/X/RWB III - Thamrin/QARDH / LD1933360887

Based on the terms and conditions in this agreement. the Bank agrees to give the applicant a bailout (Qardh) to the applicants for the value of Accepted Invoice as stated in the application for the iB Supplier Financing. namely Rp30,000,000,000. The Bank approves the applicant's application based on invoices that have been approved by BPJS Kesehatan.

Term and settlement

The term of the awarding Fund is November 29, 2019 until February 29, 2020.

The applicant hereby declares a debt to the Bank at the value of Accepted Invoice and promises to settle in real time at the maturity of the bailouts as referred to in article 2 paragraph (1) above.

The settlement is done by debit against the account No. 7120753667 a.n. PT Rumah Sakit Pelni supplier.

Based on the Wakalah Bil Ujrah principle. the Bank agrees to be a representative of the applicant to bill the Buyer (BPJS Kesehatan) agreed by the parties in a transaction conducted by the applicant with the Buyer. where Buyer is obliged to pay bills to the applicant. Billing by the Bank is done until the amount of highest mentioned in this iB Supplier Financing application. The bank will collect the Buyer when the payment is due based on the invoice received by the Bank from the applicant.

For the purposes above the Bank is entitled to obtain Ujrah/Fee and the applicant is obliged to pay Ujrah/Fee amounting to Rp666,105,271 and the administrative fee of Rp150,000 for Bank to conduct sales documents and then bill the receivables to Buyer (BPJS Kesehatan).

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG / *27. LIABILITIES OF LONG TERM EMPLOYEE BENEFITS*

	2020	2019	
Tingkat diskonto	5.70%	6.80%	*Discount Rate*
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	3%	3%	*The Projected rate of salary Increase*
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun	*Normal retirement age*
Tingkat mortalita	Indonesia - VI (2019)	Indonesia - III (2011)	*Mortality Rate*
Tingkat cacat tetap	0.02% per tahun	0.02% per tahun	*Permanent disability rate*

	2020	2019	
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) awal periode	157.921.590.369	114.496.226.847	*Reserves (Prepaid Expenses) at beginning of period*
Pembayaran imbalan pada tahun berjalan	(12.134.991.512)	(7.735.289.689)	*Benefit payments in the current year*
Beban (pendapatan) imbalan pada Laba Rugi	23.150.826.516	18.347.951.267	*(Benefit) Expenses on the Profit and Loss*
Pendapatan (Beban) pada Penghasilan Komprehensif lain	34.980.241.792	39.918.342.167	*Benefits (Expenses) on other Comprehensive Income*
Iuran Pemberi kerja	(26.029.791.784)	(7.105.640.223)	*Employer Contributions*
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) akhir periode	**177.887.875.381**	**157.921.590.369**	*Reserves (Prepaid Expenses) at endof period*
Entitas Anak	9.214.334.052	18.133.425.549	*Subsidiaries*
Jumlah	**187.102.219.433**	**176.055.015.918**	***Total***

Rincian beban yang diakui di laporan laba rugi: / *Details of the expense recognized in the income statement:*

	2020	2019	
Biaya Jasa Kini	11.915.297.735	9.073.756.892	*Current service cost*
Biaya Bunga	37.268.948.518	36.924.280.660	*Interest Cost*
Pendapatan Bunga atas Aset	(26.033.419.737)	(27.650.086.285)	*Interest Income on Assets*
Jumlah	**23.150.826.516**	**18.347.951.267**	***Total***

28. LIABILITAS HAK GUNA / *28. LEASE LIABILITIES*

Kelompok liabilitas untuk mencatat estimasi nilai sekarang yang harus diselesaikan di masa depan terkait dengan kontrak sewa jangka panjang berdasarkan penerapan PSAK 73.

The liability group records the estimated present value that must be settled in the future related to long-term lease contracts based on the application of PSAK 73.

Kewajiban dicatat berdasar nilai sekarang dari total nilai kontrak yang harus dibayarkan.

Liabilities are recorded at the present value of the total contract value to be paid.

	2020		
Kontrak/ *Contract*	**Saldo / *Balance***	**Bagian Lancar UtangJangka Panjang / *Current Portion for Long Term Debt *)***	**Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / *Long Term Portion Maturity***
Entitas Induk/Parent Entity:			
TH.09.10-02/SS/2018	1.427.093.640	1.427.093.640	-
TH.09.10-02/SS/2018	789.524.991	789.524.991	-
TH.09.10-01/SS/2018	77.880.000	77.880.000	-
TH.09.04-01/SS/2018	623.040.000	623.040.000	-
TH.09.04-01/SS/2018	286.000.002	286.000.002	-
Sub Jumlah	3.203.538.633	3.203.538.633	-
Entitas Anak/ Subsidiaries:			
PT Sarana Bandar Nasional	419.847.884	185.802.816	234.045.068
PT Pelita Indonesia Djaya	1.365.347.826	751.248.337	614.099.489
Jumlah/Total	**4.988.734.343**	**4.140.589.786**	**848.144.557**

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

28. LIABILITAS HAK GUNA (Lanjutan)

Kontrak TH.09.10-02/SS/2018 merupakan kontrak sewa 1 unit Toyota Alphard dan 6 unit Toyota Camry dengan PT Pelita Indonesia Djaya.

Sedangkan kontrak TH.09.10-01/SS/2018 dan TH.09.04-01/SS/2018 merupakan sewa kontrak masing-masing 9 unit Toyota Avanza Veloz dan 16 unit Toyota Avanza Veloz yang semuanya berada di cabang.

***28. LEASE LIABILITIES** (Continued)*

The TH.09.10-02 / SS / 2018 contract is a rental contract for 1 unit of Toyota Alphard and 6 units of Toyota Camry with PT Pelita Indonesia Djaya.

While the TH.09.10-01 / SS / 2018 and TH.09.04-01 / SS / 2018 are rental contracts for 9 units of Toyota Avanza Veloz and 16 units of Toyota Avanza Veloz, all of which are in branches.

29. MODAL SAHAM

Modal dasar. ditempatkan dan disetor penuh masing masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

29. SHARE CAPITAL

Authorized Capital. issued and fully paid respectively on December 31. 2020 and 2019. are as follows:

2020				
Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Lembar Saham/** ***Shares***	**Nilai Nominal per Lembar Saham/** ***Nominal Value per Share***	**Persentase kepemilikan/** ***Percentage of ownership***	**Jumlah nilai saham/** ***Total value of shares***
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	7.629.900	1.000.000	100%	7.629.900.000.000
Jumlah	**7.629.900**	**1.000.000**	**100%**	**7.629.900.000.000**

2019				
Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Lembar Saham/** ***Shares***	**Nilai Nominal per Lembar Saham/** ***Nominal Value per Share***	**Persentase kepemilikan/** ***Percentage of ownership***	**Jumlah nilai saham/** ***Total value of shares***
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	7.629.900	1.000.000	100%	7.629.900.000.000
Jumlah	**7.629.000**	**1.000.000**	**100%**	**7.629.900.000.000**

Total 100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp7.629.900.000.000 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut:

a. sebesar Rp7.065.092.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta No. 1, tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH., yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0012165 tanggal 02 Februari 2016.

b. sebesar Rp564.807.589.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui konversi utang pokok Subsidiary Loan Agreement (SLA) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 dan Nomor 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016.

c. sebesar Rp411.000 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto sebagaimana suratnya nomor LAI_AU- 015/KAP.BM&W/BM/VI/2016 tanggal 01 April 2016.

Total 100% of the nominal value of each issued share or a total of Rp7,629,900,000,000 has been fully paid-up by the Republic of Indonesia (Shareholders) in the following manner:

a. amounting to Rp7,065,092,000,000 represents old capital deposits in accordance with Deed No. 1, dated February 1, 2016 made before the Notary Ida Adiningsih, SH., Which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHUAH.01.03-0012165 dated February 02, 2016.

b. amounting to Rp564,807,589,000 originating from the 2016 State Budget through the conversion of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 's Subsidiary Loan Agreement (SLA) to the Republic of Indonesia based on the Loan Forwarding Agreement Number 1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 and Number 1151 / DP3 / 2002 dated May 30, 2002 as stipulated in Government Regulation Number 87 of 2016.

c. amounting to Rp411,000 which comes from the capitalization of a portion of the Company's reserves as recorded in the Financial Statements for the 2015 Financial Year which has been audited by KAP Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto as his letter number LAI_AU- 015/KAP.BM&W/BM/VI/2016 dated April 01, 2016.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

30. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH / *30. GOVERNMENT CAPITAL*

Landasan Hukum/ *Legal Foundation*	Penyertaan Modal Pemerintah/ *Goverment Capital*	Pengalihan/ *Redirect*	Jumlah / *Total*
PP. RI No. 40 Tahun 1992	309.143.585.642	(309.000.000.000)	143.585.642
PP. RI No. 87 Tahun 2016	564.807.589.000	(564.807.589.000)	-
Jumlah / *Total*	**873.951.174.642**	**(873.807.589.000)**	**143.585.642**

Pada tahun 2016 terdapat penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Non Tunai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan nilai sebesar Rp564.807.589.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui konversi Utang *Soft Loan Agreement* (SLA) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 dan Nomor 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002.

In 2016 there is the addition of the Government of Non- Cash by the Indonesian Government Regulation No. 87 Year 2016 About the Addition of Investment of the Republic of Indonesia in Capital Shares Owned Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia with a value of Rp564,807,589,000 sourced from budget of the State 2016 through the conversion of debt Soft Loan Agreement (SLA) Limited Liability Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia to the Republic of Indonesia under the Agreement Subsidiary Loan No. 1144 / DP3 / 2001 dated February 25. 2001 and No. 1151 / DP3 / 2002 dated May 30. 2002.

31. CADANGAN / *31. APPROPRIATED RELATED EARNING*

Merupakan cadangan yang dibentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari laba setelah pajak yang belum ditentukan peruntukkannya sebagai berikut (Lihat Catatan 29):

It is a proposal formed based on the general meeting of shareholders of the income after the unspecified tax as follows (See Note 29):

	31 Desember/ *December 2020*	31 Desember/ *December 2019*	
Saldo awal	892.643.118.797	689.011.932.749	*Beginning balance*
Penggunaan Laba tahun lalu	205.108.931.712	203.631.186.048	*Distribution of Profit Previous Year*
Saldo akhir	**1.097.752.050.509**	**892.643.118.797**	***Ending balance***

(Lihat Catatan 29) *(See Note 29)*

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *32. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL*

Merupakan tambahan modal yang berasal dari Pelepasan Kepemilikan di PT RS Pelni per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

This account to loss of control of entity Is the Additional capital of the year is from divesment of interest at PT RS Pelni to December 31, 2020 as follows:

	2020	
Nilai Pelepasan:	503.800.000.000	*Divesment Values:*
Nilai Kepemilikan Dilepas	(95.610.404.353)	*Divest of share value*
Dilusi	(10.310.687.935)	*Dilution*
Jumlah	**397.878.907.712**	***Total***

33. SALDO RUGI/DEFISIT / *33. ACCUMULATED DEFICITS*

Merupakan akumulasi laba tahun berjalan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Is the accumulated deficit of the year running up to 31 December 2020 and 2019 as follows:

	2020	2019	
Saldo awal	(2.427.746.001.578)	(2.404.249.412.464)	*Beginning balance*
Distribusi Saldo Laba Tahun Lalu:			*Distribution of Retained Earnings:*
Cadangan	(205.108.931.712)	(203.631.186.048)	*Reserve*
Laba Tahun Berjalan	30.737.343.238	180.134.596.934	*Profit of Current Year*
Dampak PSAK	(21.484.570.078)	-	*Effect of SFAS*
Penyesuaian Entitas Anak	133.357.959	-	*Adjustment's Subsidiaries*
Saldo akhir	**(2.623.468.802.171)**	**(2.427.746.001.578)**	***Ending balance***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

33. SALDO RUGI/DEFISIT (Lanjutan)

Penggunaan laba tahun buku 2019 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 05 tanggal 2 Juli 2020 dihadapan Notaris H Teddy Anwar SH.

***33. ACCUMULATED DEFICITS** (Continued)*

The use of earnings for the fiscal year 2019 is accordance with the Deed of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 05 dated July 2, 2020. before Notary H Teddy Anwar SH.

34. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA / ***34. OTHER COMPONENT EQUITY***

	2020	**2019**	
Saldo awal	(71.872.380.147)	(104.755.741.217)	*Beginning balance*
Keuntungan (Kerugian) dari:			*Profit (Loss) from:*
- Aktuaria	(27.769.799.863)	(40.488.030.701)	*Current Actuarial* -
- Nilai Wajar Aset	9.780.647.255	73.371.291.771	*Fair Value of Assets* -
- Efek Divestasi	(31.106.509.833)	-	*Divestasi Effect* -
- Dilusi Investasi	(3.465.804.560)	-	*Dilution of Investment* -
Saldo akhir	**(124.433.847.148)**	**(71.872.380.147)**	***Ending balance***

35. KEPENTINGAN NON PENGENDALI / ***35. NON-CONTROLLING INTERESTS***

31 Desember/*December* 2020					
Pemegang Saham / *Shareholders*	**% Penyertaan / *Participation***	**Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (awal) / *Part of the owners of shares of non controlling interests (beginning)***	**Dividen/Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / *Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital***	**Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / *Profit (Loss) Current Year***	**Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (akhir)/ *Part of shareholders of non controlling interests (end)***
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0.53% in SBN	80.000.000	1.659.368.864	160.659.587	1.900.028.451
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0.50% in PIDC	10.050.000	603.318.142	112.340.737	716.708.879
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	2.00 % in PBN	5.000.000	108.074.202	7.914.270	120.988.472
Koperasi Sabanas/ *Cooperative Sabanas*	0.038 % in SBL	3.800.000	(20.149.985)	408.459	(15.941.526)
PT Citra/ *Citra. PT*	0.05% in PANI	150.000.000	3.531.992	(52.004.954)	101.527.038
Jumlah/*Total*		**248.850.000**	**2.354.143.215**	**229.318.099**	**2.823.266.314**

35. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (Lanjutan) / ***35. NON-CONTROLLING INTERESTS*** *(Continued)*

Pemegang Saham / *Shareholders*	**% Penyertaan / *Participation***	**Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (awal) / *Part of the owners of shares of non controlling interests (beginning)***	**Dividen/Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / *Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital***	**Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / *Profit (Loss) Current Year***	**Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (akhir)/ *Part of shareholders of non controlling interests (end)***
		31 Desember/*December* 2019			
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0.53% in SBN	80.000.000	1.469.731.329	322.628.469	1.872.359.798
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0.50% in PIDC	10.050.000	437.353.371	257.708.429	705.111.800
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0.02% in RS PELNI	25.000.000	27.747.363	2.534.581	55.281.944
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	2.00 % in PBN	5.000.000	99.927.233	10.697.117	115.624.350
Koperasi Sabanas/ *Cooperative Sabanas*	1.01 % in SBL	3.800.000	76.191.612	23.292.863	103.284.475
PT Citra/ *Citra. PT*	5% in PANI	150.000.000	-	3.531.992	153.531.992
Jumlah/*Total*		**273.850.000**	**2.110.950.908**	**620.393.451**	**3.005.194.359**

36. PENDAPATAN USAHA / ***36. OPERATING REVENUES***

Pendapatan usaha merupakan penjualan jasa pelayaran dan jasa lainnya. terdiri dari:

Operating revenues represent the sale of shipping services and other services. consisting of:

	2020	**2019**	
Pendapatan Usaha. Bruto:			***Gross Operating Revenue:***
Penugasan Pemerintah	2.861.122.956.922	2.677.763.686.340	*Government Assignments*
Tambang Pasasi	453.909.535.650	1.336.980.495.814	*Ticketing*
Usaha Pelayanan Kesehatan	-	607.850.344.252	*Health Service Business*
Tambang Muatan	291.209.832.496	347.533.326.439	*Cargo*
Usaha Perkapalan Lainnya	26.071.222.985	59.112.746.815	*Other Shipping Business*
Usaha Perbengkelan	13.325.876.250	11.309.785.542	*Workshop Business*
Usaha Perhotelan	2.753.490.338	6.738.392.227	*Hospitality Business*
Usaha Keagenan	3.228.032.672	3.535.743.223	*Agency Business*
Usaha Wisata Bahari	-	1.391.705.518	*Marine Tourism Business*
Usaha Lifestyle	270.911.006	-	*Lifestyle Business*
Usaha Penunjang Lainnya	515.535.688.836	495.535.041.124	*Other Supporting Enterprises*
Sub Jumlah Dipindahkan	**4.167.427.547.155**	**5.547.751.267.294**	***Carried Forward Sub Total***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan) / ***36. OPERATING REVENUES*** *(Continued)*

	2020	2019	
Sub Jumlah Pindahan	**4.167.427.547.155**	**5.547.751.267.294**	***Brought Forward Sub Total***
Dikurangi:			*Less:*
Reduksi Tambang pasasi	349.382.900	3.512.859.800	*Ticketing Reduction*
Reduksi Tambang Muatan	452.506.170	8.285.000	*Cargo Reduction*
Sub Jumlah	**801.889.070**	**3.521.144.800**	***Sub Total***
Jumlah Pendapatan Usaha – Bersih	**4.166.625.658.085**	**5.544.230.122.494**	***Total Revenue - Net***

Pendapatan Penugasan Pemerintah merupakan kompensasi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik *(Public Service Obligation - PSO)* dan subsidi meliputi:

a. Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
b. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak;
c. Angkutan Barang di Laut (Tol Laut);
d. Kapal Perintis Milik Negara: dan
e. Kapal Rede.

a. Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2020 Nomor: HK 201/12/7/DJPL/2019 dan Nomor: TH.12-31-01/SS/2019.

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 Nomor: HK.201/2/II/DJPL/2019 dan Nomor: TH.01.21- 01/SS/2019. serta Nomor: HK.107/1/8/DJPL-18 dan Nomor: TH.2.26-01/SS/2018 tanggal 26 Februari 2018 untuk Tahun Anggaran 2018.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.817.909.075.000 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA- 999.07.1.985120/2019 tanggal 28 Desember 2018 dan untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.867.769.738.000 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA- 999.07.1.98120/2018 tanggal 29 Desember 2017.

Government Assignment Revenue is compensation received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Transportation - Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) and subsidies assignments including:

a. Sea Freight for Economy Class Passengers;
b. Activities of Operation of Livestock Ships;
c. Freight in the Sea (Sea Toll);
d. State owned Pioneer ships; and
e. Rede Ships.

a. Sea Freight for Economy Class Passengers;

The revenue assignment for carrying out the obligations of public services for sea transportation for economy class passengers is based on the Agreement on the Implementation of Obligatory Services for Sea Transport for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2020 Number: HK 201/12/7/DJPL/2019 dan Nomor: TH.12-31-01/SS/2019.

The revenue assignment for carrying out the obligations of public services for sea transportation for economy class passengers is based on the Agreement on the Implementation of Obligatory Services for Sea Transport for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2019 number: HK. 201/2/II/DJPL/2019 and Number: TH. 01.21-01/SS/2019 and Number: HK. 107/1/8/DJPL-18 and number: TH. 2.26-01/SS/2018 dated February 26, 2018 for the Fiscal Year 2018.

The value of the agreement on the implementation of public service obligations in the field of sea transportation for economy class passengers sourced from the state budget for 2019 in the amount of Rp1,817,909,075,000 based on the Budget Implementation List (DIPA) of the State General Treasurer Budget Implementation Registration Number 2018 Number: SP DIPA- 999.07.1.985120/2019 on December 28, 2018 and for the 2017 fiscal year amounting to Rp1,867,769,738,000 in accordance with the Budget Implementation List (DIPA) Number DIPA- 999.07.1.98120/2018 dated December 29, 2017.

36. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

a. Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi; (Lanjutan)

Jumlah trip dan kompensasi per unit kapal yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagai berikut:

***36. OPERATING REVENUES** (Continued)*

***a. Sea Freight for Economy Class Passengers;** (Continued)*

The number of trips and compensation per unit of ship carrying out the Sea Transport Sector Public Service Obligations for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2020 and 2019 are as follows:

No.	Nama Kapal/ *Name of Ship*		Jumlah Trip/ *Total Voyage*		JumlahKompensasi/ *Total Compensation*(Rp)	
			2020	2019	2020	2019
1	KM. Umsini		23	23	116.023.216.711	110.367.253.510
2	KM Tidar		23	23	109.782.766.902	95.184.890.310
3	KM Bukit Siguntang		23	23	111.066.102.666	80.405.496.151
4	KM Lambelu		23	23	117.724.711.958	84.819.030.989
5	KM Sinabung		23	23	123.442.584.010	102.660.945.951
6	KM Kelud		46	46	115.290.833.033	87.320.187.522
7	KM Dorolonda		23	23	130.463.030.350	119.101.026.266
8	KM Nggapulu		23	23	145.948.577.674	108.275.973.816
9	KM Labobar		23	23	137.273.565.916	117.648.802.564
10	KM Kelimutu		23	23	67.336.086.205	53.648.025.658
11	KM Lawit		23	23	68.388.693.657	54.912.299.187
12	KM Tatamailau		23	23	59.529.590.225	54.100.953.537
13	KM Sirimau		12	12	62.827.677.327	56.671.495.614
14	KM Awu		23	23	63.145.862.333	47.002.170.797
15	KM Leuser		12	12	61.198.539.203	59.133.727.641
16	KM Binaiya		23	23	62.093.389.991	53.865.762.856
17	KM Bukit Raya		23	23	59.256.063.423	59.465.547.489
18	KM Tilongkabila		23	23	58.152.472.886	50.044.280.070
19	KM Pangrango		23	23	40.928.831.036	39.473.931.225
20	KM Sangiang		23	23	46.654.686.305	41.983.272.740
21	KM Wilis		23	23	43.939.041.281	40.526.125.529
22	KM Gunung Dempo		23	23	97.829.053.373	74.245.416.590
23	KM Ciremai		23	23	83.558.169.461	53.733.303.803
24	KM Dobonsolo		23	23	95.980.084.052	55.434.199.964
25	KM Egon		23	23	37.854.725.163	50.405.031.767
26	KM Jet Liner		46	46	77.418.264.515	67.479.923.456
Jumlah			**622**	**622**	**2.193.106.619.656**	**1.817.909.075.002**
Jumlah Pembulatan					**2.193.106.619.656**	**1.817.909.075.002**

b. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak;

Pendapatan penugasan penyelenggaraan subsidi pengoperasian kapal ternak didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak Tahun Anggaran 2020 Tahap I Nomor: 01/Satkerlala/RT-1/1/2020 dan Nomor: TH.01.31- 02/SS/2020 tanggal 2 Januari 2020.

Sedangkan Pendapatan penugasan penyelenggaraan subsidi pengoperasian kapal ternak didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak Tahun Anggaran 2019 Tahap I Nomor: 01/Satkerlala/RT-1/1/2019 dan Nomor: TH.01.31- 02/SS/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Tahap II dengan Nomor 02/Satkerlala/RT-1/VIII/2019 dan Nomor: TH.08.1- 04/SS/2019 tanggal 01 Agustus 2019 serta Nomor: 01/Satkerlala/RT.1-2/IV/2018 dan Nomor: TH.04.12-02/SS/2018 tanggal 12 April 2018 untuk Tahun Anggaran 2018.

b. Activities of Operation of Livestock Ships;

Assignment income for subsidizing operation of livestock vessels is based on the implementation of subsidization activities subsidy operation of livestock vessel year 2020 phase I Number: 01/Satkerlala/RT-1/1/2020 and Number: TH. 01.31-02/SS/2020 dated January 1, 2020.

Meanwhile Assignment income for subsidizing operation of livestock vessels is based on the implementation of subsidization activities subsidy operation of livestock vessel year 2019 phase I Number: 01/Satkerlala/RT- 1/1/2019 and Number: TH. 01.31-02/SS/2019 dated January 31, 2019 and Phase II with number 02/Satkerlala/RT-1/VIII/2019 and number TH. 08.1- 04/SS/2019 dated August 01, 2019 and Number: 01/Satkerlala/RT. 1-2/IV/2018 and Number: TH. 04.12-02/SS/2018 dated April 12, 2018 for fiscal year 2018.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
*As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

36. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

b. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak; (Lanjutan)

Pekerjaan penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak Tahun Anggaran 2020 berdasarkan jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.880 /DJPL- 2019 tanggal 6 Desember 2019 dan lama waktu pelayaran kapal maksimal dalam 1 (satu) *round voyage* sesuai dengan trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. terhitung dimulai sejak kapal tiba di pelabuhan pangkal *(home base)* sampai dengan kapal tiba kembali di pelabuhan pangkal. setelah berlayar menurut urutan pelabuhan yang telah ditetapkan.

Kapal yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan subsidi Tahun Anggaran 2020 untuk pengoperasian kapal ternak adalah KM. Camara Nusantara 1. tanpa menggunakan kapal pengganti. kode Trayek: RT-1. yaitu Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang. Waktu pelaksanaan kegiatan KM. Camara Nusantara 1 Tahap I selama 150 hari sejak NOR (*Notice of Readiness*) terhitung paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2020.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Kapal Ternak tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.544.010.383 (Tahap I) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2020 tanggal 12 November 2019.

Pekerjaan penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak berdasarkan jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.107/6/11/DJPL- 2018 tanggal 26 Desember 2018 dan lama waktu pelayaran kapal maksimal dalam 1 (satu) *round voyage* sesuai dengan trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. terhitung dimulai sejak kapal tiba di pelabuhan pangkal *(home base)* sampai dengan kapal tiba kembali di pelabuhan pangkal. setelah berlayar menurut urutan pelabuhan yang telah ditetapkan.

Kapal yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak adalah KM. Camara Nusantara 1. tanpa menggunakan kapal pengganti. kode Trayek: RT-1. yaitu Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang. Waktu pelaksanaan kegiatan KM. Camara Nusantara 1 Tahap I selama 155 hari sejak NOR (*Notice of Readiness*) terhitung paling lambat mulai tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 20 Juni 2019 dan Tahap II selama 153 hari sejak NOR terhitung paling lambat mulai tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Kapal Ternak tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.843.750.000 (Tahap I). dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2019 tanggal 5 Desember 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 dan Rp 5.240.950.000 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03.022.04.1.439454/2019 pada tanggal 15 Agustus 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya.Tahun anggaran 2018 sebesar Rp16.008.262.000. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2018 tanggal 5 Desember 2017.

***36. OPERATING REVENUES** (Continued)*

***b. Activities of Operation of Livestock Ships;** (Continued)*

The work of organizing subsidy activities for the operation of livestock vessels year in 2020 is based on a fixed and regular route network according to the Decree of the Director General of Sea Transportation Number AL.107/6/11/DJPL-2018 dated Desember 26, 2018 and the length of ship shipping takes a maximum of one round voyage in accordance with the route stipulated in the Decree of the Director General of Sea Transportation. starting from the time the ship arrives at the base port (home base) until the ship arrives back at the base port. after sailing according to the specified port order.

The vessel used in the activities of subsidizing fiscal year in 2020 for operation of livestock vessels is KM. Camara Nusantara 1. without the use of a replacement vessel. the code of route: RT- 1. namely Kupang-Waingapu-Tanjung Priok-Cirebon- Kupang. The execution time of KM. Camara Nusantara 1 Tahap I for 150 days since NOR (Notice of Readiness) is counted for the latest from January 1, 2020 to Mei 31, 2020.

The value of the activity of subsidizing operations of livestock vessel operation year 2019 amounted to Rp5,544,010,383 (phase I). is charged to the Register of Budget (DIPA) registration number: SP DIPA- 022.04.1.439454/2020 dated November 12, 2019

The work of organizing subsidy activities for the operation of livestock vessels is based on a fixed and regular route network according to the Decree of the Director General of Sea Transportation Number AL.107/6/11/DJPL-2018 dated Desember 26, 2018 and the length of ship shipping takes a maximum of one round voyage in accordance with the route stipulated in the Decree of the Director General of Sea Transportation. starting from the time the ship arrives at the base port (home base) until the ship arrives back at the base port. after sailing according to the specified port order.

The vessel used in the activities of subsidizing operation of livestock vessels is KM. Camara Nusantara 1. without the use of a replacement vessel. the code of route: RT- 1. namely Kupang-Waingapu-Tanjung Priok-Cirebon- Kupang. The execution time of KM. Camara Nusantara 1 Tahap I for 155 days since NOR (Notice of Readiness) is counted for the latest from January 16. 2019 to June 20, 2019 and phase II for 153 days since NOR counted from August 01, 2019 to December 31, 2019.

The value of the activity of subsidizing operations of livestock vessel operation year 2019 amounted to Rp4,843,750,000 (phase I). is charged to the Register of Budget (DIPA) registration number: SP DIPA- 022.04.1.439454/2019 dated December 5. 2018 state budget of revenue and Expenditure (APBN) year budget 2019 and Rp5,240,950,000 are charged in the Register for implementation of budget (DIPA) revised to 03.022.04.1.439454/2019 on August 15, 2019 state budget of revenues and Expenditure (APBN) year 2019 and its changes. The fiscal year 2018 amounted to Rp16,008,262,000. charged to the Register of budget Implementation (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454/2018 dated December 5, 2017.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
*As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

36. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

c. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak; (Lanjutan)

Tarif penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak tahun anggaran 2020 dan 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak.

d. Angkutan Barang di Laut (Tol Laut);

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik Tahun Anggaran 2020 untuk angkutan barang di laut didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2019 Tahap I Nomor: 01/Kontrak-TL/PPK/PELNI/I/Ditlala-2020 dan Nomor: TH.1.02-01/SS/2020 tanggal 31 Januari 2020.

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2019 Tahap I Nomor: 01/Kontrak- TL/PPK/PELNI/I/Ditlala-2019 dan Nomor: TH.1.31- 01/SS/2019 tanggal 31 Januari 2019. Tahap II Nomor 02/Kontrak-TL/PPK/PELNI/IX/DITLALA-2019 dan Nomor : TH.09.10-03/SS/2019. Tahap III dengan Nomor 03/Kontrak-TL/PPK/PELNI/IX/DITLALA-2019 dan Nomor : TH.9.16-0/SS/2019. Tahap IV Nomor : 04/Kontrak-TL/PPK/PELNI/Ditlala-2019 dan Nomor TH.9.23- 02/SS/2019. Nomor: 01/Kontrak-TL/PELNI/PPK/V/Ditlala- 2018 dan Nomor: TH.5.31-02/SS/2018 tanggal 31 Mei 2018 untuk Tahun Anggaran 2018.

Jumlah trip dan kompensasi per unit kapal dan kode trayek yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagai berikut:

***36. OPERATING REVENUES** (Continued)*

***c. Activities of Operation of Livestock Ships;** (Continued)*

Rates implementation of the activities of livestock vessels operating subsidy of fiscal year 2020 and 2019 based on Regulation of the Minister of Transportation Republic of Indonesia Number 109 Year 2018 concerning PM third amendment to the Regulation of the Minister of Communications of the Republic of Indonesia No PM 182 Year 2015 on Freight rates for Ships Operating Subsidies Livestock Event.

d. Freight in the Sea (Sea Toll);

Income assignment for the implementation of public service obligation of Fiscal Year 2020 for freight in the sea is based on the agreement of Public service obligation to transport goods in the Sea year budget 2019 phase I No: 01/Kontrak - TL/PPK/PELNI/I/Ditlala-2020 and No: TH. 1.31-01/SS/2019 dated January 31, 2020.

Income assignment for the implementation of public service obligation for freight in the sea is based on the agreement of Public service obligation to transport goods in the Sea year budget 2019 phase I No: 01/Contract-TL/PPK/PELNI/I/Ditlala-2019 and No: TH. 1.31-01/SS/2019 dated January 31, 2019. Stage II No. 02/Contract-TL/PPK/PELNI/IX/DITLALA-2019 and No: TH. 09.10-03/SS/2019. Stage III with no 03/contract-TL/PPK/PELNI/IX/DITLALA-2019 and No: TH. 9.16-0/SS/2019. Stage IV no: 04/Contract-TL/PPK/PELNI/Ditlala-2019 and TH. 9.23- 02/SS/2019. No: 01/Contract- TL/PELNI/PPK/V/Ditlala-2018 and No: TH. 5.31- 02/SS/2018 dated May 31, 2018 for fiscal year2018.

The number of trips and compensation per unit of ship and route code that carry out the Public Service Transport Obligations in the Sea in the Fiscal Year 2020 and 2019 are as follows:

No.	Nama Kapal/ *Name of Ship*	Kode Trayek/ *Route Code*		Jumlah Trip/ *Total Voyage*		JumlahKompensasi/ *Total* Compensation(Rp)	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	KM. Logistik Nusantara I	H-1	H-1	15	11	31.777.882.610	23.671.792.633
2	KM. Logistik Nusantara IV	T-3	T-3	18	-	20.767.263.610	-
3	KM. Kendhaga Nusantara 1	T-5	T-5	17	11	7.323.669.707	8.891.411.175
4	KM. Kendhaga Nusantara 7	T-14	T-10	21	11	10.101.447.124	9.647.161.045
5	KM. Kendhaga Nusantara 11	T-13	-	16	-	10.366.574.163	-
6	KM. Caraka Jaya Niaga III-22	T-18	T-3	3	14	4.112.732.923	11.678.013.241
7	KM. Caraka Jaya Niaga III-32	T-5	T-1	2	18	2.037.989.283	13.433.657.813
8	KM. Logistik Nusantara III	T-15	T-15	11	-	18.697.278.279	-
9	KM. Logistik Nusantara VI	T-10	-	8	-	25.125.012.898	-
10	KM. Logistik Nusantara II	T-18	T-18	9	-	15.741.829.443	-
11	KM. Logistik Nusantara V	T-10	-	3	-	9.036.542.281	-
	Jumlah/*Total*					**155.088.222.322**	**67.322.035.907**

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
*As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

36. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

d. Kapal Perintis Milik Negara

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik Negara didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahap I Tahun Anggaran 2020 Nomor: 01/KONTRAK-PERINTIS/PELNI/PPK/I/DITLALA-2020 Nomor TH.01.02-04/SS/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang di addendum dengan nomor:ADD.05/KONTRAK/PERINTIS/PELNI/PPK/VII/DITLALA-2020 pada tanggal 09 Juli 2020. Tahap II Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Perjanjian Nomor: 01/KONTRAK-PERINTIS/PELNI/TAHAP2/PPK/XI/DITLALA-2020 Nomor TH.11.05-01/SS/2020 tanggal 05 November 2020 yang di addendum dengan nomor ADD 01/KONTRAK-PERINTIS /PELNI/TAHAP2/PPK/XI/DITLALA-2020 tanggal 20 November 2020.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik Negara tahun anggaran 2020 sebesar Rp210.405.873.000 termasuk PPN 10%. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2020 tanggal 12 November 2019.

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik Negara didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2019 Nomor: 01/Satkerlala/Altis/VI/2019 dan Nomor: TH.06.12- 01/SS/2019 tanggal 12 Juni 2019. dan Nomor: 01/Satkerlala/Altis/III/2018 dan Nomor: TH.3.22- 01/SS/2018 tanggal 22 Maret 2018 untuk Tahun Anggaran 2018.

Untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp308.920.000.000. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- 022.04.1.439454/2018 tanggal 5 Desember 2018.

e. Kapal Rede

Pendapatan Kapal Rede didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahun Anggaran 2020 Tahap I dengan nomor 01/KONTRAK-REDE/PELNI/PPK/I/DITLALA-2020 Nomor TH.01.02-03/SS/2020 Pada tanggal 02 Januari 2020 yang diamandemen dengan No. ADD.03/KONTRAK/REDE/PPK/VII/DITLALA-2020 Pada tanggal 08 Juli 2020. Tahap II berdasarkan perjanjian No.01/KONTRAK-EDE/PELNI/TAHAP2/PPK/XI/DITLALA-2020 No. TH.11.11-01/SS/2020 tanggal 11 November 2020 yang diaddendum dengan nomor ADD.01/KONTRAK-REDE/PELNI/TAHAP2/PPK/XI/2020 pada tanggal 26 November 2020. Anggaran 2019 Nomor: 01/KTRKREDE/VI/DITLALA-2019 dan Nomor: TH.06.12- 03/SS/2019 tanggal 12 Juni 2019.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahap I tahun anggaran 2020 sebesar Rp 24.000.000.000 sudah termasuk PPN yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Nomor SP DIPA-022.04.1.439454/2020 Tanggal 12 November 2019 revisi tanggal 1 Juli 2020. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp38.223.805.809 termasuk PPN 10%. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2019 tanggal 5 Desember 2018.

***36. OPERATING REVENUES** (Continued)*

d. State owned Pioneer ships; and

The assignment income for public service activities of the State owned pioneer ship is based on the agreement on Organizing public service activities of the State owned pioneer ship fiscal year 2020 No :01/KONTRAK-PERINTIS/PELNI/PPK/I/DITLALA-2020 and TH01.02-04/SS/2020 dated Januari 2, 2020, addendum with No. ADD.05/KONTRAK/PERINTIS/PELNI/PPK/VII/DITLALA-2020 dated July 09, 2020. Stage II in fiscal year 2020 based on agreement No. : 01/KONTRAK-PERINTIS/PELNI/TAHAP2/PPK/XI/DITLALA-2020, Nomor TH.11.05-01/SS/2020 date November 5, 2020 which is addendum No.: ADD 01/KONTRAK-PERINTIS /PELNI/TAHAP2/PPK/XI/DITLALA-2020 dated November 20, 2020.

The value of the agreement on the implementation of public service activities of pioneering vessels belonging to the State in 2020 fiscal year amounting to Rp210,405,873,000. including 10% VAT. is charged to the Budget Implementation Entry List (DIPA) No. : SP DIPA-022.04.1.439454 / 2020 dated November 12. 2019.

The assignment income for public service activities of the State owned pioneer ship is based on the agreement on Organizing public service activities of the State owned pioneer ship fiscal year 2019 Number: 01/Satkerlala/Altis/VI/2019 and Number: TH. 06.12- 01/SS/2019 dated June 12. 2019. and Number: 01/Satkerlala/Altis/III/2018 and Number: TH. 3.22- 01/SS/2018 dated March 22. 2018 for the fiscal year 2018.

For fiscal year 2019 amounting to Rp308,920,000,000 being charge to Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. : SP DIPA- 022.04.1.439454/2018 dated December 5, 2018

e. Rede Ships

The assignment income for Kapal Rede is based on the Agreement for the Implementation of Port Water Transportation Activities by Using State-Owned Vessels (Rede Ship) for Fiscal Year 2020 Phase I with number 01/KONTRAK-REDE/PELNI/PPK/I/DITLALA-2020 No. TH.01.02-03/SS/2020 dated January 2, 2020 as amended by No. ADD.03/KONTRAK/REDE/PPK/VII/DITLALA-2020 dated July 8, 2020. Stage II is based on agreement No. 01/KONTRAK-REDE/PELNI/TAHAP2/PPK/XI/DITLALA-2020 No. TH.11.11-01/SS/2020 dated November 11, 2020 which was addendum with No. ADD.01/KONTRAK-REDE /PELNI/TAHAP2/PPK/XI/2020 dated November 26, 2020. Fiscal year 2019 Budget No. : 01/KTRKREDE/VI/DITLALA-2019 and No. : TH.06.12- 03 / SS / 2019 dated June 12, 2019.

The amount of the agreement's port water transportation service activities using State-Owned Ships (Rede Ship) Phase I for the 2020 fiscal year is equal to Rp24,000,000,000 including VAT charged to Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat No. SP DIPA-022.04.1.439454 / 2020 Dated November 12, 2019 revised on July 1, 2020. Fiscal Year 2019 amounting to Rp38,223,805,809 including 10% VAT. charged to Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No.: SP DIPA-022.04.1.439454 / 2019 dated December 5, 2018.

36. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

e. Kapal Rede (Lanjutan)

Pendapatan Kapal Rede didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 01/KTRKREDE/ VI/DITLALA-2019 dan Nomor: TH.06.12- 03/SS/2019 tanggal 12 Juni 2019.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) tahun anggaran 2019 sebesar Rp38.223.805.809 termasuk PPN 10%. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2019 tanggal 5 Desember 2018.

Mendasar pada Berita Acara Perhitungan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi/PSO pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2021 pengajuan klaim atas penyelenggaraan pelayanan publik untuk penumpang kelas ekonomi selama tahun 2020 sewajarnya diterima oleh PT PELNI (Persero) Rp 2.193.106.619.656,34. Sehingga Perseroan membukukan pendapatan usaha penugasan khusus Pemerintah (PSO dan Subsidi) sebagai berikut:

***36. OPERATING REVENUES** (Continued)*

***e. Rede Ships** (Continued)*

Rede Ships revenue is based on the Treaty Ports Water Transport Organization by Using State Owned Ship (Rede Ship) Fiscal Year 2019 Number 01/KTRKREDE/ VI/DITLALA-2019 and No. TH.06.12-03/SS/2019 dated June 12, 2019.

The value of the agreement for the operation of port water transportation services using State Owned Vessels (Rede Ship) in the fiscal year 2019 is Rp38.223.805.809 including 10% VAT. charged to the Budget Implementation Registration Number (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454 / 2019 December 5, 2018.

Based on the Minutes of the Calculation of Public Service Obligations in the Sea Transportation Sector for Economy Class Passengers / PSO at PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Fiscal Year 2020 by Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dated 11 May 2021 submission of claims for the implementation of public services for economy class passengers during In 2020, PT PELNI (Persero) should receive Rp. 2,193,106,619,656.34. So that the Company records the Government revenue (PSO and Subsidies) as follows:

	2020	**2019**	
Kapal Penumpang Kelas Ekonomi	Rp 2.193.106.619.656	Rp 2.130.280.875.028	*Economy Class Passenger Ships*
Subsidi - Kapal Perintis	Rp. 443.797.418.015	Rp 417.235.830.782	*Subsidies - Pioneer Ships*
Subsidi - Kapal Tol Laut	Rp 175.570.086.807	Rp 103.381.382.456	*Subsidies - Sea Toll Ship*
Subsidi - Kapal Ternak	Rp 10.369.467.146	Rp 8.900.912.880	*Subsidies - Cattle Ships*
Subsidi - Kapal Rede	Rp 38.279.365.302	Rp 17.964.685.194	*Subsidies - Rede Ships*
Jumlah	Rp 2.861.122.956.926	Rp 2.677.763.686.340	***Total***

37. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA

37. COST OF REVENUES

	2020	**2019**	
Perkapalan	1.332.862.134.300	1.554.616.021.453	*Shipping*
Pegawai	871.249.642.102	940.675.699.165	*Employee*
Pemeliharaan dan Perbaikan	477.506.156.905	698.318.083.334	*Maintenance and Repair*
Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 16,17,18,19)	378.429.345.777	375.945.384.892	*Depreciation and Amortization (Notes 16,17,18,19)*
Penumpang	286.163.932.747	388.547.391.888	*Passenger*
Pelayanan Kesehatan	-	396.069.813.800	*Health Services*
Asuransi	53.395.866.912	52.002.106.050	*Insurance*
Muatan Ternak	28.378.714.068	23.373.889.295	*Livestock Cargo*
Kendali Mutu Pelayanan	10.601.353.376	10.623.772.893	*Quality Service Control*
Perbengkelan	9.438.356.592	7.278.656.112	*Workshop*
Perhotelan	2.314.625.930	3.086.655.389	*Hospitality*
Sewa	1.623.792.975	1.199.375.820	*Rent*
Pajak dan Retribusi	40.538.469	86.407.703	*Taxes and Levies*
Beban Pokok Lainnya	295.492.354.357	324.794.099.282	*Other Cost of Revenues*
Jumlah	**3.747.496.814.510**	**4.776.617.357.076**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

38. BEBAN PEMASARAN DAN DISTRIBUSI / *38. MARKETTING AND DISTRIBUTION EXPENSES*

	2020	2019	
Penjualan	11.304.616.086	9.016.619.048	*Sales*
Kehumasan	7.024.702.963	9.123.832.091	*Public Relations*
Promosi dan Periklanan	2.389.317.715	7.922.339.033	*Promotion and Advertising*
Pemasaran Lainnya	2.341.855.602	2.126.431.607	*Others Marketing*
Jumlah	**23.060.492.366**	**28.189.221.779**	***Total***

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2020	2019	
Pegawai	232.450.038.909	362.517.590.931	*Employees*
Pemeliharaan dan Perbaikan	28.976.567.321	43.184.769.918	*Maintenance and Repair*
Imbalan Paska Kerja	27.047.134.678	8.477.664.219	*Post Employment Benefits*
Konsultan dan Audit	17.464.041.501	28.351.157.449	*Audit and Consultant*
Rumah Tangga	17.212.585.863	29.854.829.479	*Household*
Adminsitrasi Perkantoran	15.292.342.321	26.767.119.756	*Office Administration*
Penyusutan dan Amortisasi	14.525.407.262	12.105.979.868	*Amortization and Depreciation*
Pajak dan Restribusi	13.540.982.877	7.860.755.643	*Taxes and Levies*
Sewa	11.169.239.241	6.172.287.743	*Rent*
Asuransi	8.847.002.536	6.066.768.671	*Insurance*
Provisi Penurunan Nilai Piutang	5.699.835.222	2.623.348.775	*Provision of Impairment of Receivables*
PKBL	6.276.952.922	4.064.890.939	*PKBL*
Sumbangan	1.205.871.134	552.618.071	*Donations*
Perencanaan dan Pengembangan	1.105.310.556	1.669.247.976	*Development and Planning*
Olah Raga dan Kesenian	263.718.934	825.439.862	*Sport and Art*
Denda/Klaim	257.567.341	357.374.234	*Penalties / Claims*
Keamanan dan Keselamatan	149.725.436	9.922.428.716	*Security and Safety*
Lainnya	8.915.435.574	9.758.001.195	*Others*
Jumlah	**410.399.759.628**	**561.132.273.445**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

40. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA / *40. NON OPERATING INCOME (EXPENSES)*

	2020	2019	
a. Pendapatan Non Usaha:			***a. Non-Operating Revenues:***
Bunga	51.166.905.846	38.387.674.436	*Interest*
Laba Entitas Asosiasi	17.556.547.455		
Sewa	-	17.482.092.811	*Rent*
Klaim Asuransi	9.868.719.844	5.113.220.723	*Insurance Claim*
Jasa Administrasi	7.844.328.476	12.699.299.642	*Administration Services*
Keuntungan Selisih Kurs	4.488.133.727	1.833.471.607	*Foreign Exchange Gains*
Jasa Giro	4.454.356.402	4.802.893.708	*Current Account Service*
Denda	2.648.938.489	343.406.502	*Penalties*
Keuntungan Penjualan Aset	2.271.600.000	453.454.545	*Gains of Asset Sale*
Keuntungan Perubahan Nilai Wajar Aset Non Keuangan	1.923.600.000	55.446.445.689	*Gains of Changing Fair Value of Non-Financial Assets*
Pelunasan Piutang Dihapuskan	405.116.118	694.114.174	*Repayment of Accounts Receivable*
Lainnya	9.517.942.877	14.153.576.621	*Others*
Sub Jumlah	**112.146.189.234**	**151.409.650.458**	***Sub Total***
b. Beban Non-Usaha:			***b. Non-Operating Expenses:***
Kerugian Selisih Kurs	7.877.029.935	3.995.296.383	*Foreign Exchange Losses*
Administrasi Bank	1.282.281.972	2.497.713.371	*Bank Administration*
Beban Keuangan	157.632.813	3.123.186.162	*Financial Expenses*
Lainnya	8.425.252.281	27.480.059.996	*Others*
Sub Jumlah	**17.742.197.001**	**37.096.255.912**	***Sub Total***
Jumlah Pendapatan Non Usaha - Bersih	**94.403.987.233**	**114.313.394.546**	***Total Non Operating Income - Net***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
*As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

40. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA (Lanjutan)

Keuntungan perubahan nilai wajar aset non keuangan merupakan kenaikan perubahan nilai wajar properti investasi tanah dan gedung.

Pemulihan iuran program dana pensiun merupakan kelebihan iuran program manfaat pasti dana pensiun yang telah dibayarkan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya berdasarkan perhitungan aktuaria.

***40. NON OPERATING INCOME (EXPENSES)** (Continued)*

The gains of changing the fair value of non-financial assets is an increase in the fair value of investment property of land and buildings.

The recovery of pension fund program contributions is an excess of defined benefit program pension contributions that have been paid by the company when compared to the obligations that should be based on actuarial calculations.

41. INFORMASI SEGMEN USAHA / ***41. SEGMENT INFORMATION***

a. Penugasan dan Non Penugasan / *a. Assignment and Non Assignment*

	2020		2019		
	Penugasan	**Non Penugasan**	**Penugasan**	**Non Penugasan**	
Pendapatan Usaha	3.354.142.505.071	813.285.042.084	3.984.237.992.289	1.563.513.275.005	*Operating Revenues*
Reduksi Pendapatan Usaha	-	(801.889.070)	-	3.521.144.800	*Reduction in Operating Revenues*
Pendapatan Usaha Bersih	3.354.142.505.071	812.483.153.014	3.984.237.992.289	1.559.992.130.205	*Net Operating Revenue*
Beban Pokok Usaha	(2.731.842.347.900)	(1.015.654.466.610)	(3.299.684.221.330)	(1.476.933.135.746)	*Operating Expenses*
Laba Kotor	622.300.157.171	(203.171.313.596)	684.553.770.958	83.058.994.460	*Gross Profit*
Beban Pemasaran dan Distribusi	-	(23.060.492.366)	-	(28.189.221.779)	*Distribution and Marketing Expense*
Beban Umum dan Administrasi	(231.011.068.785)	(179.388.690.843)	(294.829.821.993)	(266.302.451.452)	*General and Administration Expense*
Laba (Rugi) Usaha	391.289.088.386	(405.620.496.805)	389.723.948.966	(211.432.678.772)	*Operating Profit or (Loss)*
Pendapatan (Beban) Non Usaha Lainnya, Bersih	-	94.403.987.233	-	114.313.394.546	*Non Operating Income(Expense) Net*
Laba Sebelum Pajak	391.289.088.386	(311.216.509.572)	389.723.948.966	(97.119.284.226)	*Profit Before Tax*
Beban Pajak	(26.712.102.519)	(22.393.814.958)	(59.372.904.295)	(52.476.770.060)	*Tax Expense*
Laba Tahun Berjalan	**364.576.985.867**	**(333.610.324.530)**	**330.351.044.671**	**(149.596.054.286)**	*Profit For The Current Year*

b. Menurut wilayah / *b. By region*

a. Pendapatan menurut wilayah / *a. Operating income by region*

	2020		2019		
	Rp	**%**	***Rp***	**%**	
Sumatera	44.335.653.080	1,06	124.063.653.989	2,24	*Sumatera*
Jawa	3.479.812.345.204	83,50	4.217.068.698.699	76,01	*Jawa*
Kalimantan	80.649.589.537	1,94	151.265.632.194	2,73	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	88.694.781.385	2,13	145.383.159.523	2,62	*Bali dan Nustra*
Sulawesi. Maluku dan Papua	473.935.177.949	11,37	909.970.122.889	16,40	*Sulawesi. Maluku and Papua*
Jumlah	**4.167.427.547.155**	**100,00**	**5.547.751.267.294**	**100,00**	***Total***

41. INFORMASI SEGMEN USAHA (Lanjutan) / ***41. SEGMENT INFORMATION*** *(Continued)*

b. Hasil usaha laba (rugi) kotor menurut wilayah / *b. Results of gross operations income (loss) by region*

	2020		2019		
	Rp	%	*Rp*	*%*	
Sumatera	10.887.216.281	2,60	63.862.078.150	8,23	*Sumatera*
Jawa	166.127.684.398	39,64	302.846.846.162	39,45	*Jawa*
Kalimantan	(18.075.518.333)	(4,31)	105.914.606.587	13,18	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	9.083.643.661	2,17	67.884.423.315	8,84	*Bali dan Nustra*
Sulawesi. Maluku dan Papua	251.105.817.568	59,91	227.104.811.204	29,60	*Sulawesi. Maluku and Papua*
Jumlah	**419.128.843.575**	**100,00**	**767.612.765.418**	**100,00**	***Total***

c. Aset menurut wilayah / *c. Assets by region*

	2020		2019		
	Rp	%	Rp	*%*	
Sumatera	159.821.351.955	2,20	168.507.141.100	2,39	*Sumatera*
Jawa	6.433.507.896.891	88,70	6.073.218.481.218	90,26	*Jawa*
Kalimantan	300.355.966.104	4,14	276.680.589.811	1,59	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	213.358.877.599	2,94	201.367.178.004	1,26	*Bali dan Nustra*
Sulawesi. Maluku dan Papua	145.995.176.360	2,01	341.508.919.672	4,50	*Sulawesi. Maluku and Papua*
Jumlah	**7.253.039.268.909**	**100,00**	**7.061.282.309.805**	**100,00**	***Total***

d. Aset Tetap menurut wilayah / *d. Fixed assets by region*

	2020		2019		
	Rp	%	Rp	*%*	
Sumatera	22.989.254.266	0,74	2 .096.680.046	0.06	*Sumatera*
Jawa	2.873.393.083.092	92,38	3.380.690.105.208	97.19	*Jawa*
Kalimantan	32.191.254.520	1,03	24.328.466.974	0.70	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	21.592.842.472	0,69	9 .942.282.025	0.29	*Bali dan Nustra*
Sulawesi. Maluku dan Papua	160.104.055.206	5,15	61.543.153.373	1.77	*Sulawesi. Maluku and Papua*
Jumlah	**3.110.270.489.556**	**100,00**	**3.478.600.687.626**	**100,00**	***Total***

e. Biaya penyusutan menurut wilayah / *e. Depreciation costs by region*

	2020		2019		
	Rp	%	*Rp*	*%*	
Sumatera	701.231.709	2,23	282.595.485	7,37	*Sumatera*
Jawa	371.557.698.759	76,07	376.964.607.519	98,26	*Jawa*
Kalimantan	1.607.034.280	2,72	682.786.366	0,18	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	907.485.332	2,61	492.738.929	0,13	*Bali dan Nustra*
Sulawesi. Maluku dan Papua	7.871.929.688	16,36	5 .235.795.560	1,36	*Sulawesi. Maluku and Papua*
Jumlah	**382.645.379.768**	**100,00**	**383.658.523.859**	**100,00**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

41. INFORMASI SEGMEN USAHA (Lanjutan)

f. Liabilitas menurut wilayah

***41. SEGMENT INFORMATION** (Continued)*

f. Liabilities by region

	2020		2019		
	Rp	**%**	***Rp***	***%***	
Sumatera	11.707.976.861	1,34	12.307.031.014	1,19	*Sumatera*
Jawa	799.123.134.549	91,60	959.278.131.758	92,67	*Jawa*
Kalimantan	4.909.784.864	0,56	11.773.682.068	1,14	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	4.327.284.101	0,50	9 .451.721.393	0,91	*Bali dan Nustra*
Sulawesi. Maluku dan Papua	52.376.027.676	6,00	42.398.226.499	4,10	*Sulawesi. Maluku and Papua*
Jumlah	**872.444.208.051**	**100,00**	**1.035.208.792.732**	**100,00**	***Total***

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

42. RELATED PARTY TRANSACTION

The nature of relationship and type of material transactions with parties who have a special relationship with the following details:

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ *Nature of relationship Related Parties*	Transaksi/*Transactions*
1	PT Bank Mandiri (Persero). Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / *Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia*	Setara Kas. Piutang / *Cash Equivalent. Receivable*
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / *Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia*	Setara Kas. Piutang / *Cash Equivalent. Receivable*
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / *Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia*	Setara Kas / *Cash equivalent*
4	Bank Indonesia	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / *Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
5	Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
6	PT Pelabuhan Indonesia I. II.III dan IV (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
7	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
8	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
9	PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
10	PT Pertamina (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan) ***42. RELATED PARTY TRANSACTION*** *(Continued)*

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ *Nature of relationship Related Parties*	Transaksi/*Transactions*
11	JKN-BPJS	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
12	PT Nindya Karya (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
13	PT Pupuk Kaltim (Pesero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
14	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
15	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
16	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
17	PT Jasa Raharja (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
18	PT Sucofindo (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
19	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
20	PT Garuda Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
21	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
22	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Personil Kunci / *Common Key Management*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
23	PT Sarana Gama Sejahtera	Personil Kunci / *Common Key Management*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*

Jumlah tansaksi dengan pihak-pihak berelasi tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

The amount of transactions with related parties in year 2020 and 2019 is as follows:

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Jenis Transaksi/*Transaction Type*	Jumlah (Rp)/ *Amount (Rp)*	
			2020	2019
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas/*Cash and CashEquivalents*	482.697.765.545	419.033.951.841
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ *Restricted Cash and Cash Equivalent*	161.782.098.540	166.328.152.858
		Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	-	537.522.344
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas/*Cash and Cash Equivalents*	723.357.906.842	528.480.985.253
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ *Restricted Cash and Cash Equivalent*	5.000.000.000	342.391.990

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan) ***42. RELATED PARTY TRANSACTION*** *(Continued)*

No	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Jenis Transaksi/*Transaction Type*	Jumlah (Rp)/ *Amount (Rp)*	
			2020	2019
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas/*Cash and Cash Equivalents*	771.501.162.268	672.545.084.473
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ *Restricted Cash and Cash Equivalent*	-	935.460.637
4.	Bank Indonesia	Piutang Usaha/ *Account Receivables*	457.965.632	276.284.091
5	Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	12.879.045.000	16.706.944.877
6	PT Pelabuhan Indonesia I. II.III dan IV (Persero)	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	392.703.237	617.811.014
		Utang Usaha/*Account Payable*	9.689.182.755	14.290.072.070
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ *Other Short Term Financial Liabilities*	21.350.740.522	11.067.634.613
7	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	37.524.996	436.028.750
8	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	860.817.498	860.817.498
9	PT Pos Indonesia (Persero)	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	267.985.756	338.164.144
10	PT Pertamina (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	-	2.540.175.000
11	JKN - BPJS	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	-	103.381.379.581
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ *Other Short Term Financial Liabilities*	-	864.961.560
12	PT Nindya Karya (Persero)	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	580.023.280	2.873.587.500
13	PT Pupuk Kaltim (Pesero)	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	-	939.985.408
14	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	-	813.735.563
		Utang Usaha/*Account Payable*		600.428.332
15	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	-	396.993.582
		Utang Usaha/*Account Payable*		554.182.650
16	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	1.900.330.297	2.876.903.152
17	PT Jasa Raharja (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	-	768.282.000
18	PT Sucofindo (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	2.039.790.500	734.700.000
19	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	1.021.742.672	688.362.100
20	PT Garuda Indonesia (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	-	640.287.800
21	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Utang Usaha/*Account Payable*	-	204.121.373
22	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	8.987.222.242	19.001.214.242
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ *Other Short Term Financial Liabilities*	-	780.096.161
23	PT Sarana Gama Sejahtera	Piutang Usaha/*Accounts Receivable*	-	609.461.953
		Utang Usaha/*Account Payable*	1.620.248.456	645.258.571

43. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN / *43. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*

Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan:

Here's an overview of the carrying value and the estimated fair value of financial instruments are stated in the statement of financial position:

	31 Desember/*December 31. 2020*		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	
Aset Keuangan:			***Financial Assets:***
Kas dan Setara Kas	2.284.861.630.577	2.284.861.630.577	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	281.167.247.454	281.167.247.454	*Account Receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	666.495.434.802	666.495.434.802	*Other Current Financial Assets*
Jumlah	**3.232.524.312.833**	**3.232.524.312.833**	***Total***
Liabilitas Keuangan:			***Financial Liability:***
Utang Usaha	97.619.849.232	97.619.849.232	*Account Payables*
Beban Akrual	373.233.573.563	373.233.573.563	*Accrued Expenses*
Bagian Lancar atas Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang.	9.599.072.667	9.599.072.667	*Current Portion for Long Term Financial Institution and Bank Loan*
Liabilitas Kontrak	59.089.365.707	59.089.365.707	*Contract Liability*
Liabiltias Keuangan Jangka Pendek Lainnya	79.811.730.195	79.811.730.195	*Other Short Term Financial Liabilities*
Utang Non Usaha Jangka Panjang	33.287.964.838	33.287.964.838	*Other Long Term Non Business Debt*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	3.537.422.000	3.537.422.000	*Long Term Financial Institution and Bank Loan*
Jumlah	**656.178.978.202**	**656.178.978.202**	***Total***

	31 Desember/*December 31. 2019*		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	
Aset Keuangan:			***Financial Assets:***
Kas dan Setara Kas	1.666.914.538.163	1.666.914.538.163	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	232.488.270.948	232.488.270.948	*Account Receivable*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	761.807.625.933	761.807.625.933	*Other Current Financial Assets*
Jumlah	**2.661.210.435.044**	**2.661.210.435.044**	***Total***
Liabilitas Keuangan:			***Financial Liability:***
Utang Usaha	190.082.677.190	190.082.677.190	*Account Payables*
Beban Akrual	275.769.924.191	275.769.924.191	*Accrued Expenses*
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	118.557.626.450	118.557.626.450	*Current Portion for Long Term Liabilities*
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan	67.997.523.551	67.997.523.551	*Prepaid Income/Deposits/ Deposit Guarantee*
Liabiltias Keuangan Jangka Pendek Lainnya	73.206.765.416	73.206.765.416	*Other Short Term Financial Liabilities*
Utang Non Usaha Jangka Panjang	25.054.588.234	25.054.588.234	*Other Long Term Non Business Debt*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	59.358.063.180	59.358.063.180	*Long Term Financial Institution and Bank Loan*
Jumlah	**810.027.168.212**	**810.027.168.212**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

44. RASIO PENGGUNAAN UTANG YANG TERKENA BUNGA / *44. INTEREST BEARING DEBT RATIO*

	31 Desember/ *December 31*, 2020	31 Desember/ *December 31*, 2019	Deviasi/ *Deviation* (%)	
Utang yang terkena Bunga	9.807.699.743	172.475.309.276.000	-94,31%	*Interest-Bearing Debt*
Rasio Penggunaan Utang yang Terkena Bunga				*Interest-Bearing Debt Ratio*
Utang terkena Bunga/ Ekuitas	**0,15%**	**2,86%**		***Interest-Bearing Debt/ Equity***

45. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA / *45. RIVIEW OF THE GOING CONCERN*

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum go-public oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows:

Rasio/ *Ratio*	**Rumus/ *Formula Altman Z-Score***
Likuiditas	$6{,}56 \times \frac{\text{Modal Kerja Bersih/ } Net\ Working\ Capital}{\text{Jumlah aset/}Total\ Assets}$
Profitabilitas	$3{,}26 \times \frac{\text{Akumulasi Saldo Laba/}Retained\ Earning}{\text{Jumlah aset/}Total\ Assets}$
Profitabilitas	$6{,}72 \times \frac{\text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak/}Earning\ Before\ Tax\ \&\ Interest}{\text{Jumlah aset/}Total\ Assets}$
Solvabilitas	$1{,}05 \times \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas/}Equity}{\text{Jumlah Kewajiban/}Total\ Liabilities}$

Untuk perusahaan non manufaktur, klasifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Jika hasilnya, Z < 1.1 mengindikasikan Perusahaan berpotensi besar pailit.
b. Jika hasilnya, 1,1 < Z < 2.60 mengindikasikan terdapat kondisi keuangan Perusahaan yang perlu perhatian khusus.
c. Jika hasilnya, Z > 2.60 mengindikasikan Perusahaan bagus dan aman dari kepailitan.

For non-manufacturing companies, the classification used is as follows:

a. If the result is, Z <1.1 indicates the Company has a great potential for bankruptcy.
b. If the result, 1.1 <Z <2.60 indicates that there is a financial condition of the Company that needs special attention.
c. If the result is, Z> 2.60 indicates that the Company is good and safe from bankruptcy.

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum go-public oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows:

Rasio/ *Ratio*	**Rumus/ *Formula Altman Z-Score***	**Jumlah/*Total***
Likuiditas	$6{,}56 \times \frac{3.129.808.704.537}{7.253.039.268.909}$	2.83
Profitabilitas	$3{,}26 \times \frac{(2.623.468.802.171)}{7.253.039.268.909}$	(1.18)
Profitabilitas	$6{,}72 \times \frac{(24.496.968.098)}{7.253.039.268.909}$	(0.02)
Solvabilitas	$1{,}05 \times \frac{6.380.595.060.858}{872.444.208.051}$	7.68
Jumlah/*Total*		**9.31**

45. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA

Berdasarkan hasil perhitungan Z-Score model pada periode berjalan diperoleh skor sebesar 9.31 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas aman dari kepailitan (Z >2.60) atau dapat diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan entitas anaknya secara konsolidasi sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya.

45. RIVIEW OF THE GOING CONCERN

Based on the results of the Z-Score model calculation in the current period, a score of 9.31 was obtained, indicating that it is very far above "safe from bankruptcy" limit or it can be interpreted that, in carrying out its activities, the company and its subsidiaries in a consolidated manner are very capable of maintaining business continuity.

46. PERKARA-PERKARA LITIGASI

a. Perkara Pidana terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Karim Bin Lambe.

PELNI melaporkan Sdr. Abdul Karim sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor : LPB/154/IV/2018/SPKT tanggal 17 April 2018 terhadap dugaan tindak Pidana Sdr. Abdul Karim atas penggunaan akte palsu sebagaimana dimaksud didalam Pasal 226 ayat (2) KUH Pidana dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dimana yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Kejaksaan berkas telah dinyatakan lengkap (P-21).

Status hukum: Menunggu pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Makasar atas hasil sidang yang telah dilaksanakan.

b. PT PELNI digugat atas Hubungan Industrial

Pegawai PKL sejak tanggal 16 Januari 2016 dengan jabatan sebaga Mualim I pada KM. Sabuk Nusantara 33 yang telah habis masa kontraknya dan mengajukan gugatan Hubungan Industrial (Sdr. Christian Mailoa).

Status hukum: Saudara Christian Mailoa telah melakukan pencabutan eksekusi tanggal 13 November 2020.

c. Adanya Pihak Lain yang memanfaatkan Aset atas kepemilikan PT PELNI.

Status Hukum: Dalam perkembangannya Kantor Pertanahan Kota Kendari menyampaikan Surat Nomor: 1266/Und-74.71.600.MP.002.01/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 Kepada PT. PELNI (Persero) Perihal Undangan Klarifikasi dan Pengukuran Ulang Bidang Tanah yang pada intinya terindikasi batas bidang tanah tidak sesuai dengan Gambar Situasi aset Tanah PT PELNI (Persero).

d. Laporan kepada Polres Tg. Perak Surabaya dari pihak keluarga ABK KM Awu yang meninggal dalam perjalanan dari Kumai menuju Surabaya atas dugaan Almarhum meninggal karena perbuatan manusia dan dilakukan oleh ABK lainnya.

Status Hukum: Perkara ini dihentikan oleh Polres Tg Perak Surabaya karena belum ditemukannya peristiwa tindak pidana.

e. Pengaduan kepada Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan LSM Makassar Peduli Aset Negara tanggal 6 Januari 2020 perihal tindak pidana yang diduga dilakukan oleh eks Direktur PT Rumah Sakit PELNI yang dianggap menimbukan kerugian negara

Status Hukum: Perkara ini dihentikan oleh Polda Sulawesi Selatan karena Pengadu tidak dapat menunjukkan bukti perihal dugaan tindak pidana yang diadukan.

46. LITIGATION CASE

a. Criminal Matters related to criminal acts by Sdr. Abdul Karim Bin Lambe.

Pelni reported Sdr. Abdul Karim as a police report letter number: LPB/154/IV/2018/SPKT on 17 April 2018 against alleged criminal offence. Abdul Karim for the use of false deeds referred to in article 226 paragraph (2) KUH Pidana dugaan criminal acts make a false letter and put false information into the authentic deed. where she has been designated as a suspect and the file is delegated to the high attorney of South Sulawesi. in prosecutors the file has been declared complete (P 21).

Legal status: Waiting for official notification from the Makassar District Court on the results of the trial that has been held.

b. PT PELNI lawsuit on Industrial Relations

Apprentice employee since 16 January 2016 with a position as Chief Executive Officer of KM. Belt Nusantara 33, whose contract has expired and filed a lawsuit on Industrial Relations (Mr. Christian Mailoa).

Legal status: Mr. Christian Mailoa has revoked the execution on November 13, 2020.

c. There are other parties who use assets on the ownership of PT PELNI.

Legal Status: During progress, the Kendari City Land Office submitted Letter Number: 1266 / Und-74.71.600.MP.002.01 / IX / 2020 dated 17 September 2020 to PT. PELNI (Persero) Regarding the Invitation for Clarification and Re-Measurement of Land Plots, which in essence indicates that the boundaries of land parcels are not in accordance with the Land asset Situation Picture of PT. PELNI (Persero).

d. The family of KM Awu crew who died on the way from Kumai to Surabaya reported to Regional Police station Tg. Perak Surabaya on the suspicion that the deceased died due to human actions and was carried out by other crew members.

Legal Status: This case was stopped by Regional Police of Tg Perak Surabaya because a criminal incident had not been found.

e. The Makassar NGO Cares for State Assets Reported to the South Sulawesi Regional Police on January 6, 2020 regarding criminal acts allegedly committed by the former Director of PT PELNI Hospital which were deemed to have caused state losses.

Legal Status: This case was terminated by the South Sulawesi Regional Police because the Complainant could not provide evidence of the alleged criminal act being complained of.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

46. PERKARA-PERKARA LITIGASI (Lanjutan)

f. Pegawai Kerja Laut PT,PELNI (Persero) atas nama Sulaiman. S pada saat perpanjangan PKL tahun 2019, PT PELNI (Persero) melakukan pemeriksaan ulang atas ijazah yang bersangkutan dengan menanyakan kepada Universitas Hasanuddin selaku Universitas yang menerbitkan Ijazah yang bersangkutan sebagaimana surat PT.PELNI (Persero) Nomor : 07.15/01/S-T/040/2019 tanggal 15 Juli 2019 Universitas Hasanuddin Fakultas Kedokteran telah merespon Surat PT PELNI (Persero) sebagaimana Surat Nomor : 1341/UN4.6.1/DI.00/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang pada intinya menyampaikan bahwa dr. Sulaiman, S.Ked Nomor Register 8904048, Nomor Ijazah 2457-039-04, tidak benar alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, karena yang bersangkutan menggunakan Nomor Register 8904048 a.n dr. Ratnah Hafid. S.Ked. dan Nomor Alumni 2457 a.n dr. Matius. M.G. S.Ked.

Status Hukum: Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.B/2020/PN.MKS yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan

g. Gugatan PT. PELNI (Persero) atas Wanprestasi yang dilakukan PT Bintang Citra International dalam Pengadaan *Dry Container* untuk kebutuhan Kapal PT. PELNI (Persero).

Status Hukum: Dalam perkembangannya, telah ditandatangani Surat Perdamaian (*van dading*) tanggal 03 Juni yang pada intinya PT. PT Bintang Citra International setuju atas opsi denda sebesar Rp 835.810.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

h. Dugaan Pemalsuan Dokumen Perusahaan dan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Sdr. Ekoyunitriato, pegawai yang telah memasuki usia pensiun sejak tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.23/03/SK/HKO.01/2016 namun terdapat surat atas nama ybs selaku *Enterprise Risk Management* pada Surat Nomor: 010/SMO/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Penunjukan Konsultan Asuransi.

Status Hukum: Perkara tersebut telah dilaporkan oleh PT. PELNI (Persero) sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/2561/IV/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ dan sedang dalam tahap pemeriksaan kepada terlapor.

i. Perbedaan isi muatan dengan dokumen SI, Manifest, dimana sudah ada Surat Permintaan Maaf dari Pemilik Muatan/Shipper, dan Muatan yang berbeda merupakan bukan barang yang dilarang untuk dimuat Tol Laut yang ditindaklanjuti oleh PT. PELNI (Persero) dengan melaporkan kepada Kementerian Perhubungan.

Status Hukim: Saat ini perkara sedang tahap pemeriksaan dari Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri.

j. PT.PELNI (Persero) melaporkan Sdr.Abdul Karim bin Lambe sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor : LPB/154/IV/2018/SPKT tanggal 17 April 2018 atas dugaan perbuatan tindak Pidana yang dilakukan Abdul Karim bin Lambe pada saat agenda pembuktian di persidangan Gugatan Perdata Nomor: 324/Pdt.G/2012/PN.Mks.

Status Hukum: Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: 362/PID/2020/PT.MKS menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1541/Pid.B/2019/PN.Mks, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar.

***46. LITIGATION CASE** (Continued)*

f. Marine Worker of PELNI (Persero), Sulaiman. S at the time of PKL extension in 2019, PT. PELNI (Persero) conducts a re-examination of the certificate by asking Hasanuddin University as the University that issued the certificate as PT.PELNI (Persero) letter Number: 07.15 / 01 / ST / 040/2019 dated July 15, 2019 Hasanuddin University Faculty of Medicine has responded PT.PELNI (Persero) letter as stated in Letter Number: 1341 / UN4.6.1 / DI.00 / 2019 dated July 16, 2019, which basically stated that dr. Sulaiman, S.Ked Register Number 8904048, Diploma Number 2457-039-04, not true alumni of the Hasanuddin University Faculty of Medicine, because he used the Register Number 8904048 a.n dr. Ratnah Hafid. S.Ked. and Alumni Number 2457 a.n dr. Matthew. M.G. S.Ked.

Legal Status: Decision of the Makassar District Court Number 635 / Pid.B / 2020 / PN.MKS which sentenced to imprisonment for 3 years 6 month.

g. PT. PELNI (Persero) for the Default conducted by PT Bintang Citra International in the procurement of dry containers for the needs of PT. PELNI (Persero).

Legal Status: On the progress, a Peace Letter (van dading) dated June 3, which in essence has been signed, PT. PT Bintang Citra International agreed to a fine of IDR835,810,000 (eight hundred thirty-five million eight hundred and ten thousand rupiah).

h. Alleged Falsification of Company Documents and Abuse of Authority committed by Mr. Ekoyunitriato, an employee who has entered retirement age since July 1, 2016 based on the Decree of the Board of Directors Number: 06.23 / 03 / SK / HKO.01 / 2016 but there is a letter in his name as Enterprise Risk Management in Letter Number: 010 / SMO / II / 2017 dated 17 February 2017 concerning the Appointment of an Insurance Consultant.

Legal Status: This case has been reported by PT. PELNI (Persero) as the Proof of Report Number: TBL / 2561 / IV / YAN.2.5 / 2020 / SPKT PMJ and is currently in the examination stage of the reported party.

i. The difference in the contents of the cargo with SI documents, Manifest, where there is already a Letter of Apology from the Shipper Owner, and different cargoes are not goods that are prohibited from being loaded by the Sea Toll which is followed up by PT. PELNI (Persero) by reporting to the Ministry of Transportation.

Legal Status: Currently the case is being investigated by the Directorate of Special Crimes, Bareskrim Polri.

j. PT.PELNI (Persero) reported Mr. Abdul Karim bin Lambe as the Police Report Letter Number: LPB / 154 / IV / 2018 / SPKT dated 17 April 2018 on suspicion of criminal acts committed by Abdul Karim bin Lambe during the evidentiary agenda at the trial. Civil Claim Number: 324 / Pdt.G / 2012 / PN.Mks.

Legal Status: Decision on Appeal at the High Court of South Sulawesi Number: 362 / PID / 2020 / PT.MKS strengthens the decision of the Makassar District Court Number: 1541 / Pid.B / 2019 / PN.Mks, strengthening the decision of the Makassar District Court.

46. PERKARA-PERKARA LITIGASI (Lanjutan)

k. PT. PELNI (Persero) menerima Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : B/450/VI/RES 1.24/2020/Ditreskrimum tanggal 3 Juni 2020 Perihal Bantuan Untuk Menghadirkan Saksi, dimana surat panggilan dimaksud pada intinya meminta Direktur SDM & Umum untuk menghadirkan Pegawai PT.PELNI (Persero) a.n Donni Rachmadi, Suwadi dan Ivan Eka Aditya di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel pada tanggal 10 Juni 2020 untuk diinterogasi dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan dan atau penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh dr Fathema Dian Rachmat.

Status Hukum: Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: 796 A2/VII/RES.1.24/2020 Ditreskrimum tanggal 14 Juli 2020 disampaikan bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara maka perkara dihentikan penyeleidikannya dan tidak dapat ditindaklanjuti ke proses penyidikan dengan pertimbangan pengadu tidak dapat menunjukkan bukti perihal dugaan tindak pidana yang diadukan, sehingga tidak cukup bukti perkara tersebut.

l. Dugaan kelalaian sehubungan dengan ABK KM.Sinabung yang meninggal diatas Kapal pada perjalanan dari Makassar ke Surabaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-B/242/VII/RES.1.24./2020/RESKRIM/POLRES PELABUHAN TG.PERAK, tanggal 22 Juli 2020 tentang Kejadian lain-lain/Orang Meninggal Dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar Pukul 21.20 WIB diatas KM. Sinabung berlayar dari Makassar menuju Surabaya.

Status Hukum: Perkara ini telah dihentikan sebagaimana Surat Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Nomor: B/2501/X/Res.1.24/2020/Satreskrim tanggal 31 Oktober 2020 tentang Informasi Perkembangan Perkara yang menyebutkan "Penyidik melaksanakan Gelar Perkara dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar terhadap perkara tersebut dihentikan Penyelidikannya karena belum ditemukan Peristiwa Pidana"

m. Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali II atas perkara No. 48/Srt.Pdt.PK/2019/PN. Jkt. Pst Jo No. 110/Pdt. Plw/2015/2015/PN. Jkt. Pst.

Upaya Hukum Perlawanan (Derden Verzet) terkait Aset milik PT PELNI (Persero) di Jl. Angkasa No 18 Kemayoran. dengan Luas obyek 3.658 m2. dimana hal ini karena Hasan Ismail yang mengaku sebagai ahli waris Geo Carol Lijnis Huffenreutur dulunya pemilik tanah seluas 36.370 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Pasar Baru tanggal 23 Maret 1964. mengajukan gugatan Perdata atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT.PELNI (Persero) atas penguasaan Tanah d Jl. Angkasa No 18. Kemayoran dengan objek Sertifikat HGB Nomor 1179/Gunung Sahari Selatan dengan luas tanah 3.658 m2 atas nama PT PELNI (Persero).

Status hukum: Dimenangkan oleh BUMN dan PT Pelni di tingkat peninjauan Kembali, namun pada 7 April 2021 yang bersangkutan (Hasan Ismail) mengajukan peninjauan Kembali (PK) (Kedua) terhadap putusan PK di tahun 2020.

***46. LITIGATION CASE** (Continued)*

k. PT. PELNI (Persero) received a Letter from the State Police of the Republic of Indonesia for South Sulawesi Region Number: B / 450 / VI / RES 1.24 / 2020 / Ditreskrimum dated 3 June 2020 Regarding Assistance to Presenting Witnesses, where the summons in essence asked the Director of Human Resources & General Affairs to present PT.PELNI (Persero) employees Donni Rachmadi, Suwadi and Ivan Eka Aditya at the South Sulawesi Regional Police General Criminal Investigation Directorate Office on June 10, 2020 to be interrogated and their statements heard as witnesses in a criminal case of fraud and / or embezzlement that is suspected of being committed. by dr Fathema Dian Rachmat.

Legal Status:On the progress, based on the Notification Letter on the Progress of Investigation Results Number: 796 A2 / VII / RES.1.24 / 2020 Ditreskrimum dated July 14, 2020 it is stated that after an investigation and a case title are carried out, the case is terminated and cannot be followed up on to the investigation process with consideration the complainant cannot show evidence regarding the alleged criminal act being complained of, so there is insufficient evidence of the case.

l. lleged negligence in connection with the crew members of Sinabung KM who died on board on the way from Makassar to Surabaya as Police Report Number: LP-B / 242 / VII / RES.1.24. / 2020 / RESKRIM / POLRES PELABUHAN TG PERAK, July 22, 2020 regarding Miscellaneous Incidents / Deaths that occurred on Tuesday, July 21, 2020 at around 21.20 WIB above KM. Sinabung sailed from Makassar to Surabaya.

Legal Status: This case has been terminated according to the Tanjung Perak Harbor Resort Police Letter Number: B / 2501 / X / Res.1.24 / 2020 / Satreskrim dated 31 October 2020 regarding Case Development Information which states "Investigators carry out a Case Title with conclusions and recommendation of title against the case is terminated. The investigation is due to the fact that no criminal incident has been found. "

m. Cons Memory review from the respondent reconsideration II of the case No. 48/Srt. Pdt. PK/2019/PN. Jkt. Pst Jo No. 110/PDT. PLW/2015/2015/PN.Jkt.Pst.

Resistance (Derden Verzet) related assets belonging to PT PELNI (Persero) at Jl. Angkasa No 18 Kemayoran. with an area of 3.658 m2. where this is because Hasan Ismail who claimed to be the heir of Geo Carol Lijnis Huffenreutur was formerly a landowner of 36.370 m2 based on certificate of Rights No. 116/New Market on March 23. 1964. filing a civil lawsuit against law against PT. PELNI (Persero) for the mastery of the land D Jl. Angkasa No 18. Kemayoran with the object of HGB Certificate No. 1179/Gunung Sahari Selatan with land area 3.658 m2 on behalf of PT PELNI (Persero).

Legal Status: Win by BUMN and PT Pelni at the level of Judicial Review, but on April 7, 2021 the person concerned (Hasan Ismail) submitted a Judicial Review (PK) (Second) of the PK decision in 2020.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
*As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

47. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. Pengembalian dana Subsidi (Subsidi Kapal Perintis) ke Kemenhub atas kegiatan tahun 2019

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nomor : UM.006/1/12/DA-2021 perihal Tindak Lanjut atas Temuan Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Perintis dan Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) Tahun Anggaran 2019 kepada PT PELNI (Persero).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 nomor: 90.c/HP/XIV/05/2020 tanggal 21 Mei 2020.

Sehubungan hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut meminta klarifikasi PT PELNI (Persero) terkait tindak lanjut pengembalian / setor pada kas negara atas temuan Rp 17.445.899.239, dengan rincian sebagai berikut :

a. Temuan atas pekerjaan penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara TA. 2019 sebesar Rp. 17.122.083.939
b. Temuan atas pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut TA. 2019 sebesar Rp 323.815.300

2. Pengembalian dana Subsidi (Subsidi Kapal Perintis) ke Kemenhub atas kegiatan tahun 2018

Berdasarkan Surat Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Nomor: PR/101/9/17/DA.-2020 perihal tindak lanjut hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektur Jendral Kementrian Perhubungan kepada PT Pelni (Persero).

Berdasarkan Surat Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor: KU.102//I/8/DJPL/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal pembuatan komitmen kapal perintis agar memerintahkan PT Pelni (Persero) menyetor kelebihan pembayaran.

Sehubungan hal tersebut diinstruksikan kepada Operator PT Pelni (Persero) untuk segera menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran kegiatan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kapal Milik Negara Triwulan IV TA 2018 senilai Rp42.745.259.943.- (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Berdasar hasil Tindak Lanjut perihal pengembalian kelebihan pembayaran kegiatan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kapal Milik Negara tersebut, Perseroan berencana untuk meminta verifikasi terhadap kekurangan pembayaran Pekerjaan Kewajiban Pelayanan Kewajiban Publik Angkutan Barang Kapal Perintis Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 sehingga hasil verifikasi tersebut dapat dikompensasikan sebagai pengurang atas kelebihan pembayaran tersebut.

47. SUBSEQUENT EVENTS

1. Refund of Pioneer Ship Subsidy to the Ministry of Transportation for 2019 activities

Based on the Letter of the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation number: UM.006 / 1/12 / DA-2021 regarding the Follow-up on Findings of Pioneer Transportation Activities and Sea Freight Transportation (Sea Toll) for Fiscal Year 2019 to PT PELNI (Persero).

Based on the Letter of the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation number: UM.006 / 1/12 / DA-2021 regarding the Follow-up on Findings of Pioneer Transportation Activities and Sea Freight Transportation (Sea Toll) for Fiscal Year 2019 to PT PELNI (Persero).

In this regard, the Directorate of Traffic and Sea Transportation requested clarification from PT PELNI (Persero) regarding follow-up actions to return / excess deposit to the state of treasury for the finding of Rp.17,445,899,239, with the following details:

a. Findings on the work of organizing Public Service Activities for State Owned Pioneer Ships TA. 2019 amounting to Rp. 17,122,083,939;
b. Findings on the work of Organizing Public Service Obligations for Goods Transportation in the Sea TA. 2019 amounting to Rp. 323,815,300

2. Refund of Pioneer Ship Subsidy to the Ministry of Transportation for 2018 activities

Based on the letter of Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation number: PR/101/9/17/DA.-2020 regarding the follow-up of Audit results with a specific purpose (ADTT) inspector General of the Ministry of Transportation to PT Pelni (Persero).

Based on letter of director General of Sea Transportation number: KU. 102//I/8/DJPL/2020 dated January 28, 2020 concerning the making of the pilot vessel commitment to order PT Pelni (Persero) to deposit excess payment.

In the event that it is instructed to the Operator of PT Pelni (Persero) to immediately deposit to the state treasury for the excess payment subsidy of the land transport pioneer of the state owned quarterly IV TA 2018 Worth Rp42,745,259,943.- (Forty Two Billion Seven Hundred Forty Five Million Two Hundred Fifty Nine Thousand Nine Hundred Forty Three Rupiah).

Based on the results of the follow-up on the return of overpayment of marine transport subsidy activities of the State. the company plans to request verification against the shortage of payment of employment obligations services Public liability transport goods Pioneer Quarter IV year budget 2018 so that the verification results can be compensated as a deduction for the excess payment.

47. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)

3. Perubahan Susunan Direksi PT PELNI (Persero)

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor : SK-12/MBU/01/2021 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Penagngkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat nama – nama dibawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia :
1. Sdr. Muhammad Tukul Harsono sebagai Direktur Armada
2. Sdr. Masrul Khalimi sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut

Mengangkat nama – nama dibawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia :
1. Sdr. Robert MP Sinaga sebagai Direktur Armada dan Teknik
2. Sdr. Yahya Kuncoro sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut

4. Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2019

Pada Tanggal 15 April 2021, Perseroan menerima Surat Keterangan Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan untuk masa Pajak 2019 dengan nomor: 00015/406/19/093/21 sebesar Rp6.706.778.317 di tahun 2021.

Pada Mei 2021, telah diterima pengembalian Pajak Lebih Bayar Badan tahun 2019 sebesar Rp4.860.844.581.

***47. SUBSEQUENT EVENTS** (Continued)*

3. Changing of PT PELNI 's Board of Directors member

Based on the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number: SK-12/MBU/ 01/2021 Regarding Dismissal, Change in Position Nomenclature, and Appointment of Members - Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Decided to honorably dismiss the following names as members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia:
1. Mr. Muhammad *Tukul Harsono as Fleet Director*
2. Mr. Masrul Khalimi as Director of the Sea Freight and Freight Transport Business

To appoint the following names as members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia:
*1. Mr.*Robert *MP Sinaga as Fleet and Engineering Director*

2. Mr. Yahya Kuncoro as Director of Sea Freight and Toll Transport Business

4. Result of Tax Return for the fiscal Year 2019

On April 15, 2021. the Company received on Overpayment Tax assessment letter on income Tax for the year 2019 tax period with number: 00015/406/19/093/21 amounting to Rp6,706,778,317 in 2021.

On May 2021, had been received Overpayment of Tax Return for the year fiscal tax 2019 amounting to Rp4,860,844,581.

48. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN 73

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrument keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" sejak 1 Januari 2020 mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Total dampak pada laba ditahan Perseroan pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

48. IMPACT OF ADOPTION SFAS 71 AND 73

SFAS 71 "Financial Instrument"

SFAS 71 substitute of SFAS 55. related to the recognition. classification and measurement of financial assets and financial liabilities. derecognition of financial instruments. impairment of financial assets and hedge accounting.

The adoption of SFAS 71 "Financial Instruments" since January 1, 2020 has resulted in changes in accounting policies and adjustments to amounts recognized in financial statements.

Total impact on the Company's retained earnings as of January 1, 2020 is as follows:

	Catatan	Jumlah
Peningkatan provisi piutang usaha / *Increase provision for trade receivables*	8	14.682.167.739
Peningkatan provisi aset keuangan lancar lainnya / *Increase provision for other current financial assets*	9	4.809.769.831
Peningkatan aset pajak tangguhan / *Increase of deferred tax assets*	11	(4.234.686.333)
Saldo awal laba ditahan - PSAK 71 / *Begining retained earning - SFAS 71*		**15.257.250.837**

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

48. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN 73 (Lanjutan)

PSAK 73 "Sewa"

Perseroan telah menerapkan PSAK 73 Sewa secara retrospektif sejak 1 Januari 2020, tetapi belum menyajikan kembali komparatif untuk periode pelaporan 2019, seperti yang diizinkan berdasarkan ketentuan transisi spesifik dalam standar. Oleh karena itu. reklasifikasi dan penyesuaian yang timbul dari aturan sewa guna usaha yang baru diakui dalam saldo awal neraca pada tanggal 1 Januari 2020.

Berdasarkan penerapan PSAK 73, Perseroan mengakui liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya telah diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip sewa PSAK 30. Liabilitas ini diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa. didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan lessee per 1 Januari 2019. Tingkat pinjaman inkremental rata-rata tertimbang penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 10%.

Aset hak guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa. disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa yang dibayar di muka atau yang masih harus dibayar terkait sewa tersebut yang diakui di neraca pada tanggal 31 Desember 2019.

***48. IMPACT OF ADOPTION SFAS 71 AND 73** (Continued)*

SFAS 73 "Lease"

The Company has implemented PSAK 73 Leases retrospectively since January 1, 2020. but has not yet restated the comparability for the 2019 reporting period, as permitted under the specific transitional provisions in the standard. Therefore. the reclassifications and adjustments arising from the new lease arrangements are recognized in the opening balance sheet on January 1, 2020.

Based on the application of PSAK 73. the Company recognizes lease liabilities in respect of leases which were previously classified as 'operating leases' under the lease principles of PSAK 30.This liability is measured at the present value of the remaining lease payments. discounted using the lessee's additional borrowing interest rate as of 1 January, 2019 The weighted average incremental loan rate of the tenants to the lease liabilities as of January 1, 2020 is 10%.

Usage rights assets are measured at the same amount as the lease liabilities. adjusted for the rental payments prepaid or accrued related to the lease that were recognized in the balance sheet as of December 31, 2019.

49. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

Perseroan telah mereklasifikasi akun yang tercatat dalam laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, terkait jumlah penyertaan modal pemerintah. (catatan 29).

49. RECLASIFICATION OF FINANCIAL STATEMENT

The Company has reclassified the accounts recorded in the Consolidated Statement of Changes in Equity, related to the amount of government capital participation. (note 29).

	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*			
	Penyajian terdahulu / *As previously presented*	Reklasifikasi / *Reclassification*	Setelah reklasifikasi / *As reclassified*	
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian				***Consolidated Statements of Change In Equity***
Modal di Tempatkan dan Disetor Penuh	7.065.092.000.000	564.808.000.000	7.629.900.000.000	*Share Capital*
Penyertaan Modal Pemerintah	564.951.174.642	(564.807.589.000)	143.585.642	*Government Capital*
Cadangan	892.643.529.797	(411.000)	892.643.118.797	*Appropriate Retained Earning*
Uang Muka	76.919.307.694	(21.445.890.690)	55.473.417.004	*Advance Payment*
Aset Tetap	473.970.807.272	21.445.890.690	495.416.697.962	*Fixed Assets*

	31 Desember 2018 / *December 31, 2018*			
	Penyajian terdahulu / *As previously presented*	Reklasifikasi / *Reclassification*	Setelah reklasifikasi / *As reclassified*	
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian				***Consolidated Statements of Change In Equity***
Modal di Tempatkan dan Disetor Penuh	7.065.092.000.000	564.808.000.000	7.629.900.000.000	*Share Capital*
Penyertaan Modal Pemerintah	564.951.174.642	(564.807.589.000)	143.585.642	*Government Capital*
Cadangan	689.012.343.749	(411.000)	689.011.932.749	*Appropriate Retained Earning*

50. KONDISI EKONOMI

Pada tahun 2019, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada pada kisaran 4.90% pada triwulan IV. Anggaran yang diusulkan mengasumsikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 berada pada 5.00%, yang berada di bawah 5.30% yang diasumsikan dalam APBN-P 2019. Perseroan masih optimis dibandingkan dengan prospek pemerintah terbaru tahun ini sebesar 5.00% prospek setahun penuh. PDB Indonesia yang sebenarnya berada di bawah perkiraan atau pertumbuhan PDB yang dianggarkan Pemerintah.

Di sisi lain, kebutuhan pangan dan transportasi dalam negeri masih sangat kuat. Kepercayaan pelanggan dari orang-orang melawan latar belakang kenaikan gaji setiap tahun.

Terakhir, harga barang menyebabkan penurunan subsidi BBM dari Pemerintah dan defisit transaksi berjalan akibat depresiasi Rupiah. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2020. Bank Indonesia memproyeksikan Produk Domestik Bruto di atas 5%.

Pada Oktober 2020, Presiden Joko Widodo mempresentasikan visinya tentang Indonesia pada 2045. Targetnya pada 2045 produk domestik bruto Indonesia sudah mencapai US $7 triliun. Indonesia akan menjadi salah satu dari lima besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati nol persen.

Omnibus Law

Omnibus law merupakan RUU komprehensif yang akan mengatur banyak ketentuan di berbagai sektor industri menjadi satu undang-undang. Ia berupaya memperkuat ekonomi dengan meningkatkan daya saing menciptakan lapangan kerja. dan mempermudah berbisnis di Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa untuk memenuhi visi tersebut harus mengatasi masalah overregulasi di Indonesia.

Omnibus law dirancang untuk membantu memenuhi tujuan ini. sebagian dengan menyederhanakan lingkungan peraturan negara yang kompleks terkadang berlebihan. Undang-undang tersebut akan meringankan pembatasan di 11 bidang penting, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan usaha, pajak perusahaan dan pembebasan tanah. Tak perlu dikatakan, langkah-langkah ini jika diterapkan akan membuat Indonesia menjadi tujuan yang jauh lebih menarik bagi bisnis dan investor asing.

Berikut adalah area yang terkena Omnibus Law antara lain:

1. Mempermudah perizinan usaha
2. Mengurangi pembatasan investasi asing
3. Meringankan hukum ketenagakerjaan
4. Memperlancar peraturan perpajakan perusahaan

Sampai dengan tanggal Laporan Keuangan diterbitkan, Perseroan masih dalam proses menilai dampak Omnibus Law tersebut dalam laporan keuangannya.

50. ECONOMIC CONDITION

In 2019. the Gross Domestic Product (GDP) of Indonesia is approximately at 4.90% in the 4th quarter. The proposed budget assumes the economic growth in 2019 will be at 5.00%. which is below the 5.30 % assumed in the revised budget for 2019. The Company are still optimistic compared to the latest government outlook for this year of 5.00% full- year prospect. The actual GDP of Indonesia is below with the estimated or budgeted GDP growth of the Government.

On the other hand, the domestic demand for food and transportation was still very strong. The customer confidence of the people againts the backdrop of rising wages each year.

Lastly the price of goods cause reduction as fuel subsidies of the Government and deficit of current account due to Indonesian Rupiah depreciation. This trend is expected to continue in year 2020.The Bank Indonesia projects the Gross Domestic Product above 5%.

Last October 2020. President JokoWidodo presented his vision of Indonesia in 2045. The goal is that by 2045. Indonesia's gross domestic product will have reached US$7 trillion. Indonesia will have become one of the top five world economies with a poverty rate nearing zero percent.

Omnibus Law

The omnibus law is a comprehensive bill that would regulate many provisions in various industry sectors into one law. It seeks to strengthen the economy by increasing competitiveness creating jobs and making it easier to do business in Indonesia.

The government realizes that to fulfil this vision. it must address the problem of over-regulation in Indonesia.

The omnibus law is designed to help meet these goals. in part by streamlining the country's complex. sometimes redundant regulatory environment. The law would ease restrictions in 11 critical areas, including labour law, capital investment, business licensing, corporate tax and land acquisition. Needless to say. these measures if adopted would make Indonesia a far more attractive destination for foreign businesses and investors.

The following are the areas affected by the Omnibus Law among others are:

1. *Simplifying business licensing*
2. *Easing foreign investment restrictions*
3. *Easing labour laws*
4. *Streamlining corporate tax regulations*

As of the date of the financial statements. the Company is still in the process of assessing the impact of the Omnibus Law in its financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language .

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

***PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
*As of December 31, 2020, and
for the Year Then Ended
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

50. KONDISI EKONOMI (Lanjutan)

COVID-19

Perlambatan ekonomi global dan dampak negatif di pasar keuangan utama yang disebabkan oleh penyebaran pandemi virus Covid-19, telah mengakibatkan dampak yang merugikan antara lain merugikan pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan, operasi bisnis, yang dapat berlanjut dan mengakibatkan keuangan dan operasi perusahaan yang tidak menguntungkan. Kemampuan Indonesia dalam meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian negara, sebagian besar bergantung pada efektifitas kebijakan dan tindakan respon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyebaran virus Covid-19, sebagaimana serta fiskal dan langkah-langkah lain yang sedang diambil oleh otoritas Pemerintah. Efektivitas kebijakan termasuk tindakan dan peristiwa berada di luar kendali Perusahaan.

Pandemi COVID-19 saat ini sangat berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis dan keuangan Perseroan. Beberapa kondisi yang mempengaruhi dampak signifikan tersebut diantaranya adanya pelarangan mudik Idul Fitri 1441H oleh pemerintah Republik Indonesia mulai tanggal 24 April sd 8 Juni 2020 untuk angkutan laut dan pembatasan akses masuk wilayah pada beberapa daerah di Indonesia dengan penutupan pelabuhan. Hal ini menyebabkan sebagian operasional kapal penumpang dan perintis harus terhenti sehingga perusahaan memutuskan untuk memportstay-kan 20 kapal penumpang dan 21 kapal perintis sepanjang bulan April sd Mei 2020. Keputusan perusahaan untuk melaksanakan *portstay* kapal penumpang dan perintis juga dilakukan dalam rangka efisiensi operasional kapal dan rasionalisasi anggaran perusahaan.

51. STANDAR DAN INTERPRETASI AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan yang baru dan penyempurnaan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("PSAK"), standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau berlaku pada laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021:

- Amandemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK No. 22 "Kombinasi Bisnis", dan
- PSAK No. 112 "Akuntansi Wakaf".

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen Grup masih mengevaluasi potensi dampak dari perbaikan standar akuntansi dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangannya konsolidasian.

52. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2021.

***50. ECONOMIC CONDITION** (Continued)*

COVID-19

The global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of Covid-19 virus, has resulted to adverse effects including adverse in economic growth, decline in capital market, increase in credit risks, depreciation of foreign exchange rates and disruption of business operation. which may continue and result on unfavourable financial and operation of the Company. The ability of Indonesia to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy, is largely dependent on the effectiveness of policies and actions responses issued by the Government of Republic of Indonesia on the eradicate the spread of the Covid-19 virus, as well as the fiscal and other measures that are being taken by the Government authorities. The effectiveness of the policy including actions and events are beyond the Company's control.

The current COVID-19 pandemic has had a significant impact on the Company's business and financial performance. Some of the conditions that affect this significant impact include the prohibition of travelling as long as Idul Fitri 1441H by the government of the Republic of Indonesia from 24 April to 8 June 2020 for sea transportation and restrictions on access to territory in several regions in Indonesia with the closure of ports. This caused some passenger and pioneer ship operations to stop, so the company decided to port 20 passenger ships and 21 pioneer ships from April to May 2020. The Company's decision to carry out portstay for passenger and pioneer ships was also made in the context of ship operational efficiency and rationalization. Company budget.

51. NEW ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATIONS

The Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants has issued new and improvement of the following the Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS"), the accounting standards will be effective or applicable on the Group's consolidated financial statement for the period beginning on or after January 1, 2021:

- *Amendment of SFAS No. 1 "Presentation of financial statements";*
- *Amendment of SFAS No. 22 "Business Combination"; and*
- *SFAS No. 112 "Accounting for Endowments".*

As at authorization date of this consolidated financial statements, the Group's management is still evaluating the potential impact on these improvement accounting standards and interpretations on its consolidated financial statements.

52. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements are the responsibility of management and have been approved by the Board of Directors for issue on the date May 19, 2021.

INFORMASI TAMBAHAN/
ADDITIONAL INFORMATION

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ONLY
As of December 31, 2020
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2020	2019*)	2018*)	
ASET				***ASSETS***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	2.174.388.978.134	1.492.485.214.756	1.304.740.249.968	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	263.357.161.280	130.270.254.987	103.093.493.758	*Accounts Receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	580.245.736.514	545.078.836.754	455.754.494.355	*Other Current Financial Assets*
Persediaan	418.170.581.638	413.941.490.597	445.738.060.116	*Inventories*
Pajak Dibayar Dimuka	14.505.713.230	16.106.430.254	18.332.904.321	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	15.281.708.159	33.548.618.547	40.333.669.836	*Advances Payment*
Biaya Dibayar Dimuka	27.940.124.707	23.015.575.030	18.298.101.829	*Prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar	**3.493.890.003.662**	**2.654.446.420.925**	**2.386.290.974.183**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non Current Assets***
Properti Investasi	122.382.750.000	108.366.500.000	108.366.500.000	*Invesment Properties*
Alat Produksi	2.747.319.661.056	3.004.629.880.354	3.048.365.774.736	*Production Equipment*
Aset Tetap	170.816.896.323	150.320.334.194	130.942.794.420	*Fixed Assets*
Aset Takberwujud	16.122.160.206	15.988.854.703	23.102.352.078	*Intangible Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya	355.456.174	193.327.297	305.678.011	*Other Non Current Assets*
Aset Pajak Tangguhan	47.574.712.881	23.333.909.458	39.087.707.791	*Deferred Tax Assets*
Aset Hak Guna	2.774.771.816	-	-	*Use Right of Assets*
Investasi Pada Entitas Asosiasi	159.910.656.913	-	-	*Investment in Assosiate*
Investasi Pada Entitas Anak	508.122.308.288	783.935.602.877	617.979.973.741	*Investment in Subsidiaries*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**3.775.379.373.657**	**4.086.768.408.883**	**3.968.150.780.777**	***Total Non Current Asset***
TOTAL ASET	**7.269.269.377.319**	**6.671.214.829.808**	**6.355.399.126.916**	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan Kembali (Catatan 6)

*(*As Restate (Notes 6)*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ONLY
As of December 31, 2020
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2020	2019*)	2018*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
Liabilitas Jangka Pendek				***Short Term Liabilities***
Utang Usaha	134.340.034.435	130.339.879.269	128.227.332.995	*Accounts Payable*
Beban Akrual	389.658.476.197	274.919.927.744	150.751.973.848	*Accrued Expenses*
Utang Pajak	18.221.063.631	29.200.890.315	37.028.567.097	*Tax Payables*
Liabilitas Hak Guna	3.203.538.633	-	-	*Lease Liabilities*
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	3.328.794.924	5.440.380.353	5.440.380.353	*Cureent Portion of Long term Liabilities*
Liabilitas Kontrak	51.671.631.302	47.904.973.242	36.480.255.801	*Contract Liabilities*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	78.392.770.626	45.725.486.798	40.208.335.115	*Other Short Term Financial Assets*
Sub Jumlah	**678.816.309.746**	**533.531.537.721**	**398.136.845.209**	***Sub Total***
Liabilitas Jangka Panjang				***Long Term Liabilities***
Utang Non Usaha Jangka Panjang	33.287.964.838	25.054.588.234	31.113.840.160	*Long Term Non Operating Payables*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	177.887.875.381	157.921.590.369	114.496.226.847	*Long Term Employee Benefits*
Sub Jumlah	**211.175.840.219**	**182.976.178.603**	**145.610.067.007**	*Sub Total*
Jumlah Liabilitas	**889.992.149.965**	**716.507.716.324**	**543.746.912.216**	***Total Liabilities***
Ekuitas				***Equity***
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal dasar 13.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 7.629.900 saham per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018	7.629.900.000.000	7.629.900.000.000	7.629.900.000.000	*Capital Stock - par value of Rp1.000.000 per share. Authorized - 13.000.000 share. Issued and fully paid – 7.629.900 share as of December 31, 2020, 2019 and 2018*
Penyertaan Modal Pemerintah	143.585.642	143.585.642	143.585.642	*Government Equity*
Cadangan	1.097.752.050.509	892.643.118.797	689.011.932.749	*Appropriate Retained Earnings*
Tambahan Modal Disetor	397.878.907.712	-	-	*Additional Paid-in Capital*
Saldo Rugi (Defisit)	(2.623.602.160.131)	(2.427.746.001.578)	(2.404.249.412.464)	*Retained Earnings (Defisits)*
Komponen Ekuitas Lainnya	(122.795.156.378)	(70.233.589.377)	(104.111.263.183)	*Other Component Equity*
Jumlah Ekuitas	**6.379.277.227.354**	**6.024.707.113.484**	**5.810.694.842.744**	***Total Equity***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**7.269.269.377.319**	**6.741.214.829.808**	**6.354.441.754.961**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ONLY
As of December 31, 2020
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
Pendapatan Usaha	3.657.748.300.900	4.427.157.445.337	*Operating Revenues*
Reduksi Pendapatan Usaha	(801.889.070)	(3.521.144.800)	*Reduction in Operating Revenues*
Pendapatan Usaha Bersih	**3.656.946.411.830**	**4.423.636.300.537**	***Net Operating Revenues***
Beban Pokok Usaha	3.398.183.596.992	3.958.678.341.919	*Operating Expenses*
Laba Kotor	**258.762.814.838**	**464.957.958.618**	***Gross Profit***
Beban Pemasaran dan Distribusi	20.483.606.127	36.050.172.823	*Distribution and Marketing Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	332.688.666.997	370.958.790.938	*General and Administrative Expenses*
Laba (Rugi) Usaha	**(84.409.458.286)**	**57.948.994.857**	***Operating Profit or (Loss)***
Pendapatan Non Usaha - Bersih	144.067.848.136	187.750.793.648	*Non Operating Income - Net*
Laba Sebelum Pajak	**59.658.389.850**	**245.699.788.505**	***Profit Before Tax***
Manfaat (Beban) Pajak	(28.921.046.612)	(65.565.191.571)	***Tax Benefits (Expense)***
Jumlah Beban Pajak	**(28.921.046.612)**	**(65.565.191.571**)	***Total Tax Expenses***
Laba Tahun Berjalan	**30.737.343.238**	**180.134.596.934**	***Profit for the Current Year***
Penghasilan Komprehensif Lain			***Other Comprehensive Income***
Pos-pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			*Items That Will Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss*
- Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Asosiasi dan Entitas Anak	(485.311.265)	442.956.052	*Actuaria Gain (Loss) Asociation and subsidiary Entity* -
- Perubahan Nilai Wajar Asosiasi	-	73.353.059.922	*Change in Fair Value Association* -
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			*Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss*
- Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	(27.284.588.598)	(39.918.342.168)	*Actuaria Gain (Loss)* -
- Perubahan Nilai Wajar	9.780.647.255	-	*Change in Fair Value* -
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**12.748.090.630**	**214.012.270.740**	***Total Comprehensive Income of The Current Year***
Laba Bersih Per Saham Dasar	**4.028,54**	**23.609,00**	***Basic Earnings Per Share***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - INDUK SAJA
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - INDUK SAJA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ONLY
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Additional Paid In Capital	Penyertaan Modal Pemerintah/ *Goverment Capital*	*Tambahan Modal disetor/ Additional Paid in Capital*	Cadangan/ *Appropriate Retained Earnings*	Saldo Rugi (Defisit)/ *Retained Earnings (Defisits)*	Komponen Ekuitas lainnya/ *Other Equity Components*	*Jumlah Ekuitas/ Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2018	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**-**	**689.011.932.749**	**(2.323.451.656.541)**	**(103.153.891.227)**	**5.892.449.970.623**	***Balance as of December 31, 2018***
Dampak Penyajian Kembali	-	-	-	-	(80.797.755.923)	(957.371.956)	(81.755.127.879)	*Restatement Adjustment*
Saldo per 1 Januari 2019	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**-**	**689.011.932.749**	**(2.404.249.412.464)**	**(104.111.263.183)**	**5.810.694.842.743**	***Balance as of January 1, 2019***
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	180.134.596.934	-	180.134.596.934	*Profit for the Current Year*
Cadangan/	-	-	-	203.631.186.048	(203.631.186.048)	-	-	*Reserve*
Kerugian Aktuaria	-	-	-	-	-	(39.918.342.168)	(39.918.342.168)	*Actuarial Losses*
Kerugian Aktuaria Asosiasi	-	-	-	-	-	442.956.052	442.956.052	*Actuarial Losses Association Entity*
Perubahan nilai wajar Property Investasi	-	-	-	-	-	73.353.059.922	73.353.059.922	*Change on Revaluation of Fixed Asset*
Saldo per 31 Desember 2019	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**-**	**892.643.118.797**	**(2.427.746.001.578)**	**(70.233.589.377)**	**6.024.707.113.484**	***Balance as of December 31, 2019***
Perubahan nilai wajar PSAK 71	-	-	-	-	(15.657.613.277)	-	(15.657.613.277)	*Effect PSAK 71*
Perubahan nilai wajar PSAK 71 Entitas Asosiasi	-	-	-	-	(5.826.956.802)	-	(5.826.956.802)	*Effect PSAK 71 Association Entity*
Saldo per 1 Januari 2020	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**-**	**892.643.118.797**	**(2.449.230.571.657)**	**(70.233.589.377)**	**6.003.222.543.405**	***Balance as of January 1. 2020***
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	30.737.343.238	-	20.592.656.474	*Profit for the Current Year*
Cadangan	-	-	-	205.108.931.712	(205.108.931.712)	-	-	*Reserve*
Kerugian Aktuaria	-	-	-	-	-	(27.284.588.598)	(27.284.588.598)	*Actuarial Losses*
Perubahan Nilai Wajar Property Investasi	-	-	-	-	-	9.780.647.255	9.780.647.255	*Change in Fair Value of Property Investment*
Bagian Rugi OCI Entitas Asosiasi	-	-	-	-	-	(485.311.265)	(485.311.265)	*Loss of OCI Asosiaston Investment*
Divestasi	-	-	408.189.595.647	-	-	(31.106.509.833)	377.083.085.814	*Divestment*
Dilusi	-	-	(10.310.687.935)	-	-	(3.465.804.560)	(13.776.492.495)	*Dilution*
Saldo per 31 Desember 2020	**7.629.900.000.000**	**143.585.642**	**397.878.907.712**	**1.097.752.050.509**	**(2.623.602.160.131)**	**(122.795.156.378)**	**6.379.277.227.354**	***Balance as ofDecember 31. 2020***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS - INDUK SAJA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENT OF CASH FLOWS - PARENT ONLY
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	822.132.780.831	1.439.090.978.761	*Receipt from Customer*
Penerimaan *Public Service Obligation* & Subsidi	2.794.142.980.505	2.677.763.686.340	*Receipt from Public Service Obligation & Subsidy*
Pembayaran Kepada Pemasok	(2.109.842.062.102)	(2.769.124.861.021)	*Payment to Suppliers*
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	142.546.460.602	121.809.542.985	*Receipt of Other Operating Activities*
Pembayaran Biaya Operasional	(217.077.030.785)	(256.788.550.493)	*Payment of Operating Expenses*
Pembayaran Biaya Overhead	(1.023.049.923.747)	(841.149.355.684)	*Payment of Overhead Expenses*
Pengeluaran dari Aktivitas Operasi Lainnya	(15.045.204.906)	(13.097.260.703)	*Payment of Other Operating Expenses*
Penerimaan Uang Jaminan dari Pelanggan	3.766.658.060	11.424.717.441	*Receipt of Cash Collateral from Customer*
Pembayaran Pajak	(58.372.771.147)	(57.025.642.568)	*Tax Payment*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**339.201.887.311**	**312.903.255.058**	***Net Cash Provided from Operating Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	52.211.441.828	39.313.292.965	*Interest Deposit and Demand Deposits Receipt*
Penerimaan Dividen	5.070.936.199	-	*Dividend Receipt*
Penambahan Investasi Entitas Asosiasi	(69.904.712.224)	(99.868.733.169)	*Addition of Investment Entity Associations*
Perolehan Pelepasan pengendalian Invetasi pada anak	503.800.000.000	-	*Proceeds from Divest Control in Subsidiary*
Perolehan Alat Produksi dan Aset Tetap	(142.465.163.934)	(276.984.673.576)	*Acquisition of Production Equipment and Fixed Assets*
Perolehan Aset Dalam Konstruksi	(5.433.043.999)	(33.396.506.611)	*Acquisition of Asset Under Construction*
Perolehan Aset Takberwujud	(3.487.067.415)	(294.052.170)	*Acquisition of Intangible Assets*
Pembelian Aset Lain-lain	(2.417.329.343)	-	*Purchase of Other Assets*
Kas Bersih (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	**337.375.061.112**	**(371.230.672.561)**	***Net Cash Provided (Used in) Investing Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-	***Cash Flows from Financing Activities***
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	-	-	***Net Cash from Financing Activities***
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**676.576.948.423**	**(58.327.417.503)**	***INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**1.659.589.578.151**	**1.717.916.995.654**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**2.336.166.526.574**	**1.659.589.578.151**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING***
Saldo akhir kas dan setara kas terdiri dari:			*Cash end balances and cash equivalents consist of:*
Kas dan setara kas	2.174.388.978.134	1.492.485.214.756	*Cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di akun aset keuangan lancar lainnya	161.777.548.440	167.104.363.395	*Restricted Cash and cash equivalents Presented in other current financial asset accounts*
Jumlah	**2.336.166.526.574**	**1.659.589.578.151**	***Total***

Laporan Tahunan
Annual Report
2020



PELAYARAN NASIONAL INDONESIA

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
Jl. Gajah Mada No. 14, Jakarta Pusat, 10130
Telp: (021) 6334342
Fax: (021) 63854130
infopelni162@pelni.co.id
www.pelni.co.id

Pelayaran Nasional Indonesia
@pelni162
Pelni 162
Pelni 162
Whatsapp : 0822 8888 9162
Call Center : 162 / 021 162